



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

RKPD



KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 130 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dihasilkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan pada Tahun 2022;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 18);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
46. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Perangkat...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
26. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
27. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi, penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kedudukan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daerah yang memuat uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian Kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. BAB VII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Juli 2022



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 4 Juli 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 130

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Aspek Geografi.....	II-1
2.1.1.2 Aspek Demografi.....	II-9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-13
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Indikator Impact/Makro)	II-13
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-24
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.....	II-32
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-34
2.1.3.1 Fokus Urusan Wajib.....	II-34
2.1.3.1.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	II-34
2.1.3.1.1.1 Urusan Pendidikan.....	II-34
2.1.3.1.1.2 Urusan Kesehatan.....	II-39
2.1.3.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-79
2.1.3.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-80
2.1.3.1.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-83

2.1.3.1.2	Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-86
2.1.3.1.2.1	Urusan Tenaga Kerja.....	II-86
2.1.3.1.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-88
2.1.3.1.2.3	Urusan Pangan.....	II-90
2.1.3.1.2.4	Urusan Pertanahan.....	II-91
2.1.3.1.2.5	Urusan Lingkungan Hidup.....	II-93
2.1.3.1.2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-95
2.1.3.1.2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-97
2.1.3.1.2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-99
2.1.3.1.2.9	Urusan Perhubungan.....	II-100
2.1.3.1.2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-102
2.1.3.1.2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.....	II-102
2.1.3.1.2.12	Urusan Penanaman Modal.....	II-103
2.1.3.1.2.13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	II-104
2.1.3.1.2.14	Urusan Statistik.....	II-105
2.1.3.1.2.15	Urusan Persandian.....	II-106
2.1.3.1.2.16	Urusan Kebudayaan.....	II-107
2.1.3.1.2.17	Urusan Perpustakaan.....	II-108
2.1.3.1.2.18	Urusan Kearsipan.....	II-110
2.1.3.2	Fokus Urusan Layanan Pilihan.....	II-110
2.1.3.2.1	Urusan Kelautan dan Perikanan ...	II-110
2.1.3.2.2	Urusan Pariwisata.....	II-111
2.1.3.2.3	Urusan Pertanian.....	II-113
2.1.3.2.4	Urusan Perdagangan.....	II-113
2.1.3.2.5	Urusan Perindustrian.....	II-115
2.1.3.2.6	Urusan Transmigrasi.....	II-115
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-112

2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-123
2.3.	Pemasalahan Pembangunan Daerah.....	II-149
2.3.1.	Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.....	II-149
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah.....	II-162
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....		III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1.	Kinerja Ekonomi Daerah.....	III-2
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-13
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-13
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-18
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-32
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....		IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-2
4.1.1.	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV-2
4.1.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	IV-5
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023.....	IV-7
4.1.4.	Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang dan Nasional Tahun 2023.....	IV-11
4.1.5.	Sinkronisasi dan Keterkaitan antara Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	IV-18
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-21
4.2.1	Tema Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023.....	IV-21
4.2.2	Prioritas dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.....	IV-21
4.2.3	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023....	IV-23

4.2.4	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	IV-29
4.3	Keselaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.....	IV-34
4.4	Program Unggulan.....	IV-47
4.5	Inovasi.....	IV-51
4.6	Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD.....	IV-73
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	V-1
5.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	V-4
5.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	V-13
5.4	Sinkronisasi Cross Cutting Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Sub Kegiatan yang Membidik Indikator Makro Kabupaten Sumedang.....	V-26
5.5	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	V-31
5.6	Sinkronisasi Cross Cutting Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Sub Kegiatan yang Membidik Indikator Makro Kabupaten Sumedang.....	V-45
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD.....	I-2
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-9
Gambar 1.3	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan Perencanaan A-Spasial.....	I-10
Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Sumedang.....	II-1
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang..	II-4
Gambar 2.3	Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang.....	II-6
Gambar 2.4	Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang.....	II-9
Gambar 2.5	Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2021.....	II-11
Gambar 2.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	II-12
Gambar 2.7	Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2021 (trilyun rupiah).....	II-13
Gambar 2.8	Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Tahun 2021.....	II-14
Gambar 2.9	PDRB Berdasarkan Komponen Pengeluaran Tahun 2010 – 2021 (persen).....	II-15
Gambar 2.10	Perbandingan LPE Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang.....	II-16
Gambar 2.11	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2021 (persen).....	II-17
Gambar 2.12	Perbandingan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun 2011 - 2021 (juta rupiah).....	II-18
Gambar 2.13	Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (rupiah).....	II-19
Gambar 2.14	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2021	II-19
Gambar 2.15	Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang dan Daerah Perbatasan Tahun 2018-2020.....	II-20
Gambar 2.16	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020.....	II-21
Gambar 2.17	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.....	II-21
Gambar 2.18	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020.....	II-22
Gambar 2.19	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten /Kota di Jawa Barat Tahun 2020.....	II-22
Gambar 2.20	IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020.....	II-25

Gambar 2.21	Perbandingan Capaian IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang Tahun 2010-2020.....	II-25
Gambar 2.22	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.....	II-26
Gambar 2.23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020.....	II-27
Gambar 2.24	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%).....	II-30
Gambar 2.25	Angka Kelulusan SD dan SMP serta Angka melanjutkan dari SD ke SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%).....	II-32
Gambar 2.26	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)..	II-40
Gambar 2.27	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020.....	II-41
Gambar 2.28	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i> di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%).....	II-42
Gambar 2.29	Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%)..	II-42
Gambar 2.30	Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%).....	II-45
Gambar 2.31	Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 -2020.....	II-45
Gambar 2.32	Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020.....	II-47
Gambar 2.33	Sebaran Kasus TB BTA Positif di Kabupaten Sumedang Tahun 2020.....	II-49
Gambar 2.34	Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020.....	II-51
Gambar 2.35	Tren Cakupan Kunjungan Neonatus di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%).....	II-52
Gambar 2.36	Cakupan Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020.....	II-53
Gambar 2.37	Perkembangan Balita Bawah Garis Merah (BGM) di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)	II-54
Gambar 2.38	Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-55
Gambar 2.39	Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Pakuwon Tahun 2015-2020.....	II-56
Gambar 2.40	Data Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga Tahun 2015-2019.....	II-56
Gambar 2.41	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-62
Gambar 2.42	Persentase Rumah Tangga ber-Sanitasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-62
Gambar 2.43	Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-64
Gambar 2.44	Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sumedang.....	II-65
Gambar 2.45	Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Sumedang.....	II-65

Gambar 2.46	Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-75
Gambar 2.47	Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)......	II-78
Gambar 2.48	Rasio Bayi Ber-Akte Kelahiran di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)......	II-78
Gambar 2.49	Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)......	II-79
Gambar 2.50	Realisasi dan Target Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-97
Gambar 2.51	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-112
Gambar 2.52	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih.....	II-113
Gambar 2.53	Dokumentasi Prestasi Inovasi Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi.....	II-176
Gambar 2.54	Dokumentasi Inovasi Strategi Komplementer 7 (Tujuh) Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19.....	II-178
Gambar 2.55	Dokumentasi Inovasi Pengembangan Sistem Informasi Izin Cetak mandiri (SI ICE MANDIRI) V.1.1.....	II-179
Gambar 2.56	Dokumentasi Inovasi aplikasi e-office.....	II-181
Gambar 2.57	Dokumentasi Inovasi SAKIP Desa.....	II-183
Gambar 2.58	Kebijakan Penanganan Covid-19.....	II-182
Gambar 2.59	Potensi Mudik Penduduk Sumedang dari Zona Merah Covid-19.....	II-186
Gambar 2.60	Kebiasaan Baru yang Dilakukan Masyarakat Sumedang setelah Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru.....	II-187
Gambar 2.61	Omzet Bulanan Usaha Mikro (omzet tahunan maksimum 300 juta rupiah) (n:76).....	II-187
Gambar 2.62	Omzet Bulanan Usaha Kecil (omzet tahunan Rp300 juta - Rp2,5 milyar) (n:8).....	II-188
Gambar 2.63	Peta Analisis Kerentanan UMK per Kecamatan di Kabupaten Sumedang.....	II-189
Gambar 2.64	Pergerakan Pengguna Facebook (vs baseline Februari 2020) dan Jumlah Kasus Terkonfirmasi Covid-19.....	II-189
Gambar 2.65	Hasil Pengujian Pengaruh Mobilitas terhadap Jumlah Kasus Terkonfirmasi.....	II-190
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%).....	III-2
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (%).....	III-3
Gambar 3.3	Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2021...	III-4
Gambar 3.4	Tingkat Kemiskinan & Perubahannya 2020 ke 2021 (%)......	III-5

Gambar 3.5	Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.....	III-5
Gambar 3.6	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa).....	III-6
Gambar 3.7	Jumlah & Persentase Penduduk Miskin.....	III-7
Gambar 3.8	Gini Ratio dan Perubahannya dari 2020 ke 2021.	III-7
Gambar 3.9	Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Sumedang...	III-8
Gambar 3.10	Proporsi Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Sumedang.....	III-8
Gambar 3.11	Gini Ratio Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat.....	III-9
Gambar 3.12	TPT dan Perubahannya dari 2020 ke 2021.....	III-14
Gambar 3.13	TPT Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Jawa Barat.....	III-11
Gambar 3.14	UMK Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2021.....	III-12
Gambar 3.15	IPM dan Perubahannya dari 2020 ke 2021.....	III-12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang.....	II-2
Tabel 2.2	Klasifikasi Curah Hujan di Kabupaten Sumedang.....	II-5
Tabel 2.3	Suhu Udara Kabupaten Sumedang	II-5
Tabel 2.4	Kawasan Rawan Bencana.....	II-8
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020.....	II-10
Tabel 2.6	Komponen Penyusun IPM di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020.....	II-23
Tabel 2.7	APK, APM, dan Persentase Guru Berprestasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%).....	II-27
Tabel 2.8	Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-28
Tabel 2.9	Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – Tahun 2020 (%).....	II-29
Tabel 2.10	Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%).....	II-31
Tabel 2.11	Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)	II-31
Tabel 2.12	Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumedang Tahun Ajaran 2019-2020.....	II-32
Tabel 2.13	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%).....	II-33
Tabel 2.14	Persentase Bangunan Sekolah Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%).....	II-34
Tabel 2.15	Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020.....	II-34
Tabel 2.16	Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-35
Tabel 2.17	Rasio Pelayanan Puskesmas per Kecamatan Di Kabupaten Sumedang Tahun 2019.....	II-36
Tabel 2.18	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-37
Tabel 2.19	Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-39
Tabel 2.20	Kasus DBD di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (orang).....	II-43
Tabel 2.21	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%).....	II-43
Tabel 2.22	Jumlah Puskesmas dan Pustu per Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2019.....	II-46
Tabel 2.23	Kasus Penyakit Malaria di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-48
Tabel 2.24	Kasus Filariasis di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-49

Tabel 2.25	Jumlah Kasus HIV, AIDS dan Kematian di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (orang).....	II-50
Tabel 2.26	Indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020....	II-58
Tabel 2.27	Indikator Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-59
Tabel 2.28	Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-60
Tabel 2.29	Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Luas Wilayah Kota (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-61
Tabel 2.30	Indikator Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-63
Tabel 2.31	Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-67
Tabel 2.32	Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-68
Tabel 2.33	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-69
Tabel 2.34	Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020.....	II-71
Tabel 2.35	Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-73
Tabel 2.36	Jumlah dan Kapasitas Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbulan Sampah, dan Volume Sampah yang terangkut di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-76
Tabel 2.37	Indikator Pengawasan AMDAL dan atau UKL/UPL dan Penegakan Hukum Lingkungan.....	II-76
Tabel 2.38	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 Penduduk di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%).....	II-79
Tabel 2.39	Database Kependudukan dan KTP Nasional Berbasis NIK di Kabupaten Sumedang Tahun 2015- 2019.....	II-80
Tabel 2.40	Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-80
Tabel 2.41	Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sumedang Tahun 2020	II-82
Tabel 2.42	Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%).....	II-84
Tabel 2.43	Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023.....	II-85
Tabel 2.44	Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-87
Tabel 2.45	Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-87
Tabel 2.46	Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020.....	II-88
Tabel 2.47	Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-89
Tabel 2.48	Indikator Kinerja Urusan Persandian di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-90

Tabel 2.49	Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-91
Tabel 2.50	Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2019.	II-92
Tabel 2.51	Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015-2020.....	II-93
Tabel 2.52	Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2019.....	II-94
Tabel 2.53	Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023.....	II-96
Tabel 2.54	Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023.....	II-98
Tabel 2.55	Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Sumedang (%).....	II-99
Tabel 2.56	Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-101
Tabel 2.57	Indikator Kinerja Urusan Perencanaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-102
Tabel 2.58	Indikator Kinerja Urusan Perencanaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%).....	II-103
Tabel 2.59	Indikator Kinerja Urusan Keuangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-104
Tabel 2.60	Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2020.....	II-105
Tabel 2.61	Indikator Kinerja Fungsi Pengawasan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020.....	II-106
Tabel 2.62	Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-107
Tabel 2.63	Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023.....	II-108
Tabel 2.64	Indikator Fungsi Sekretariat Daerah di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-110
Tabel 2.65	Indikator Kinerja Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-111
Tabel 2.66	Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-114
Tabel 2.67	Rasio Ketergantungan Tahun 2015-2020.....	II-115
Tabel 2.68	Rasio Pencari Kerja Lulusan S-1/S-2/S-3 di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%).....	II-116
Tabel 2.69	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Tahun 2020.....	II-117
Tabel 2.70	Jumlah PNS yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan.....	II-118
Tabel 2.71	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II-118
Tabel 2.72	Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pendidikan Tahun 2021.....	II-119
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Kesehatan Tahun 2021.....	II-121

Tabel 2.74	Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021.....	II-122
Tabel 2.75	Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.....	II-124
Tabel 2.76	Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.....	II-125
Tabel 2.77	Capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021.....	II-126
Tabel 2.78	Capaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021.....	II-127
Tabel 2.79	Capaian indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 201.....	II-128
Tabel 2.80	Capaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.....	II-129
Tabel 2.81	Capaian indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021.....	II-130
Tabel 2.82	Capaian indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021.....	II-131
Tabel 2.83	Capaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021.....	II-132
Tabel 2.84	Capaian indikator kinerja utama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021.....	II-133
Tabel 2.85	Capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021.....	II-134
Tabel 2.86	Capaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan 2021	II-135
Tabel 2.87	capaian indikator kinerja utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2021.....	II-136
Tabel 2.88	Capaian indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Tahun 2021.....	II-137
Tabel 2.89	Capaian indikator kinerja utama Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021.....	II-138
Tabel 2.90	Capaian indikator kinerja utama Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021.....	II-138
Tabel 2.91	Capaian indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Tahun 2021.....	II-139
Tabel 2.92	Capaian indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021.....	II-140
Tabel 2.93	Capaian indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021.....	II-141
Tabel 2.94	Capaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021.....	II-142
Tabel 2.95	Capaian indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2021.....	II-143
Tabel 2.96	Capaian indikator kinerja utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021.....	II-144
Tabel 2.97	Capaian indikator kinerja utama Inspektorat Tahun 2021..	II-145
Tabel 2.98	Capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Tahun 2021.....	II-146
Tabel 2.99	Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Tahun 2021.....	II-147

Tabel 2.100	Capaian indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021.....	II-148
Tabel 2.101	Hasil Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Capaian Tahun 2022.....	II-149
Tabel 2.102	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang.....	II-166
Tabel 2.103	Capaian Indikator SPM Tahun 2020 Berdasarkan Hasil Penilaian Kemendagri Tahun 2021.....	II-168
Tabel 2.104	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2020 Berdasarkan Indikator SDG's.....	II-170
Tabel 2.105	Barang Habis Pakai dan Aset Tetap Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 (unit).....	II-185
Tabel 3.1	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023.....	III-2
Tabel 3.2	IPM Kab/Kota di Jawa Barat dan Pertumbuhannya di Tahun 2021.....	III-13
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024.....	III-15
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024.....	III-31
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024.....	III-35
Tabel 4.1	Keselarasan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah dan 7 Agenda Nasional pada RPJMN 2020-2024	IV-11
Tabel 4.2	Keselarasan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah dan 7 Tujuan dan Sasaran pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023.....	IV-18
Tabel 4.3	Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023	IV-26
Tabel 4.4	Hubungan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023	IV-30
Tabel 4.5	Kedudukan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	IV-35
Tabel 4.6	Penjabaran Program Unggulan Sumedang Agamis kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	IV-47
Tabel 4.7	Penjabaran Program Unggulan Rumah Besar Fakir Miskin dan Pelayanan Kesehatan kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan.....	IV-49
Tabel 4.8	Penjabaran Program Unggulan Sumedang Buludru kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan.....	IV-51
Tabel 4.9	Penjabaran Program Unggulan Pelayanan Dasar kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan.....	IV-54
Tabel 4.10	Penjabaran Program Unggulan Infrastruktur kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan.....	IV-57
Tabel 4.11	Penjabaran Program Unggulan Pengembangan Pariwisata kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan.....	IV-58
Tabel 4.12	Penjabaran Program Unggulan Pengembangan Agribisnis kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan.....	IV-61
Tabel 4.13	Penjabaran Program Unggulan Profesionalisme ASN kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan.....	IV-66

Tabel 4.14	Penjabaran Program Unggulan Membangun Sumedang Preneurship kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan.....	IV-68
Tabel 5.1	Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Sumedang terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023....	V-2
Tabel 5.2	Dukungan Program pembangunan Kabupaten Sumedang terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	V-4
Tabel 5.3	Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023.....	V-14
Tabel 5.4	Keselarasn Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Sub Kegiatan yang Mendukung Indikator Makro Kab. Sumedang.....	V-26
Tabel 5.5	Pendanaan Program Pembangunan Daerah yang bisa didanai dari Corporate Social Responsibility (CSR).....	V-49
Tabel 6.1	Indikator Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2023.....	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama kabupaten Sumedang Tahun 2023.....	VI-2
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak /Impact Kabupaten Sumedang Tahun 2023.....	VI-3
Tabel 6.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome kabupaten Sumedang Tahun 2023.....	VI-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

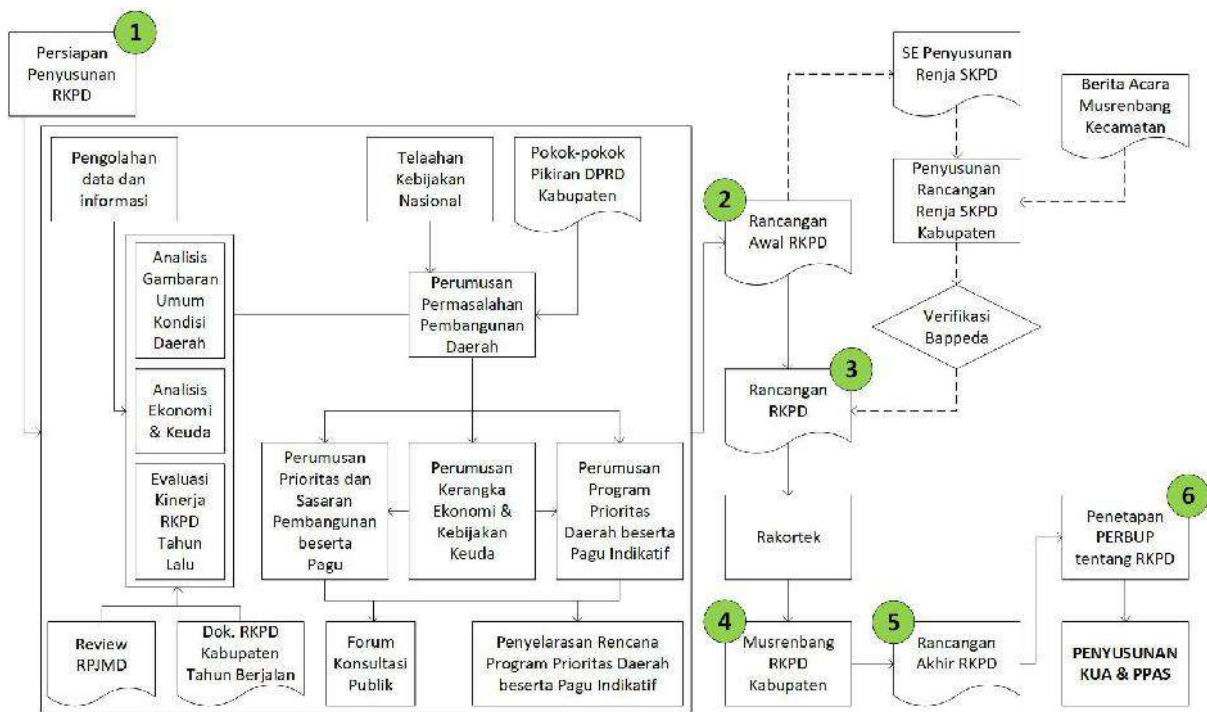
Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip – prinsip meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing – masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Tata cara penyusunan RKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD



Berdasarkan proses-nya, penyusunan RKPD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yaitu meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas. Sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa seluruh kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menggunakan sistem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, kemudian pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD. Selanjutnya pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RKPD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh lapisan masyarakat, mengarah pada percepatan pembangunan, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan

menuangkan program dan kegiatan pada tahun berkenaan yang merupakan terjemahan dari visi misi kepala daerah dan melibatkan DPRD dalam pembahasan penyusunan RKPD.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, disertai dengan semangat nilai filosofis Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) yaitu “Insun Medal Insun Madangan”, serta nilai manajerial SPBS “Rayawan Jati Sunda”, diharapkan dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan pembangunan, yang pada akhirnya diharapkan dapat bermuara pada terciptanya kondisi masyarakat Sumedang yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam tahap proses penyusunan RKPD Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sumedang masih dihadapkan dengan penanganan Vidus COVID-19 yang masih tinggi penyebarannya dan munculnya virus varian baru di beberapa negara termasuk Indonesia walaupun masih belum tinggi penyebarannya tapi tetap harus diantisipasi penyebarannya. Penyebaran Virus COVID-19 Tahun 2023 diharapkan dapat terkendali seiring dengan optimalisasi vaksinasi sampai dengan tahap 3 terhadap seluruh masyarakat sudah terealisasi. Dengan adanya optimalnya vaksinasi merupakan harapan yang sangat besar dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar terutama sektor penyelenggaraan Pendidikan yang diharapkan Pertemuan Tatap Muka (PTM) dapat terlaksana secara optimal.

Penentuan prioritas pada Tahun 2023 menitik beratkan kepada sektor-sektor yang memiliki korelasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran dan mengurangi ketimpangan wilayah. Maka Prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2023 terdapat perubahan yaitu 1) Optimalisasi Pelayanan Dasar, 2) Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi, 3) Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh, 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi.

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 merupakan tahun kelima dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini sangat strategis dalam menentukan arah dan kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun anggaran 2023 serta APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
34. Peraturan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah* Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
41. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
52. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. Dokumen RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimana dalam penyusunannya simultan dengan penyusunan RKPD. Lebih lanjut dalam hubungannya dengan RKP, dokumen RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

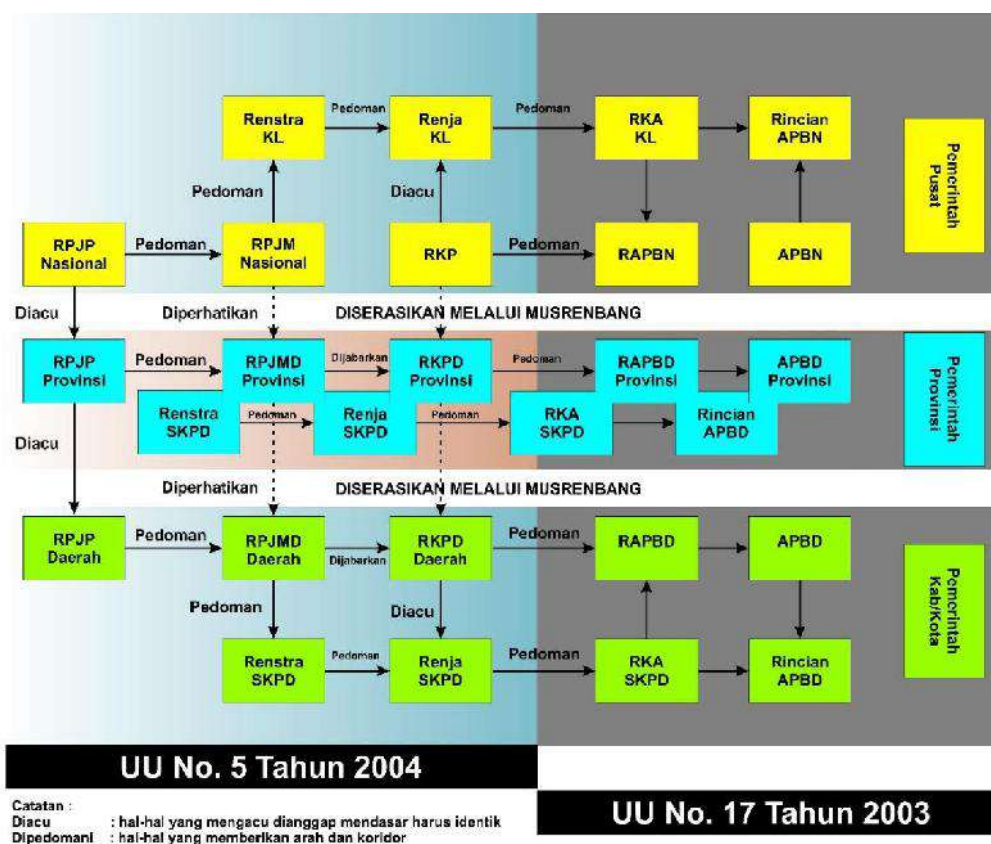
Dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yaitu RKP Tahun 2023 yang berisi input rencana seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian. Lebih lanjut dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka

menengah sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 menjadi pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Kemudian dokumen RKPD juga menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023, dengan demikian dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 merupakan dokumen satu – satunya yang dijadikan pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

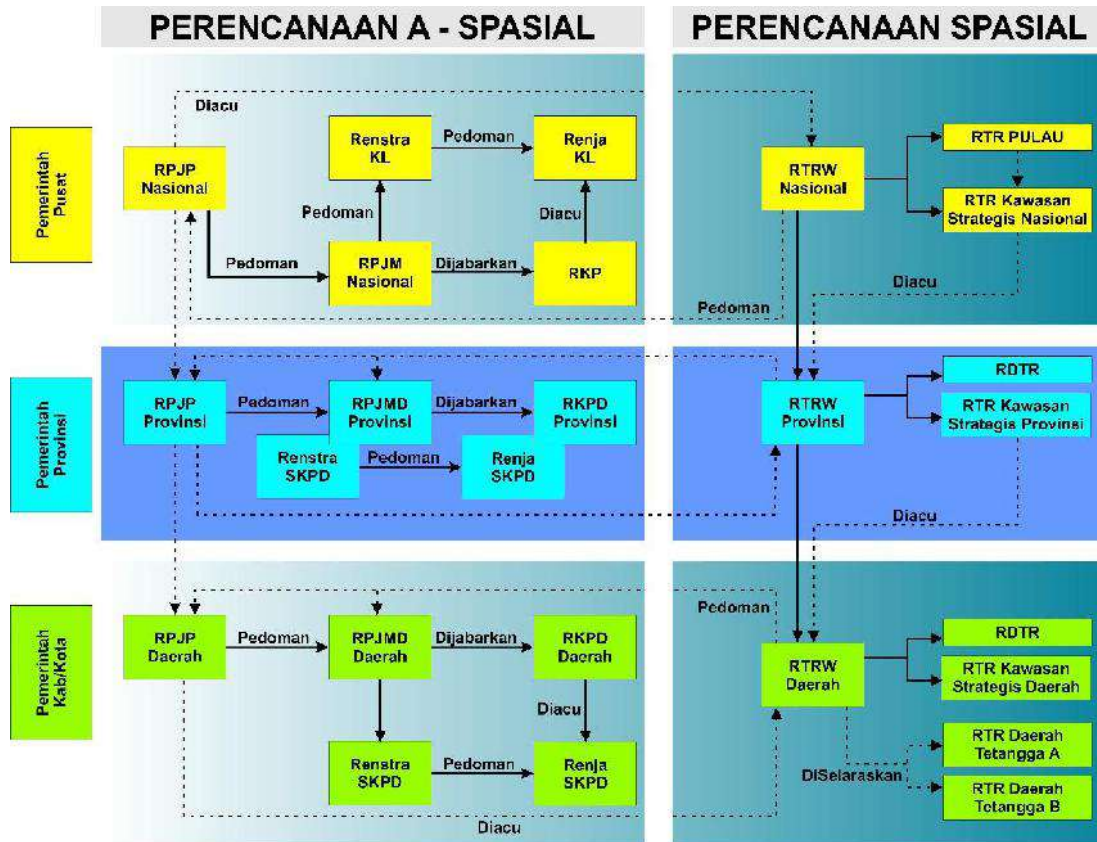


Sumber : BAPPPEDA Kabupaten Sumedang (Diolah)

Kemudian, dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat A-Spasial perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial yakni dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR, serta RTR Kawasan Strategis Daerah, selanjutnya perlu juga diselaraskan dengan dokumen-dokumen RTR dari daerah tetangga.

Dalam konteks penyusunan dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD, bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman kepada RPJPD, kemudian dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, maka korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen RPJPD dan RPJMD yang sama-sama dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD. Secara skematik uraian keselarasan dokumen spasial dan a-spasial dijabarkan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan
Perencanaan A-Spasial



Sumber: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPDP Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023, yang didalamnya memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RKPDP Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai acuan bagi DPRD Kabupaten Sumedang, seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai bahan penetapan program untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Sebagai alat koordinasi, integrasi dan sinergi pembangunan baik antar perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

5. Sebagai salah satu bentuk pemberian jaminan kepastian kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
6. Sebagai tolak ukur penilaian dan evaluasi kinerja setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (penyusunan LKPJ, LPPD dan LKPD);
7. Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang responsif, kondusif dan partisipatif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Sebagai pemersatu untuk menggerakkan dan mengerahkan seluruh *stakeholder* dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Sumedang;
9. Sebagai acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sumedang, pelaku usaha, masyarakat, komunitas, akademisi dan pemerintah daerah lainnya;
10. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada sub bab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis serta gambaran umum kondisi daerah yang menunjang perencanaan pembangunan daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan antara lain:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana dan luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan Kab/kota/kec/desa dan kelurahan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan mengenai fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang

berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Setelah menguraikan deskripsi sub bab ini dicantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi mengenai uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya terkait dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi / kabupaten / kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk meng-implementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Tahun 2023 Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

Luas Wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Jatigede (7,31%) dari total luasan Kabupaten Sumedang, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua (0,93%). Adapun luas wilayah per Kecamatan, sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan
di Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Desa	Kelurahan	Presentase (%)
1	Wado	7.334	10		4,71%
2	Jatinunggal	6.311	9		4,05%
3	Darmaraja	5.403	12		3,47%
4	Cibugel	4.999	7		3,21%
5	Cisitu	6.398	10		4,10%
6	Situraja	5.666	15		3,64%
7	Conggeang	11.220	12		7,20%
8	Paseh	3.382	10		2,17%
9	Surian	7.645	9		4,90%
10	Buahdua	11.149	14		7,15%
11	Tanjungsari	4.319	12		2,77%
12	Sukasari	3.899	7		2,50%
13	Pamulihan	5.367	11		3,44%
14	Cimanggung	4.298	11		2,76%
15	Jatinangor	2.562	12		1,64%
16	Rancakalong	5.596	10		3,59%
17	Sumedang Selatan	9.659	10	4	6,20%
18	Sumedang Utara	3.132	10	3	2,01%
19	Ganeas	2.525	8		1,62%
20	Tanjungkerta	4.393	12		2,82%
21	Tanjungmedar	6.688	9		4,29%
22	Cimalaka	4.755	14		3,05%
23	Cisarua	1.450	7		0,93%
24	Tomo	7.592	9		4,87%
25	Ujungjaya	8.738	9		5,61%
26	Jatigede	11.392	11		7,31%
Jumlah		155.872	270	7	100%

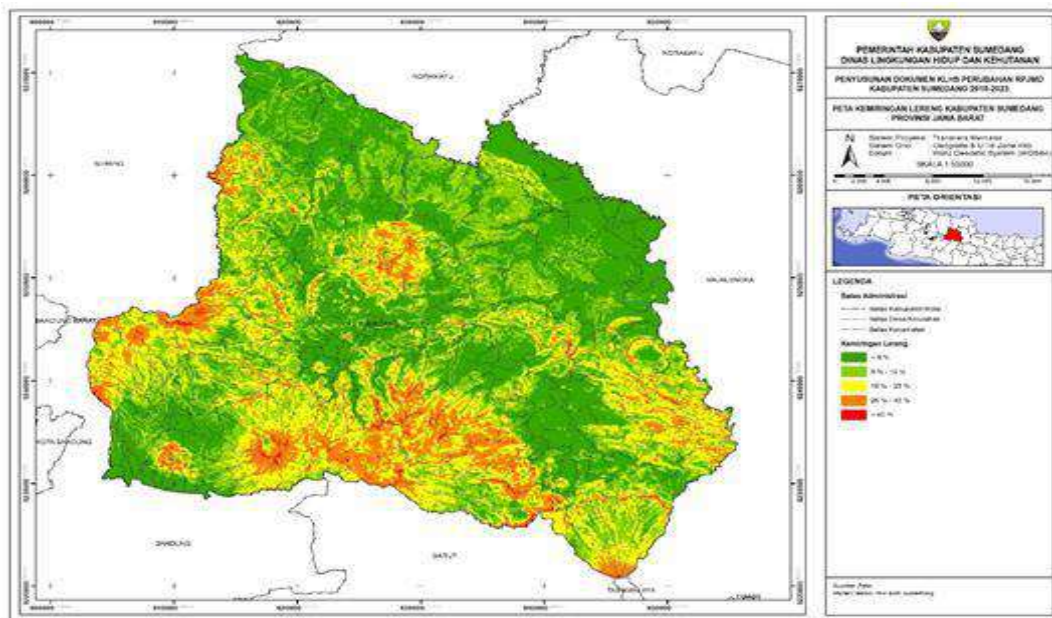
Sumber: BPS Kabupaten Sumedang Dalam Angka Tahun 2021

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Dataran terendah yang terdapat di Kabupaten Sumedang ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

1. 0-8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan per kabupaten-an;
2. 8-15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15-25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25-40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

Peta Kemiringan Kabupaten Sumedang yang bersumber dari RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 diperlihatkan pada Gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang



Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018- 2038

Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis, suhu rata-rata tahunan adalah $27,9^{\circ}\text{C}$, dengan curah hujan rata-rata 2.570 mm, adapun curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember-Januari. Kondisi iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Sumedang namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi Nasional. Sehingga dengan demikian dapat mencegah terjadinya kegagalan panen produk pertanian di Kabupaten Sumedang. Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini terkait dengan persebaran curah hujan di wilayah Kabupaten Sumedang.

Dengan klasifikasi curah hujan yang terbagi menjadi 7 (tujuh) kategori seperti yang disajikan pada Tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2
Klasifikasi Curah Hujan di Kabupaten Sumedang

No	Curah Hujan (mm)	Luas (Ha)
1	1500 - 2000 mm	1,35
2	2000 - 2500 mm	15.956,44
3	2500 - 3000 mm	59.443,31
4	3000 - 3500 mm	55.375,50
5	3500 - 4000 mm	19.563,93
6	4000 - 4500 mm	4.487,64
7	4500 - 5000 mm	1.656,91

Sumber: id.climate-data.org, hasil pengolahan 2020

Berdasarkan Tabel 2.3, bulan April adalah bulan terhangat sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 28,5 °C. Sedangkan bulan Agustus merupakan bulan dengan suhu rata-rata terendah 27 °C.

Tabel 2.3
Suhu Udara Kabupaten Sumedang

Bulan	Suhu rata-rata (°C)	Suhu maksimum rata-rata (°C)	Suhu minimum rata-rata (°C)
Januari	28,1	31,5	24,7
Februari	28,3	31,9	24,6
Maret	28,4	31,9	24,8
April	28,5	31,8	25,1
Mei	28,4	31,3	25,4
Juni	27,8	30,8	24,8
Juli	27,5	30,3	24,7
Agustus	27	29,3	24,7
September	27,3	29,6	25,1
Oktober	27,7	30,2	25,2
November	27,9	30,8	25,1
Desember	28,2	31,5	25`
Rata-rata tahunan	27,9	30,9	24,9

Sumber : *accuweather.com, diolah (2022)*

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan di dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah. Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Sumedang sebagian besar merupakan jaringan lintas kabupaten, yaitu sungai yang hulu atau hilirnya berada di antara Wilayah Kabupaten Sumedang dengan wilayah Kabupaten tetangga. Wilayah Sungai tersebut meliputi :

1. WS Cipunagara terkait dengan Kabupaten Subang adalah Sungai Cipunagara;
2. WS Cipanas terkait dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Cipanas, Sungai Cigalagah, dan Sungai Cikandung;
3. WS Citarum terkait dengan Kabupaten Bandung adalah Sungai Cikeruh dan Sungai Citarik (relatif kecil);

4. WS Cimanuk terkait dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Cipelang, Sungai Cimanuk, dan Sungai Cilutung.

Gambar 2.3
Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang



Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 (empat) DAS dengan 6 (enam) Sub DAS, yaitu :

1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
2. DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;
3. DAS Cipu negara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
4. DAS Cipanas.

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung, dan gempa bumi. Kejadian gerakan tanah disamping akibat kegempaan disebabkan juga sebagai akibat hujan yang terus menerus dengan intensitas cukup besar, begitu juga erosi yang terjadi pada sungai-sungai setempat. Sedangkan banjir sering disebabkan oleh drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan, seperti di sekitar Jalan Raya Rancaekek (sekitar Kecamatan Cimanggung) dan Kecamatan Jatinangor. Wilayah timur Kabupaten Sumedang yaitu kecamatan Tomo dan Kecamatan Ujungjaya merupakan lintasan Sungai Cimanuk. Pada saat meningkatnya debit air dikhawatirkan terjadi banjir di beberapa titik. Untuk wilayah Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan terdapat beberapa titik yang sering terjadi banjir terutama pada saat musim hujan serta adanya peningkatan debit air pada sungai Cipeles.

Gerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada umumnya dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng. Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tata guna lahan, morfologi, dan kegempaan. Gerakan tanah sering terjadi di bagian utara terutama di sekitar Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Conggeang, dan Kecamatan Rancakalong. Di bagian timur Kabupaten Sumedang terutama yang berada pada jalur sesar, berada di Kecamatan Tomo, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Jatinunggal. Secara rinci Kawasan bencana Kabupaten Sumedang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Kawasan Rawan Bencana

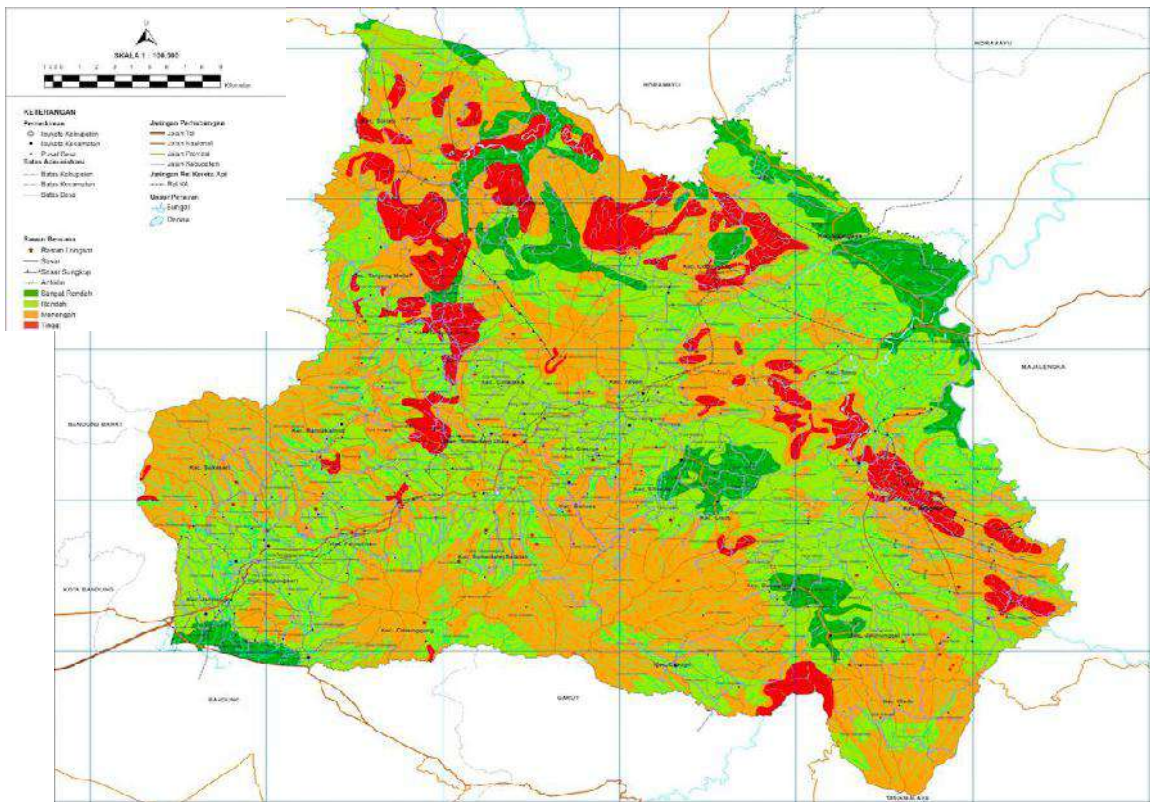
No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
1	Gerakan Tanah	Tersebar di sebagian wilayah kabupaten	Luas kurang lebih 21.612 Ha
2	Banjir	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Ujungjaya; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Sumedang Utara; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.	-

No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
3	Puting Beliung	a. Kecamatan Cimanggung; b. Kecamatan Cimalaka; c. Kecamatan Cisarua; d. Kecamatan Ujungjaya; dan e. Kecamatan Wado.	-
4	Gempa Bumi	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisit;u q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.	-

Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Secara umum daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.4
Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038

2.1.1.2. Demografi

Berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2021 semester II mengenai Jumlah Penduduk, Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga yang tersebar di 26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.165.047 jiwa yang terdiri atas 587.432 jiwa penduduk laki-laki dan 577.615 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 5.593 jiwa. Dengan besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,69, dapat dikatakan bahwa dalam 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai angka 747 jiwa per Km² dan wilayah terpadat terdapat di Kecamatan Sumedang Utara dengan angka kepadatan 3.261 jiwa per Km².

Pertambahan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Cimanggung sebanyak 988 jiwa, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Paseh dengan pengurangan penduduk sebanyak 171 jiwa.

Tabel 2.5

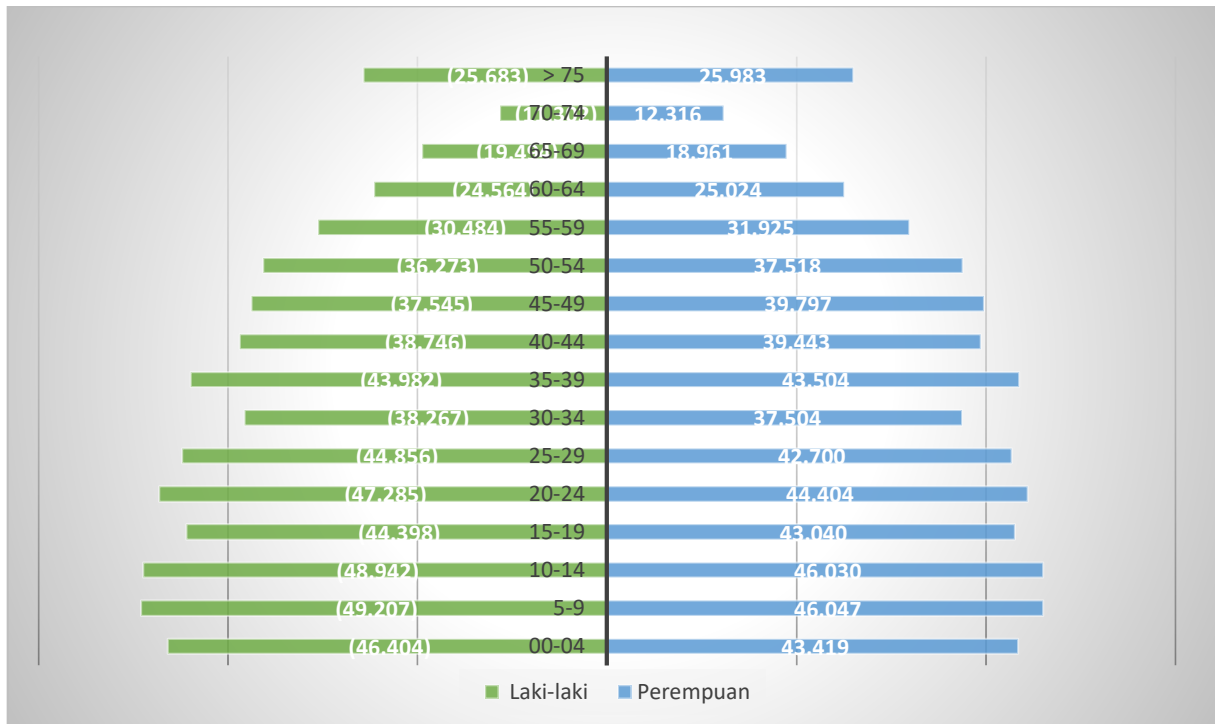
Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Pertumbuhan
1	Wado	44.254	84,27	525	190
2	Jatinunggal	45.812	72,12	635	(81)
3	Darmaraja	36.950	49,38	748	(28)
4	Cibugel	24.880	59,52	418	234
5	Cisitu	30.549	65,03	470	68
6	Situraja	42.252	43,23	977	157
7	Conggeang	28.893	106,98	270	(35)
8	Paseh	37.970	31,62	1,201	(171)
9	Surian	11.720	70,88	165	97
10	Buahdua	32.941	107,68	306	7
11	Tanjungsari	84.983	44,86	1,894	855
12	Sukasari	33.717	41,82	806	530
13	Pamulihan	62.623	50,70	1,235	778
14	Cimanggung	87.787	55,55	1,580	988
15	Jatinangor	91.391	31,60	2,892	530
16	Rancakalong	41.006	55,07	745	218
17	Sumedang Selatan	80.876	92,51	874	286
18	Sumedang Utara	99.123	30,40	3,261	487
19	Ganeas	25.893	22,90	1,131	(22)
20	Tanjungkerta	34.599	43,72	791	75
21	Tanjungmedar	26.431	60,67	436	159
22	Cimalaka	62.279	43,29	1,439	271
23	Cisarua	21.067	17,71	1,190	207
24	Tomo	23.301	84,74	275	(163)
25	Ujungjaya	31.284	86,23	363	(101)
26	Jatigede	22.466	106,24	211	58
	Total Kabupaten	1.165.047	1.558,72	747	5.593

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2022)

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya sebagaimana digambarkan dalam Grafik di bawah ini.

Grafik 2.1
Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2021



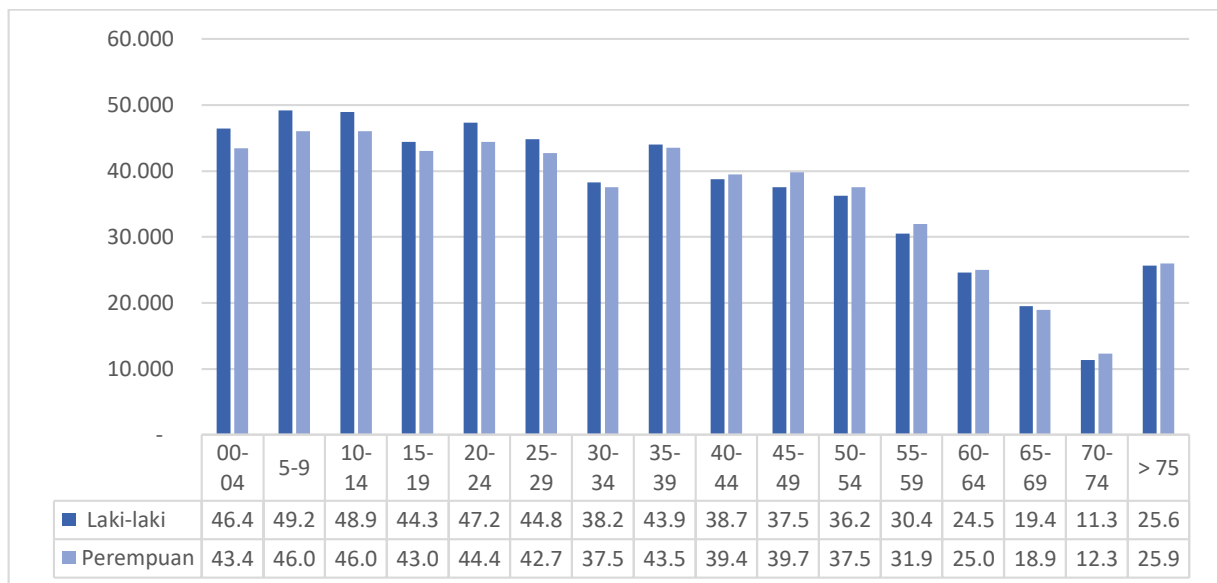
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2022)

Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga, Penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 14 tahun) sebesar 24,04 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 60,19 persen, dan jumlah penduduk lansia (≥ 65 tahun) tergolong kecil yaitu 9,76 persen. Hal ini merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat angka beban tanggungan (ABT). Pada tahun 2021 ABT di Kabupaten Sumedang sebesar 51 persen. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 51 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang. Angka tersebut menjadi naik jika dibandingkan dengan ABT Tahun 2020 sebesar 48 persen. Kenaikan ABT harus menjadi tolok ukur

penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya, yang pada gilirannya akan menjadi modal yang cukup baik mendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2022)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa untuk penduduk laki-laki jumlah terbesar berada pada rentang umur 5 – 9 Tahun sebanyak 49.207 jiwa dengan proporsi sebesar 4,22%, dan jumlah penduduk Laki-laki terendah berada pada rentang umur 70-74 Tahun sebanyak 11.302 jiwa atau sebesar 0,97%. Begitu pula bagi penduduk perempuan, jumlah terbesar berada di rentang usia 5 – 9 Tahun sebanyak 46,047 jiwa atau 3,95% dari jumlah total penduduk perempuan, sedangkan jumlah terkecil berada di rentang usia 70 – 74 Tahun sebanyak 12.316 jiwa atau 1,06%. Jika dilihat dari data di atas Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten berpenduduk tinggi dengan jumlah usia produktif (15 sampai 64 Tahun) yang sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Kabupaten Sumedang diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan mutu Pendidikan diperlukan sehingga kedepannya masyarakat Sumedang menjadi masyarakat yang maju. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah Daerah harus dapat mengelola dan memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak dikelola dan dimanfaatkan atau tidak adanya sistem serta persiapan yang baik akan menyebabkan peningkatan angka pengangguran.

Dari total jumlah penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 850.899 jiwa atau 99,00% dari penduduk yang wajib mempunyai KTP, sehingga penduduk yang tidak mempunyai KTP di Kabupaten Sumedang terhitung relatif rendah. Hal ini meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang kependudukan, yaitu di skor 85,68.

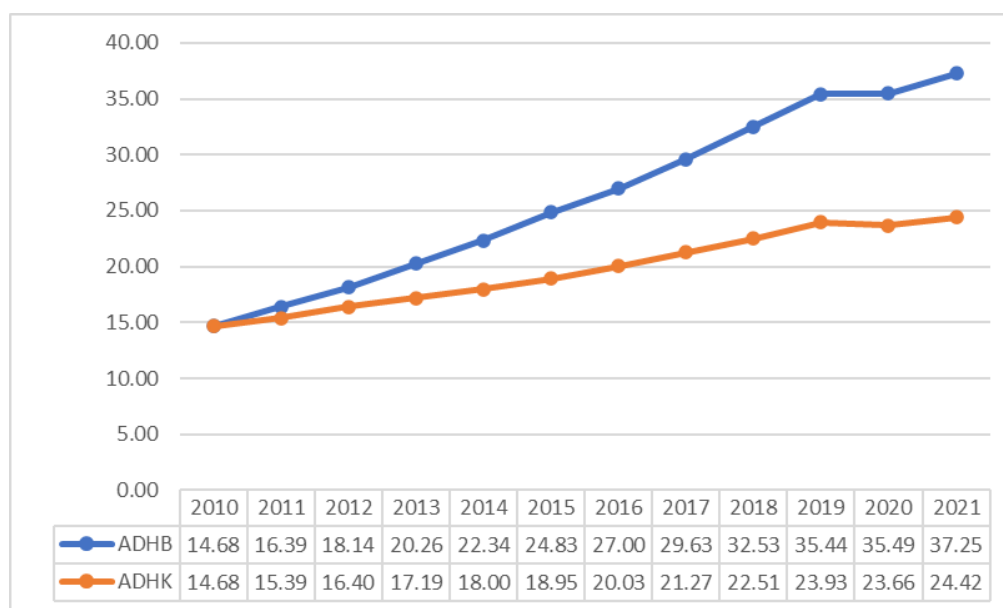
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Indikator *Impact/Makro*)

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Sumedang.

PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 mencapai Rp37,250 triliun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,76 triliun atau sekitar 4,96%. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 sebesar Rp24,415 triliun atau naik 3,17% dari tahun sebelumnya. Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan disajikan pada Grafik 2.3

Grafik 2.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2021 (triliun rupiah)

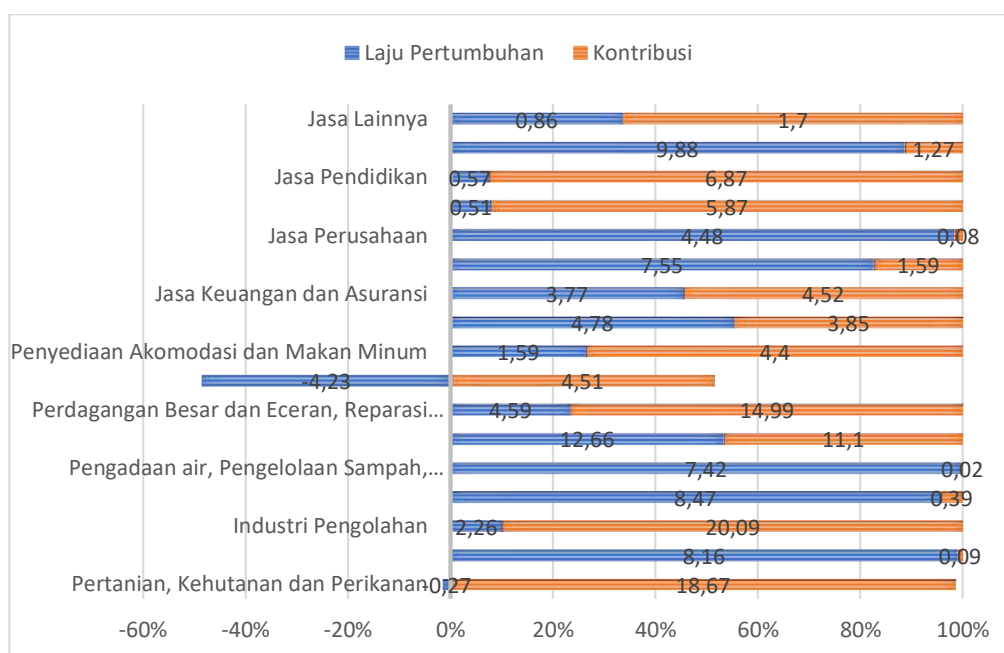


Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2022)

Berdasarkan grafik di atas, baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2020 sama-sama mengalami pertumbuhan positif. Dengan berakhirnya masa pemberlakuan pembatasan aktivitas akibat pandemi, perlahan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sumedang mulai berjalan normal kembali.

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor-sektor usaha yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Secara umum kontribusi terbesar terhadap PDRB didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu 1) sektor Industri Pengolahan; 2) sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 3) sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta 4) sektor Konstruksi. Sejak Tahun 2019 terjadi pergeseran peranan tertinggi dalam PDRB Kabupaten Sumedang yaitu peranan Industri Pengolahan yang mampu melebihi peranan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Berdasarkan Gambar 2.8, di Tahun 2021, di antara keempat lapangan usaha tersebut, 3 (tiga) sektor mengalami pertumbuhan positif, hanya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan negatif. Meski demikian, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (18,67%) belum menggeser posisi industri Pengolahan sebagai sektor dengan persentase distribusi tertinggi (20,09%). Sedangkan, dari 17 sektor lapangan usaha, hanya 2 (dua) sektor mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar minus 0,27% serta sektor Transportasi dan Pergudangan yang mengalami penurunan paling tinggi sebesar minus 4,23%.

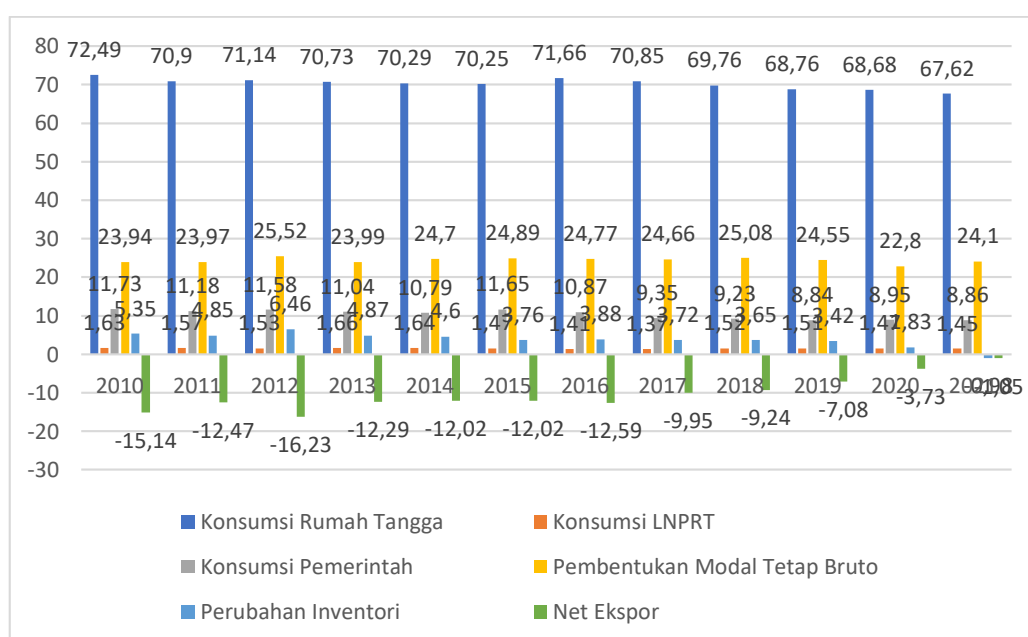
Grafik 2.4
Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Tahun 2021



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang, diolah (2022)

PDRB juga dipengaruhi oleh komponen-komponen lain, diantaranya Komponen Pengeluaran. Pada Grafik 2.5 dapat dilihat bahwa Komponen Pengeluaran Rumah Tangga masih mendominasi PDRB, yang diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto. Komponen yang mengalami peningkatan proporsi adalah komponen net ekspor yang ditandai berkurangnya angka negative, yang dapat diartikan bahwa Kabupaten Sumedang yang selama ini masih didominasi oleh komponen impor daripada ekspor ke luar daerah menunjukkan kecenderungan meningkatnya nilai ekspor komoditi ke luar daerah baik barang maupun jasa.

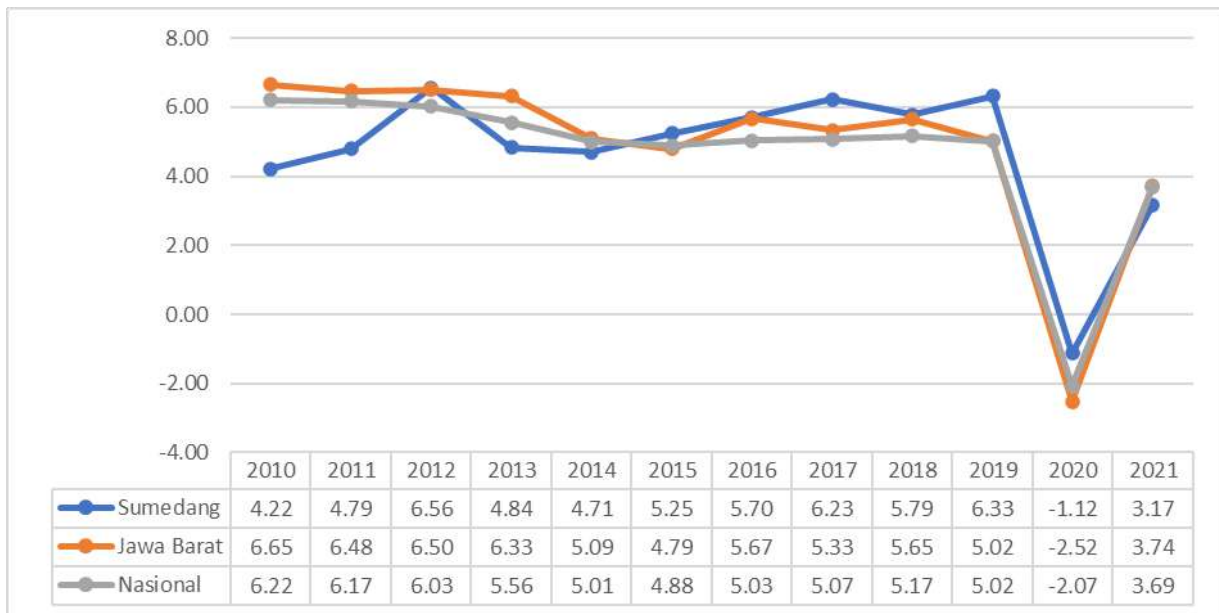
Grafik 2.5
PDRB Berdasarkan Komponen Pengeluaran Tahun 2010 – 2021 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2022)

Jika dilihat dari Grafik 2.6, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang senantiasa mengalami percepatan. Kabupaten Sumedang sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,12% pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 kembali pada pertumbuhan positif sebesar 3,17%. Meskipun demikian, pertumbuhannya masih dibawah pertumbuhan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2021, dikarenakan pertumbuhan yang positif di hampir semua kategori kecuali sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan sebesar minus 0,27% dan sektor angkutan sebesar minus 4,23%.

Grafik 2.6
Perbandingan LPE Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang (persen)

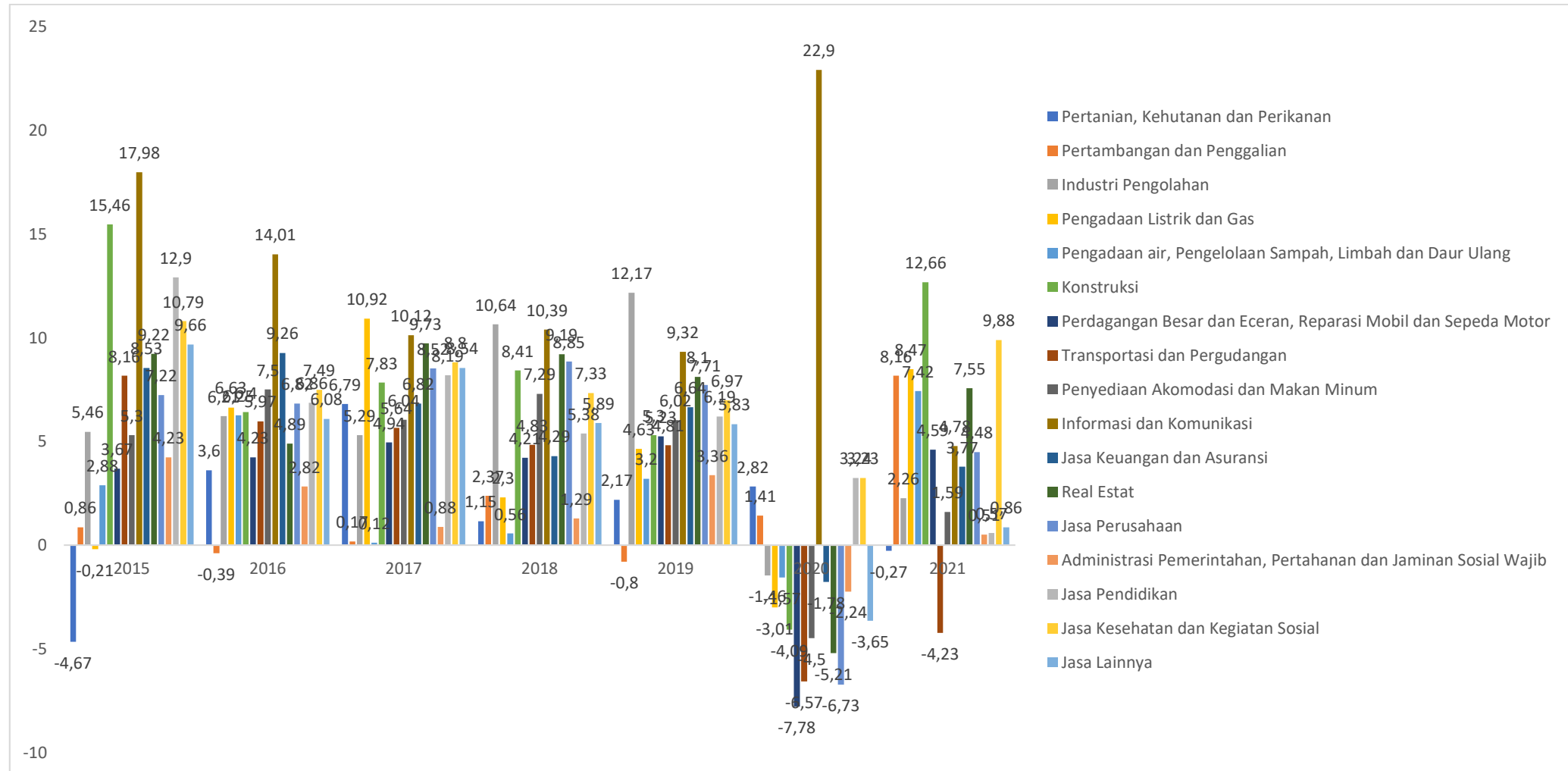


Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2022)

Grafik 2.7 menunjukkan bahwa lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Tahun 2021 adalah sektor Konstruksi sebesar 12,66%. Tingginya pertumbuhan di kategori ini terutama disebabkan oleh adanya pembangunan jalan tol Cisumdawu serta pembangunan jalan di beberapa wilayah, termasuk jalan di lingkaran Waduk Jatigede.

Lapangan usaha lain yang memiliki pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,88% yang mana permintaan akan pelayanan Kesehatan meningkat pada Tahun 2021, diikuti oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,47%, dan sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 8,61%.

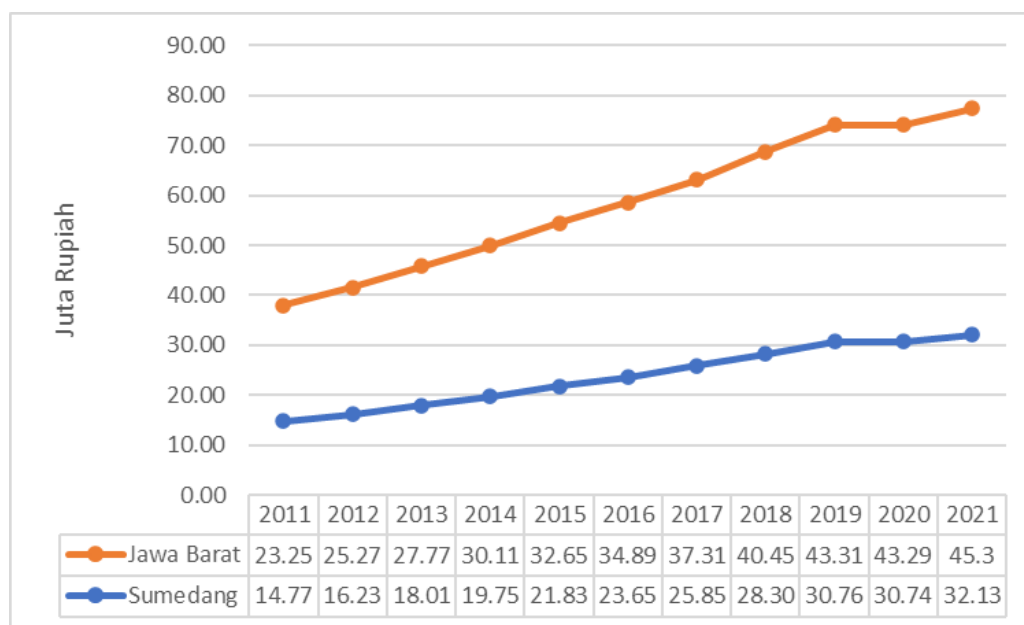
Grafik 2.7
 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan 2010
 Tahun 2015-2021 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2022)

PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan pada rentang Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021. PDRB per kapita Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 tercatat sebesar Rp32,13 juta meningkat dari tahun sebelumnya. Ini berarti PDRB Kabupaten Sumedang dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Meskipun demikian PDRB per kapita Kabupaten Sumedang masih berada dibawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 45,3 juta, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

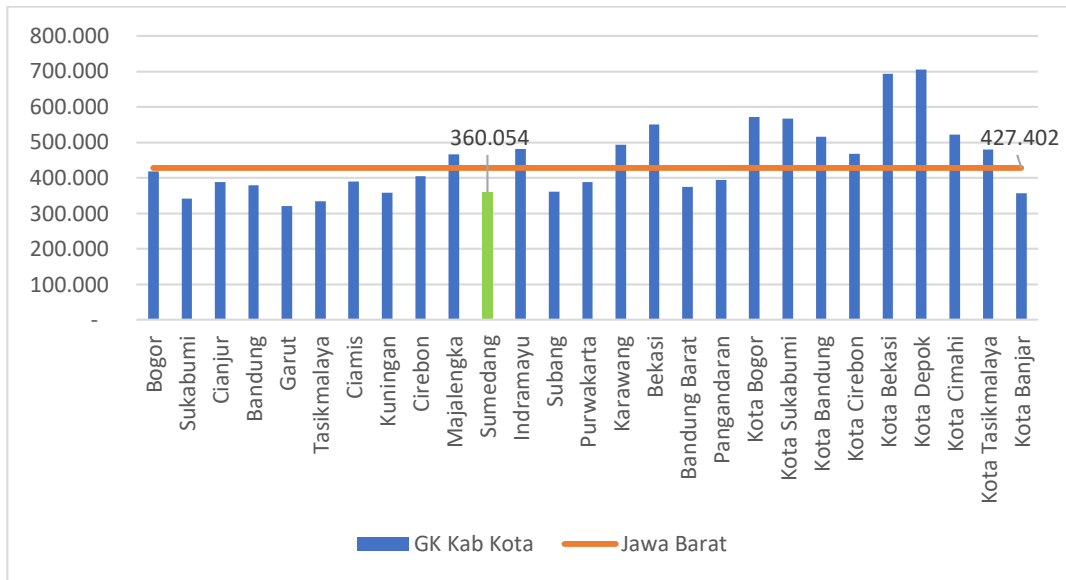
Grafik 2.8
Perbandingan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun 2011 - 2021 (juta rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2022)

Kemiskinan biasanya diukur dengan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau dengan kata lain kemiskinan dipandang dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Jika diamati pada Grafik 2.9, Tahun 2021 garis kemiskinan Kabupaten Sumedang berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Sumedang masih berada di bawah tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara umum. Dengan demikian masyarakat Sumedang masih memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang rendah atau dibawah garis kemiskinan.

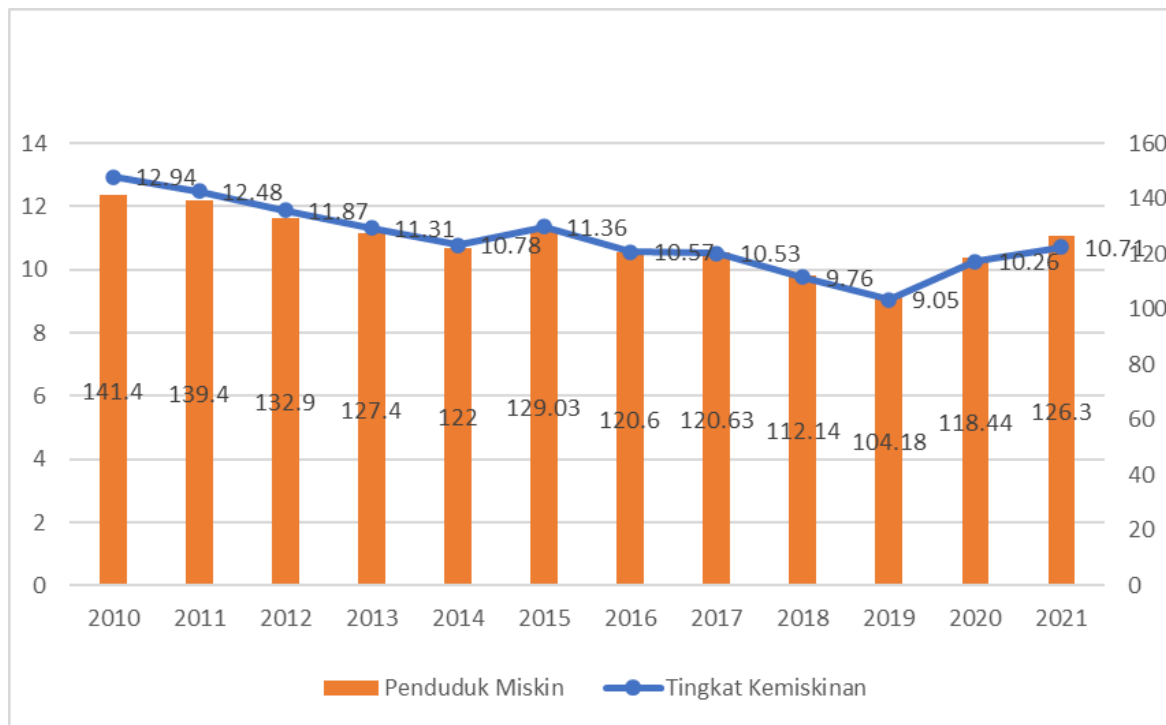
Grafik 2.9
Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 (rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2022)

Pada Tahun 2021, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang mencapai 10,71% atau naik sekitar 0,45 poin dari tahun sebelumnya dengan kisaran penduduk miskin sekitar 126 ribu jiwa.

Grafik 2.10
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang
Tahun 2010 – 2021

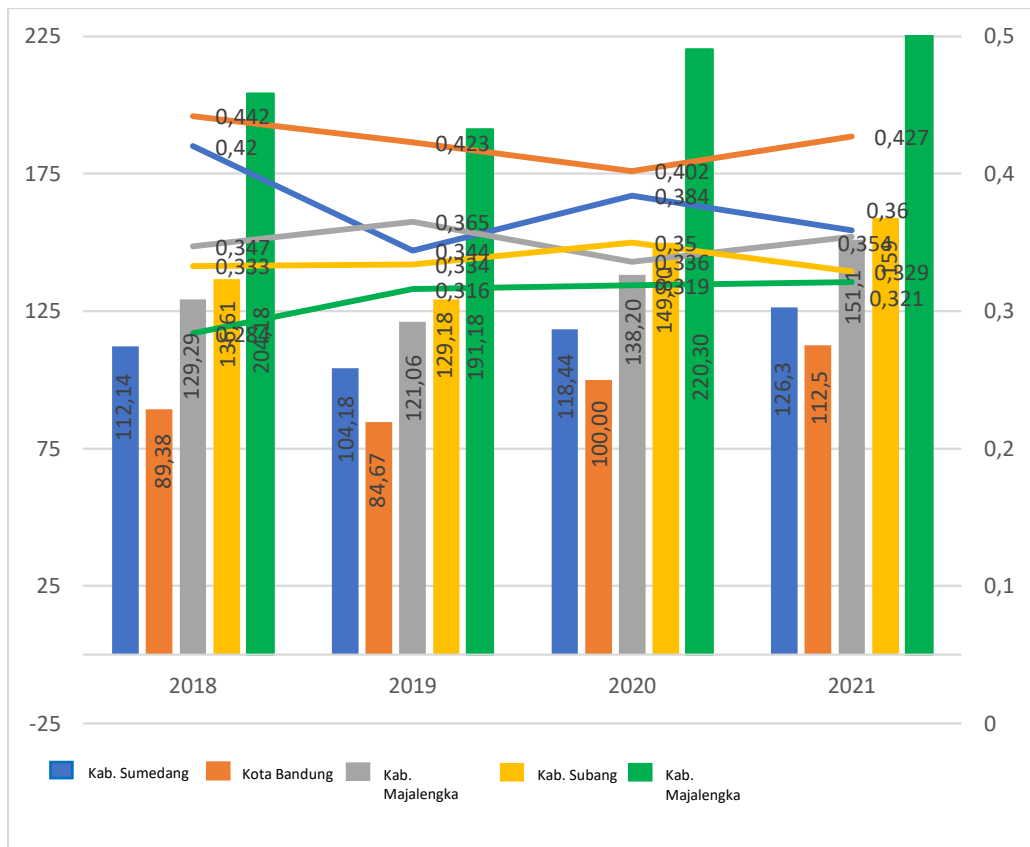


Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2022)

Sejak Tahun 2016 – 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan. Namun sejak adanya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, persentase penduduk miskin terus meningkat

hingga tingkat kemiskinan kembali ke angka 10. Hal ini juga terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah perbandingan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Perbatasan.

Grafik 2.11
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang dan Daerah Perbatasan Tahun 2018-2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2022)

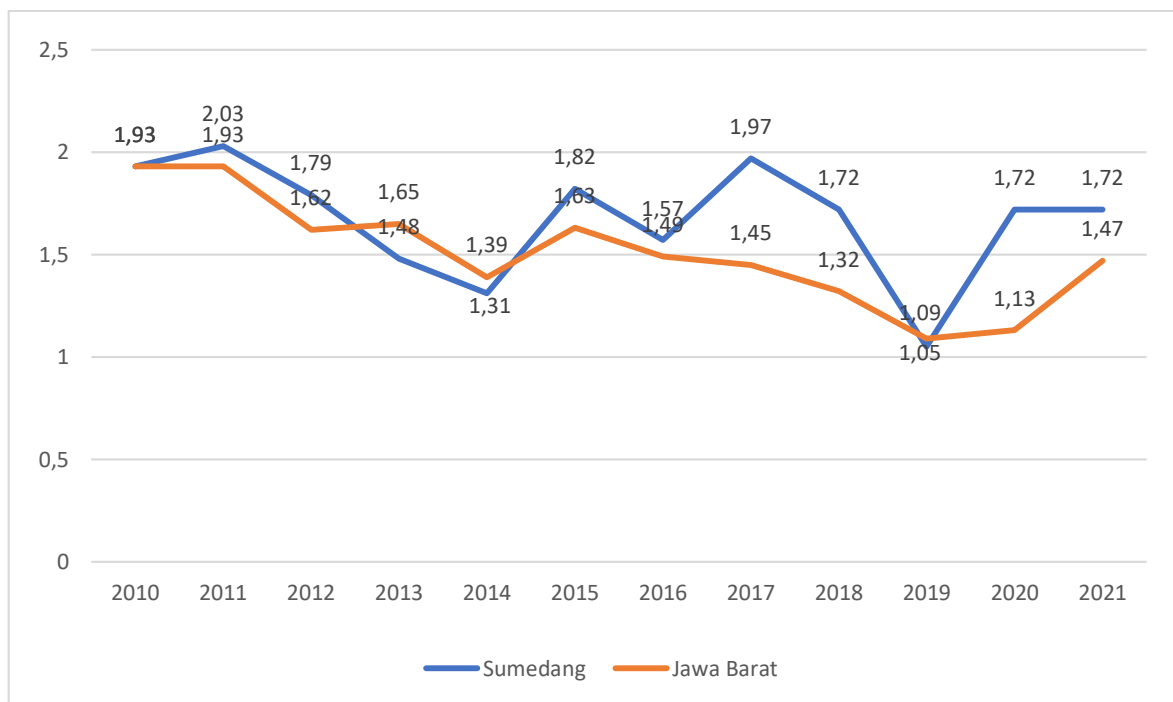
Berdasarkan Grafik 2.11 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 7,9 ribu jiwa dari tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan daerah perbatasan, kenaikan tertinggi jumlah penduduk miskin Tahun 2021 terdapat pada Kota Bandung dan Kabupaten Majalengka dengan kenaikan masing-masing sebesar 12,5 ribu jiwa dan 12,7 ribu jiwa dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, walaupun tingkat kenaikan penduduk miskinnya tinggi sama seperti tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin terendah tetap terdapat di Kota Bandung dengan jumlah penduduk miskin sebesar 112,5 ribu jiwa, dan diikuti oleh Kabupaten Sumedang sebanyak 126,3 ribu jiwa. Adapun untuk jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Indramayu sebanyak 228,6 jiwa.

Data jumlah penduduk miskin tidak dapat dilepaskan dari data indeks gini atau gini rasio, karena gini rasio merupakan salah satu indikator yang

menunjukkan tingkat ketimpangan penghasilan pada suatu wilayah. Manfaat dari pengukuran gini rasio ini digunakan untuk mengukur ketidakmerataan perekonomian dalam suatu wilayah. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa gini rasio Kabupaten Sumedang mengalami penurunan setiap tahunnya yang diindikasikan dengan nilai koefisien $< 0,4$ poin, artinya ketimpangan pendapatan masyarakat masih rendah. Kecuali pada Tahun 2020 gini rasio Kabupaten Sumedang mencapai 0,384 poin mengalami kenaikan 0,04 poin dari tahun sebelumnya. Lebih lanjut capaian Gini Rasio Kabupaten Sumedang Tahun 2021 masih lebih baik dari Provinsi Jawa Barat (0,412 poin) dan juga daerah perbatasan (Kota Bandung 0,427 poin).

Tingkat kemiskinan penduduk pun tidak lepas dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut adalah perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan antara Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021

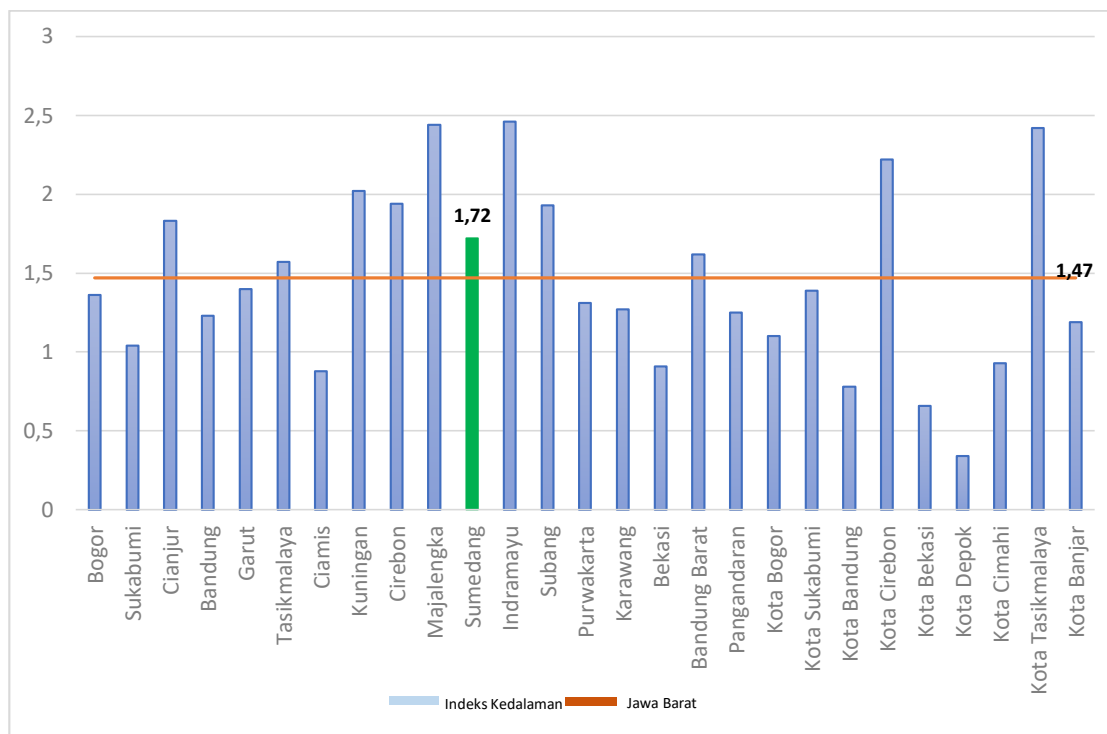
Grafik 2.12
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021



Sumber. BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2022)

Berdasarkan Grafik 2.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Sumedang selama 11 (sebelas) tahun terakhir sangat fluktuatif, dan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sumedang selalu lebih tinggi. Capaian P1 Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 sama seperti tahun sebelumnya yaitu 1,72% dan lebih tinggi 0,25% dari capaian P1 Provinsi Jawa Barat (1,42%), hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketimpangan pengeluaran pendapatan masyarakat miskin di Kabupaten Sumedang masih belum membaik atau belum merata. Meskipun demikian capaian P1 Kabupaten Sumedang masih lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Barat seperti Kabupaten Majalengka, Indramayu, Cirebon, dll. Grafik perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat disajikan pada Grafik dibawah ini.

Grafik 2.13
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

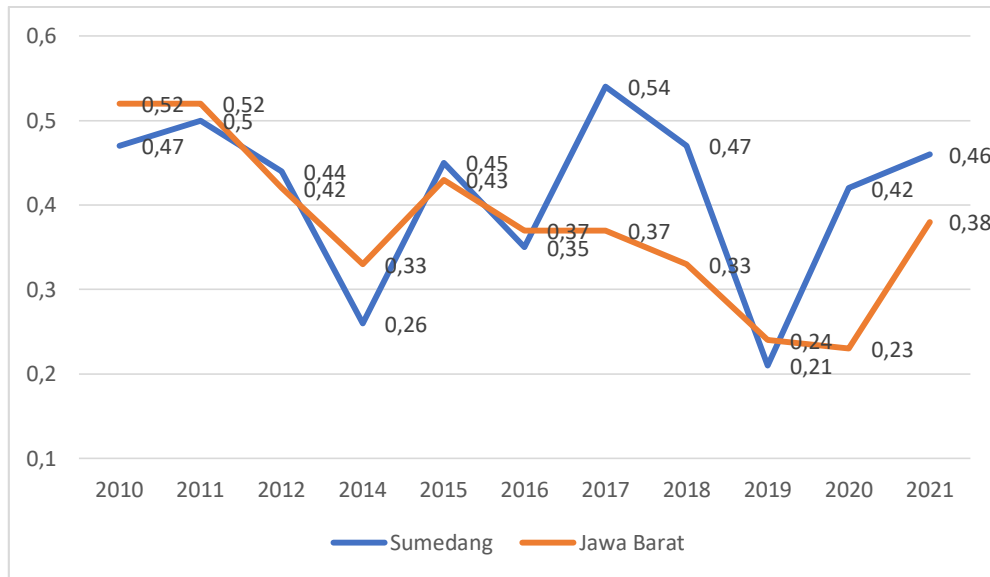


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2021)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif. Capaian terendah P2 terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0,21% lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 0,24%. Namun Tahun 2021 capaian P2 meningkat 0,04% dari tahun sebelumnya menjadi 0,46% sehingga lebih tinggi 0,08% dari Capaian P2 Provinsi Jawa Barat

(0,38% pada Tahun 2021) yang artinya bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi. Grafik fluktuasi Indeks Keparahan Kemiskinan disajikan sebagai berikut.

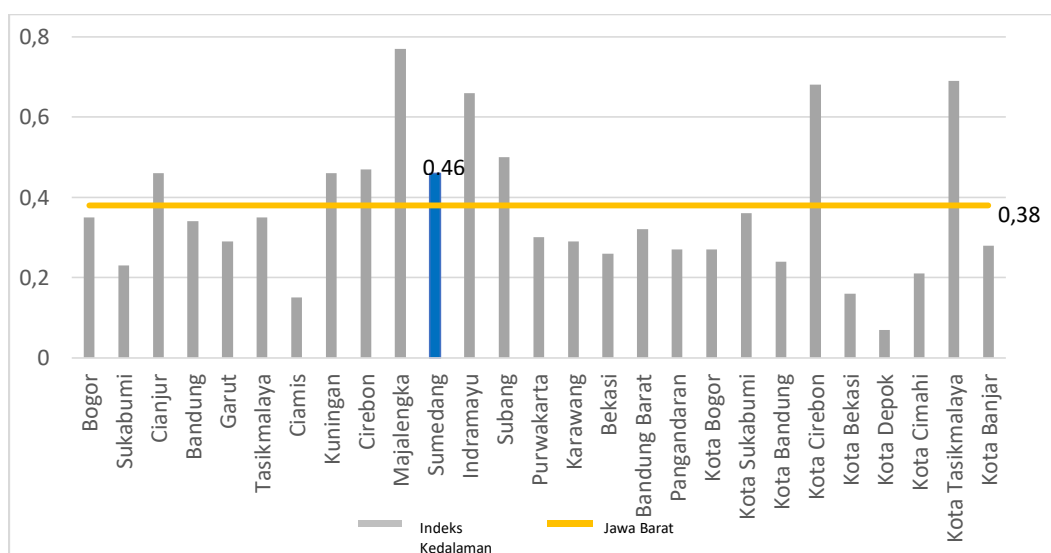
Grafik 2.14
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2021)

i. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sumedang termasuk kedalam 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota tertinggi dan jika dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat lainnya. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.15
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota
di Jawa Barat Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2021)

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana masyarakat/penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Dengan pengukuran IPM terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Perhitungan IPM menggunakan beberapa komponen antara lain angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan sekolah dan pengeluaran per kapita. Data komponen IPM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6

Komponen Penyusun IPM di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 – 2021

No	Komponen IPM	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Asia Harapan Hidup (AHH)	71,96	72,00	72,14	72,29	72,43	72,62
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,91	12,93	12,94	12,96	12,97	12,98
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,72	7,98	8,17	8,27	8,51	8,52
4	Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	9,339	9,569	9,570	10,410	10,220	10,262

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2022)

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, sehingga AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya serta meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Tinggi rendahnya AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 1) kondisi lingkungan; 2) ketersediaan pangan; 3) Pendidikan; dan 4) perekonomian masyarakat.

Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Sumedang mengalami tren positif setiap tahunnya walaupun peningkatannya tidak terlalu besar. Pada Tahun 2021, AHH Kabupaten Sumedang mencapai 72,62 tahun, artinya rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh penduduk yang lahir menjelang Tahun 2021 lebih lama 0,19 tahun dari tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Barat (73,23 tahun pada Tahun 2021) AHH Kabupaten Sumedang masih lebih rendah. Kenaikan AHH di Kabupaten Sumedang tidak lepas dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS Kabupaten Sumedang Tahun 2021 naik 0,01 Tahun dari tahun sebelumnya sehingga diperkirakan pada Tahun 2021 rata-rata anak yang berusia 7 (tujuh) tahun dan sudah masuk jenjang Pendidikan formal dapat memiliki harapan untuk menikmati Pendidikan selama 12,98 tahun atau setara dengan diploma. Angka HLS Kabupaten Sumedang pun lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka HLS Provinsi Jawa Barat yang masih 12,61 tahun.

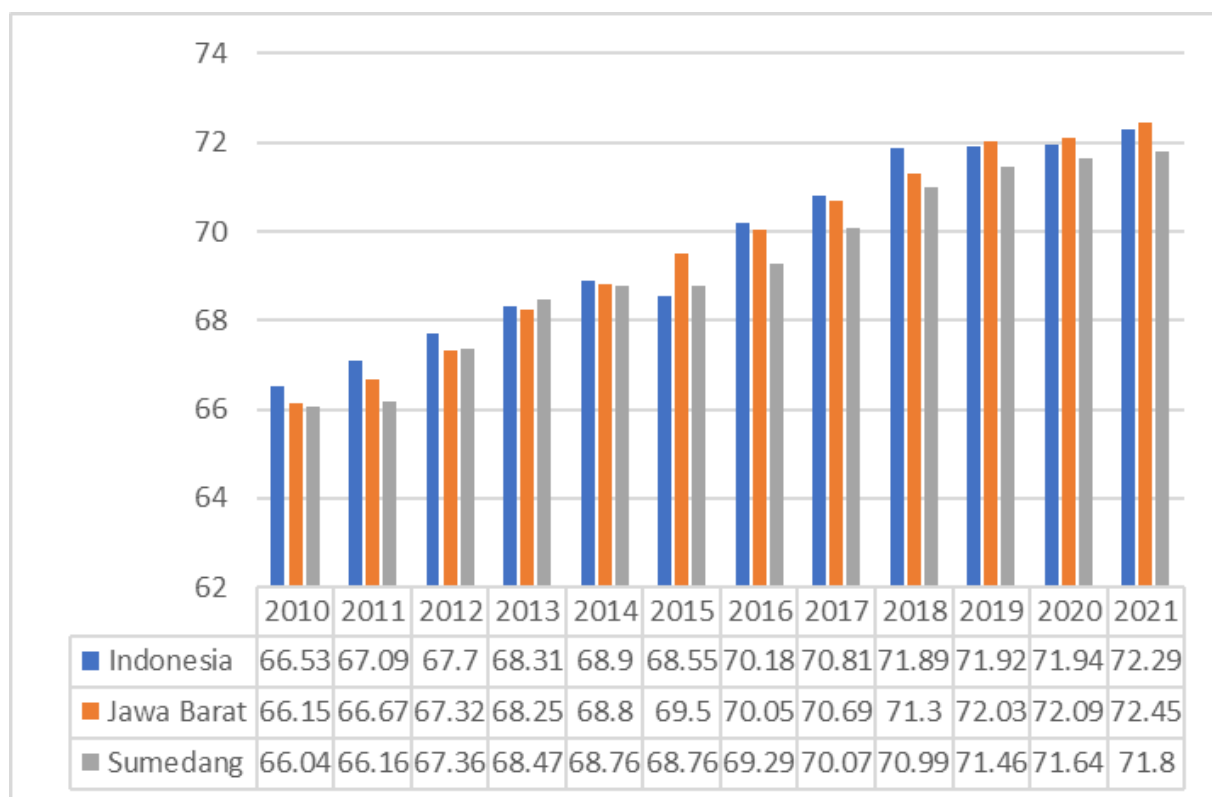
Komponen lain dari IPM yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mempunyai pengertian jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas Pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Tahun 2021 RLS Kabupaten Sumedang sebesar 8,52 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Sumedang yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 8,52 tahun atau lebih lama 0,01 tahun dari Tahun 2020. Asumsinya kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang telah mengalami perbaikan. Namun jika dibandingkan dengan angka RLS Provinsi Jawa Barat (8,61 tahun) masih lebih rendah 0,09 tahun.

Komponen terakhir IPM adalah meningkatnya standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita

merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita dapat dihitung dengan keseimbangan kemampuan belanja masyarakat. Tahun 2021 pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Sumedang sebesar Rp10.262.000,00 (*sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*). Artinya rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Sumedang selama setahun sebesar ± Rp10 juta-an dan mengalami peningkatan sebesar Rp420 ribu dari tahun sebelumnya.

Target capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang diharapkan terus meningkat setiap tahunnya, dengan tujuan target tersebut melebihi capaian IPM Provinsi Jawa Barat. Capaian pertumbuhan angka IPM Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan tiap tahunnya, seiring dengan tren kenaikan IPM secara Nasional dan Provinsi. Akan tetapi IPM Kabupaten Sumedang masih berada pada urutan ke-7 di Jawa Barat, sedikit tertinggal dari IPM Nasional dan IPM Provinsi Jawa Barat, seperti yang tersaji pada Gambar berikut.

Grafik 2.16
IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang
Tahun 2010-2021



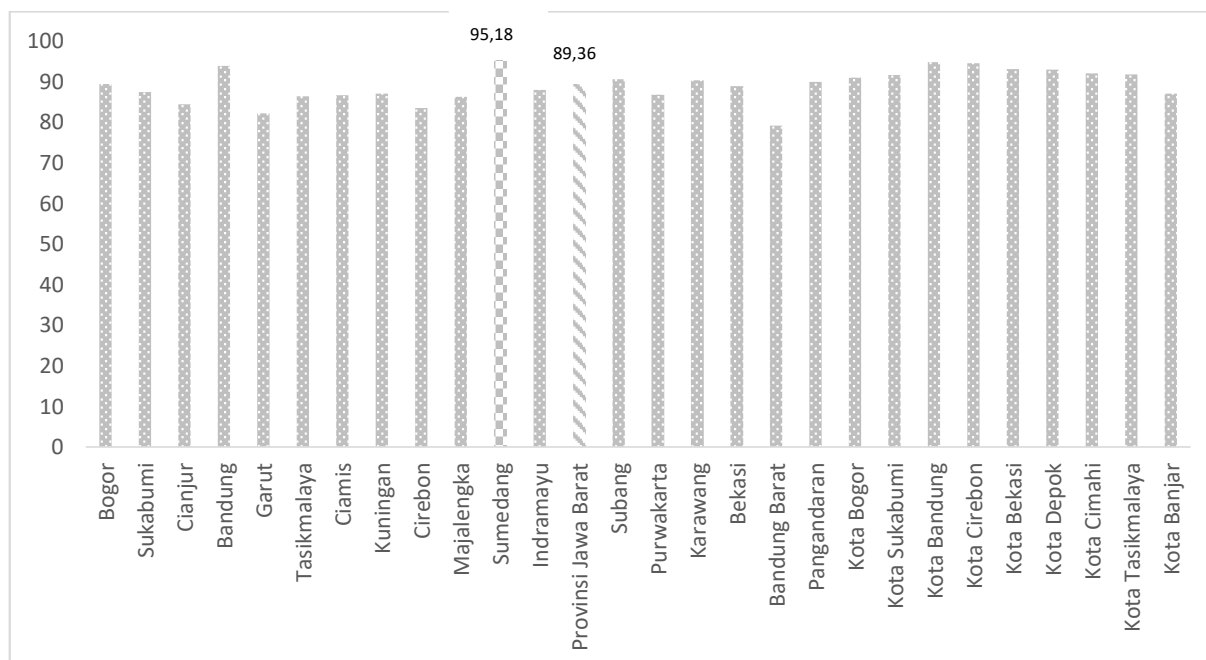
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2021) (diolah)

Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam

pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator utama untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender. Data IPD dan IDG sangat membantu pemerintah daerah untuk dapat mengurangi kesenjangan dalam suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG Kabupaten Sumedang Tahun 2021 merupakan di Jawa Barat dengan poin 95,18, bahkan Provinsi Jawa Barat pun hanya mendapat poin 89,36. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah setara atau lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain bahkan dengan Provinsi Jawa Barat sendiri.

Grafik 2.17
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



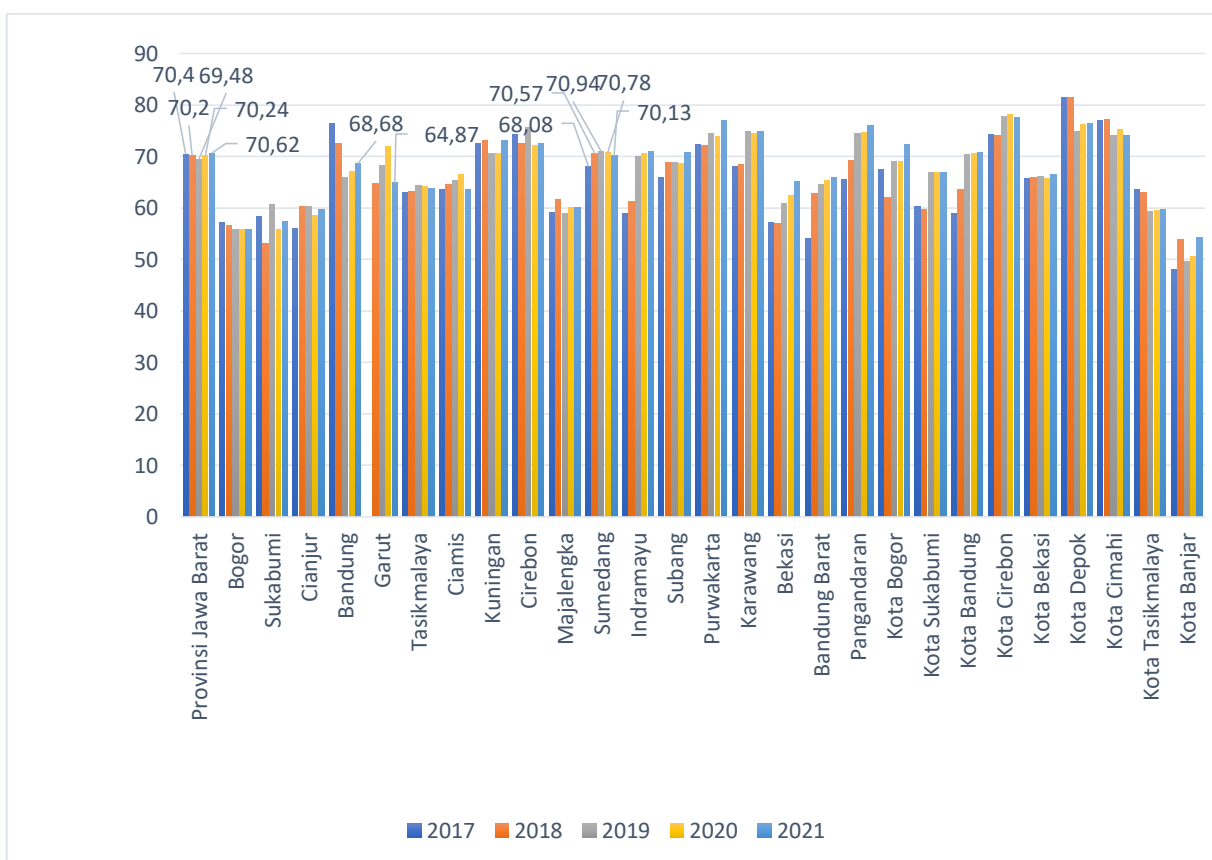
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2021) (diolah)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan

dalam pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IDG Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun terakhir memiliki rata-rata 70,10 poin atau hampir sama dengan Jawa Barat dengan rata-rata 70,18 poin. Akan tetapi pada Tahun 2021, IDG Kabupaten Sumedang turun 0,65 poin dari tahun sebelumnya menjadi 70,13 poin, sedangkan IDG Jawa Barat naik menjadi 70,62 poin atau naik 0,38 poin dari tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang peran perempuan dalam bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan masih rendah atau belum merata. Meskipun demikian, kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat.

Grafik 2.18
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota

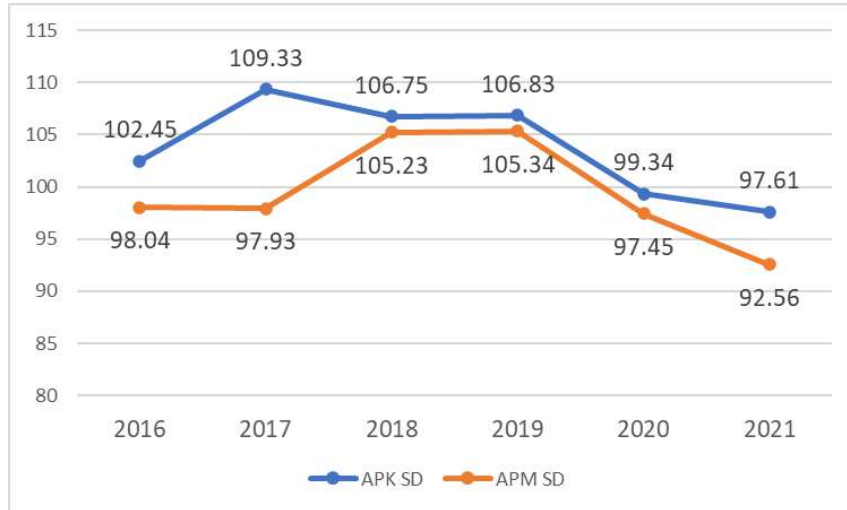


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2021) (diolah)

Selain IDG dan IPG, keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut, sehingga peningkatan mutu pendidikan dan jumlah masyarakat yang bersekolah harus terus diupayakan. Untuk mengetahui banyaknya penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari

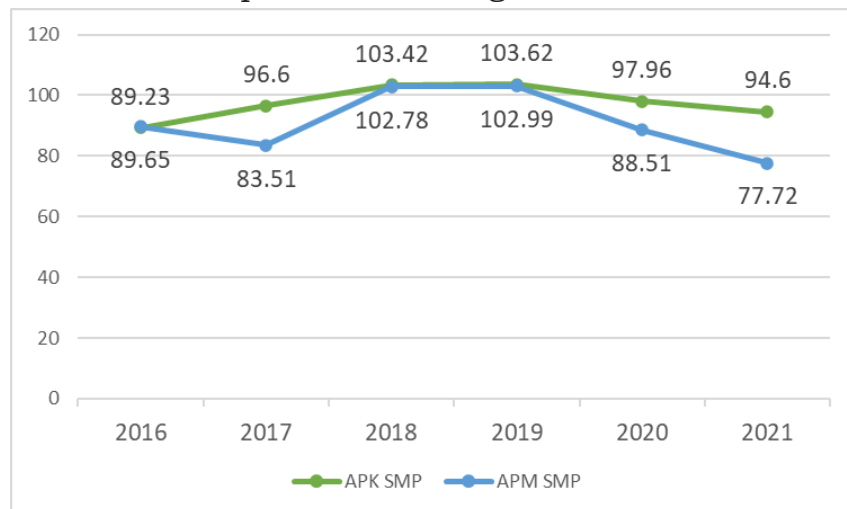
persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Indikator Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumedang tersaji pada Grafik 2.19 dan Grafik 2.20.

Grafik 2.19
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 – 2021



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2022)

Grafik 2.20
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMP
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 – 2021



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2022)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan serta untuk menunjukkan besaran kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia tertentu. Pada Tahun 2018 APK SD dan SMP Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan yang signifikan. Pada Tahun 2020, APK SD dan SMP menurun di bawah 100%, begitu pula pada Tahun 2021 yang turun masing-masing sebesar 1,73% untuk APK SD menjadi 97,61% dan 3,36% untuk APK SMP

menjadi 94,60%. Kemungkinan penyebab turunnya persentase APK SD dan APK SMP ini karena adanya penurunan keterlibatan penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan penduduk kelompok usia 13-15 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Kegunaan APM salah satunya untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur sesuai dengan ketentuan kelompok usia di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APM SD dan SMP Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 turun menjadi 92,56% untuk APM SD dan 77,72% untuk APM SMP. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan keterlibatan penduduk usia 7-12 Tahun dan 13-15 dari luar kota yang bersekolah di Sumedang, serta adanya penduduk Sumedang usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun yang bersekolah di luar Kabupaten Sumedang.

Dari urusan Kesehatan, Indikator Kesehatan Kabupaten Sumedang dijelaskan melalui Proporsi Stunting, Jumlah/Angka Kematian Bayi, dan Jumlah/Angka Kematian Ibu per 100.000 ibu melahirkan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Proporsi Stunting	N/A	N/A	32,2	24,43	17,5	10,99
2	Jumlah Kematian Bayi (jiwa)	120	145	155	134	137	161
3	Jumlah Kematian Ibu (jiwa)	111	22	16	13	21	36

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2022)

Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur dibandingkan dengan menggunakan standar WHO. Prevalensi stunting merupakan indikator untuk mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Berdasarkan data pada Tabel 2.7 proporsi stunting di Kabupaten Sumedang menggambarkan tren positif setiap tahunnya. Hal ini disebabkan dengan adanya program pencegahan stunting yang disosialisasikan kepada remaja

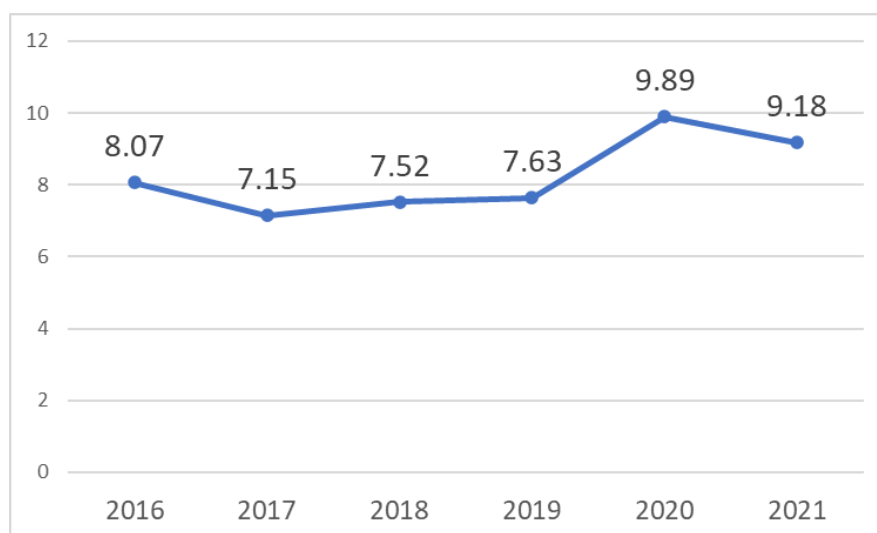
perempuan dan wanita usia subur, ibu hamil serta ibu menyusui agar tumbuh kesadaran akan kecukupan gizi bakal janin dan bayi.

Berdasarkan Tabel diatas, untuk data jumlah kematian bayi dari Tahun 2016-2021 sangat fluktuatif. Namun pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 161 jiwa dari 137 jiwa pada Tahun 2020 yang merupakan angka kematian bayi tertinggi di Kabupaten Sumedang. Penyebab terbesar kematian bayi disebabkan oleh Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang diakibatkan oleh ibu hamil yang mengalami hipertensi, kelahiran gemelli, anemia dan kekurangan energi kronis (KEK).

Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan kualitas pelayanan Kesehatan selama hamil, penanganan persalinan dan masa nifas. Jumlah AKI di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2017-2019 mengalami penurunan, akan tetapi kembali meningkat dari yang semula 13 jiwa pada Tahun 2019 menjadi 21 jiwa di Tahun 2020 dan terus bertambah sebanyak 15 jiwa menjadi 36 jiwa pada Tahun 2021. Peningkatan yang signifikan terjadi pada Tahun 2020 ke Tahun 2021, hal tersebut disebabkan sebagai dampak dari pandemic Covid-19 yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam penanganan pasien karena kurangnya rantai rujukan serta adanya pembatasan penerimaan jumlah pasien dari fasilitas tempat rujukan yang kurang memadai.

Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

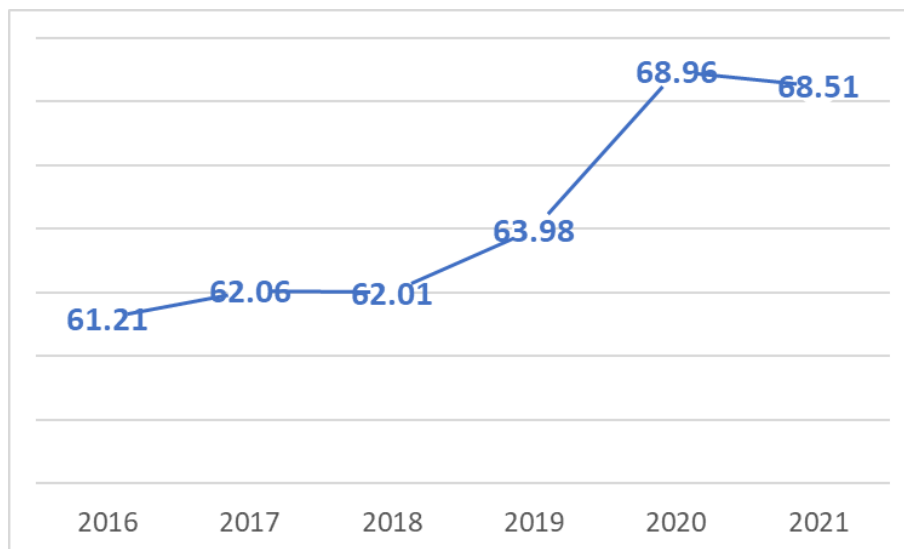
Grafik 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang
Tahun 2016 – Tahun 2021 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2022)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk mengetahui besarnya persentase Angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Diharapkan dengan mengetahui angka TPT dapat menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap *supply* tenaga kerja yang ada. Persentase TPT di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif selama 6 (enam) tahun terakhir. Persentase tertinggi TPT terjadi pada Tahun 2020 yang mencapai 9,89%, namun pada Tahun 2021 turun menjadi 9,18%. Diasumsikan bahwa di Kabupaten Sumedang masih terdapat 9,18% persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan, penyebabnya sangat beragam salah satunya dimungkinkan disebabkan oleh kinerja pasar kerja dan kondisi ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sumedang
Tahun 2016 – Tahun 2021 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2022)

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan proporsi penduduk usia kerja di suatu daerah yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja dan menjadi faktor penting dalam menggerakkan pembangunan. Biasanya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang mengalami tren positif setiap tahunnya, yang berarti pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2021 mengalami penurunan 0,45% dari tahun sebelumnya menjadi 68,51%. Pembangunan di suatu wilayah tidak bisa terlepas dari peran perempuan. Diasumsikan penurunan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang ada hubungannya dengan penurunan IDG Kabupaten Sumedang karena adanya penurunan partisipasi perempuan terutama dalam kegiatan ekonomi.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni dan budaya merupakan produk dari kreativitas manusia yang digunakan sebagai alat ekspresi keinginan, pemikiran dan pemahaman terhadap alam dan lingkungan dengan memasukan unsur keindahan dan kebenaran subjektif maupun universal dan diterapkan dalam masyarakat. Kebudayaan menjadi penting artinya bagi pembentukan karakter yang berkebangsaan Indonesia sekaligus membangkitkan identitas kebudayaan yang berciri *kasumedangan*. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan sosio-ekonomi dan politik pendukung kebudayaannya. Implementasi aspek seni dan budaya sebagai bukti keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dituangkan dalam Perda Kabupaten Sumedang tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (SPBS). SPBS yang bersifat lokal dapat dijadikan sebagai pedoman bertindak sekaligus mengarahkan kehidupan bersama dalam tataran sosial yang selaras dan seimbang serta dapat digunakan juga sebagai rencana mencapai tujuan bersama dalam kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Salah satu bentuk implementasi SPBS di Kabupaten Sumedang ialah menyajikan kembali berbagai kesenian tradisional dalam berbagai acara pemerintahan skala lokal maupun nasional serta mengenalkan dan menyebarkan cagar budaya yang dilestarikan kepada masyarakat Sumedang.

Disamping seni dan budaya, olahraga juga merupakan salah satu fokus urusan yang harus diperhatikan karena Kabupaten Sumedang memiliki potensi yang tinggi dalam bidang olahraga. Berikut adalah data hasil capaian pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Tabel 2.8
Capaian Pembangunan Bidang Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2017 – Tahun 2021

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	n/a	n/a	n/a	100	100

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	n/a	n/a	n/a	100	100
3	Jumlah atlet yang berprestasi	n/a	14	20	21	20
4	Jumlah penyelenggaraan keolahragaan	n/a	4	5	5	6

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2022)

Berdasarkan tabel di atas bahwa untuk fokus seni dan budaya diukur berdasarkan pada Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan dan persentase cagar budaya yang menunjukkan hasil capaian 100% pada Tahun 2021. Artinya bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya mengenalkan dan mengembangkan seni dan budaya lokal terhadap masyarakat. Adapun untuk fokus olahraga diukur berdasarkan jumlah atlet yang berprestasi dan jumlah penyelenggaraan keolahragaan yang trennya menunjukkan tren positif.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pada tahun 2021 terjadi Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Hal tersebut mempengaruhi fokus urusan-urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.1. Fokus Urusan Wajib

2.1.3.1. 1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1.1. Urusan Pendidikan

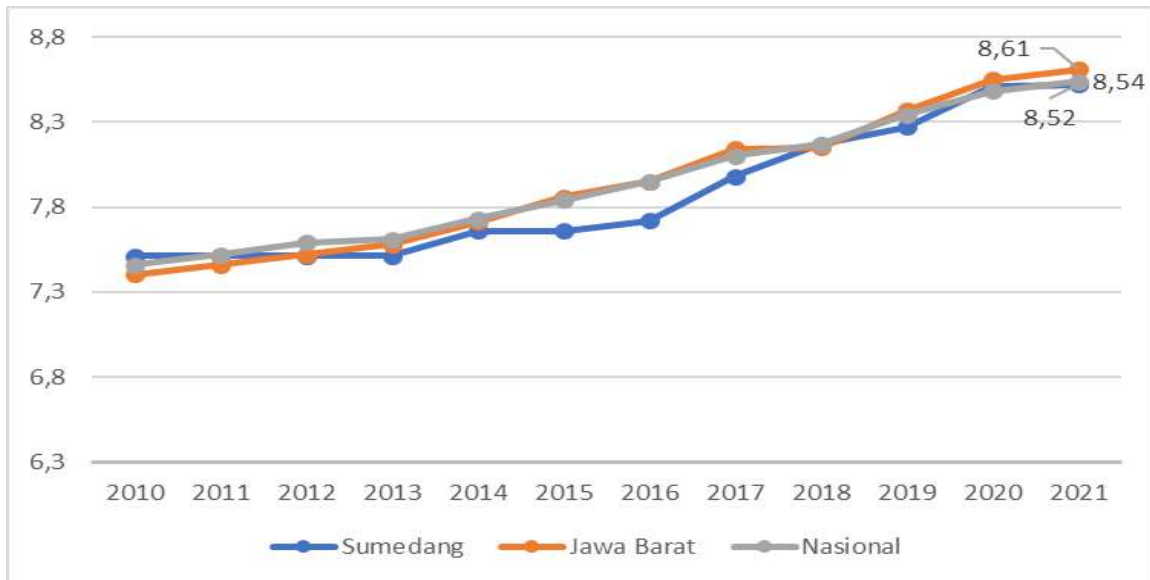
Urusan pendidikan memiliki beberapa aspek yang merupakan fokus urusan wajib pelayanan dasar Kabupaten. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan salah satunya adalah menangani pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Berikut adalah beberapa indikator penentu dalam urusan pendidikan.

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sumedang mempunyai tren positif setiap tahunnya. Pada Tahun 2021, RLS Kabupaten Sumedang naik 0,01 tahun dari tahun sebelumnya menjadi 8,52 Tahun, meskipun masih berada di bawah angka Provinsi Jawa Barat (8,61 tahun) maupun Nasional (8,54 tahun). Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antara Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional disajikan pada Gambar berikut.

Grafik 2.23

Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antara Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017 – Tahun 2021



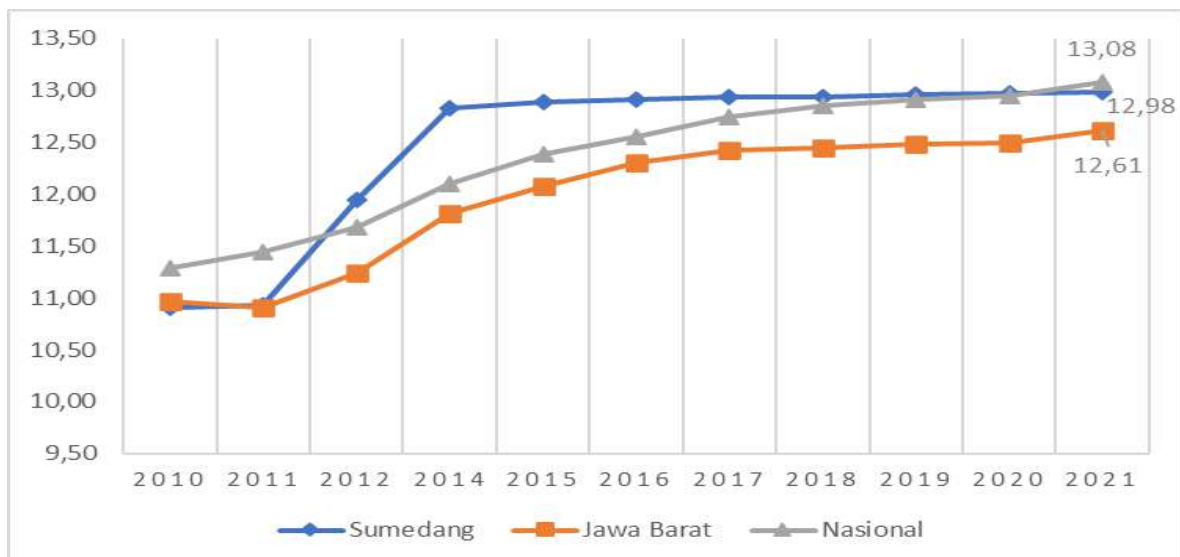
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2022) (diolah)

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan terutama pada Tahun 2014, peningkatan mencapai 0,88 tahun dari tahun sebelumnya menjadi 12,83 tahun. Kenaikan HLS pada Tahun 2021 hanya 0,01 tahun dari tahun sebelumnya (12,97 pada Tahun 2020). Meskipun demikian capaian HLS Kabupaten Sumedang masih lebih baik jika dibandingkan dengan Jawa Barat (12,61 pada Tahun 2021) namun lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian HLS Nasional (13,08 pada Tahun 2021). Berikut adalah Grafik Perbandingan HLS Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2021.

Grafik 2.24

Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) antara Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017 – Tahun 2021

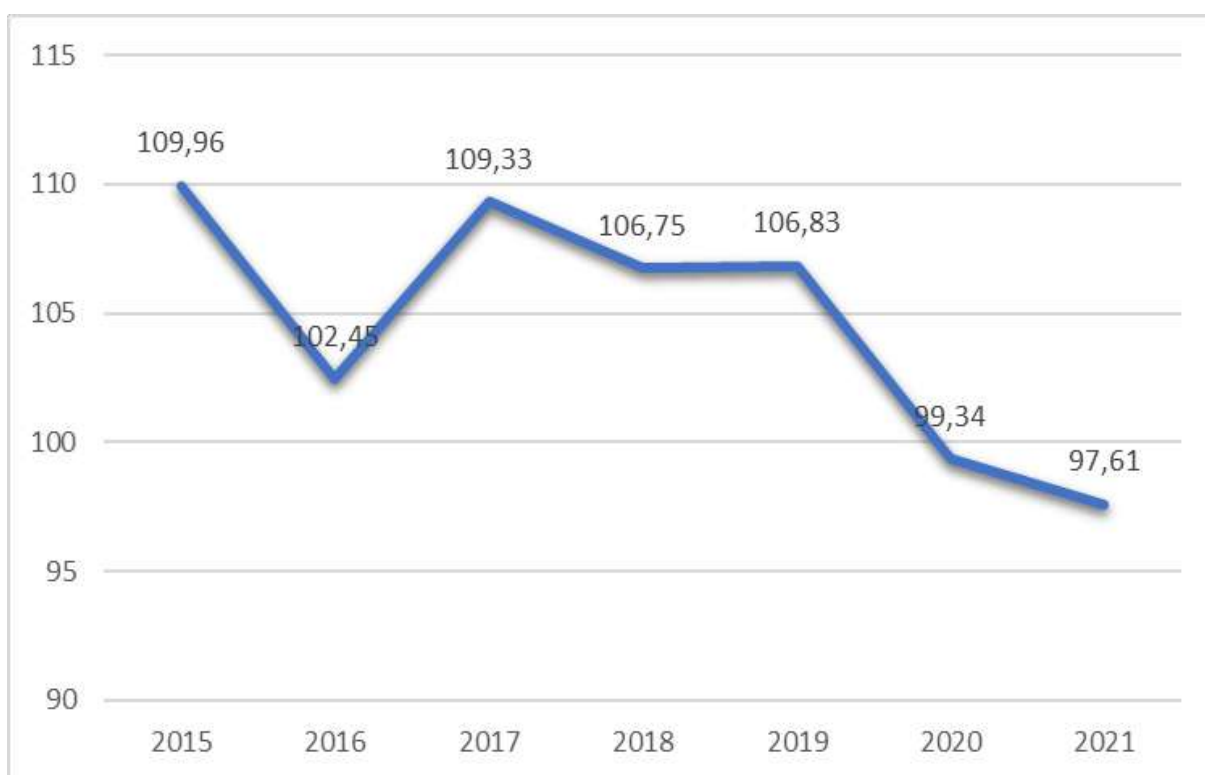


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2022) (diolah)

3) Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan pendidikan anak yang berusia antara 7-13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/karakteristik daerah serta sosial budaya masyarakat setempat yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan serta memiliki sikap kebersamaan dalam upaya mencetak generasi muda yang bertanggung jawab. Penduduk dengan usia 7-12 tahun wajib menuntaskan program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun. Berikut adalah data penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar.

Grafik 2.25
Angka Pendidikan Kasar SD Tahun 2017-2021



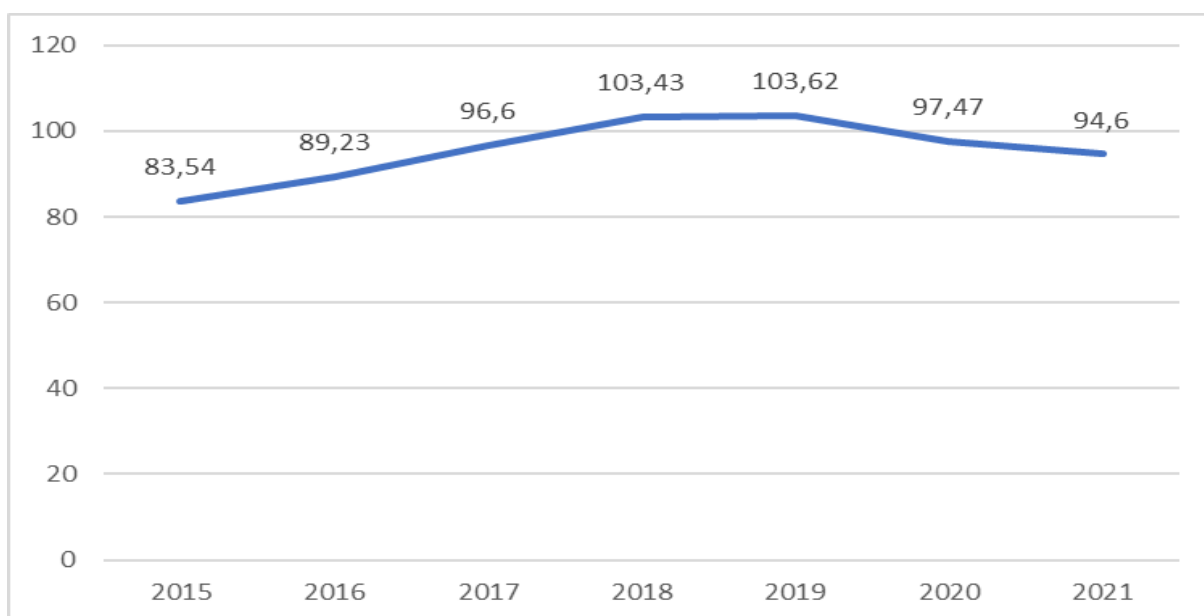
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2022) (diolah)

Berdasarkan data di atas bahwa partisipasi penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar sangat fluktuatif. Partisipasi tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebanyak 109,96 orang. Namun pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 97,61 orang dari yang sebelumnya 99,34 orang pada Tahun 2020. Penurunan ini diasumsikan kurangnya partisipasi penduduk yang berusia 7-12 tahun dalam bidang pendidikan.

4) Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SMP

Pendidikan Sekolah Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar. Tujuan pendidikan sekolah menengah adalah untuk meningkatkan keterampilan, karakter serta keterampilan yang kuat untuk berinteraksi dalam lingkungan dan lingkungan sosial budaya. Pendidikan menengah terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu menengah pertama dan menengah atas, adapun yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah pendidikan menengah pertama dengan rentang usia 13-15 Tahun. Data mengenai tingkat partisipasi Penduduk Usia 13-15 Tahun dalam Pendidikan SMP disajikan dalam Grafik berikut.

Grafik 2.26
Angka Partisipasi Kasar SMP Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2022) (diolah)

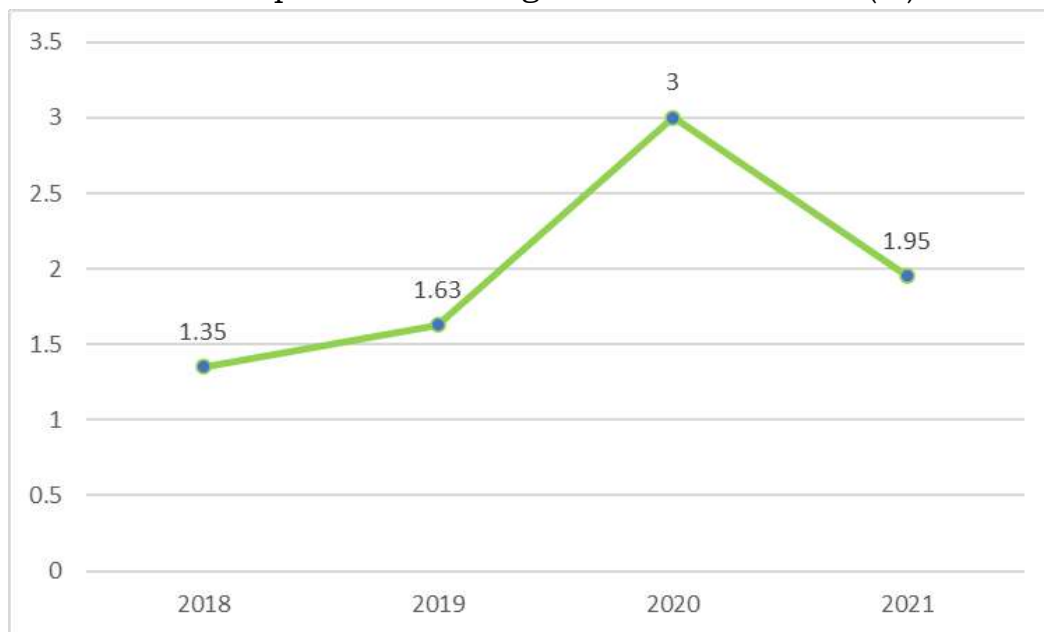
Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah partisipasi penduduk usia 13-15 tahun memiliki tren positif setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada Tahun 2020-2021 dengan jumlah partisipan sebanyak 97,47 orang pada Tahun 2020 dan 94,60 orang pada Tahun 2021 atau turun 2,87 orang dari tahun sebelumnya.

5) Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan pengganti pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan non-formal. Pendidikan kesetaraan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi warga belajar

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan kesetaraan ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan bagi warga yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu indikator utama Pimpinan Daerah di Kabupaten Sumedang, sehingga menjadi kegiatan yang diprioritaskan. Data APK Pendidikan kesetaraan Tahun 2021 mengalami penurunan 1,05% dari Tahun sebelumnya (3% pada Tahun 2020) menjadi 1,95%. Diasumsikan bahwa penurunan ini disebabkan karena berkurangnya partisipasi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan kesetaraan serta lingkungan pendidikan atau lingkungan sosial yang sangat berpengaruh terhadap dukungan penyelenggaraan pendidikan. Tren Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021 disajikan pada gambar berikut.

Grafik 2.27
 Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan
 di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2021 (%)



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2022)

6) Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang diberikan sebelum anak masuk ke jenjang pendidikan dasar. Pendidikan PAUD ini diupayakan untuk membina anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih

lanjut. Berikut adalah tren Partisipasi Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.28
Angka Partisipasi Pendidikan Usia Dini
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 – 2021 (%)



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2022)

Berdasarkan data diatas bahwa tren angka partisipasi pendidikan PAUD sangat fluktuatif. Realisasi tertinggi pada Tahun 2019 sebesar 89,53% dan terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2021 realisasi partisipasi PAUD menjadi 64,85% dari 80,6% pada Tahun 2020. Diperkirakan menurunnya angka partisipasi PAUD di Kabupaten Sumedang sebagai salah satu dampak dari *Covid-19* yang mengakibatkan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan dilaksanakan secara daring atau *online*, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mengikutsertakan anak yang berusia 5-6 Tahun dalam pendidikan PAUD.

2.1.3.1.1.2. Urusan Kesehatan

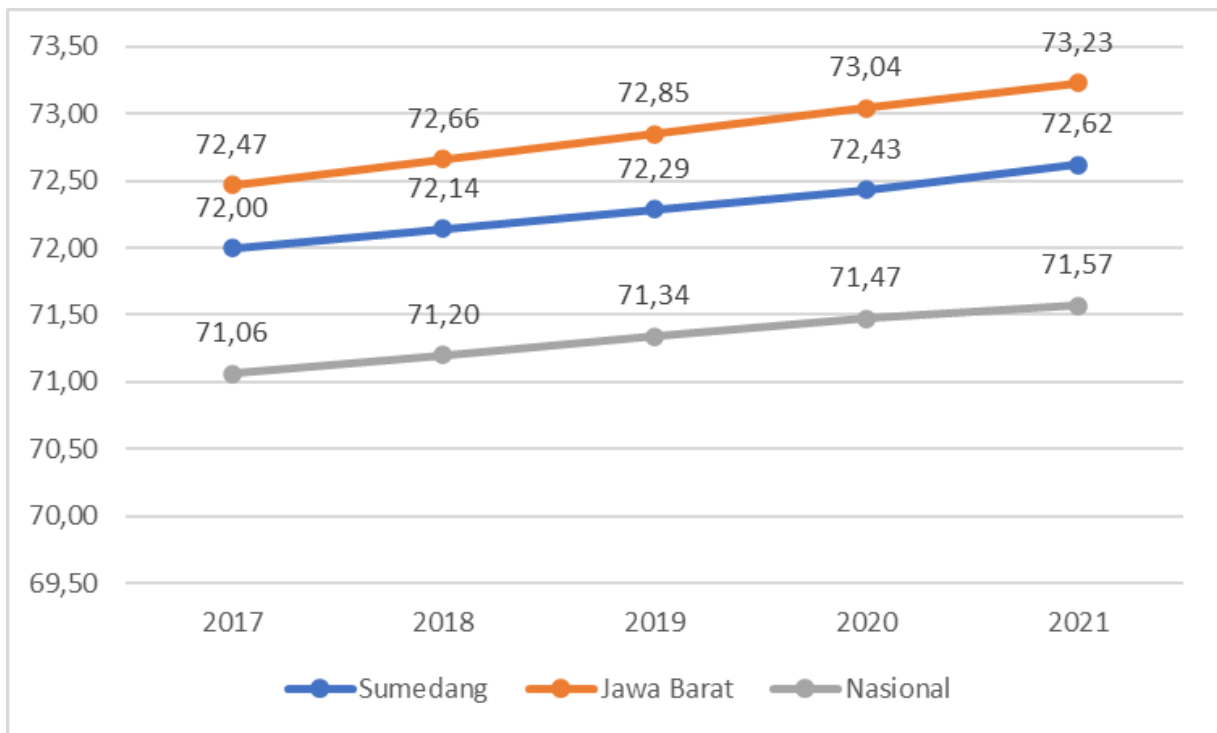
Urusan kesehatan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan dalam pemerintahan. Beberapa indikator yang menunjang sasaran Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, adalah sebagai berikut:

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah. AHH Kabupaten

Sumedang terus mengalami kenaikan seperti yang tersaji pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.29
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2021



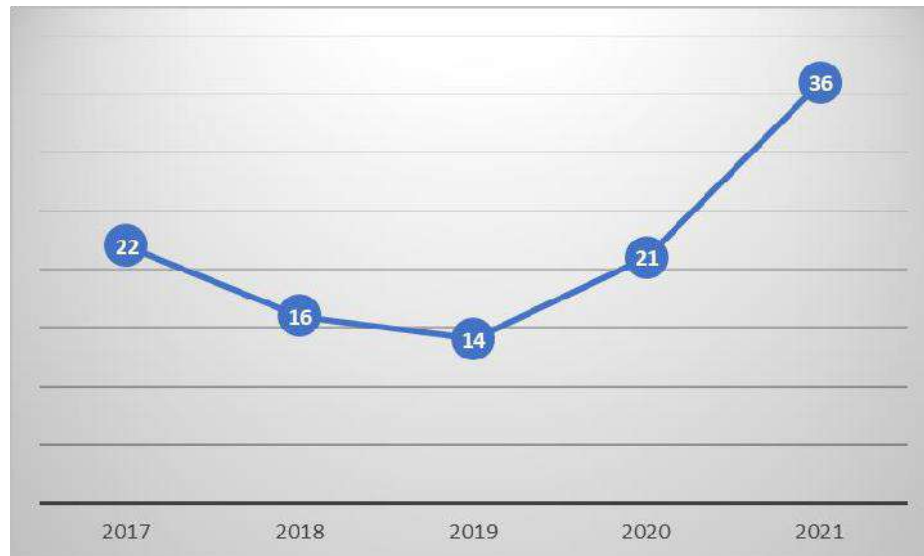
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2022) (diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa AHH Kabupaten Sumedang menunjukkan tren positif. Bahkan Tahun 2021 AHH Kabupaten Sumedang mencapai 72,62 tahun dengan capaian lebih tinggi dari AHH Nasional yaitu 71,57 tahun meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Jawa Barat sebesar 73,23 tahun. Dengan semakin tingginya AHH di Kabupaten Sumedang menandakan adanya keberhasilan dari beberapa program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Sumedang.

2) Jumlah Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI masih merupakan masalah tertinggi kesehatan di Indonesia dan tingginya AKI mencerminkan kualitas akan pelayanan kesehatan. Pendataan mengenai AKI sangat bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas resiko tinggi.

Grafik 2.30
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022) (diolah)

Berdasarkan Grafik 2.30, bahwa sejak Tahun 2020 tren Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan dan Tahun 2021 merupakan tahun dengan kasus tertinggi kematian ibu sepanjang 5 (lima) tahun terakhir dengan jumlah kasus sebanyak 36 kematian ibu. Adapun penyebab utama kasus kematian ibu adalah terjadinya keterlambatan penanganan pasien karena kurang adekuatnya rantai rujukan dan adanya pembatasan penerimaan jumlah pasien dari fasilitas kesehatan pertama pada fasilitas tempat rujukan. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa penyebab kematian ibu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kasus Tahun 2021

No	Kasus	Jumlah
1.	Covid-19	17
2.	Pendarahan	7
3.	Hipertensi	4
4.	Penyakit jantung	2
5.	Infeksi	1
6.	Lain-lain	5

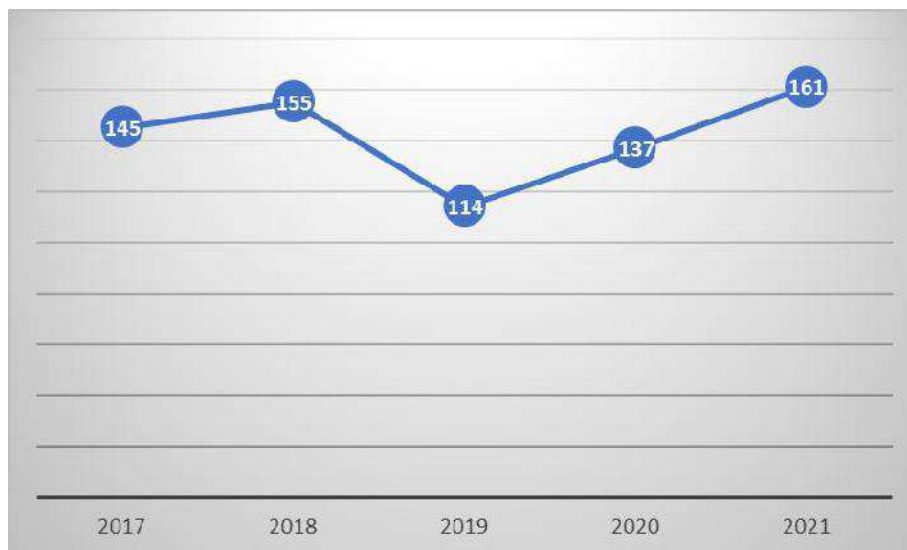
Jumlah	36
--------	----

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022) (diolah)

3) Jumlah Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tren rasio kematian bayi sangat fluktuatif. Tahun 2021 merupakan realisasi tertinggi jumlah kematian bayi di Kabupaten Sumedang yaitu sebanyak 161 jiwa dari 17.881 kelahiran hidup, atau mengalami kenaikan sebanyak 24 jiwa dari Tahun 2020. Adapun penyebab tertinggi angka kematian bayi tersebut adalah bayi berat lahir rendah (BBLR) yang disebabkan oleh ibu yang mengalami hipertensi dalam kehamilan, kelahiran gemelli (kehamilan kembar), anemia serta Kekurangan Energi Kronis (KEK). Tren Rasio Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021 disajikan dalam gambar berikut.

Grafik 2.31
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021



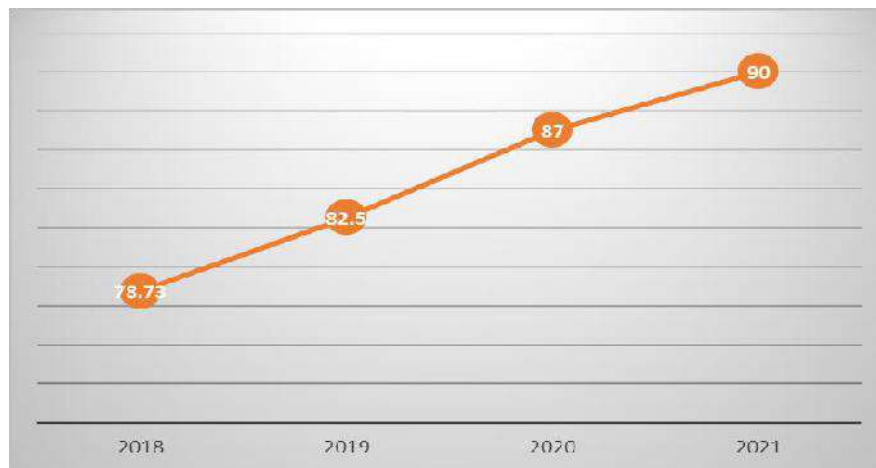
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022) (diolah)

4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan

Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dari IKM salah satunya untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan kesehatan dari

waktu ke waktu. Berikut adalah capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2021.

Grafik 2.32
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

Berdasarkan data di atas, IKM bidang kesehatan di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan. Tahun 2021 capaian IKM bidang kesehatan merupakan capaian tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 90 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik khususnya kesehatan kepada masyarakat.

5) Angka Kematian Akibat DBD (CFR DBD)

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus *dengue* yang ditandai demam 2 – 7 hari disertai dengan manifestasi perdarahan, penurunan trombosit (*trombositopenia*), disertai juga dengan gejala-gejala tidak khas seperti nyeri kepala, nyeri otot dan tulang, ruam kulit atau nyeri belakang bola mata. Cakupan Kasus DBD dan penanganannya di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Grafik 2.33
Cakupan Kasus DBD di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

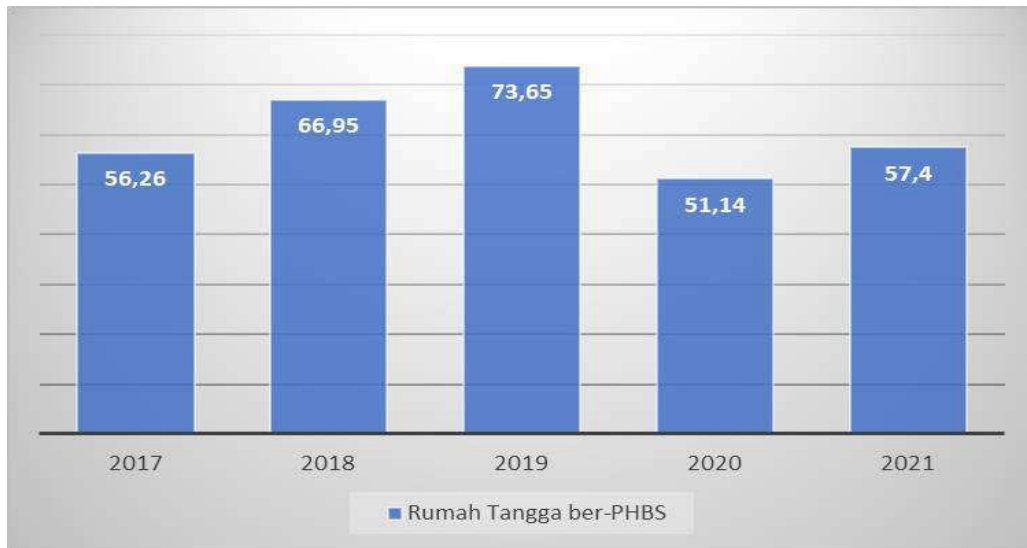
Berdasarkan data di atas, kasus DBD di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan terutama pada Tahun 2021 mencapai 1.331 kasus dan merupakan kasus tertinggi di Kabupaten Sumedang. Beberapa faktor penyebab tingginya kasus DBD di Kabupaten Sumedang antara lain adanya musim hujan yang berlangsung relatif lama, daya tahan tubuh yang buruk, serta kesehatan lingkungan yang masih buruk.

6) Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga (PHBS RT) merupakan rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat. Indikator PHBS-RT meliputi 10 (sepuluh) indikator antara lain Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan; Pemberian Bayi ASI Eksklusif; Penimbangan Balita; Penggunaan Air Bersih; Cuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun; Penggunaan Jamban Sehat; Memberantas Jentik di Rumah 1 (satu) kali Seminggu; Makan Buah dan Sayur Setiap Hari; Melakukan Aktivitas Fisik Setiap Hari; dan Tidak Merokok di dalam Rumah. Pemenuhan indikator PHBS-RT disesuaikan dengan jenis indikator yang terdapat dalam masing-masing rumah tangga.

Program PHBS adalah upaya untuk pengalaman belajar bagi perorangan, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pelaksanaan PHBS berpengaruh terhadap penanggulangan masalah kesehatan melalui pencegahan terjadinya kesakitan ataupun kematian. Berikut adalah jumlah Rumah Tangga ber-PHBS di Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.34
Persentase Rumah Tangga ber-PHBS di Kabupaten Sumedang
Tahun 2017-2021



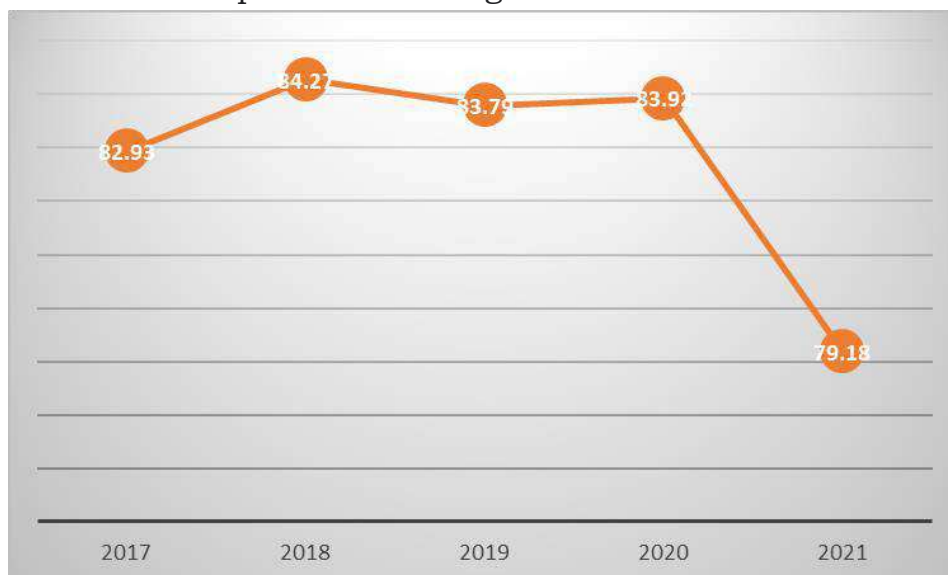
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022) (diolah)

Berdasarkan data diatas bahwa rumah tangga ber-PHBS terus meningkat setiap tahunnya, kecuali pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 22,51% dari Tahun 2019 menjadi 51,41. Penurunan ini terjadi karena kegiatan PHBS seperti pendataan dari rumah ke rumah serta kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat belum dapat dilaksanakan dengan selama masa pandemi *Covid-19*. Namun pada Tahun 2021 persentase rumah tangga ber-PHBS kembali naik menjadi 57,4% karena masyarakat mulai dilibatkan kembali dalam beberapa program PHBS pemerintah walaupun dengan batasan jumlah peserta serta mulai digalakkannya kembali sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kesehatan kepada masyarakat.

7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit

Berdasarkan Grafik 2.35 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Rumah Sakit berfluktuasi. Pada Tahun 2021 terjadi penurunan disebabkan Rumah Sakit Umum Daerah dikonsentrasikan sebagai Rumah Sakit yang menangani pasien *Covid-19* sehingga pelayanan rawat jalan dan rawat inap bagi pasien biasa ditutup sementara, sehingga pasien biasa hanya dilayani oleh fasilitas kesehatan pertama.

Grafik 2.35
Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2021



Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang (2021)

8) Akreditasi Rumah Sakit Sesuai Standar Nasional

Penilaian akreditasi untuk Rumah Sakit dilakukan 4 (empat) tahun sekali. Pada awal Tahun 2022, Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang dinilai Paripurna.

Gambar 2.5
Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Sumedang
Tahun 2022



Sumber : RSUD Kab. Sumedang (2021)

9) Cakupan SPM Memenuhi Standar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolak ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam

melayani masyarakat karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional. SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kesehatan ibu hamil merupakan masalah kesehatan yang harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Salah satu metode peningkatan kesehatan ibu hamil ialah dengan peningkatan pelayanan antenatal. Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada Ibu selama masa kehamilannya secara berkala. Tujuannya untuk pengawasan tumbuh kembang janin dalam rahim serta untuk menjaga keselamatan ibu dan janin.

Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui cakupan pelayanan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan cakupan K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, yakni paling sedikit 4 (empat) kali sesuai jadwal yang dianjurkan tiap trimester dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Tren pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang cenderung fluktuatif. Untuk cakupan pelayanan K1 selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami penurunan, kecuali pada Tahun 2020 naik menjadi 108,8% dari 105,7% pada Tahun 2019. Akan tetapi Tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 105,9%. Berbeda halnya dengan cakupan pelayanan K4 yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 cakupan pelayanan K4 sebesar 98,12% menjadi 100% di Tahun 2021. Meskipun demikian masih terdapat kesenjangan yang relatif besar antara cakupan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang, yang menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan lingkungan ibu hamil masih rendah serta adanya pandemi covid-19 yang membatasi kunjungan ibu hamil. Karena itu diperlukan upaya peningkatan peran bidan, meningkatkan peran dan dukungan suami serta keluarga agar ibu hamil dapat melaksanakan kunjungan antenatal *care* secara lengkap. Cakupan pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar berikut

Grafik 2.36
Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang
Tahun 2017 – 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Pelayanan kesehatan ibu bersalin merupakan salah satu cara untuk menurunkan kematian ibu dan bayi, yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan ibu bersalin ialah dengan melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun sangat fluktuatif. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah mencapai 100% yang artinya bahwa seluruh proses persalinan sudah seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Data tertinggi terjadi pada Tahun 2018 dan Tahun 2020 yaitu 105,9%. Untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada Tahun 2021 menurun 5,5% dari tahun sebelumnya menjadi 100,4%.

Grafik 2.37
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2017 – 2021

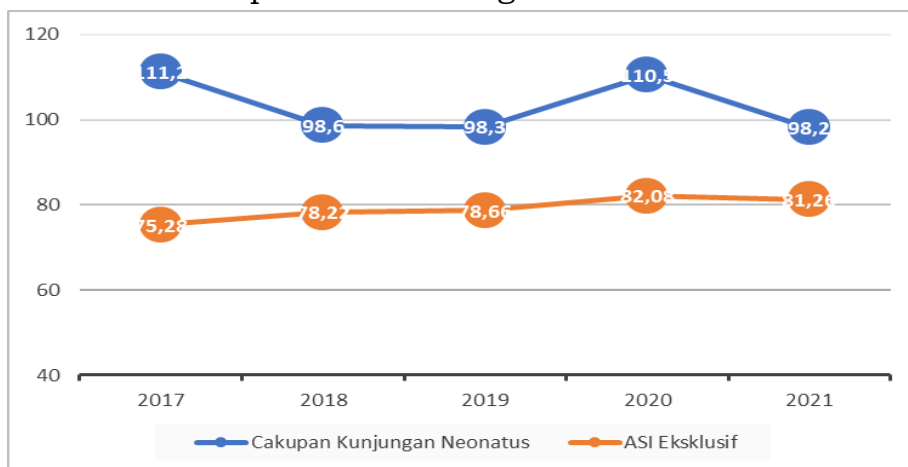


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir atau disebut juga pelayanan *Neonatus* ialah pelayanan yang digunakan untuk menunjang kesehatan bayi yang baru mengalami proses kelahiran dan baru berusia 0-28 hari dan diberikan secara adekuat yang meliputi pencegahan hipotermi, perawatan tali pusat, Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif serta pemberian imunisasi dan deteksi dini tanda bahaya. Berikut adalah Jenis Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021.

Grafik 2.38
Cakupan Kunjungan Neonatus dan Cakupan ASI Eksklusif
di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022) (diolah)

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir berupa kunjungan neonatal (KN) yakni kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 3 (tiga) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar fasilitas kesehatan seperti di bidan, polindes dan kunjungan ke rumah. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, sehingga dapat mengetahui sedini mungkin apabila terdapat kelainan atau masalah pada neonatus. Dengan demikian dapat diketahui efektivitas dan pelayanan kesehatan neonatal. Tren cakupan Kunjungan *Neonatus* di Kabupaten Sumedang setiap tahunnya sebagian besar mengalami penurunan. Penurunan terendah terjadi pada Tahun 2021 sebesar 12,3% dari tahun 2020 menjadi 98,2%. Penurunan ini sebagai salah satu akibat dari adanya pandemi covid-19 yang membatasi jumlah kunjungan tenaga kesehatan terhadap neonatus untuk meminimalisir sebaran *covid-19*.

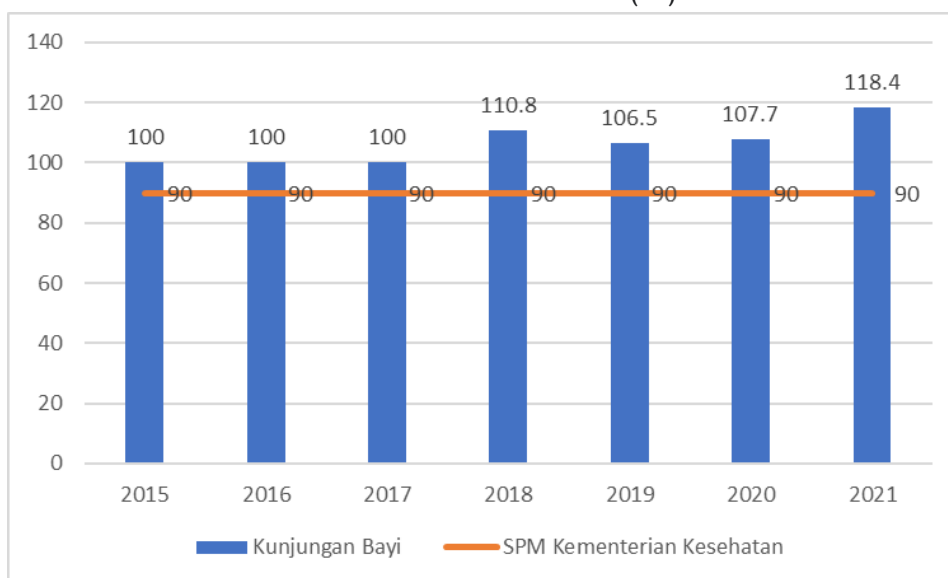
Pelayanan lainnya ialah Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif. IMD merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 (enam) bulan pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain. ASI menyediakan semua nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang bayi dan mengandung antibodi yang berfungsi melawan penyakit serta membantu menyempurnakan sistem kekebalan tubuh bayi. Proses untuk keberhasilan ASI eksklusif bayi 6 (enam) bulan dilaksanakan selama rentang usia bayi 0 sampai 5 bulan. Keberhasilan ASI eksklusif di Kabupaten Sumedang tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 82,08%, dan menunjukkan tren menurun dengan persentase 81,26% di Tahun 2021. Penurunan ini terjadi karena banyak faktor, diantaranya jumlah bayi ASI Eksklusif yang gugur sebelum usia 6 bulan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran ibu akan pentingnya ASI bagi pertumbuhan anak serta rendahnya implementasi regulasi pemberian ASI, sehingga terlihat regulasi tersebut agak teracuhkan. Selain itu juga meningkatkan kasus *covid-19* di Kabupaten Sumedang menyebabkan kurang intensifnya sosialisasi yang digalakkan oleh petugas kesehatan untuk mendorong ibu memberikan ASI eksklusif. Dengan demikian keberhasilan cakupan pemberian ASI eksklusif sangat dipengaruhi oleh kerja sama dari semua pihak.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Balita diartikan sebagai salah satu periode usia dengan rentang usia mulai 12-59 bulan. Masa balita merupakan masa keemasan atau disebut juga *golden period* yaitu masa ketika terbentuknya dasar-dasar kemampuan keindraan, berfikir, berbicara serta pertumbuhan mental intelektual yang intensif dan awal pertumbuhan moral. Pelayanan kesehatan balita meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan serta tata laksana balita sakit. Upaya deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita menjadi sangat penting agar dapat dikoreksi sedini mungkin sehingga mencegah gangguan ke arah yang lebih berat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan balita adalah cakupan kunjungan anak balita yang diartikan sebagai cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 (empat) kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sumedang pada grafik di bawah dapat dilihat sejak Tahun 2015 telah mencapai 100%, dan tren terus meningkat. Pada Tahun 2021 persentasenya hanya mencapai 118,4% atau 18.896 bayi telah mendapatkan pelayanan paripurna.

Grafik 2.39
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 – 2021 (%)



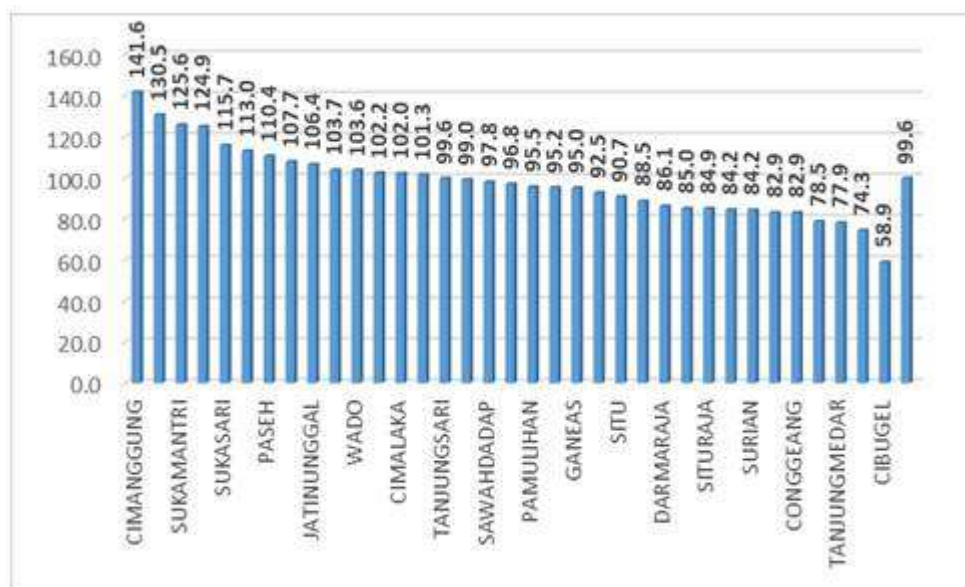
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

Cakupan kunjungan anak balita yang memperoleh pelayanan sesuai standar, meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 (delapan) kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali setahun,

pemberian Vitamin A sebanyak 2 (dua) kali setahun, dan pelayanan anak balita sakit sesuai standar.

Berdasarkan Grafik 2.40 dapat dilihat bahwa pencapaian cakupan kunjungan anak balita per Puskesmas Tahun 2021 hanya 14 Puskesmas yang mencapai target 100%, sedangkan 29 Puskesmas masih di bawah target, sehingga Cakupan Kunjungan Balita sebesar 99,6% atau sekitar 62.800 balita yang terlayani sesuai standar.

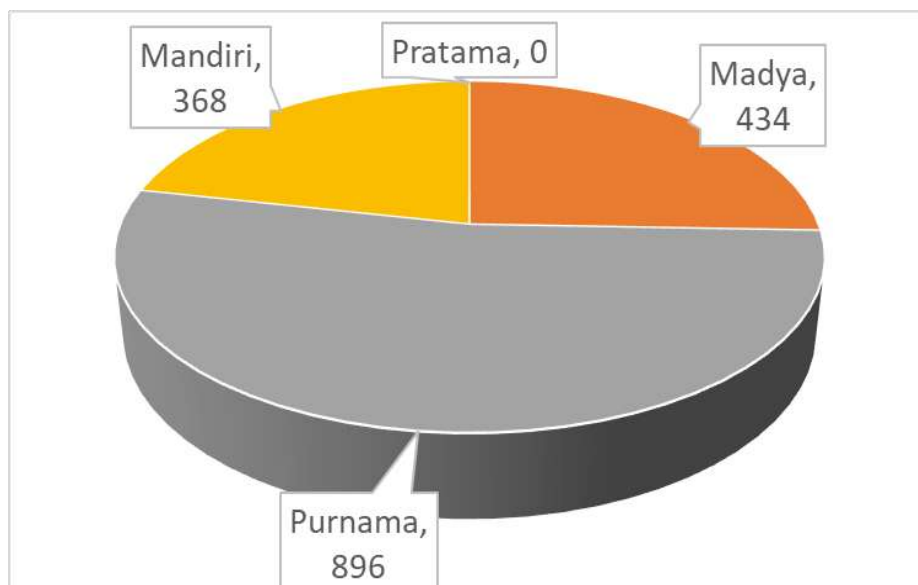
Grafik 2.40
Cakupan Kunjungan Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Sumedang Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

Pada Tahun 2021 terdapat 1.698 Posyandu dan Posyandu dengan strata mandiri sebanyak 21, 7% atau 368 Posyandu.

Grafik 2.41
Posyandu Menurut Strata Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

Posyandu merupakan kegiatan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar terutama bagi ibu, bayi dan anak balita. Posyandu memiliki 5 (lima) program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare.

Imunisasi yang diberikan pada bayi berupa imunisasi Hepatitis-B0 dengan 2 (dua) kategori pemberian imunisasi yaitu untuk bayi baru lahir kurang dari 24 jam dan bayi berumur 1-7 hari. Imunisasi lainnya yang diberikan adalah BCG, DPT -HB-HiB 3, Polio 4 dan Campak/MR. Dari 17.357 bayi lahir hidup, terdapat 15.381 bayi dengan imunisasi dasar lengkap atau sebanyak 88,6%.

Tabel 2.10
Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Bayi Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Berdasarkan Puskesmas Tahun 2021

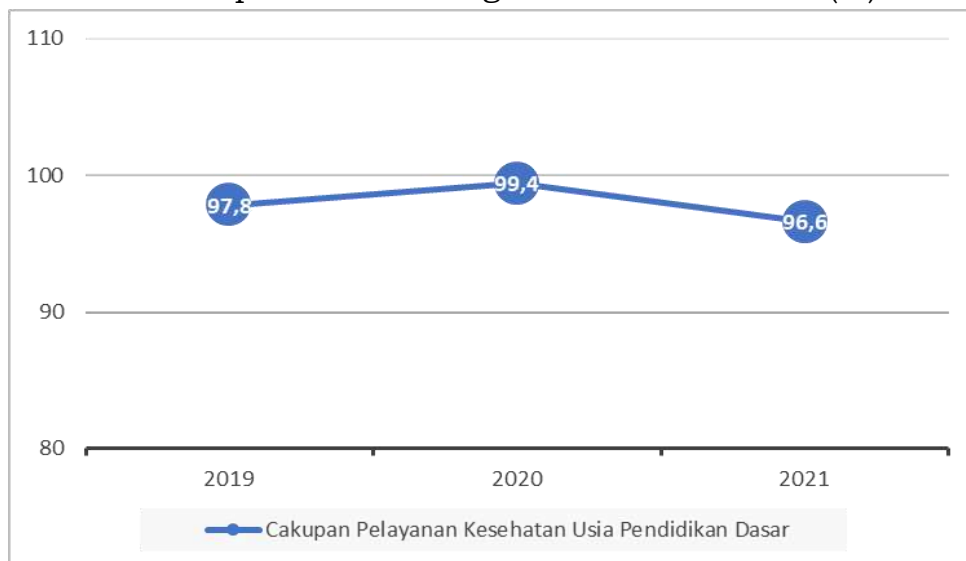
NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT)			IMUNISASI DASAR LENGKAP					
			L	P	L+P	L		P		L + P	
						JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	25	26	27	28	29	30
1	Jatinangor	Jatinangor	830	878	1,708	666	80.2	649	73.9	1,315	77.0
2		Cisempur	254	245	499	243	95.7	221	90.2	464	93.0
3	Cimanggung	Cimanggung	562	528	1,090	557	99.1	503	95.3	1,060	97.2
4		Sawahdadap	249	183	432	209	83.9	193	105.5	402	93.1
5	Tanjungsari	Tanjungsari	321	301	622	324	100.9	328	109.0	652	104.8
6		Margajaya	377	337	714	290	76.9	261	77.4	551	77.2
7	Sukasari	Sukasari	273	274	547	267	97.8	266	97.1	533	97.4
8	Pamulihan	Haurngombong	250	173	423	169	67.6	157	90.8	326	77.1
9		Pamulihan	259	197	456	219	84.6	235	119.3	454	99.6
10	Rancakalong	Rancakalong	270	311	581	290	107.4	293	94.2	583	100.3
11	Sumedang Selatan	Sumedang Selatan	390	429	819	371	95.1	361	84.1	732	89.4
12		Sukagalih	176	179	355	157	89.2	162	90.5	319	89.9
13	Sumedang Utara	Kotakaler	155	112	267	131	84.5	130	116.1	261	97.8
14		Situ	373	404	777	317	85.0	320	79.2	637	82.0
15		Padasuka	163	138	301	112	68.7	123	89.1	235	78.1
16	Ganeas	Ganeas	177	186	363	152	85.9	143	76.9	295	81.3
17	Situraja	Situraja	210	252	462	222	105.7	226	89.7	448	97.0
18	Cisitu	Cisitu	223	189	412	201	90.1	165	87.3	366	88.8
19	Darmaraja	Darmaraja	294	279	573	225	76.5	228	81.7	453	79.1
20	Cibugel	Cibugel	132	137	269	167	126.5	153	111.7	320	119.0
21	Wado	Wado	331	252	583	281	84.9	288	114.3	569	97.6
22	Jatinunggal	Jatinunggal	316	275	591	275	87.0	263	95.6	538	91.0
23	Jatigede	Jatigede	124	96	220	148	119.4	117	121.9	265	120.5
24	Tomo	Tomo	146	112	258	143	97.9	124	110.7	267	103.5
25	Ujungjaya	Ujungjaya	254	248	502	216	85.0	215	86.7	431	85.9
26	Conggeang	Conggeang	201	200	401	182	90.5	160	80.0	342	85.3
27	Paseh	Paseh	331	265	596	236	71.3	227	85.7	463	77.7
28	Cimalaka	Cimalaka	496	429	925	358	72.2	347	80.9	705	76.2
29	Cisarua	Cisarua	189	150	339	151	79.9	104	69.3	255	75.2
30	Tanjungkerta	Sukamantri	114	106	220	122	107.0	110	103.8	232	105.5
31		Tanjungkerta	93	78	171	64	68.8	51	65.4	115	67.3
32	Tanjungmedar	Tanjungmedar	170	141	311	137	80.6	164	116.3	301	96.8
33	Buahdua	Buahdua	139	157	296	131	94.2	110	70.1	241	81.4
34		Hariang	81	60	141	73	90.1	72	120.0	145	102.8
35	Surian	Surian	80	53	133	53	66.3	53	100.0	106	79.7
JUMLAH (KAB/KOTA)			9,003	8,354	17,357	7,859	87.3	7,522	90.0	15,381	88.6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Usia Pendidikan Dasar berkisar antara 6-12 Tahun. Pada usia tersebut pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia serta keterampilan yang dikuasai pun semakin beragam. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah merupakan salah satu indikator SPM urusan kesehatan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Sasaran pelayanan kesehatan adalah anak usia sekolah yang berada dalam kuasa asuh dari orang tua/wali, maka informasi penjangkaran kesehatan/pemeriksaan berkala perlu diberikan untuk orangtua/wali. Pelayanan kesehatan merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya agar terhindar dari keadaan yang lebih buruk, selain itu juga dengan adanya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dapat diperoleh data dan informasi mengenai perkembangan anak. Adapun jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan antara lain penilaian riwayat kesehatan, penilaian status imunisasi, riwayat kesehatan keluarga, penilaian perilaku berisiko, penilaian kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kesehatan intelegensia, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan kebersihan diri, pemeriksaan kesehatan indera penglihatan, pemeriksaan kesehatan indera pendengaran, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan kebugaran jasmani yang dilakukan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali di sekolah. Hasil dari pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut.

Grafik 2.42
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2021 (%)



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

Berdasarkan Grafik diatas cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 100%. Namun jika dilihat dari trennya pada Tahun 2020 mencapai 99,4% atau meningkat 1,6% dari Tahun 2019. Sedangkan pada Tahun 2021 kembali menurun menjadi 96,6%. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai jadwal pemeriksaan yang disampaikan oleh petugas/guru kepada komite sekolah sehingga pada saat pelayanan kesehatan ada siswa yang tidak hadir, selain itu belum optimalnya *sweeping* yang dilakukan oleh petugas dan peran dari Tim TP UKS di tiap tingkatan serta kegiatan masih dianggap hanya bertumpu pada sektor kesehatan yakni Dinas Kesehatan.

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Usia produktif berkisar antara 15-59 Tahun dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi (termasuk keluarga berencana) dan skrining kesehatan di wilayahnya dalam kurun waktu satu tahun. Skrining usia produktif merupakan salah satu indikator SPM bidang kesehatan, sehingga Pemerintah Daerah wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Skrining kesehatan dilakukan untuk mengamati faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Berikut adalah Sebaran Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Tabel 2.11

Sebaran Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN															
			JUMLAH			MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR						BERISIKO						
						LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jatinangor	Jatinangor	21,162	30,249	51411	19,921	94.1	26,881	98.8	46802	96.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
2		Cisempur	11,765	16,568	28333	10,629	122.0	15,943	96.2	26572	93.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3	Cimanggung	Cimanggung	17,815	20,195	38010	14,358	80.6	21,536	106.6	35894	94.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4		Sawandadap	9,571	11,776	21347	8,504	88.5	12,705	108.3	21209	99.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5	Tanjungsari	Tanjungsari	10,986	13,751	24737	9,743	88.7	14,614	106.3	24357	98.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6		Margajaya	14,270	17,294	31564	11,387	79.5	17,080	98.8	28467	90.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7		Sukasari	10,654	12,340	22994	7,568	70.9	11,336	91.9	18894	82.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8	Pamulihan	Haurgombong	8,386	10,866	19252	6,216	74.0	12,325	113.4	20941	106.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9		Pamulihan	9,425	11,525	20950	9,454	100.3	14,181	123.0	23635	112.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
10	Rancakalong	Rancakalong	12,485	15,117	27602	10,796	86.5	16,194	107.1	26990	97.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
11	Sumedang Selatan	Sumedang Selatan	16,767	20,717	37484	13,667	81.5	20,500	99.0	34167	91.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
12		Dukagalih	7,536	9,652	17188	8,534	113.2	12,801	132.6	21336	124.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
13	Sumedang Utara	Kotakaler	7,136	8,874	16010	7,206	101.0	10,808	121.8	18014	112.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
14		Situ	16,565	20,936	37501	11,293	68.2	16,939	80.9	28232	75.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
15		Padasuka	5,238	6,617	11855	5,670	108.3	8,506	128.5	14176	119.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
16	Geneas	Geneas	7,654	9,665	17319	7,261	94.9	10,891	112.7	18152	104.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
17	Situraja	Situraja	10,276	16,227	26503	10,496	102.1	15,745	97.0	26241	99.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
18	Cisitu	Cisitu	8,576	10,757	19333	7,660	89.3	11,491	106.8	19151	99.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
19	Darmaraja	Darmaraja	12,211	15,124	27335	11,661	95.5	17,492	113.7	29103	106.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
20	Cihugel	Cihugel	6,775	8,496	15271	6,084	89.8	9,127	107.4	15211	99.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
21	Wado	Wado	14,217	17,387	31604	10,620	74.7	15,931	91.6	26551	84.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
22	Jatinunggal	Jatinunggal	13,528	16,758	30286	11,760	86.9	17,640	105.3	29400	97.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
23	Jatigede	Jatigede	7,654	9,889	17543	5,601	74.2	8,522	86.2	14203	81.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
24	Tomo	Tomo	7,782	9,667	17449	6,996	89.9	10,495	108.6	17491	100.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
25	Ujungjaya	Ujungjaya	9,867	11,645	21512	7,003	71.0	10,504	90.2	17507	81.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
26	Conggeang	Conggeang	9,435	11,886	21321	7,410	78.5	11,114	93.5	18524	86.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
27	Pasoh	Pasoh	11,853	14,697	26550	10,330	87.2	15,495	105.4	25625	97.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
28	Cimalaka	Cimalaka	18,684	23,065	41749	13,914	74.5	20,872	90.5	34789	83.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
29	Cisarua	Cisarua	6,544	7,546	14090	6,113	93.4	9,170	121.5	15283	108.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
30	Tanjungkerta	Sukamantri	5,321	7,563	12884	5,308	100.7	8,038	106.3	13389	104.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
31		Tanjungkerta	5,986	6,664	11750	4,278	71.4	6,417	96.3	10699	91.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
32	Tanjungmedar	Tanjungmedar	7,365	10,420	17785	7,742	105.1	11,613	111.4	19355	108.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
33	Buahdua	Buahdua	6,672	9,227	15899	7,014	105.1	10,521	114.0	17335	110.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
34		Herlisan	3,245	4,477	7722	2,769	85.3	4,134	92.6	6923	89.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
35	Surian	Surian	3,359	4,639	7998	2,926	87.1	4,388	94.6	7314	91.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
JUMLAH (KAB/KOTA)			355,865	452,276	808100	310,012	87.1	465,019	102.8	775,031	95.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

Dari data tersebut sebanyak 35 puskesmas melakukan skrining kesehatan untuk usia produktif yang tersebar di seluruh kecamatan dengan memilah berdasarkan jenis kelamin. Total jumlah penduduk (laki-laki dan perempuan) yang terdata adalah 808.591 jiwa sedangkan yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar hanya 775.031 jiwa atau 95% dari target 100% sehingga terdapat selisih 33.560 jiwa yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis sebab-sebab penduduk usia produktif tersebut belum mendapatkan pelayanan kesehatan melalui penyusunan strategi untuk menjangkau seluruh penduduk usia produktif agar seluruhnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut diberikan kepada setiap warga yang telah berusia 60 tahun ke atas. Bentuk pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular sesuai standar paling sedikit 1 (satu) kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Tujuan dari pelayanan kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pada lansia untuk memelihara kesehatan sendiri, meningkatkan kemampuan serta peran serta keluarga dan masyarakat dalam mengatasi kesehatan lansia, meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan lansia serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia.

Pelayanan kesehatan penduduk usia lansia di Kabupaten Sumedang berupa skrining yang dilakukan di 26 Kecamatan pada 35 puskesmas dengan jumlah penduduk usia lanjut sebanyak 189.426 jiwa. Adapun penduduk yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar berjumlah 147.535 jiwa atau 77,9%. Ini berarti belum seluruh penduduk usia lanjut mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut adalah Data Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Tabel 2.12
Data Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	USIA LANJUT (60TAHUN+)									
			JUMLAH			MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR						
			L	P	L+P	L	%	P	%	L+P	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	JATINANGOR	JATINANGOR	5,897	6,204	12,101	1,711	29.0	2,314	37.3	4,025	33.3	
2	JATINANGOR	CISEMPUR	3,237	3,405	6,642	834	25.8	1,883	55.3	2,717	40.9	
3	CIMANGGUNG	CIMANGGUNG	4,342	4,568	8,910	20,249	466.3	25,598	560.4	45,847	514.5	
4	CIMANGGUNG	SAWAHDADAP	2,439	2,565	5,004	737	30.2	2,886	112.5	3,623	72.4	
5	TANJUNGSARI	TANJUNGSARI	2,826	2,973	5,799	2,182	77.2	2,649	89.1	4,831	83.3	
6	TANJUNGSARI	MARGAJAYA	3,606	3,793	7,399	751	20.8	952	25.1	1,703	23.0	
7	SUKASARI	SUKASARI	2,627	2,763	5,390	2,475	94.2	3,077	111.4	5,552	103.0	
8	PAMULIHAN	HAURNGOMBONG	2,199	2,313	4,512	765	34.8	1,456	62.9	2,221	49.2	
9	PAMULIHAN	PAMULIHAN	2,393	2,518	4,911	1,486	62.1	2,091	83.0	3,577	72.8	
10	RANCAKALONG	RANCAKALONG	3,153	3,317	6,470	4,084	129.5	5,293	159.6	9,377	144.9	
11	SUMEDANG SELATAN	SUMEDANG SELATAN	4,282	4,505	8,787	1,211	28.3	2,054	45.6	3,265	37.2	
12	SUMEDANG SELATAN	SUKAGALIH	1,963	2,066	4,029	636	32.4	889	43.0	1,525	37.8	
13	SUMEDANG UTARA	KOTAKALER	1,829	1,924	3,753	1,472	80.5	1,736	90.2	3,208	85.5	
14	SUMEDANG UTARA	SITU	4,284	4,507	8,791	2,178	50.8	2,524	56.0	4,702	53.5	
15	SUMEDANG UTARA	PADASUKA	1,329	1,398	2,727	1,238	93.1	2,347	167.9	3,585	131.5	
16	GANEAS	GANEAS	1,978	2,081	4,059	1,007	50.9	2,491	119.7	3,498	86.2	
17	SITURAJA	SITURAJA	3,028	3,185	6,213	159	5.3	699	21.9	858	13.8	
18	CISITU	CISITU	2,209	2,323	4,532	141	6.4	182	7.8	323	7.1	
19	DARMARAJA	DARMARAJA	3,123	3,285	6,408	685	21.9	853	26.0	1,538	24.0	
20	CIBUGEL	CIBUGEL	1,744	1,835	3,579	720	41.3	1,139	62.1	1,859	51.9	
21	WADO	WADO	3,610	3,798	7,408	898	24.9	1,506	39.7	2,404	32.4	
22	JATINUNGGAL	JATINUNGGAL	3,460	3,640	7,100	2,247	64.9	3,073	84.4	5,320	74.9	
23	JATIGEDE	JATIGEDE	2,004	2,108	4,112	1,774	88.5	2,578	122.3	4,352	105.8	
24	TOMO	TOMO	1,993	2,097	4,090	833	41.8	900	42.9	1,733	42.4	
25	UJUNGJAYA	UJUNGJAYA	2,457	2,585	5,042	702	28.6	1,372	53.1	2,074	41.1	
26	CONGGEANG	CONGGEANG	2,436	2,562	4,998	773	31.7	817	31.9	1,590	31.8	
27	PASEH	PASEH	3,033	3,191	6,224	2,558	84.3	3,332	104.4	5,890	94.6	
28	CIMALAKA	CIMALAKA	4,769	5,017	9,786	1,302	27.3	1,963	39.1	3,265	33.4	
29	CISARUA	CISARUA	1,610	1,693	3,303	143	8.9	170	10.0	313	9.5	
30	TANJUNGGAL	SUKAMANTRI	1,467	1,543	3,010	699	47.6	1,109	71.9	1,808	60.1	
31	TANJUNGGAL	TANJUNGGAL	1,342	1,412	2,754	804	59.9	1,221	86.5	2,025	73.5	
32	TANJUNGGAL	TANJUNGGAL	2,032	2,137	4,169	508	25.0	1,096	51.3	1,604	38.5	
33	BUAHDUA	BUAHDUA	1,816	1,911	3,727	182	10.0	297	15.5	479	12.9	
34	BUAHDUA	HARIANG	883	929	1,812	308	34.9	434	46.7	742	40.9	
35	SURIAN	SURIAN	914	961	1,875	2,524	276.3	3,578	372.3	6,102	325.5	
JUMLAH (KAB/KOTA)			92,314	97,112	189,426	60,976	66.1	86,559	89.1	147,535	77.9	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang paling umum dan paling banyak disandang masyarakat. Hipertensi disebut sebagai *the silent killer* karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Hipertensi merupakan penyakit yang berada pada 10 (sepuluh) besar penyakit di Kabupaten Sumedang. Tabel di bawah ini adalah Data Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021.

Tabel 2.13
Data Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Sumedang Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN			MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN					
			LAKHLAKI	PEREMPUAN	LAKHLAKI + PEREMPUAN	LAKHLAKI		PEREMPUAN		LAKHLAKI + PEREMPUAN	
						JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jatinangor	Jatinangor	7500	8353	15853	10432	139,1	10.532	126,1	20.964	132,2
2		Cisempur	4301	4.400	8701	3120	72,5	5.241	119,1	3.361	96,1
3	Cimanggung	Cimanggung	5322	6.351	11673	5123	96,3	5.144	81,0	10.267	88,0
4		Sawahdadap	3500	3.056	6556	3221	92,0	3.431	112,3	6.652	101,5
5	Tanjungsari	Tanjungsari	3252	4.345	7597	3001	92,3	4.305	99,1	7.305	96,2
6		Margajaya	4341	5.352	9693	4023	92,7	5.022	93,8	9.045	93,3
7	Sukasari	Sukasari	3031	4.031	7062	3234	106,7	3.543	87,9	6.777	96,0
8	Pamulihan	Haungbong	2301	3.611	5912	1435	62,4	4.452	123,3	5.887	99,6
9		Pamulihan	3211	3.223	6434	2242	69,8	5.150	159,8	7.392	114,9
10	Rancakalong	Rancakalong	4222	4.255	8477	3105	73,5	5.011	117,8	8.115	95,7
11	Sumedang Selatan	Sumedang Selatan	5202	6.310	11512	4321	83,1	5.325	84,4	9.646	83,8
12		Sukagalih	2134	3.145	5279	2123	99,5	4.013	127,6	6.135	116,2
13	Sumedang Utara	Kotakaler	1404	3.513	4917	2021	143,9	4.022	114,5	6.043	122,9
14		Situ	5302	6.215	11517	4452	84,0	5.532	89,0	9.984	86,7
15		Padasuka	1271	2.302	3573	2121	166,9	2.521	109,5	4.642	129,9
16	Ganeas	Ganeas	2204	3.115	5319	2543	115,4	3.300	105,9	5.843	109,9
17	Situraja	Situraja	3127	5.012	8139	3024	96,7	4.445	88,7	7.469	91,8
18	Cisitu	Cisitu	2422	3.515	5937	3048	125,8	3.041	86,5	6.089	102,6
19	Darmaraja	Darmaraja	3252	5.143	8395	3224	99,1	3.425	66,6	6.649	79,2
20	Cibugel	Cibugel	1650	3.040	4690	3120	189,1	2.130	70,1	5.250	111,9
21	Wado	Wado	4203	5.503	9706	4402	104,7	4.363	79,3	8.765	90,3
22	Jatinunggal	Jatinunggal	3101	6.200	9301	2130	68,7	5.121	82,6	7.251	78,0
23	Jatigede	Jatigede	2142	3.246	5388	2000	93,4	3.001	92,5	5.001	92,8
24	Tomo	Tomo	2146	3.213	5359	1332	62,1	3.332	103,7	4.664	87,0
25	Ujungjaya	Ujungjaya	2202	4.404	6606	2411	109,5	3.541	80,4	5.952	90,1
26	Conggeang	Conggeang	3425	3.123	6548	1580	46,1	5.012	160,5	6.592	100,7
27	Paseh	Paseh	3122	5.032	8154	2023	64,8	5.024	99,8	7.047	86,4
28	Cimalaka	Cimalaka	6411	6.411	12822	6122	95,5	6.655	103,8	12.777	99,6
29	Cisarua	Cisarua	2113	2.214	4327	1124	53,2	3.004	137,7	4.128	95,4
30	Tanjungkerta	Sukanantri	1422	2.522	3944	1002	70,5	3.090	122,5	4.092	103,8
31		Tanjungkerta	1302	2.306	3608	2420	185,9	2.320	100,6	4.740	131,4
32	Tanjungmedar	Tanjungmedar	2121	3.341	5462	1000	47,1	4.002	119,8	5.002	91,6
33	Buahdua	Buahdua	2321	2.562	4883	1411	60,8	3.300	128,8	4.711	96,5
34		Hariang	1232	1.142	2374	1443	117,1	1.443	126,4	2.885	121,6
35	Surian	Surian	1143	1.313	2456	1342	117,4	1.443	109,9	2.785	113,4
JUMLAH (KAB/KOTA)			99855	132466	248174	100675	100,8	144236	108,9	244911	98,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

Berdasarkan Tabel diatas jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Sumedang sebanyak 248.174 jiwa dan didominasi oleh penderita berjenis kelamin perempuan (132.466 jiwa). Adapun penderita yang mendapat pelayanan kesehatan telah mencapai 244.911 jiwa atau 98,7% hampir mendekati target yang telah ditentukan.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Diabetes Melitus (DM) atau Kencing Manis merupakan penyakit saat kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula didalam darah tidak dapat dimetabolisme. *Diabetes Melitus* disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Berikut adalah Data Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus* (DM) di Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Tabel 2.14
Data Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
di Kabupaten Sumedang Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDERITA DM	PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Jatinangor	Jatinangor	4111	2792	67.9
2		Cisempur	2556	2179	85.3
3	Cimanggung	Cimanggung	3027	2135	70.5
4		Sawahdadap	1700	1951	114.8
5	Tanjungsari	Tanjungsari	1970	2170	110.2
6		Mergajaya	2513	2206	87.8
7	Sukasari	Sukasari	1831	2233	122.0
8	Pamulihan	Haurngombong	1533	1567	102.2
9		Pamulihan	1668	1612	96.6
10	Rancakalong	Rancakalong	2198	1642	74.7
11	Sumedang Selatan	Sumedang Selatan	2985	1717	57.5
12		Sukagalih	2369	1427	60.2
13	Sumedang Utara	Kotakaler	1275	2397	188.0
14		Situ	2986	1552	52.0
15		Padasuka	927	1517	163.6
16	Ganeas	Ganeas	1379	1569	113.8
17	Situraja	Situraja	2111	1531	72.5
18	Cisitu	Cisitu	1540	1666	108.2
19	Darmaraja	Darmaraja	2177	1545	71.0
20	Cibugel	Cibugel	1216	1373	112.9
21	Wado	Wado	1390	1605	115.5
22	Jatinunggal	Jatinunggal	2412	1502	62.3
23	Jatigede	Jatigede	1397	1451	103.9
24	Tomo	Tomo	1390	1920	138.1
25	Ujungjaya	Ujungjaya	1713	2034	118.7
26	Conggeang	Conggeang	1698	1936	114.0
27	Paseh	Paseh	2114	1972	93.3
28	Cimalaka	Cimalaka	3325	1446	43.5
29	Cisarua	Cisarua	1122	1836	163.6
30	Tanjungkerta	Sukamantri	936	1425	152.2
31		Tanjungkerta	1416	1796	126.8
32	Tanjungmedar	Tanjungmedar	1416	1796	126.8
33	Buahdua	Buahdua	1266	1783	140.8
34		Hariang	616	1822	295.8
35	Surian	Surian	637	1302	204.4
JUMLAH (KAB/KOTA)			64920	62,409	96.1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

Pencapaian program diabetes melitus Tahun 2021 mencapai 62.409 jiwa atau 96,1%. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan yang ditunjang dengan pembiayaan APBN yaitu dengan penyediaan KIT Penyakit PTM yang berfungsi untuk deteksi dini penyakit diabetes melitus yang dilakukan di Posbindu PTM yang tersebar di seluruh kecamatan, meskipun belum semua Posbindu PTM (86,64%) mempunyai KIT PTM yang digunakan untuk deteksi dini diabetes melitus.

j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa berat (psikotik akut dan *skizofrenia*) sebagai upaya pencegahan sekunder, meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. Berdasarkan pencatatan dan pelaporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap ODGJ telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya deteksi dini faktor resiko kepada Dinas Instansi, Tatanan Pendidikan serta kepada komunitas masyarakat. Berikut adalah Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) di Kabupaten Sumedang Tahun 2021

Tabel 2.15
Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Kabupaten Sumedang Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT		
			SASARAN ODGJ BERAT	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	
1	2	3	4	JUMLAH	%
1	Jatinangor	Jatinangor	106	52	49.1
2		Cisempur	56	12	20.7
3	Cimanggung	Cimanggung	78	57	73.1
4		Sawahdadap	44	14	31.8
5	Tanjungsari	Tanjungsari	51	31	60.8
6		Margajaya	65	41	63.1
7	Sukasari	Sukasari	47	42	89.4
8	Pamulihan	Harungombong	36	46	117.9
9		Pamulihan	43	32	74.4
10	Rancakalong	Rancakalong	56	49	87.5
11	Sumedang Selatan	Sumedang Selatan	77	75	97.4
12		Sukagalih	35	39	111.4
13	Sumedang Utara	Kotakaler	33	24	72.7
14		Situ	77	54	70.1
15		Padauka	24	27	112.5
16	Ganeas	Ganeas	35	45	128.6
17	Siluraja	Siluraja	54	49	90.7
18	Cisitu	Cisitu	40	43	107.5
19	Darmaraja	Darmaraja	56	73	130.4
20	Cibugel	Cibugel	31	16	51.6
21	Wado	Wado	65	40	61.5
22	Jatinunggal	Jatinunggal	62	50	80.8
23	Jatigede	Jatigede	36	12	33.3
24	Tomo	Tomo	36	22	50.0
25	Ujungjaya	Ujungjaya	44	22	40.7
26	Conggeang	Conggeang	44	42	49.4
27	Paseh	Paseh	54	33	113.8
28	Cimalaka	Cimalaka	85	70	269.2
29	Cisarua	Cisarua	29	31	129.2
30	Tanjungkerta	Sukamantri	26	42	116.7
31		Tanjungkerta	24	26	78.8
32	Tanjungmedar	Tanjungmedar	36	36	105.5
33	Buahdua	Buahdua	33	52	157.6
34		Harlang	16	16	112.5
35	Surian	Surian	16	12	75.0
JUMLAH (KAB/KOTA)			1655	1331	80.4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

Berdasarkan Tabel 2.15 di atas, sasaran kasus ODGJ berat Tahun 2021 sebanyak 1.655 orang sedangkan yang mendapat pelayanan kesehatan hanya 1.331 orang atau sekitar 80,4% dari target 100% kasus ODGJ berat yang tertangani. Dengan demikian, pencapaian pelayanan kesehatan ODGJ Berat di Kabupaten Sumedang belum optimal dan masih perlu peningkatan seperti peningkatan kapasitas pengetahuan dokter dan petugas kesehatan jiwa, karena dari 35 Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Sumedang baru 5 (lima) Puskesmas yang sudah mempunyai petugas jiwa terlatih. Selain itu juga belum adanya rumah sakit khusus untuk ODGJ di Kabupaten Sumedang juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penanganan kasus ODGJ.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberculosis*

Tuberculosis (TBC) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Indonesia termasuk kedalam 5 (lima) besar Negara pengidap TBC di Asia Tenggara. Biaya yang perlu dikeluarkan untuk penanganan dan pengobatan TBC cukup besar dan berdampak langsung terhadap penderita maupun keluarga karena menyebabkan penurunan kinerja dan produktivitas penderita sehingga berdampak terhadap penurunan angka penghasilan keluarga, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut. Apalagi pada saat ini penyakit TB bukan hanya TB reguler, melainkan sudah banyak ditemukan kasus TB-HIV, TB-MDR, dan TB-DM yang memerlukan pengobatan dan penanganan khusus. Berikut adalah Jumlah Kasus TB di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021.

Grafik 2.43
Jumlah Penemuan Kasus TB di Kabupaten Sumedang Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

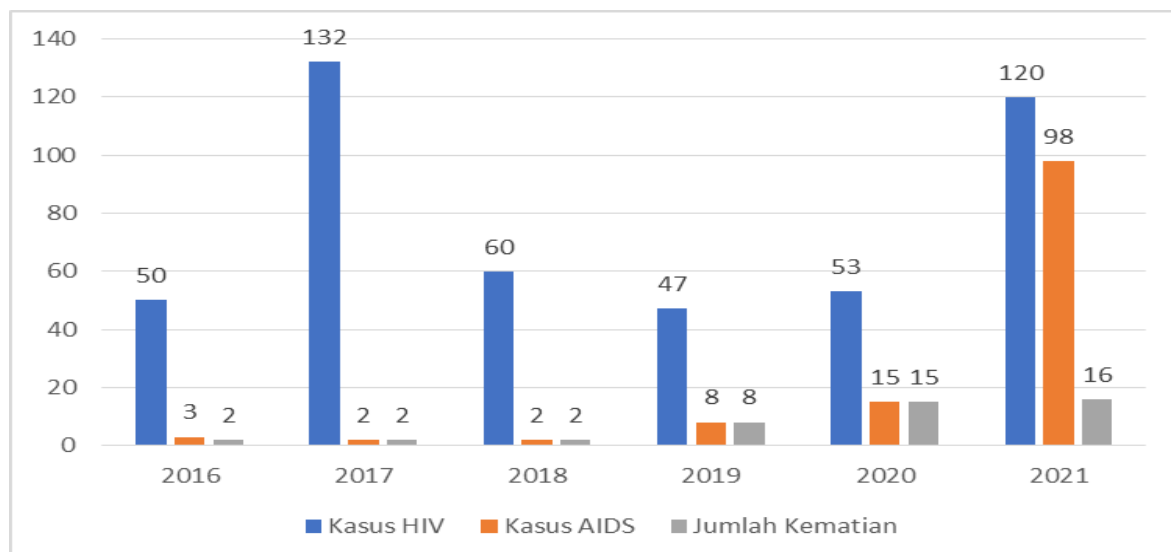
Berdasarkan Grafik di atas pada tahun 2021 penemuan kasus TB (kasus yang ditemukan serta yang diobati) mencapai 1.390 kasus yang tersebar di 26 Kecamatan. Dari kasus tersebut terdapat 184 kasus TB yang menyerang pada anak usia 0-14 Tahun. Jumlah kasus tertinggi terdapat di Kecamatan Cimalaka sebanyak 98 kasus dan kasus terendah terdapat di Kecamatan Tanjungmedar sebanyak 15 kasus.

1. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

HIV (*Human immunodeficiency virus*) merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Sampai dengan saat ini HIV masih belum dapat disembuhkan akan tetapi pengobatan untuk memperlambat perkembangan penyakit sudah tersedia. Sedangkan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan stadium akhir dari infeksi virus HIV dan pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.

Epidemi HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang telah terjadi perubahan dari “*low level epidemic*” menjadi “*concentrate level epidemic*” yang artinya penyebaran HIV/AIDS cepat terjadi pada sub populasi tertentu namun belum menyebar di populasi umum. Dampak penyebaran infeksi HIV/AIDS dan tingginya prevalensi di Kabupaten Sumedang dalam beberapa tahun terakhir menganggap masalah HIV/AIDS bukan hanya masalah medis dari penyakit menular saja akan tetapi sudah menjadi aspek kehidupan masyarakat baik dari sisi kesehatan, psikologi, sosial dan budaya. Tren jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2.44
Data Kasus HIV, AIDS dan Kematian di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Kesehatan (2022)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus HIV sangat fluktuatif. Kasus tertinggi terjadi pada Tahun 2017 sebanyak 132 kasus dan melandai di tahun-tahun berikutnya. Kenaikan kembali terjadi pada Tahun 2021 menjadi 120 kasus yang diiringi dengan kenaikan kasus AIDS dan Jumlah Kematian sebesar masing-masing 98 kasus dan 16 jiwa kasus kematian. Tingginya penemuan data kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang sebagai salah satu bentuk peningkatan usaha petugas kesehatan dalam penemuan kasus HIV/AIDS selain itu juga adanya peningkatan layanan *Voluntary Counselling and Testing (VCT)* yang sudah dikembangkan di 33 Puskesmas, sehingga jumlah kasus HIV/AIDS dapat ditemukan lebih cepat, lebih dini dan lebih akurat. Hal ini akan mempengaruhi terhadap proses pencegahan dan pengendalian setiap kasus terutama pada populasi kunci (WPS, LSL, Waria, Penasun) dan populasi khusus (Ibu hamil, Pasien TB dan Pasien IMS).

10) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Sesuai Standar

Fasilitas Kesehatan (Faskes) merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Faskes terbagi menjadi tingkat 1, 2 dan 3 dapat diartikan sebagai jenis tingkatan pelayanan kesehatan yang dihadirkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Fungsi Faskes yaitu sebagai tempat perawatan kesehatan membuat fasilitas publik yang satu ini sangat penting keberadaannya di setiap wilayah.

Faskes tingkat pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. FKTP meliputi puskesmas atau yang setara, praktek dokter, praktek dokter gigi, klinik pratama atau yang setara, dan Rumah Sakit kelas D atau yang setara. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu serta merata dan non diskriminatif. Sehingga setiap pasien dapat memperoleh pelayanan kesehatan efektif serta lebih mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. Berikut adalah Tren Kunjungan Pasien Puskesmas di Kabupaten Sumedang.

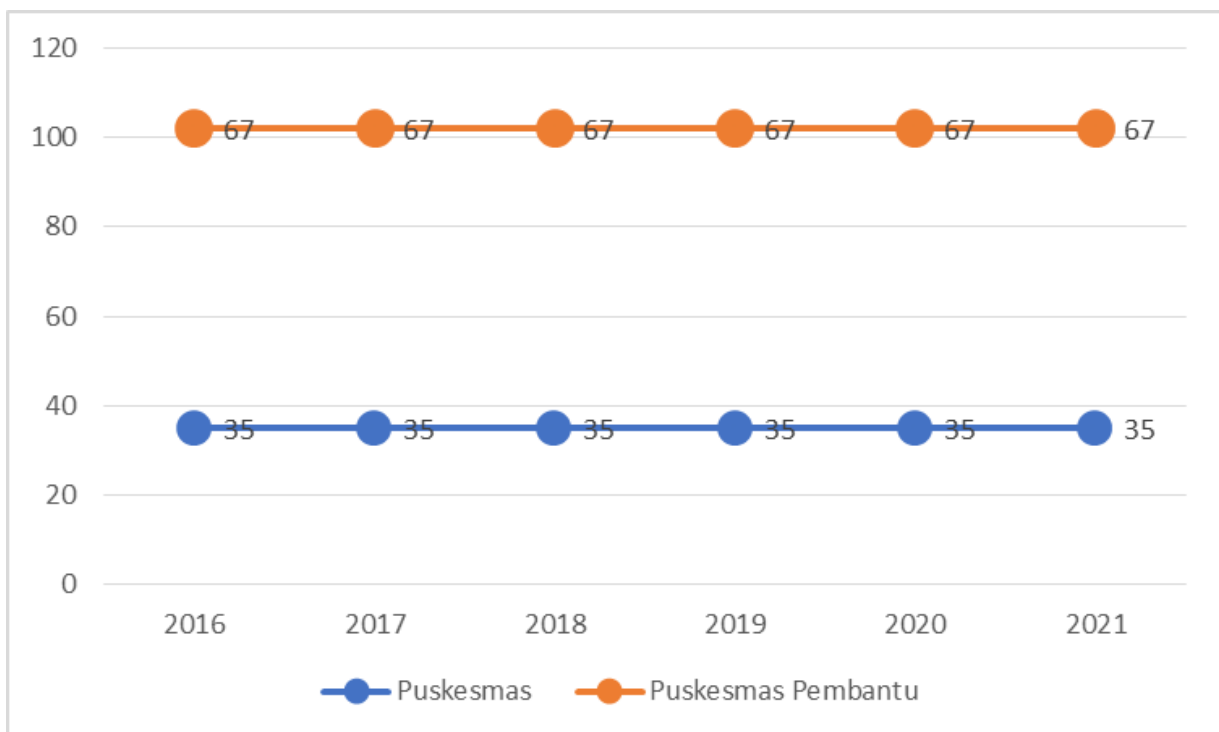
Grafik 2.45
Tren Kunjungan Pasien Puskesmas di Kabupaten Sumedang



Sumber : Dinas Kesehatan (2022)

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan jumlah kunjungan pasien baik kunjungan sehat dan sakit ke Puskesmas mengalami fluktuatif. Penurunan terjadi pada Tahun 2020 menjadi 807.839 jiwa atau turun 295.698 jiwa dari tahun sebelumnya dan kembali mengalami peningkatan kunjungan pasien pada tahun berikutnya menjadi 839.331 jiwa. Hal ini dikarenakan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi.

Grafik 2.46
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

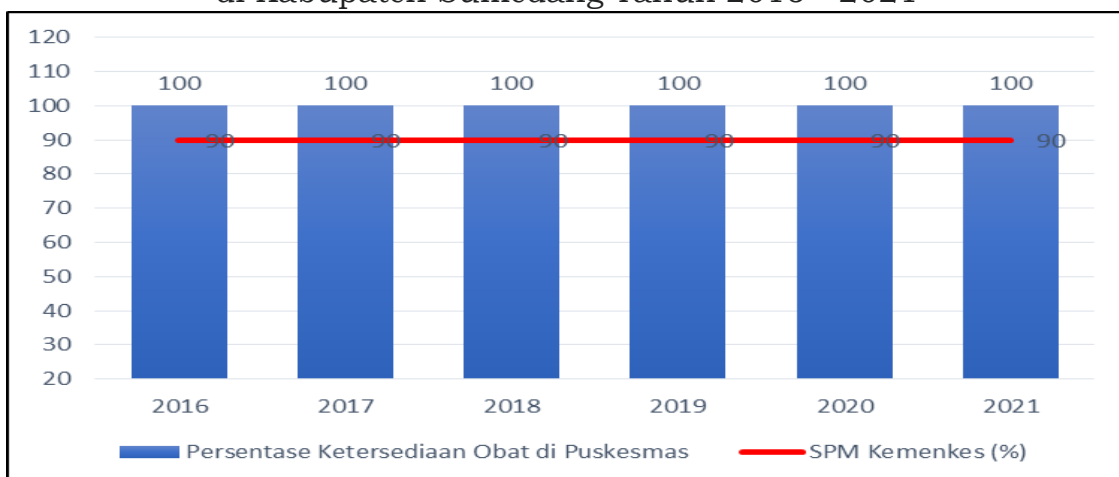


Sumber : Dinas Kesehatan (2022)

Jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2016-2021 berjumlah 35 puskesmas. Hal ini menggambarkan bahwa dari 26 kecamatan seluruhnya telah memiliki fasilitas puskesmas. Adapun kecamatan yang memiliki puskesmas lebih dari satu yakni Kecamatan Jatinangor (2 puskesmas), Cimanggung (2 puskesmas), Pamulihan (2 puskesmas), Tanjungsari (2 puskesmas), Sumedang Selatan (2 puskesmas), Sumedang Utara (3 puskesmas), Tanjungkerta (2 puskesmas), dan Buahdua (2 puskesmas). Berdasarkan SPM Kemenkes rasio puskesmas adalah 1:10.000 atau dengan kata lain satu puskesmas diperuntukan melayani 10.000 penduduk. Melihat hal tersebut maka jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang masih sangat kurang. Untuk membantu pelayanan kesehatan Kabupaten Sumedang memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu). Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas, selain itu juga Pustu merupakan bagian integral Puskesmas yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas, dan bertujuan untuk meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Meskipun demikian, untuk optimalisasi kualitas pelayanan perlu ada peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan atau pembangunan Puskesmas/Pustu atau meningkatkan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas.

Untuk mengukur kualitas puskesmas salah satunya dilihat dari indikator persentase ketersediaan obat di Puskesmas. Pada Grafik 47 dibawah sejak Tahun 2016-2021 persentase ketersediaan obat di Puskesmas telah mencapai 100% atau dengan kata lain telah mencapai target SPM Kemenkes sebesar 90%.

Grafik 2.47
 Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas
 di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 - 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

11) Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan Memenuhi Standar

Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan. Tenaga Kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi: 1) Tenaga Medis; 2) Psikologi klinis; 3) Keperawatan; 4) Kebidanan (Bidan); 5) Kefarmasian (Apoteker, tenaga teknis kefarmasian); 6) Tenaga Kesehatan Masyarakat; 7) Kesehatan Lingkungan; 8) Gizi (Nutrisionis dan Dietisien); 8) Keterampilan Fisik (Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapi Wicara, Akupuntur); 9) Keteknisan Medis; 10) Biomedika (Radiografer, Elektromedis, Radioterapis, Ortitik Prostetik, ahli laboratorium Medik, dan Fisikawan Medik. Sedangkan Asisten Tenaga Kesehatan meliputi 1) Asisten Perawat; 2) Asisten Tenaga Kefarmasian; 3) Asisten Dental; 4) Asisten teknisi Laboratorium Medik; dan 5) Asisten Teknisi Pelayanan Darah.

Tenaga kesehatan merupakan pokok dari subsistem SDM kesehatan, yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu juga banyaknya tenaga kesehatan yang pensiun dan terbatasnya kuota pengangkatan PNS dan PPPK Bidang kesehatan. Berikut adalah Data Tenaga Kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.16

Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Umum	283
2	Dokter Gigi	45
3	Dokter Spesialis	67
4	Perawat	1221
5	Bidan	828
6	Kesehatan Masyarakat	86
7	Sanitarian	45
8	Gizi	64
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	115
10	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	4
11	Keterampilan Fisik	12
12	Keteknisan Medis	98
13	Tenaga Teknis Kefarmasian	93
14	Apoteker	63
15	Pejabat Struktural	103
16	Tenaga Pendidik	6
17	Tenaga Dukungan Manajemen	1511

Sumber : Dinas Kesehatan (2022)

12) Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani adalah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Pada Tahun 2021 target perkiraan ibu hamil yang mengalami komplikasi sebanyak 3.444 kasus, akan tetapi berdasarkan data jumlah penanganan komplikasi kebidanan sebanyak 5.011 kasus. Sehingga cakupan penanganan komplikasi kebidanan sebesar 145%, dapat dilihat pada grafik dibawah.

Grafik 2.48
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 – 2021
(%)

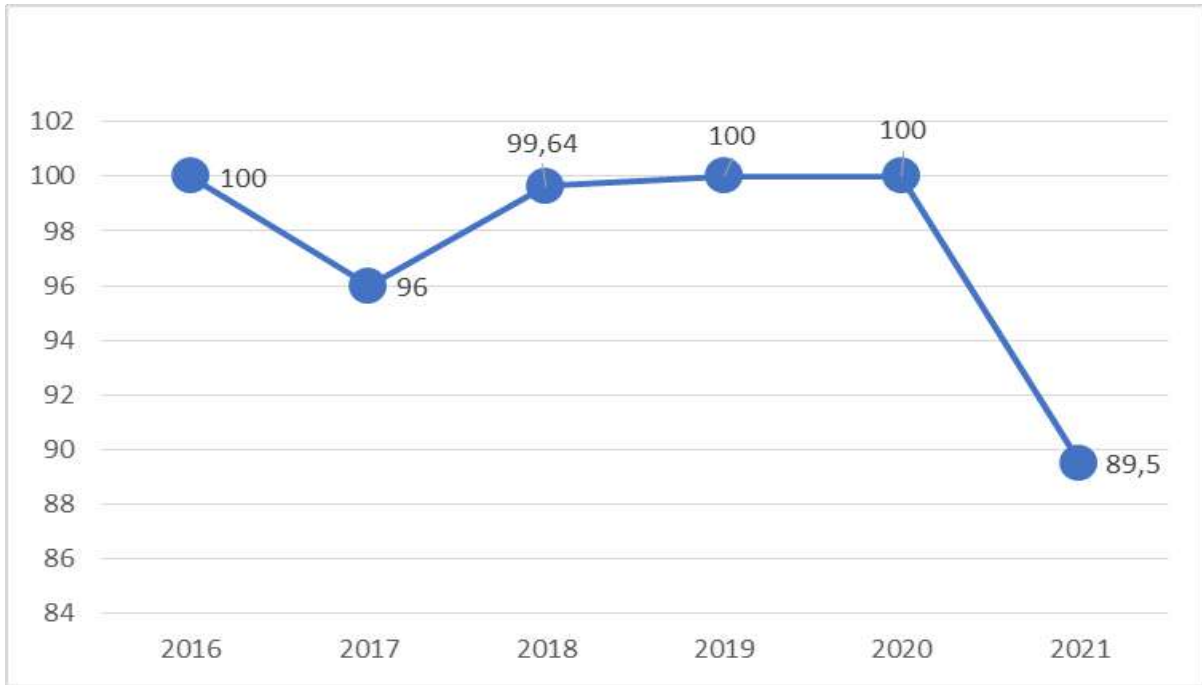


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

13) Cakupan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) merupakan suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (dibawah umur 1 (satu) tahun). Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Sumedang terbilang fluktuatif. Cakupan terendah terjadi pada Tahun 2021 sebesar 89,5% atau turun 10,5% dari tahun sebelumnya.

Grafik 2.49
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 – 2021 (%)



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

14) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2016 - 2021 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus balita gizi buruk telah tertangani seluruhnya dan telah mencapai SPM Kementerian Kesehatan (100%).

Grafik 2.50
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 – 2021 (%)



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

15) Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Jaminan kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan di setiap kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumedang. Jumlah Kepesertaan untuk jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Sumedang sesuai visi misi Kesehatan Nasional menuju *Universal Health Coverage* (UHC), sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Sumedang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional. Oleh karena itu pada tahun 2021, Kabupaten Sumedang sudah seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Tabel 2.17

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 – 2021 (%)

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

Jaminan kesehatan masyarakat miskin pada Tahun 2021 dengan sasaran penduduk 1.165.047 jiwa sebesar 78,41%.

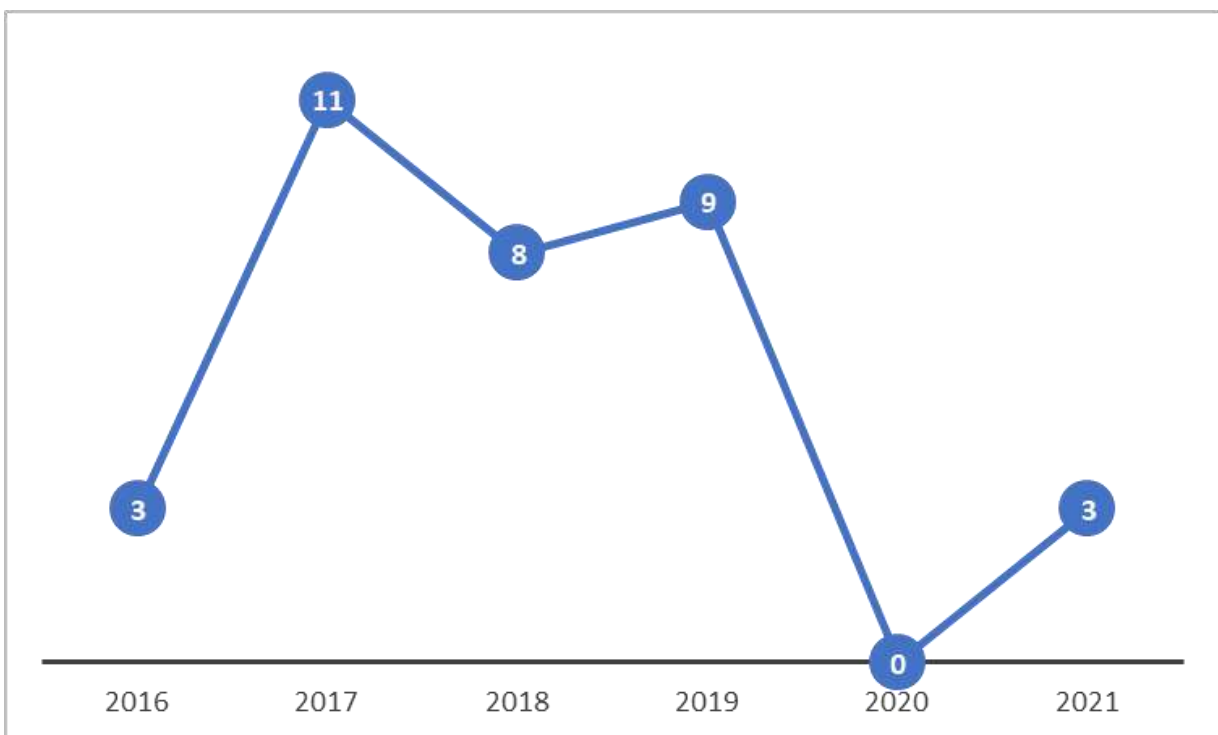
16) Penyakit Menular

Penyakit menular merupakan infeksi yang disebabkan mikroorganisme berupa virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ciri penyakit menular adalah dapat berpindah ke orang yang sehat sehingga menyebabkan orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Penularan bisa langsung atau melalui media atau vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular masih menjadi masalah besar kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi : a) Penyakit menular langsung; dan b) Penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Beberapa jenis penyakit menular yang pernah dan sering terjadi di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

a. Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina. Malaria masih merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu bayi, anak, balita, ibu hamil, selain itu malaria secara langsung menyebabkan anemia dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Manifestasi klinis malaria dapat bervariasi dari ringan sampai membahayakan jiwa. Kasus malaria di Kabupaten Sumedang dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.51
Kasus Penyakit Malaria di Kabupaten Sumedang
Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

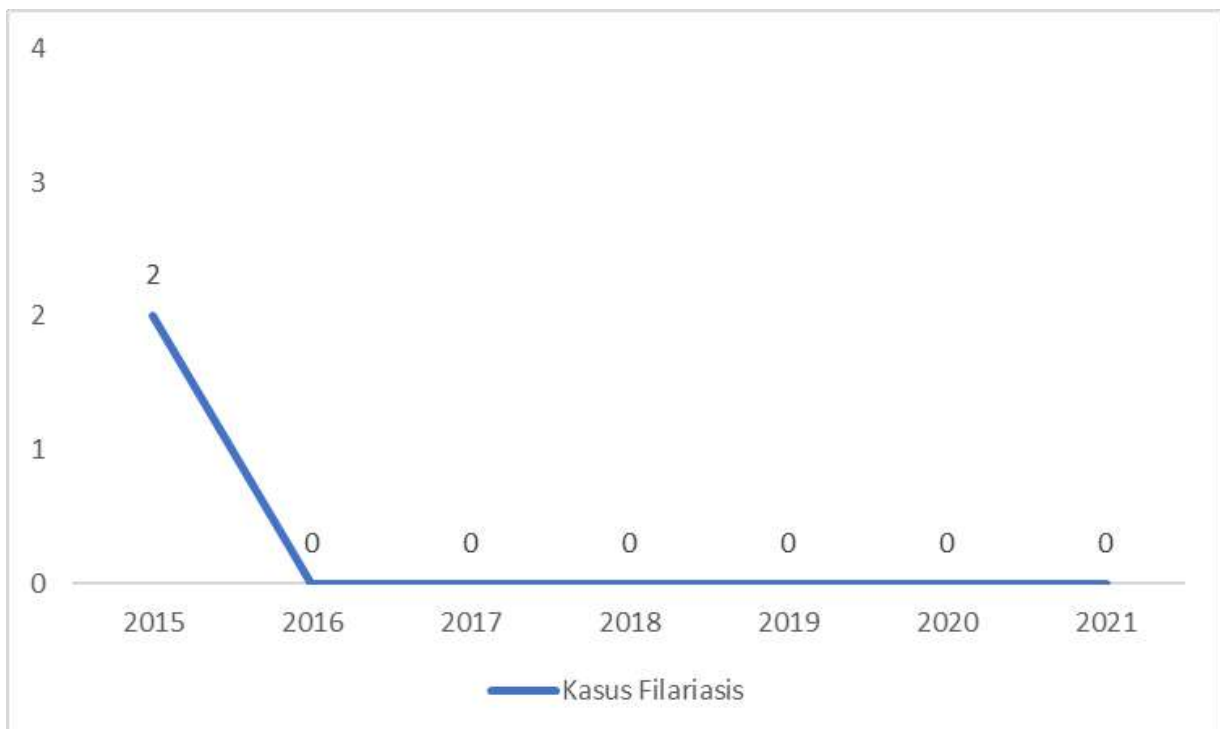
Kasus penyakit malaria di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif. Kasus tertinggi ditemukan pada Tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) kasus. Penyebaran penyakit ini disebabkan adanya mobilitas penduduk yang tinggi ke Sumedang dari daerah endemis penyakit malaria, seperti Papua. Tahun 2021 ditemukan kembali kasus malaria sebanyak 3 kasus, padahal pada tahun sebelumnya sama sekali tidak terdapat kasus malaria di Kabupaten Sumedang. Penyebaran penyakit ini disebabkan adanya mobilitas penduduk yang tinggi. Disinyalir temuan kasus malaria di Kabupaten Sumedang dikarenakan mulai adanya pelanggaran

mobilitas penduduk dari dan ke Sumedang dari daerah endemis penyakit malaria, seperti Papua,

b. *Filariasis*

Filariasis (Kaki Gajah) merupakan penyakit menular yang disebabkan karena infeksi cacing *filaria*, yang hidup di saluran dan kelenjar getah bening (limfe) serta menyebabkan gejala akut dan kronis. Penyakit ini ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk terutama *Culex quinquefasciatus* dan nyamuk lainnya dari Genus *Mansonia*, *Anopheles* dan *Aedes*. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, *glandula mammae* dan *scrotum* serta menimbulkan cacat seumur hidup. Sejak Tahun 2016, sudah tidak ditemukan kasus *Filariasis* di Kabupaten Sumedang. Dan pada tahun 2021 target nasional pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan kesepakatan program dan Global Eliminasi *Filariasis*. Eliminasi penyakit kaki gajah (*Filariasis*) merupakan program strategis nasional. Dukungan Kemendagri dalam Percepatan Eliminasi *Neclated Tropical Disease* dengan tujuan program Eliminasi Global di tahun 2020: Menghentikan penularan penyakit, mengurangi penderita dan meningkatkan kualitas hidup. Trend penderita *Filariasis* dari tahun 2015-2021 di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

Grafik 2.52
Kasus Penyakit *Filariasis* di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2021

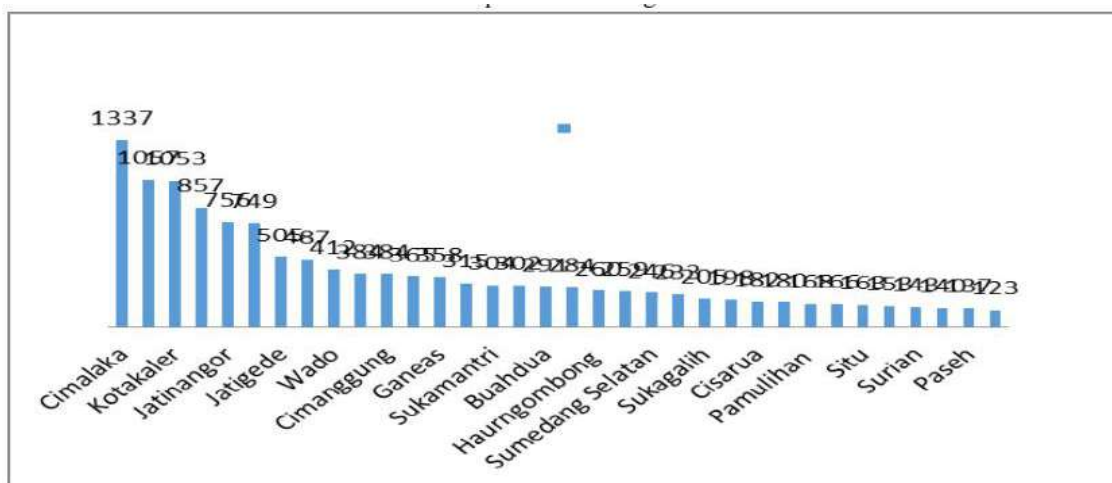


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

c. Penyakit Diare

Penyakit Diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar (BAB) lebih sering dari biasanya. Seseorang bisa dikatakan mengalami diare bila ia BAB sebanyak tiga kali atau lebih dalam satu hari. Selain itu, feses yang dikeluarkan juga lebih encer. Diare umumnya terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Diare merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum di Indonesia, terutama pada bayi dan anak-anak.

Grafik 2.53
Kasus Penyakit Diare di Kabupaten Sumedang
Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2022)

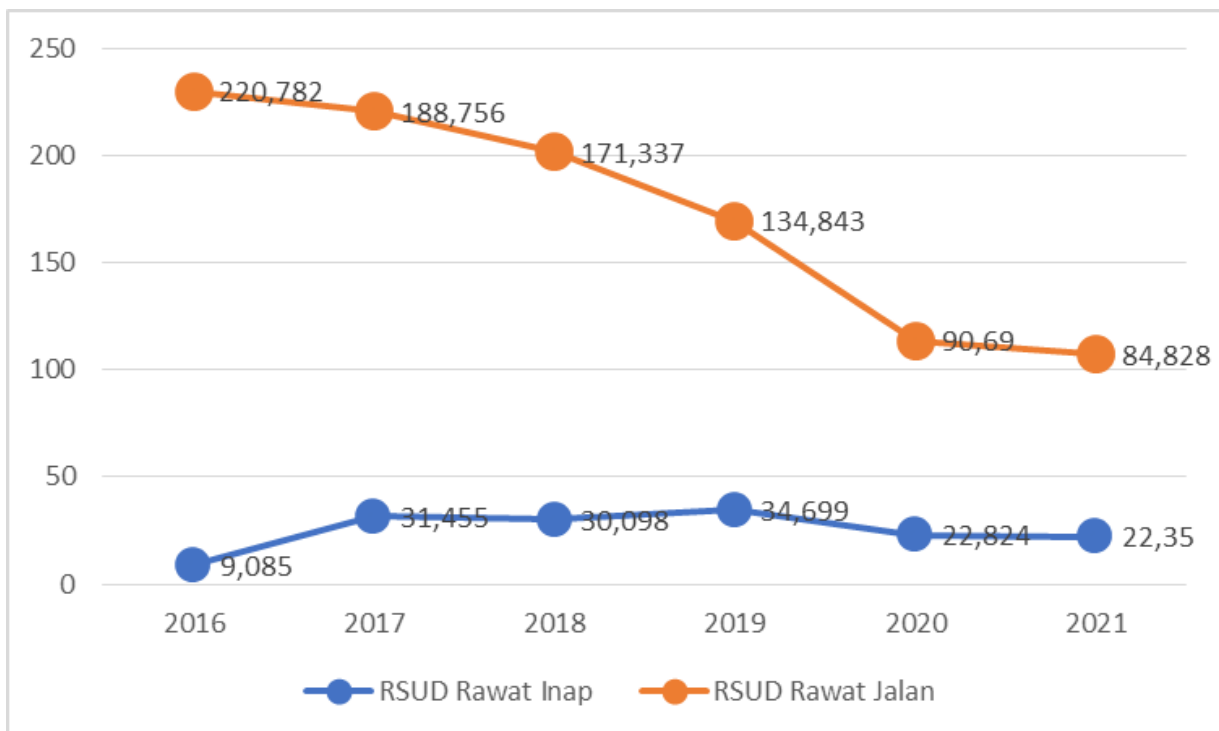
Dari Grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah penderita penyakit diare di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 jumlah kasusnya terbanyak terdapat di Puskesmas Cimalaka sebanyak 1337 kasus, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya penduduk dan juga dipengaruhi faktor lingkungan serta penyakit penyerta (*infeksi oportunistik*) yang mendukung meningkatnya jumlah kasus diare di wilayah tersebut. Sedangkan jumlah terkecil ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Tanjungkerta sebanyak 112 kasus.

17) Pelayanan Kesehatan Rujukan

Faskes Tingkat 2 (dua) atau Faskes Tingkat Lanjutan (FKRTL) merupakan Faskes yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialis/subspesialis yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pelaksanaan sistem rujukan di Indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama,

kedua dan ketiga, yang dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri namun berada di suatu sistem dan saling berhubungan. Rujukan merupakan proses yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan terutama untuk daerah dengan keterbatasan fasilitas. Dengan proses rujukan yang baik pasien bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas serta komprehensif. Di Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan mewakili 35 Puskesmas membuat perjanjian kerja sama untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan program rujuk balik dengan Rumah Sakit. Jumlah Rumah Sakit Umum di Kabupaten Sumedang berjumlah 3 (tiga), yaitu RSUD Sumedang, RSU Pakuwon dan RSU Harapan Keluarga.

Grafik 2.54
Jumlah Kunjungan Rawat jalan dan rawat inap di RSUD Sumedang Tahun 2016-2021

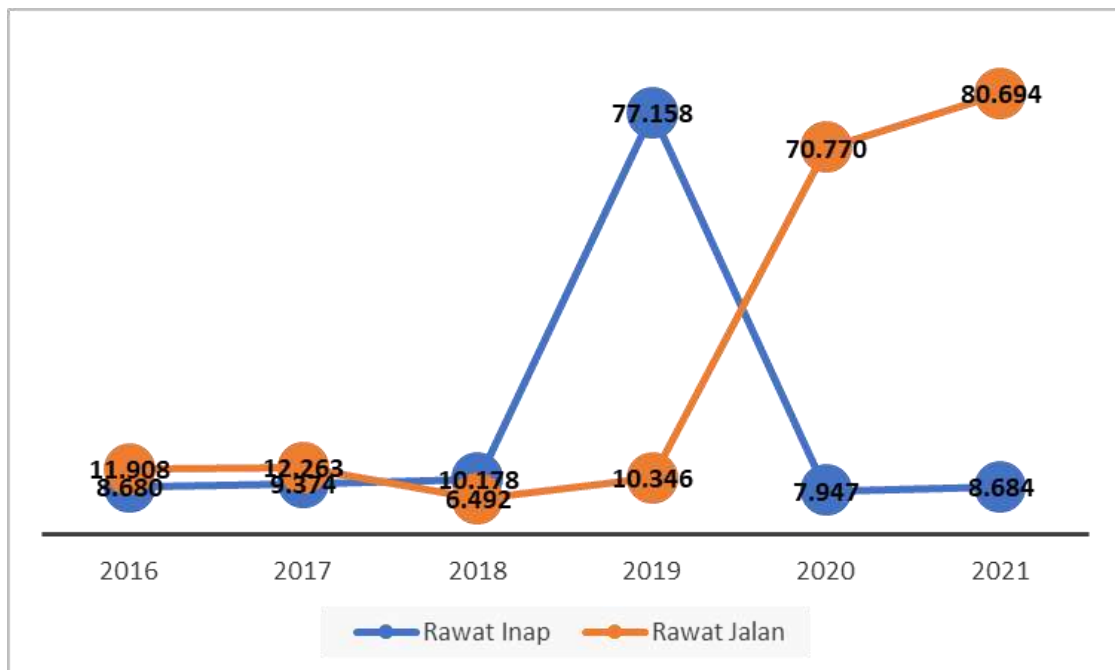


Sumber : Dinas Kesehatan (2022)

Berdasarkan grafik di atas menggambarkan bahwa trend kasus rujukan rawat jalan di RSUD Sumedang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami penurunan. Berbeda dengan kasus rawat inap yang fluktuatif sepanjang tahunnya. Pada Tahun 2021 baik kasus rawat jalan maupun rawat inap di RSUD Sumedang lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 84.828 untuk kasus rawat jalan dan 22.350 kasus untuk rawat inap. Penurunan ini terjadi karena adanya pandemi *Covid-19* yang membatasi jumlah kunjungan baik rawat jalan maupun rawat inap ke/di RSUD. Selain itu juga adanya mekanisme sistem rujukan berjenjang dan mapping rujukan FKTP yang diterapkan dengan baik serta didukung juga dengan peningkatan

jumlah sarana dan prasarana rujukan di Kabupaten Sumedang yaitu dengan bertambahnya 1 (satu) Rumah Sakit Umum yaitu Rumah Sakit Harapan Keluarga.

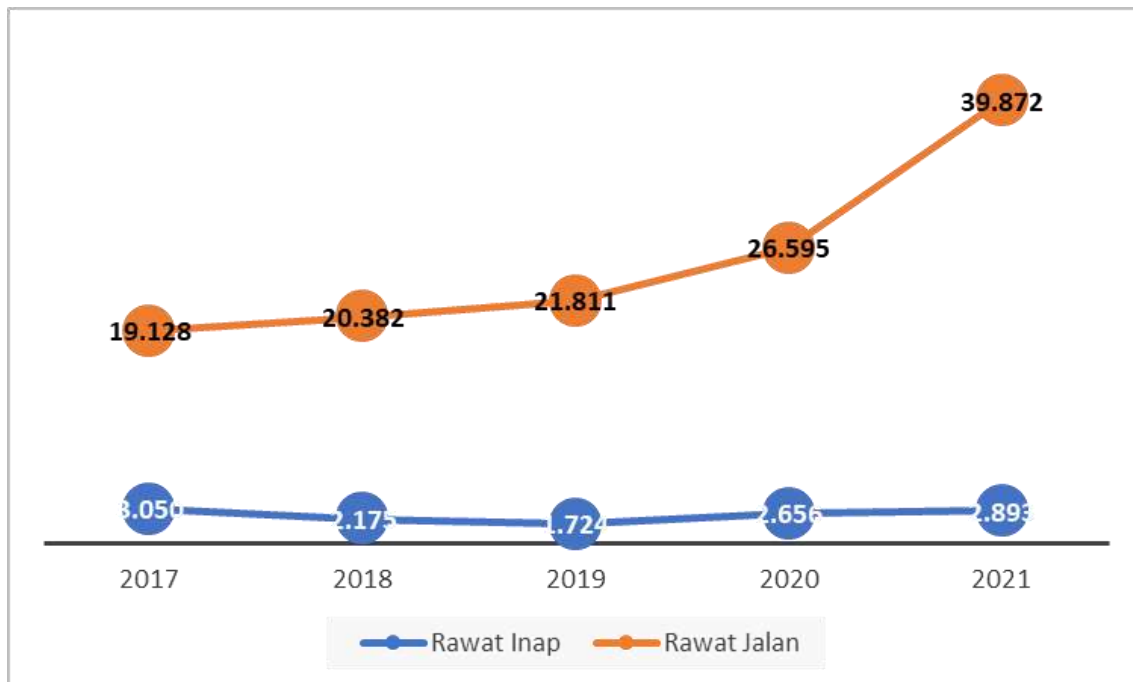
Grafik 2.55
Jumlah Kunjungan Rawat jalan dan rawat inap di RSUD Pakuwon Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Kesehatan (2022)

Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan rawat inap tertinggi di RSUD Pakuwon terjadi pada Tahun 2019 sebanyak 77.158 kasus. Hal ini terjadi karena mulai diberlakukannya rujukan berjenjang di Kabupaten Sumedang, dan sistem tersebut telah berjalan dengan baik. Sedangkan pada Tahun 2020 dan 2021 jumlah kunjungan mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* yang membatasi jumlah kunjungan rawat inap di RSUD. Berbeda dengan jumlah kunjungan rawat inap, sejak Tahun 2020 jumlah kunjungan terus mengalami peningkatan dengan jumlah tertinggi pada Tahun 2021 sebanyak 80.694 kasus, karena telah diberlakukannya rujukan berjenjang dan adanya pandemi *Covid-19* yang meminimalisir jumlah rawat inap di RSUD kecuali untuk kondisi gawat darurat.

Grafik 2.56
 Jumlah Kunjungan Rawat jalan dan rawat inap di RSUD Harapan Keluarga
 Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan (2022)

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada RSUD Harapan Keluarga jumlah kasus rawat jalan lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus rawat inap. Kasus Rawat Inap di RSUD Harapan Keluarga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sedangkan kasus rawat jalan terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang dirujuk ke RSUD Harapan Keluarga masih ditangani dengan rawat jalan. Hal ini didukung dengan data bahwa nilai *Net Death Rate* (NDR) di RSUD Harapan Keluarga 0,5%.

Menurut WHO idealnya suatu negara memiliki 1 (satu) tempat tidur Rumah Sakit untuk setiap 1.000 penduduk atau dengan kata lain memiliki *ed to population ratio* 1:1.000. Dengan demikian indikator dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tersebut. Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Kabupaten Sumedang Tahun 2021 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.18

Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Kabupaten Sumedang Tahun 2021

NO	NAMA RUMAH SAKIT ^a	JUMLAH TEMPAT TIDUR
1	2	3
1	RSUD SUMEDANG	352
2	RSU PAKUWON	117
3	RSU HARAPAN KELUARGA	50
KABUPATEN/KOTA		519

Sumber : Dinas Kesehatan (2022)

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa total dari jumlah tempat tidur dari ketiga RSU adalah 519 buah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumedang saat ini maka kebutuhan tempat tidur di RSU sekitar 646 tempat tidur.

2.1.3.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pekerjaan Umum

a. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap

Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 mengalami penurunan sepanjang 21,450 km yaitu dari semula sepanjang 796,056 km pada Tahun 2016 menjadi 774,606 km. Penurunan ini diantaranya disebabkan oleh proyek penggenangan Waduk Jatigede yaitu berkurangnya 4 (empat) ruas jalan sepanjang 16,20 km (ruas jalan Cadasngampar-Cijeungjing sepanjang 3,7km, ruas jalan Wado-Cadasngampar sepanjang 5km, ruas jalan Cisurat-Cipasang sepanjang 4,5 km, dan ruas jalan Cikawung-Cipaku sepanjang 3 km). Selain dampak penggenangan waduk Jatigede, pengurangan panjang jalan juga disebabkan oleh pengalihan status jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi sebanyak 2 (dua) ruas jalan sepanjang 9,10 km (ruas jalan Cibuntu-Parakanmuncang sepanjang 3,8 km dan ruas jalan Warungsimpang-Cibuntu sepanjang 5,3 km).

Pada Tahun 2019, total Panjang jalan Kabupaten kembali mengalami penurunan yaitu dari semula 774,606 km pada Tahun 2018 menjadi 774,368 km. Penurunan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tahun 2016 yang menetapkan penurunan status fungsi jalan kabupaten menjadi jalan lingkungan sepanjang 7,238 km pada 10 ruas jalan dan penambahan ruas jalan sepanjang 7 km pada 3 ruas jalan. Ruas jalan yang mengalami penurunan status yaitu ruas jalan Masjid (depan Masjid Agung) sepanjang 0,100 km; ruas jalan Pendopo Tegalkalong sepanjang 0,123

km; ruas jalan Terminal Ketib sepanjang 0,157 km; ruas jalan Talun Pojok sepanjang 0,458 km; ruas jalan Mekarsari sepanjang 0,750 km; ruas jalan kompleks Persekolahan Licin sepanjang 1,100 km; ruas jalan kompleks Workshop sepanjang 0,700 km; ruas jalan kompleks Prabu Kian Santang sepanjang 1,500 km; ruas jalan Joglo-Paseh sepanjang 1,500 km; dan ruas jalan kompleks Puskopad sepanjang 0,850 km. Adapun ruas jalan yang mengalami penambahan yaitu ruas jalan Citengah-Cigumentang/Sindangwangi (Batas Kabupaten Bandung) sepanjang 5 km; ruas jalan Wado-Cikareo sepanjang 0,5 km; dan ruas jalan Cikawung-Darmaraja sepanjang 1,5 km.

Berdasarkan kondisinya, jaringan jalan terbagi menjadi 4 (empat) yakni kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan, dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.

Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan (Tabel 2.32). Pada Tahun 2016 tercatat panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sepanjang 345,279 km dan merupakan persentase terendah selama 6 (enam) tahun terakhir. Tren jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat hingga di Tahun 2021 mencapai 83,21% dengan panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sepanjang 664,37 km.

Tabel 2.19
Indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Panjang Jalan (km)	796,056	774,606	774,606	774,368	774,368	774,368
2	Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (km)	345,279	424,702	486,454	547,868	595,992	664,373
3	Persentase Jalan Kabupaten dalam	43,37	54,83	62,80	70,75	76,96	83,21

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kondisi Baik (>40 Km/Jam) (%)						

Sumber : Dinas PUPR Kab Sumedang (2022)

b. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk (per 10.000 Jiwa)

Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk adalah rasio panjang jalan per 10.000 jiwa yang menggambarkan bahwa ruas-ruas jalan telah menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang melayani jumlah penduduk di wilayah tertentu. Rasio panjang jalan per 10.000 jiwa di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2015 tercatat sebesar 7,2 km/10.000 jiwa, dan mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi 6,7 km/10.000 jiwa (Tabel 2.33). Penurunan rasio disebabkan karena adanya pengurangan Panjang Ruas Jalan akibat pembangunan bendungan Jatigede dan Tol Cisumdawu. Hal ini berimbas pada rasio Panjang jalan, apalagi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.20
Indikator Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Panjang Jalan (km)	796,056	774,606	774,606	774,368	774,368	774,368
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.132.459	1.139.564	1.148.198	1.154.458	1.159.454	1.165.047
3	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk (jiwa/km ²)	0,00070	0,00070	0,00067	0,00067	0,00067	0,00067

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2022)

Jika mengacu pada Permen PU Nomor 14 Tahun 2010, untuk kategori wilayah dengan kepadatan penduduk $500 \leq KP < 1000$ jiwa/km², maka SPM rasio ideal panjang jalan per 10.000 jiwa adalah 5 Km/10.000 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Sumedang 737 jiwa/km², dengan demikian Kabupaten Sumedang telah mencapai target SPM walaupun rasio Panjang jalannya menurun.

c. Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan infrastruktur irigasi. Tiga pilar pengelolaan sumber

daya air meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2016 tercatat 38%, kemudian selama enam tahun meningkat menjadi 45,2% di Tahun 2021. Meskipun secara tren meningkat namun angka realisasi masih dibawah 50%, sehingga perlu terus diupayakan agar persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan. Sementara itu rasio jaringan irigasi terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2019. Dan Pada Tahun 2021 rasio jaringan irigasinya mencapai 31,98%, hal ini terjadi karena adanya penambahan panjang saluran irigasi yang baik menjadi 961.589,67m. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan kuantitas irigasi di Kabupaten Sumedang semakin membaik dan perlu terus ditingkatkan untuk menunjang produktivitas pertanian.

Tabel 2.21

Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik(%)	38	41	41,15	43,08	43,79	45,2
a	Luas Irigasi Kondisi Baik (Ha)	21.619	23.333	23.452	24.552,6	24.957,2	19.789,16
b	Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	56.993	56.993	56.993	56.993	56.993	3.0069
2	Rasio Jaringan Irigasi	2,97	6,46	4,31	4,33	30,81	31,98
a	Panjang Saluran Irigasi Yang Baik (m)	203.070	135.450	135.941,96	142.321,61	144.667,2	961.589,67
b	Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha)	31.417	31.417	31.417	31.417	31.417	30.069

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2022)

2) Penataan Ruang

Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain. RTH sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika kota. Luas RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%.

Tabel 2.22
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Luas Wilayah Kota
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2021 (%)

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RTH dari luas wilayah kota	5,86	7,13	11,04	11,04	11,07	11,07

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumedang (2022)

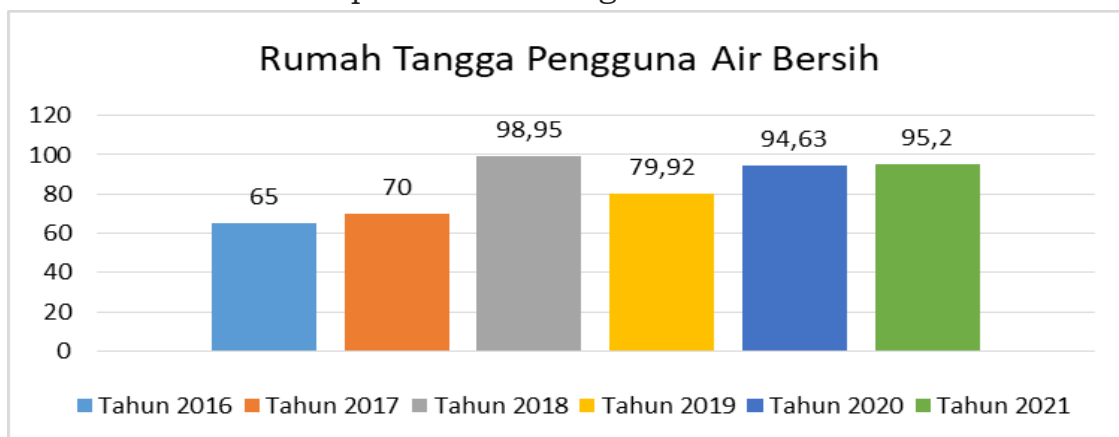
Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase RTH di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Tahun 2021 persentase RTH mencapai angka 11,07%. Kondisi tersebut belum memenuhi besaran target RTH sesuai dengan amanah undang-undang yaitu sebesar 30%.

2.1.3.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Ketersediaan sumber air bersih di Kabupaten Sumedang telah sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Berdasarkan tabel di bawah, jumlah rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Pada Tahun 2020 di Kabupaten Sumedang tercatat 94,63% rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih atau sekitar 406.826 rumah tangga yang mempunyai akses air minum. Terdapat peningkatan pada tahun 2021 sebesar 95,20% atau sebanyak 409.267 rumah tangga yang mempunyai akses air bersih. Namun kondisi tersebut masih jauh dibawah target nasional yakni 100% penduduk berakses air bersih. Sehingga pemerintah masih perlu terus meningkatkan akses air bersih ke seluruh Desa/kelurahan yang tersebar di 26 Kecamatan.

Grafik 2.57
 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
 di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

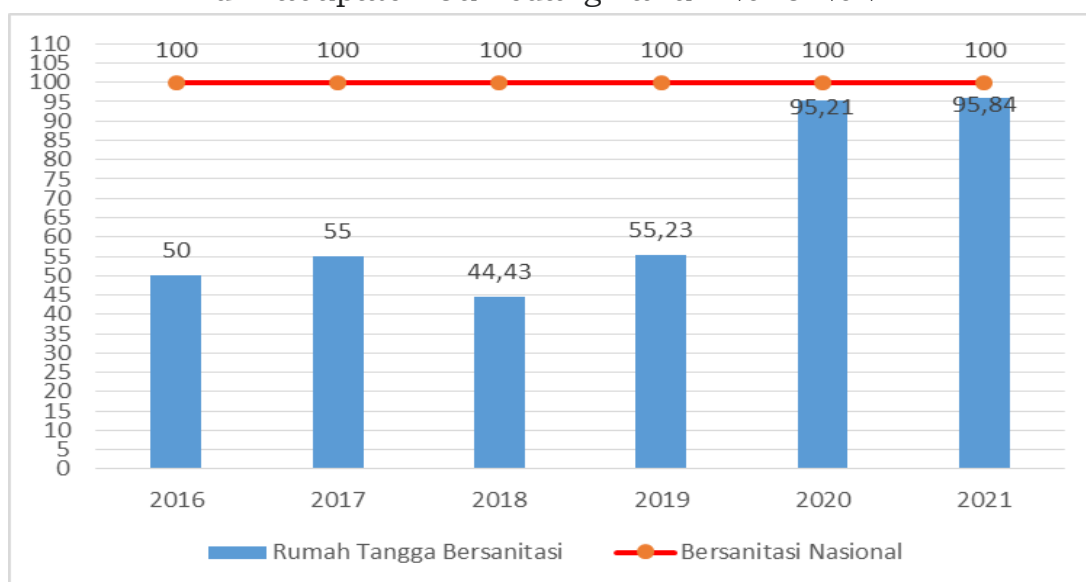


Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2022)

b. Rumah Tangga ber-Sanitasi

Rumah tangga bersanitasi salah satu kriterianya adalah mempunyai WC dan akses sanitasi yang layak. Target capaian untuk rumah tangga bersanitasi nasional adalah 100%. Di Kabupaten Sumedang peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi tidak terlalu signifikan. Sampai dengan Tahun 2021 rumah tangga bersanitasi baru mencapai 95,84% dan jika dijumlahkan hanya 287.520 rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi. Namun masih di bawah Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, tentunya perlu ada perhatian khusus dari pemerintah terkait hal tersebut. Capaian dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.58
 Persentase Rumah Tangga ber-Sanitasi
 di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2022)

c. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Permukiman kumuh pada umumnya mencakup 3 (tiga) segi yaitu kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi kesehatan dan sumber pencemaran. Kawasan permukiman kumuh merupakan penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman.

Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Permukiman kumuh di Kabupaten Sumedang semula tersebar hanya di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Cimanggung. Tahun 2016 luas total permukiman kumuh hanya 50,76 Ha dan di Tahun 2021 bertambah menjadi 164,69 Ha. Penambahan luasan wilayah terjadi karena adanya penambahan lokus permukiman kumuh di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Sumedang Utara. Data luas permukiman kumuh Tahun 2018 masih null karena pada tahun tersebut sedang melakukan kajian mengenai permukiman kumuh dan kajian baru selesai pada awal Tahun 2019.

Untuk data pengurangan luasan lingkungan permukiman kumuh terjadi pada Tahun 2016 – 2017. Di Tahun 2019 dan 2021 tidak terjadi pengurangan karena terdapat penambahan lokus permukiman kumuh, sehingga menyebabkan penambahan luasan permukiman kumuh.

Tabel 2.23
Indikator Lingkungan Pemukiman Kumuh
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengurangan luasan Lingkungan Pemukiman Kumuh (Ha)	2,28	0,75	-	-	-	-
2	Luas Total Pemukiman Kumuh (Ha)	50,76	50,01	n/a	169,64	169,64	169,64

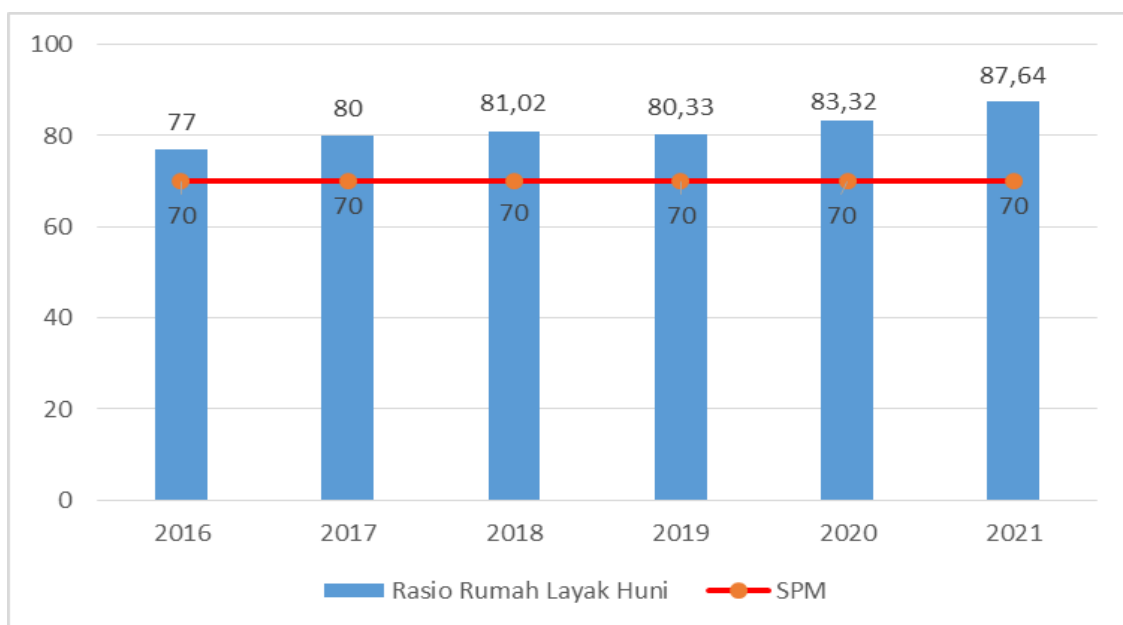
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2022)

d. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Target SPM Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio rumah layak huni, yakni sebesar 70%. Tercatat sampai dengan Tahun 2019 mencapai 80,67% atau sekitar 48.402 rumah yang sudah layak huni dan dirata-ratakan setiap tahun terdapat 2.000 perbaikan rumah tidak

kayak huni sehingga pada tahun 2021 bertambah sebanyak 2.592 rumah yang sudah layak huni atau sebesar 4,32% dengan capaian total 87,64% sehingga rasio capaian rumah layak huni Kabupaten Sumedang telah melebihi target SPM Kementerian Perumahan Rakyat, namun belum memenuhi target daerah Kabupaten Sumedang yaitu sebanyak 60.000 rumah layak huni.

Grafik 2.59
Rasio Rumah Layak Huni
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2022)

2.1.3.1.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi cakupan petugas perlindungan masyarakat, cakupan penegakan Perda dan cakupan amper petugas Satpol PP. Berdasarkan data pada Tabel dibawah diketahui bahwa cakupan petugas perlindungan masyarakat standarnya 1 (satu) RT itu terdapat 1 (satu) orang Linmas. Selama 5 (lima) tahun terakhir cakupan terendah terjadi pada tahun 2016 sekitar 46,15%, dan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 sekitar 69,23%. Target yang ingin dicapai cakupan petugas Linmas pada Tahun 2019 adalah 75%, sedangkan cakupan petugas Linmas untuk Tahun 2019 kembali menurun ke angka 60,55%. Sehingga indicator ini belum mencapai standar.

Cakupan penegakan Perda Kabupaten Sumedang dari Tahun 2016 hingga Tahun 2021 menunjukkan angka realisasi 100%. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran Perda telah ditindaklanjuti. Cakupan patroli petugas Satpol PP dari Tahun 2016 hingga Tahun 2021 mengalami peningkatan, pada

Tahun 2016 tercatat 19,23% dan di Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 26,92%. Begitu juga dengan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun terakhir ini telah mencapai 100%, ini bermakna seluruh pelanggaran K3 telah diselesaikan. Hubungan antara ketiga indikator tersebut saling berkesinambungan, sehingga semakin intensnya petugas Satpol PP melakukan patrol maka semakin berkurangnya angka pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat sehingga capaian penegakan Perda pun akan maksimal.

Sementara itu untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten mengalami kenaikan perubahan sejak Tahun 2016 – 2021, pada tahun 2021 mencapai 80,64%. Lebih lanjut, frekuensi kebakaran sesuai waktu tanggap (*response time*) di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan hasil kinerja yang positif. Menurut SPM dalam Permendagri Nomor 69/2012 disebutkan bahwa waktu tanggap (*respon rate*) sebesar 75%, sementara itu sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2018 waktu tanggap di Kabupaten Sumedang telah mencapai lebih dari 80%. Walaupun di Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 86,01%, hal tersebut disebabkan kondisi sarana berupa Kendaraan Pemadam Kebakaran yang kondisinya sudah kurang memadai untuk melayani pengaduan di wilayah seluruh KABUPATEN Sumedang dan adanya penurunan tingkat pangaduan kejadian Kebakaran yang harus ditindak lanjuti, namun masih berada di atas SPM Kemendagri.

Tabel 2.24
Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (1 RT, 1 orang Linmas)	46,15	69,23	69,23	60,55	60,55	60,55
2	Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	19,23	19,23	23,08	26,92	26,92	26,92
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	32,04	32,04	54,15	63,22	80,64	80,64

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	80	87,50	88,41	75,10	86,01	86,01

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (2022)

2.1.3.1.1.6. Urusan Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Untuk melihat peran aktif pemerintah dalam upaya penanganan PPKS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Indikator Kinerja Urusan Sosial
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	n/a	n/a	1,71	2,91	4,69	4,87
2	Persentase PPKS yang Direhabilitasi	n/a	n/a	n/a	25,72	n/a	0
3	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	99,34	99,75	81,98	69,91	63,25	45%
4	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	n/a	n/a	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Sumedang (2022)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak

dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS digunakan sebagai database bagi pemerintah daerah guna menangani PPKS. PPKS yang di rehabilitasi tetapi untuk penanganannya dikembalikan ke keluarga PPKS (reunifikasi). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sedangkan untuk persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial trennya mengalami kenaikan sebesar 99,75% dan tren terendah terjadi di Tahun 2021 sebesar 45%. Penurunan ini dikarenakan dengan adanya Bantuan Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan sasaran PPKS. Dan untuk persentase korban bencana alam sosial setelah tanggap darurat bencana di Kabupaten Sumedang telah mencapai 100% di Tahun 2021.

2.1.3.1.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi sub urusan (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil); (2) sub urusan penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (3) sub urusan hubungan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial). Berdasarkan kewenangan tersebut, dapat diukur realisasi kinerja

urusan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang yang mencakup indikator-indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	73	24	100	9	7	4
2	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	15	16	20	39,60	42	43
3	Keselamatan dan perlindungan (%)	21,33	-	-	n/a	n/a	n/a
4	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100	100
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi (%)	59	64	86,5	73,5	100	100
6	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%)	n/a	a/n	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2022)

Untuk indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) secara tren mengalami peningkatan. Dari seluruh Kasus yang ditangani melalui perjanjian bersama dapat diselesaikan sesuai dengan regulasi dan dapat ditangani.

Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami kenaikan tren sejak Tahun 2019 – 2021. Hal ini disebabkan karena para pencari kerja yang telah ditempatkan melaporkan telah diterima bekerja ke Disnakertrans. Walaupun mengalami kenaikan akan tetapi persentase masih dibawah 50%, sehingga perlu terus dilakukan peningkatan motivasi bekerja kepada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk mengembalikan kartu kuning agar dapat terhitung persentase jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan secara akurat.

Selanjutnya untuk indikator keselamatan dan perlindungan menunjukkan persentase perusahaan yang telah menerapkan K3 (keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja) masih minim di Kabupaten Sumedang. Pada Tahun 2016 hanya tercatat 21,33% perusahaan yang menerapkan K3, sehingga perlu sosialisasi lebih intensif kepada 79% perusahaan yang belum menerapkan K3. Selain itu juga diperlukan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan akan penerapan K3 di

perusahaan-perusahaan yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Dari tahun 2019-2021 tidak terdapat data tersebut karena untuk pengawasan K3 sudah menjadi kewenangan Provinsi. Sedangkan untuk indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah menunjukkan angka 100% sejak Tahun 2016 – 2019. Hal ini bermakna seluruh perselisihan buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah daerah telah diselesaikan.

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan kerja yang dititikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja dengan sasaran para pencari kerja atau usia kerja. Indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi mengalami tren peningkatan sampai Tahun 2018. Pada Tahun 2019, tren menurun menjadi 73,5%, hal ini terjadi karena kurangnya peminat para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang disediakan oleh pemerintah dan terdapat kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 100% hal ini dikarenakan akibat dari pandemi Covid-19 tingginya PHK dan kebutuhan keahlian dalam menjadi wirausaha, serta adanya kerjasama antara Perusahaan dengan Balai pelatihan Kerja (BLK) dalam penempatan lulusan-lulusan yang sudah mendapat Pelatihan dan bersertifikasi BNSP.

Perselisihan Hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah mencapai 100%, baik itu yang penyelesaiannya dilakukan melalui konsiliasi ataupun mediasi.

2.1.3.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Sumedang relatif lebih baik capaian kab/ kota lain se Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan di bidang politik, sebagai sumber pendapatan dan

proporsi perempuan sebagai tenaga profesional lebih baik dari laki-laki. Partisipasi angkatan kerja perempuan di dunia kerja pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan.

Tabel 2.27
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	OPD Responsif Gender (%)	n/a	n/a	9,68	48,39	100	100
2	Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang Dihasilkan	n/a	n/a	1	3	1	1
3	Persentase Kelompok Anak termasuk Forum Anak di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan (%)	n/a	n/a	3,85	19,23	61	65,38
4	Persentase Organisasi Wanita yang aktif (%)	n/a	n/a	9,52	9,52	70	70
5	Persentase Perempuan yang Mendapatkan Pemberdayaan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (%)	n/a	n/a	12,84	12,84	75	75
6	Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan(%)	125	55	100	100	100	100
7	Rasio KDRT (%)	26,47	16	30,91	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas sosial dan P3A Kab. Sumedang (2022)

Responsif Gender merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek yaitu peran, akses, manfaat dan peranan yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Dari data diatas untuk OPD responsif gender pada Tahun 2020 dan 2021 telah mencapai 100%, artinya seluruh OPD sudah melaksanakan perencanaan responsif gender. Untuk mendukung perencanaan responsif gender di Kabupaten Sumedang maka dibuat sebuah kebijakan yang mengatur pengarusutamaan gender. Salah satu indikator perlindungan anak di Indonesia adalah dibentuknya Kelompok Anak termasuk Forum Anak di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Selanjutnya peran wanita dalam pembangunan adalah dengan turut aktif pada organisasi wanita. Di Kabupaten Sumedang sendiri persentase organisasi wanita yang aktif baru 70% pada tahun 2021, sehingga perlu mendorong agar wanita berperan aktif dalam pembangunan melalui aktif berpartisipasi di organisasi wanita yang sudah terbentuk. Salah satu peran organisasi wanita ini adalah membentuk perempuan-perempuan untuk menjadi lebih berdaya sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Jumlah perempuan yang mendapatkan pemberdayaan dalam peningkatan ekonomi keluarga di Kabupaten Sumedang baru sekitar 75% di Tahun 2021. Diharapkan persentase ini terus meningkat sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat Sumedang secara umum.

Untuk indikator rasio KDRT di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif. Rasio KDRT terendah terjadi pada Tahun 2017 sebesar 16% akan tetapi tahun berikutnya mengalami peningkatan amper dua kali lipat menjadi 30,91%. Hal ini sejalan dengan pengaduan tindak kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani, yang mana di Tahun 2017 hanya terdapat 55 kasus pengaduan, sedangkan di Tahun 2018 dan 2019 kasus pengaduan mencapai 100 kasus. Kedepannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan kabupaten perlu lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat dengan cepat ditangani dan pelaku tindak kekerasan dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera.

2.1.3.1.2.3. Urusan Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk.

Berdasarkan Tabel dibawah dapat diketahui ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif. Ketersediaan pangan utama

tertinggi pada Tahun 2020 yang mencapai 604,11 kg/jiwa/tahun, sedangkan ketersediaan pangan utama terendah pada Tahun 2021 yaitu sebesar 569,25 kg/jiwa/tahun. Penurunan tersebut dikarenakan perbedaan cara perhitungan di tahun sebelumnya menggunakan perhitungan Gabah Kering Giling sedangkan untuk Tahun 2019 perhitungannya menggunakan standar beras hasil giling dengan perbedaan 62% dari gabah kering giling. Namun walaupun terjadi penurunan masih dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Sumedang karena didukung juga oleh adanya regulasi ketahanan pangan, sehingga pasokan pangan aman.

Tabel 2.28
Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama (Kg/jiwa/Tahun)	806.14	921.66	486.196	200,621	604,11	569,25

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang (2022)

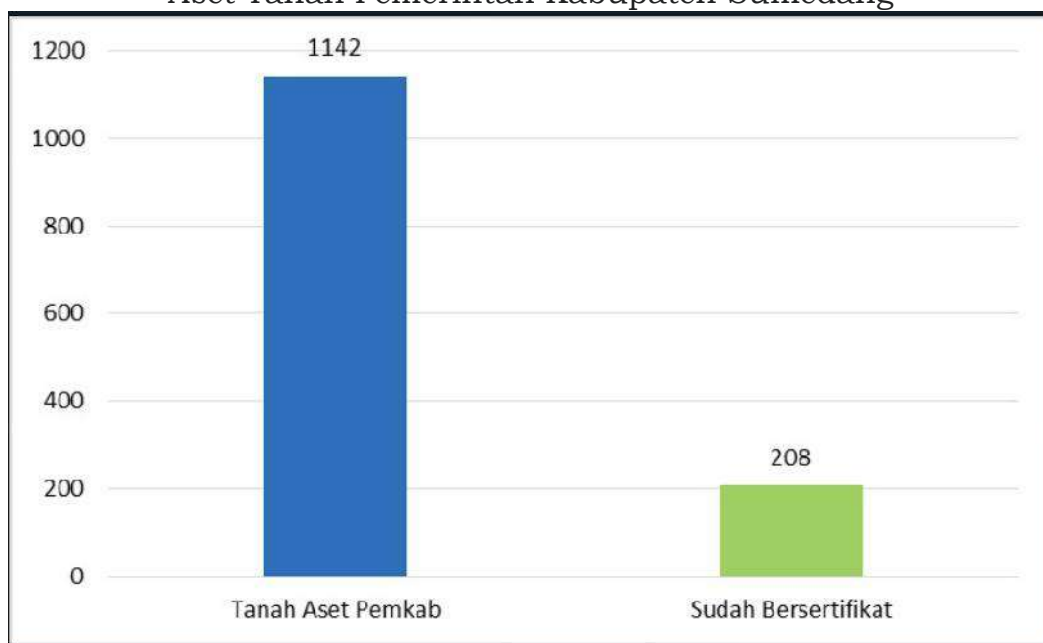
2.1.3.1.2.4. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan urusan pemerintah pusat. Namun ada beberapa hal yang merupakan urusan pemerintah daerah seperti izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah, penetapan objek dan subjek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, penetapan tanah ulayat, penerbitan izin membuka tanah, dan perencanaan penggunaan tanah.

Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah) di Kabupaten Sumedang sejak 5 (lima) Tahun terakhir yang mengemuka adalah dampak dari pembangunan mega proyek (Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Jatigede, Bendung Rengrang dll) sebagian lagi merupakan konflik (di antara Pemilik Lahan). Sampai dengan Tahun 2019 Pemerintah Daerah telah 100% memfasilitasi sengketa pertanahan. Sedangkan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang difasilitasi sudah mencapai 96,37% di Tahun 2019.

Hasil Verifikasi Administrasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2017 berjumlah 1.142 Bidang Tanah, sedangkan yang telah bersertifikat saat ini sebanyak 208 sertifikat atau sekitar 18,21%.

Grafik 2.60
Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sumedang

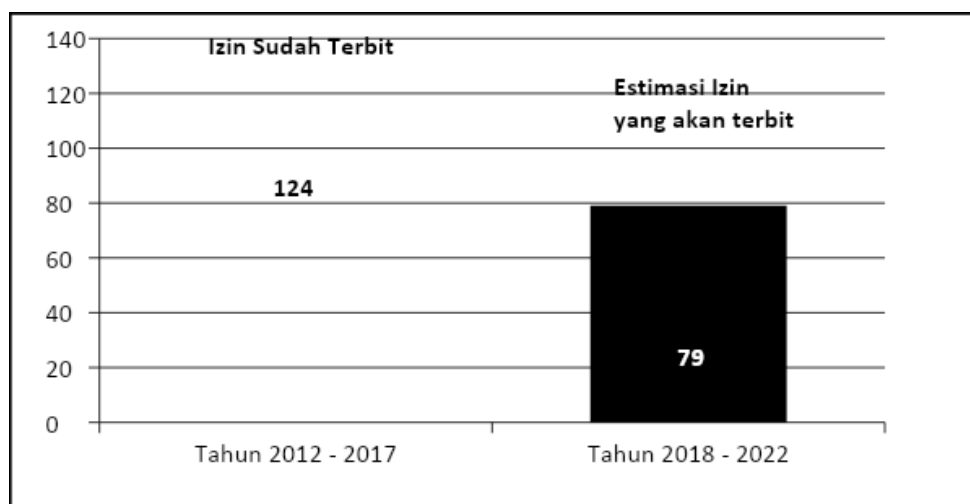


Sumber : Bidang Aset BPKA Kabupaten Sumedang

Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah) di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2019 yang mengemuka adalah dampak dari pembangunan mega proyek (Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Jatigede, Bendung Rengrang dll) sebagian lagi merupakan konflik (di antara Pemilik Lahan).

Proses pembuatan Izin Lokasi dilaksanakan secara kolektif dengan SKPD terkait, yang leading sektornya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap izin lokasi di Kabupaten Sumedang yang saat ini dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.61
Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Sumedang



Sumber : Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sumedang

2.1.3.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

1) Persampahan

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat digolongkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Untuk mengurangi timbulan sampah di masyarakat maka diperlukan usaha untuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah yang ditujukan untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau estetika.

Pengurangan sampah dikelola di sumber sampah melalui aktivitas 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) oleh 9 (Sembilan) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), 13 Bank Sampah, 12 pelaku sektor informal, dan pemilahan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Sisanya dikelola secara tradisional oleh masyarakat di pedesaan. Tahun 2019 persentase pengurangan sampah di Kabupaten Sumedang baru 19,98% sehingga diperlukan upaya yang lebih besar lagi untuk mengurangi timbulan sampah.

Dalam perspektif pembangunan periode Tahun 2019-2023 target penanganan dan pengurangan sampah di sumber sampah perlu lebih ditingkatkan lagi untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat sebagaimana Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumedang diantaranya adalah TPAS yang selama ini dipergunakan sudah melebihi daya tampung (*overload*) dan pengelolaannya belum memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagai antisipasi kedepan saat ini sedang dibangun TPAS di Cijeruk melalui kerjasama dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan skema kewajiban Kementerian PUPR membangun fisik TPAS dan pemerintah Kabupaten Sumedang membangun jalan akses menuju TPAS. Sampai dengan saat ini pembangunan fisik TPAS dimaksud baru pada tahap komponen utama.

2) Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)/Transfer Depo, Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3 R, Timbulan Sampah dan Volume Sampah terangkut (m³/hari)

Jumlah dan kapasitas TPSS/Transfer Depo di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2016 tidak mengalami perubahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan rotasi pengangkutan sampah ke Tempat

Penyimpanan Akhir Sampah (TPAS) dan pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melakukan pengolahan sampah secara 3R, walaupun secara kondisi eksisting belum optimal dan masih sangat memerlukan pembinaan dan pendampingan. Berikut disajikan kondisi jumlah dan kapasitas TPSS/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbulan sampah dan Volume sampah terangkut di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2016-2021.

Tabel 2.29
Jumlah dan Kapasitas Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbulan Sampah, dan Volume Sampah yang terangkut di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah TPSS/Transfer Depo (unit)	5	5	5	5	5	5
2	Jumlah TPS 3 R (unit)	8	8	9	24	24	28
3	Kapasitas Daya Tampung TPSS/Transfer Depo (M ³)	60	60	60	60	60	60
4	Kapasitas Daya Tampung TPS 3 R (M ³)	200	230	245	600	600	700
5	Timbulan Sampah (Ton/hari)	434	432	436	439	440	442
6	Volume Sampah yang terangkut ke TPAS (ton/hari)	163,18	164,27	169,86	205	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang (2022)

3) Pengawasan Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan

Realisasi indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan atau UKL/UPL di Kabupaten Sumedang pada periode Tahun 2016-2018 telah mencapai target yang ditentukan. Pada Tahun 2016 tercatat 80%, kemudian meningkat mencapai 90% pada Tahun 2018. Namun demikian capaian Tahun 2018 tersebut masih harus terus ditingkatkan mengingat usaha/kegiatan Wajib AMDAL dan atau UKL/UPL akan meningkat pula seiring dengan peningkatan aktivitas investasi di Kabupaten Sumedang. Untuk Tahun 2019-2021 kewenangan terkait Pengawasan AMDAL dan Penegakan Hukum Lingkungan sudah menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat

Tabel 2.30
Indikator Pengawasan AMDAL dan atau UKL/UPL dan
Penegakan Hukum Lingkungan

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengawasan AMDAL (%)	80	85	90	0	0	0
2	Penegakan Hukum Lingkungan	13	7	13	n/a	n/a	n/a

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang (2022)

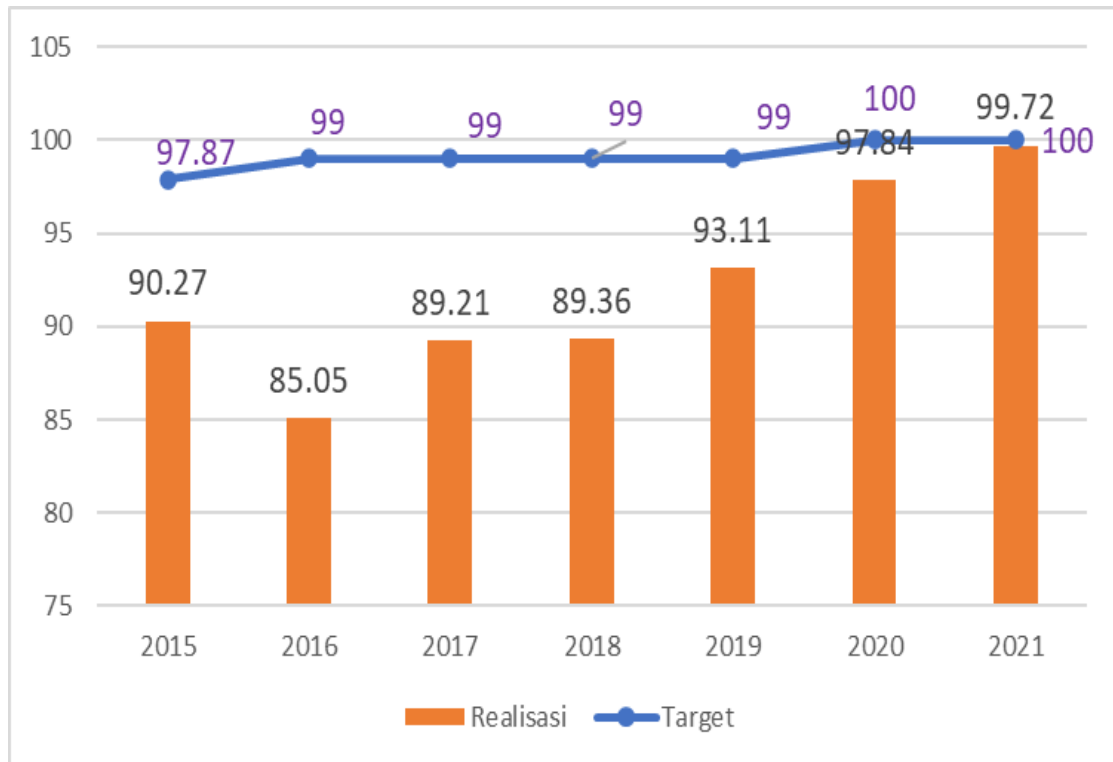
Indikator penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2018 menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada Tahun 2013 tercatat 7 (tujuh) penegakan, kemudian penegakan tertinggi di Tahun 2016 dan 2018 sebanyak 13 penegakan. Banyaknya jumlah pelanggaran mengindikasikan masih perlunya pemahaman bagi *stakeholder* (pengusaha dan masyarakat) tentang peraturan terkait hukum lingkungan, namun bermakna pula meningkatnya kesadaran kritis di masyarakat sekitar usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan sehingga mereka berani melakukan pengaduan. Kondisi tersebut pada perspektif pembangunan periode Tahun 2018-2023 perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui berbagai upaya guna meningkatkan kesadaran lingkungan bagi semua pihak.

2.1.3.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Tren rasio penduduk ber-KTP mengalami penurunan dan secara umum target per tahunnya tidak tercapai.

Persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif (Grafik 2.62). Tren pada Tahun 2016 merupakan tren terendah pelayanan KTP dengan persentase hanya 85,05%, dan terus meningkat hingga mencapai 97,72% di Tahun 2021. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang memasuki usia 17 tahun, serta terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam hal pengadaan blanko KTP.

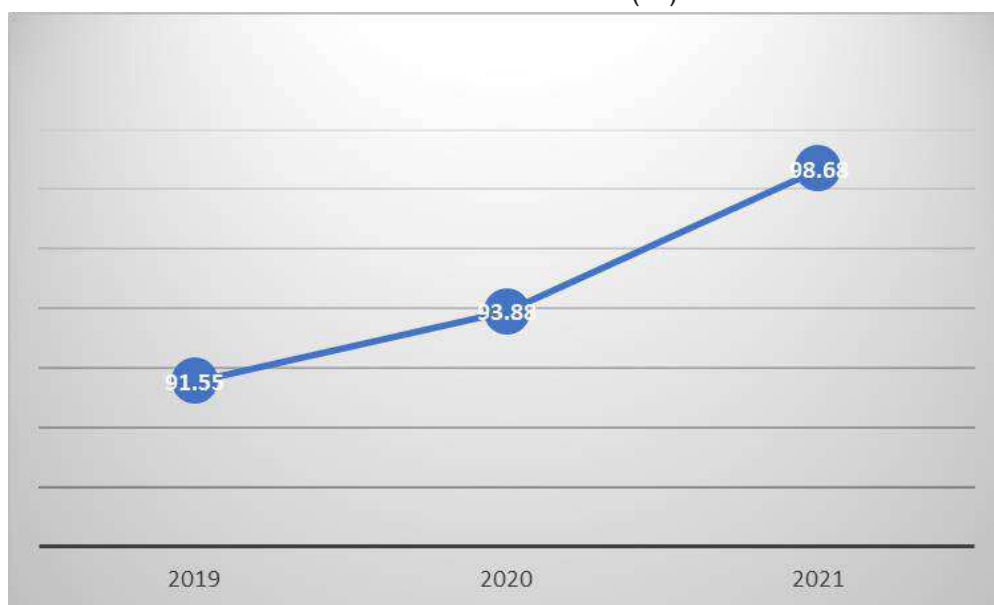
Grafik 2.62
Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Sumedang
Tahun 2016-2021 (%)



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2022)

Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dari tahun ke tahun cenderung meningkat seperti yang digambarkan dalam Grafik 2.63. Pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 1.256.649 Keluarga dan Wajib KTP sudah memiliki dokumen kependudukan.

Grafik 2.63
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Tahun 2019-2021 (%)



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2022)

2.1.3.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum pencapaian target dalam merealisasikan indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.31
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

No	Indikator	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	277	277	277	277	277	277
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	303	303	303	277	277	277
3	Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100	100
4	Posyandu aktif	1.641	1.641	1.641	1.641	1.692	1.692
5	Cakupan pembinaan lembaga Adat	1	1	1	9	9	9
6	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	22	25	30	30	100	100
7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (kecamatan)	24	24	24	24	26	26
8	Jumlah desa yang menerapkan siskudes	72	204	270	270	270	270
9	Cakupan pembinaan lembaga BUMDesa	77	141	183	270	270	270
10	Jumlah desa yang memiliki administrasi Pemdes sesuai aturan	270	270	270	277	270	270
11	Rata -rata Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	794	1.036	971	633	633	633

Sumber : DPMPD Kabupaten Sumedang (2022)

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan PKK mengalami penurunan tren disebabkan karena adanya penghapusan desa di wilayah Genangan Waduk Jatigede sebanyak 6 (enam) Desa. Sejak Tahun 2016 – 2021 rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD dan PKK berjumlah 277 kelompok dengan persentase PKK yang aktif mencapai 100%. Untuk capaian target indikator kinerja posyandu aktif, Tahun 2016 tercatat berjumlah 1.661 posyandu aktif dan setahun setelahnya hingga Tahun 2019 turun menjadi 1.641. penurunan ini dimungkinkan akibat adanya beberapa posyandu aktif yang terdapat di Desa

yang dihapuskan akibat pembangunan Waduk Jatigede. namun pada tahun 2020 dan 2021 bertambah jumlah Posyandu menjadi 1.692 posyandu. Berdasarkan Undang-undang Desa, Lembaga Adat merupakan Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa, yang bertugas untuk membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Pada Tahun 2019 di Kabupaten Sumedang terjadi peningkatan jumlah Lembaga adat menjadi 9 (sembilan) lembaga adat dari yang semula berjumlah 1 (satu) di tahun-tahun sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang dimulai dari masyarakat atau dengan kata lain masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat persentase jumlah swadaya masyarakat yang semula hanya 22% di Tahun 2016 meningkat menjadi 100% di Tahun 2021.

BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sebagai sumber kegiatan ekonomi Desa. Pertumbuhan BUMDes dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 jumlah BUMDes yang dibina mencapai 270 BUMDes, dengan rincian sebanyak 5 (lima) BUMDes Maju, 73 (tujuh puluh tiga) BUMDes Berkembang dan sisanya BUMDes Pemula atau perkembangannya masih jalan ditempat. Dalam rangka peningkatan perencanaan dan penganggaran di Desa maka dibentuk Siskeudes. Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan Desa dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa. Aplikasi ini mulai dikembangkan dan diperkenalkan pada Tahun 2015 dan mulai diterapkan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2016. Pada tahun tersebut hanya 72 Desa yang menerapkan Siskeudes. Siskeudes mengalami perkembangan yang positif, Tahun 2019 seluruh desa telah menerapkan Siskeudes secara optimal yaitu sebanyak 270 Desa.

2.1.3.1.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi jumlah keluarga pra sejahtera, jumlah keluarga sejahtera 1, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan yang menikah usia 15-49, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*), dan Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang Aktif. Data indikator tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021 (%)

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	n/a	3,74	4,48	3,64	4,51	3,23
2	Persentase Keluarga Sejahtera I	n/a	36,18	15,74	42,26	18,26	14,41
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	81,64	81,64	80,87	81,96	81,64	81,10
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	8,48	7,67	8,55	8,00	8,22	8,50
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	93,62	93,50	95,62	86,77	50,54	56,08

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang (2022)

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Tren jumlah keluarga pra sejahtera dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Tahun 2019 persentase keluarga pra sejahtera mencapai 3,64% atau turun sekitar 0,48% dari Tahun 2018. Peran pemerintah dalam mengupayakan turunnya jumlah keluarga sejahtera salah satunya dengan memberikan bantuan baik berupa kebutuhan pokok ataupun uang. Dengan turunnya jumlah keluarga pra sejahtera berarti terdapat keluarga yang naik kelas menjadi keluarga sejahtera

Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis keluarga. Jumlah Keluarga Sejahtera I mengalami penurunan tiap Tahunnya. Tren tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 67,03% hal ini bisa diakibatkan adanya perpindahan status keluarga, dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga

sejahtera I karena diperkirakan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2019 persentase jumlah keluarga sejahtera turun menjadi 42,26%. Diperkirakan adanya peningkatan status dari keluarga sejahtera I menjadi keluarga sejahtera II.

Untuk realisasi indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun cenderung mengalami peningkatan walaupun belum mencapai 100%. Pada Tahun 2019 angka pemakaian kontrasepsi mencapai 81,96 yang merupakan pencapaian tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeetneed*) merupakan kondisi yang mengisyaratkan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga diambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeetneed*) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Cakupan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yang mencapai 8,55%. Tingginya angka *unmeetneed* KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang akan berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadinya ledakan penduduk. Sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi pada PUS terus digalakan sehingga pada Tahun 2021 cakupan *unmeetneed* KB menjadi 8,50%.

Adapun indikator Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB selama Tahun 2016-2021 telah mencapai target Tahunan yang ditentukan. Meskipun demikian, realisasi Tahunan bersifat fluktuatif, pada Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 95,62% kemudian mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya.

2.1.3.1.2.9. Urusan Perhubungan

Secara umum pencapaian indikator urusan perhubungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021 (%)

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Ijin Trayek (%)	25,40	26,20	31,84	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (kendaraan)	2.211	3.413	3.893	n/a	n/a	n/a
3	Cakupan Ketersediaan	n/a	n/a	n/a	27,72	79.03	97.40

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%)						
5	Persentase Kendaraan Laik Jalan (%)	n/a	n/a	83,40	91,92	61.56	84,60
6	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	74,75	43,65	67,03	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

Capaian Rasio Izin Trayek pada Tahun 2016 sebesar 25,40%, meningkat menjadi 31,84% di Tahun 2018. Peningkatan rasio izin trayek ini terjadi karena adanya penambahan jalur angkutan umum serta penambahan jumlah kendaraan umum. Pada Tahun 2019 tidak ada data dikarenakan indikator tersebut berubah menjadi indikator Cakupan Trayek Angkutan Umum.

Uji KIR angkutan umum merupakan serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Sumedang masih fluktuatif. Tahun 2016 jumlah uji KIR angkutan umum hanya 2.211 kendaraan dan terus meningkat mencapai 3.893 kendaraan di Tahun 2018, pada Tahun 2019 tidak terdapat data dikarenakan pada Tahun 2019 berubah menjadi indikator Persentase Kendaraan Laik Jalan dengan perhitungan persentase menjadi 84,60% pada tahun 2021. Dengan jumlah kendaraan angkutan umum yang ada di Kabupaten Sumedang sebanyak 589 bis dan 1432 angkutan kota.

Salah satu peningkatan angka keselamatan di jalan raya adalah dengan pemasangan rambu-rambu di beberapa jalan yang rawan kecelakaan, rawan bencana serta Kawasan pendidikan. Persentase pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif karena tidak setiap tahun diadakan pemasangan baru rambu-rambu. Pada Tahun 2018 pemasangan rambu-rambu sekitar 67,03% dan perhitungan indikator ini hanya dari Tahun 2015-2018 dan selanjutnya dikarenakan adanya perubahan SOTK muncul pengelolaan Penerangan Jalan Umum sebagai salah satu perlengkapan jalan, maka untuk Tahun 2019 indikator pemasangan rambu-rambu berubah menjadi Cakupan ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan capaian 97.40% pada tahun 2021.. Perbedaan perhitungan menyebabkan adanya penurunan capaian dikarenakan pada

indikator mencakup ketersediaan prasarana berupa dokumen, fasilitas perhubungan berupa jumlah terminal, jumlah rambu-rambu, dan jumlah Penerangan Jalan Umum.

2.1.3.1.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime*). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah, hal ini ditunjang oleh adanya pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), sarana prasarana telepon pintar/komputer/desktop/notebook dan ketersediaan akses internet di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Sumedang belum mencapai target, pada Tahun 2018 hanya sebesar 52%, dengan demikian masih terdapat 48% rumah tangga yang tidak memiliki akses internet. Namun secara keseluruhan pelayanan komunikasi dan informasi di Kabupaten Sumedang sudah mencapai 100% dengan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tahun 2021 sebesar 3,60 dengan **predikat sangat baik**. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 2021

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi	n/a	100	100	100
2	Nilai SPBE	2,46	2,51	3,81	3,60

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang (2022)

2.1.3.1.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang

yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Secara umum tren persentase koperasi aktif di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 tercatat sebesar 71,03% koperasi aktif, kemudian terjadi penurunan pada Tahun 2021 menjadi 40,41% akibat dari dampak pandemi *Covid 19* banyak koperasi yang mengalami kontraksi dalam perputaran modal dan piutang. Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2015-2018 mengalami tren positif, di Tahun 2016 tercatat terdapat 15.149 usaha mikro dan kecil dan jumlahnya terus bertambah menjadi 20.760 usaha mikro dan kecil di Tahun 2018 dan sangat signifikan pada tahun 2021 sebanyak 61.587 usaha mikro, kenaikan tersebut akibat dari mudahnya proses perijinan (NIB) bagi UKM yang bisa langsung dapat dicetak di desa/kelurahan.. Lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
di Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi aktif	71,63	71,67	71,67	71,67	71,67	40,41
2	Jumlah usaha mikro dan kecil	15.400	15.467	15.467	18.267	18.267	61.587

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2022)

2.1.3.1.2.12. Urusan Penanaman Modal

Dilihat dari jumlah investor di Kabupaten Sumedang, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun asing jumlahnya hampir sama. Namun dilihat dari total investor yang berinvestasi terdapat peningkatan yang drastis. Pada Tahun 2016 jumlah investor sebanyak 56 naik tajam di Tahun 2021 dengan jumlah investor mencapai 351. Hal ini juga berlaku pada tenaga kerja yang terserap. Sejak Tahun 2016, tenaga kerja yang terserap baik melalui PMDM maupun PMD mencapai 33,70 dan terus naik rasionya menjadi 238 di Tahun 2021, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja melalui PMDM.

Untuk perizinan yang dikeluarkan oleh PTSP tren nya fluktuatif. Pada Tahun 2021 jumlah perizinan turun menjadi 4.644 dikarenakan proses

perijinan melalui Sistem ICE MANDIRI, sehingga tahapan proses lebih transparan dan akuntabel.

Tabel 2.36
Indikator Urusan Penanaman Modal
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	56	106	106	139	108	351
2	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	6.224	4.790	4.790	2.519	3.976	4.644
3	Rasio daya serap tenaga kerja	33,70	51,41	51,41	51,70	186	238

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Sumedang (2022)

2.1.3.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Sampai dengan Tahun 2019, tercatat 213 organisasi pemuda yang aktif. Hal ini berarti bahwa pemuda di Kabupaten Sumedang memiliki penambahan tempat untuk berkreasi dan berekspresi sehingga kemudian dapat membangun prestasi dalam bidang kepemudaan. Jumlah organisasi kepemudaan terbagi menjadi 5 (lima) bidang, yaitu organisasi bidang politik sebanyak 42 organisasi; bidang olahraga sebanyak 1 (satu) organisasi; bidang ekonomi sebanyak 1 (satu) organisasi; bidang sosial sebanyak 50 organisasi; dan Karang Taruna sebanyak 277 kelompok yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Cakupan pembinaan olahraga sejak Tahun 2016 membina 4 (empat) cabang olahraga secara bergantian dengan jumlah klub olahraga yang tercatat pada Tahun 2019 mencapai 309 klub olahraga yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk atlet berprestasi Tahun 2021 terdapat 20 atlet yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Sumedang sampai Tingkat Nasional. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2021

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	n/a	80,00	100,00	100
2	Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat Nasional	14	13	20	20

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2022)

2.1.3.1.2.14. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan Kabupaten, urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Sehingga dibuat “Buku Kabupaten Sumedang dalam Angka”. Sejak Tahun 2015 buku tersebut selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Sumedang yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Sumedang yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Buku tersebut berfungsi sebagai penyedia data yang akurat dan berkualitas. Sampai dengan Tahun 2018 persentase ketersediaan data yang akurat dan berkualitas di Kabupaten Sumedang baru mencapai 68,08%. Ketersediaan data ini semakin baik di Tahun 2019 yang ditunjukkan dengan capaian indikator 100%. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Sumedang
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Buku “kabupaten/kota dalam angka”	ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Buku "PDRB kabupaten/kota"	ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Sumedang (2022)

2.1.3.1.2.15. Urusan Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa sejak Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Sumedang telah menggunakan persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah, peningkatan penggunaan . Hal ini karena masih kurang efektif dan kurangnya partisipasi Perangkat Daerah dalam penggunaan persandian, sehingga selama tahun tersebut hanya 1 (satu) Perangkat Daerah saja yang menggunakan persandian dalam komunikasinya. Peningkatan signifikan terjadi di Tahun 2020 yang mencapai 99,53% atau dengan kata lain hampir seluruh OPD di Kabupaten Sumedang telah menggunakan persandian dalam komunikasinya walaupun masih belum optimal.

Tabel 2.38
Indikator Kinerja Urusan Persandian di Kabupaten Sumedang
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	3,34	3,34	3,34	82,78	99,53

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2022)

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018, terdapat perubahan indikator kinerja Urusan Persandian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.39
Indikator Kinerja Urusan Persandian di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2020 (%)

Indikator	2018	2019	2020	2021
Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	n/a	27,59 (8 OPD)	100 (29 OPD)	100 (29 OPD)

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2022)

2.1.3.1.2.16. Urusan Kebudayaan

Indikator urusan kebudayaan meliputi jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah museum, penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Berdasarkan Tabel 2.40, diketahui bahwa jumlah grup kesenian di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2017 baru 72 grup sedangkan sanggar kesenian di Tahun 2019 sudah mencapai 772 sanggar yang terdiri dari berbagai jenis kesenian. Sedangkan untuk sarana penyelenggaraan seni dan budaya berupa gedung kesenian terjadi penambahan, di Tahun 2017 Kabupaten Sumedang baru mempunyai 1 (satu) buah gedung kesenian dan di Tahun 2019 bertambah menjadi 2 (dua) buah gedung kesenian, dengan demikian para pelaku seni dapat lebih leluasa untuk mempresentasikan keseniannya. Untuk tempat pameran hasil budaya atau kebudayaan atau museum dari tahun ke tahun jumlah museum di Kabupaten Sumedang hanya mempunyai 1 (satu) museum.

Lebih lanjut, penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Sumedang mulai dilaksanakan pada Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) acara. Dalam perspektif pembangunan periode Tahun 2019-2023 perlu adanya agenda penyelenggaraan festival seni dan budaya setiap tahun, karena adanya grup kesenian dan gedung kesenian menjadi tidak bermakna jika penyelenggaraan festival di tingkat Kabupaten Sumedang tidak memiliki agenda tahunan. Sehingga pada Tahun 2019 penyelenggaraan festival seni dan budaya mencapai 23 acara dengan melibatkan kelompok seni tari tradisional dan kelompok musik tradisional. Tercatat pada Tahun 2019 jumlah kelompok seni tari tradisional dan kelompok musik tradisional di Kabupaten Sumedang masing masing berjumlah 57 kelompok seni dan 559 kelompok musik. Dengan adanya penyelenggaraan festival tidak hanya melestarikan seni dan budaya namun juga dapat memberi nilai tambah

ekonomi khususnya terhadap penggiat seni dan budaya, umumnya terhadap aktivitas perekonomian lokal.

Pelaksanaan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya mulai dilakukan pada Tahun 2017 sebanyak 22 lokasi yang kemudian menurun menjadi 20 lokasi di Tahun 2018, dan menggeliat kembali di Tahun 2019 sebanyak 224 lokasi, karena adanya promosi besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memperkenalkan situs dan cagar budaya yang ada di Sumedang kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk promosi pariwisata budaya.

Pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2023 terdapat perubahan Indikator kinerja yaitu indikator Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang sudah mencakup indikator kinerja sebelumnya serta capaian pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 mencapai 100% dikarenakan peran serta Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melindungi dan menjaga situs-situs dan cagar budaya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai potensi kunjungan wisata religi maupun wisata lainnya dan sebagai warisan budaya leluhur, selain itu intens dalam melakukan pembinaan terhadap para pelaku-pelaku budaya dan seniman di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.41
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Realisasi Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Group kesenian	60	72	n/a	772	772	772
2	Jumlah Gedung kesenian	1	1	n/a	2	2	2
3	Jumlah Museum	1	1	1	1	1	1
4	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	n/a	5	n/a	23	n/a	n/a
5	Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	22	20	224	n/a	n/a
7	Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	-	-	-	100	100	100

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sumedang (2022)

2.1.3.1.2.17. Urusan Perpustakaan

Berdasarkan tren indikator kinerja urusan perpustakaan pada Tabel 2.42 selama periode Tahun 2016-2021 rata-rata realisasi menunjukkan capaian yang positif. Untuk jumlah perpustakaan mengalami tren positif, dan

di Tahun 2021 jumlah perpustakaan mencapai 1.103 perpustakaan di seluruh Kabupaten Sumedang (mencakup perpustakaan SD-SMP-Perpus di Kantor OPD) dan jumlah setiap tahunnya merupakan agregat dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan jumlah pengunjung, yang terus menurun setiap tahunnya sebagai dampak perkembangan teknologi informasi. Pada Tahun 2020 jumlah pengunjung menurun sebanyak 12.304 pengunjung, jumlah tersebut merupakan jumlah pengunjung di seluruh perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya regulasi terkait pandemi *Covid 19* dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga jumlah kunjungan menurun dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 23.200 pengunjung dengan adanya pelanggaran dalam PPKM.

Adapun untuk jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat sampai dengan Tahun 2019-2020 belum tersedia namun pada Tahun 2021 terdapat 3 Pustakawan namun masih belum optimal dalam pelayanan Perpustakaan. Oleh karena itu perlu terus diupayakan adanya peningkatan jumlah pustakawan agar pelayanan urusan perpustakaan dapat berkontribusi pada peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan sesuai hasil survey dari responden pengunjung terdapat 87,06% merasa puas terhadap pelayanan perpustakaan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021. Dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan lebih dekat kepada masyarakat maka keberadaan perpustakaan keliling ke Desa dan Kecamatan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, walaupun cakupan lokasi yang terlayani baru 30% pada Tahun 2021 dikarenakan keterbatasan kendaraan Puskesmas Keliling. Penjelasan lebih lanjut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.43
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perpustakaan	695	834	1.011	n/a	1.103	1.103
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	30.632	33.552	81.679	73.671	12.304	23.200
3	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	179.353	316.200	81.679	890.319	n/a	31.512
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0	3

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Tingkat Kepuasan Pengunjung	-	-	74,40	88,05	82,00	87,06
6	Cakupan Lokasi yang terlayani melalui Pusling	-	-	22,22	31	0,038	30

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2022)

2.1.3.1.2.18. Urusan Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan periode Tahun 2013-2017 dapat digambarkan oleh indikator pada Tabel 2.44. Indikator persentase Perangkat Daerah (PD) yang mengelola arsip secara baku secara tren menunjukkan peningkatan capaian, pada Tahun 2015 tercatat sejumlah 25% OPD yang mengelola arsip secara baku, kemudian pada Tahun 2018 meningkat menjadi 40% OPD, hal ini bermakna terdapat 12 OPD yang telah mengelola arsip secara baku pada Tahun 2018. Untuk Tahun 2019 sesuai RPJMD 2018-2023 adanya perubahan indikator menjadi Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan Standar (IKU) dengan capaian 100% sehingga pengelolaan arsip pada setiap Perangkat Daerah sudah sesuai dengan regulasi kearsipan, hal tersebut di tunjang oleh indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan mengalami peningkatan jumlah arsiparis sebanyak 23 orang pada Tahun 2021.

Tabel 2.45
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	35	40	40	Ganti Indikator		
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	130	20	20	n/a	23	23
3	Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan Standar	-	-	3,64	21,82	40,00	100

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang (2022)

2.1.3.2. Fokus Urusan Layanan Pilihan

2.1.3.2.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan pada Tahun 2021 sebesar 9.667,99 ton yang didukung oleh 14.950 orang pembudidaya perikanan. Hal tersebut sejalan dengan adanya tren peningkatan jumlah rumah tangga perikanan selama periode Tahun 2021 meningkat menjadi 21.583 rumah tangga. Selanjutnya, jumlah konsumsi ikan di masyarakat Kabupaten Sumedang per kapita sudah

menunjukkan capaian yang baik dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Realisasi Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi perikanan (ton)	8.026	8.146	8.286	9.020	9.263	9.667,99
2	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	16,36	16,40	16.53	16.62	17,27	17,93
3	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB						
	A. Atas dasar harga berlaku (%)	0.67	0.72	0,65	0.65	0,68	0,70
	B. Atas dasar harga konstan (%)	0.63	0.61	0.59	0.57	0.60	0,61
4	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RT)	22.096	22.097	21.102	21.108	21.805	21.583

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2022)

2.1.3.2.2 Urusan Pariwisata

Tujuan pariwisata adalah meningkatkan pendapatan devisa serta pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah sektor pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang didominasi oleh objek wisata alam dan memiliki daya tarik yang hampir mirip antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya. Sampai Tahun 2019 jumlah objek wisata di Kabupaten Sumedang 39 objek yang tersebar di 26 Kecamatan dan masih didominasi wisata berskala lokal.

Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang belum seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, biro wisata dan toko cenderamata. Tahun 2019 tercatat di

Kabupaten Sumedang baru mempunyai 30 hotel saja dengan total jumlah kamar 870 kamar dan klasifikasi hotel masih belum merupakan hotel berbintang. Untuk restoran dan cafetaria masing-masing berjumlah 117 restoran dan 80 cafetaria. Penunjang pariwisata lainnya seperti biro wisata dan toko souvenir yang mempunyai tujuan salah satunya untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk biro wisata baru terdapat 15 biro wisata, sedangkan upaya promosi potensi wisata baik secara lokal, nasional dan internasional sudah dilakukan sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali melalui pameran pariwisata dan sosial media. Untuk toko cinderamata baru terdapat sekitar 27 toko cinderamata saja yang tersebar di seluruh daerah wisata. Dalam konteks pengembangan pariwisata sehingga bermakna bahwa daerah tujuan wisata tersebut belum mampu berperan optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sumedang sangat aktif dalam pengembangan potensi wisata sehingga Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Sumedang cukup tinggi pada Tahun 2019 sebanyak 81.494 orang dan adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 717.800 pengunjung ke berbagai objek wisata walaupun pada masa pandemi *Covid 19* tidak mengurangi kunjungan wisata namun terdapat penurunan pada Tahun 2021 sebanyak 684.004 pengunjung berakibat dari kebijakan PPKM pada tahun 2021.

Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang berkembang sangat pesat sehingga sektor ekonomi kreatif dapat dikembangkan secara digital dan mudah diakses secara nasional maupun internasional, pada Tahun 2019 hanya 63% kemudian mengalami peningkatan menjadi 100% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021.

Tabel 2.47
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2021

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	498.472	81.494	717.800	684.004
2	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional (%)	44,00	63,00	100,00	100.00

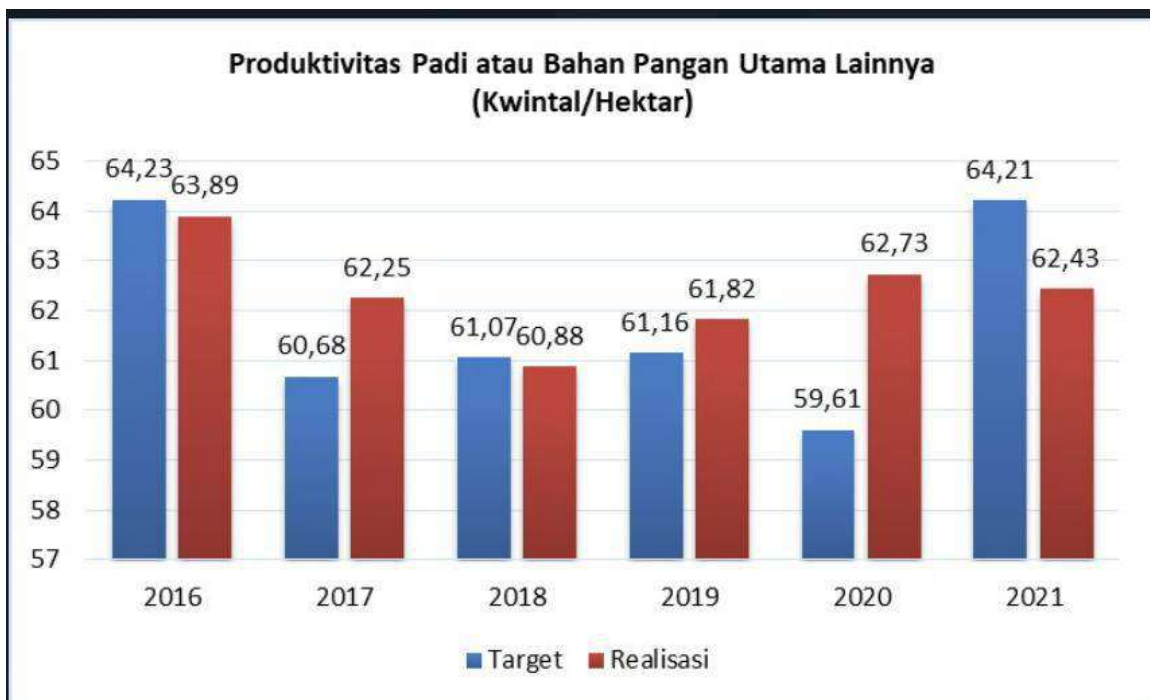
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang (2022)

2.1.3.2.3. Urusan Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Bahan makanan utama penduduk di Kabupaten Sumedang adalah beras. Secara tren produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan tetapi tidak mencapai target tahunannya. Pada Tahun 2016 produktivitas hanya mencapai 63,89/Ha, sedangkan di Tahun 2017 mengalami penurunan, produktivitas hanya mencapai 62,25/Ha padahal target tahunannya sudah diturunkan menjadi 60,68/Ha. dan pada tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya hanya mencapai 62,43/ha. Hal tersebut akibat dari kondisi cuaca yang tidak menentu dan banyaknya bencana yang berakibat area persawahan terdampak cukup luas. Realisasi produktivitas padi dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.64

Realisasi dan Target Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang (2022)

2.1.3.2.4. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor kehutanan perikanan dan sektor industri pengolahan. Pada Tahun 2019 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sumedang tercatat 15,65%. Sektor perdagangan ini dijalankan oleh pedagang/usaha formal dan pedagang/usaha informal, untuk indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha sejak Tahun 2016 hingga Tahun

2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 tercatat 600 pedagang/usaha informal kemudian meningkat menjadi 665 pedagang/usaha informal pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 - 2021 data dimaksud tidak dapat dihitung kembali dikarenakan bukan menjadi indikator kinerja urusan perdagangan.

Untuk Indikator Kinerja selanjutnya sesuai Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2021 menjadi Indikator Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan capaian Tahun 2016 sebesar 4,23% dan meningkat pada Tahun 2021 sebesar 6,351%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perdagangan yang positif seiring dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta bertambahnya jumlah penduduk kelas menengah ke atas. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	600	665	n/a	n/a	n/a	n/a
Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	4,23	4,94	4,21	5,23	4,89	6,351

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2022)

2.1.3.2.5. Urusan Perindustrian

Pada Tahun 2017, urusan Perindustrian memiliki indikator Cakupan Bina Kelompok Pengrajin dengan angka capaian 321 kelompok pengrajin. Indikator Kinerja selanjutnya sesuai Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2023 diubah menjadi Indikator Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan.

Tahun 2021 sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sumedang dengan kontribusi sebesar 11,78%. capaian tersebut menurun dari tahun 2019 dikarenakan masa pandemi covid 19 yang sangat berdampak terhadap sektor industri pengolahan. Jika berdasarkan kapasitas tenaga kerjanya dari yang terkecil, industri dibedakan menjadi industri skala kecil, industri skala menengah dan industri skala besar. Dan yang merupakan kewenangan Kabupaten mencakup industri kecil dan sedang, yang didalamnya terdapat kelompok usaha kecil berupa pengrajin dan industri rumah tangga. Peran pemerintah Kabupaten Sumedang pada

pertumbuhan industri pengolahan sangat intens dengan mengembangkan *One Village One Product (OVOP)* sehingga mendorong lapangan usaha di masyarakat berkembang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Sumedang (%)

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	315	321	n/a	n/a	n/a	n/a
Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	6,21	5,29	10,64	12,17	11,51	11,78

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2022)

2.1.3.2.6. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh Pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Pelaksanaan transmigrasi saat ini dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta difasilitasi oleh pemerintah pusat ditujukan bagi kemanfaatan daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan- permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Selama periode Tahun 2016-2017 Pemerintah Kabupaten Sumedang telah memberangkatkan transmigran total sebanyak 42 KK, yaitu masing-masing 16 KK pada Tahun 2015, 21 KK pada Tahun 2016, dan 5 (lima) KK pada Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2018 tidak

ada transmigran yang ditempatkan karena pada tahun ini Kabupaten Sumedang tidak mempunyai kuota. Dan pada Tahun 2019 Sumedang kembali mendapatkan kuota untuk melakukan transmigrasi akan tetapi hanya 6 (enam) KK saja. dan samurai dengan tahun 2021 belum ada pengiriman kembali untuk transmigran. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021

Uraian/ Indikator	2016			2017			2018	2019	2020	2021
	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Lokasi	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Lokasi	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK
Jumlah Peserta Transmigran Umum	6 Kk	21 Jiwa	Upt Malakoni Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu	5 Kk	18 Jiwa	Upt Parudongka Kec. Rauta Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara	Tidak Ada Penempatan Dikarnakan tidak ada kuota	6 Kk	0	0
	10 Kk	51 Jiwa	Upt Parudongka Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara					10 Kk	0	0
	5 Kk	16 Jiwa	Upt Jud Nganti Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan					5 Kk	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang (2022)

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Kemenristek BRIN, bahwa Kabupaten Sumedang masuk pada kategori Daya Saing Tinggi dengan nilai 2,5940.

Tren pengeluaran per kapita masyarakat Sumedang secara umum selalu mengalami kenaikan, namun dari Tahun 2019, semula mencapai Rp10,406 juta mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp10,262 juta. Hal tersebut tidak terlepas dari akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Secara tren pengeluaran per kapita Kabupaten Sumedang masih berada di bawah pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat sebesar Rp10,934 juta.

Grafik 2.65
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2021

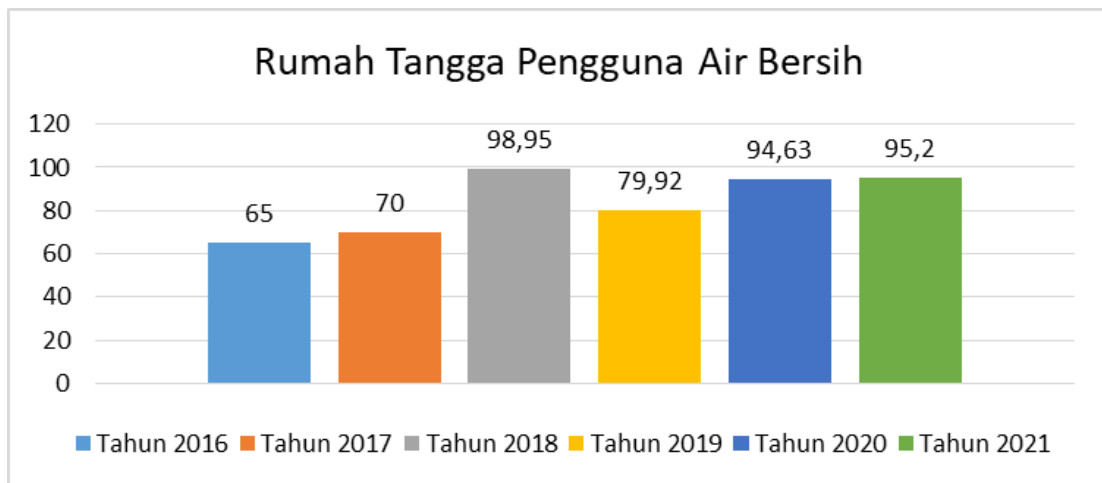


Sumber: BPS Kab. Sumedang dan Bappppeda Kab. Sumedang (2022)

Ketersediaan air bersih di Kabupaten Sumedang masih berada pada angka 70% masyarakat yang dapat mengakses air bersih pada Tahun 2017. Capaian ini sudah mengalami perbaikan dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 yang baru mencapai angka 65%. Untuk mencapai target nasional sebesar 100% penduduk yang memiliki akses air bersih di Tahun 2021, akan tetapi pada tahun tersebut pun masih 95,20% masyarakat yang terlayani akses air bersih. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten

Sumedang masih harus terus melakukan perbaikan. Terutama dalam hal penyediaan air di wilayah-wilayah yang memiliki akses sulit terhadap sumber air bersih.

Grafik 2.66
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2022)

Untuk Kecamatan penyumbang akses air bersih terendah yaitu Kecamatan Cimanggung, diperkirakan sumber-sumber air bersih untuk masyarakat diambil oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi terutama produksi makanan dan minuman di wilayah tersebut. Sedangkan untuk penyumbang akses air bersih tertinggi yaitu Kecamatan Tanjungmedar, diperkirakan pada wilayah tersebut masih banyaknya sumber mata air yang dapat dipakai sebagai sarana air bersih.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang menggambarkan Aspek daya saing daerah dalam konteks fokus iklim berinvestasi antara lain adalah : (1) lama proses perizinan; (2) jumlah macam pajak dan retribusi daerah; dan (3) jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf selanjutnya dengan mengacu pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51
Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lama Proses Perizinan	14 HK	14 HK	Max. 5 HK	Max. 5 HK	Max. 5 HK	Max. 5 HK
Jumlah dan macam pajak retribusi daerah	Retribusi IMB, Ho dan Trayek	Retribusi IMB, Ho dan Trayek	Retribusi IMB, Ho dan Trayek	Retribusi IMB, Ho dan Trayek	Retribusi IMB, Ho dan Trayek	Retribusi IMB, Ho dan Trayek
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu	Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu	Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu	Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu	Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu	Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang (2022)

Indikator Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2017 lama perizinan mencapai 14 hari kerja Dengan adanya aplikasi SI ICE MANDIRI dengan sistem *Online Single Submission*, lamanya pengurusan perizinan bisa diperpendek hingga 5 (lima) hari kerja, dengan ketentuan semua persyaratan perizinan terpenuhi.

Pajak dan retribusi yang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Sumedang selama Tahun 2016-2021 antara lain adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak restoran Retribusi IMB, Ho, Trayek angkutan dan untuk kedepannya dengan adanya retribusi yang bersumber dari Parkir Berlangganan dengan harapan dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha selama kurun waktu Tahun 2016-2021 adalah Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang menggambarkan daya saing daerah dalam konteks fokus sumber daya manusia di suatu daerah antara lain adalah (1) Rasio ketergantungan; (2) jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan; (3) jumlah PNS menurut pendidikan yang ditamatkan. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan

informasi yang dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf di bawah ini.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong sebagai negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Tahun 2021 angka ketergantungan Kabupaten Sumedang mencapai 51,058%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Walaupun kenaikan penduduk terbesar di Kabupaten Sumedang berkisar di usia < 15 tahun yang merupakan usia non produktif, namun secara total jumlah penduduk usia produktif berkisar antara 15-64 tahun tetap tertinggi, sehingga berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Tabel 2.52
Rasio Ketergantungan
Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	256.140	259.870	267.175	265.798	275.312	305.610
Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	100.345	95.447	100.574	109.319	101.934	88.178
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (Usia <15 Tahun + usia >64 Tahun)	356.485	355.317	367,749	375.117	377.246	393.788
Penduduk Usia 15-64	759.569	775.974	784.247	780.449	779.341	771.259
Rasio ketergantungan	46,25	45,94	48,87	47,12	48,13	51,058

Sumber : Bappppeda dan Disdukcapil Kab. Sumedang (diolah) (2022)

Rasio pencari kerja lulusan S-1/S-2/S-3 dan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan dapat menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah, sehingga dapat menjadi landasan pembuatan strategi peningkatan kualitas SDM dan strategi peningkatan lapangan kerja.

Berdasarkan Tabel dibawah diketahui bahwa pada Tahun 2021 pencari kerja yang terdaftar dengan tingkat pendidikan S1 mencapai 182 orang. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 di mana pencari kerja yang terdaftar berjumlah 390 orang, maka terjadi penurunan.

Tabel 2.53
Rasio Pencari Kerja Lulusan S-1/S-2/S-3
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2021 (%)

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pencari kerja yang terdaftar lulusan S-1	108	143	1.576	511	390	182
Pencari kerja yang terdaftar lulusan S-2	5	7	12	2	0	0
Pencari kerja yang terdaftar lulusan S-3	0	0	0	0	0	0
Jumlah Lulusan S-1/S-2/S-3	113	150	1.588	513	390	825
Jumlah Penduduk	1.142.097	1.146.435	1,148,198	1.154.458	1.159.454	1.165.047
Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3	1,0	1,31	13,83	0,04	0,03	0,07

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2022)

Jika mengamati data tabel di bawah, pada Tahun 2021, terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor industri ke sektor jasa, ini berarti sektor jasa saat ini mendominasi lapangan kerja di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu peningkatan jenjang pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah pengangguran.

Tabel 2.54
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan
Tahun 2021 (jiwa)

No	Lapangan Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	148.643
2	Industri Pengolahan	153.930
3	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	272.033
Jumlah		574.606

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2022)

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Sumedang mayoritas berpendidikan terakhir S-1. Hal ini bermakna pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang secara umum telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berpikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (*Benjamin S. Bloom, 1956*).

Namun demikian dalam perspektif ke depan perlu terus ditingkatkan kualitas pendidikan pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang pada jenjang S2 dan S-3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang terus berkembang dan bersifat multidimensi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.55
Jumlah PNS yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PNS di Pemda Sumedang	11.656	11.344	10.614	10.006	9.945	9.252
PNS Lulusan D3 ke Bawah	2.054	-	1.858	3.413	2.986	2.675
PNS Lulusan S1	6.450	6.305	6.337	6.038	6.416	6.643
PNS Lulusan S2	574	552	538	548	539	529

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PNS Lulusan S3	10	9	6	5	4	5

Sumber : Bappppeda Kabupaten Sumedang dan BKPSDM Kab. Sumedang (2022)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

2.2.1.1. Metode Evaluasi

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah (1) data capaian indikator output kegiatan serta realisasi anggaran kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2022; dan (2) data capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.

2.2.1.2. Metode analisis

Analisis dalam evaluasi RKPD Kabupaten Sumedang Triwulan I Tahun 2022 secara umum menggunakan metode *rapid assessment* yang menilai capaian realisasi terhadap target/menilai realisasi berdasarkan tren/menilai rata-rata realisasi, dengan menggunakan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Skala penilaian peringkat kerja sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.56
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja (Tahunan)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ Nilai ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ Nilai ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ Nilai ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ Nilai ≤ 65 %	Rendah
5	Nilai ≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

2.2.2. Hasil Evaluasi

2.2.2.1 Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2022

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk 1) mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana

pembangunan Daerah; 2) konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan 3) kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dari penetapan indikator kinerja daerah (IKD) ialah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun Indikator kinerja utama merupakan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan, visi dan misi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. Hasil Evaluasi Renja Capaian Kinerja dengan Korelasi antara Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.57

Evaluasi Renja Capaian Kinerja dengan Korelasi antara Indikator Kinerja Daerah dengan Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
1	ANGKA HARAPAN HIDUP	Rasio Kematian Ibu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	28,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	42,36	DINKES
		Rasio Kematian Bayi			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	13,68	
		Prevalensi Balita Stunting	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	48,65	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten /Kota	48,65	
		Angka Kematian karena Penyakit DBD	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	31,67	Pemberian izin apotek,toko obat,toko alat kesehatan dan optikal,usaha mikro obat tradisional (UMOT)	36,67	
		Akreditasi RS sesuai Standar Nasional			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	26,67	

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
					diproduksi oleh industri Rumah Tangga		
		Indeks IKM Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100,00	Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /kota	100,00	
2	RATA RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH	Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetisi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	22,58	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21,39	DISDIK
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22,25	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	21,67	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25,00	
3	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	66,54	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	66,54	DPUTR

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	25,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	25,00	DINSOS
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	28,63	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6,43	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	21,32	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	21,32	
		Persentase Luas Kawasan Kumuh	Program Pengembangan Perumahan	23,25	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	46,50	PERKIMTAN
		Rasio Rumah Layak Huni			Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0,00	
		Total Fertility Rate (TFR)	Program Pengendalian Penduduk	10,00	-		DPPKBP3A
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	29,02	-		
		Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	18,20	-		
		Persentase Keluarga Sejahtera 1					

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
4	INDEK PEMBERDAYAAN GENDER DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	Persentase Perempuan yang Mampu Memenuhi Kehidupan Keluarga	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	37,50	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25,00	
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	50,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	25,00	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,00	
		Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan	-	-	-		
		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	50,00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,00	
		Kabupaten Layak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	27,50	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27,50	

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
5	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0,00	BAKESBANGPOL
			PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25,00	
			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	50,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	50,00	
			PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	65,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	65,00	
		Tingkat Bina Demokratisasi	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Penge	75,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	75,00	

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
		Cakupan Penanganan Penyelenggaraan K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,17	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35,84	SATPOLPP
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	48,00	
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	66,67	
		Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	63,92	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	26,55	SETDA
6	LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengelolaan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	15,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	15,00	DKPP
		Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	40,00	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	40,00	

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
		Eceran : Reparasi Mobil dan Sepedah Motor	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	40,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20,00	
					Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	0,00	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	26,85	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/Kota	22,22	
					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	33,33	
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	35,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	35,00	

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	25,00	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	25,00	
7	LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7,28	Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian	12,55	DPKP
		Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2,00	
		Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	33,91	Pengembangan Prasarana Pertanian	25,00	
					Pembangunan Prasarana Pertanian	42,82	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	25,00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	25,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	20,40	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	20,40	
		Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	70,00	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	70,00	DISPETERIK

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
		Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	62,50	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	62,50	
		Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	25,00	Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain	25,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	20,00	Pengembangan Prasarana Pertanian	35,00	
					Pembangunan Prasarana Pertanian	10,00	
					Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	15,00	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	10,00	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10,00		
Persentase Wilayah yang Terkendali dari penyakit hewan menular strategis	-	-	-	-			
8	LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Cakupan Perlindungan/Pengembangan /Pemanfaatan/Pembinaan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	54,41	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	54,41	DISBUDPARPORA
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	50,00	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	0,00	
					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100,00	
			-		-		
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	36,49	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	22,99	
					Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	50,00	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		27,33	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	
9	INDEKS KUALITAS INFRASTRUKTUR	Persentase Tingkat Kondisi Jalan kabupaten Mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	25,17	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	25,17	DPUPT
		Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	40,38	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,38	
		Persentase Luas Kawasan Kumuh	-		-		

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
		Cakupan Kelancaran, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	62,84	PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/ KOTA	100,00	DISHUB
	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/ KOTA				55,45		
	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C				96,00		
	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR				45,00		
	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR				54,61		
	PELAKSANAAN MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/ KOTA				100,00		
	PERSETUJUAN HASIL ANALISA DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA				63,00		
	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1				10,76		

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
					(SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA		
10	INDEKS KETAHANAN DAERAH	Indeks Ketahanan Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	56,18	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50,00	BPBD
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	57,90	
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	71,81	
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	45,00	
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	48,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	48,00	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	79,92	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	76,50	SATPOLPP

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
		Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	83,34	
11	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0,00	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	DPKP
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	25,00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	50,00	
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0,00	
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	25,00	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	56,00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	56,00		
Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepedah Motor	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	26,85	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	22,22	DKPP		

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
					Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	33,33	
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,00	
12	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	15,00	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	30,00	DLHK
					Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	0,00	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50,00	

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	25,00	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	64,33	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	64,33	
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	30,00	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	30,00	
		Persentase Penanganan Sampah	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	21,43	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	21,43	
		Persentase Pengurangan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	44,00	Kegiatan Pengelolaan Sampah	44,00	
		13	PERSENTASE PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	24,92	

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
					Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5,84	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	20,74	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20,74	
14	NILAI SAKIP KAB. DAN OPINI BPK	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	24,87	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	23,72	BKAD
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	25,00	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	42,31	
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	33,33	
					Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	43,75	Pengelolaan Barang Milik Daerah	43,75	

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU	
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN		
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	59,83	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	59,83		
		Maturitas SPIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	50,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	46,67	INSPEKTORAT	
		Persentase Tindaklanjut pemeriksaan (THLP) yang diselesaikan rekomendasi			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	53,33		
		Persentase pemenuhan Infrastruktur peningkatan Kapasitas APIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	52,78	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	52,78		
		Persentase Penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD						
		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM						
		Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	50,56	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	55,00		BAPPPEDA
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	56,67		

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
		Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang Berkategori "Baik"	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	50,56	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	51,59	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	54,67	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	62,69	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	37,41	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	54,60	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	70,83	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0,00	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	58,49	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	34,49	
15	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Indeks Profesionalitas ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	35,18	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	32,86	BKPSDM

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
		Indeks Sistem Merit			Mutasi dan Promosi ASN	53,73	
					Pengembangan Kompetensi ASN	23,29	
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30,83	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	25,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	0,00	DISDUKCAPIL
		Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	25,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	25,00	
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	60,58	Pelayanan Pencatatan Sipil	75,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	45,79	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45,79	DPMPTSP

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	28,67	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28,67	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50,00	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,00	
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	59,83	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Persentase Masyarakat dalam Memahami Program-Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	61,20	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61,20	DISKOMSANDITIK
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35,42	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,92	BAPENDA
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					
		16	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	Nilai SPBE	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	43,45	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49,40	

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
		Score Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	76,25	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52,50	
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	
17	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan ditempatkan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	55,71	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	17,86	DISNAKERTRANS
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100,00	
					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100,00	
					Pengakuan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5,00	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	70,83	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	62,50	
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	75,00	
		Penertiban Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			75,00		
Jumlah Koperasi yang Modern	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	0,00	DKPP		

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
					Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	10,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10,00	
		Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omset	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	25,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	25,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	33,33	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	33,33	
		Cakupan Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	87,50	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan	100,00	

NO	IKU KEPALA DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN		PD PENGAMPU
			NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
			KEKAYAAN INTELEKTUAL		kreatif di daerah kabupaten/kota Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	75,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	37,50	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	37,50	

Sumber : Bapppeda Kab. Sumedang (2022) (diolah)

Indikator Utama Daerah Kabupaten Sumedang berjumlah 20 indikator yang dibidik oleh 74 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan 93 program dan 151 kegiatan yang tersebar pada 25 SKPD, dengan demikian terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah Kabupaten yang tidak membidik Indikator Utama Daerah yaitu Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Sekretariat Dewan. Berdasarkan Tabel 2.52 diketahui bahwa sampai dengan triwulan kedua, rata-rata capaian program masih termasuk ke dalam kategori “**Sangat Rendah**” sampai “**Sedang**” yang artinya bahwa capaian kinerja masih kurang dari 50 persen dan atau paling besar capaiannya sekitar 75 persen. Perhitungan capaian kinerja program didapat dari rata-rata total capaian kinerja kegiatan. Korelasi antara IKU Perangkat Daerah dan IKD didasarkan atas *cascading* program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Bappppeda, sehingga dapat dilihat program dan kegiatan yang seharusnya menjadi prioritas setiap Perangkat Daerah untuk membidik IKU SKPD dan IKU Kepala Daerah.

Permasalahan rendahnya capaian kinerja di setiap Perangkat Daerah diakibatkan masih adanya ketergantungan PD dalam setiap pengerjaan kegiatan terhadap besaran atau ada/tidaknya anggaran pada tahun berjalan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata program/kegiatan yang capaiannya rendah masih berupa kegiatan yang melibatkan jasa pihak ketiga baik berupa jasa konsultasi ataupun konstruksi, serta kegiatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan penjadwalan dari kementerian.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi yang tercantum dalam sub bab evaluasi capaian RKPD Tahun 2020, evaluasi capaian RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, dan gambaran umum kondisi daerah. Berikut permasalahan pembangunan yang disusun menurut bidang urusan.

2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1. Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan Urusan Pendidikan meliputi :

- a. rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan lembaga PAUD;
- b. kurangnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan PAUD;

- c. terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat;
- d. kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan;
- e. proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam masa AKB/ *New Normal* dilaksanakan secara *virtual/daring*, keterbatasan jaringan dan akses internet di daerah-daerah menjadi permasalahan utama;
- f. salah satu akibat dari pandemi *covid-19* dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah persentase anak yang putus sekolah, sebagai dampak dari hilangnya mata pencaharian orang tua.

2.3.1.1.2. Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan Urusan Kesehatan meliputi :

- a. belum tercapainya target Puskesmas perawatan karena terbatasnya anggaran peningkatan sarana dan prasarana bangunan Puskesmas Perawatan, alat kesehatan dan juga SDM kesehatan yang sangat terbatas;
- b. belum tercapainya jumlah Puskesmas mampu PONED (Pelayanan *Obstetrik Neonatal Emergensi* Dasar);
- c. belum optimalnya cakupan rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam pencegahan stunting di Kabupaten Sumedang;
- e. belum terlayannya jaminan kesehatan penduduk 100%;
- f. belum optimalnya kualitas air minum yang memenuhi syarat yang diakibatkan oleh pengaruh geografis, topografis, juga kondisi sarana prasarana air yang ada di masyarakat;
- g. belum adanya pemutakhiran data indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilayani oleh RSUD;

2.3.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

- a. masih banyaknya kegiatan kurang menembak target RPJMD;
- b. terbatasnya kualitas sumber daya manusia untuk perencana dan pengawas;
- c. kurang optimalnya pelayanan UPT karena terbatasnya prasarana alat berat dan laboratorium yang baik;

- d. kajian mengenai peningkatan status jalan kabupaten jarang dilakukan karena harus ada rekomendasi dari Pemerintah Pusat/provinsi/Gubernur;
- e. masih adanya rencana permohonan pembangunan RTH yang belum dilaksanakan, sehingga belum terhitung jumlah RTH yang sudah ada;
- f. banyaknya kegiatan jalan pada ruas jalan non status sehingga tidak dapat dihitung ke dalam target RPJMD;
- g. masih belum optimalnya penanganan TPT dan drainase jalan serta peningkatan rehabilitasi jalan di Kabupaten Sumedang;
- h. kurangnya koordinasi antara PD yang menangani permasalahan terkait pariwisata, pembangunan di sekitar bantaran sungai dan drainase dengan Dinas PUPR, sehingga terjadi permasalahan di lapangan serta terlihat kurang efisiensinya kegiatan yang dilaksanakan karena kurang membidik perencanaan pembangunan;
- i. belum optimalnya pelaksanaan program IPDMIP di Kabupaten Sumedang;

2.3.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi:

- a. belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penanganan pembangunan Kabupaten Sumedang;
- b. rendahnya sarana penyediaan air bersih di perdesaan;
- c. belum optimalnya penanganan drainase dan limbah domestik;
- d. belum terbangunnya sarana penunjang menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan Kabupaten Sumedang, terutama penataan PKL;
- e. belum tercapainya kegiatan PAMSIMAS karena keterbatasan dan tidak tersedia sumber mata air;
- f. kurangnya SDM yang kompeten;
- g. belum tersedianya database rumah tinggal.

2.3.1.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

- a. rendahnya kualitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
- b. kurangnya jumlah anggota Satpol PP untuk melakukan patroli terutama di daerah perbatasan
- c. kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas;
- d. masih kurangnya tenaga PPNS;
- e. kurangnya pos pelayanan dan jumlah mobil pemadam kebakaran sebagai pendukung kegiatan penanggulangan kebakaran;
- f. minimnya jumlah petugas Damkar yang memenuhi kualifikasi;
- g. BPBD Kabupaten Sumedang Klasifikasinya Masih Tipe B, maka sumber daya manusia yang ada belum optimal dalam menangani permasalahan kebencanaan yang ada di Kabupaten Sumedang;
- h. tim Relawan Bencana di setiap Kecamatan belum terbentuk karena belum adanya dukungan anggaran;
- i. belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- j. kurangnya informasi bencana serta logistik untuk penanggulangan bencana.

2.3.1.1.6. Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan Urusan Sosial meliputi:

- a. belum optimalnya pelayanan dalam penanganan PPKS di Kabupaten Sumedang;
- b. masih adanya data DTKS dan Non DTKS yang belum sesuai data dilapangan;
- c. rendahnya sarana dan prasarana pelayanan Kesos.

2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan Urusan Tenaga Kerja meliputi:

- a. kurangnya peminat program pelatihan sehingga dalam pencapaian standar pelayanan minimal kurang maksimal;
- b. kurangnya tenaga instruktur pelatihan;
- c. kurangnya pemahaman pekerja/buruh serta perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan;

- d. masih adanya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, seperti perselisihan mengenai hak, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan kepentingan;
- e. masih rendahnya data mengenai jumlah pekerja/buruh perusahaan;
- f. jumlah lowongan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja;
- g. kompetensi Calon Tenaga Kerja tidak dapat memenuhi bursa kerja;
- h. akibat pandemi Covid-19 banyak tenaga kerja yang dirumahkan dan diberhentikan/PHK.

2.3.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. masih rendahnya kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan;
- b. perempuan dan anak masih menjadi sasaran utama tindak kekerasan;
- c. masih rendahnya tingkat kesejahteraan anak;
- d. belum tersedianya data terbaru mengenai organisasi wanita yang aktif;
- e. kurangnya sosialisasi mengenai Lembaga-lembaga perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak.

2.3.1.2.3. Urusan Pangan

Permasalahan pembangunan urusan Pangan meliputi:

- a. semakin berkurangnya areal persawahan produktif yang merupakan salah satu lumbung padi di Kabupaten Sumedang;
- b. berkurangnya jumlah produksi bahan pangan;
- c. masih rendahnya cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- d. belum optimalnya pengawasan distribusi pangan.

2.3.1.2.4. Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan urusan Pertanahan meliputi:

- a. Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum masih belum terpenuhi terutama proyek-proyek strategis;
- b. Masih banyaknya asset pemerintah daerah yang belum jelas legalitasnya;

2.3.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan urusan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. daya tampung TPS per satuan penduduk masih kecil, hal ini karena belum tersedianya lahan untuk penambahan TPS di perkotaan;
- b. Belum optimalnya pengembangan RTH Publik;
- c. Belum terdatanya kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan
- d. Belum optimalnya pemantauan kualitas udara dan air;

2.3.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

- a. Terbatasnya blanko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga menghambat pencetakan KTP-el bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman;
- b. Terbatasnya mesin cetak KK dan KTP sehingga pelayanan masih dilaksanakan di dinas;
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merekam setiap kejadian, terutama untuk melaporkan kematian.

2.3.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

- a. Belum optimalnya pengelolaan BUMDes;
- b. Belum optimalnya penyediaan kebutuhan dan data untuk Desa Wisata dan Inovasi Desa;
- c. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna di desa.

2.3.1.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

- a. Belum optimalnya pelayanan PUS dan MKJP kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya peserta KB aktif;
- c. Belum adanya pembaharuan data statistik rata-rata usia menikah wanita;

- d. Banyak peristiwa pernikahan dini bagi remaja akibat Pandemi Covid-19.

2.3.1.2.9. Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan urusan Perhubungan meliputi:

- a. Belum berhasilnya penanganan masalah kemacetan di simpul titik kemacetan Kabupaten Sumedang, yaitu simpangan pusat aktifitas di ibukota, Pasar dan Alun-alun Tanjungsari, pertigaan Cimalaka, dan Jatinangor;
- b. Belum optimalnya pengendalian penghentian kendaraan ilegal;
- c. Belum optimalnya pengelolaan parkir termasuk pengendalian parkir liar;
- d. Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan PJU;
- e. Belum optimalnya sosialisasi keselamatan berlalu lintas;
- f. Belum optimalnya penyediaan rambu dan marka serta fasilitas lalu lintas lainnya, khususnya di perkotaan;
- g. Belum optimalnya pelayanan terminal tipe C yang sudah ada;
- h. Belum adanya terminal barang;
- i. Belum memadainya koordinasi terkait pembatasan angkutan barang yang melalui jalan arteri di Kabupaten Sumedang, sehingga berakibat pada kemacetan, polusi, rawan kecelakaan, dan lain-lain;
- j. Belum optimalnya pemeliharaan dan pengawasan dan penggunaan fasilitas lalu lintas (halte, zebra cross, zona selamat sekolah, trotoar, dan lainnya);
- k. Belum memadainya trayek angkutan penumpang antar kecamatan;
- l. Minimnya sarana dan prasarana uji kendaraan;
- m. Belum adanya pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi air (Waduk Jatigede) dan dampak aktifitas Pariwisata di sekitar Waduk Jatigede;

2.3.1.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika meliputi:

- a. Rendahnya kualitas ASN dibidang IT dan masih kurangnya penggunaan TIK untuk menunjang penyelesaian pekerjaannya;
- b. Sarana dan prasarana penunjang ASN dalam hal IT masih sangat minim;
- c. Belum optimalnya penggunaan system manajemen perangkat daerah;

- d. Belum meratanya penyebaran pemasangan akses internet di Desa/Kelurahan;
- e. Akses informasi terbatas dan tidak terkoordinir;

2.3.1.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi:

- a. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta UMKM;
- b. Rendahnya kemitraan yang terjalin antara UMKM dengan pelaku usaha menengah dan besar (retail);
- c. Belum terdatanya jumlah koperasi yang masih aktif;
- d. Belum adanya database UMKM yang telah diperbaharui;
- e. Masih rendahnya wawasan, keterampilan dan kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha lokal/UMKM;
- f. Masih rendahnya akses permodalan dan pemasaran produk UMKM;
- h. Rendahnya minat masyarakat terhadap produk dalam negeri;

2.3.1.2.12. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan urusan Penanaman Modal meliputi:

- a. Upaya meningkatkan investasi di kabupaten sumedang masih bersifat sektoral sehingga prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal belum optimal;
- b. Pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Sumedang belum optimal;
- c. Kurangnya angka investor yang datang berinvestasi di Kabupaten Sumedang;
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

2.3.1.2.13. Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan urusan Statistik meliputi:

- a. Kurang memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya dalam bidang statistik;
- b. Belum adanya pemutakhiran dan pengintegrasian data statistik daerah;

- c. Kurangnya kesinambungan penyediaan data makro daerah di Kabupaten Sumedang

2.3.1.2.14. Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan urusan Persandian meliputi:

- a. Tidak adanya ASN yang ahli persandian/sandiman/sandiwati;
- b. Belum optimalnya pengamanan informasi daerah;
- c. Kurangnya kepedulian dan dukungan pada pelaksanaan urusan persandian.

2.3.1.2.15. Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan urusan Kebudayaan, meliputi:

- a. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya;
- b. Pelaksanaan event seni budaya masih terbatas;
- c. Belum optimalnya kontribusi budayawan lokal dalam pengembangan Kabupaten Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda;
- d. Pelestarian situs cagar budaya belum optimal.

2.3.12.2.16. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan urusan Perpustakaan meliputi:

- a. Kurangnya minat baca masyarakat;
- b. Tidak ada Pustakawan di Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
- c. Kurangnya koleksi bahan pustaka;
- d. Belum optimalnya kegiatan perpustakaan keliling (Pusling);
- e. Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif.

2.3.1.2.17. Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan urusan Kearsipan meliputi:

- a. Kurangnya pengelola kearsipan/arsiparis;
- b. Belum tersedianya digitalisasi arsip sebagai salah satu bentuk pelayanan arsip daerah;
- c. Belum optimalnya pemeliharaan arsip daerah;
- d. Belum representatifnya Gedung depo arsip sehingga pelayanan kearsipan belum berjalan secara optimal.

2.3.1.3. Urusan Pilihan

2.3.1.3.1. Urusan Perikanan

Permasalahan pembangunan urusan Perikanan meliputi:

- a. Tidak tercapainya target konsumsi makan ikan yang telah digalakan oleh pemerintah kepada masyarakat;
- b. Belum optimalnya produksi ikan, baik ikan hias, ikan konsumsi dan benih ikan;
- c. Kurangnya pemasaran produksi perikanan.

2.3.1.3.2 Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan urusan Pariwisata meliputi:

- a. Akses menuju destinasi wisata kurang memadai;
- b. Terbatasnya pelaksanaan event festival;
- c. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan;
- d. Masih rendahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan.

2.3.1.3.3. Urusan Pertanian

Permasalahan pembangunan urusan Pertanian meliputi:

- a. Kurangnya penerapan teknologi pertanian oleh petani;
- b. Masih rendahnya hasil usaha pertanian dan peternakan;
- c. Masih tingginya gangguan hama/penyakit tanaman yang menyebabkan penurunan tingkat produksi pertanian;
- d. Makin berkurangnya luas lahan pertanian produktif;
- e. Minat usaha tani dan ternak yang semakin berkurang;
- f. Belum optimalnya penyampaian informasi mengenai pertanian dan peternakan kepada masyarakat;
- g. Skala usaha relatif masih rendah dan keterbatasan permodalan;
- h. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang dipakai sebagai jalur lalu lintas angkutan ternak dari dalam/luar daerah, sehingga ternak rentan tertular penyakit;
- i. Produktivitas ternak masih relatif rendah;
- j. Tempat pemotongan hewan ternak/unggas di bawah standar ketentuan kesmavet;
- k. Belum tersedianya Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah;
- l. Kurangnya ketersediaan hijauan makanan ternak pada musim kemarau;

- m. Belum terkoordinasikannya pengawasan kesmavet dan pengendalian penyakit hewan zoonosis dengan instansi/stakeholders terkait;
- n. Masih rendahnya pemahaman para konsumen maupun pelaku tata niaga tentang pangan asal hewan yang ASUH dan bahayanya penyakit yang bersifat zoonosis;
- o. Belum optimalnya kelompok dan organisasi tani dan peternak sebagai mitra kerja dinas;
- p. Kurangnya akses permodalan dan pemasaran produk hasil pertanian dan peternakan;
- q. Belum adanya data statistik peternakan.

2.3.1.3.4. Urusan Kehutanan

Permasalahan pembangunan Bidang Kehutanan meliputi:

- a. Alih fungsi Kawasan hutan menjadi areal genangan Waduk Jatigede;
- b. Kurang efisiensinya pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura).

2.3.1.3.5. Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan urusan Perdagangan meliputi:

- a. Belum adanya kesepakatan kerjasama antara distributor, koperasi dan pelaku usaha perdagangan untuk melakukan sistem jaringan usaha;
- b. Belum terwujudnya kesepakatan antara warga pasar dengan Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan pasar;
- c. Masih terdapatnya lahan-lahan belum bersertifikat yang akan diperuntukan pembangunan pasar;
- d. Belum adanya data valid mengenai perdagangan besar dan eceran yang tersebar di Kabupaten Sumedang;
- e. Kurang fahamnya masyarakat untuk melakukan perdagangan secara online.

2.3.1.3.6. Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan urusan Perindustrian meliputi:

- a. Belum adanya pemutakhiran data mengenai jumlah IKM di Kabupaten Sumedang;
- b. Sarana dan prasarana IKM belum memadai;
- c. Belum optimalnya jasa pelayanan/rekomendasi untuk pemberian lisensi terhadap produk IKM (seperti HAKI, Hak Cipta, Label Halal)
- d. Belum optimalnya pemasaran produk IKM;

- e. Belum adanya tempat/galeri untuk mempromosikan produk IKM Sumedang tingkat kabupaten.

2.3.1.3.7. Urusan Transmigrasi

Permasalahan pembangunan urusan Transmigrasi meliputi:

- a. Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam hal penentuan lokasi transmigrasi;
- b. Pemberitahuan penentuan lokasi penempatan transmigran dilakukan pada pertengahan tahun sehingga kegiatannya tidak sesuai dengan perencanaan yang ditentukan oleh Kabupaten;
- c. Kurangnya informasi dan minat masyarakat untuk mengikuti Program Transmigrasi.

2.3.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.1.4.1. Bidang Perencanaan

Permasalahan pembangunan dalam Bidang Perencanaan meliputi:

- a. Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
- b. Perencanaan terkadang belum sesuai dengan hasil evaluasi pembangunan;
- c. Belum semua Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian pembangunan yang berkategori baik; dan
- d. Kurangnya pemahaman akan kedudukan perencanaan pembangunan.

2.3.1.4.2. Bidang Keuangan Daerah

Permasalahan pembangunan dalam Bidang Keuangan Daerah meliputi:

- a. Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah; dan
- b. Masih rendahnya kualitas dokumen keuangan daerah.

2.3.1.4.3 Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan dalam Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan meliputi:

- a. Anggaran yang diperuntukan bagi kegiatan diklat masih rendah, sehingga target peserta diklat disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Sehingga berdampak pada jumlah pejabat yang belum melaksanakan diklat kepemimpinan.

- b. Masih rendahnya pegawai memahami dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan mengenai kepegawaian.
- c. Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan database ASN, terlebih saat ini Sumedang menggalakkan *e-Government*.
- d. Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dikarenakan adanya rasionalisasi dan realokasi anggaran untuk penanggulangan *covid-19*.

2.3.1.4.4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi:

- a. Terbatasnya fungsional peneliti; dan
- b. Belum optimalnya penyebarluasan informasi arah rencana penelitian dan pengembangan.

2.3.1.4.5. Fungsi Lainnya

Permasalahan pembangunan dalam fungsi lain penunjang pemerintahan daerah meliputi:

- a. Belum sinerginya program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan daerah perbatasan dan daerah lainnya;
- b. Belum optimalnya kerja sama antar daerah sebagai salah satu solusi dan inovasi penyelenggaraan pembangunan;
- c. Belum lengkapnya database potensi daerah yang akan dikerjasamakan atau dipromosikan dengan/ke daerah lain;
- d. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal mempermudah alur kerja sama;
- e. Kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan sinergitas dalam menjalankan pemerintahan;
- f. Proses mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan baik yang berasal dari Provinsi ataupun Pusat melalui mekanisme tugas pembantuan dan urusan bersama masih dilaksanakan secara sektoral tanpa melakukan koordinasi dengan SKPD atau pemerintah setempat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan;
- g. Fungsi koordinasi dari Setda masih dianalogikan sebagai kegiatan residu dari kegiatan yang belum dilaksanakan oleh SKPD teknis;

- h. Dalam fungsi manajemen, Setda belum menjadi penentu bagi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD;
- i. Banyaknya kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan dan harus terdani namun tidak seimbang dengan anggaran yang tersedia
- j. Pelayanan publik di Kecamatan belum optimal;
- k. Belum tersusunnya petunjuk teknis penggunaan Dana Kelurahan sehingga belum bisa memaksimalkan penggunaan Dana Kelurahan;
- l. Belum dilaksanakannya pemutakhiran mengenai indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang;
- m. Memudarnya pengetahuan/pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara untuk generasi muda;
- n. Belum adanya sistem informasi ormas untuk mengetahui jumlah Ormas yang aktif serta masih adanya stigma negatif terhadap Ormas di masyarakat;
- o. Belum optimalnya pengawasan Orang Asing, Lembaga Asing, dan Tenaga Kerja Asing yang terdapat di Kabupaten Sumedang;
- p. Belum optimalnya pemantauan organisasi terlarang;
- q. Masih adanya potensi terorisme dan radikalisme;

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan Daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat tahun berjalan dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang akan dicapai pada Tahun selanjutnya dengan kondisi riil pada saat perencanaan tersebut dibuat. Identifikasi permasalahan ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Identifikasi dilakukan untuk menghimpun potensi daerah dalam sebuah sistem pembangunan daerah yang sinergis. Berikut adalah identifikasi permasalahan di Kabupaten Sumedang berdasarkan potensi daerah yang terbagi dalam 33 urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 2.58
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pendidikan SD <ol style="list-style-type: none"> a. Akses ke fasilitas pendidikan masih sulit karena tidak seimbangnya sebaran fasilitas pendidikan SD dengan penduduk usia SD dan belum seimbangnya penataan dan pemerataan guru sesuai kualifikasi yang dibutuhkan; b. Masih lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan pendidikan SD/kesiswaan/penerapan kurikulum 2013. 2. Pelayanan Pendidikan SMP <ol style="list-style-type: none"> a. Akses ke fasilitas pendidikan masih sulit karena tidak seimbangnya sebaran fasilitas pendidikan SMP dengan penduduk usia SMP dan belum seimbangnya penataan dan pemerataan guru sesuai kualifikasi yang dibutuhkan; b. Masih lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan pendidikan SMP (tenaga pendidik-kesiswaan-penerapan kurikulum 2013). 3. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan Paket A-B-C; b. Belum adanya insentif terhadap tenaga kependidikan PAUD Dikmas; 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		c. Kualifikasi dan kompetensi dan kreativitas pendidik dan tenaga kependidikan masih belum optimal. 4. Pelayanan sarana prasarana pelayanan pendidikan a. Belum optimalnya kualitas gedung sekolah, masih kurangnya ruang kelas dan belum lengkapnya fasilitas IT dalam mendukung KBM.	
2	Kesehatan	1. Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi di Jawa Barat; 2. Masih tingginya penyakit menular dan penyakit tidak menular; 3. Masih kurangnya SDM Kesehatan dan distribusi Nakes yang tidak merata di beberapa daerah; 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan; 5. Masih terdapat kesulitan akses ke pelayanan kesehatan.	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagian besar masih bertumpu pada retribusi jasa usaha, terutama yang bersumber dari sewa alat berat dan sewa pakai alat laboratorium; - Kurang disiplinnya masyarakat pengguna jalan terhadap batasan muatan kendaraan dan musim penghujan merupakan faktor yang dominan penyebab kerusakan jalan; - Terus bertambahnya aparatur melalui UPT PUPR tanpa adanya seleksi kemampuan yang kompeten dalam kinerja, 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<p>hal ini dikarenakan kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan kepegawaian, sehingga pelayanan kinerja kurang efektif;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasionalisasi anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang sering kali dilakukan, sehingga perencanaan kurang optimal yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan sering terlambat. 	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya. <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk kegiatan Bantuan Provinsi waktu pelaksanaan terbatas dari mulai terbitnya DPPA sampai dengan tahun anggaran, hanya tersisa waktu efektif 8 bulan, pelaksanaan fisik hanya efektif 6 bulan sehingga penyerapan anggaran dengan nilai besar sulit tercapai hanya; b. Untuk Pekerjaan Geotheater waktu pelaksanaan menunggu audit selesai; c. Nilai Anggaran untuk penyusunan DED terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan output yang diharapkan. 2. Program Penataan Bangunan Gedung <ol style="list-style-type: none"> a. Permasalahan yang terjadi di lapangan pada proses pelaksanaan pembangunan fisik terkendala oleh waktu yang terbatas, karena proses pengadaan jasa konstruksi pengawasan dan pelaksana pekerjaan konstruksi; b. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan pematangan lahan IPP terkendala oleh pengukuran lahan yang harus dipastikan kembali karena berkaitan dengan beberapa pihak. 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik <ol style="list-style-type: none"> a. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat; b. Pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi belum optimal; c. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD; d. Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dan elite Politik dalam proses penyelenggaraan demokrasi; e. Adanya Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kabupaten Sumedang terutama pembangunan Waduk Jati Gede, Berbagai Bendung, Bandara Kertajati, dan Jalan Tol Cisumdawu, yang akan mengakibatkan terciptanya konflik di tingkat masyarakat misalnya tuntutan ganti rugi; f. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami aspek demokrasi yang memberikan peluang luas terhadap masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah; g. Koordinasi dengan instansi vertikal yang baik dalam rangka penanganan berbagai hal koordinasi dengan instansi vertikal tidak mengalami hambatan karena telah terbangun sinergitas penguatan dan pengembangan jaringan yang terorganisir dengan baik dengan pihak Kepolisian, Kodim, Kodam, Korem, BIN dan Kejaksaan; 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<p>h. Tingkat Partisipasi masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap proses demokrasi cukup tinggi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013, Tingkat Partisipasi Masyarakat sebesar 78,45 % dan 78,75% dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Tingkat Partisipasi Masyarakat sebesar 80,62% dan 80,60% dari gambaran data di atas terjadi kenaikan tingkat partisipasi Pilgub sebesar 2,17% dan Pilbup sebesar 1,85% sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif Tahun 2014 sebesar 78,09% dan 80,22%;</p> <p>i. Kondusifitas daerah tetap terjaga berbagai proses demokrasi yang sudah dilaksanakan seperti Pilkada Serentak 2018, Pilkades Serentak Gelombang Kedua di 93 Desa dan Perayaan hari-hari besar keagamaan tidak memunculkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan Kondusifitas daerah dan tingkat kejahatan atau pelanggaran di wilayah Kabupaten Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain serta unjuk rasa dari komponen masyarakat berlangsung secara damai tidak anarkis;</p> <p>j. Sinergitas Forkopimda dalam Penanganan Masalah adanya dukungan dari para tokoh, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang meliputi Forkopimda, Forkopimda, Tiga Pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Babin kamtibmas) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ormas dan OKP;</p>	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<ul style="list-style-type: none"> k. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.); l. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; m. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah) potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi; n. Gangguan PEKAT masih tinggi; o. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing; p. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada; q. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik sosial; r. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi; s. Peran ormas di masyarakat belum optimal; t. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik sosial; u. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas; v. Belum terbentuknya sistem informasi ormas; w. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM; x. Sinergitas antar lembaga masih kurang; y. Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, dan parpol; z. Belum optimalnya pendidikan politik; aa. Belum optimalnya Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Sumedang. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik <ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan penanggulangan bencana belum sinergis dengan penegakan peraturan perundang-undangan di kawasan rawan bencana; 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<ul style="list-style-type: none"> b. Ketangguhan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana; c. Komitmen semua komponen dalam hal penanggulangan bencana; d. Banyaknya jenis dan intensitas bencana. <p>3. Satuan Polisi Pamong Praja</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Konflik kepentingan aparaturnya Pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat tertentu dalam upaya penegakan Peraturan perundang-undangan daerah; b. Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas; c. Belum optimalnya sistem koordinasi antar instansi terkait; d. Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah; e. Terbatasnya ruang atau lokasi yang dikhususkan bagi PKL; f. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga / memelihara ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat; g. Pada umumnya masyarakat belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi Satpol PP; h. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk menolak berkembangnya penyakit masyarakat; i. Kurangnya sarana prasarana Satpol PP; j. Keterbatasan Anggaran yang ada. 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
6	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum akurat (Valid); 2. Peran Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal; 3. Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial tingkat desa; 4. Sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memadai. 	
7	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelatihan yang disediakan oleh LPK swasta masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 2. Masih kurangnya tenaga SDM instruktur BLK yang berkompeten; 3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas lulusan BLK/LPK di dalam pasar kerja; 4. Kurang efektivitasnya informasi pasar kerja; 5. Belum tersedianya SDM fungsional pengantar kerja; 6. Belum optimalnya Keppres 04 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan; 7. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja yang ada; 8. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas komunikasi antara pekerja dengan pengusaha; 9. Masih adanya permasalahan hubungan antara pekerja dengan pengusaha; 10. Kurangnya tenaga fungsional mediator hubungan industrial. 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Kelompok UPPKS : a. Rendahnya motivasi keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 dalam berwirausaha; b. Tingkat kelangsungan hidup kelompok, dimana banyak usaha yang dilakukan oleh para anggotanya tidak berkembang secara baik; c. Keterbatasan kemampuan keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya dan potensi setempat guna memajukan kelompok; d. Rendahnya keterampilan pengurus dalam mengelola kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Keluarga dengan tahapan kesejahteraan yang lebih tinggi kurang memiliki minat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif di kelompok UPPKS.	
9	Pangan	a. Belum adanya lokus untuk kegiatan cadangan pangan.	
10	Pertanahan	1. Data base belum berbasis parsial karena membutuhkan anggaran yang besar; 2. Lahan Eks HGU Sampora belum dioptimalkan pemanfaatan lahannya masih berupa lahan kosong dan indikasi terlantar.	
11	Lingkungan Hidup	1. Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Tingginya produksi sampah tidak diimbangi oleh pertambahan lahan penampungan sampah, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan sampah. Kesadaran masyarakat	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<p>dalam pengelolaan sampah secara mandiri pun masih kurang. Lebih lanjut, fungsi ruang terbuka hijau masih belum optimal;</p> <p>2. Penataan dan Penataan Hukum Lingkungan Saat ini belum ada tenaga PPLH di Kabupaten Sumedang, di samping itu juga masih kekurangan tenaga PPNS. Hal tersebut menjadi penyebab masih lemahnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sumedang, fenomena masyarakat (<i>individu/corporate</i>) yang membuang limbah secara ilegal sulit dihindarkan karena keterbatasan para pengawas, ditambah juga masih minimnya instrumen untuk pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi demikian bermuara pada tingginya pencemaran dan pengrusakan lingkungan;</p> <p>3. Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Jumlah sarana prasarana untuk IPAL komunal dan IPLT masih terbatas karena keterbatasan lahan serta IPAL Komunal, dalam konteks ini masyarakat juga belum sepenuhnya mendukung penyediaan sarana prasarana tersebut. Beberapa mata air telah terjadi penurunan debit bahkan punah. Lebih lanjut, koordinasi antar OPD masih kurang sehingga bermuara pada masih lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p>	
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>1. Jangkauan pelayanan yang sangat luas;</p> <p>2. Ketersediaan blangko KTP dari pusat terbatas aplikasinya untuk daerah;</p> <p>3. Masih rendahnya pencatatan peristiwa penting lainnya (kematian, perkawinan dll);</p>	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		4. Pemanfaatan data penduduk yang masih belum maksimal penggunaannya; 5. Akses ke data center sangat terbatas, sehingga menghambat pelayanan administrasi kependudukan kabupaten sumedang; 6. Lambatnya <i>update data warehouse</i> di Kemendagri.	
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Bidang Pemerintahan Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Rendahnya Profesionalisme Aparatur Desa b. Masih lemahnya penerapan SPM Desa c. Masih lemahnya presentasi penataan batas desa d. masih rendahnya pemanfaatan kerjasama Desa 2. Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dalam pembangunan; b. Masih belum terpenuhinya beberapa regulasi untuk memperkuat LKD dan LAD; c. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat; d. Ketersediaan Kader pembangunan/pemberdayaan masyarakat masih terbatas. 3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa dan kerjasama Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya akses pengembangan usaha masyarakat desa; b. Belum optimalnya peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa; c. Rendahnya pemanfaatan potensi desa; 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<ul style="list-style-type: none"> d. Belum optimalnya pengembangan usaha produk unggulan daerah di tiap desa; e. Belum terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat (pangan dan sarana pengolahan air bersih melalui Pamsimas/KP-SPAM) 4. Bidang Keuangan dan Aset Desa <ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan aset desa; b. Masih tingginya kekhawatiran aparatur desa terhadap implikasi hukuman atas pengelolaan keuangan dan aset desa; c. Masih rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan desa. 	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hambatan Untuk TFR : <ul style="list-style-type: none"> a. Banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka kelahiran; b. Tingginya angka Pasangan Usia Subur Muda; c. Struktur penduduk usia muda tinggi; d. Masih cukup tinggi angka kelahiran. 2. Minat Keluarga Pra Sejahtera : <ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya motivasi keluarga pra sejahtera dalam berwirausaha; b. Belum optimalnya penyuluhan tentang pemberdayaan ekonomi terhadap keluarga Pra sejahtera; c. Bantuan modal untuk usaha masih terkendala. 3. Untuk ketahanan keluarga Kelompok BKB, BKR dan BKL Hambatannya disebabkan adanya anjuran dari pemerintah 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		dilarang berkerumun akibat pandemi Covid 19, sehingga kegiatan kelompok BKB, BKR, dan BKL tidak dapat Sepenuhnya dilaksanakan	
15	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya sistem penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten dengan proyeksi penyelenggaraan bidang perhubungan, sebagai contoh Pembangunan yang tidak diikuti oleh ketersediaan Satuan Ruas Parkir yang memadai dan ketersediaan Terminal barang sebagai tempat bongkar-muat barang menuju ke pusat perbelanjaan. 2. Aturan dan regulasi di daerah yang belum bisa maksimal menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang klise di Kabupaten Sumedang, seperti Perparkiran yang menimbulkan kemacetan, semrawutnya terminal bayangan yang menimbulkan kemacetan pada titik titik tertentu yang diakibatkan tidak adanya fasilitas kedatangan dan keberangkatan armada angkutan sesuai dengan trayek yang ada. Yang kesemuanya bertumpu pada konsistensi kita semua untuk melaksanakan dan mematuhi regulasi-regulasi yang tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah di Kabupaten sumedang. 3. Peningkatan sarana dan prasarana bidang perhubungan guna optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dalam aplikasinya dapat terasa langsung oleh warga masyarakat dalam terciptanya tertib hidup berlalu lintas. 4. Belum adanya legalitas yang jelas terkait pengelolaan Waduk Jatigede, sehingga belum tersentuhnya penyelenggaraan 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<p>Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) serta untuk pembangunan Dermaga belum bisa dilaksanakan sehingga Pengawasan dan pengendalian lalu lintas ASDP di Kawasan Waduk Jatigede belum bisa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna menjamin keamanan dan keselamatan para pemanfaat kawasan tersebut.</p> <p>5. Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang perhubungan.</p>	
16	Komunikasi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Komunikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem pengendalian dan pengawasan komunikasi belum optimal; b. Kurangnya kewenangan dalam penanganan permasalahan komunikasi; c. Lembaga sosial komunikasi masyarakat belum optimal (KIM dan Penra); 2. Bidang Informatika <ol style="list-style-type: none"> a. Masih adanya penyelenggara pemerintahan yang belum melaksanakan <i>e-government</i>; b. Peran serta OPD lain dalam penyediaan data publik melalui <i>website</i>; c. Keterbatasan plafon anggaran. 	
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan di lapangan; 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi; 3. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani keputusan; 4. Kurangnya pengetahuan sumber daya aparatur dalam pemanfaatan IT; 5. Masih adanya tumpang tindih fungsi dan tugas; 6. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi; 7. Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya; 8. Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi; 9. Rendahnya tingkat kewirausahaan koperasi; 10. Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha; 11. Database UMKM belum tersedia secara akurat; 12. Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing; 13. Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan; 14. Belum akuratnya data IKM (Industri Kecil Menengah). 	
18	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum adanya peta data potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah; b. belum adanya data potensi investasi yang sudah diolah dan dikembangkan menjadi peluang investasi melalui analisis; c. belum adanya data peluang investasi unggulan daerah (sudah dilakukan analisis) sebagai bahan promosi; d. belum adanya dokumen strategi promosi investasi sebagai bahan atau acuan pelaksanaan kegiatan promosi. 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
19	Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum tersedianya data pendukung; b. Masih rendahnya prestasi olahraga; c. Masih rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan; d. Minimnya sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan; e. Terbatasnya penyelenggaraan event olahraga dalam kepemudaan. 	
20	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum tenaga ahli Statistik; b. Pemahaman aparatur terhadap pentingnya data masih kurang; c. Forum data belum terbentuk. 	
21	Persandian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman pemerintah daerah dalam mengelola risiko keamanan data masih kurang; b. Identifikasi dan deteksi kemungkinan terjadi serangan keamanan belum tersedia; c. Keamanan data secara umum belum terjamin; d. Belum tercukupinya kebutuhan Sandiman. 	
22	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kebudayaan; b. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya; c. masih rendahnya promosi kebudayaan; d. belum tersedianya data pendukung. 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
23	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai; 2. Koleksi bahan pustaka sangat terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; 3. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai; 4. Layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka; 5. Masyarakat Kabupaten Sumedang banyak tersebar di desa-desa, sehingga akses terhadap pelayanan perpustakaan daerah sangat terbatas, sementara perpustakaan desa kurang berkembang; 6. Jangkauan perpustakaan keliling sangat terbatas; 7. Minat baca masyarakat masih rendah; 8. Gedung Layanan Perpustakaan belum Representatif. 	
24	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang jadwal retensi arsip; 2. Belum adanya fitur pada aplikasi Super <i>e-Office</i> untuk penyusutan arsip; 3. Aparatur Pemerintah belum memahami esensi arsip. 	
25	Peternakan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Waduk Jatigede; 2. Produktivitas perikanan dan peternakan; 3. Kualitas dan kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana; 4. Ketersediaan bibit bersertifikat; 5. Kehilangan dan kerusakan hasil; 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Mutu hasil produksi yang beragam; 7. Nilai tambah hasil produksi perikanan dan peternakan; 8. Sinergitas dan koordinasi; 9. Penyebaran dan penerapan paket teknologi; 10. Ancaman penyakit hewan menular; 11. Keamanan pangan; 12. Pemasukan ternak sapi, telur dan ikan; 13. Degradasi lingkungan budidaya dan Perairan Umum; 14. Ketersediaan hijauan pakan ternak; 15. Tingkat konsumsi ternak dan ikan; 16. Kualitas Sumberdaya manusia peternak dan pembudidaya ikan; 17. Kompetensi petugas/penyuluh; 18. Kualitas kelembagaan peternak; 19. Sarana prasarana Penyuluhan; 20. Rendahnya minat pemuda untuk berusaha ternak dan ikan; 21. Kondisi ketahanan pangan daerah masih belum mantap, terutama karena produksi komoditas pertanian, peternakan dan perikanan terkendala penurunan luas lahan pertanian secara terus menerus; 22. Produk hasil perikanan dan peternakan kurang berdaya saing dalam perdagangan bebas. 	
26	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya tingkat kunjungan wisatawan; b. belum tertatanya infrastruktur destinasi wisata; c. Rendahnya promosi wisata; d. Belum tersedianya data pendukung; 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<ul style="list-style-type: none"> e. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata; f. Masih rendahnya tingkat penciptaan produk unggulan; g. Masih rendahnya pembinaan untuk pengembangan ekonomi kreatif; h. Belum tersedianya data pendukung; i. Promosi hasil ekonomi kreatif masih rendah. 	
27	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya penerapan teknologi tepat guna pertanian oleh petani; b. Masih rendahnya hasil usaha pertanian; c. Masih tingginya gangguan hama/penyakit tanaman yang menyebabkan penurunan tingkat produksi pertanian; d. Makin berkurangnya luas lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan; e. Minat usaha tani yang semakin berkurang; f. Belum optimalnya penyampaian informasi mengenai pertanian kepada masyarakat; g. Skala usaha relatif masih rendah dan keterbatasan permodalan; h. Belum optimalnya kelompok dan organisasi tani sebagai mitra kerja dinas; i. Kurangnya akses permodalan dan pemasaran produk hasil pertanian; j. Perubahan iklim yang berakibat berkurangnya produksi pertanian. k. Belum meratanya distribusi Pupuk bersubsidi; 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian. m. Adanya pergeseran kegiatan yang bersumber dana dari APBD Provinsi 	
28	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam aspek kehutanan, kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian taman hutan raya masih lemah, ditambah dengan masih tingginya potensi <i>Occupancy</i> lahan dalam kawasan hutan raya. Hal tersebut disebabkan antara lain karena belum lengkapnya instrumen pengelolaan kawasan taman hutan raya. Permasalahan dalam aspek ini dapat bermuara pada kerusakan lingkungan kawasan hutan raya. 	
29	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pemasaran masih terbatas; 2. Masih rendahnya kualitas pendataan supplier distributor; 3. Masih rendahnya pengawasan di bidang perdagangan; 4. Masih rendahnya pembinaan pelaku usaha 	
30	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana pendukung industri; 2. Masih rendahnya hasil industri yang tersertifikasi (halal, PIRT). 	
31	Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi; 2. Belum tersedianya lahan untuk transmigrasi; 3. Masih rendahnya kuantitas SDM bidang transmigrasi; 4. Belum tersedianya SDM fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
32	Umum :		
	Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset bersifat dinamis; 2. Adanya pergantian petugas pengelolaan keuangan dan aset pada SKPD mengakibatkan hasil pekerjaan kurang optimal; 3. Struktur APBD belum ideal; 4. Implementasi Akuntansi berbasis AkruaI belum optimal; 5. Penatausahaan Aset Daerah belum optimal. 	
	Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan pajak; 2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah; 3. Belum adanya dukungan sistem yang terintegrasi; 4. Kualitas layanan pendataan masih rendah; 5. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur; 6. Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian; 7. Belum Optimalnya pemutakhiran data potensi pajak daerah; 8. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah; 9. Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah; 10. Belum dilakukan penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar; 11. Ketersediaan data piutang yang tidak valid; 12. Belum adanya sistem terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi; 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<ul style="list-style-type: none"> 13. Belum adanya penindakan yang tegas terhadap wajib pajak; 14. Masih kurangnya ketersediaan jumlah SDM; 15. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah secara elektronik; 16. Pembayaran pajak belum tepat waktu; 17. Belum optimalnya penanganan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan; 18. Belum optimalnya jangkauan pelayanan Pajak Daerah bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Sumedang; 19. Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah. 	
	Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum optimal dan terpetakannya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan, kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi secara riil; 2. Tambahan Penghasilan Pegawai masih berdasarkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan perilaku dan kehadiran kerja tanpa target kinerja; 3. Masih kurangnya aparatur yang memiliki kualifikasi teknik serta distribusi PNS yang belum merata secara kualitas dan kuantitas; 4. Belum optimalnya pengevaluasian kinerja dan disiplin pegawai yang terintegrasi; 5. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan yang baik, bersih dan melayani; 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		6. Beberapa pelayanan administrasi kepegawaian di BKPSDM belum seluruhnya berbasis teknologi informasi; 7. Belum optimalnya dan terintegrasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.	
	Inspektorat	1. Kompetensi APIP belum merata. 2. Terbatasnya kemampuan teknis. 3. Belum optimalnya fungsi Katalis, Konsultan dan Penjamin Kualitas. 4. Belum meratanya jenjang APIP.	
	Sekretariat Daerah	1) Bagian Tata Pemerintahan : a. Belum optimalnya pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan b. Belum adanya penegasan tentang batas wilayah kecamatan, kelurahan dan desa c. Masih rendahnya respon OPD dalam penyusunan LKPJ dan LPPD 2) Bagian Hukum a. Belum tercapainya target program pembentukan Perda sesuai dengan yang ditetapkan b. Belum tersedianya pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum dan pustakawan 3) Bagian Organisasi b. Masih adanya OPD yang belum menyusun dan menerapkan SOP dan standar pelayanan	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<ul style="list-style-type: none"> c. Belum adanya evaluasi kelembagaan, analisa jabatan dan analisa Beban kerja sesuai dengan SOTK yang baru d. Masih rendahnya respon dan pemahaman OPD terhadap dukungan data penyusunan LAKIP e. Belum tersedianya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan analis dan penyusun 4) Bagian Kerjasama <ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur kerjasama daerah b. Belum adanya SOP yang mengatur administrasi kerjasama OPD c. Rendahnya respon OPD terkait potensi kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti d. Kurangnya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai tupoksi e. Belum tersedianya data potensi kerjasama 5) Bagian Perekonomian <ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya dukungan data terkait dengan evaluasi kinerja BUMD dan perekonomian daerah b. Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi analis ekonomi daerah c. Tingkat responsif pelayanan informasi analisa ekonomi daerah yang belum optimal d. Belum adanya SOP yang mengatur sistem informasi ekonomi daerah 6) Bagian Kesejahteraan Rakyat : 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat b. Belum adanya OPD teknis yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan c. Tingkat responsif OPD yang masih rendah d. Masih adanya kegiatan-kegiatan teknis e. Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi 7) Bagian Pengendalian Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya dukungan data pelaksanaan pembangunan dari OPD terkait b. Belum optimalnya pelayanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan OPD 8) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) <ul style="list-style-type: none"> a. Belum tersedianya pejabat fungsional PPBJ b. Tingkat responsif pelayanan yang masih belum optimal c. Belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana PBJ d. Belum optimalnya layanan informasi pengadaan barang dan jasa 9) Bagian Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Belum tersedianya SOP pelayanan kerumahtanggaan Setda dan pimpinan daerah b. Tingkat responsif dan kualitas pelayanan yang masih belum optimal 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<ul style="list-style-type: none"> c. Belum adanya pemisahan tugas antara pelayanan rumah tangga pimpinan daerah dan di lingkungan Sekretariat Daerah d. Belum tersedianya pejabat pejabat fungsional arsiparis 10) Bagian Humas dan Protokol <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat pelayanan publikasi pimpinan daerah yang masih belum optimal b. Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan protokoler daerah c. Masih rendahnya tingkat responsivitas OPD terkait pengaduan masyarakat 11) Bagian Keuangan <ul style="list-style-type: none"> a. Masih adanya keterlambatan pelaporan keuangan Setda b. Masih rendahnya kualitas kompetensi pengelola keuangan di lingkungan Setda c. Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi perencana d. Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan 	
	Sekretariat DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi pelayanan Perangkat Daerah; 2. Organisasi dan tata laksana Perangkat Daerah; 3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya; 4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang; 5. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah; 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		6. Informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.	
	Bappppeda	<p>Masih kurangnya minat investasi di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat, yang letak daerahnya berada di jalur strategis, yakni jalur pengembangan pembangunan nasional antara wilayah Bandung-Cirebon. Dengan segala potensi yang dimilikinya, tidak heran jika Kabupaten Sumedang kini menjadi salah satu daerah incaran para investor yang ingin berinvestasi mengembangkan usahanya. Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya investasi tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan faktor masyarakat yang cenderung ingin mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat tapi risiko yang diterima relatif kecil. Dukungan terhadap faktor ini berasal dari gaya hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, lebih nyaman dengan keadaan saat ini meskipun tahu bahwa produk yang dikonsumsi merupakan barang impor. Bahkan tidak jarang masyarakat kita lebih bangga menggunakan produk impor daripada produk domestik. Dengan kenyamanan seperti ini, rasanya mustahil membujuk masyarakat untuk mau berinvestasi di Kabupaten Sumedang, karena resikonya masih tergolong tinggi. Faktor yang mempengaruhi kurangnya minat investasi di Kabupaten Sumedang diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur pendukung investasi hanya berpusat pada beberapa wilayah tertentu, tidak tersebar secara merata; 	

No	Urusan	Permasalahan	Korelasi dengan Bab V
		<p>2. Prosedur yang ditetapkan untuk berinvestasi dinilai masih terlalu rumit dengan kewajiban pengisian formulir investasi yang cukup tebal dan mau tidak mau harus berhubungan dengan banyak pihak dan meminta kemampuan dari pemilik modal tersebut yang dikatakan akan mempermudah proses investasi, contohnya adalah kemampuan penggunaan IT dalam bertransaksi. Namun prosedur yang rumit ini sebenarnya merupakan langkah untuk memproteksi diri pemilik modal sehingga lebih menjamin keamanan bagi mereka sendiri;</p> <p>3. Investasi kerap disamakan dengan riba atau penimbunan yang dikenal sebagai salah satu kegiatan yang sangat dilarang secara agama. Mungkin yang perlu dipertegas di sini adalah investasi bukanlah penggandaan uang meski sekilas terlihat sama karena pemilik modal tidak terlibat secara langsung dalam jalannya roda perusahaan;</p> <p>4. Masyarakat belum terbiasa untuk berinvestasi pada barang yang tak terlihat, lebih menyukai jenis investasi yang jelas-jelas terlihat wujud barangnya sehingga mereka lebih bisa merasa aman dan nyaman karena mereka sendiri yang memegang barang investasi tersebut. Selain itu, masyarakat umumnya tidak sabar dalam berinvestasi, belum mengarah pada kedewasaan atau <i>drive to maturity</i>.</p>	

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (2022) (diolah)

2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu (1) Urusan Pendidikan, (2) Urusan Kesehatan, (3) Urusan Pekerjaan Umum, (4) Urusan Perumahan Rakyat, (5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan (6) Urusan Sosial. Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berikut adalah penerapan SPM di Kabupaten Sumedang berdasarkan P-RPJMD 2018-2023.

Tabel 2.59

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
1	SPM Pendidikan			
	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Dinas Pendidikan
	Pendidikan dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	
			Tingkat partisipasi warga negara 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP	
	Pendidikan kesetaraan		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	
2	SPM Kesehatan			
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan SPM bidang Kesehatan masyarakat yang memenuhi standar; 2. Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah yang sesuai standar;	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
	Pelayanan Kesehatan Balita			
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		3. Cakupan penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus			
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan jiwa berat			
	Pelayanan Kesehatan orang terduga <i>tuberculosis</i>			
	Pelayanan Kesehatan dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif			
3	SPM Pekerjaan Umum			
	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase cakupan pelayanan air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase cakupan akses sanitasi layak	
4	SPM Perumahan Rakyat			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Program pengembangan perumahan	Persentase penanganan hunian rumah pasca bencana	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase sarana prasarana dan utilitas umum yang dibangun dan dikembangkan	
5	SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Rasio petugas perlindungan	Satuan Polisi

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
			masyarakat (1 orang setiap RT); 2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban dan ketentraman); 3. Cakupan pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani.	Pamong Praja
	Pelayanan informasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana	Persentase penanganan pra bencana	
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Persentase penanganan bencana	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>Response Timerate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	
6	SPM Sosial			
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi sosial	Persentase PPKS (Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan korban Napza yang menerima bantuan social kebutuhan dasar	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah	Program penanganan bencana	Persentase penanganan bencana	

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
	tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah			

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2022).

Indikator Kinerja Pencapaian SPM Kabupaten/Kota pada 6 (enam) urusan terdiri dari Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal Layanan Dasar. Berikut adalah indikator kinerja per jenis layanan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Tabel 2.60
Indikator Kinerja Pencapaian SPM Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Penerima Layanan Dasar	Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar	Target	Batas Waktu Capaian
A. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan	100%	Setiap tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil <i>Assessment Nasional</i>		Meningkat dari hasil 2 (dua) tahun sebelumnya	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan		100 %	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil <i>Assessment Nasional</i>		Meningkat dari hasil 2 (dua) tahun sebelumnya	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD		100 %	
B. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber	100 % (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Penerima Layanan Dasar	Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar	Target	Batas Waktu Capaian
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100 % (sesuai dengan jumlah bayi lahir yang akan dipenuhi)	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100 % (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100 % (sesuai dengan jumlah anak usia Pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100 % (sesuai dengan jumlah warga negara usia produktif yang akan dipenuhi)	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100 % (sesuai dengan jumlah warga negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan		100 % (sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Penerima Layanan Dasar	Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar	Target	Batas Waktu Capaian
9	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100 % (sesuai dengan jumlah warga negara penderita <i>diabetes melitus</i> usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100 % (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis	Jumlah warga negara terduga tuberkolusis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100 % (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkolusis yang akan dipenuhi)	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100 % (sesuai dengan jumlah warga negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang akan dipenuhi)	
C. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Penerima Layanan Dasar	Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar	Target	Batas Waktu Capaian
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	
D. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni)	
E. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas					
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan Perkada yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Penerima Layanan Dasar	Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar	Target	Batas Waktu Capaian
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	

Sumber : Permendagri 59/2021

2.4.1. Realisasi Capaian SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2021

Berdasarkan penilaian Kemendagri atas indikator SPM sebagaimana dimaksud pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61
Capaian Indikator SPM Tahun 2021

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)		TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET
1	PENDIDIKAN				
		1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	89,31
		2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	100	43,42
		3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100	44,41
2	KESEHATAN				
		1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	99,03%
		2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	74,24%
		3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	98,96%
		4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	96,48%
		5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	89,36%
		6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	80,63%
		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	95,59%
		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	92,87%
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	57,95%

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)		TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	95,89%
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	96,02%
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	66,22%
3	PU & PERKIM				
	PUPR	1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			1. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	100%	99,68%
		2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
			1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100%	91,60%
			2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100%	92,25%
			3. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100%	89,09%
4	Perkim		Pembangunan baru dilokasi baru/relokasi bagi korban bencana	100%	100%
		1.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota		
			1. Pendataan Tingkat kerusakan rumah akibat bencana	100%	99,52%
5	POL PP	1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	91,09%
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
		2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)		TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET
			Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	84,16%
			Jumlah Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat daerah	100%	6,93%
6	DINAS SOSIAL				
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	100%	99,70%
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	100%	100%
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	100%	83,33%
			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100,00%
			Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	99,83%
7	BPBD		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
		1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100%	100%
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
		3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%
		4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100%	100%
		5	Penyusunan Rencana Kontijensi	100%	100%
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	
		6	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%
		7	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%

2.4. Inovasi

Peranan inovasi dalam meningkatkan daya saing bangsa dengan pengembangannya yang berbasis kesisteman, telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Visi misi maupun arah pembangunan, di dalam Undang-Undang tersebut, menekankan tentang pentingnya inovasi dalam membangun daya saing.

Visi Pembangunan Nasional jangka panjang Tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam RPJPN 2005-2025, adalah mewujudkan “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” yang salah satu implementasinya dituangkan ke dalam Misi ke-2 yaitu “mewujudkan Bangsa yang berdaya saing” dengan salah satu arahan kebijakannya adalah “...penguatan sistem inovasi dalam rangka pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan...”. Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Dalam konteks daerah, pembangunan berbasis inovasi sudah menjadi keniscayaan, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini seiring dengan tumbuhnya kesadaran bersama bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya acuan kebijakan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kreativitas keinovasian daerah. Peningkatan keinovasian masyarakat serta merta akan meningkatkan dan memacu kreativitas untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan beberapa inovasi, yaitu:

2.4.2. Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi

Pada akhir Tahun 2018, pemerintah pusat menetapkan 100 Kabupaten/Kota prioritas penurunan stunting di Indonesia dimana salah satunya adalah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2018, Prevalensi Stunting Kabupaten Sumedang cukup tinggi yaitu sebesar 32,2 persen. Menyikapi hal diatas, dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, salah satu Indikator Kinerja Utama Bupati dalam mewujudkan Sumedang Simpati adalah Persentase Balita Stunting. Target penurunan persentase balita stunting adalah sebesar 3% per tahun sehingga pada Tahun 2023 target prevalensi stunting hanya tinggal 17%.

Untuk percepatan pencapaian target persentase balita stunting maka pemerintah Kabupaten Sumedang menyusun inovasi dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 441/Kep.325-Bappppeda/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi.

Tujuan inovasi penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi ini adalah menurunkan persentase balita stunting setiap tahun di Kabupaten Sumedang. Sedangkan manfaat inovasi penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi adalah program pencegahan stunting lintas sektor dapat berjalan secara sinergi (integrasi), efektif, efisien dan berhasil guna dalam menurunkan persentase balita stunting di Kabupaten Sumedang.

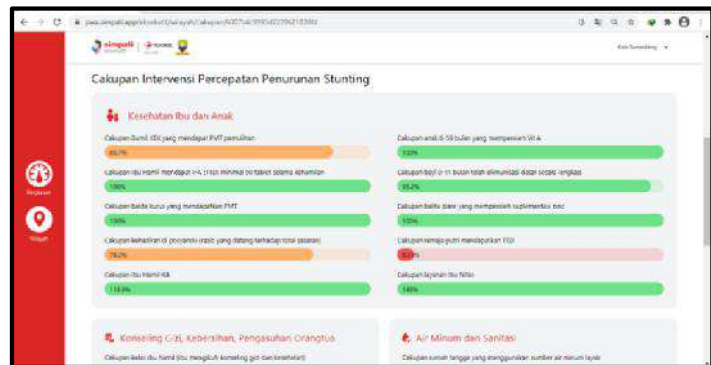
Inovasi ini telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat. Penghargaan itu merupakan kerja keras dari aparatur pemerintah didukung berbagai komponen masyarakat untuk mewujudkan Sumedang Simpati, Sumedang yang lebih baik, maju dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk tingkat Provinsi, penghargaan yang diraih adalah Terbaik I Kategori Kabupaten dengan Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Tahun ke II Tingkat Jawa Barat. Sedangkan untuk tingkat Nasional, Pemkab Sumedang berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk Kabupaten Terbaik Ke-3 Wilayah Regional II (Wilayah Tengah) dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020.

Inovasi Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi saat ini telah dilengkapi dengan aplikasi SIMPATI. Aplikasi SIMPATI merupakan bentuk kerjasama dengan PT. Telkomsel yang memberikan aplikasi dan 300 ponsel beserta kartu seluler kepada KPM. Aplikasi SIMPATI untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan pada 1000 hari pertama kehidupan dengan tujuan agar seluruh orang tua dan pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak secara berkala.

Gambar 2.6
Dokumentasi Prestasi Inovasi
Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi



Terbaik Ke-3 Wilayah Regional II (Wilayah Tengah) dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020



Dashboard Aplikasi SIMPATI

Sumber: Bappppeda (2021)

2.4.3. Strategi Komplementer 7 (Tujuh) Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19

Sesuai dengan kalender pendidikan Tahun 2020/2021, satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Namun bersamaan dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah sebagaimana dalam keadaan normal.

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Bersama bahwa hanya bagi kabupaten/kota dengan status zona hijau yang diizinkan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah mulai tanggal 13 Juli 2020 dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sedangkan bagi kabupaten/kota yang tidak/belum berstatus zona hijau dilarang menyelenggarakan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah

untuk dan dengan alasan apapun. Bahkan bagi daerah kabupaten/kota yang sudah dinyatakan berstatus menjadi zona hijau pun tidak dapat secara serta merta melakukan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah, tetapi harus didahului oleh kajian dan pembahasan yang cermat dengan mempertimbangkan banyak hal demi mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga dengan demikian proses belajar mengajar tatap muka harus melalui tahapan dan prosedur yang cermat antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota terutama dalam pengecekan sarana prasarana pendukung protokol kesehatan, skrining kesehatan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta SOP pembelajaran.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, maka harus dicari terobosan (inovasi) agar proses pendidikan dan pengajaran bagi peserta didik tetap berlangsung walaupun di masa pandemi. Alternatif pembelajaran dapat dilaksanakan melalui media daring, namun kondisi di Kabupaten Sumedang belum memungkinkan untuk dilaksanakan secara menyeluruh. Disisi lain, bahwa pendidikan dan pengajaran harus berpegang teguh pada prinsip adil, merata, dan menjangkau semua siswa. Sehingga diperlukan sebuah strategi yang bersifat komplementer (saling mengisi dan melengkapi antara teknik daring dan luring). Maka langkah dibentuklah sebuah inovasi berupa Strategi Komplementer 7 Metode Pembelajaran.

Strategi pembelajaran komplementer yang telah dirumuskan merupakan jawaban sekaligus salah satu alternatif pemecahan masalah yang kami temui di awal masa darurat pandemi Covid-19 yaitu pembelajaran jarak jauh (Belajar Dari Rumah) yang lebih menitikberatkan kepada metode pembelajaran Daring yang ternyata kurang efektif karena secara nyata tidak mampu memenuhi unsur keadilan dan pemerataan, karena berdasarkan data kasar yang kami miliki di Kabupaten Sumedang metode pembelajaran Daring hanya mampu menjangkau 31% peserta didik, serta kurang efisien karena setiap individu guru dan peserta didik harus mengeluarkan biaya kuota internet yang tidak murah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

Inovasi Strategi Komplementer 7 Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19 ini bahkan telah didaftarkan hak ciptanya ke Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor EC00202049761 tanggal 15 November 2020.

Gambar 2.7

Dokumentasi Inovasi Strategi Komplementer
7 (Tujuh) Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19



2.4.4 Hak Cipta Strategi Komplementer 7 Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19 Informasi Izin Cetak mandiri (SI ICE

MANDIRI) V.1.1

Si Ice Mandiri merupakan sebuah sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang memungkinkan pemohon dapat mengunduh SK perizinan dan mencetaknya secara mandiri. Aplikasi ini berbasis *online* sehingga masyarakat dapat melakukan pengajuan perizinan dengan memanfaatkan teknologi internet. Sistem informasi ini sangat cocok digunakan di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di kabupaten/kota. Sistem informasi ini dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang dapat memudahkan baik dari sisi pemohon (masyarakat) maupun dari sisi petugas (DPMPTSP). Semua tahapan pemrosesan permohonan dapat dipantau oleh pemohon sehingga ada kejelasan waktu penyelesaian.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan perizinan maupun non perizinan semuanya menggunakan arsip digital, pemohon diharuskan mengunggah semua berkas-berkas tersebut ke SI ICE MANDIRI. Dengan demikian satu berkas tersebut dapat digunakan untuk seluruh proses termasuk yang berkaitan dengan SKPD Teknis terkait (single submission). Berkas digital juga memudahkan pemohon jika suatu saat membutuhkan kembali berkas-berkas tersebut.

Produk hukum perizinan maupun non perizinan yang telah selesai dan diterbitkan DPMPTSP Kabupaten Sumedang melalui SI ICE MANDIRI berupa

soft file yang dapat diunduh oleh pemohon kapan saja dan dimana saja. Jika pemohon membutuhkan salinannya maka pemohon dapat mencetaknya secara mandiri. Soft file ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang menggunakan cap dan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara digital dan memiliki keamanan yang baik. Soft file dari produk SI ICE MANDIRI juga dilengkapi dengan QR Code untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memeriksa keabsahannya.

Beberapa manfaat yang didapatkan dengan adanya pengembangan aplikasi ini diantaranya adalah waktu pemrosesan perizinan lebih cepat; keamanan data lebih terjamin; pemohon lebih cepat mengetahui terkait dengan progres permohonan ijin melalui notifikasi email dan fasilitas tracking ijin pada SI ICE MANDIRI 1.1 serta terimplementasikannya konfirmasi Status Wajib Pajak (KSPW) pada aplikasi SI ICE MANDIRI 1.1 sehingga pemrosesan permohonan ijin hanya dilakukan kepada pemohon yang sudah memenuhi kewajibannya atas pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor.

Gambar 2.8
Dokumentasi Inovasi
Pengembangan Sistem Informasi Izin Cetak mandiri
(SI ICE MANDIRI) V.1.1



Aplikasi SI ICE MANDIRI

2.4.5. Aplikasi e-Office

Pengelolaan surat secara konvensional seringkali menghadapi kendala atau permasalahan yang dapat menyebabkan keterlambatan penandatanganan surat, disposisi surat, posisi surat sulit dilacak, surat terlambat disampaikan kepada penerima, arsip surat menumpuk, sulit mengecek keaslian tanda tangan, format surat yang berbeda dan tidak sesuai

pedoman tata naskah dinas, penggunaan stempel yang berbeda/tidak resmi, serta penomoran surat yang tidak tersentralistik.

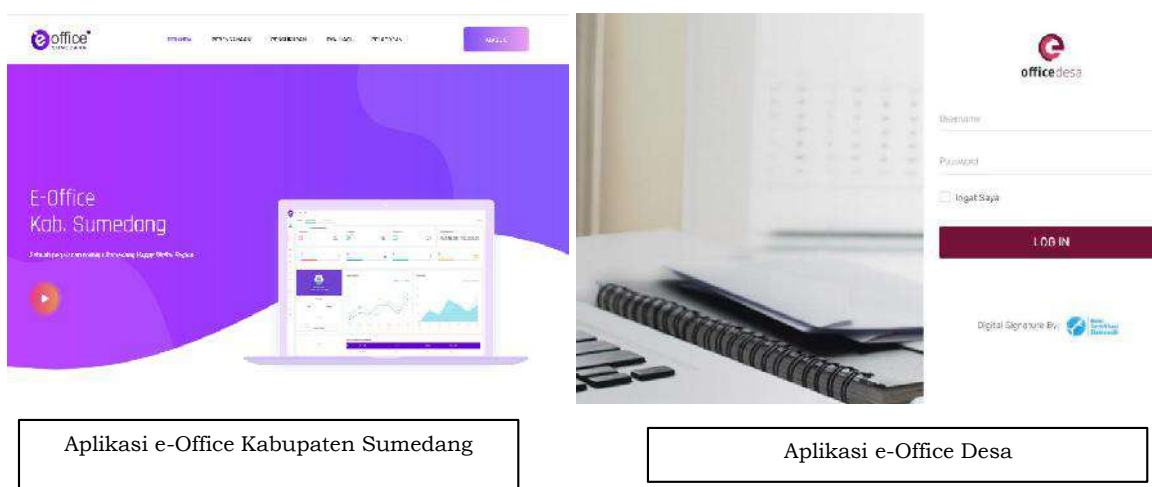
Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut guna meningkatkan kinerja dan efisiensi penyelenggaraan dan pelayanan administratif, maka dibuatlah inovasi berupa aplikasi *e-Office* Sumedang. Tujuan penerapan *e-office* yaitu untuk mendukung pelaksanaan *e-government* dalam rangka percepatan menuju *Sumedang Digital Region* serta untuk efisiensi pelaksanaan surat menyurat (menjadi lebih cepat, mudah, hemat, dan aman).

Aplikasi *e-office* dalam rangka penerapan tata naskah dinas secara elektronik merupakan inovasi pada bidang tata kelola pemerintahan dalam rangka pelaksanaan *e-government (e-Gov)*. Dalam paradigma *Bureaucracy 3.0 (dynamic government)* di masa industri 4.0, digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu keniscayaan, penyelenggaraan pemerintahan dituntut serba cepat dan praktis. Digitalisasi administrasi persuratan mengubah kultur konvensional ke digital yang selaras dengan kemajuan zaman.

Aplikasi *e-Office* Sumedang merupakan hasil modifikasi dan penyempurnaan aplikasi *e-office* KemenpanRB. Modifikasi dan penyempurnaan tersebut diantaranya dengan penambahan/ penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*) yang dikeluarkan oleh BSSN melalui BSR.E. Sementara pihak KemenpanRB tidak menggunakan tangan digital melainkan hanya *QR code* atau *barcode*. Tanda tangan digital legalitasnya sama dengan tanda tangan basah yang dibubuhi stempel. Hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang ITE.

Saat ini, *e-Office* telah dikembangkan hingga ke pemerintahan desa melalui *e-Office* Desa. Dengan adanya aplikasi *e-Office* Desa, diharapkan dapat meningkatkan kinerja di Pemerintahan Desa.

Gambar 2.9
Dokumentasi Inovasi aplikasi e-office



2.4.6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meluncur ke 270 desa di Kabupaten Sumedang sangat besar, yakni mencapai Rp 303,565 milyar namun pengelolaannya belum berbasis kinerja (perencanaan lemah, serta tidak melakukan perjanjian, pengukuran dan evaluasi kinerja). Pengelolaan DD dan ADD tersebut juga belum berorientasi hasil, sehingga angka kemiskinan dan angka stunting di Kabupaten Sumedang masih tinggi, serta pelayanan publik belum optimal. Angka kemiskinan 9,76 % (Jawa Barat 7,83 %), angka stunting 9,7 % (Angka prevalensinya di atas rata-rata Jawa Barat yakni 32,2 %, sementara Jawa Barat 29,2 %), serta hasil survei kepuasan masyarakat baru mencapai 80,74. Di sisi lain tata kelola pemerintahan desa belum bersinergi dengan tata kelola pemerintahan kecamatan dan kabupaten. Desa-desa belum fokus membidik permasalahan kemiskinan, stunting dan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, agar tata kelola pemerintahan desa berbasis kinerja, berorientasi hasil dan fokus terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, serta sinergi dengan agenda pembangunan kecamatan dan kabupaten, maka diluncurkan kebijakan SAKIP Desa. Melalui penerapan SAKIP Desa, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan desa berlangsung lebih optimal, serta Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) pun dapat dilakukan lebih baik lagi, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, sampai dengan pemantauannya. Dengan penerapan SAKIP Desa yang ditunjang dengan pengembangan SPIP tersebut, tata kelola pemerintahan desa semakin akuntabel, transparan dan partisipatif.

Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan desa pun menjadi lebih baik, sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya Good Village Governance.

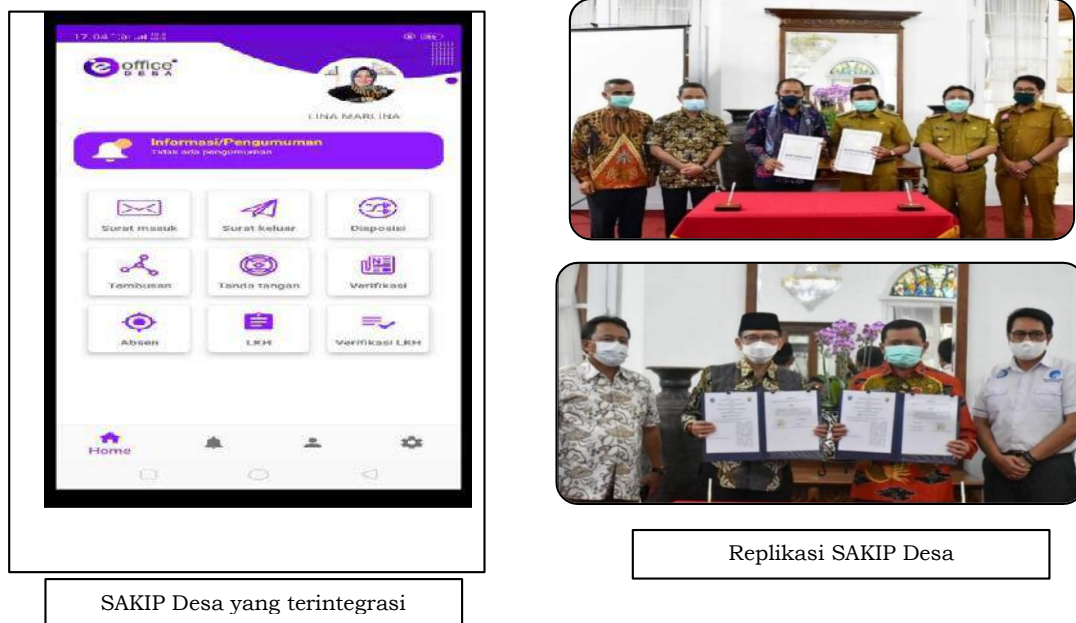
SAKIP Desa adalah adalah sebuah terobosan yang unik karena untuk pertama kalinya manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil (performance based budgeting), diterapkan secara sistemik dalam tata kelola pemerintahan desa. Penerapan SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang juga memiliki nilai kebaruan dalam pengembangan Good Village Governance, karena yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Setelah penerapan SAKIP Desa, 270 Desa sudah di Kabupaten Sumedang kini sudah berorientasi hasil (Angka Kemiskinan turun (9.06 %) dan Stunting turun (8,7 %), serta hasil Survei Kepuasan Publik semakin meningkat (82,27). Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sumedang tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan (Desa Mandiri : 4; Desa Maju : 91; Desa Berkembang: 175; Desa Tertinggal : 0).

Keberlanjutan SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang dapat dijamin karena desain program ini dikembangkan secara TERSTRUKTUR (melibatkan peran aktif lintas jenjang pemerintahan, yakni SKPD Kabupaten, Kecamatan dan Desa), SISTEMIK (dilakukan melalui pendekatan sistem “performance management”), MASIF (dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memobilisasi berbagai potensi daerah), INTEGRATIF (desain SAKIP Desa ditransformasi ke platform digital dan diintegrasikan dengan Super App e-Office Desa).

Sebagai landasan yuridis, agar SAKIP Desa terjamin keberlanjutannya, telah diterbitkan 2 (dua) regulasi kunci, yakni : Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Desa.

Gambar 2.10
Dokumentasi Inovasi SAKIP Desa



2.5. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang

Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk menanggulangi Krisis Kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi melalui kesiapsiagaan sumber daya kesehatan. Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan mengikuti siklus penanggulangan Bencana dengan penyesuaian yang meliputi tahap pra krisis kesehatan, tanggap darurat krisis kesehatan, dan pasca krisis kesehatan dengan penekanan pada upaya mencegah kejadian Krisis Kesehatan yang lebih parah atau buruk dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.

Penanganan KLB terjadi pada Tahun 2020, yaitu adanya *Coronavirus Disease* atau disebut juga *Covid-19* yang menyerang hampir seluruh negara di dunia. Penyebaran virus *Covid-19* terjadi melalui droplet dalam kontak dekat tanpa pelindung. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sangat dianjurkan dalam rangka pencegahan penularan virus ini.

Bagi pemerintah Kabupaten Sumedang, kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 dilakukan dengan membentuk Gugus Tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor:443/Kep.161-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Sumedang. Gugus Tugas Covid-19 melibatkan multi stakeholder

yang secara sinergi bertugas melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 baik dari aspek medis maupun non medis dengan pelaporan rutin setiap hari yang hasilnya digunakan untuk pengambilan kebijakan. Kebijakan diantaranya berupa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur Peraturan Bupati Sumedang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19. Dan pelaksanaan operasi secara berkala dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan menerapkan 3 (tiga) M yaitu Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dengan sabun dan Menjaga Jarak dengan Menjauhi Kerumunan.

Kebijakan ini menjadi pilihan sulit bagi pemerintah karena memiliki konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terganggu ketika pembatasan sosial berlaku. Sementara di sisi kesehatan masyarakat, ancaman penyebaran virus yang massif jika tidak membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah bisa mengancam jiwa yang berdampak pada kehilangan modal manusia, khususnya tenaga medis. Secara garis besar kebijakan yang diambil adalah sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.11
Kebijakan Penanganan Covid-19



Salah satu upaya pemerintah untuk penanganan Covid-19 tercantum dalam Tabel berikut.

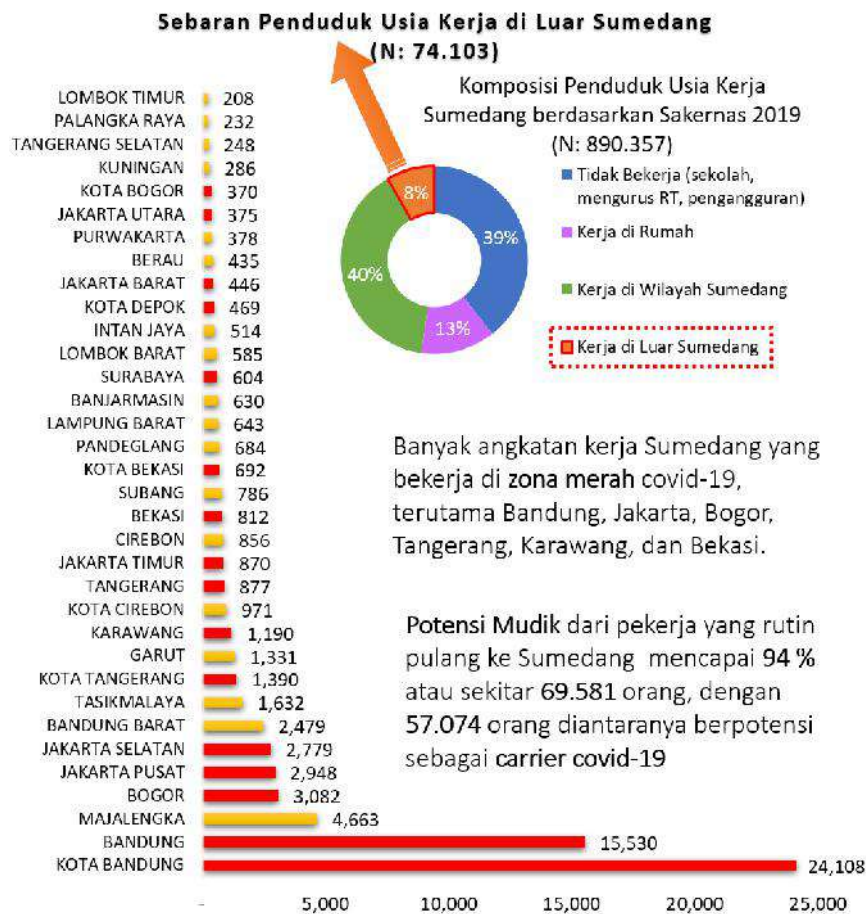
Tabel 2.62
Barang Habis Pakai dan Aset Tetap Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 (unit)

No	Uraian	Jumlah
A	Barang Habis Pakai	
1	Alat Pelindung Diri (APD)	3.500
2	Masker	210.000
3	Kaos Tangan	210.000
4	Hand Sanitizer 250 ml	10.500
5	Alat Rapid test	7.200
B	Aset Tetap	
1	Thermo Gun	70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)

Sebagai antisipasi dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan beberapa kajian agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas dan memberikan dampak lebih buruk pada kesehatan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang. Diawali dengan kajian pemetaan sebaran penduduk usia kerja di berbagai daerah, terutama yang terkategori zona merah, untuk meminimalisir masuknya pemudik menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H atau pada Tahun 2020. Sebagian besar bekerja di zona merah yaitu Kota dan Kabupaten Bandung. Masuknya pemudik dari zona merah inilah yang dikhawatirkan dapat memicu penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumedang sehingga diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegahnya.

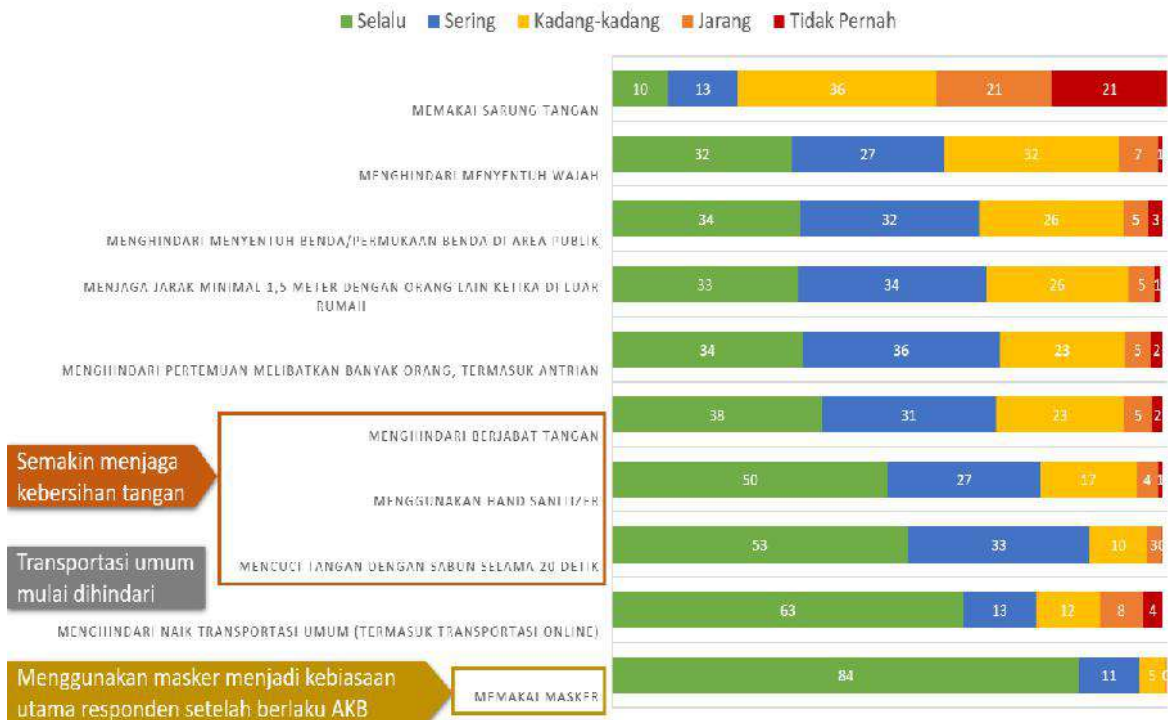
Gambar 2.12
Potensi Mudik Penduduk Sumedang dari Zona Merah Covid-19



Sumber: Sakernas, 2019 (diolah)

Ketika terjadi pelanggaran PSBB, Pemkab Sumedang kembali melakukan kajian melalui survei yang disebarluaskan secara online pada masyarakat Sumedang untuk menggali persepsi dan kesiapan masyarakat memasuki masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Berdasarkan hasil survei, responden mengetahui dan memahami kebijakan AKB di Sumedang disertai beberapa perubahan perilaku seperti rajin menggunakan masker. Dalam perspektif ekonomi masyarakat menerima dengan baik kebijakan AKB ini disebabkan banyaknya penduduk yang mengalami penurunan pendapatan akibat pembatasan sosial yang berlaku. Namun, dari aspek kesehatan tetap ada kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19 ketika harus beraktivitas di luar rumah.

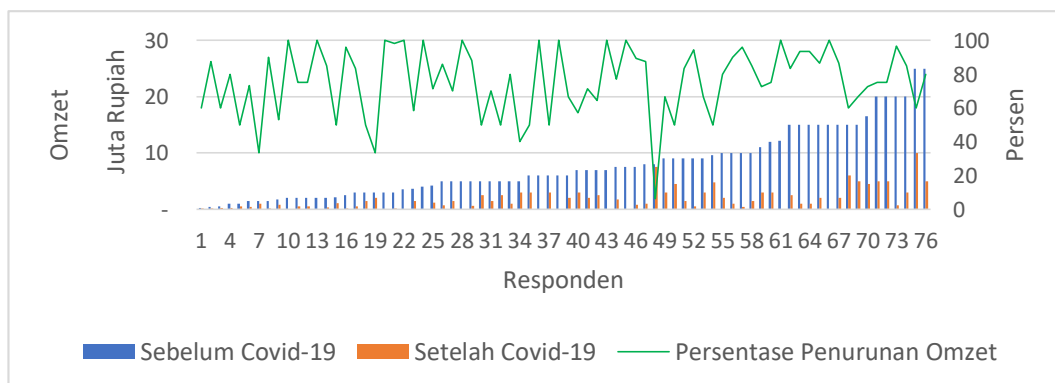
Gambar 2.13
Kebiasaan Baru yang Dilakukan Masyarakat Sumedang setelah
Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru



Sumber: Bappeda Kabupaten Sumedang (2020)

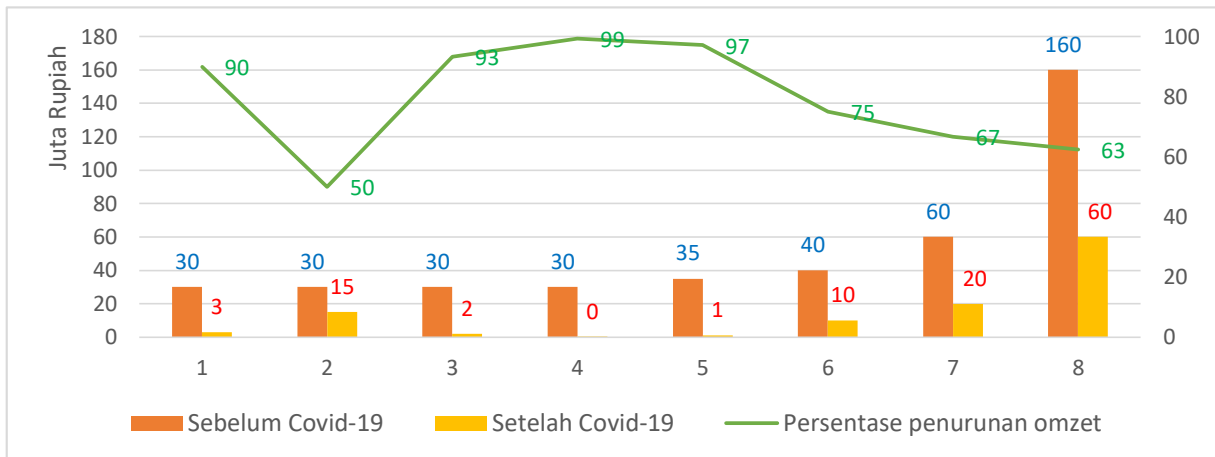
Pemkab Sumedang juga melakukan kajian dampak Pandemi Covid-19 pada sektor esensial di masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil survei menunjukkan bahwa hampir semua UKM yang disurvei mengalami penurunan omzet usaha yang sangat signifikan, yaitu sekitar 75 persen, bahkan sebagian dari UKM ada yang berhenti berusaha.

Grafik 2.67
Omzet Bulanan Usaha Mikro (omzet tahunan maksimum 300 juta rupiah)
(n:76)



Sumber: Hasil Survei Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, 2020 (diolah)

Grafik 2.68
Omzet Bulanan Usaha Kecil
(omzet tahunan Rp300 juta - Rp2,5 milyar)
(n:8)

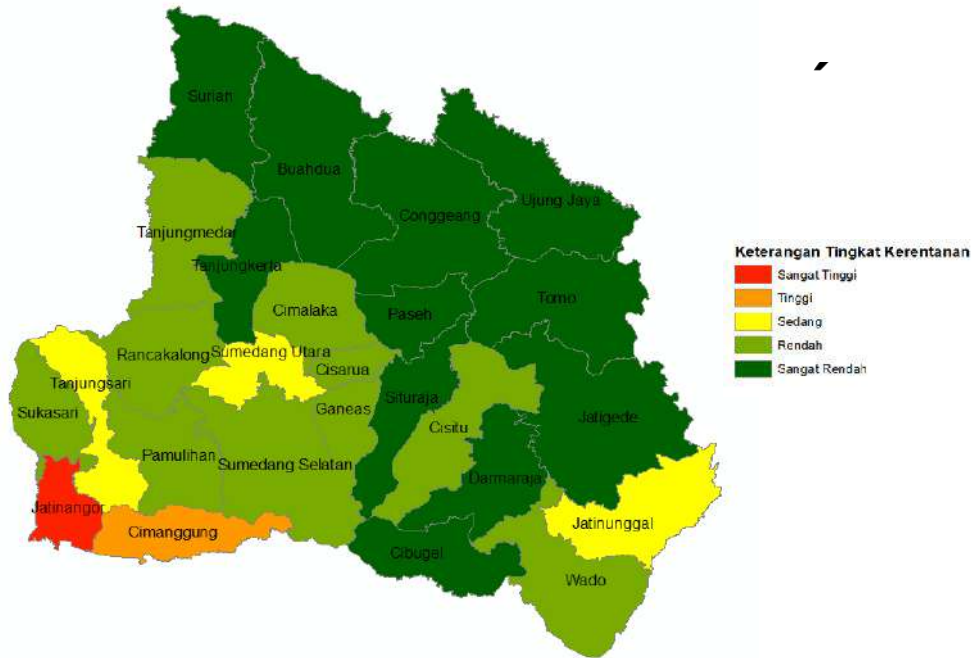


Sumber: Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, 2020 (diolah)

Kajian dampak pandemi covid-19 terhadap UMK dilanjutkan pada tingkat kewilayahan menggunakan pendekatan metode kerentanan berbasis spasial yang diadopsi dari *Intergovernmental Panel for Climate Change* (IPCC). Data yang digunakan adalah Potensi Desa (potensi desa) Tahun 2018 dan 2019 serta beberapa data pendukung dari instansi terkait. Hasil analisis kerentanan menunjukkan bahwa terdapat satu kecamatan dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi yaitu Kecamatan Jatinangor, dikarenakan banyaknya UMK dan sebagian besar mata pencaharian penduduknya dari sektor-sektor yang terkena dampak restriksi sosial akibat Pandemi Covid-19 seperti industri, perdagangan dan jasa.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap pandemi Covid-19 di tingkat daerah adalah dengan meningkatkan kapasitas adaptif, terutama mendorong kegiatan perekonomian di tingkat desa melalui peningkatan unit usaha dan skala usaha Badan Usaha Milik Desa, perluasan jangkauan sinyal internet, dan mendorong perluasan dari jaringan layanan pengiriman barang.

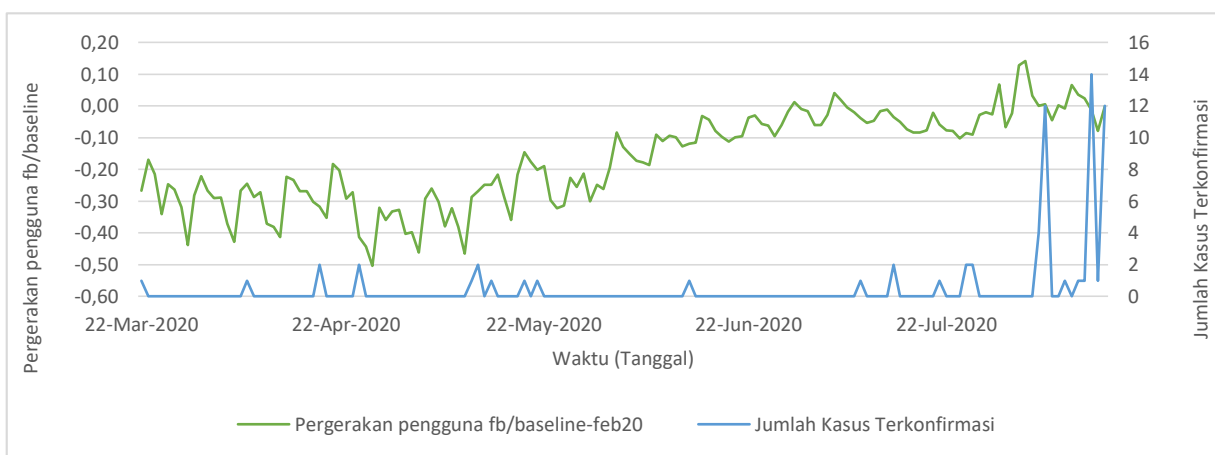
Gambar 2.14
Peta Analisis Kerentanan UMK per Kecamatan
di Kabupaten Sumedang



Sumber: Bappppeda Kab. Sumedang (2020)

Kajian lain yang dilakukan Pemkab Sumedang terkait adanya pandemi covid-19 adalah memastikan keterkaitan penambahan kasus terkonfirmasi dengan mobilitas penduduk. Data yang digunakan adalah *Facebook Movement Range Maps* yang berisi data mobilitas harian penduduk di seluruh dunia yang mengakses facebook sebagai media sosial paling banyak digunakan di Indonesia. Hasil pengujian statistik menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari mobilitas penduduk terhadap peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Sumedang.

Grafik 2.69
Pergerakan Pengguna Facebook (vs baseline Februari 2020)
dan Jumlah Kasus Terkonfirmasi Covid-19



Sumber: Bappppeda Kab. Sumedang (2020)

Tabel 2.63
 Hasil Pengujian Pengaruh Mobilitas terhadap Jumlah Kasus Terkonfirmasi

```
. tsset date
    time variable: date, March 01, 2020 to August 15, 2020
                delta: 1 day
```

```
. reg konfirmasi all_day_bing_tiles_visited_relat
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	147
Model	17.2875797	1	17.2875797	F(1, 145)	=	5.12
Residual	489.175005	145	3.37362073	Prob > F	=	0.0251
				R-squared	=	0.0341
				Adj R-squared	=	0.0275
Total	506.462585	146	3.46892182	Root MSE	=	1.8367

konfirmasi	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
all_day_bing_tiles_visited_relat	2.403896	1.061932	2.26	0.025	.3050303	4.502761
_cons	.8641897	.2355837	3.67	0.000	.3985681	1.329811

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (2020)

Berdasarkan tabel dan hasil pengujian statistik terlihat bahwa mobilitas penduduk memiliki pengaruh signifikan (pada tingkat kepercayaan 95 persen) terhadap jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kab. Sumedang. Dengan demikian, untuk meredam peningkatan kasus Covid-19 namun masyarakat masih dapat menjalankan aktivitas perekonomian maka ditempuh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala mikro (PPKM Mikro) yang berlaku secara nasional khususnya di wilayah dengan risiko penyebaran covid-19 yang cukup tinggi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan awal tahun 2022, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2022 dan 2023.

Pada tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, arah kebijakan ekonomi Nasional adalah peningkatan produktivitas; penguatan pemulihan sosial dan ekonomi yang inklusif; dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tekait arah kebijakan perekonomian tidak lepas dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan Tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rancangan RKPD Tahun 2023 mengusung tema **“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”**, dan tema RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah **“Pemantapan Pembangunan yang Inovatif, Kolaboratif dan Progresif”**.

Tahun 2023 merupakan tahun pembangunan terakhir pada periode Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Pada tahun 2023 kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah untuk memenuhi target-target akhir pembangunan yang tertuang pada RPJMD, Arah kebijakan ekonomi akan diprioritaskan terutama pada target-target pembangunan yang belum tercapai.

Mengacu pada Tabel 3.1 kebijakan perekonomian daerah akan digunakan untuk mendorong pencapaian tiga target indikator makro yaitu (1) penurunan Persentase Penduduk Miskin, (2) penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan (3) percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 3.1
Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Variabel	Satuan	2021		2022	2023
		Target	Realisasi	Target	Target
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,72-72,00	71,80	71.93-72.48	72.40-73.37
Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,75 – 9,71	10,71	10.41-9.54	9,70-7,56
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,35 – 8,51	9,18	8.78-7.99	8.18-6.95
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.66 – 4.70	3.17	4.70-5.70	5.20-6.20
Gini Ratio	Poin	0,39 – 0,36	0,36	0.38-0.35	0,37-0,34
PDRB per Kapita	Juta Rupiah	30.75-32.08	-	32.09-33.84	33.85-34.70

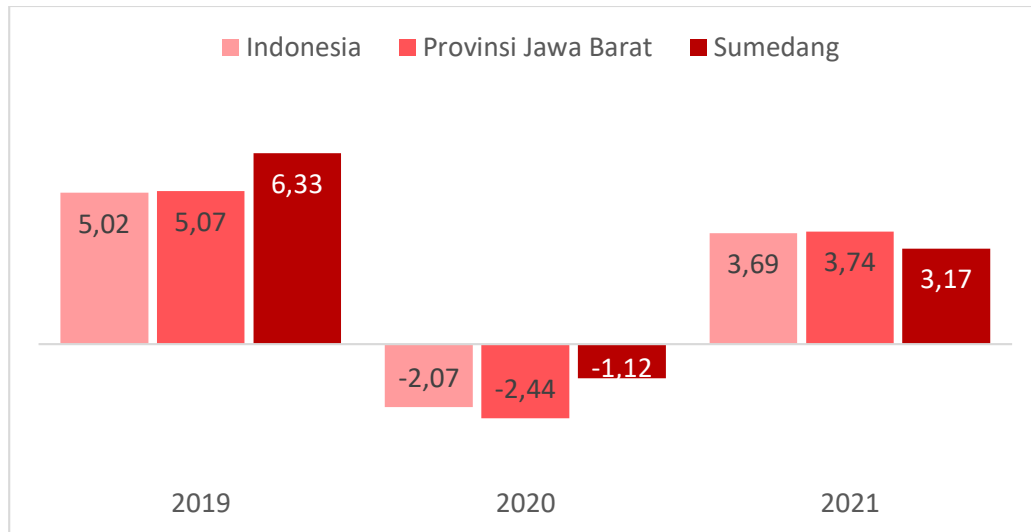
Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang (2022)

3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah

A. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sudah kembali tumbuh positif, baik di tingkat nasional, regional Jawa Barat maupun Kabupaten Sumedang. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas masyarakat sudah kembali meningkat setelah sebelumnya terdampak pandemi Covid-19 dengan adanya pembatasan sosial secara massif. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang jika dibandingkan dengan tingkat nasional dan regional Jawa Barat, sedikit lebih lambat. Padahal di dua tahun sebelumnya mampu lebih cepat dari nasional dan Jawa Barat.

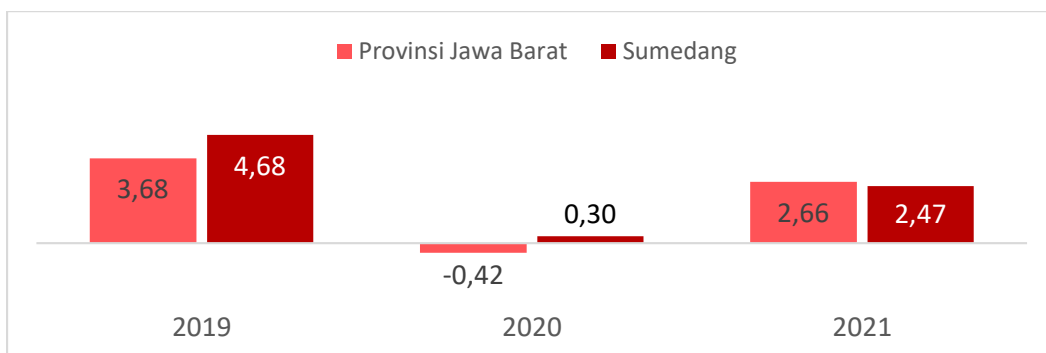
Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)



Sumber : BPS (2022)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang yang lebih lambat juga sejalan dengan pertumbuhan PDRB per Kapita yang di dua tahun sebelumnya dapat lebih cepat dari Jawa Barat, bahkan di saat awal pandemi Covid-19 (2020) masih tumbuh positif, sementara Jawa Barat mengalami kontraksi.

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (%)

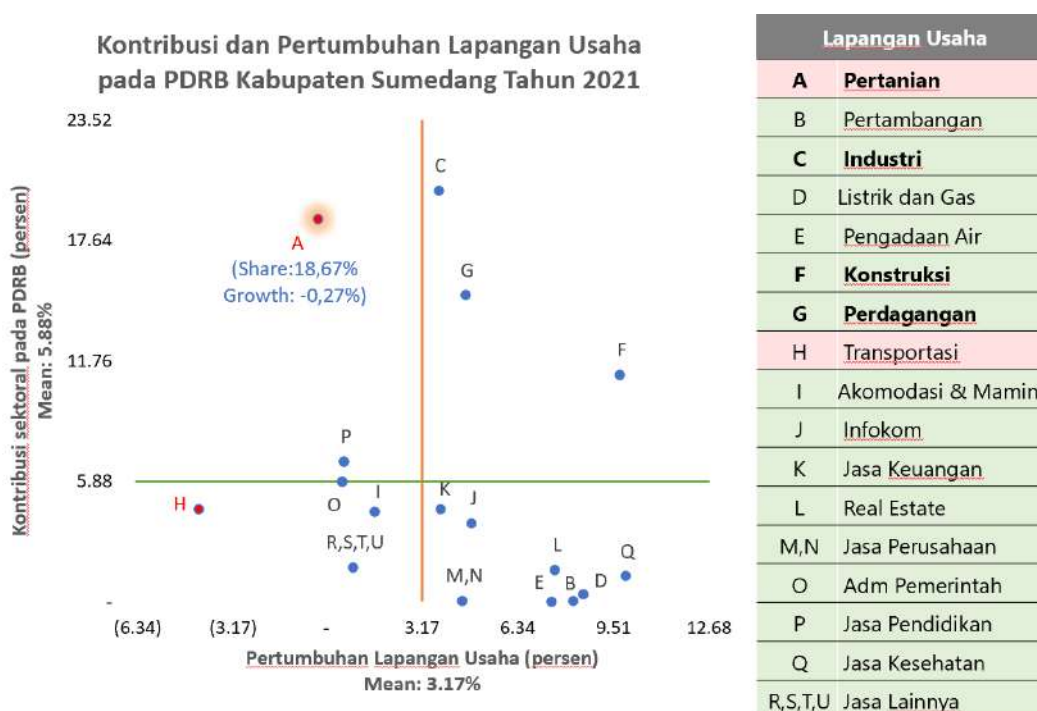


Sumber : BPS (2022)

Lebih lambatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang dibandingkan regional Jawa Barat, dapat dijelaskan dengan melihat struktur PDRB berdasarkan lapangan usaha dimana terdapat salah satu sektor utama di Kabupaten Sumedang yang mengalami kontraksi pada Tahun 2021, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Padahal, di tahun sebelumnya sektor ini mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19. Namun di tahun 2021, saat sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru berkontraksi sebesar -0,27 persen. Meskipun terbilang kecil kontraksinya, akan tetapi besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan,

dan perikanan yang mencapai 18,67 persen menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat karena di tingkat provinsi Jawa Barat sektor ini masih tumbuh positif. Terkontraksinya sektor Pertanian ini disebabkan menurunnya produksi di sub sektor tanaman pangan yang menjadi core pertanian Kab. Sumedang, juga pada peternakan dan tanaman hortikultura tahunan. Adanya bencana banjir dan kekeringan merupakan pemicu rendahnya produksi pertanian di 2021, khususnya pada komoditas padi sawah. Luas lahan terdampak bencana di 2021 meningkat 57% dibandingkan 2020, dan puso meningkat 22%.

Gambar 3.3
Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB
Kabupaten Sumedang Tahun 2021



Sumber : BPS, 2022 (diolah)

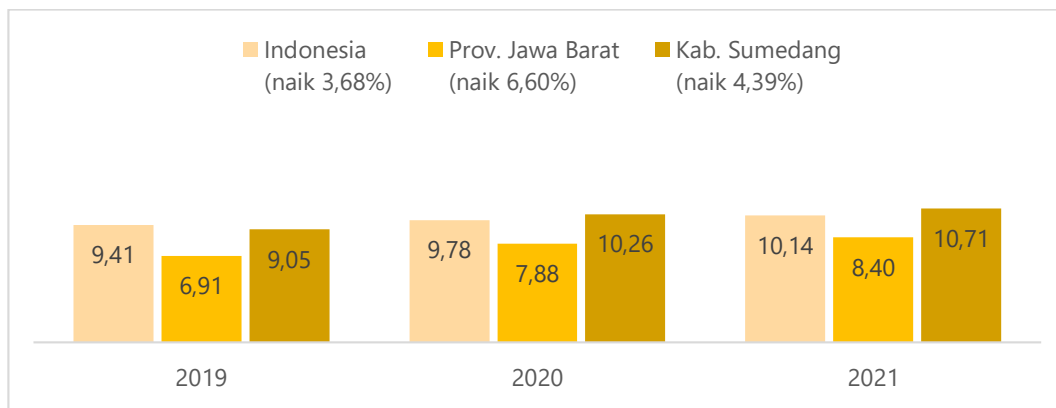
0

Selain itu, masih ada satu lapangan usaha lagi yang juga terkontraksi, yaitu sektor transportasi dan pergudangan, dengan kontraksi yang lebih tinggi mencapai -4,23 persen dan kontribusi pada PDRB sebesar 4,51 persen. Dari seluruh lapangan usaha yang ada, sektor transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha yang terdampak cukup serius mengingat sektor ini juga terkontraksi di tahun sebelumnya (-6,57 persen).

B. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan sejak adanya pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan di hampir semua wilayah. Jika dikomparasikan peningkatan kemiskinan di Kab. Sumedang dengan tingkat kemiskinan di level nasional dan regional Jawa Barat dari tahun 2020 ke 2021 maka peningkatan di Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat namun masih berada di atas peningkatan kemiskinan nasional.

Gambar 3.4
Tingkat Kemiskinan & Perubahannya 2020 ke 2021 (%)

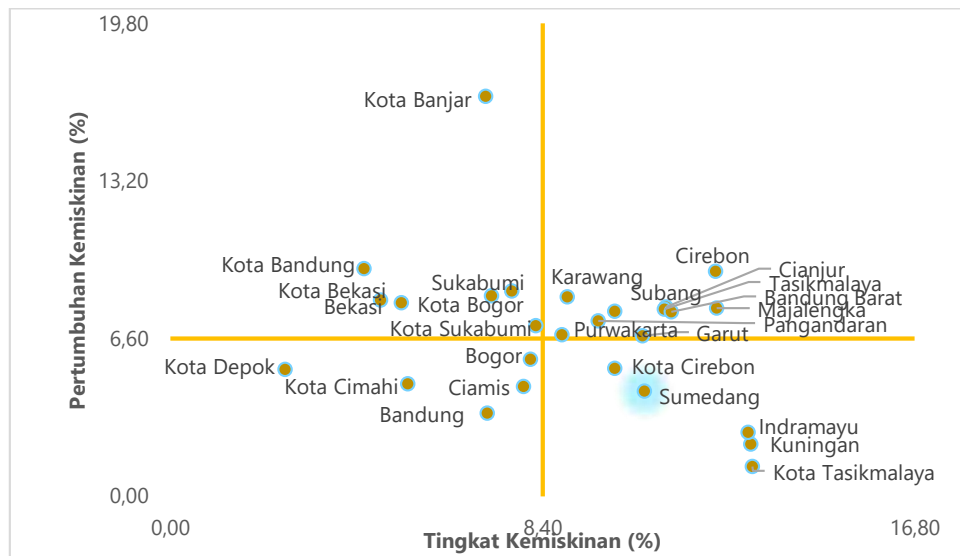


Sumber : BPS, 2021

Untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar wilayah, perlu dihitung persentase perubahan tingkat kemiskinan sehingga dapat menilai progress penurunan/peningkatan kemiskinan secara proporsional. Dengan kata lain, tidak cukup fair hanya membandingkan persentase atau jumlah penduduk miskin di setiap wilayah tanpa dilihat dari pertumbuhannya. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kondisi awal tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.

Peningkatan yang dialami Kab. Sumedang memang melebihi rata-rata peningkatan di Jawa Barat, namun dilihat dari pertumbuhan tingkat kemiskinan maka capaian Sumedang (4,4%) masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat (6,6%). Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan penduduk miskin di Sumedang relatif lebih rendah dari rata-rata kabupaten kota di Jawa Barat.

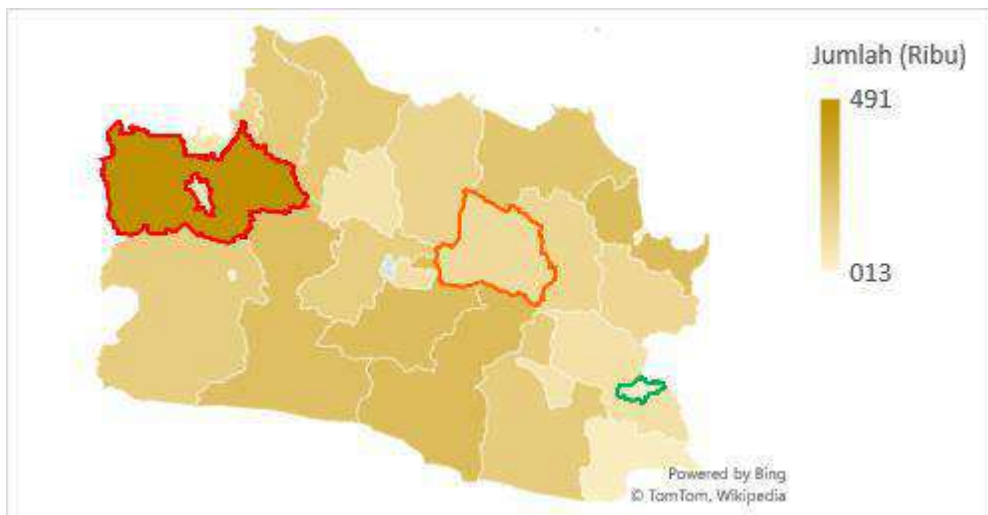
Gambar 3.5
Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

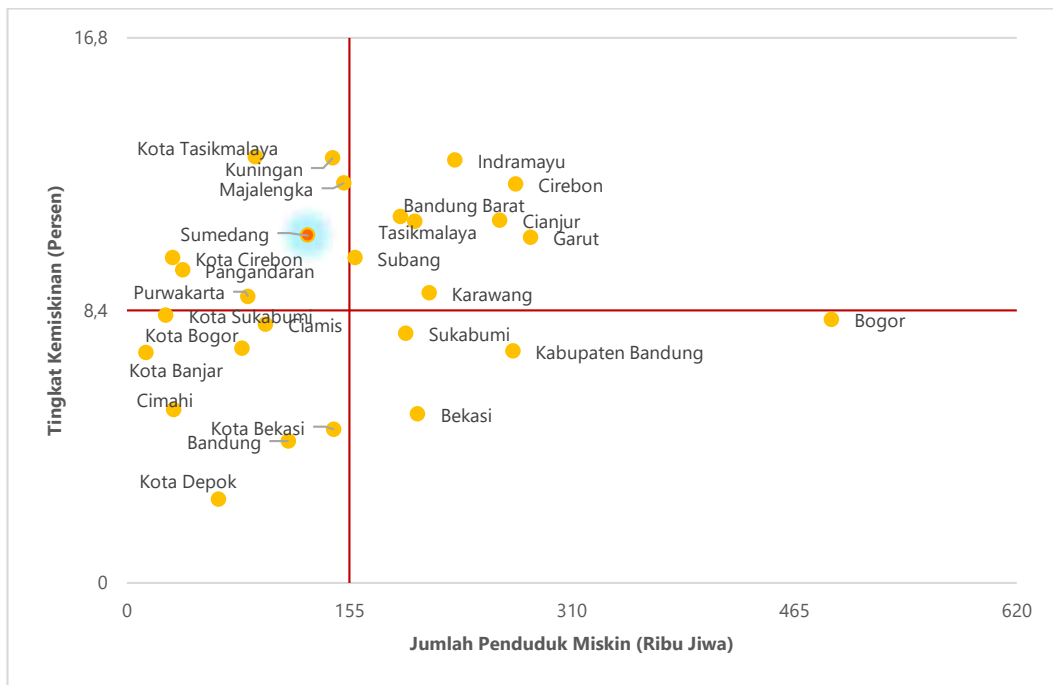
Selain pertumbuhan kemiskinan yang lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang juga masih relatif lebih baik dari jumlah penduduk miskin yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 126 ribu jiwa, dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat yang jika dirata-ratakan sekitar 155 ribu jiwa. Jika dikomparasikan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin maka posisi Kab. Sumedang masih berada di kuadran 2 yang lebih baik dari sisi jumlah penduduk miskin namun kurang menguntungkan dari persentase penduduk miskinnya.

Gambar 3.6
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

Gambar 3.7
Jumlah & Persentase Penduduk Miskin

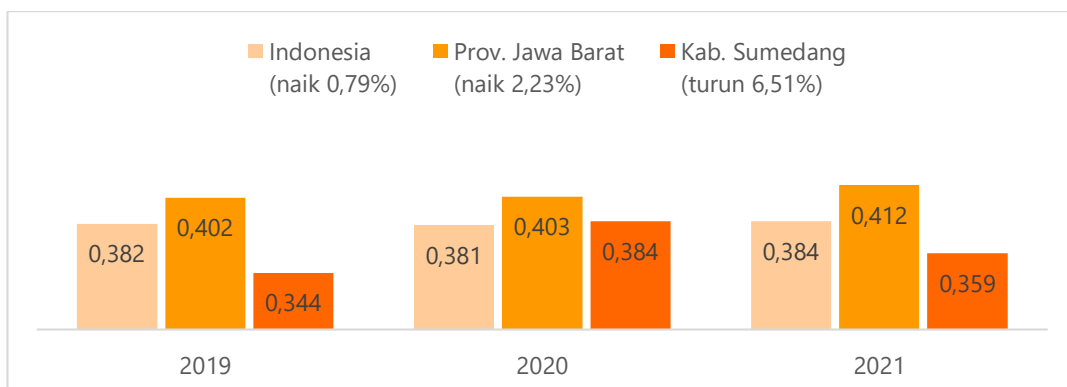


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

C. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang dalam tiga tahun terakhir lebih fluktuatif dibandingkan nasional dan regional Jawa Barat. Di tahun 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19, gini ratio Kab. Sumedang berada di 0,344. Sementara ketika terjadi awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang meningkat menjadi 0,384, dan pada tahun 2021 ketimpangan kembali menurun ke 0,359. Capaian ini sangat baik jika dibandingkan dengan nasional dan Jawa Barat yang justru mengalami peningkatan ketimpangan.

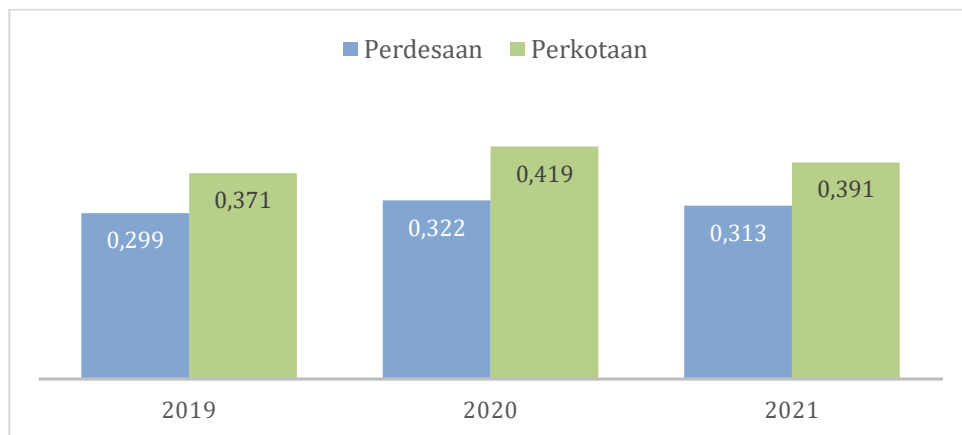
Gambar 3.8
Gini Ratio dan Perubahannya dari 2019 ke 2021



Sumber : BPS, 2022

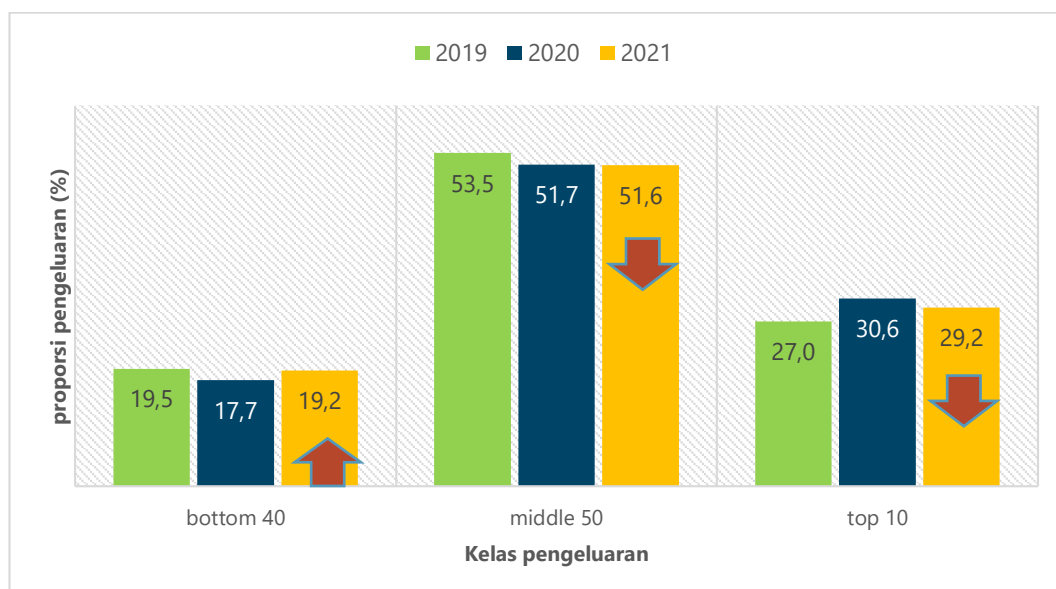
Tahun 2019 gap gini ratio perkotaan dan perdesaan lebih kecil, dan proporsi pengeluaran kelompok berpendapatan bawah dan menengah meningkat sementara kelompok berpendapatan atas menurun sehingga gini ratio mampu mencapai 0,344. Sementara di tahun 2020, kondisi sebaliknya terjadi akibat ketahanan ekonomi masyarakat bawah cukup rentan menghadapi guncangan akibat pandemi Covid-19. Di 2021, kondisi yang relatif sama dengan 2019 dimana gini ratio perkotaan dan perdesaan menurun dan gap nya mengecil dibandingkan 2020, serta meningkatnya proporsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah menjadikan gini ratio 2021 kembali turun meskipun belum menyamai capaian sebelum pandemi Covid-19.

Gambar 3.9
Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Sumedang



Sumber : BPS, 2022

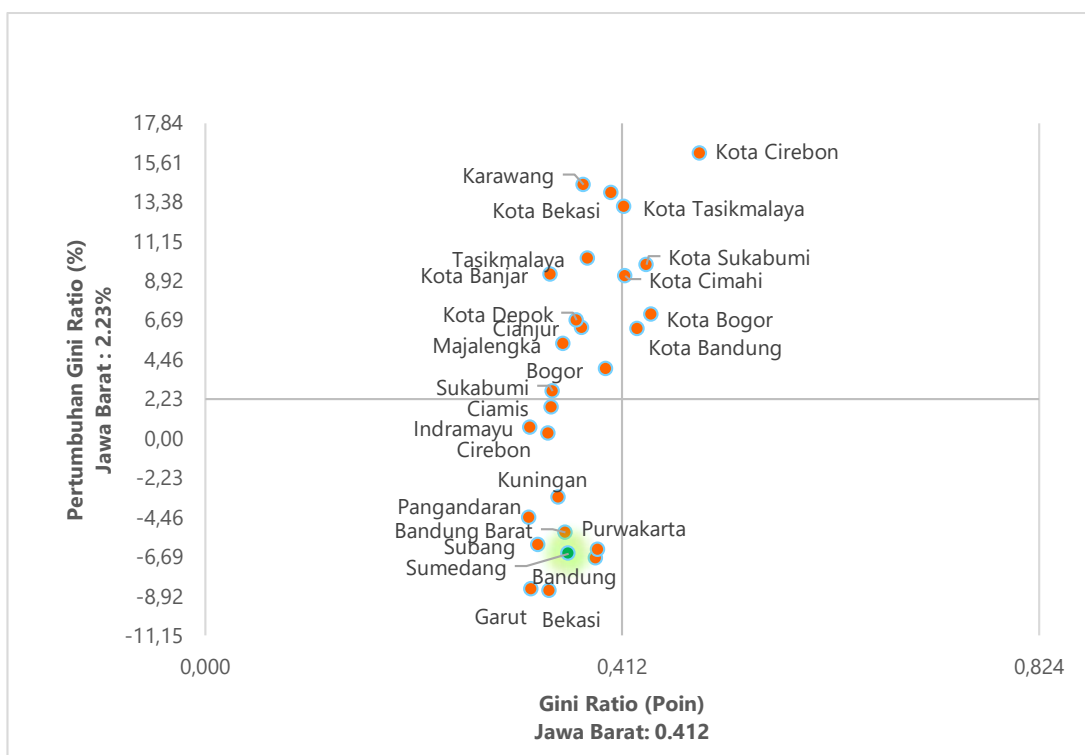
Gambar 3.10
Proporsi Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Sumedang



Sumber : BPS, 2022

Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan adalah melalui pembenahan program jaring pengaman sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat agar lebih efektif dan tepat sasaran atau dalam istilah lain upaya menekan tingkat *inclusion error* (adanya orang tidak miskin yang menerima bantuan) dan *exclusion error* (adanya orang miskin yang tidak menerima bantuan) (Smeru, 2020).

Gambar 3.11
Gini Ratio Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat



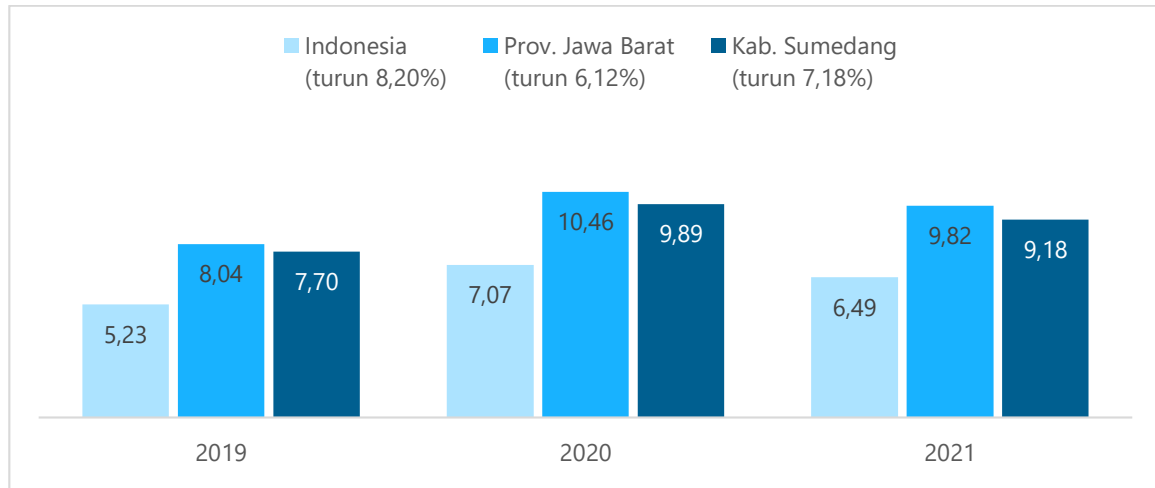
Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, gini ratio Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan di saat sebagian besar kabupaten dan seluruh kota di Jawa Barat mengalami peningkatan ketimpangan. Penurunan gini ratio dari 2021 ke 2020 mampu turun 6,51 persen lebih rendah, sementara di Provinsi Jawa Barat, gini ratio yang mencapai 0,412 justru meningkat sebesar 2,23 persen.

D. Ketenagakerjaan

Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 2020 terjadi sebagai dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan kelesuan dunia usaha sehingga terjadi pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan hingga PHK. Kondisi yang lebih baik terjadi di 2021 dimana TPT mengalami penurunan,

baik di tingkat nasional, Jawa Barat, maupun Kab. Sumedang. Namun, dilihat pertumbuhan TPT Sumedang mampu turun lebih baik dibandingkan Jawa Barat, meski masih lebih rendah dari penurunan di level nasional.

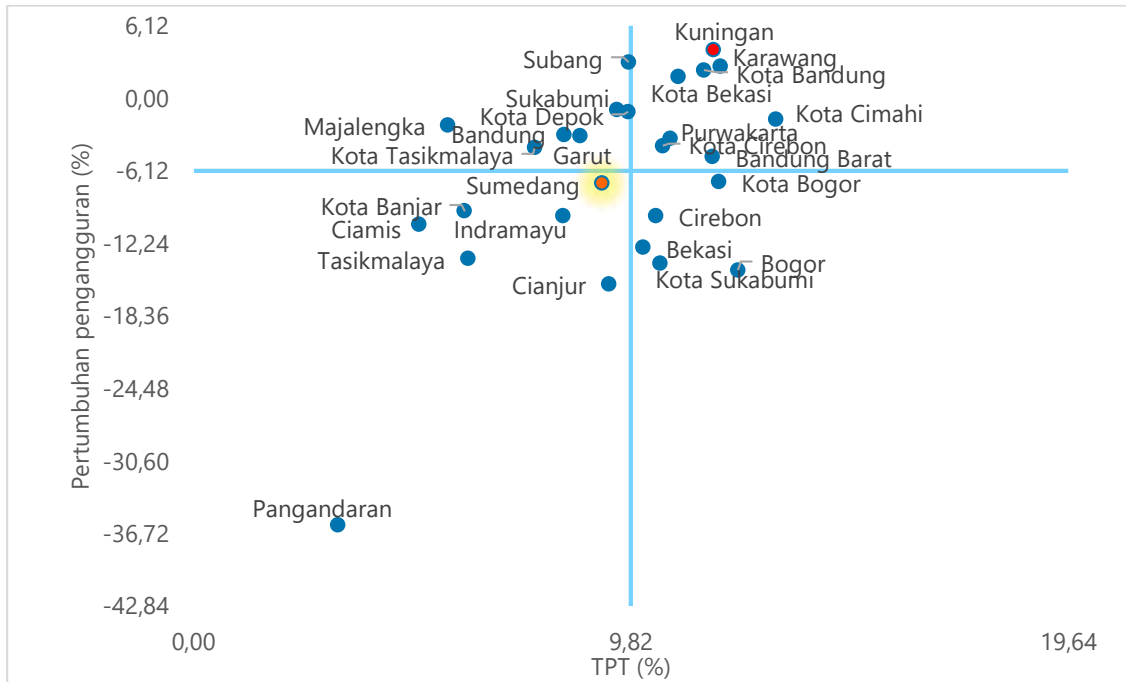
Gambar 3.12
TPT dan Perubahannya dari 2019 ke 2021



Sumber : BPS, 2021

Jika dibandingkan kondisi pengangguran dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, posisi Kab. Sumedang berada di kuadran terbaik karena mampu menurunkan TPT lebih tinggi dari capaian Jawa Barat. Kelebihan lainnya, Kab. Sumedang meskipun memiliki UMK di atas rata-rata Jawa Barat, dan tidak semua kab/kota mengalami kenaikan UMK, namun TPT masih bisa lebih rendah dari Jawa Barat.

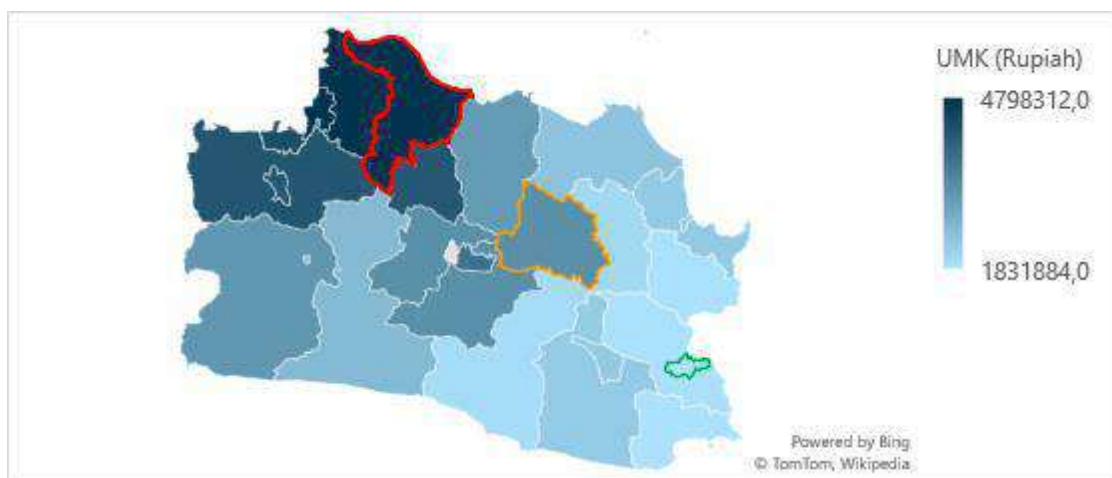
Gambar 3.13
TPT Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Jawa Barat



Sumber : BPS, 2021

Di kuadran terbaik, hanya Kab. Sumedang yang memiliki UMK di atas rata-rata Jawa Barat (3,2 juta rupiah) dan mengalami kenaikan UMK juga di atas rata-rata Jawa Barat (95 ribu rupiah). UMK Kab. Sumedang pada 2021 mencapai Rp. 3.241.929 dengan peningkatan UMK dari 2020 ke 2021 sebesar Rp. 102.000. UMK Kab. Sumedang ini berbeda jauh dengan kabupaten tetangga seperti Majalengka, Garut, dan kabupaten tetangga lainnya, kecuali Kab. Bandung.

Gambar 3.14
UMK Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2021

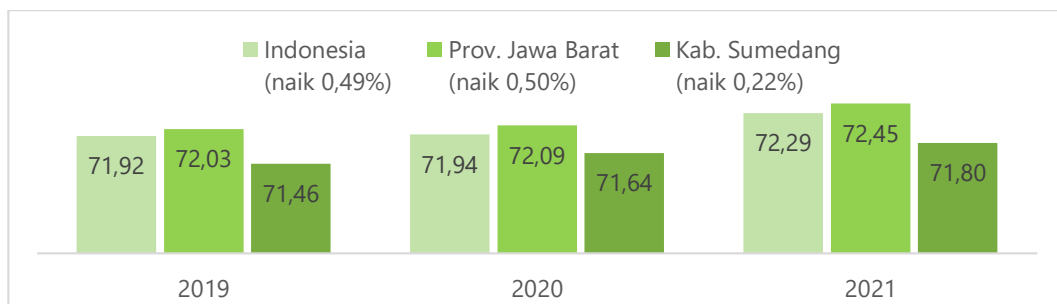


Sumber : BPS, 2021

E. Pembangunan Sumber Daya Manusia

IPM Sumedang dalam 3 tahun terakhir sudah berada pada kategori Tinggi (>70 poin), dan masih mampu meningkat meskipun dihadapkan pada pandemi Covid-19 di 2020 dan 2021. Komponen IPM yang mengalami peningkatan lebih lambat hanya pada pendidikan, meskipun komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) Sumedang sudah lebih baik dari Jawa Barat.

Gambar 3.15
IPM dan Perubahannya dari 2020 ke 2021



Posisi IPM Sumedang jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat memang relatif lambat, namun secara peringkat masih berada di urutan 12 kabupaten kota Jawa Barat. Bahkan, jika dibandingkan antar kabupaten, karena IPM tinggi didominasi oleh kotamadya, Kab. Sumedang berada di posisi 3 terbaik. Namun demikian, capaian IPM 2021 ini menjadi tantangan bagi Pemkab Sumedang untuk meningkatkan keteringgalan terutama pada aspek pendidikan (RLS dan HLS).

Tabel 3.2
IPM Kab/Kota di Jawa Barat dan Pertumbuhannya di Tahun 2021

WILAYAH	UHH	%UHH	RLS	%RLS	HLS	%HLS	PPP	%PPP	IPM	%IPM	Rank
INDONESIA	71.57	0.10	8.54	0.06	13.08	0.10	11,156	143	72.29	0.49	
JAWA BARAT	73.23	0.19	8.61	0.06	12.61	0.11	10,934	89	72.45	0.50	
Bogor	71.36	0.19	8.31	0.01	12.49	0.01	10,410	93	70.60	0.28	16
Sukabumi	71.21	0.24	7.10	0.03	12.24	0.01	8,850	27	67.07	0.28	24
Cianjur	70.32	0.19	7.19	0.01	12.00	0.01	8,052	72	65.56	0.31	27
Bandung	73.72	0.19	9.07	0.11	12.70	0.01	10,307	106	72.73	0.47	10
Garut	71.59	0.18	7.53	0.01	12.03	0.12	7,961	85	66.45	0.50	25
Tasikmalaya	69.67	0.20	7.48	0.13	12.54	0.01	7,829	-23	65.90	0.35	26
Ciamis	72.02	0.19	7.90	0.20	14.20	0.14	9,259	-29	70.93	0.62	15
Kuningan	73.78	0.19	7.80	0.23	12.23	0.01	9,409	-50	69.71	0.48	17
Cirebon	72.18	0.19	7.10	0.18	12.27	0.02	10,368	26	69.12	0.54	19
Majalengka	70.46	0.19	7.31	0.04	12.23	0.01	9,591	70	67.81	0.33	22
Sumedang	72.62	0.19	8.52	0.01	12.98	0.01	10,262	45	71.80	0.22	12
Indramayu	71.84	0.21	6.52	0.22	12.26	0.01	9,810	-49	67.64	0.52	23
Subang	72.58	0.23	7.11	0.01	11.71	0.01	10,854	64	69.13	0.26	18

WILAYAH	UHH	%UHH	RLS	%RLS	HLS	%HLS	PPP	%PPP	IPM	%IPM	Rank
Purwakarta	71.18	0.19	8.10	0.01	12.12	0.01	11,669	55	70.98	0.23	13
Karawang	72.33	0.18	7.78	0.01	12.10	0.01	11,522	207	70.94	0.40	14
Bekasi	73.81	0.13	9.30	0.18	13.10	0.01	11,341	100	74.45	0.51	8
Bandung Barat	72.52	0.18	8.20	0.01	11.88	0.01	8,546	91	68.29	0.31	20
Pangandaran	71.60	0.20	7.85	0.11	12.08	0.01	9,065	-19	68.28	0.32	21
Kota Bogor	73.82	0.21	10.53	0.20	13.42	0.01	11,716	152	76.59	0.63	5
Kota Sukabumi	72.58	0.16	9.81	0.22	13.58	0.11	10,942	-57	74.60	0.53	7
Kota Bandung	74.46	0.18	10.99	0.24	14.21	0.01	16,996	109	81.96	0.55	1
Kota Cirebon	72.44	0.18	10.12	0.21	13.13	0.01	11,810	10	75.25	0.48	6
Kota Bekasi	75.19	0.18	11.31	0.15	14.10	0.10	15,903	127	81.95	0.55	2
Kota Depok	74.62	0.18	11.46	0.18	13.93	0.01	15,420	139	81.37	0.49	3
Kota Cimahi	74.21	0.18	11.08	0.12	13.81	0.01	12,019	-6	78.06	0.30	4
Kota Tasikmalaya	72.34	0.19	9.52	0.19	13.46	0.01	10,213	-50	73.31	0.37	9
Kota Banjar	71.19	0.20	8.77	0.14	13.24	0.01	10,476	-59	71.92	0.31	11

Sumber: BPS (2022)

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah Pendapatan Daerah, oleh karenanya pendapatan daerah perlu dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang tinggi sebagai pendukung pendanaan pembangunan daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah Pada Tahun 2020 strukturnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan realisasi Tahun 2021, proyeksi dan target Tahun 2022 – 2024 strukturnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2024, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021(Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2024 (Rp)
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.904.389.486.621,44	2.835.865.125.275,29	2.894.611.047.718,00	3.444.838.830.207,80	3.444.838.830.207,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	444.430.247.449,44	470.281.819.936,29	537.973.563.766,00	654.249.377.891,68	654.249.377.891,68
4.1.01	Pajak Daerah	180.222.612.157,00	198.326.131.839,00	273.224.000.000,00	298.826.931.766,30	298.826.931.766,30
4.1.02	Retribusi Daerah	8.300.206.720,00	6.731.513.966,00	21,648,949,026,00	14.681.794.766,69	14.681.794.766,69
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.929.327.383,00	11.164.520.965,00	11.603.089.374,00	10.599.813.895,09	10.599.813.895,09
4.1.04	Lain - Lain PAD yang Sah	244.978.101.189,44	254.059.653.166,29	231,497,525,366,00	330.140.837.463,59	330.140.837.463,59
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.318.347.156.451,00	2.233.686.395.115,00	2.356.637.483.952,00	2.674.080.673.001,12	2.674.080.673.001,12
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.934.732.545.970,00	1.892.016.917.253,00	2.088.986.329.000,00	2.227.994.453.832,21	2.227.994.453.832,21
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	383.614.610.481,00	341.669.477.862,00	267.651.154.952,00	446.086.219.168,91	446.086.219.168,91
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	141.612.082.721,00	131.896.910.224,00	0,00	116.508.779.315,00	116.508.779.315,00
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2.904.389.486.621,44	2.835.865.125.275,29	2.894.611.047.718,00	3.444.838.830.207,80	3.444.838.830.207,80

- 1) Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 (Unaudited BPK RI)
2) Laporan Realisasi APBD (LRA) Tahun Anggaran 2020 (Database SIPKD per 31 Desember 2021)

PAD meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, sedangkan pendapatan transfer terdiri dari : Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan Dana Desa, Transfer antar Daerah terdiri dari: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Adapun arah kebijakan dan strategi pendapatan daerah, adalah :

Arah kebijakan pendapatan daerah, meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
2. Menegakkan pelaksanaan regulasi pajak dan retribusi daerah
3. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah
5. Meningkatkan pertumbuhan capaian realisasi potensi Pendapatan Daerah
6. Mengembangkan inovasi transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah

Strategi pendapatan daerah, meliputi:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
2. Penyusunan regulasi PDRD
3. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah
4. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah
5. Pendidikan dan Pelatihan SDM pengelola pendapatan daerah
6. Kajian optimalisasi pendapatan daerah
7. Pemetaan potensi pendapatan daerah
8. Penyusunan strategi pemanfaatan potensi Pendapatan Daerah

3.2.1.1 Pajak Daerah

A. Upaya Intensifikasi :

1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem online terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;

2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui :
 - a. Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;
 - b. Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 - a) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
 - b) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan;
 - c) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. Wajib pajak *self assessment*;
 - b. Wajib pajak PBB-KB;
 - c. Wajib pajak PPJ
4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain :
 - a. Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
 - b. PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya;
 - c. Melakukan *cleansing* data terhadap piutang pajak.
5. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.

B. Upaya Ekstensifikasi :

1. Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah :
 - a. Melakukan *review* atas peraturan perundangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, khususnya pengelolaan pajak daerah;
 - b. Melakukan penambahan objek pajak;
 - c. Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir;
 - d. Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
 - a. Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM;
 - b. Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan;
 - c. Pengembangan kerjasama pembayaran Pajak Daerah dengan perbankan, dan *ecommerce*.

3.2.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu peningkatan pelayanan retribusi daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah.

1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui :
 - a. Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
 - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
 - c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
 - d. Menerapkan *cash less* dalam pembayaran retribusi dengan *banking system*;
 - e. Memulai menerapkan *e-ticketing*;
 - f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas PTSP.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui :
 - a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

3.2.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
2. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;

4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.

Lebih lanjut lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. penerimaan ini berasal dari penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja komponen ini maka dilakukan upaya antara lain :

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.

3.2.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang diprioritaskan untuk Pendanaan Urusan Pemerintah wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minima serta wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya untuk besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.

Pengelolaan Belanja dalam Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos

belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja dengan menggunakan pendekatan :

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;

Dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]

2. Penganggaran terpadu;

Dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran

3. Penganggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan

- a. Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] diharapkan dari sub kegiatan; [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
- b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- c. Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Belanja Daerah difokuskan pada tiga prioritas yaitu :

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk membiayai pemenuhan program-program unggulan terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati); dan terakhir
- c. Prioritas III adalah dialokasikan untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam kebijakan pada RKPD Tahun 2023 yang difokuskan pada 4 (empat) prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;
 - a. Meningkatkan Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan
 - b. Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Pendidikan Berbasis Teknologi Digital
 - d. Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
 - e. Meningkatkan Pemerataan Sarana Prasarana Kesehatan
 - f. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik
 - g. Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat
 - h. Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - i. Optimalisasi Perlindungan Sosial
2. Pemulihan Ekonomi Berbasis Inovasi dan Kolaborasi
 - a. Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian
 - b. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Daerah
 - c. Meningkatkan omzet koperasi dan UMKM
 - d. Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - e. Meningkatkan kompetensi SDM yang Berdaya Saing dan Memenuhi Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja
 - f. Menguatnya Sektor Perdagangan dalam Pengendalian Inflasi Daerah
 - g. Meningkatkan Iklim Investasi Daerah
 - h. Akselerasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru
 - i. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas
 - j. Meningkatkan Kualitas dan Pemasaran Produk IKM
3. Membangun yang Berkelanjutan dan Tangguh;
 - a. Optimalisasi Pelayanan Pengelolaan Persampahan
 - b. Berkurangnya Pencemaran Air, Udara dan Emisi CO₂
 - c. Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - d. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
 - e. Menguatnya Penerapan Norma Agama dan Budaya dalam Pembangunan
 - f. Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- g. Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana dan Penanganan Pasca Bencana
- 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi.
 - a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government
 - b. Meningkatnya Pelayanan Publik
 - c. Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah
 - d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
 - e. Terintegrasinya Pemanfaatan Satu Peta Satu Data

Berdasarkan Fokus dan Prioritas Pembangunan pada Tahun 2023 akan diJawa Baratkan lebih lanjut dalam Stuktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Uraian Sebagai Berikut :

3.2.2.1. Stuktur Belanja Daerah pada APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang diJawa Baratkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Struktur Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

3.2.2.2 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Rencana Alokasi Belanja Pegawai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Tahun 2023 dialokasikan sebagai berikut :

- a. Gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai formasi Pegawai Tahun 2023;
- b. Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah berserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
- d. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional yang telah diJawa Baratkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- e. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK)

dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. Penganggaran Tambahan Penghasilan ASN (PNS dan PPPK) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh Persetujuan DPRD. Adapaun Kebijakan serta penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah;
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik.
- j. Penganggaran Honorarium lainnya diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud dengan berpedoman kepada Standar Satuan Harga Regional (SHSR) dan Keputusan Kepala Daerah tentang satuan Harga
- k. Penganggaran Honorarium Honorarium untuk ASN (PNS dan PPPK) telah memperhatikan kebijakan pada Tambahan Penghasilan ASN.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD dan menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau Paling lama Tahun 2026. Adapaun dalam proses Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran adanya penyesuaian Alokasi Belanja Pegawai pada Setiap SKPD, hal dimaksud dipengaruhi oleh adanya Kebijakan Pemerintah Pusat serta penyesuaian Kebutuhan Pendanaan Belanja Pegawai.

2. Belanja Barang dan Jasa

Rencana Pendanaan untuk Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah. Pengadaan Barang dan jasa dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
- b. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
- c. Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. ^{[[L]]}_{SEP}
- d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk ^{[[L]]}_{SEP} menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri ^{[[L]]}_{SEP} dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada ^{[[L]]}_{SEP} Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Pada Tahun 2023 akan diarahkan kepada belanja yang dapat memberikan dampak menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak melakukan perjanjian pinjaman sehingga tidak mengalokasikan untuk pembayaran belanja bunga.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

Dalam rangka Mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan serta memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif maka pemerintah daerah dan meningkatkan Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro Pemerintah Daerah Telah Menetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Sumedang, Bahwa Pemerintah Daerah akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat daerah serta pemberian insentif (Subsidi) atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KURDA dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur dengan tingkat Bunga sebagai berikut :

- a. Tingkat suku bunga sebesar 3% (tiga persen) flat rate per tahun, premi asuransi dan provisi bank dibebankan kepada debitur;
- b. Tingkat suku bunga sebesar 9% (sembilan persen) flat rate per tahun dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk subsidi bunga yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan Bantuan social berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali ditentukan dalam peraturan perundang – undangan. Perencanaan dan penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pada Tahun 2023 dalam tahap persiapan Pemilu dan Pilkada serentak akan mengalokasikan Hibah kepada Organisasi Penyelenggaraan Pemilihan diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Kriteria Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diusulkan melalui elektronifikasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan atau Sistem Informasi Lainnya.

3.2.2.3 Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran Belanja Modal diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pengembangan sarana dan Prasarana yang terkait langsung dengan Peningkatan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi. Penganggaran Belanja Modal (Barang Milik Daerah) didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan Kebutuhan Pelaksanaan Tugas SKPD serta ketersediaan barang Milik Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa, yang Penjelasan definisi serta indikator Infrastuktur akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau Paling lama Tahun 2026.

Sehubungan dengan belum adanya Peraturan Pemerintah atas penjelasan tanggal Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka apabila ada penyesuaian kebijakan pada belanja modal pada Penyusunan Dokumen Penganggaran hal tersebut berpedoman Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman penyusunan APBD.

3.2.2.4 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan dua kriteria

1. Keperluan Mendesak

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - 2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh

tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

2. **Keadaan Darurat meliputi**

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

3. **Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya** untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya

4. **Bantuan sosial** yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ^[1]_{SEP}

3.2.2.5 **Kebijakan Belanja Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari :

a. **Belanja Bagi Hasil Pajak**

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

b. **Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa**

- 1) Pemenuhan Hak – Hak keuangan Desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

- 2) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perencanaan Pendanaan pada Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan Proyeksi pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Adapun penyesuaian rencana Alokasi Dana Desa menunggu Informasi dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- 3) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa serta mendorong pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumedang

Kebijakan Dana Transfer Kepada Pemerintah Desa Sangat Dipengaruhi Oleh Berbagai Kebijakan Dari Pemerintah Pusat Khususnya Kebijakan Dana Transfer, Apabila Adanya Penyesuaian Pada Proses Penyusunan Dokumen Penganggaran Hal tersebut mebyesuaian atas Proyeksi Penerimaan Dana Transfer Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Presiden Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri.

Berdasarkan Arah Kebijakan Belanja maka Rencana Alokasi pada Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2024 (Rp)
5	BELANJA	2.868.265.284.483,00	2.712.130.404.839,00	2.882.281.374.558,00	3.444.838.830.207,80	3.444.838.830.207,80
5.1	BELANJA OPERASI	1.949.881.150.929,00	1.955.814.792.559,00	2.067.525.526.042,00	2.123.049.589.693,92	2.123.049.589.693,92
5.1.01	Belanja Pegawai	1.176.209.206.916,00	1.182.261.056.674,00	1.285.674.718.177,00	1.356.235.382.482,52	1.356.235.382.482,52
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	738.886.933.513,00	709.093.186.272,00	712.664.886.965,00	681.113.343.177,90	681.113.343.177,90
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	500.587.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Hibah	33.562.360.500,00	59.369.641.613,00	59.544.160.000,00	78.327.715.000,00	78.327.715.000,00
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	1.222.650.000,00	4.590.320.500,00	9.641.760.900,00	7.373.149.033,50	7.373.149.033,50
5.2	BELANJA MODAL	498.497.676.052,00	353.171.282.580,00	411.721.679.388,00	623.733.723.254,76	623.733.723.254,76
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	46.401.777.454,00	23.812.747.069,00	17.466.148.128,00	53.637.600.151,51	53.637.600.151,51
5.4	BELANJA TRANSFER	373.484.680.048,00	379.331.582.631,00	385.568.021.000,00	644.417.917.107,61	644.417.917.107,61
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.044.107.816,00	23.441.269.922,00	29.487.295.000,00	52.867.912.301,31	52.867.912.301,31
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	353.440.572.232,00	379.331.582.631,00	356.080.726.000,00	591.550.004.806,30	591.550.004.806,30
	TOTAL BELANJA DAERAH	2.868.265.284.483,00	2.712.130.404.839,00	2.882.281.374.558,00	3.444.838.830.207,80	3.444.838.830.207,80

Sumber : BKAD Kab. Sumedang

3.2.2.6 Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan arah kebijakannya meliputi (a) menentukan skema penggunaan DAU berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah; (b) mengutamakan pemanfaatan DAU dalam memenuhi SPM sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; (c) menyempurnakan formula DAU berdasarkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, seperti letak geografis dan perekonomian daerah; dan (d) mengalokasikan DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dana Alokasi Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik, dengan arah kebijakan sebagai berikut.

Arah Kebijakan DAK Fisik, meliputi:

- a. mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta mendukung tematik tertentu sesuai dengan prioritas nasional;
- b. mempertajam fokus kegiatan DAK Fisik yang berorientasi hasil dan berdampak langsung pada pembangunan daerah dan capaian prioritas nasional berbasis pada capaian target kinerja;
- c. mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian outcome yang optimal;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi Dana Transfer Khusus;
- e. meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis
- b) kinerja dan penguatan kualitas pengawasan; (f) memperkuat sinergi pemanfaatan dan efisiensi belanja DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung baik APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

Arah Kebijakan DAK Nonfisik, meliputi:

- a) melanjutkan penyediaan dan pemerataan operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan sesuai target prioritas nasional;
- b) memperkuat dukungan pendanaan bagi pencapaian prioritas nasional;
- c) meningkatkan sinergi pendanaan DAK Nonfisik dengan sumber pendanaan lainnya.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.2.3.1 Pembiayaan dengan Skema APBD

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Sebagaimana diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

A. Arah Kebijakan Penerimaan Daerah

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah tidak memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2022 walaupun kenyataannya bahwa setiap tahun terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Tidak diproyeksikan SiLPA karena pada SiLPA terdiri dari sisa-sisa anggaran pada tahun berjalan dan dalam penyajiannya harus diuraikan secara rinci, sementara pemerintah daerah masih kesulitan menentukan proyeksi kegiatan mana saja yang memiliki sisa anggaran pada tahun berjalan.

B. Arah Kebijakan Pengeluaran Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan untuk pengalokasian Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
2. Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda);

3. Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
4. Penyertaan modal kepada PT. LKM Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang;
5. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jawa Barat Banten (BJB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2021 Tentangperubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerahjawa Barat Dan Banten, Tbk..
6. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024.

Berdasarkan arah Kebijakan Pembiayaan Daerah, maka Rencana Alokasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2024 (Rp)
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	163.930.843.943,17	124.474.646.639,61	0,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.930.843.943,17	117.474.646.639,61	0,00	0,00	
6.1.02	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	0,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	163.930.843.943,17	124.474.646.639,61	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	82.580.399.442,00	15.870.000.000,00	12.329.673.160,00	(42.882.100.000,00)	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan				15.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal	9.400.000.000,00	8.870.000.000,00	12.329.673.160,00	27.882.100.000,00	
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	71.000.000.000,00	7.000.000.000			
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	82.580.399.442,00	15.870.000.000,00	12.329.673.160,00	(42.882.100.000,00)	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	81.350.444.501,17	108.604.646.639,61	(12.329.673.160,00)	(42.882.100.000,00)	

1) Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 (Unaudited BPK RI)

2) Laporan Realisasi APBD (LRA) Tahun Anggaran 2021 (per 31 Desember 2021)

3.2.3.2 Pembiayaan dengan Skema Non-APBD

Pendanaan daerah selain bersumber dari APBD, dapat juga berasal dari Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) dan Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP), yang merupakan urusan bersama dengan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi yang sejalan dengan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.

1. Dana Dekonstrasi

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

2. Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan Adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dokumen RKPD memuat prioritas pembangunan daerah yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat urgensi dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan Tahun 2023 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada Tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumedang didasarkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Pada bagian ini dirumuskan Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

1. Korelasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
2. Korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD, didalamnya terdapat arahan pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah serta isu strategis daerah;
3. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana;
4. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, Perangkat Daerah pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas;
5. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut;
6. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolak ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya;

7. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Visi pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Tema tersebut dilengkapi dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - 4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- c. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:
- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

D. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya didalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsamelalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Memajukan kebudayaan;
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
- 5) Meningkatkan budaya literasi.

d. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

e. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
- f. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bersumber dari RPJMD Tahun 2018-2023 disajikan sebagai berikut.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Perwujudan visi melalui 5 (lima) misi, yaitu: **Misi Pertama**, Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban; **Misi Kedua**, Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; **Misi Ketiga**, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; **Misi Keempat**, Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dan **Misi Kelima**, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- a. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
- b. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
- c. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
- d. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur

- energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.
- e. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
 - f. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
 - g. Terwujudnya good governance dan whole of government, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan implementasi tahun kelima dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Tujuan pembangunan merupakan bentuk penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah, sedangkan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih operasional untuk mengetahui keberhasilan dalam tujuan yang bermuara pada keberhasilan masing-masing misi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang dimaksud telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Untuk mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan terlebih dahulu disampaikan Visi Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Visi Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Sumedang periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Sejahtera : kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas serta pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

Agamis : sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maju : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

Profesional : *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektif dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

Kreatif : masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah

beserta penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan yang secara integral melekat pada masing-masing misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau.

- Tujuan : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
- Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan
- Sasaran 3 : Meningkatnya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Sasaran 4 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.

2. Misi Kedua : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.

- Tujuan : Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang
- Sasaran : Memperkuatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama

3. Misi Ketiga : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.

- Tujuan : Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan
- Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri
- Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis
- Sasaran 3 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
- Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
- Sasaran 5 : Meningkatnya Ketahanan Daerah
- Sasaran 6 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
- Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

4. Misi Keempat : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

- Tujuan : Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi
- Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Sasaran 3 : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja daerah

5. Misi Kelima : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang

- Tujuan : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing
- Sasaran : Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat

4.1.4. Sinkronisasi dan Keterkaitan antara Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang dan Nasional Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Atas dasar tersebut RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 perlu berintegrasi, tersinkronisasi dan bersinergi dengan RPJMN 2020-2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tingkat keselarasan tujuan sasaran pembangunan daerah dengan Agenda Nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Keselarasan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah dan 7 Agenda Nasional pada RPJMN 2020-2024

7 Agenda Nasional		Sasaran Agenda Nasional	Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang		
			Misi	Tujuan	Sasaran
a	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1 Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 2: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis SASARAN 5: Meningkatnya Ketahanan Daerah

7 Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional	Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang				
		Misi	Tujuan	Sasaran		
				SASARAN 6: Menjamin Ketahanan Pangan Daerah		
2	Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisihery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur,	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri SASARAN 3: Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata		
		MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 3: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja daerah		
		MISI 5: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	SASARAN 1: Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat		
b	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 2: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis
				MISI 5: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	SASARAN 1: Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
		2	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 4: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian SASARAN 8: Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang

7 Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional	Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang				
		Misi	Tujuan	Sasaran		
	3	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 4: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	
			SASARAN 8: Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang			
	3	Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	
			MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal		SASARAN 4: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	
			MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.		SASARAN 3: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja daerah	
			MISI 5: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang		SASARAN 1: Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	
	4	Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
					SASARAN 2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	
	5	Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
					SASARAN 2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	
c	Meningkatkan SDM Bererualitas dan Berdaya Saing	1	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN3: Meningkatnya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

7 Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional	Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang		
		Misi	Tujuan	Sasaran
				SASARAN 4: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
		MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 3: Meningkatnya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SASARAN 4: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
3	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 4: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
6	Pengentasan kemiskinan	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 3: Meningkatnya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SASARAN 4: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
		MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 6: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

7 Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional	Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang			
		Misi	Tujuan	Sasaran	
	7 Peningkatan produktivitas dan daya saing	MISI 5: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	SASARAN 1: Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	
d	Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa	1 Memperkukuh ketahanan budaya bangsa	MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang	SASARAN : Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama
			MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 3: Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
	2 Memajukan kebudayaan	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 3: Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	
	3 Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama	MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang	SASARAN : Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	
	4 Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga		MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 3: Meningkatnya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang	SASARAN 4: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
			MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 5: Meningkatnya Ketahanan Daerah
	5 Meningkatkan budaya literasi	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	

7 Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional	Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang				
		Misi	Tujuan	Sasaran		
			mudah dan terjangkau			
		MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
e	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 4: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
		2	Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 4: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
		3	Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 4: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
				MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 3: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja daerah
		4	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 4: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
		5	Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 4: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
						SASARAN 8: Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang

7 Agenda Nasional		Sasaran Agenda Nasional		Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang		
				Misi	Tujuan	Sasaran
				MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
f	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 7: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 5: Meningkatnya Ketahanan Daerah
						SASARAN 7: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		3	Pembangunan Rendah Karbon	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 5: Meningkatnya Ketahanan Daerah
						SASARAN 7: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
g	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas	MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
						SASARAN 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
						SASARAN 3: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja daerah
		2	Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil	MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang	SASARAN : Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama
				MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		3	Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber	MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang	SASARAN : Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama

7 Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional	Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang		
		Misi	Tujuan	Sasaran
		MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 3: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja daerah
	4 Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi	MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
	5 Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		MISI 5: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	SASARAN : Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat

4.1.5. Sinkronisasi dan Keterkaitan antara Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 perlu berintegrasi, tersinkronisasi dan bersinergi dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tingkat keselarasan tujuan sasaran pembangunan daerah dengan Agenda Provinsi Jawa Barat, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Keselarasan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah dan 7 Tujuan dan Sasaran pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

7 Tujuan P-RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	Sasaran	Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang		
		Misi	Tujuan	Sasaran
a Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat	1 meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang	SASARAN : Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama

7 Tujuan P-RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran		Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang		
				Misi	Tujuan	Sasaran
	beragama dalam kerangka demokrasi					
b	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 3: Meningkatkan penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 4: Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
		4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	SASARAN 2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan
		5	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional	MISI 5: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	SASARAN 1 : Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat
c	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah.	1	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 3: Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
		2	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial	MISI 2 : Menkuatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang	SASARAN 1: Menguatkan kondisi kehidupan kerukunan umat beragama
d	Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.	1	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 4: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
		2	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 4: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
		3	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	MISI 5: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	SASARAN 1: Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat

7 Tujuan P-RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran		Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang		
				Misi	Tujuan	Sasaran
				inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang		
		4	Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan local	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 4: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
						SASARAN 8: Meningkatkan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang
e	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan local	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 5: Meningkatkan Ketahanan Daerah
						SASARAN 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
		2	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan local	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 4: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
		3	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan local	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 5: Meningkatkan Ketahanan Daerah
f	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi.	1	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan local	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis
		2	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan local	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 3: Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
		3	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan local	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri
		4	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan local	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	SASARAN 8: Meningkatkan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang
				MISI 4: Menata birokrasi	Terwujudnya akuntabilitas	SASARAN 2: Meningkatkan

7 Tujuan P-RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran		Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang		
				Misi	Tujuan	Sasaran
				pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	kinerja dan reformasi birokrasi	kualitas pelayanan publik
g	Terwujudnya good governance dan whole of government.	1	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
						SASARAN 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif	MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik SASARAN 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Tema Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun yang penting dalam periode RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 sehingga diharapkan tahun ini target-target pembangunan Kabupaten Sumedang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat seiring berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode 2018-2023. Maka tema pembangunan Kabupaten Sumedang yang diusung pada Tahun 2023 adalah “***Pemantapan Pembangunan yang Inovatif, Kolaboratif dan Berdaya Saing***”. Fokus program-kegiatan pada Tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan prioritas dan program pembangunan.

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada Perubahan RPJMD ke dalam rencana kerja tahunan sesuai tema pembangunan Tahun 2023, maka dirancang suatu Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

Prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelayanan Dasar, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan
 - b. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Pendidikan Berbasis Teknologi Digital
 - d. Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
 - e. Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Kesehatan
 - f. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik
 - g. Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat
 - h. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - i. Optimalisasi Perlindungan Sosial
2. Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian
 - b. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Daerah
 - c. Meningkatnya omzet koperasi dan UMKM
 - d. Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - e. Meningkatnya kompetensi SDM yang Berdaya Saing dan Memenuhi Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja
 - f. Menguatnya Sektor Perdagangan dalam Pengendalian Inflasi Daerah
 - g. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah
 - h. Akselerasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru
 - i. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas
 - j. Meningkatnya Kualitas dan Pemasaran Produk IKM
3. Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh, dengan sasaran Sebagai berikut :
- a. Optimalisasi Pelayanan Pengelolaan Persampahan
 - b. Berkurangnya Pencemaran Air, Udara dan Emisi CO₂
 - c. Meningkatnya Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - d. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
 - e. Menguatnya Penerapan Norma Agama dan Budaya dalam Pembangunan
 - f. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - g. Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana dan Penanganan Pasca Bencana.

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi, dengan sasaran Sebagai berikut :
 - a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government
 - b. Meningkatnya Pelayanan Publik
 - c. Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah
 - d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
 - e. Terintegrasinya Pemanfaatan Satu Peta Satu Data.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Pembangunan ekonomi nasional tahun 2023 akan dilaksanakan untuk mendukung proses transformasi ekonomi setelah pada tahun sebelumnya dihadapkan pada pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Tahun 2023 merupakan momentum untuk menciptakan horizon baru pembangunan dengan menekankan pada strategi mewujudkan SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi perekonomian domestik, dan pemindahan IKN.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2023 dengan tema sebagai berikut :

***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan”***

Tema tersebut dilengkapi dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional dari 7 (tujuh) Prioritas pembangunan pada RPJMN 2020-2024,

5 (lima) Proritas Pembangunan tersebut yaitu PN1, PN2, PN3, PN5 dan PN6 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan (Prioritas Nasional 1/PN1).

Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (Prioritas Nasional 2/PN2).

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

- c. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (Prioritas Nasional 3/PN3).

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya didalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsamelalui:
- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - 2) Memajukan kebudayaan;
 - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
 - 5) Meningkatkan budaya literasi.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Prioritas Nasional 5/PN5).
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (Prioritas Nasional 6/PN6).

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Analisis hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	<p>Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi</p> <p>Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian</p> <p>Sasaran 3: Meningkatnya omzet koperasi dan UMKM</p> <p>Sasaran 4:</p>

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang
		<p>Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>Sasaran 5: Meningkatnya kompetensi SDM yang Berdaya Saing dan Memenuhi Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja</p> <p>Sasaran 9: Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas</p> <hr/> <p>Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh</p> <p>Sasaran 3: Meningkatnya Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Sasaran 4: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah</p>
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan(PN2)	<p>Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar</p> <p>Sasaran 6: Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik</p> <p>Sasaran 7: Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat</p> <p>Sasaran 8: Optimalisasi Perlindungan Sosial</p> <hr/> <p>Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi</p> <p>Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian</p> <p>Sasaran 7: Meningkatnya Iklim Investasi Daerah</p> <p>Sasaran 8: Akselerasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru</p>
		<p>Prioritas 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi</p> <p>Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal</p>

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN4).	<p>Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar</p> <p>Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan</p> <p>Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>Sasaran 3: Pendidikan Berbasis Teknologi Digital</p> <p>Sasaran 4: Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Sasaran 5: Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Kesehatan</p>
		<p>Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi</p> <p>Sasaran 5: Meningkatnya kompetensi SDM yang Berdaya Saing dan Memenuhi Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja</p>
4	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar (PN5).	<p>Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar</p> <p>Sasaran 6: Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik</p> <p>Sasaran 7: Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat</p>
		<p>Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi</p> <p>Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian</p> <p>Sasaran 4: Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>Sasaran 7: Meningkatnya Iklim Investasi Daerah</p> <p>Sasaran 8: Akselerasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru</p>
5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim (PN6)	<p>Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar</p> <p>Sasaran 6: Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik</p>

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang
		<p>Sasaran 8: Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.</p>
		<p>Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh</p> <p>Sasaran 1: Optimalisasi Pelayanan Pengelolaan Persampahan</p> <p>Sasaran 2: Berkurangnya Pencemaran Air, Udara dan Emisi CO2</p> <p>Sasaran 6: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <p>Sasaran 7: Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana dan Penanganan Pasca Bencana</p>

4.2.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 bahwa Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah ***“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”***

Pada Tahun 2023 diharapkan masyarakat dapat hidup mandiri dengan meningkatkan kegiatan ekonomi setelah mengalami krisis pandemi COVID-19, yang sejalan dengan vaksin yang sedang berjalan maka pada Tahun 2023 dengan tetap melaksanakan 11 (Sebelas) prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023. Sehingga pada Tahun 2023 prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan pangan berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;
6. Reformasi Sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana;
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
8. Gerakan membangun desa;
9. Pendidikan Agama dan tempat ibadah juara;
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup;

11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Analisis hubungan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hubungan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Sumedang
1.	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;	Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar Sasaran 4: Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Sasaran 5: Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Kesehatan
2.	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;	Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian Sasaran 4: Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sasaran 7: Meningkatnya Iklim Investasi Daerah
		Prioritas 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Sasaran 1: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Publik Sasaran 3: Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah
3.	Penguatan Sistem Ketahanan pangan berkelanjutan;	Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Sasaran 3: Meningkatnya Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasaran 4: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Sumedang
		<p>Prioritas 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi</p> <p>Sasaran 1: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government</p>
4.	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	<p>Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar</p> <p>Sasaran 6: Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik</p> <p>Sasaran 7: Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat</p> <p>Sasaran 8: Optimalisasi Perlindungan Sosial</p>
		<p>Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh</p> <p>Sasaran 3: Meningkatnya Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Sasaran 4: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah</p>
5.	Reformasi Sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;	<p>Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar</p> <p>Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan</p> <p>Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>Sasaran 3: Pendidikan Berbasis Teknologi Digital</p>
		<p>Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh</p> <p>Sasaran 5: Menguatnya Penerapan Norma Agama dan Budaya dalam Pembangunan</p>
6.	Reformasi Sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana;	<p>Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar</p> <p>Sasaran 8: Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.</p> <p>Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh</p>

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Sumedang
		<p>Sasaran 1: Optimalisasi Pelayanan Pengelolaan Persampahan</p> <p>Sasaran 2: Berkurangnya Pencemaran Air, Udara dan Emisi CO2</p> <p>Sasaran 6: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <p>Sasaran 7: Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana dan Penanganan Pasca Bencana</p>
		<p>Prioritan 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi</p> <p>Sasaran 1: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government</p>
7.	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;	<p>Prioritan 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi</p> <p>Sasaran 1: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government</p> <p>Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Publik</p> <p>Sasaran 3: Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah</p> <p>Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal</p> <p>Sasaran 5: Terintegrasinya Pemanfaatan Satu Peta Satu Data</p>
8.	Gerakan Membangun Desa	<p>Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar</p> <p>Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan</p> <p>Sasaran 4: Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Sasaran 5: Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Kesehatan</p> <p>Sasaran 6: Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik</p> <p>Sasaran 7:</p>

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Sumedang
		Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat
		<p>Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi</p> <p>Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian</p> <p>Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Daerah</p> <p>Sasaran 4: Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>Sasaran 8: Akselerasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru</p> <p>Sasaran 9: Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas</p>
		<p>Prioritas 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi</p> <p>Sasaran 1: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government</p> <p>Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Publik</p>
9.	Pendidikan Agama dan tempat ibadah juara;	<p>Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar</p> <p>Sasaran 8: Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh</p> <p>Sasaran 5: Menguatnya Penerapan Norma Agama dan Budaya dalam Pembangunan.</p>
10.	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup;	<p>Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar</p> <p>Sasaran 6: Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik</p> <p>Sasaran 7: Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat</p>

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Sumedang
		<p>Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi</p> <p>Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian</p> <p>Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Daerah</p> <p>Sasaran 4: Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>Sasaran 8: Akselerasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru</p> <p>Sasaran 9: Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas</p>
		<p>Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh</p> <p>Sasaran 1: Optimalisasi Pelayanan Pengelolaan Persampahan</p> <p>Sasaran 2: Berkurangnya Pencemaran Air, Udara dan Emisi CO2</p> <p>Sasaran 6: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <p>Sasaran 7: Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana dan Penanganan Pasca Bencana</p>
11.	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.	<p>Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi</p> <p>Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian</p> <p>Sasaran 4: Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>

4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Keselarasn antara prioritas pembangunan Tahun 2022 dengan Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan dijabarkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Kedudukan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Isu Strategis	Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Prioritas Tahun 2023	Sasaran Tahun 2023
ISU PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar dengan upaya pembebasan beban biaya peserta didik	Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar	Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan
				Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan
	Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan Mendorong pengembangan pendidikan karakter	Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Sasaran 3: Pendidikan Berbasis Teknologi Digital
ISU PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN	Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa melalui peningkatan jumlah dan kualitas Pustu serta penyediaan Transportasi Kesehatan Masyarakat	Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar	Sasaran 1: Menguatnya Penerapan Norma Agama dan Budaya dalam Pembangunan
		Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif		Sasaran 4: Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Sasaran 5:

Isu Strategis	Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Prioritas Tahun 2023	Sasaran Tahun 2023
		Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing		Meningkatnya Pemerataan Sarana
		Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing		Prasarana Kesehatan
ISU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KETIMPANGAN EKONOMI	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia	Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar	Sasaran 6: Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik
				Sasaran 7: Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat
			Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Sasaran 9: Optimalisasi Perlindungan Sosial Sasaran 3: Meningkatnya Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu Strategis	Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Prioritas Tahun 2023	Sasaran Tahun 2023
ISU PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi	Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksesibilitas aktivitas perekonomian masyarakat	Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian
		Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi		
		Menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah	Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar	Sasaran 7: Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat
		Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian
				Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Daerah

Isu Strategis	Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Prioritas Tahun 2023	Sasaran Tahun 2023
ISU PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Sasaran 6: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik		Sasaran 7: Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana dan Penanganan Pasca Bencana
		Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik	Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar	Sasaran 6: Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik
		Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara	Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Sasaran 1: Optimalisasi Pelayanan Pengelolaan Persampahan
Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara	Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar	Sasaran 6: Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik		

Isu Strategis	Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Prioritas Tahun 2023	Sasaran Tahun 2023
			Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Sasaran 2: Berkurangnya Pencemaran Air, Udara dan Emisi CO2
		Meningkatkan pemenuhan air baku dan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin	Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar	Sasaran 6: Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik
				Sasaran 7: Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat
ISU PENINGKATAN ANTISIPASI BENCANA	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	Mengurangi resiko bencana alam dan dampak perubahan iklim	Prioritas 1: Optimalisasi Pelayanan Dasar	Sasaran 8: Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
			Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Sasaran 6: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Isu Strategis	Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Prioritas Tahun 2023	Sasaran Tahun 2023
				Sasaran 7: Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana dan Penanganan Pasca Bencana
ISU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KETIMPANGAN EKONOMI	Meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani serta penguatan ketahanan pangan	Memfasilitasi sarana produksi dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung terwujudnya kawasan agribisnis	Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian
		Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Daerah
			Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian
	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat	Meningkatkan fungsi sistem irigasi yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian	Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 4: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian

Isu Strategis	Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Prioritas Tahun 2023	Sasaran Tahun 2023
	dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi			Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Daerah
	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Sasaran 3: Meningkatnya Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ISU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KETIMPANGAN EKONOMI	Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil	Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah	Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 3: Meningkatnya omzet koperasi dan UMKM Sasaran 9: Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas dan Pemasaran Produk IKM.

Isu Strategis	Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Prioritas Tahun 2023	Sasaran Tahun 2023
		Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitaliasasi pasar tradisional	Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 3: Menguatnya Sektor Perdagangan dalam Pengendalian Inflasi Daerah
		Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat		Sasaran 3: Meningkatnya omzet koperasi dan UMKM.
Sasaran 9: Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas				
	Meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani serta penguatan ketahanan pangan	Memfasilitasi sarana produksi dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung terwujudnya kawasan agribisnis	Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 1: Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian
				Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Daerah

Isu Strategis	Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Prioritas Tahun 2023	Sasaran Tahun 2023
			Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Sasaran 4: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
ISU PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH	Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata	Meningkatkan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal	Prioritas 3: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Sasaran 5: Menguatnya Penerapan Norma Agama dan Budaya dalam Pembangunan
		Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan <i>event visit wonderful Indonesia</i>	Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 4: Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja	Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 4: Meningkatnya kompetensi SDM yang Berdaya Saing dan Memenuhi Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja
		Membangun Sumedang <i>Preneurship</i> berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda		Sasaran 9: Meningkatnya Pemberdayaan

Isu Strategis	Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Prioritas Tahun 2023	Sasaran Tahun 2023
		Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif		Ekonomi Berbasis Komunitas Sasaran 4: Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Peningkatan kinerja aparatur pemerintah	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika	Prioritas 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 3: Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah
		Mengembangkan sistem <i>e-government</i> untuk meningkatkan		Sasaran 1: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government
		Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima		Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Publik Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
			Prioritas 2:	Sasaran 7:

Isu Strategis	Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Prioritas Tahun 2023	Sasaran Tahun 2023	
	Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah Sasaran 8: Akselerasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru	
			Prioritas 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 1: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government	
				Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Publik	
				Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	
		Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi		Prioritas 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sasaran 1: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government
		Memberikan kepastian karir dan pengembangan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi dan kinerja			Sasaran 2:

Isu Strategis	Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Arah Kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Sumedang	Prioritas Tahun 2023	Sasaran Tahun 2023
		penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah
		Mendorong pengembangan pendidikan karakter		

4.4. Program Unggulan

Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang kepada masyarakat, yang menggambarkan kegiatan konkret dan mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat serta memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Program unggulan direncanakan dan dilaksanakan setiap tahun selama masa jabatan. Adapun Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah:

4.4.1. Sumedang Agamis.

Program unggulan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan adalah sertifikasi diniyah bagi lulusan SD dan sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP dan sederajat, memberikan insentif guru ngaji/ustad/takmir masjid, pelaksanaan Subuh Berjamaah di setiap mesjid kecamatan yang diikuti Bupati - Wakil Bupati dan para pejabat, taklim aparatur di setiap OPD, safari Ramadhan, pengembangan Koperasi Syariah di setiap Mesjid Besar Kecamatan, Magrib Mengaji On Line (MMO) setiap hari kerja dipandu oleh Bupati, Masjid Al Kamil IPP, dan Masjid Al Kami Panenjoan Jatigede. Program Unggulan Agamis ini mengakselerasi pencapaian Sasaran Misi ke-2 pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, yaitu Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama.

4.4.2. Rumah Besar Fakir Miskin Sampai Tingkat Desa.

Rumah Besar Fakir Miskin merupakan suatu sistem penanggulangan kemiskinan terpadu yang melibatkan berbagai program dan stakeholder mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Rintang Simpati (pemberian bantuan makanan harian dari Kecamatan kepada lansia miskin), Puskesmas di 270 desa, Sekretariat Rumah Besar, Integrasi penanganan fakir miskin, SSQR/Sumedang Simpati Quick Response (Saluran WA untuk menampung dan merespon keluhan/permohonan masyarakat atas permasalahan sosial, pendidikan, kesehatan). Dengan adanya berbagai kegiatan Rumah Besar Fakir Miskin tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi sasaran Misi ke-1.

4.4.3. Sumedang Buludru.

Program ini salah satu sasaran Misi ke-3 adalah Meningkatkan Ketahanan Daerah. Kondisi lingkungan yang indah, bersih, nyaman, dan aman mendukung perwujudan ketahanan daerah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembentukan URC (Unit Reaksi Cepat) Persampahan, Penataan Alun-Alun Sumedang, Pemeliharaan RTH, Penguatan pengelolaan TPSA Cibeureum, URC (Unit Reaksi Cepat) Tambal Lubang, Penataan Trotoar, PJU Perkotaan.

4.4.4. Pelayanan Dasar.

SDM yang sehat, kuat, dan cerdas merupakan modal utama pembangunan. Memiliki kualitas SDM seperti itu pada saat ini maupun masa mendatang merupakan keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah menjadi Sasaran Misi ke-1 menjadi kunci mewujudkan SDM yang sehat, kuat, dan cerdas tersebut. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah peningkatan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C). Pendidikan kesetaraan ini sangat membantu masyarakat kurang beruntung untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikan yang meningkat akan membantu dalam mencari pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Strategi dalam pembelajaran pada masa pandemic Covid 19, Kabupaten Sumedang menerapkan 7 (tujuh) Strategi Pendidikan Komplementer yaitu 1) Pembelajaran Virtual, 2) Pembelajaran Tematik terintegrasi berbasis Proyek, 3) Pembelajaran melalui modul/LKS, 4) Home Visit, 5) televisi/Radio dan media lainnya, 6) Grup Media Sosial, 7) Penugasan Berkala dan terstruktur.

Pembentukan Public Safety Center (PSC) 119 Simpatik. PSC 119 Simpatik berfungsi sebagai Layanan Pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan Gawat Darurat dengan Pelayanan Kesehatan Cepat, Tepat, Cermat dan Profesional (Respon Time) selama 24 jam sehingga dapat meminilisir bahkan menghilangkan kecacatan/kematian seseorang yang mengalami kegawatdaruratan kesehatan; peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu). Pustu membantu jangkauan layanan dasar di wilayah kerja Puskesmas sehingga mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4.4.5. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian merupakan Sasaran dari Misi ke – 3. Beberapa pembangunan dan peningkatan infrastruktur seperti pembangunan Jalan Lingkar Jatigede, peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata, peningkatan jalan di daerah perbatasan, dan peningkatan jaringan irigasi dipastikan membantu meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Terjadinya peningkatan pergerakan orang/barang/jasa dari dan menuju wilayah ekonomi karena semakin mudahnya aksesibilitas, peningkatan efisiensi usaha tani dan UMKM karena menurunnya biaya transportasi, peningkatan produktivitas komoditas pertanian karena ketersediaan kecukupan pengairan.

4.4.6. Pengembangan Pariwisata.

Kabupaten Sumedang dianugerahi alam indah serta budaya unik dan menarik yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata sehingga sangat tepat Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata juga menjadi Sasaran Misi ke – 3. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan KEK Pariwisata Jatigede, Pembangunan Tugu Kujang Sapasang, Kawasan Wisata Cisema Jatigede, peningkatan Wisata Museum Srimanganti, Geotheater Rancakalong, peningkatan Seni dan Budaya Daerah.

4.4.7. Pengembangan Agribisnis.

Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian menduduki peringkat pertama. Penduduk Kabupaten Sumedang yang menjadi petani sekitar 131.264 orang atau 22% dari jumlah angkatan kerja (Tahun 2020). Bila diasumsikan sekitar 75% dari jumlah tersebut telah berkeluarga (dengan 3 orang anak), maka jumlah penduduk Sumedang yang menggantungkan hidupnya secara langsung pada sektor pertanian sejumlah 229.712 jiwa. Menjadi tumpuan terbesar masyarakat dalam menggantungkan hidup, maka fokus peningkatan pertumbuhan sektor pertanian akan membantu pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Hal ini juga sesuai dengan Sasaran pada Misi ke-3, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan

Agribisnis. Pengembangan Agribisnis akan meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan pemasaran komoditas pertanian sehingga diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan petani. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Sumedang, Kawasan Food Estate, Integrated Farming, pengembangan perikanan di kawasan waduk Jatigede.

4.4.8. Profesionalisme ASN.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, ASN memberikan pelayanan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Sasaran dari Misi ke – 4, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kualitasnya terpelihara, dan berkelanjutan. Pelayanan publik yang bersifat mempermudah, mempercepat, dan transparans yang telah dilaksanakan adalah pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), aplikasi pelayanan perizinan melalui Si Ice Mandiri (sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang memungkinkan pemohon dapat mengunduh SK perizinan dan mencetaknya secara *mandiri.*), pelayanan dokumen kependudukan melalui aplikasi SilaSidakep (merupakan jenis layanan melalui daring bagi masyarakat Sumedang untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), WA KEPO (Whatapps Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online – memberikan pelayanan secara on line kepada masyarakat termasuk penyampaian saran dan keluhan), Commad Center (Pusat informasi memungkinkan pimpinan melihat secara real time mengenai program, output, dan kondisi daerah). Selain itu, tentunya pelayanan publik memerlukan ASN yang berkualitas. Oleh karena itu, dikembangkan Talent Poll (pengembangan karir ASN berdasarkan kompetensi dan kualifikasi), dan Sumedang Simpati Academy (pelatihan ASN melalui modul LMS).

4.4.9. Membangun Sumedang Preneurship.

Berwirausaha merupakan salah satu pilihan pekerjaan masyarakat Kabupaten Sumedang. Memberikan fasilitasi pemberdayaan kewirausahaan secara terintegrasi dari hulu – hilir akan meningkatkan kompetensi dan daya saing mereka. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah Gerakan Wirausahawan Muda (GARUDA) yang telah menghasilkan One Village One Product (OVOP) seperti Kampung

Kaos Kaki, Kampung Sepatu, Kampung Aluminium; One Pesantren One Product (OPOP), Gerai UMKM (SIMADU, GUMASEP), UMKM Go Digital, Festival Tahunan Kopi Sumedang, pelayanan pendaftaran NIB di desa – desa. Pembangunan Gedung Creative Center. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mengakselerasi pencapaian Sasaran Misi ke-5, yaitu Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat.

4.5 Inovasi

4.5.1 Inovasi yang sudah dilaksanakan

4.5.1.1. Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri (SIICE MANDIRI) V.1.1

SI ICE MANDIRI Adalah sistem informasi cetak mandiri secara online. sistem tersebut dapat melayani masyarakat untuk mengurus permohonan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Masyarakat atau pemohon dapat mengajukan permohonan perizinan melalui SI ICE secara online. sistem dibagi permodul peruser seperti modul bagian verifikator, kepala bidang, dan kepala dinas dan OPD Teknis. Masyarakat tidak perlu lagi mengurus surat rekomendasi ke Dinas SKPD terkait, cukup mendaftarkan di sistem dan mengisi formulir persyaratan dan menggugah berkas persyaratan. SKPD terkait juga akan menerima informasi dan notifikasi terkait permohonan perizinan yang memerlukan surat rekomendasi.

Hasil dari produk akhir sistem ini masyarakat dapat mendownload SK perizinan dalam bentuk softfile. sistem dibuat sedinamis mungkin agar Masyarakat dan Dinas dengan mudah menggunakan aplikasi SI ICE.

Tujuan (Versi 1.1) :

1. Pengurangan Entitas/Pengguna yang awalnya berjumlah 9 entitas menjadi 6 entitas
 - a. Masyarakat
 - b. Petugas survey dan Tim Teknis SKPD digabung ke Tim Teknis SKPD.
 - c. Koordinator, Front Office, Back Office digabung menjadi Verifikator
 - d. Kepala Bidang
 - e. Kepala Dinas
 - f. AdminSehingga dengan pengurangan entitas ini alur proses bisnis menjadi lebih singkat.
2. Menghilangkan peran petugas dalam pembuatan SK, diambil alih secara otomatis oleh sistem

3. Notifikasi Email

Perubahan Notifikasi dari SMS Gateway menjadi Notifikasi melalui email untuk semua entitas/pengguna

4. Trace Riwayat

Merupakan pengembangan dari monitoring berkas pada versi sebelumnya. Sebuah fitur untuk mencatat semua aktivitas entitas/pengguna dalam pemrosesan izin secara detail, sehingga baik petugas atau masyarakat dapat mengawasi proses yang terjadi.

5. Interopability dengan Aplikasi Milik Pemerintah lainnya

SIICE Mandiri ber-interopability dengan Aplikasi Siapdol milik Bappenda untuk Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Daerah.

4.5.1.2. eKlinik Serambi Inspektorat Sumedang (eKSIS)

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari reformasi birokrasi dan sesuai dengan salah satu misi Presiden tahun 2019-2024 adalah pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Saat ini birokrasi dituntut untuk dapat bergerak lebih lincah, dinamis, bersih, dan akuntabel sehingga mampu beradaptasi pada perubahan yang bergerak dengan cepat dan penuh ketidakpastian. Salah satu faktor pengungkit untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melakukan penguatan dibidang pengawasan, yaitu dengan memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Bangun sistem peringatan dini (early warning system), perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel.

Saat ini, kinerja APIP dianggap masih lemah meskipun telah didorong dengan upaya penguatan atas fungsi dan perannya. Salah satunya adalah upaya tersebut masih terus “dihantui” tantangan sistemis dalam hal kuantitas dan kualitas SDM, anggaran, serta kelembagaan dan kewenangannya. Meskipun beberapa kerangka regulasi telah disusun guna mengatasi masalah tersebut, namun kenyataannya di lapangan masih terdapat, misalnya, kesenjangan antara jumlah SDM APIP dengan kebutuhan idealnya. Selain itu, beberapa aspek lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius adalah persoalan independensi, kompetensi, dan integritas SDM APIP yang selama ini dianggap masih “jauh panggang dari api”. Indikasi lemahnya independensi tersebut dapat dilihat dari posisi SDM APIP yang secara struktural masih berada di bawah kendali pimpinan instansi pemerintah.

Sehingga oleh karenanya, kondisi demikian tidak memungkinkan SDM APIP untuk melakukan pengawasan secara profesional dan objektif. Tidak berhenti sampai di situ, anggaran yang dialokasikan untuk Inspektorat selaku APIP juga belum memadai, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan pada instansi pemerintah menjadi tidak optimal. Dari sisi komitmen alokasi anggaran, secara legal, juga belum ada dasar hukum bagi instansi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dalam jumlah atau persentase tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Regulasi Akan hal itu, salah satu aksi perubahan menuju ke arah lebih baik Inspektorat Kabupaten Sumedang sebagai APIP membuat suatu inovasi yang bernama eKSIS” (eKlinik Serambi Inspektorat Sumedang) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas assurance activities (memberikan penjaminan), anti corruption activities, serta consulting activities (konsultasi termasuk mencari solusi atas semua permasalahan).

4.5.1.3. Sistem Mekanisme Pengajuan Dokumen (SIMEDOK)

Pembuatan aplikasi SIMEDOK dilatarbelakangi dengan belum adanya sistem aplikasi terintegrasi untuk mengupload dokumen langsung ke BPKAD, persyaratan pengajuan pencairan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia yang kurang mendukung, dan birokrasi yang panjang. Atas dasar hal tersebut, maka kami berinisiatif berusaha mengatasi permasalahan dengan dibuatkannya Aplikasi Sistem Mekanisme Pengajuan Dokumen (SIMEDOK).

Mekanisme pengajuan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah melalui aplikasi SIMEDOK dimulai dari permohonan pengajuan kepala desa kemudian disampaikan ke kecamatan untuk dilakukan verifikasi, Hasil verifikasi ditindaklanjuti dengan rekomendasi dari camat setelah dokumen dianggap lengkap. Selanjutnya dokumen disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk dilakukan verifikasi ulang. Hasil verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setelah berkas dinilai lengkap, maka kemudian dikeluarkanlah rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian seluruh berkas pengajuan disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diproses lebih lanjut. Dari mekanisme penyampaian dokumen pengajuan pencairan dengan proses yang panjang seringkali terjadi

permasalahan yang mengakibatkan lambatnya proses pencairan dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan Desa.

Aplikasi Sistem Mekanisme Pengajuan Dokumen (SIMEDOK) merupakan aplikasi yang dibangun untuk menjembatani proses pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ,Dana Bagi hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dimana pihak desa ataupun kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak perlu secara langsung untuk menyampaikan dokumen pengajuan pencairan tetapi cukup dengan cara meng upload seluruh dokumen pengajuan pencairan melalui sistem aplikasi SIMEDOK. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya tatap muka langsung dengan para pemroses di kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ataupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk menghindari adanya gratifikasi pada setiap proses pengajuan pencairan. Diharapkan dengan aplikasi ini proses pengajuan pencairan akan menjadi lebih mudah dan cepat. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan e-office desa sehingga mempermudah bagi pemerintah desa untuk mengakses dan melakukan proses pengajuan pencairan secara cepat. Hal ini akan berdampak pada kelancaraan kegiatan dan pembangunan pada pemerintah desa.

4.5.1.4. Sistem Informasi Koperasi Online (SIKOPROL)

Pelaporan aktivitas setiap koperasi kepada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKPP) Kabupaten Sumedang saat ini masih bersifat konvensional. Jarak dan kondisi koperasi mempengaruhi ketaatan pelaporan tersebut. Dengan demikian seringkali Dinas kurang memperoleh perkembangan koperasi - koperasi tertentu. Demikian juga pemberian informasi kepada koperasi sangat tergantung kepada jarak dan media yang dimiliki koperasi. Hal tersebut menjadikan kurang berimbangya informasi yang diperoleh koperasi - koperasi di Kabupaten Sumedang.

Teknologi dapat menjadi solusi untuk memperkuat, mempercepat dan mempermudah memperoleh data dan informasi antara pembina koperasi dengan koperasi. Teknologi Informasi Komunikasi berbasis internet melalui media handphone dan website menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia saat ini. Begitu mudahnya melakukan aktivitas usaha dan penyampaian informasi dan bisa tersampaikan dengan cepat. Aplikasi melalui media dekstop dan website dapat mempermudah

komunikasi antara DKPP dengan koperasi. Koperasi dapat dengan cepat dan mudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban usahanya kepada dinas, sebaliknya dinas juga dapat dengan mudah dan cepat melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan informasi perkoperasian.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun 2020 Bidang Koperasi melalui Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Koperasi membuat system informasi digitalisasi pengawasan koperasi berbasis android dan website. Sistem tersebut diberi nama SIKoprOL (Sistem Informasi Koperasi Online). SIKoprOL merupakan suatu system informasi digitalisasi pengawasan koperasi yang menyajikan data koperasi, informasi koperasi, kesehatan koperasi dan keragaan koperasi dalam rangka mewujudkan data dan informasi koperasi yang cepat, akurat, berkualitas dan terintegrasi.

4.5.1.5. Aplikasi Sistem Informasi Kompilasi Inovasi Terintegrasi (SIKOMPLIT)

Aplikasi Sistem Informasi Kompilasi Inovasi Terintegrasi (Sikomplit) adalah inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumedang menyusun Data Base Inovasi di Kabupaten Sumedang. Aplikasi Sikomplit disusun agar inovasi yang telah disusun dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah terdokumentasikan pada data base inovasi. Sehingga dari data base tersebut, diketahui inovasi mana yang memiliki kelengkapan data dukung dan kedalaman inovasi yang baik. Inovasi yang telah diinput pada aplikasi Sikomplit, selanjutnya akan diverifikasi kelengkapan data dukungnya.

Inovasi dengan nilai kematangan terbaik, akan ditetapkan sebagai Juara pada kegiatan Gelar Inovasi Tahun 2021. Inovasi terbaik selanjutnya akan diusulkan untuk mengikuti perlombaan inovasi tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Inovasi yang diinput kedalam Aplikasi Sikomplit terbagi menjadi 3 kategori, yaitu Kategori Perangkat Daerah, Kategori Kecamatan dan Kategori Desa. Masing-masing inovasi akan dinilai dan diperingkat sesuai dengan kategorinya. Operator pada aplikasi Sikomplit adalah PNS atau CPNS yang telah didaftarkan sesuai dengan format yang disampaikan untuk diberikan akses kedalam Aplikasi Sikomplit.

Format inovasi yang akan diinput kedalam Aplikasi Sikomplit, terdiri dari dua macam, yaitu Profil Inovasi dan Indikator Inovasi. Format isian pada Aplikasi Sikomplit, disesuaikan dengan Format Isian pada Aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri (IGA). Sehingga pada saat input

Inovasi pada Aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri (IGA) tidak akan mengalami kesulitan.

4.5.1.6. Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi (APLIKASI SIMPATI)

Tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang menjadi ancaman terhadap ketersediaan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Stunting akan menyebabkan anak gagal tumbuh dan terganggunya perkembangan kognitif, motorik serta metabolik pada usia dewasa. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan upaya dalam menurunkan dan mencegah stunting melalui intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik. Namun, upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil yang optimal. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan program intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik tidak tepat sasaran dikarenakan ketidakakuratan data sebagai bahan pengambilan kebijakan intervensi.

Pada tahun 2019, Bappeda Kabupaten selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penurunan Stunting Terintegrasi membuat inovasi yaitu Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Simpati) yaitu aplikasi yang mampu menyediakan data balita dan data cakupan intervensi percepatan penurunan stunting yang cepat, dinamis dan akurat. Sehingga, pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dapat mengambil kebijakan yang tepat dan efektif dalam menangani wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi stunting cukup tinggi.

Dua tahun berjalan, aplikasi simpati telah memberikan dampak dalam meningkatkan efektifitas program intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik. Hal ini dapat dilihat dari dampak pelaksanaan program yang mampu menurunkan angka prevalensi stunting dari 32,3 persen pada tahun 2018 menjadi 17,5 persen pada tahun 2020.

4.5.1.7. Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (SIAPDOL)

BAPPENDA Kabupaten Sumedang memiliki beberapa Sistem, namun sistem-sistem tersebut belum terintegrasi, diantaranya belum terintegrasinya beberapa Sistem Informasi/aplikasi pajak daerah yang ada di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dengan sistem informasi/aplikasi yang ada di SKPD/Instansi lain, sehingga dengan adanya SIAPDOL ini dapat mengintegrasikan beberapa Sistem Informasi/Aplikasi yang ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Sistem Informasi Pajak Daerah Online (SIAPDOL) adalah sistem informasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang untuk mengintegrasikan beberapa sistem informasi yang ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. Dengan terintegrasinya beberapa Sistem ini dapat mempermudah mengetahui jumlah realisasi Pajak dan realisasi Pendapatan daerah kabupaten Sumedang secara real time dan mempermudah kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pajak. Tak hanya itu, SIAPDOL ini memiliki beberapa fitur lainnya, diantaranya Fitur PBB, BPHTB, Fitur Pajak Lainnya, fitur Realisasi PAD, Tapping Box, Info PKB dan SIPELDA.

SIAPDOL dapat memantau pajak masuk secara real time tiap harinya. Fitur Realisasi PAD didalamnya terdapat PBB, BPHTB dan pajak lainnya. Tiap-tiap nama pajak menampilkan data realisasi sampai hari ini serta sisa dari capaian target. Fitur Tapping Box didalamnya terdapat menu dashboard untuk menampilkan data transaksi dari mulai data bulanan, data harian, device harian, dll. Kemudian menu Real Time Transaction yang mana didalamnya menampilkan data total transaksi dan total pajak (pajak lainnya) hingga hari ini. Menu dashboard pada data harian disana dapat melihat pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan secara realtime tiap harinya dengan menyesuaikan dulu tanggal pada tampilan dengan tanggal hari ini Berikutnya yaitu menu Device Status Monitoring, menu ini menampilkan status aktif/tidak device yang terpasang di wajib pajak (WP). Fitur Info PKB untuk cek informasi pajak kendaraan bermotor didalamnya terdapat info PKB, Bukti Bayar dan validasi STNK dengan cara menginput Nopol,Warna TNKB, No.KTP. Fitur SIPELDA (Sistem Pelayanan Pajak Daerah) untuk pencarian data pajak dengan memasukan NIK yang akan dicari data pajaknya, pada fitur ini akan menampilkan data pajak individu, baik pajak yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar. Fitur Pajak Lainnya diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan umum, pajak reklame, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah

4.5.1.8. Aplikasi Pengajuan Draf Peraturan Perundang - Undangan (SIPEJUANG)

Aplikasi Sipejuang merupakan aplikasi untuk pengajuan draf peraturan perundang - undangan atau produk hukum dilingkungan pemerintah daerah kabupaten sumedang. Dalam hal ini pengajuan draf peraturan (produk hukum) oleh SKPD kepada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sumedang. Untuk akses website/aplikasi : <https://sipejuang.sumedangkab.go.id>.

Untuk jenis aturan ada 5 yaitu KEPBUP,PERDA,PERBUP,KEP SEKDA dan dokumen lain. Admin dari bagian hukum membuat Data user kemudian di bagikan ke setiap perangkat daerah agar setiap SKPD bisa mengakses aplikasi SIPEJUANG.

4.5.1.9. Tongsis 119 (Teropong Operasional PSC SIMPATIK 119)

Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Pusat membentuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui Public Safety Center (PSC) 119. Pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang meluncurkan Public Safety Center 119 Siap Melayani Pasien dengan Hati Ikhlas atau yang lebih dikenal dengan nama PSC 119 SIMPATIK. 119 merupakan call center PSC yang sama di seluruh Indonesia, sedangkan SIMPATIK merupakan inovasi sebagai nama khusus untuk PSC 119 Kabupaten Sumedang.

Kecepatan dan ketepatan penanganan merupakan hal krusial dalam penanganan kegawadaruratan kesehatan. Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya Manusia menjadi hal paling penting dalam menunjang aktivitas tersebut. Tanpa kehandalan Sumber Daya Manusia dan manajemen Sumber Daya Manusia yang baik maka kecepatan dan ketepatan penanganan kegawatdaruratan kesehatan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik.

Secara kelembagaan PSC 119 SIMPATIK berada di bawah pengendalian Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mengontrol langsung operasional PSC 119 SIMPATIK sehingga manajemen Sumber Daya Manusianya menjadi tanggung jawab Kepala Seksi.

Aplikasi TONGSIS 119 berjalan pada 2 platform yaitu web based dan android dimana masing-masing platform memiliki fungsi yang berbeda. Web based digunakan oleh administrator dan operator sedangkan android digunakan oleh petugas lapangan yaitu medis dan supir ambulance. Terdapat 4 (empat) level pengguna pada aplikasi ini yaitu : operator pusat, petugas pusat, petugas puskesmas dan administrator. Dengan adanya inovasi mengenai pengendalian kinerja tenaga PSC 119 Simpatik dengan aplikasi TONGSIS (Teropong Operasional PSC SIMPATIK) 119 ini dapat mengendalikan serta mengontrol kinerja tenaga PSC 119 Simpatik sehingga kecepatan dan ketepatan penanganan kegawatdaruratan kesehatan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik

4.5.1.10. Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL)

Unit Reaksi Cepat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Sumedang, di bentuk untuk lebih cepat, tepat dalam melayani masyarakat memberikan kenyamanan sebagai pengguna jalan dalam status jalan kabupaten. URCTL adalah Unit yang dibentuk oleh Dinas PUPR melalui Bidang Bina Marga yang yang diberi tugas untuk melaksanakan perbaikan tambal lubang jalan khususnya pemeliharaan jalan yang di kelola sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor: 620/kep.226-pupr/2019 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten, adapun URCTL ini bekerja pada perbaikan jalan dalam kondisi rusak ringan dengan tingkat kerusakan jalan dibawah 5 (lima) Prosen. Dalam arti kata tidak menangani kerusakan berat maupun sedang. Mengapa demikian karena penanganan jalan dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat memerlukan penanganan yang lebih komperhensif mengingat jenis kerusakan tersebut dilaksanakan melalui program kegiatan pemeliharaan periodik, pemeliharaan Berkala dan Rekonstruksi jalan, sehingga pelaksanaan pekerjaan memerlukan waktu yang cukup panjang dari mulai pengusulan kegiatan, pengaggaran, perencanaan jenis konstruksi yang akan dilaksanakan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Untuk itu dengan adanya URCTL ini dapat lebih cepat dalam penanganan pekerjaan jalan dalm kondisi rusak ringan dikarenakan URCTL dari segi material dan peralatan telah tersedia dan mudah dikerjakan tanpa memerlukan mobilisasi alat yang harus menggunakan peralatan yang besar. Dalam hal memermudah sarana interaksi dengan masyarakat selain menggunakan sarana media sosial, sarana telekomunikasi, URCTL juga

tersedia dalam web yang dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi berbasis WEB dengan nama URCTL Dinas PUPR Kab. Sumedang.

4.5.1.11. SICERDAS

SiCerdas sebelumnya adalah Sistem Informasi Cetak dan Unduh RPJMD dan Rencana Strategis, seiringnya perjalanan dimana pada SIPD sudah muncul menu untuk Cetak dan Unduh RPJMD dan Rencana Strategis maka berubah menjadi ***Sistem Informasi Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang*** (SiCerdas), sistem ini bukan hanya memuat input RPJMD dan Rencana Strategis tetapi ada pula input Rencana Kerja Perangkat Daerah. System ini diperlukan sebagai bahan sinkronisasi dalam Penyusunan Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Dengan adanya SiCERDAS sangat membantu Kepala Bappppeda dalam mensinergikan Dokumen Perencanaan Kabupaten dan Perangkat Daerah sehingga akan memudahkan dalam pencapaian target kinerja dari Kepala Daerah. Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten Sumedang akan lebih efektif dan efisien sehingga pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun dapat lebih fokus dalam pencapaian prioritas pembangunan dan hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SiCerdas sudah menjadi bagian dari SuperApps E Office dimana menjadi baseline dan bersinergi dengan Sistem Informasi lainnya yaitu SiJagur dan Penyusunan SKP serta SIEVKA dimana nomenklatur Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kepala Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indicator kinerja yang telah di input menjadi rujukan dalam Evaluasi Kinerja dan Capaian kinerja Seluruh Perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.

Setelah pelaksanaan aksi perubahan *Sistem Informasi Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang* (SiCerdas) (SiCERDAS) pada Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah dapat mensinergikan Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai proses bisnis yang telah ditetapkan.
2. Dapat terukurnya Kinerja Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama.

3. Meningkatnya penilaian SPBE Kabupaten Sumedang dengan di support nilai layanan pemerintah bidang perencanaan menjadi Level 5. *Sistem Informasi Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang (SiCerdas)* (SiCERDAS) dapat sinergi dan terintegrasi sistem informasi pemerintah daerah lainnya, dikarenakan sistem ini merupakan database perencanaan pembangunan dan capaian kinerja kepala daerah sampai dengan akhir masa jabatan.

4.5.1.12. TERRITORY LEARNING COMMUNITY (TLC) SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PEMBELAJARAN DI MASA DARURAT COVID-19)

Territory Learning Community (TLC) adalah komunitas belajar berbasis kewilayahan yaitu Konsep penyelenggaraan pendidikan sebagai wahana untuk memberdayakan pendidikan dengan dukungan potensi masyarakat pada suatu wilayah tertentu guna mencapai tujuan pendidikan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta mengimplementasikannya ke dalam kurikulum dan pembelajaran yang khas dan terstruktur, sehingga kompetensi lulusannya memenuhi standar tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan (Ciri Sabumi Cara Sadesa).

Situasi dan kondisi pandemi belum menunjukkan tanda-tanda membaik sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah belum dapat dilaksanakan. Belajar di rumah (BDR) melalui pembelajaran daring (online) belum dapat menjangkau semua peserta didik. Sebagian masih kesulitan, baik terkait jangkauan akses maupun perangkatnya. Kemdikbud mencatat, tanda-tanda learning lost sudah mulai terjadi. Learning lost adalah kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa. Bila hal ini dibiarkan maka akan mengancam pula pada pencapaian pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Sumedang, yang salah satu indikator kinerjanya adalah meningkatkan APM dan APK PAUD, SD, dan SMP. Perlu upaya bersama untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan berkualitas bagi setiap peserta didik secara terstruktur, sistemik, dan masif. Salah satunya melalui penyelenggaraan Komunitas Belajar berbasis Kewilayahan (Territory Learning Community).

Penyelenggaraan pendidikan harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan insan pendidikan namun juga berupaya menghindari terjadinya Learning loss yaitu hilangnya minat belajar pada pelajar, karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran. Upaya menghindari learning loss adalah memastikan pemenuhan hak atas

pendidikan bagi setiap peserta didik secara terstruktur, sistemik, dan massif dengan berbasis kewilayahan (Territory Learning Community). Sasaran Petunjuk Teknisnya adalah:

1. Satuan pendidikan selalaku penyelenggara pendidikan fomal dan non formal;
2. Peserta didik dan seluruh warga belajar;
3. Orang tua siswa dan masyarakat setempat Pemerintah setempat dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas , Instansi, kantor dan lembaga lain yang terkait

4.5.1.13. SISTEM INFORMASI SMART MENCINTAI ARSIP (SISEMAR))

Bidang Akuisisi Dokumen Kearsipan yang merupakan salah satu bidang di Dinas Arsip dan Perpustakaan yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan, Penilaian dan Akusisisi Arsip, Digitalisasi Arsip, Pendataan dan Penataan Arsip Daerah. Adapun Kegiatan Digitalisasi Arsip menggunakan aplikasi SISEMAR merupakan suatu sistem atau tata cara mengumpulkan informasi dalam bentuk dokumen yang direkam dan disimpan memakai teknologi komputer berupa dokumen elektronik bertujuan supaya dokumen mudah dilihat, dikelola ditemukan dan dipakai kembali. Untuk mewujudkan kinerjanya dalam bentuk kegiatan yang diakomodir dan dituangkan melalui APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021. Tata Kearsipan diharapkan dapat tertib Administrasi arsip dan dapat terwujud sesuai standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Pengelolaan, Penilaian dan Akusisi Arsip, Pendataan maupun kegiatan Digitalisasi Arsip, penyimpanan dokumen secara inovatif, efektif dan efisien di setiap Organisasi Perangkat Daerah OPD, BUMN, dan Sumber Kearsipan yang lain.

Kegiatan Digitalisasi Arsip Tahun Anggaran 2021 maksudnya untuk untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk dokumen yang direkam dan di simpan memakai teknologi komputer berupa dokumen elektronik efisiensi sehingga Arsip dapat tertib dan teratur. SISEMAR (sistem informasi smart mencintai arsip) merupakan aplikasi untuk pencatatan arsip statis dilingkungan dinas arsip dan perpustakaan sumedang. Di dalamnya terdapat Fitur Data Master yang berisi Data Arsip. Halaman Data Arsip Ini berfungsi untuk meng-Input Data Arsip, Berisikan kolom-kolom seperti Kode Klasifikasi, Indek, Deskripsi, Tahun, Unit Kerja Pencipta, File dan Search Data Arsip Statis. Ada Fitur Search dimana Fungsi kolom search ini adalah

untuk memudahkan pencarian data arsip yang telah tersimpan/terekam dalam Aplikasi SISEMAR.

4.5.1.14. SIPPUJAAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan. Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), maka adanya inovasi dalam aksi perubahan ini untuk mengoptimalkan pelayanan dengan :

- a. Sistem Informasi Pengaduan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (SIPPUJAAN)
- b. Buku Petunjuk / User Guide
- c. Media Sosialisasi

Pembuatan Sistem Informasi Pengaduan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (SIPPUJAAN) dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan Pengaduan Gangguan PJU dan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan PJU pada UPTD Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sumedang.

4.5.1.15. KECAMATAN KELAS DUNIA

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang berumur tua karena merupakan kelanjutan dari berbagai kerajaan sebelumnya. Hari Jadi Kabupaten Sumedang ditetapkan pada tanggal 22 April 1578, sehingga usianya sudah mencapai 443 tahun. Meskipun sudah termasuk kabupaten lama tetapi kemajuannya tidak terlampau signifikan dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Titik-titik cerah perubahan mulai terjadi sejak kepemimpinan Bupati Dr.H. Dony Ahmad Munir, ST, MM beserta Wakil Bupati H. Erwan Setiawan, SE yang memegang jabatan untuk periode 2018-2023. Kepemimpinannya didukung oleh Sekretaris Daerah Drs. Herman Suryatman, MSi, sebagai trio

penggebrak perubahan di Kabupaten Sumedang yang kemudian memperoleh dukungan dari seluruh ASN.

Dalam masa tiga tahun kepemimpinan, sudah banyak penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Sumedang, terutama yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Semua jajaran OPD sudah mendapat sentuhan untuk perubahan, termasuk rencana perampingan birokrasi serta ujicoba empat hari kerja dalam seminggu. Agar reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh, maka kecamatan yang merupakan lini terdepan Pemda Kabupaten Sumedang perlu juga dibenahi.

Saat ini ada keinginan politik yang sangat kuat dari Bupati Sumedang untuk lebih mendayagunakan keberadaan kecamatan guna mendukung visi dan misinya. Dengan menggunakan tag line SIMPATI (Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif) perlu disusun model pengembangan kecamatan melalui sebuah kajian akademis ringkas. Ada 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga memerlukan sebuah model pengembangan sebagai sebuah percontohan, agar eksistensi kecamatan dapat mempercepat kemajuan kabupaten secara keseluruhan, jangan malah menjadi beban karena memperpanjang rantai birokrasi.

Sama seperti di kabupaten/kota lainnya, kecamatan seringkali dipandang sebagai organisasi kelas dua, kelompok “pemadam kebakaran” untuk menyelesaikan masalah di kecamatan yang disebabkan oleh pihak-pihak lain, serta kadang-kadang juga dijadikan “tempat buangan” bagi pegawai yang bermasalah terutama kecamatan yang jauh letaknya dari ibukota kabupaten. Sudah saatnya kecamatan sebagai lini terdepan pemberi pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan kewilayahan memperoleh perhatian yang memadai, sehingga semua orang yang bekerja di kecamatan menjadi bangga dengan profesinya, karena posisinya yang selalu dekat dengan masyarakat. Terlebih lagi Kabupaten Sumedang berambisi mewujudkan pemerintahan kelas dunia (world class government) pada skala kabupaten sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Kecamatan sebagai salah satu OPD kabupaten sudah seharusnya juga memenuhi standar sebagai kecamatan kelas dunia.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

sudah dan sedang dijalankan di Kabupaten Sumedang. Sasaran sekarang adalah menyiapkan kecamatan menuju pemerintahan kelas dunia tahun 2025.

Kecamatan Kelas Dunia baru dilakukan piloting di Kecamatan Sumedang Selatan. Penentuan Kecamatan Sumedang Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai variable seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, kinerja organisasi, cakupan pelayanan informasi teknologi, dan kepemimpinan camat. Kecamatan Sumedang Selatan menjadi piloting Kecamatan Kelas Dunia ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sumedang. Konsekuensi dengan ditetapkannya Sumedang Selatan menjadi poloting pemerintahan kecamatan kelas dunia sangat akan mempengaruhi besarnya anggaran, jumlah ASN, bentuk dan susunan organisasi, serta fasilitas pendukung terutama yang berkaitan dengan penggunaan informasi teknologi secara intensif dan tidak kalah pentingnya ruang kerja yang representative sebagai cerminan kantor pemerintahan kecamatan berkelas dunia.

Secara singkat dapat dirumuskan ciri-ciri pemerintahan kecamatan kelas dunia yaitu sebagai berikut :

1. Semua kegiatannya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, telah berbasis pada IT (*digital government*).
2. Memiliki kewenangan delegatif sesuai situasi dan kondisi, serta potensi wilayah kerjanya.
3. Memiliki susunan organisasi yang sesuai dengan beban kerja karena adanya pendelegasian kewenangan dari bupati/walikota kepada masing-masing camat.
4. Memiliki jumlah dan kualitas ASN yang sesuai dengan luasnya pendelegasian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat serta perubahan bentuk dan susunan organisasi.
5. Memiliki anggaran sesuai dengan beban kerjanya, berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota bersangkutan.
6. Memiliki fasilitas kerja minimal, sesuai dengan beban kerjanya.
7. Menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien.
8. Membangun jejaring dalam rangka tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*).
9. Memiliki kepemimpinan yang inovatif ditandai adanya beberapa “*quick wins*.”

10. Memiliki parameter pengukuran kinerja yang akuntabel.

Model kecamatan Kelas Dunia adalah sebagai berikut :



Melalui model di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintahan kecamatan kelas dunia berbasis pada IT. Hal ini sejalan dengan salah satu karakteristik revolusi industri 4.0 yakni semuanya berbasis pada internet (*Internet of Things= IoT*). Langkah pertama menentukan kewenangan delegatif dari Bupati Sumedang kepada camat kecamatan terpilih, diikuti dengan penentuan bisnis inti kecamatan bersangkutan, penentuan besarnya anggaran, bentuk dan susunan organisasi, penentuan jumlah dan kualitas ASN di kecamatan terpilih, serta pengukuran kinerjanya. Setiap tahapan pelaksanaan dapat dilakukan evaluasi, sehingga perbaikannya dapat dibuat sambil proses perubahannya terus dijalankan. Pada saat yang sama diperlukan penguatan kepemimpinan camatnya dengan melibatkan pada setiap proses perubahan yang sedang dijalankan di tingkat kabupaten. Tujuannya agar perubahan yang dilakukan di tingkat kecamatan sejalan dengan perubahan yang dilakukan di tingkat kabupaten.

4.5.1.16. SIGEOL

Terdorong oleh pesatnya penggunaan platform digital dalam menyajikan dan menyampaikan berbagai informasi, pembangunan materi informasi berbasis geospasial perlu dibangun secara komprehensif dan sistematis. Pengertian komprehensif adalah informasi tersebut memiliki banyak tema yang mencakup kebutuhan dari masyarakat umum maupun kepentingan pemerintah atau lembaga usaha lainnya. Sistematis mengandung arti harus terbangun agar memiliki informasi yang tepat, konsisten, dan ter-update setiap ada perubahan. Karena basisnya adalah

geospasial, yakni menyangkut aspek ruang muka bumi, upaya pembangunan informasi ini perlu memenuhi kaidah pemetaan terutama pada tahapan akuisisi data spasial. Di sisi lain, pembangunan informasi berbasis geospasial membutuhkan kelengkapan konten informasi yang harus dibangun. Dalam istilah sistem informasi geografis, konten informasi ini merupakan attribute atau deskripsi dari entitas objek yang dipetakan. Entitas objek muka bumi baik, yang berupa titik, garis dan poligon akan lebih bermanfaat apabila dilengkapi deskripsi sebagai informasi yang terkandung di dalamnya, misalnya tentang informasi hak penguasaan lahan, harga lahan dan sebagainya.

Terdapat dua proses dalam tahapan pembangunan informasi berbasis geospasial, dan proses pertama adalah proses pemetaan sebagai tahapan pembangunan baseline penggambaran entitas objek muka bumi dalam basis sistem koordinat tertentu dengan produk berupa Peta atau Citra. Sedangkan tahap kedua adalah pengisian attribute sebagai deskripsi dari setiap entitas yang terkandung dalam peta atau citra dari hasil pekerjaan tahap pertama. Pengisian deskripsi harus dilakukan secara lengkap agar informasi dapat dimanfaatkan secara luas.

Dalam rangka mengantisipasi pembangunan wilayah Kabupaten Sumedang, informasi geospasial yang tertata dalam struktur dan format yang baik dan benar serta ter-update akan menunjang kemudahan dalam memperoleh informasi berbasis lokasi. Informasi ini penting untuk menunjang kemudahan dalam penyusunan rencana pengembangan berbagai sektor pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu perlu diupayakan pembangunan database geospasial secara komprehensif dan sistematis berlandaskan pada konsep kebijakan satu data dan satu peta, untuk memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS), yakni sistem informasi yang mengelola, mengolah, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan entitas objek secara interaktif berbasis spasial

4.5.1.17. VIRTUAL TOUR SUMEDANG

Sumedang saat ini menyatakan diri sebagai Kabupaten Pariwisata, tentunya hal tersebut harus dibarengi dengan akselerasi pembangunan lokasi wisata dan promosi wisata yang cepat. Media digital tentunya menjadi salah satu alat yang digunakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) sebagai media promosi pariwisata. Hal tersebut juga sejalan dengan program Bupati Sumedang, yaitu Sumedang

Happy Digital Region dan juga perkembangan digital di Kabupaten Sumedang yang saat ini sangat pesat, terbukti dengan nilai SPBE Kabupaten Sumedang berada pada angka 3,81 (2020). Hal tersebut tentunya mendorong Disparbudpora untuk ikut serta berperan dalam pembangunan digital serta meningkatkan angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Sumedang. Harapan tersebut diwujudkan dalam inovasi “Virtual Tour Sumedang”.

Aplikasi virtual tour sumedang ini dibuat berbasis web. Tujuannya agar mudah diakses baik dengan menggunakan computer ataupun perangkat bergerak lainnya. Aplikasi ini akan dirancang agar dapat menampilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menampilkan halaman utama dengan menu yang ditampilkan hanya ada menu “mulai jelajahi”;
- b. Pada saat meng-klik menu mulai jelajahi maka akan ditampilkan halaman yang berisikan daftar objek wisata di Kabupaten Sumedang;
- c. Aplikasi dapat menampilkan informasi terkait dengan objek wisata yang dipilih jika user meng-klik salah satu objek wisata;
- d. Aplikasi dapat menampilkan video atau visual tentang informasi sehingga aplikasi menjadi lebih interaktif dan menarik jika user meng-klik tombol “jelajahi sekarang”;
- e. Visual yang ditampilkan setelah user meng-klik tombol “jelajahi sekarang” pada aplikasi yaitu berupa gambar yang diambil secara 360. Aplikasi ini akan dibuat dengan menggunakan MySQL sebagai database dan PHP Framework untuk Bahasa pemrogramannya sementara untuk hosting akan dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistika Kabupaten Sumedang.

Tujuan dari inovasi ini adalah untuk Mempromosikan Pariwisata Kabupaten Sumedang Secara Virtual Pada Masa Pandemi COVID-19. Agar masyarakat tetap dapat melihat tempat wisata walaupun sedang berada dirumah maupun yang berada diluar sumedang, dan sebagai promosi wisata kabupaten sumedang secara digital 360. Dengan adanya aplikasi Virtual Tour Sumedang yang dapat diakses secara online pada perangkat mobile dapat membantu masyarakat yang ingin merasakan sensasi berlibur di beberapa destinasi unggulan wisata Kabupaten Sumedang secara virtual dimasa pandemi COVID-19 melalui Link yang dapat diakses : <https://virtualtour.sumedangkab.go.id/>

4.5.1.18. PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER (BUDIKDAMBER)

Kabupaten Sumedang sampai saat pemenuhan produksi ikan belum bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Kabupaten Sumedang juga merupakan salah satu Kabupaten yang tingkat konsumsi ikannya masih rendah, dimana pada tahun 2020 baru mencapai 17,29 kg/kapita/tahun. Di era pandemi Covid19, juga berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan daerah yang telah mencapai angka dua digit.

Budidaya ikan, secara umum diperlukan lahan berupa kolam beserta sumber airnya. Secara umum kolam banyak dimiliki oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian, saat ini dapat dikembangkan budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan-lahan pekarangan (lahan marginal). Salah satu yang dapat dikembangkan adalah Budidaya Ikan Dalam Ember (BUDIKDAMBER).

Budikdamber merupakan teknik budidaya ikan ramah lingkungan yang memadukan antara budidaya ikan dan sayuran dengan menggunakan ember sebagai wadah budidaya ikan serta memanfaatkan air media budidaya untuk tumbuh kembangnya tanaman sayuran. Dalam hal Budikdamber selain dapat menghasilkan ikan juga menghasilkan sayuran. Teknologi Budikdamber sangat cocok untuk diadopsi terutama pemukiman yang padat penduduk karena tidak memerlukan lahan yang luas dan bisa dilakukan di lahan pekarangan rumah dan tidak memerlukan banyak air. Ikan yang cocok dibudidayakan di Budikdamber adalah ikan lele.

Budikdamber secara umum dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga dalam rangka meningkatkan tingkat konsumsi ikan, terutama untuk daerah stunting. Selanjutnya selain dikonsumsi juga sebagian dapat dijual untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini berperan dalam peningkatan produksi perikanan dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Budiukdamber sangat cocok dilakukan oleh perempuan dalam keluarga.

4.5.1.19. Sistem Layanan Sehari Mesti Jadi (SILASEMEDI)

Silasemedi atau sistem pelayanan sehari mesti jadi adalah program inovasi Disdukcapil Sumedang di bidang pelayanan masyarakat. Program ini baru di terapkan pada layanan pencatatan Akta Kelahiran, dimana masyarakat yang membuat Akta Kelahiran bisa selesai pada hari itu juga atau Akta Kelahirannya langsung bisa di cetak jika berkas pendaftarannya sudah lengkap dan tidak bermasalah. Inovasi ini diinisiasi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dalam rangka memberikan pelayanan yang baik; pelayanan yang membahagiakan masyarakat; juga dalam rangka percepatan pencapaian kepemilikan akta pencatatan sipil di Kabupaten Sumedang. Dengan adanya Sistem Layanan Sehari Mesti Jadi (SILASEMEDI) diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan akta pencatatan sipil di Kabupaten Sumedang.

Metode dalam pelaksanaan penyelenggaraan Inovasi Sistem Layanan Sehari Mesti Jadi (SILASEMEDI) ini yaitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang memperhatikan/memprioritaskan daerah yang cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil yang masih minim dan aksesibilitas yang kurang; lalu membuat jadwal dengan berkoordinasi dengan perangkat Kecamatan/Desa sasaran untuk waktu pelaksanaan layanan jemput bola dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik untuk kesiapan sarana prasarana dan jaringan internet. Dengan metode jemput bola seperti hal di atas, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk menuju ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan menunggu waktu lama untuk memiliki dokumen akta pencatatan sipil serta bagi masyarakat yang tidak bisa melakukan pendaftaran akta pencatatan sipil melalui online, metode ini sangat membantu masyarakat dalam pelayanan akta pencatatan sipil.

4.5.1.20. Pelayanan Pengusulan Proposal Usulan RUTILAHU Secara Online

Berdasarkan kondisi di kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumedang khusus pada Seksi Pelaksana Bidang Perumahan dan Permukiman, permasalahan yang terjadi adalah pengajuan proposal usulan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) masih dilakukan secara manual yaitu dengan mengirimkan berkas proposal secara fisik ke kantor dinas oleh LPM desa. Hal ini menimbulkan beberapa kendala diantaranya:

- a. Berkas proposal rawan hilang dan proses penginputan data usulan harus dilakukan secara manual dengan menggunakan excel.
- b. Jika terjadi kondisi dimana berkas proposal hilang maka pihak dinas akan langsung menghubungi pihak desa untuk dikirimkan ulang berkas proposal yang baru, hal ini juga menjadikan tertundanya proses

penginputan data usulan oleh dinas akibat menunggu proposal yang dikirim ulang sampai.

- c. Bagi desa yang jaraknya cukup jauh dari kantor Dinas Perkimtan, untuk mengajukan proposal usulan perlu mengeluarkan biaya dan waktu yang cukup banyak.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan untuk mewujudkan visi Sumedang Simpati Tahun 2023 serta mimpi besar Bupati dan Wakil Bupati Sumedang untuk mewujudkan Sumedang Happy Digital Region dan World Class Government maka proses pengusulan proposal bantuan perbaikan RUTILAHU diharapkan dapat dilakukan secara online dengan google form. Sehingga terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam proses pengusulan dan pengajuan proposal ini seperti diantaranya:

- a. Terciptanya efektivitas dan efisiensi poses pengajuan proposal usulan pada program bantuan perbaikan RUTILAHU yaitu LPM desa dapat mengajukan proposal dengan lebih mudah dan praktis, dapat dilakukan dimana saja dan dengan biaya yang lebih murah.
- b. Pelaksanaan inventarisir berkas atau file proposal usulan dapat lebih baik, aman, dan tidak mudah rusak atau hilang
- c. Proses penginputan data usulan juga dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat karena file yang dikirim melalui google form dapat langsung tersimpan di google drive sehingga dapat terlaksana dan terorganisir dengan baik.

4.5.1.21. Sumedang Simpati Academy

Aplikasi e-learning yang akan dibangun menggunakan Learning Management System (LMS) Moodle yang akan memungkinkan para peserta untuk memasuki ruang kelas digital, dimana kegiatan belajar-mengajar dapat dilakukan. Kegiatan belajar-mengajar tersebut dapat berupa materi, pemberian kuis, ujian dan sebagainya. Learning Management System (LMS) adalah sebuah aplikasi yang berfungsi mengadministrasikan secara otomatis berbagai kegiatan pembelajaran. Guru dapat menggunakan aplikasi ini untuk berbagi sumber belajar, berinteraksi, dan berdiskusi dengan siswa, menyampaikan pengumuman, memberi tugas maupun ujian, serta memberikan penilaian, sedangkan siswa dapat membaca materi belajar, menjawab pertanyaan, berdiskusi, serta mengirimkan tugas dan menjawab soal-soal ujian.

LMS dapat diartikan sebagai aplikasi berbasis web yang digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan menilai proses pembelajaran dengan spesifik. Moodle merupakan sebuah perangkat lunak open source yang mendukung implementasi e-learning dengan paradigma terpadu dimana berbagai fitur penunjang pembelajaran dengan mudah dapat diakomodasi dalam suatu portal e-learning. Dengan menggunakan Moodle, akan memungkinkan para pelajar untuk memasuki ruang kelas digital, dimana kegiatan belajarmengajar dapat dilakukan. Kegiatan belajar mengajar tersebut dapat berupa diskusi materi, pemberian kuis, ujian dan sebagainya.

4.5.1.22. Unit Reaksi Cepat Penanganan Sampah (URCPS)

Sejalan dengan perkembangan pembangunan, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut UU No 18 tahun 2008 pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Terbitnya undang-undang ini mempertimbangkan bahwa pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, memiliki luas wilayah 152.220 km² dan berpenduduk sebanyak 1.154.400 jiwa pada tahun 2019. Kabupaten Sumedang terbagi menjadi 26 (dua puluh enam) kecamatan dan 270 desa 7 kelurahan dengan kota Kabupaten berada di Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penduduk, salah satunya adalah penyediaan infrastruktur perkotaan termasuk sarana dan prasarana persampahan. Karena pada dasarnya masalah persampahan erat kaitannya dengan perkembangan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat dalam pola pembuangan sampah yang saat ini sudah menjadi semakin kompleks di setiap daerah, termasuk Kabupaten Sumedang. Sebagai salah satu kabupaten yang sedang berkembang permasalahan sampah menjadi problem yang cukup kompleks di Kabupaten Sumedang. Permasalahan sarana prasarana, teknik dan manajemen pengelolaan serta budaya masyarakat

untuk mengatasi masalah persampahan masih perlu di tingkatkan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang memiliki tugas dan fungsi dalam Bidang Pengelolaan Sampah. Pada tahun 2019 perkiraan timbulan sampah di Kabupaten Sumedang sebanyak 437,84 Ton/Hari (± 2.881 M3/Hari). Dalam pengelolaannya, Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Sumedang selaku Leading Sector Pengelola Sampah di Kabupaten Sumedang telah melakukan berbagai program dan kegiatan, dan salah satu diantaranya adalah dengan membentuk tim yang diberi nama URCPS (Unit Reaksi Cepat Penanganan Sampah). Unit Reaksi Cepat (URC) Penanganan Sampah merupakan bagian dari satuan tugas (Satgas) Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. URC Penanganan sampah mempunyai tugas rutin dan insidesial dalam penanganan sampah, memberikan layanan pengaduan masyarakat terkait dengan adanya timbulan sampah liar pada fasilitas umum dan fasilitas sosial khususnya Wilayah Sumedang kota.

4.6 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam mengimplementasikan pendekatan partisipatif pada penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dilakukan proses penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berdasarkan hasil penelaahan Perangkat Daerah sebanyak 474 usulan permasalahan.

Pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir dan yang telah dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, maka terpetakan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, antara lain:

- 1) Pembangunan/Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) Kesejahteraan Guru Ngaji;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, antara lain:
 - 1) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Puskesmas;
 - 2) Pengadaan Mobil Ambulance;
 - 3) Sarana dan Prasarana Posyandu
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Antara lain:
 - 1) Penanganan infrastruktur Ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Jalan Strategis ;
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - 4) Pembangunan sarana dan prasarana Air Bersih;
 - 5) Pembangunan Pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
 - 6) Pengadaan sarana dan prasarana persampahan.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
 - 2) Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:
 - 1) Bantuan Modal BUMdesa;
 - 2) Pembangunan Gedung BUMdesa;
 - 3) Bantuan Keuangan Desa, meliputi sarana dan prasarana olahraga.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Antara lain:

Bantuan Modal usaha
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Antara lain:

Pelatihan Kompetensi dan Kewirausahaan
8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Antara lain:

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum, meliputi Ruas Jalan Kabupaten dan jalan lingkungan;
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Antara lain:
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, meliputi jaringan irigasi pertanian, jalan usaha tani, dan alat pertanian;
 - 2) Pembangunan Pasar Hewan;
 - 3) Pemberian bantuan ternak untuk kelompok tani ternak;
10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Antara lain:
 - 1) Pengadaan sarana dan prasarana UMKM;

- 2) Peningkatan SDM para pelaku UMKM;
 - 3) Bantuan Modal UMKM;
11. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Antara lain:
- 1) Pengembangan obyek wisata;
 - 2) Pembangunan Desa Wisata dan Religi;
 - 3) Peningkatan SDM pengelola Pariwisata;
 - 4) Sarana dan Prasarana Olahraga.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke lima dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten yang memuat uraian, Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Kebijakan, serta Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana kerja Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), unsur DPRD, unsur Vertikal, Unsur Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Kabupaten Sumedang, unsur Perguruan Tinggi, unsur Dunia Usaha, unsur Asosiasi Profesi, Organisasi dan Tokoh Masyarakat serta unsur Media Masa.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Tahun 2023 untuk mendanai setiap urusan pemerintahan daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta memanfaatkan pendanaan yang bersumber Corporate Social Responsibility (CSR) dan pendanaan sumber lainnya.

5.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, bahwa penyusunan RKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi.

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 telah memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagaimana terdapat 14 (empat belas) Majorproject, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Sumedang terhadap
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Majorproject Prioritas/Kegiatan Prioritas Nasional	Program Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.050.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		2. Pengelolaan Terpadu UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	804,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengembangan Umkm	4.945.300.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		3. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8,468,800,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
				83,881,822,708	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	24,225,042,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				11,200,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1,550,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		4. Destinasi Pariwisata Prioritas	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		5. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi			
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay			
		7. Pembangunan Ibu Kota Negara			

No	Prioritas Nasional	Majorproject Prioritas/Kegiatan Prioritas Nasional	Program Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	8. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.810.000.000	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	2,875,950,900	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	11,096,563,300	
		9. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	301,701,281,878	Dinas Kesehatan dan RSD
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.000.000	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	931,876,000	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	750,000,000	Dinas Kesehatan
		10.Reformasi Pendidikan Keterampilan	Program Pengelolaan Pendidikan	1,128,241,668,000	Dinas Pendidikan
		11.Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	301,701,281,878	Dinas Kesehatan
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	12. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu			
		13. Transformasi Digital	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4,511,000,000	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian.
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	18.889.568.800	
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	14. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1,665,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	50.000.000	

5.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, bahwa penyusunan RKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi.

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 telah memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Dukungan Program pembangunan Kabupaten Sumedang terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja Program	Target	PD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah					
		1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	100%	Dinas Kesehatan dan RSD Kabupaten Sumedang	417.655.894.685
			Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar	100%		
			Cakupan Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	85%	Dinas Kesehatan	
		2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	80%	Dinas Kesehatan	100.000.000
		3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Minuman Sesuai Standar	100%		931,876,000
		4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	20%		750,000,000
			Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga	60%		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja Program	Target	PD Pelaksana	Jumlah (Rp)	
		5 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	75,37%	Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana dan P3A	11,369,193,000	
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	9,05%			
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi						
		1 Program Pemberdayaa, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	0,34%	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustria n	804,200,000	
		2 Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang di kembangkan	0,22%	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustria n	4,945,300,000	
		3 Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	38,780,350,000	
			Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	100%			
		4 Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20%			1,921,600,000
		5 Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	100%			1,000,000,000
		6 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	46,60%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99,400,000,000	
		7 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan ketersediaan sarana pertanian	52,92%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8,468,800,000	
			Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	Dinas Perikanan dan Peternakan	8,468,800,000	
		8 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas tambahan lahan pertanian yang terairi	1.952. hektar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24,225,042,200	
			Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	Dinas Perikanan dan Peternakan	11,200,000,000	
		9 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	Dinas Perikanan dan Peternakan	1,850,000,000	
		10 Program Pengendalian Dan Penanggulang	Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian	95%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2,540,000,000	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja Program	Target	PD Pelaksana	Jumlah (Rp)
		an Bencana Pertanian	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan dan Kesehatan Hewan	100%	Dinas Perikanan dan Peternakan	50,000,000
		11 Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan	100%	Dinas Perikanan dan Peternakan	32,500,000
		12 Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian	34%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8,929,600,000
		13 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap	100%	Dinas Perikanan dan Peternakan	130,000,000
		14 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya	100%		1,775,000,000
		15 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Kelestarian Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum	100%		160,000,000
		16 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100%		100,000,000
		17 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	16 Sub Sektor		Dinas Periwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		18 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitas dan kompetensi sumber dayanya	7 Event	5,315,000,000	
		19 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	90%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,161,442,036
		20 Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	4%		550,000,000
		21 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	85%		458,914,000
		22 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%		200,000,000
		23 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Yang Sehat	50,51%		Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja Program	Target	PD Pelaksana	Jumlah (Rp)
		24 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian	12,08%	Perindustrian	100,000,000
		25 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan	5,15%		420,000,000
		26 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	cakupan perizinan perdagangan	100%		-
		27 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	cakupan sarana distribusi perdagangan	49,90%		1,400,000,000
		28 Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Jenis Pengawasan perdagangan	12 Laporan		900,000,000
		29 Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pengembangan ekspor	10 Kali		200,000,000
		30 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan standarisasi dan perlindungan konsumen	100%		150,000,000
		31 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	5 kali		255,000,000
		32 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pembangunan Kawasan Industri	30%		1,050,000,000
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan					
		1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1,550,000,000
		2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita			19,262,563,300
		3 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan penduduk rawan pangan			4,098,540,00
		4 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)			830,000,000
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial					
		1 Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	53.33%	Dinas sosial	1,810,000,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja Program	Target	PD Pelaksana	Jumlah (Rp)
		2 Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar	33.08%		2,875,950,900
		3 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar	98%		11,096,563,300
		4 Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan bencana	100%		850,000,000
		5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Makam Pahlawan dan daerah yang dipelihara	100%		144,175,480
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan					
		1 Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan	92.02%	Dinas Pendidikan	1,128,241,668,000
		2 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	935,000,000
		3 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%		1,590,000,000
		4 Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase OPK yang dikembangkan	72,73%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	32,327,350,000
		5 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	100%		150,000,000
		6 Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang dibina Persentase Sejarah Lokal yang dibina	100%		400,000,000
		7 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	20.62 %		2,250,000,000
		8 Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Kunjungan wisatawan museum	4.000 orang		550,000,000
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana					
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kecamatan yang terfasilitasi dalam penanganan Pra Bencana dan Pascabencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,930,000,000
7	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja Program	Target	PD Pelaksana	Jumlah (Rp)
		1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Liputan di Media Sosial (Facebook Twitter Youtube)	60%	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	4,511,000,000
		2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Desa Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	100%		18,889,568,800
			Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektroni	100%		
		3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,360,350,000
		4 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	429,986,421,000
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
			Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	97%		
		5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90%		3,141,600,000
		6 Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pamanfaatan Bahan Pustaka	4,12%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2,735,000,000
			Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan	86%		
		7 Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	97%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,482,170,000
		8 Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	93%		977,330,000
		9 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase instansi yang menggunakan Database Kependudukan	100%		775,000,000
		10 Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,921,600,00
		11 Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	87%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	632,416,648

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja Program	Target	PD Pelaksana	Jumlah (Rp)
		12 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,802,500,000
		13 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan kewilayahan	100%	Sekretariat Daerah	28,659,024,780
			Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama serta rencana aksi yang jelas dan terukur	100%		
			Persentase Pelayanan Bagian Hukum	100%		
		14 Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	100%		2,650,000,000
		15 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	100%	Sekretariat DPRD	35,361,970,500
		16 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik	100%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10,447,796,230
			Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA berkategori Baik	100%		
			Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkategori Baik	100%		
		17 Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang berkinerja baik	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	20,483,065,840
			Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	100%		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja Program	Target	PD Pelaksana	Jumlah (Rp)
			Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan	100%		
			Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan	100%		
		18 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	91%	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10,119,320,000
		19 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pemenuhan unsur SPIP	100%	Insektorat Kabupaten	4,857,149,200
			Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	100%		
		20 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase elemen IACM yang terpenuhi	100%		1,648,028,690
8	Gerakan Membangun Desa					
		1 Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Program Penataan Desa Kategori Optimal	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,400,000,000
		2 Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	100%		10,000,000
		3 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan desa tertib administrasi	90%		6,673,686,100
		4 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	100%		2,171,000,000
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara					
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perangkat daerah bidang kesehatan, Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB; pendidikan, pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang capaian kinerja tahunannya berkategori "baik" serta Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan	100%	Sekretariat Daerah	25,459,024,780

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja Program	Target	PD Pelaksana	Jumlah (Rp)
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
		1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Instrumen dan/atau rujukan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,665,000,000
		2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah tindakan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%		305,000,000
		3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Tutupan vegetasi (ITV)	0,42 poin		1,598,000,000
		4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah usulan TPS B3 yang mendapat rekomendasi	7 usaha/kegiatan		50,000,000
		5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	36%		175,000,000
		6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Jumlah komunitas kearifan lokal yang diakui keberadaannya dalam PPLH	2 komunitas		50,000,000
		7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkatkan aktivitasnya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)Lingkungan Hidup (PPLH)	42 Lembaga		125,000,000
		8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan berbudaya lingkungan	16 Desa/Kelurahan		50,000,000
		9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian sengketa PPLH	100%		80,000,000
		10 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan	Jumlah Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses	19,11%		31,590,500,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja Program	Target	PD Pelaksana	Jumlah (Rp)
		Persampahan Regional	sampah yang dikelola dengan baik diperkotaan			
		11 Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	99%		4,923,000,000
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata					
		1 Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang	85,30%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	790,692,187,155
		2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan		Dinas Perhubungan	27,907,070,000
		3 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan	7 ODW	Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2,000,000,000
		4 Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	14 Event		2,400,000,000
		5 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	16 Sub Sektor		3,010,000,000

5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tetap memperhatikan penerapan keenam SPM tersebut dalam RKPD Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tahun 2023

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	750.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	500.000.000	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	500.000.000	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	90.000.000	
Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	700.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan	720.000.000	

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
		Peraturan Bupati/Wali Kota		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.428.000.000	
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.625.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	375.000.000	
Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.135.950.900	Dinas Sosial

5.4. Keterkaitan Prioritas Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Program Unggulan Kepala Daerah.

Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang kepada masyarakat, yang menggambarkan kegiatan konkret dan mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat serta memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Program unggulan direncanakan dan dilaksanakan setiap tahun selama masa jabatan. Terdapat 9 (Sembilan) Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Sumedang Agamis.
2. Rumah Besar Fakir Miskin Sampai Tingkat Desa.
3. Sumedang Buludru.
4. Pelayanan Dasar.

5. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas.
6. Pengembangan Pariwisata.
7. Pengembangan Agribisnis.
8. Profesionalisme ASN.
9. Membangun Sumedang Preneurship.

Dalam mendorong pencapaian target dan pelaksanaan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, maka dapat dijabarkan dalam Program Prioritas Daerah Tahun 2023 yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.4
Penjabaran Program Unggulan kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	25,459,024,780	Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	11,294,812,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14,208,908,000	Dinas Pendidikan
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	23,546,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	115,406,585,000	

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
		di Daerah Kabupaten/Kota		
Jumlah			189,915,329,780	

Tabel 5.5
Penjabaran Program Unggulan Rumah Besar Fakir Miskin dan Pelayanan Kesehatan kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	235,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,575,000,000	
2	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2,360,000,000	
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	11,096,563,300	
4	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,100,000,000	
6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan	6,549,231,923	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
		kesejahteraan keluarga		
7	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	8,929,600,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	133,500,000	
9	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	18,912,563,300	
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115,507,523,250	Dinas Kesehatan
11	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2,550,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
12	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	22,050,350,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	105,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Pemberdayaan Nelayan Kecil	25,000,000	

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
		dalam Daerah Kabupaten/Kota		
14	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	185,993,758,628	Dinas Kesehatan
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.853.000.000	26 Kecamatan
Jumlah			385.976.090.401	

Tabel 5.6
Penjabaran Program Unggulan Sumedang Buludru kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11,299,000,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman	1,200,000,000	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	300,000,000	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2,550,000,00	

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah	
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	21,400,000,00		
5	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	31,590,500,000		
6	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	4,923,000,000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1,598,000,000		
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125,000,000		
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000		
10	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	420,000,000		
11	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	790,692,187,155		
12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	19,049,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
13	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	5,070,000,000	Dinas Perhubungan
Jumlah			866,593,087,155	

Tabel 5.7
Penjabaran Program Unggulan Pelayanan Dasar kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	762,718,771,000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	261,608,571,000	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	89,705,418,000	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	14,208,908,000	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	185,993,758,628	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115,507,523,250	

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100,000,000	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100,000,000	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	931,876,000	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	450,000,000	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000	

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	115,954,612,807	Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Daerah)
Jumlah			1,547,679,438,685	

Tabel 5.8
Penjabaran Program Unggulan Infrastruktur kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	790,692,187,155	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	99,400,000,00	
Jumlah			890,092,187,155	

Tabel 5.9
Penjabaran Program Unggulan Pengembangan Pariwisata kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam	500,000,000	Dinas Pariwisata Kebudayaan

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota		Kepemudaan dan Olahraga
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	31,377,350,000	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	450,000,000	
2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100,000,000	
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2,150,000,000	
3	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	550,000,000	
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1,550,000,000	
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	450,000,000	
5	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2,400,000,000	

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3,150,000,000	
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	790,692,187,155	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	19,049,000,000	Dinas Perhubungan
Jumlah			852,418,537,155	

Tabel 5.10
Penjabaran Program Unggulan Pengembangan Agribisnis kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	105.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
2	Program Pengelolaan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	25.000.000	

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
	Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.750.000.000	
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	160.000.000	
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	25.000.000	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	75.000.000	
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	133.500.000	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.295.300.000	

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	100.000.000	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	11.000.000.000	
		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	100.000.000	
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	180.000.000	
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	50.000.000	
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.500.000	

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	82.421.822.708	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.460.000.000	
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	350.000.000	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	23.875.042.200	
12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2.540.000.000	
13	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	8.929.600.000	
14	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
15	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
16	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	255.000.000	

No	Program	Kegiatan	Pagu RKPD 2023 (Rp)	Perangkat Daerah
17	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.050.000.000	
Jumlah			142.659.264.908	

Tabel 5.11
Penjabaran Program Unggulan Profesionalisme ASN kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
1.	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	16.257.065.840	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3.323.530.100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	632.416.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.511.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5.	Program Pengelolaan	Pengelolaan Nama Domain	5.850.000.000	

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	Aplikasi Informatika	yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a		
		Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	13.039.568.000	
Jumlah			43.613.579.940	

Tabel 5.12
Penjabaran Program Unggulan Membangun Sumedang Preneurship
kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
1.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	22.050.350.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	804.200.000	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
3.	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	4.945.300.000	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	632.416.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah			28.432.266.000	

5.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Sasaran dan Prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta program Kepala Daerah telah dirumuskan 4 prioritas pembangunan daerah diperlukan adanya sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan daerah dengan program, indikator program serta pendanaan setiap Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.13
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah
Tahun 2023

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
1. Optimalisasi Pelayanan Dasar	1. Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan	Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan sarana prasarana dan inovasi dalam pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	100%	1,128,241,668,000	Dinas Pendidikan			
	2. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP	100%					
	3. Pendidikan Berbasis Teknologi Digital				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	100%					
					Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	100%					
	4. Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar	100%	301,701,281,878	Dinas Kesehatan			
	5. Meningkatnya Pemerataan Sarana Prasarana Kesehatan				Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	100%	100,000,000
	6. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Domestik	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pemenuhan perumahan dan pemukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Layak	76,9%	28,119,981,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak			1,57%	11,299,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah Tidak Layak Huni			82,7%	4,050,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	7. Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan Rakyat			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Hunian Rumah Pasca Bencana	53,3%	700,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan			

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Pemukiman dan Pertanahan
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Sarana Prasarana dan Utilitas Umum yang dibangun dan di kembangkan	68,8%	21,400,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	8. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan kinerja aparaturnya pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi dan <i>artificial intelligence</i>	Mengembangkan sistem <i>e-government</i> untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman)	100%	6,229,521,000	Satuan Polisi Pamong Praja
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (Response Timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90%	3,428,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	100%	5,930,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Penanganan Pra Bencana		100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
			Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	9. Optimalisasi Perlindungan Sosial	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	12,64%	1,810,000,000	Dinas Sosial
					Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	58,33%		
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar	25,5%	2,875,950,900	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar	98%	11,096,563,300	

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	100%	850,000,000	
2.	1. Optimalisasi Infrastruktur Penunjang Perekonomian	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi	Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksesibilitas aktivitas perekonomian masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang	83,5%	790,692,187,155	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	50%	27,907,070,000	Dinas Perhubungan
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	64,88%		
					Persentase Pelayanan Bidang Perhubungan	80%		
	2. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Daerah	Meningkatkan infratraktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatkan infratraktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	47,5%	99,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan sarana pertanian	70%	83,881,822,708	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Cakupan pengembangan sarana pertanian	30%		
					Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas tambahan lahan yang terairi	2.088 Ha	24,225,042,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	11,200,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian	27%	8,929,600,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap	100%	130,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya	100%	1,775,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3. Meningkatnya omzet koperasi dan UMKM	Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil melalui digitalisasi dan	Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan usaha mikro	0,5%	804,200,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian	

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		kolaborasi antar generasi		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	0,4%	4,945,300,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian
				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi pelayanan izin usaha simpan pinjam	100%	80,000,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan KSP/US	70.51%	100,000,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	7.15%	420,000,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	87%	632,416,648	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
	4. Pemajuan Kebudayaan untuk menunjang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata	Meningkatkan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase OPK yang dikembangkan	100%	32,327,350,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	100%	150,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang dibina	100%	400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	20,67%	2,250,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Kunjungan wisatawan musieum	4000 orang	550,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan <i>event visit wonderful Indonesia</i>	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan	6 ODTW	2,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	14 Event	2,400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	16 Sub Sektor	3,010,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitas dan kompetensi sumber dayanya	16 Sub Sektor	5,315,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
	5. Meningkatnya kompetensi SDM yang Berdaya Saing dan Memenuhi Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	100%	38,780,350,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat	100%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	100%	1,921,600,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	6. Menguatnya Sektor Perdagangan dalam Pengendalian Inflasi Daerah	Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil melalui digitalisasi dan kolaborasi antar generasi	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	5 Kali	255,000,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah peningkatan sarana distribusi perdagangan	52%	1,400,000,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	12 Laporan	900,000,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian
7. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	90%	1,161,442,036	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			yang berkelanjutan dan berkeadilan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	70%	458,914,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
	8. Akselerasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi	Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksesibilitas aktivitas perekonomian masyarakat	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pembangunan industri sesuai perencanaan	45%	1,050,000,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	12 Laporan	100,000,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian
				PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Desa yang Menerima Program Penataan Desa	100%	1,400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang	83,5%	790,692,187,155	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	47,5%	99,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan RTR	70%	8,750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	100%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan sarana pertanian	70%	83,881,822,708	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Cakupan pengembangan sarana pertanian	30%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%		8,468,800,000
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas tambahan lahan yang terairi	2.088 Ha	24,225,042,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	11,200,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	90%	1,161,442,036	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan	6 ODTW	2,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	14 Event	2,400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
	9. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas	Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil melalui digitalisasi dan kolaborasi antar generasi	Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan usaha mikro	0,5%	804,200,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	0,4%	4,945,300,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	16 Sub Sektor	3,010,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitas dan kompetensi sumber dayanya	16 Sub Sektor	5,315,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Membangun Sumedang <i>Preneurship</i> berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	100%	38,780,350,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat	100%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	10. Meningkatnya Kualitas dan Pemasaran Produk IKM	Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil melalui digitalisasi dan kolaborasi antar generasi	Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan usaha mikro	0,5%	804,200,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	0,4%	4,945,300,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	12 Laporan	100,000,000	Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian	
3. Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	1. Optimalisasi Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik diperkotaan	19,11%	31,590,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	99%	4,923,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	2. Berkurangnya Pencemaran Air, Udara dan Emisi CO2		Meningkatkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Instrumen dan/atau rujukan Perencanaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	1,665,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindakan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	99%	305,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah usulan TPS B3 yang mendapat rekomendasi	7 Usulan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Tutupan vegetasi (ITV)	0,42 poit	1,598,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	36%	175,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	3. Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD Responsip Gender	61,29%	1,783,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan P3A
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan Korban kekerasan	100%	225,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Berencana dan P3A
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Peresentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	100%	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan P3A
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kelompok anak termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	65.38%	300,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan P3A
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok ketahanan (BKB,BKR dan BKL)	20,87%	6,625,396,423	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan P3A
					Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS	4,33%		
	4. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Memperkuat ketahanan pangan daerah	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola	100%	1,550,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan penduduk rawan pangan	100%	4,098,540,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	100%	830,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	5. Menguatnya Penerapan Norma Agama dan Budaya dalam Pembangunan	Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB; Pendidikan, Pariwisata,	100%	28,659,024,780	Sekretariat Daerah

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang capaian kinerja tahunannya berkategori "baik" serta Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan			
				PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	1,590,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial, ekonomi dan Budaya)	100%	935,000,000	
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	11,294,812,000	
			Mendorong pengembangan pendidikan karakter	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	100%	1,128,241,668,000	Dinas Pendidikan
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP	100%		
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	100%		
					Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	100%		
	6. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan RTR	70%	8,750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	100%		
	7. Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana dan		Mengurangi risiko bencana alam dan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	100%	5,930,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Penanganan Pasca Bencana		dampak perubahan iklim		Persentase Penanganan Pra Bencana	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (Response Timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90%	3,428,000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan Hunian Rumah Pasca Bencana	100%	700,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	100%	850,000,000	Dinas Sosial
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian	95%	2,540,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian	10%		
					Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan dan Kesehatan Hewan	100%	50,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Government	Peningkatan kinerja aparaturn pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi dan <i>artificial intelligence</i>	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	100%	18,889,568,800	Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik
					Persentase Desa Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	100%		
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan	100%	2,360,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan	100%	2,802,500,000	
					Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi	100%		

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	97%	429,986,421,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
					Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	100%			
					Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	97%			
					Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	97%			
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase instansi yang menggunakan Database Kependudukan	63%	775,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pemenuhan unsur SPIP	100%	4,857,149,200	Inspektorat Daerah	
					Perntase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	100%			
	2. Meningkatnya Pelayanan Publik	Mengembangkan sistem <i>e-government</i> untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	97%	8,482,170,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	94%	977,330,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	90%	3,428,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
	3. Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah	Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan	98%	20,483,065,840	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan	98%		
Persentase ASN yang mengikuti						85%			

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Pengembangan Kompetensi			
					Persentase ASN yang berkinerja baik	100%		
	4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal		Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	90%	1,161,442,036	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	70%	458,914,000	
	5. Terintegrasinya Pemanfaatan Satu Peta Satu Data		Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	100%	18,889,568,800	Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik
					Persentase Desa Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	100%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik	100%	505,000,000	
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan	100%	2,360,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

5.6. Sinkronisasi Cross Cutting Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Sub Kegiatan yang Membidik Indikator Makro Kabupaten Sumedang

Indikator makro merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan, untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja sehingga perlu adanya sinkronisasi Cross Cutting program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan yang membidik indikator makro Kabupaten Sumedang, sebagaimana dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 5.14
Keselarasan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Sub Kegiatan yang Mendukung Indikator Makro Kab. Sumedang

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
TINGKAT KEMISKINAN										
1	Penerima Program Perlindungan masih banyak yang berada diatas Desil 4	Perubahan Mindset penerima bantuan sosial	Character Building	DPPKB P3A	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Pelaporan hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga (Sekoper Cinta)</i>		1.200.000.000
								<i>Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita "Kritis, Terampil, dan Menarik" (Sekoci Titanik)/Banprov</i>		
				Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	<i>Penyuluhan Kemiskinan Oleh Tokoh Agama, Tokoh Budaya, Para Pendamping Program</i>		100.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				DPMD	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Program PKK		500.000.000
				Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan PSM		125.000.000
				Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan TKSK		250.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Bappeda	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Penguatan TKPK</i>		200.000.000
				Inspektorat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Audit Kemiskinan)</i>		427.888.250
2	Menurunnya omset pelaku Usaha Mikro Kecil (Rata-rata 64 Persen)	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Bottom 40	Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	<i>Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</i>		60.000.000
				Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	<i>Bantuan UEP</i>		200.000.000
				Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	<i>Pelatihan UEP</i>		35.000.000
				Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	<i>Bantuan KUBE</i>		1.524.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
						Kabupaten / Kota				
				Disnakertrans	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>		
				Disnakertrans	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	<i>Revitalisasi BLK (Banprov)</i>		
				Disnakertrans	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	<i>Uji Kompetensi tenaga Kerja / Pelatihan Pengembangan Desa Produktif (OVOP)</i>		
								<i>Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri (Pemagangan)</i>		
				Disnakertrans	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	<i>Pelayanan Pembuatan AK1 (Kartu Kuning)</i>		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Disnakertrans	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	<i>Pembinaan Arah Minat bakat siswa sekolah Menengah Kejuarauan agar terarah</i>		
				Disnakertrans	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	<i>Pelatihan Kewirasusahaan bagi penyandang Disabilitas dan Layanan Penempatan tenaga Kerja Penyandang disabilitas</i>		
				Disnakertrans	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	<i>Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja mandiri</i>		
				Disnakertrans	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	<i>Informasi Pasar Kerja Online</i>		
				Disnakertrans	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	<i>Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja</i>		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Dinas Pertanian dan KP	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	<i>Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan</i>		506.281.650
								<i>Pekarangan Pangan Lestari dalam rangka mendukung Program P2WKSS</i>		96.281.650
								<i>Lomba Cipta Menu Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>		200.000.000
				DLHK	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<i>Pembinaan Kelembagaan Pengelola Sampah (Bank Sampah)</i>		200.000.000
				DPMD	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	<i>Pembinaan BUMDes, BUMDesma dan Pendamping BUMDes</i>		972.400.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				DPMD	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam rangka Akselerasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat</i>		103.500.000
				DPPKB P3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kegiatan Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Sub Kegiatan Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	<i>Pembinaan dan pelatihan teknis bagi pengelola kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting</i>		500.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				DPPKB P3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kegiatan Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Sub Kegiatan Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKS)	<i>Pembinaan dan pelatihan teknis bagi kader BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting</i>		331.605.400
				DPPKB P3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kegiatan Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Sub Kegiatan Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	<i>Penyediaan biaya operasional untuk kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting</i>		522.026.523

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				DPPKB P3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Sub Kegiatan Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan UPPKS)	<i>Pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting</i>		76.164.500
				Diskominfo Sanditik	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	<i>Pelatihan Digital Marketing</i>		
				Dinas KUKM Perindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	<i>Sertifikasi Halal</i>		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Dinas KUKM Perindag	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	<i>Pembinaan Lembaga Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>		150.000.000
				Dinas KUKM Perindag	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	<i>Pemberdayaan UMKM dan Hibah Sapras UMKM ke Daerah DTKS</i>		4.945.300.000
				DPM PTSP	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Layanan Izin Usaha (NIB)</i>		482.416.648

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Disparbudpora	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	<i>Pelatihan Kewirausahaan Pemuda</i>		
				Dinas Perikanan dan Peternakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	<i>Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan</i>		80.000.000
				Dinas Perikanan dan Peternakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	<i>Pembinaan Nelayan Kecil</i>		25.000.000
				Dinas Perikanan dan Peternakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	<i>Pembinaan Pembudidayaan Ikan</i>		25.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Dinas Perikanan dan Peternakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pengembangan Budidaya Ikan</i>		665.000.000
				Dinas Perikanan dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	<i>Pengadaan Peralatan Peternakan</i>		133.500.000
				Dinas Perikanan dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kegiatan Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	<i>Pengadaan Benih / Bibit Ternak</i>		3.510.300.000
				Dinas Pertanian dan KP	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	<i>Pengembangan Budidaya, Pengadaan benih dan sarana produksi, Ekstensifikasi / Intensifikasi</i>		
				Dinas Pertanian dan KP	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	<i>Pengadaan Sarana Panen, Pasca panen, Pengolahan produk Hasil tanaman pangan</i>		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Dinas Pertanian dan KP	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kegiatan Pembanguna Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	<i>Pembangunan Embung</i>		
				Dinas Pertanian dan KP	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kegiatan Pembanguna Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	<i>Pembangunan Jalan Produksi pertanian</i>		
				Dinas Pertanian dan KP	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kegiatan Pembanguna Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pertanian Lainnya	<i>Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO); Pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) produk pertanian; Pembangunan Green House; Renovasi UPTD Balai Benih Hortikultura dan Perkebunan Rancakalong dan sarana pendukungnya</i>		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Disnakertrans	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	<i>Sosialisasi Ketramigrasian</i>		100.000.000
				Bappeda	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	<i>Kajian Pembangunan Pertanian</i>		200.000.000
3	Tingkat Kepemilikan Perumahan dan Sanitasi layak belum menyeluruh	Peningkatan Standar Hidup Layak	Peningkatan Infrastruktur Dasar	Dinas PUTR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	<i>Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan (APBD)</i>		1.800.000.000
				Dinas PUTR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum (Banprov)</i>		
				Dinas Perkimtan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Sub Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<i>Perbaikan Rutilahu</i>		6.365.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
4	Penerima Program Perlindungan masih banyak yang berada diatas Desil 4	Ketepatan Data untuk Sasaran Program Perlindungan Sosial	Perlindungan Sosial	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	<i>Penerapan SPM SD</i>		
								<i>Verifikasi dan Validasi PIP SD</i>		100.000.000
				Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	<i>Penerapan SPM SMP</i>		
								<i>Verifikasi dan Validasi PIP SMP</i>		75.000.000
				Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	<i>Pembayaran Premi JKN dan JAMKESDA (Banprov)</i>		
								<i>Pembayaran Premi APBD JKN</i>		38.838.787.200
								<i>Pembayaran Premi APBD JAMKESDA</i>		8.892.592.967

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	<i>Pengelolaan kegawat daruratan dan pengelolaan Sistem Rujukan terintegrasi (SISRUTE)</i>		3.500.000.000
				Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	<i>Pengawasan post market irtp KIE, Bimtek keamanan pangan pelaku irtp, Pengujian sampel pangan dan pengawasan sarana irtp</i>		431.876.000
				Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Pembinaan Lembaga Masyarakat (Rumah Besar Simpati dan Puskesmas)</i>		1.200.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Verifikasi dan Validasi Data Miskin</i>		700.000.000
				Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<i>Fasilitasi Bantuan Sosial</i>		1.500.000.000
				Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	<i>Bantuan Permakaman</i>		400.000.000
				Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	<i>Bantuan Sosial Sandang</i>		50.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	<i>Bantuan Sosial Alat Bantu</i>		100.000.000
				Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	<i>Bantuan Reunifikasi Keluarga</i>		160.000.000
				Dinas Pertanian dan KP	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Beras/Bahan Makanan Cadangan Pangan pada Daerah Rawan Pangan</i>		4.038.540.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Disdukcapil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Pening Terkait Pendaftaran Penduduk	<i>Perekaman Pendaftaran Penduduk Dengan Motor</i>		170.000.000
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA										
1	Harapan Lama Sekolah 12,98 Tahun (Diatas Provinsi 12,61 Tahun)	Laju pertumbuhan HLS lambat	Peningkatan Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	<i>Penerapan SPM SMP</i>		500.000.000
								<i>Veri- vali PIP SMP</i>		-
							Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	<i>Koordinasi dan Sosialisasi Kurikulum Prototype</i>		100.000.000
								<i>Lesson Study</i>		75.000.000
							Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	<i>Penerapan SPM SD</i>		750.000.000
								<i>Veri- vali PIP SD</i>		-
							Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	<i>Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk Assesmen Kelas</i>		350.000.000
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	<i>Penerapan SPM Paud</i>		500.000.000						

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
2	Rata-rata lama sekolah 8,52 Tahun (Dibawah Provinsi 8,61 Tahun)	Laju pertumbuhan RLS lambat	Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Non Formal/kesetaraan	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	<i>Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket A, B, dan C</i>	Penduduk 25 tahun keatas yang belum memperoleh ijazah Paket A/B/C	3.000.000.000
								<i>Verifikasi dan Validasi Usia 25 tahun keatas Bersekolah Di Kabupaten Sumedang (Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan)</i>		250.000.000
								<i>Penerapan SPM Kesetaraan</i>		90.000.000
							Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	<i>Bimbingan Teknis Bagi Pengelola PKBM</i>		100.000.000
3	Angka Harapan Hidup 72,6 Tahun (Dibawah Provinsi 73,23 Tahun)	Laju pertumbuhan AHH sedang	Peningkatan Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	<i>Renovasi Puskesmas (Banprov)</i>		
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	<i>Rehabilitasi Pustu</i>		1.100.000.000
							Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	<i>Pengadaan Alkes</i>		750.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
							Pengadaan Obat Vaksin;	<i>Pengadaan Obat</i>		1.500.000.000
							Pengadaan Bahan Habis Pakai	<i>Pengadaan Bahan Habis Pakai (Perban Plester, alat suntik dll)</i>		2.000.000.000
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas</i>		200.000.000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas</i>		200.000.000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas</i>		100.000.000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas</i>		200.000.000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas</i>		200.000.000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas</i>		150.000.000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas</i>		100.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
							Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;	<i>Pembinaan, pelatihan dan Monev Pemegang Program Pada Puskesmas</i>		500.000.000
							Pengelolaan Surveilans Kesehatan;	<i>Vaksinasi Covid 19</i>		3.000.000.000
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	<i>Pembayaran Premi APBD JKN</i>		
								<i>Pembayaran Premi APBD JAMKESDA</i>		
							Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	<i>Pengelolaan kegawat daruratan dan pengelolaan Sistem Rujukan terintegrasi (SISRUTE)</i>		3.500.000.000
						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	<i>Pembinaan Petugas Promkes Puskesmas dan Edukasi, penyuluhan luar gedung Kepada Masyarakat</i>		250.000.000
						Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	<i>Penguatan PHBS Di 5 Tatanan</i>	Sosialisasi, edukasi dan promosi gerakan berhenti merokok	200.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
				Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) tingkat kabupaten (OKPPD)</i>		200.000.000
								<i>Sosialisasi dan bimbingan teknis keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)</i>		100.000.000
4	Pengeluaran Perkapita 10,26Jt (Dibawah Provinsi 10,93 Jt)	Laju pertumbuhan Pengeluaran Perkapita lambat	Peningkatan Standar Hidup Layak	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	<i>Operasional pelaksanaan Pemantauan</i>		50.000.000
						Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	<i>Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Desa Stunting</i>		
								<i>Pekarangan Pangan Lestari dalam rangka mendukung Program P2WKSS</i>		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
								<i>Lomba Cipta Menu Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>		
								<i>Peningkatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Lokus Stunting</i>		
								<i>Pelatihan Kelompok Wanita Tani dan Pengadaan bibit</i>		
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Beras/Bahan Makanan Cadangan Pangan pada Daerah Rawan Pangan</i>		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>		120.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
						Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Operasi Pasar		
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		50.000.000
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA										
1	Terdapat kantong pengangguran kelompok usia 15-24 tahun	meningkatkan pengangguran usia muda khususnya ketika pandemi (generasi Z)	Peningkatan Kapasitas Pencari kerja	Disnaker	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Pelatihan dan Pendidikan Untuk Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Di Kabupaten Sumedang	angkatan kerja usia remaja (15 -24 tahun)	2.900.350.000,00
								- Skil Development Center (SDC)		1.600.000.000,00
								- Pelatihan Berbasis Kompetensi		4.800.000.000,00
				Disnaker		Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Uji Kompetensi tenaga Kerja Pelatihan Pengembangan Desa Produktif		1.600.000.000,00
								- Gerakan Wirausaha Muda di Desa (Bankeu Provinsi)		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
								- One Village One Product (Bankeu Provinsi)		
								- Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri (Bankeu Provinsi)		
							Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	- Revitalisasi UPTD BLK (Bankeu Provinsi)		
				Disperindag	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	- Pembinaan OVOP dan OPOP		150.000.000,00
								- Pelatihan dan Pengadaan Alat serta Kemasan		50.000.000,00
								- Fasilitasi pengembangan UMKM Orientasi peningkatan skala usaha		205.000.000,00
				Disperindag	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro			50.000.000,00
							Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Sertifikasi halal		300.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
							<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>			150.000.000,00
					PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>		400.000.000,00
								<i>- hibah Sapras UMKM ke Daerah DTKS</i>		2.000.000.000,00
								<i>- Pembinaan OVOP dan OPOP</i>		150.000.000,00
								<i>- Pengadaan alat produksi UMKM</i>		300.000.000,00
								<i>- Pengolahan, Pemasaran SDM serta Design dan Teknologi</i>		497.000.000,00
								<i>- Pengadaan alat UMKM</i>		180.000.000,00
								<i>- Fasilitasi Pengembangan UMKM Desa orientasi peningkatan skala usaha</i>		300.000.000,00
								<i>- Pengadaan Sarana Prasarana UMKM</i>		140.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
								- Pelatihan UMKM Pengajin kursi, Pengrajin tahu, Pengrajin Pemintalan benang rafia		50.000.000,00
								- Penyediaan alat produksi UMKM		75.000.000,00
								- Pelatihan dan Pengadaan Alat serta Kemasan		382.000.000,00
								- Pemberdayaan UMKM		266.300.000,00
								- Fasilitasi pengembangan UMKM Orientasi peningkatan skala usaha		205.000.000,00
				Disparbudpora	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda		250.000.000,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekraf	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekraf	BINTEK Ekonomi kreatif dalam rangka aktifasi GCC		150.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
					PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sistem Pemasaran	DIGITAL MARKETING		150.000.000,00
				DPKP	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	Penguatan Petani Milenial (Pertanian Presisi)		20.000.000,00
2.	tingginya pencari kerja dari pengangguran terdidik (lulusan SMA/SMK)	masih rendahnya link and match antara dunia pendidikan dan dudi	Kemitraan dengan DUDI	Disnaker	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Uji Kompetensi tenaga Kerja Pelatihan Pengembangan Desa Produktif		1.600.000.000,00
								- Gerakan Wirausaha Muda di Desa (Bankeu Provinsi)		
								- One Village One Product (Bankeu Provinsi)		
								- Penyiapan Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri (Bankeu Provinsi)		
					PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar kerja	- Pelayanan Pembuatan AK1 (Kartu Kuning)		250.000.000,00
								- Pembuatan Izin BKK (Bursa Kerja Khusus)		
								- Penanganan PMI		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
								- Pembuatan Rekom CPMI		
							Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	- Pembinaan Arah Minat bakat siswa sekolah Menengah Kejuruan agar terarah		100.000.000,00
							Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Pelatihan Kewirasusahaan bagi penyandang Disabilitas dan Layanan Penempatan tenaga Kerja Penyandang disabilitas		100.000.000,00
							Perluasan Kesempatan Kerja	- Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja mandiri		150.000.000,00
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			297.200.000,00
							Job Fair/Bursa Kerja	- Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja		100.000.000,00
					HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	- Pembinaan dan Sosialisasi Undang Undang Cipta kerja		150.000.000,00
								- Pembinaan dan Rapat Dewan Pengupahan		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
								- Capacity Building SPSB		
								- Monitoring dan Evaluasi Undang Undang Cipta Kerja		
				Disdik	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	- Verifikasi dan Validasi Usia 7-18 yang Tidak Bersekolah Di Kabupaten Sumedang (Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan)		
				Diskominfo	APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	- Pelatihan Digital Marketing		420.000.000
					INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media komunikasi Publik	- Sosialisasi Pelatihan tenaga Kerja dan Lowongan Kerja		2.050.000.000
3	Pencari kerja baru tidak mampu bertahan lama dalam pekerjaannya	Tingkat Adapatasi Pencari Kerja rendah	Character Building	Disnaker	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Pelatihan dan Pendidikan Untuk Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Di Kabupaten Sumedang - Skil Development Center (SDC) - Pelatihan Berbasis Kompetensi		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
					PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Pelatihan Kewirasusahaan bagi penyandang Disabilitas dan Layanan Penempatan tenaga Kerja Penyandang disabilitas		
							Perluasan Kesempatan Kerja	- Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja mandiri		
				Disperindag	PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	- Pelatihan UMKM Pengajin kursi, Pengrajin tahu, Pengrajin Pemintalan benang rafia		
								- Pelatihan dan Pengadaan Alat serta Kemasan		
				Disparbudpora	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekraf	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekraf	<i>BINTEK Ekonomi kreatif dalam rangka aktifasi GCC</i>		
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI										
1	Masih terdapat pelambatan pertumbuhan lapangan usaha akibat pandemi Covid 19	Pertumbuhan Ekonomi masih lambat dibandingkan sebelum pandemi Covid 19 (3,17% vs 6,33%)	Mendorong Pertumbuhan Lapangan Usaha	DPKP	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	<i>Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi</i>	<i>Pengembangan Budidaya</i>		10.560.000.000,00
								<i>Pengadaan benih dan sarana produksi</i>		
								<i>Ekstensifikasi / Intensifikasi</i>		
							<i>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	<i>Pengadaan Sarana Panen, Pasca panen, Pengolahan produk Hasil tanaman pangan</i>		2.530.000.000,00
						Pengelolaan sumberdaya genetik hewan, tumbuhan, mikroorganisme, kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian</i>	<i>Rekomendasi BBM bersubsidi pada RMU skala kecil</i>		50.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
								<i>Pengadaan Sarana Panen, Pasca panen, Pengolahan produk Hasil tanaman pangan</i>		120.000.000,00
								<i>Penyusunan analisa usaha tani dan kehilangan hasil komoditas tanaman pangan</i>		90.000.000,00
								<i>Penanganan Panen dan Pasca Panen Memperkuat branding dan mendampingi HKI bagi produk unggulan Sumedang untuk mencapai 50% produk UMKM terstandard</i>		200.000.000,00
								<i>Pengadaan Terpal Jemur Padi</i>		660.000.000,00
								<i>Pengadaan Sarana Panen, Pasca panen, Pengolahan produk Hasil hortikultura</i>		150.000.000,00
								<i>Penyusunan laporan analisa usaha tani dan kehilangan hasil komoditas hortikultura</i>		50.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
								<i>Penanganan Panen dan Pasca Panen Memperkuat branding dan mendampingi HKI bagi produk unggulan Sumedang untuk mencapai 50% produk UMKM terstandard</i>		200.000.000,00
								<i>Pengadaan alat panen, pasca panen dan pengolahan perkebunan</i>		200.000.000,00
								<i>Penyusunan laporan analisa usaha tani dan kehilangan hasil komoditas perkebunan</i>		60.000.000,00
								<i>-Pengadaan alat perajang dan alat pendukungnya (rimbagan, sasag, pisau rajang, asahan) dalam rangka mendukung Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau</i>		100.000.000,00
								<i>Penanganan Panen dan Pasca Panen Memperkuat branding dan mendampingi HKI bagi produk unggulan Sumedang untuk mencapai 50% produk UMKM terstandard</i>		200.000.000,00
							<i>Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman</i>	<i>Penangkaran Benih Padi</i>		70.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
								<i>Penangkaran Benih Palawija</i>		80.000.000,00
								<i>- Penangkaran Benih Mangga</i>		30.000.000,00
								<i>- Penangkaran Benih Sawo</i>		30.000.000,00
								<i>- Penangkaran Benih Alpukat</i>		40.000.000,00
								<i>- Penangkaran Benih jambu kristal</i>		40.000.000,00
								<i>- Penangkaran Benih tanaman hias</i>		40.000.000,00
								<i>- Penangkaran Benih Vanili</i>		10.000.000,00
								<i>- Penangkaran Benih Cengkeh</i>		10.000.000,00
								<i>- Penangkaran Benih lada</i>		5.000.000,00
								<i>- Penangkaran Benih Kopi</i>		35.000.000,00
					PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan prasarana pertanian	<i>Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani</i>	<i>Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, irigasi air tanah dalam/ dangkal, pipanisasi, dan pompanisasi</i>		10.000.000.000,00
							<i>Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian</i>	<i>Pembangunan Embung</i>		720.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
							Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Pembangunan Jalan Produksi pertanian		6.900.000.000,00
							Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)		4.350.000.000,00
								Pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) produk pertanian		
								Pembangunan Green House		
								Renovasi UPTD Balai Benih Hortikultura dan Perkebunan Rancakalong dan sarana pendukungnya		
					PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Pengadaan obat-obatan tanaman dan alat pengendali hama dalam rangka pengendalian OPT Tanaman Pangan		230.000.000,00
								Hand sprayer elektrik Tanaman Pangan		910.000.000,00
								Pengadaan obat-obatan tanaman dan alat pengendali hama dalam rangka pengendalian OPT Hortikultura		165.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
								<i>Pengadaan obat-obatan tanaman dan alat pengendali hama dalam rangka pengendalian OPT Perkebunan</i>		100.000.000,00
					PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	<i>Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan desa</i>	<i>Penguatan kapasitas Posluhdes</i>		510.000.000,00
								<i>Penguatan kapasitas penyuluh pertanian (sertifikasi/bimtek/Di klat)</i>		660.000.000,00
							<i>Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa</i>	Updating kelembagaan petani		15.000.000,00
								Sekolah Petani Menggapai Cita – Cita dan Harapan (SEKOPI CINTA)		
								Lomba Kelompok Tani Berprestasi		100.000.000,00
								Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi		100.000.000,00
								Penguatan Petani Milenial (Pertanian Presisi)		
							<i>Penyediaan dan Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian</i>	<i>Media penyuluhan</i>		260.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
								Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan sarana pendukungnya		5.200.000.000,00
							Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Penyelenggaraan Sekolah Lapang dalam rangka mendukung Program IPDMIP		1.000.000.000,00
				Diskop	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro			50.000.000
							Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	- Sertifikasi Halal		300.000.000
							Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			
					PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		
								- hibah Saprasi UMKM ke Daerah DTKS		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
								- Pembinaan OVOP dan OPOP		
								- Pengadaan alat produksi UMKM		
								- Pengolahan, Pemasaran SDM serta Design dan Teknologi		
								- Pengadaan alat UMKM		
								- Fasilitasi Pengembangan UMKM Desa orientasi peningkatan skala usaha		
								- Pengadaan Sarana Prasarana UMKM		
								- Pelatihan UMKM Pengajin kursi, Pengrajin tahu, Pengrajin Pemintalan benang rafia		
								- Penyediaan alat produksi UMKM		
								- Pelatihan dan Pengadaan Alat serta Kemasan		
								- Pemberdayaan UMKM		
								- Fasilitasi pengembangan UMKM Orientasi peningkatan skala usaha		

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPd 2023
				DISKANAK	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan		80.000.000,00
						Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pembinaan Nelayan Kecil		25.000.000,00
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembinaan Pembudidayaan Ikan		25.000.000,00
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Budidaya Ikan		665.000.000,00
					PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat D	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapa	Penebaran Benih Ikan		100.000.000,00
				Penebaran Benih Ikan untuk Restocking					60.000.000,00	
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengadaan Peralatan Peternakan		133.500.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengadaan Nitrogen Cair untuk Depo IB		40.000.000,00
						Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih / Bibit Ternak		7.045.300.000,00
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Penanaman Hijauan Pakan Ternak		100.000.000,00
					PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan dan Pembinaan Kemitraan Usaha		32.000.000,00
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis		50.000.000,00
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Penebaran Benih Ikan		100.000.000

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
						Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<i>Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</i>			
								<i>Penebaran Benih Ikan untuk Restocking</i>		60.000.000
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis</i>	<i>Pengadaan Vaksin, Vaksinasi dan Sosialisasi Penyakit Hewan</i>		170.000.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner</i>			225.000.000,00
						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan</i>	<i>Pembinaan Kelompok Pengolah Hasil Peternakan</i>		50.000.000,00
							<i>Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>	<i>Pemantauan Peredaran Hewan dan PAH</i>		80.000.000,00
							<i>Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Pengujian Sampel Bahan Asal Hewan</i>		50.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	<i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	<i>Pengadaan Peralatan Pengolahan dan Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan</i>		75.000.000,00
2	Tersedianya potensi pariwisata yang bisa dikembangkan	Tingginya multiplier effect dari kegiatan pariwisata	Pengembangan Pariwisata	Disparbudpora	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	<i>Perumusan peraturan Bupati</i>		200.000.000,00
						Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	<i>pembinaan dan pengawasan perijinan pelaku usaha pariwisata</i>		150.000.000,00
							Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	<i>Sertifikasi usaha dan LSI</i>		300.000.000,00
					PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Kerjasama promosi melalui media elektronik</i>		350.000.000,00
							Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Pameran Pariwisata Daerah dan Penunjang kegiatannya</i>		950.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
					PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	<i>Pengadaan sapras GCC</i>		1.000.000.000,00
					PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	<i>Pelatihan tata kelola kepariwisataan</i>		100.000.000,00
				<i>Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata (9 Desa)</i>						
							Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	<i>Smd kreatif festival, smd zazzetnic festival, pestifal pilm pendek, Music and tourism activity, Melukis bersama, asian string festival</i>		1.575.000.000,00
							Fasilitasi Pengembangan Kompetisi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	<i>Event kreatif Mojang jajaka Kabupaten Sumedang</i>		150.000.000,00
					PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	<i>Haul Cut Nyak Dhien, Hari jadi Sumedang, Binojakrama Padalangan, Festival Permainan Tradisional, Teritorial Edukasi Ruang Ekspresi Seni (TERAS), Upacara Adat Ngalaksa</i>		1.000.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
					PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	<i>Pelatihan Pelaku Seni Budaya</i>		150.000.000,00
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota</i>	<i>Promosi Sejarah Lokal Kab. Sumedang</i>		100.000.000,00
							<i>Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah</i>	<i>Digitalisasi Sejarah Lokal Kab. Sumedang</i>		300.000.000,00
					PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	<i>Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum</i>	<i>Digitalisasi koleksi benda musium</i>		200.000.000,00
3	Menurunnya seluruh komponen pengeluaran pembentuk PDRB (Konsumsi RT, Investasi, Belanja Pemerintah dan Net Export)	Menurunnya aktifitas perekonomian masyarakat di level Rumah Tangga dan Dunia Usaha	Meningkatkan Komponen Pengeluaran	Disperindag	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>		120.000.000,00
						Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kotan/ Kota</i>	<i>Operasi Pasar</i>		530.000.000,00

No	Telaahan	Isu	Strategi	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Sasaran	PAGU RKPD 2023
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan</i>	<i>Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan</i>		50.000.000,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Pameran Dagang Nasional</i>	<i>Pameran Komoditas dan produk unggulan</i>		200.000.000,00
				DPMPSTP	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula</i>	<i>Pelayan dan Penerbitan ijin NIB</i>		

5.7. Rencana Program dan Kerangka Pendanaan melalui Kolaborasi Pentahelix

Pendanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang, selain bersumber dari APBD juga bersumber dana-dana yang lain. Konsep yang digunakan adalah pentahelix yaitu kolaborasi antara akademisi dari perguruan tinggi, pelaku bisnis, penggiat di komunitas, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta modal sosial yang ada di masyarakat. Sampai dengan saat ini, yang paling dominan adalah program yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Rencana pendanaan program yang bisa didanai melalui sumber *corporate social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15
Pendanaan Program Pembangunan Daerah yang bisa didanai dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*

No	Nama Program	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.	Program Kawasan Permukiman	
7.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	
9.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
10.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
12.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
13.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

No	Nama Program	Perangkat Daerah Penanggungjawab
14.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
15.	Program Pengelolaan Persampahan	
16.	Program Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja
17.	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
18.	Program Rehabilitasi Sosial	
19.	Program Penanganan Bencana	
20.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22.	Program Perlindungan Perempuan	
23.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
24.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
25.	Program Perlindungan Khusus Anak	
26.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
27.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
28.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
29.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
30.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
31.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
32.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
33.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
34.	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35.	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
36.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
37.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
38.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

5.8. Program dan Kegiatan yang mendukung terhadap pelaksanaan penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's).

Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's). Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 bahwa terdapat 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi prioritas Pembangunan Tahun 2022 yaitu :

1. Prioritas 1 : TPB 3 (Kesehatan Dan Kehidupan Yang Layak)
2. Prioritas 2 : TPB 8 (Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi)
3. Prioritas 3 : TPB 6 (Air Bersih Dan Sanitasi)
4. Prioritas 4 : TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)
5. Prioritas 5 : TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)

Pemerintah Kabupaten Sumedang mendukung komitmen pencapaian SDG's dengan dukungan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.16

Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan yang mendukung terhadap pelaksanaan penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's)

OUTCOME	PARA PIHAK	ARAHAN KEBIJKAN	PROGRAM	KETERANGAN ARAHAN KEBIJAKAN/PROGRAM	ARAHAN LOKASI	REKOMENDASI	PROGRAM PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
PRIORITAS 1 : TPB 3 (KESEHATAN DAN KEHIDUPAN YANG LAYAK)									
Perempuan melahirkan di faskes	<ul style="list-style-type: none"> DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Sumedang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Sumedang Yayasan Aisyiah Sumedang Tim Penggerak PKK Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Sumedang Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kab. Sumedang Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Kab. Sumedang 	Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Penambahan tenaga kesehatan ; Pengajuan kenaikan status RS Tipe B ke Tipe B Pendidikan; Penambahan jumlah tempat tidur (Pembangunan Rumah Sakit) 	Se Kabupaten Sumedang	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan akses layanan darurat melahirkan skala lingkungan terutama layanan penjemputan dan penanganan pertama; Bidan siaga di setiap kelurahan dengan jangkauan call 24 jam; Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan termasuk tenaga kesehatan setempat; 	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	301,701,281,878	Dinas Kesehatan
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100,000,000	
Persentase perokok <18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> DINAS KESEHATAN Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Sumedang Yayasan Aisyiah Sumedang Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang Forum Anak Tandang Kab. Sumedang. Paguyuban Sumedang Sehat Karang Taruna Kab. Sumedang 	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Penyebaran informasi secara intensif tentang bahaya merokok kepada para remaja Pelaksanaan secara konsisten regulasi kawasan tanpa rokok 	Se Kabupaten Sumedang	Penerapan larangan jual beli rokok pada penduduk dibawah umur 18 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	301,701,281,878	

OUTCOME	PARA PIHAK	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN ARAHAN KEBIJAKAN/PROGRAM	ARAHAN LOKASI	REKOMENDASI	PROGRAM PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan pengguna layanan asuransi kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Sumedang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Sumedang Yayasan Aisyiah Sumedang Tim Penggerak PKK Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kab Sumedang Himpunan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kab. Sumedang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kab. Sumedang Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Kab. Sumedang 	Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perbarui data DTKS untuk urusan JKN	Se Kabupaten Sumedang	Pendataan penduduk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk prioritas diberikan layanan asuransi kesehatan;	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	82,056,799,071	Dinas Kesehatan
Peningkatan Persentase ASFR	<ul style="list-style-type: none"> DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DPPKB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Sumedang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Sumedang Yayasan Aisyiah Sumedang Tim Penggerak PKK Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kab Sumedang Ikatan Ahli Kesehatan 	Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 	Pelatihan penanganan kegawatdaruratan neonatal (Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatus)	Se Kabupaten Sumedang	Pendataan penduduk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk prioritas diberikan layanan asuransi kesehatan;	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	301,701,281,878 11,369,193,000	Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak

OUTCOME	PARA PIHAK	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN ARAHAN KEBIJAKAN/PROGRAM	ARAHAN LOKASI	REKOMENDASI	PROGRAM PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	Masyarakat (IAKMI) Kab. Sumedang								
PRIORITAS 2 : TPB 8 (PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI)									
1. Peningkatan lapangan kerja informal Non Pertanian 2. Proporsi Pelatihan Tenaga Kerja	1. DISNAKERTRANS 2. APINDO 3. Karang Taruna 4. KNPI 5. Kwarcab Sumedang 6. Forum Anak Tandang Sumedang	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja	1. Program Penempatan Tenaga kerja 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Kerjasama dengan perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja Kab Sumedang 2. Pelaksanaan jobfair serta meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan; 3. Pemanfaatan Balai Latihan Kerja sebagai upaya dalam meningkatkan keterampilan dan munculnya kemandirian dalam berwirausaha	Se Kabupaten Sumedang	Peningkatan peluang kesempatan kerja	Program Penempatan Tenaga kerja	1,921,600,000	Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	38,780,350,000	
Peningkatan industry Pariwisata	1. DISPARBUDPORA 2. Nazir Wakaf Sumedang 3. Yayasan Pangeran Sumedang 4. Komunitas Penggerak Pariwisata Kab. Sumedang. 5. KONI 6. Dewan Kebudayaan Sumedang 7. Karang Taruna 8. KNPI 9. Kwarcab Sumedang 10. Forum Anak Tandang Sumedang	1. Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan event visit wonderful Indonesia 2. Meningkatkan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal	1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan	1. Revitalisasi/penataan kawasan pariwisata; 2. Meningkatkan pelaksanaan event (Melakukan kerjasama penyelenggaraan event dengan swasta); 3. Melakukan promosi pariwisata seni dan budaya; 4. Pembangunan galeri ekonomi kreatif sekaligus kepariwisataan;	Se Kabupaten Sumedang	1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja bidang pariwisata dan sektor non pertanian 2. Penataan Pacuan Kuda sebagai Ruang Publik. Ruang Aktivitas Publik (Olahraga ringan, Pertunjukan Seni, Rekreasi) di Pacuan Kuda merupakan upaya untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, di mana akan dibangun Arena Pertunjukan berbentuk Velodrome 3. Terselenggaranya festival dan gelar seni budaya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5,315,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
							Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,000,000,000	
							Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3,010,000,000	

OUTCOME	PARA PIHAK	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN ARAHAN KEBIJAKAN/PROGRAM	ARAHAN LOKASI	REKOMENDASI	PROGRAM PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
			Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pemasaran Pariwisata 5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada penggerak ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan.		tercatat pada kalender tahunan Event Visit Wonderful Indonesia dengan menjadikan SRIMANGANTI sebagai ikon kebudayaan dan daya tarik pariwisata Sumedang	Program Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,400,000,000 2,000,000,000	
Peningkatan laju pertumbuhan pendapatan per kapita	1. DKPP 2. DPKP 3. KADIN 4. HIPMI 5. GAPENSI 6. BAZNAS	1. Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menenga 2. Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat 3. Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	1. Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 5. Program Penyuluhan Pertanian 6. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Megoptimalkan pengelolaan data (melakukan pendataan/updating data UMK); 2. Melakukan pelatihan kewirausahaan yang komprehensif (proses hulu hingga hilir) 3. Bantuan Modal Usaha bagi UMK dalam meningkatkan dan pengembangan usaha. 4. Perlu ditambah pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas strategis (sinergi dengan Dinas Industri dan Perdagangan	Se Kabupaten Sumedang	Peningkatan produktivitas sektor unggulan;	Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Penyuluhan Pertanian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	804,200,000 4,945,300,000 8,929,600,000 10,447,796,230	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PRIORITAS 3 : TPB 6 (AIR BERSIH DAN SANITASI)									
		1. Meningkatkan pemenuhan perumahan dan pemukiman layak dan terjangkau bagi	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Menyediakan sarpras sanitasi; 2. Menyediakan tanah untuk sanitasi komunal; 3. Melaksanakan STBM.	Se Kabupaten Sumedang	1. Meningkatkan pelayanan air minum layak 1 persen per tahun; 2. Mengembangkan skema pelayanan air kerjasama dengan kota/kabupaten sekitarnya untuk	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	28,119,981,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

OUTCOME	PARA PIHAK	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN ARAHAN KEBIJAKAN/PROGRAM	ARAHAN LOKASI	REKOMENDASI	PROGRAM PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
4. Peningkatan akses air minum layak dan berkelanjutan	7. Tim Penggerak PKK Kab. Sumedang 8. Dharma Wanita Indonesia Kab. Sumedang 9. Karang Taruna 10. Forum Anak Tandang	masyarakat miskin 2. Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4. Menyediakan sanitasi komunal; 5. Penyediaan layanan sedotan tinja 6. Pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap usaha produksi perikanan		pelayanan rawan defisit air; 3. Mengembangkan inovasi baru penyediaan jaringan air minum pada kecamatan – kecamatan yang rawan defisit air; 4. Meningkatkan infrastruktur air minum sesuai dengan SPM; 5. Meningkatkan cakupan pelayanan air perpipaan melalui penyediaan jaringan distribusi di seluruh kecamatan; 6. Pendataan penduduk yang BABS untuk diprioritaskan dalam penanganan pengolahan limbah; 7. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan pada skala lingkungan; dan			
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11,299,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	160,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
PRIORITAS 4 : TPB 9 (INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR)									
1. Masih rendahnya serapan pendapatan daerah dari sektor industry 2. Ekspor – impor seimbang 3. Peningkatan Investasi industri manufaktur 4. Masih rendahnya tenaga kerja terampil bidang industry 5. Infrastruktur pendukung industri manufaktur	1. DKPP 2. DPMPTSP 3. APINDO 4. KADIN 5. HIPMI	1. Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah 2. Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat 3. Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Pengembangan Kawasan Industri untuk potensi Pendapatan Asli Daerah. 2. Optimalisasi Investasi dalam upaya pengembangan kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan dukungan regulasi yang mudah dan terjangkau.	Se Kabupaten Sumedang	1. Penerapan standar yang lebih tinggi untuk produk industri manufaktur; 2. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk impor; 3. Meningkatkan potensi ekonomi dengan membangun infrastruktur pendukung untuk meningkatkan ekonomi dan investasi; 4. Penyerapan tenaga kerja industri manufaktur yang berkualitas dan kompeten; 5. Perlu dilakukan penyusunan rencana induk kawasan industri Kabupaten Sumedang sebagai arahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal	1,050,000,000 550,000,000 458,914,000 632,416,648	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 70% 80%

OUTCOME	PARA PIHAK	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM	KETERANGAN ARAHAN KEBIJAKAN/PROGRAM	ARAHAN LOKASI	REKOMENDASI	PROGRAM PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
						<p>pengembangan industri di Kabupaten Sumedang; dan</p> <p>6. Peningkatan dukungan sentra-sentra kegiatan ekonomi yang sudah terbentuk.</p> <p>7. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;</p>			
PRIORITAS 5 : TPB 4 (PENDIDIKAN BERKUALITAS)									
<p>1. Peningkatan kualitas sarana pendidikan</p> <p>2. Peningkatan kualitas tenaga pengajar</p> <p>3. Peningkatan standar kurikulum pembelajaran</p> <p>4. Peningkatan jumlah lulusan</p>	<p>1. DINAS PENDIDIKAN</p> <p>2. PGRI</p> <p>3. DEWAN PENDIDIKAN KAB. SUMEDANG</p> <p>4. FORUM ANAK TANDANG</p> <p>5. KARANG TARUNA</p> <p>6. KNPI</p>	<p>Meningkatkan sarana prasarana dan inovasi dalam pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat</p>	<p>Program Pengelolaan Pendidikan</p>	<p>1. Melakukan pembinaan standar pendidikan pada jenjang PAUD;</p> <p>2. Melakukan sosialisasi pendidikan jenjang PAUD untuk wilayah (kecamatan) yang APK dan APM PAUD nya rendah;</p> <p>3. Peningkatan program sekolah Paket A, B dan C</p> <p>4. Membangun Lab IPA dan Lab Komputer di jenjang SD-SMP;</p> <p>5. Melakukan bantuan pendidikan lanjutan untuk guru baik dari Pemerintah maupun Swasta (CSR);</p> <p>6. Penyelenggaraan pendidikan berbasis Eksotis dan PERKASA</p>	<p>Se Kabupaten Sumedang</p>	<p>1. peningkatan kapasitas tenaga pengajar sesuai kompetensi masing – masing;</p> <p>2. Peningkatan sarana dan prasarana belajar sesuai dengan SPM;</p> <p>3. Peningkatan Kualitas lulusan;</p> <p>4. peningkatan bantuan biaya pendukung sekolah (seragam, sepatu, buku tulis, buku bacaan dll) / subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah;</p> <p>5. Penyediaan akses internet/ rumah internet pada lingkungan permukiman warga;</p>	<p>Program Pengelolaan Pendidikan</p>	<p>1,128,241,668,000</p>	<p>Dinas Pendidikan</p>

5.9. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas yang mendukung Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2023.

Sumedang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang terus bertransformasi menuju Pemerintahan yang Berkelas Dunia (World Class Government). Pembangunan di segala sektor dilaksanakan secara akseleratif dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam bingkai Visi Sumedang Simpati.

Pada Tahun 2022, Kabupaten Sumedang telah memasuki tahun keempat upaya penurunan stunting. Berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia, Prevalensi Stunting Kabupaten Sumedang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Prevalensi stunting Kabupaten Sumedang menurun dari angka 32.2 persen pada tahun 2018 menjadi 22 persen pada tahun 2021 bahkan berdasarkan hasil Bulan Penimbangan Balita prevalensi stunting Sumedang di angka 10,99 persen. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus berfokus pada upaya penurunan dan pencegahan stunting untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang.

Visi Indonesia Maju menetapkan target Prevalensi Stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024. Kondisi ini terus memacu pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menangani stunting sampai pada pencapaian Sumedang Zero New Stunting dengan strategi pembangunan pentahelix dan bertumpu pada pengoptimalan budaya, agama dan teknologi.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya mewujudkan Sumedang Zero New Stunting tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, dimana prevalensi stunting tahun 2022 ditargetkan sebesar 12 persen dan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 9 persen.

Pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting mulai dari analisis situasi sampai dengan reviu kinerja terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga seluruh aksi berorientasi pada upaya pencapaian sasaran yaitu mewujudkan Sumedang Zero New Stunting.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penurunan dan Pencegahan Stunting terletak pada Komitmen, Kolaborasi dan Inovasi.

Pemerintah kabupaten Sumedang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Tindak lanjut dari Peraturan Bupati ini, pemerintah kabupaten Sumedang telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi melalui Keputusan Bupati dan menyiapkan anggaran yang optimal untuk ketersediaan program penanganan stunting. Selain pada acara khusus koordinasi dan konsolidasi penanganan stunting, pada kesempatan lain pun Bupati melakukan cek, ricek dan kros cek perkembangan penanganan stunting di Kabupaten Sumedang

Pendekatan kolaboratif melalui pentahelix dilakukan karena pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki keterbatasan Sumber Daya. Bantuan Lembaga non pemerintah dalam membantu Sumedang menangani stunting sangat banyak mulai dari PT. Telkomsel, PT. Danone Indonesia, Save The Children, Nutrition Internasional, Sawala Foundation, IBI, IDI, Persagi, Aisyah, ITB, UNPAD, UNSAP, UKI, Jusyan FM, dan lembaga lainnya

Untuk mempercepat Pencapaian Sumedang Zero New Stunting, teknologi menjadi alat yang paling tepat. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang membangun Aplikasi Simpati. Melalui Aplikasi ini, pemerintah Kabupaten Sumedang dapat meningkatkan ketersediaan dan efektifitas program penanganan stunting.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat atas keberhasilan dalam upaya penanganan stunting. Penghargaan yang didapatkan adalah Terbaik 1 Lomba Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi dan Kabupaten Paling Replikatif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Juara 2 Lomba Inovasi Cegah Stunting Kategori Penggunaan Teknologi Informasi dari BKKBN, HIPPG dan Adinkes, Penghargaan dari Markplus Inc atas Inovasi e-Simpati. Bahkan Kabupaten Sumedang akan menjadi bagian yang memeriahkan acara G20 yang akan digelar pada bulan November 2021 di Bali sebagai Kabupaten yang telah menerapkan Artificial Intelligence dalam penurunan stunting.

Untuk mendukung Penurunan Prevelansi Stunting perlu di dorong oleh program prioritas dan kolaborasi Perangkat Daerah yang dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.17

Penjabaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Penurunan Prevelansi Stunting Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD 2023
1	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.275.000.000
2	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	200.000.000 2.200.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000 14.926.816.832 610.000.000 3.000.000.000 82.056.799.071 450.000.000 300.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	11.800.000.000 15.069.981.000 550.000.000,00

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD 2023
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	10.074.000.000,00
		1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.000.000.000,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
		1.04.03.2.03.02 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	2.100.000.000,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
1.04.04.2.01.01 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.365.000.000		
5	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	8.872.563.300
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.453.500.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	37.630.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
		2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.472.273.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	500.000.000		
2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	331.605.400		
2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.717.626.523		
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.050.000.000

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD 2023
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
		1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18.912.563.300
		3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.874.600.000
9	Dinas Perikanan dan Peternakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
		3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	450.000.000
		2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000
11	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	950.000.000
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		Pengelolaan Sampah	
		2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	200.000.000
		2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.500.000.000
		2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	223.000.000
		Jumlah	198.672.958.426

5.10. Rencana Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan serta kerangka pendanaan dalam RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berdasarkan hasil input Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terpetakan kedalam setiap urusan pemerintahan yang meliputi; urusan wajib Pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan; urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan; urusan pilihan terdiri dari 8 urusan, unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri dari 1 unsur pendukung dan; unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri dari 5 urusan, unsur pengawasan urusan pemerintahan terdiri dari 1 unsur pengawasan, unsur kewilayahan yang dilaksanakan oleh 26 Kecamatan dan unsur pemerintahan umum dengan dukungan pendanaan masih bersifat indikatif.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja dan kerangka pendanaan ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023. Secara rinci Program, Kegiatan dan sub kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dapat dilihat pada table 5.18 di bawah ini.

Tabel 5.18
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	728,918,403,041						100 Persen	721,418,084,746			
1 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					131,380,000							360,000,000			
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	43,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	130,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	53,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					711,215,706,641							703,591,998,346			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6652 Orang/bulan	11,184,006,641		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6652 Orang/bulan	703,529,998,346	Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	11,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	20,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	50,000,000	Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						150,000,000						72,000,000		
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Laporan	72,000,000	Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						635,000,000						525,280,000		
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100,000,000				Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	100 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	4 Orang	300,000,000	Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	5 Orang	25,280,000	Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	215,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	5 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						999,920,000						1,010,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	299,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	300,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	60,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	200,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,686,396,400							12,743,606,400	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	100,000,000				Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	100,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12,586,396,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	12,643,606,400	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,100,000,000							3,115,200,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Unit	115,200,000	Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Unit	3,000,000,000	Dinas Pendidikan	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	Persen		Persen	100 Persen	1,128,241,668,000					100 Persen	1,202,092,190,584		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						762,718,771,000						811,541,492,216		
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1304 Ruang	293,326,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Optimalisasi Pelayanan Dasar	1304 Ruang	293,426,600,000	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				31 Ruang	6,665,992,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Optimalisasi Pelayanan Dasar	31 Ruang	6,765,992,000	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				187 Ruang	14,705,119,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Optimalisasi Pelayanan Dasar	187 Ruang	14,805,119,000	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				72 Ruang	14,719,389,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Optimalisasi Pelayanan Dasar	72 Ruang	14,819,389,000	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				553 Unit	72,143,420,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Optimalisasi Pelayanan Dasar	553 Unit	72,243,420,000	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				805 Ruang	109,494,839,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Optimalisasi Pelayanan Dasar	805 Ruang	109,594,839,000	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1344 Ruang	14,781,304,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Optimalisasi Pelayanan Dasar	1344 Ruang	14,881,304,000	Dinas Pendidikan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				26 Ruang	1,226,732,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Optimalisasi Pelayanan Dasar		26 Ruang	1,326,732,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				73 Ruang	9,046,830,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Optimalisasi Pelayanan Dasar		73 Ruang	9,146,830,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				342 Unit	31,274,190,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Optimalisasi Pelayanan Dasar		342 Unit	31,374,190,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				222 Unit	7,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		222 Unit	7,500,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				35000 Peserta Didik	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		35000 Peserta Didik	850,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia				193 Paket	21,575,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Optimalisasi Pelayanan Dasar		193 Paket	21,675,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				604 Satuan Pendidikan	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		604 Satuan Pendidikan	500,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				44 Peserta Didik	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		44 Peserta Didik	350,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				5300 orang	5,580,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5300 orang	5,580,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				604 Satuan Pendidikan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		604 Satuan Pendidikan	300,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				583 Satuan Pendidikan	100,221,100,000		DAK Non Fisik - BOS Reguler		Optimalisasi Pelayanan Dasar		583 Satuan Pendidikan	144,318,384,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				583 orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		583 orang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				258 Ruang	58,058,256,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Optimalisasi Pelayanan Dasar		258 Ruang	58,058,256,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	100,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	100,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				200 Orang	150,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		200 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						261,608,571,000							276,081,661,400	
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				161 Ruang	44,814,734,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		161 Ruang	44,914,734,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				18 Ruang	8,246,802,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		18 Ruang	8,446,802,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				39 Ruang	8,807,487,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		39 Ruang	8,907,487,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				16 Ruang	7,530,016,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		16 Ruang	7,730,016,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				69 Ruang	37,062,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		69 Ruang	37,162,340,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	185,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				233 Unit	38,328,780,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		233 Unit	38,328,780,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang 217 Ruang	34,860,864,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Ruang 217 Ruang	34,860,864,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	2,823,740,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Ruang	2,823,740,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	363,060,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Ruang	363,060,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				13 Ruang	3,670,862,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		13 Ruang	3,670,862,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				16 Ruang	5,400,424,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		16 Ruang	5,400,424,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				88 Unit	8,186,175,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		88 Unit	8,186,175,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Paket	1,000,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10000 Peserta Didik	575,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		10000 Peserta Didik	600,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				108 Paket	11,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Optimalisasi Pelayanan Dasar		108 Paket	11,000,000,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				122 Satuan Pendidikan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		122 Satuan Pendidikan	500,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				15 Peserta Didik	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		15 Peserta Didik	300,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 2500 orang	450,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Orang 2500 orang	1,200,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				122 Satuan Pendidikan	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		122 Satuan Pendidikan	300,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				72 Satuan Pendidikan	43,995,660,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Optimalisasi Pelayanan Dasar		72 Satuan Pendidikan	54,353,750,400	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				123 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik - BOS Reguler		Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		123 Orang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				13 Ruang	2,619,567,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		13 Ruang	2,619,567,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	363,060,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Ruang	363,060,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	100,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	100,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	150,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		100 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						89,705,418,000							99,564,970,008	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				133 Unit	21,906,098,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		133 Unit	22,906,098,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				170 Unit	24,724,977,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Optimalisasi Pelayanan Dasar		170 Unit	25,724,977,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				19 Ruang	1,973,716,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		19 Ruang	1,937,160,008	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				17 Unit	1,610,087,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		17 Unit	1,710,087,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10000 Peserta Didik	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		10000 Peserta Didik	1,000,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				80 Paket	20,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		80 Paket	25,000,000,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					0 Orang 1225 Orang	760,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Orang 1225 Orang	1,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					961 Satuan Pendidikan	1,275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		961 Satuan Pendidikan	1,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					961 Satuan Pendidikan	16,440,540,000		DAK Non Fisik-BOP PAUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		961 Satuan Pendidikan	16,728,648,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD					900 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		900 Orang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					3 Dokumen	100,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					1 Dokumen	100,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan					100 Orang	165,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		100 Orang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							14,208,908,000							14,904,066,960	
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun					9 Unit	1,332,108,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		Optimalisasi Pelayanan Dasar		9 Unit	1,332,108,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.04 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	693,090,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		Optimalisasi Pelayanan Dasar	1 Unit	693,090,000	Dinas Pendidikan	
1 01 02 2.04 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1800 Peserta Didik	90,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar	1800 Peserta Didik	200,000,000	Dinas Pendidikan	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1836 Peserta Didik	3,250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar	1836 Peserta Didik	500,000,000	Dinas Pendidikan	
1 01 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				4500 orang	4,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar	4500 orang	4,500,000,000	Dinas Pendidikan	
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				50 Satuan Pendidikan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar	50 Satuan Pendidikan	500,000,000	Dinas Pendidikan	
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				46 Satuan Pendidikan	4,043,710,000		DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Optimalisasi Pelayanan Dasar	46 Satuan Pendidikan	4,942,452,000	Dinas Pendidikan	
1 01 02 2.04 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan				46 orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar	46 orang	200,000,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						438,563,404,602						277,733,477,720		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	135,080,246,724					100 Persen	127,080,389,453		
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	435,000,000					100 Persen	410,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 laporan	175,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	132,308,792,099						100 Persen	124,583,934,828	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1000 orang bulan	132,108,792,099	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1000 orang bulan	124,383,934,828	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 laporan	100,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	22,000,000						100 Persen	72,000,000	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 orang	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		20 orang	12,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	420,454,625						100 Persen	420,454,625	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 paket	120,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15,954,625	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	15,954,625	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 paket	60,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 paket	30,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	12,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 dokumen	12,500,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 laporan	130,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 dokumen	52,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 dokumen	52,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	227,000,000						100 Persen	427,000,000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 unit	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 unit	125,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	102,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	102,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	830,000,000						100 Persen	830,000,000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	155,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 laporan	155,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	675,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 laporan	675,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	837,000,000						100 Persen	337,000,000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Laporan	197,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	197,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 unit	10,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	575,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	75,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 unit	55,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar	Persen		Persen	100 Persen	301,701,281,878						100 Persen	146,793,088,267	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi sarana sesuai standar	Persen		Persen	50 Persen	185,993,758,628						50 Persen	78,514,205,100	
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	149,999,787,589	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 unit	10,375,121,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 unit	37,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	650,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Margamekar	Pajak Rokok	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	2,500,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				5 unit	10,226,896,139	Kab. Sumedang, Paseh, Semua Kelurahan Kab. Sumedang, Cimanggung, Sawahdadap Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 unit	12,000,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 unit	1,800,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 unit	15,000,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Unit	2,500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 unit	330,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 unit	4,080,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 unit	5,461,953,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		100 unit	750,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 paket	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 paket	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 paket	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 paket	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 paket	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 paket	151,205,100	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 50 Persen	115,507,523,250						100 Persen 50 Persen	65,828,883,167	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17877 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	17877 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17065 Orang	2,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	17065 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16252 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	16252 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17534 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	17534 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16318 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	16318 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				630002 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	630002 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				196760 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	196760 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				230491 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	230491 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				62100 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	62100 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1614 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1614 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2793 orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	2793 orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				19730 orang	480,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	19730 orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				4 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	4 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 dokumen	14,926,816,832	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	12 dokumen	3,500,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 dokumen	62,146,583		Pajak Rokok	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	6 dokumen	425,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 dokumen	610,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	7 dokumen	210,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 dokumen	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	12 dokumen	3,750,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 dokumen	2,021,760,764	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	12 dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 dokumen	82,056,799,071	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	12 dokumen	47,731,380,167	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	2 dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				14 unit	3,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	14 unit	2,415,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	12 laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 unit	3,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 unit	3,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1000 Keluarga	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1000 Keluarga	587,503,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase faslitas kesehatan yang sudah menyeylenggarakan SIK terintegrasi	Persen		Persen	50 Persen	100,000,000						50 Persen	1,950,000,000	
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit yang memiliki ijin operasional	Persen		Persen	50 Persen	100,000,000						50 Persen	500,000,000	
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				36 Unit	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		36 Unit	400,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Persen		Persen	90 Persen	100,000,000						90 Persen	1,950,000,000	
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktek tenaga kesehatan yang memiliki izin	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000						100 Persen	195,000,000	
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Persen		Persen	100 Persen	931,876,000						100 Persen	960,000,000	
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan dan Minuman Yang Diperiksa Dan Memenuhi Syarat	Persen		Persen	100 Persen	931,876,000						100 Persen	150,000,000	
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 dokumen	931,876,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri	Persen		Persen	25 Persen	750,000,000						25 Persen	950,000,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif Yang dibina	Persen		Persen	100 Persen	450,000,000						100 Persen	200,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 dokumen	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen		Persen	65 Persen	300,000,000						65 Persen	600,000,000		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				5 dokumen	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 dokumen	600,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							345,833,696,051							387,469,321,766	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							229,879,083,244							228,741,759,608	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,137,323,636							0	
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1,137,323,636	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,849,120,000						12 bulan	3,849,120,000	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik				12 laporan	3,849,120,000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Pegawai dan Masyarakat pengguna layanan Sarana Prasarana Kesehatan RSUD Sumedang	12 laporan	3,849,120,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							224,892,639,608						12 bulan	224,892,639,608	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	224,892,639,608	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit Kerja	224,892,639,608	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							115,954,612,807						100 Persen	158,727,562,158	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan yang memenuhi Sarana sesuai Standar	Persen		Persen	100 Persen	115,954,612,807						100 Persen	133,027,562,158	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah pengadaan alat- alat kesehatan Rumah Sakit				240 Unit 9 paket	115,954,612,807	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Pegawai dan Masyarakat pengguna layanan fasilitas kesehatan di RSUD Sumedang	240 Unit 9 paket	122,127,876,129	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,692,495,000							3,692,495,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang Memadai	Persen		Persen	100 Persen	2,775,000,000						100 Persen	2,775,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	2,775,000,000						1 Unit	2,775,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,775,000,000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	2,775,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	917,495,000						100 Persen	917,495,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						917,495,000							917,495,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	JUMLAH DOKUMEN OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 DOKUMEN 0 Dokumen	917,495,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	12 DOKUMEN 0 Dokumen	917,495,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,581,555,000							3,581,555,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	2,698,800,000						100 Persen	2,698,800,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	2,698,800,000						1 Unit	2,698,800,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Dokumen Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Blud				0 Unit Kerja 12 Dokumen	2,698,800,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Unit Kerja 12 Dokumen	2,698,800,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	882,755,000						100 Persen	882,755,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	50 Persen	882,755,000						50 Persen	882,755,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	882,755,000	Kab. Sumedang, Ciamanggung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	882,755,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,635,391,000							3,415,042,250	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	2,812,891,000						100 Persen	2,615,042,250	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	"Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,812,891,000						1 Unit Kerja	2,615,042,250	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,812,891,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	2,615,042,250	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	822,500,000						100 Persen	800,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	822,500,000						12 Dokumen	800,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	822,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	12 Dokumen	800,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,131,108,500						2,131,108,500		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,363,848,500						100 Persen	1,363,848,500	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	unit		unit	1 unit	1,363,848,500						1 unit	1,363,848,500	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,363,848,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	1,363,848,500	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	767,260,000						100 Persen	767,260,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	767,260,000						12 Dokumen	767,260,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	767,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	12 Dokumen	767,260,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,051,541,000						2,181,541,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD Yang Memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,235,541,000						100 Persen	1,235,541,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	1,235,541,000						1 Unit	1,235,541,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Pelayanan dan Penunjang BLUD				4 dokumen	1,235,541,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	4 dokumen	1,235,541,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	816,000,000						100 Persen	946,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	50 Persen	816,000,000						50 Persen	946,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	816,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Dokumen	946,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,050,000,000							2,025,000,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,275,000,000						100 Persen	1,275,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	Unit		Unit	1 Unit	1,275,000,000						1 Unit	1,275,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Laporan Peningkatan BLUD				1 Unit Kerja 12 Laporan	1,275,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Hargombong	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit Kerja 12 Laporan	1,275,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	775,000,000						100 Persen	750,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	50 Persen	775,000,000						50 Persen	750,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	775,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Hargombong	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	12 Dokumen	750,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,238,350,000							2,354,350,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadaie Layana	Persen		Persen	100 Persen	1,504,350,000						100 Persen	1,504,350,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,504,350,000						1 Unit Kerja	1,504,350,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,504,350,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	1,504,350,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	734,000,000						100 Persen	850,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						734,000,000							850,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	734,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	850,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,351,267,000							2,351,267,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,358,790,000						100 Persen	1,358,790,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	1,358,790,000						1 Unit	1,358,790,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,358,790,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	1,358,790,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	992,477,000						100 Persen	992,477,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	50 Persen	992,477,000						50 Persen	992,477,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 dokumen	992,477,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 dokumen	992,477,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,271,500,000							3,271,500,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	persen		persen	100 persen	2,354,000,000						100 persen	2,354,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	unit		unit	1 unit	2,354,000,000						1 unit	2,354,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,354,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	2,354,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	917,500,000						100 Persen	917,500,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						917,500,000							917,500,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	917,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	917,500,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,686,970,000							1,686,970,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Layanan BLUD yang Memadai	Persen		Persen	100 Persen	953,009,000						100 Persen	953,009,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningkatan BLUD	Unit		Unit	1 Unit	953,009,000						1 Unit	953,009,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan "Jumlah Dokumen Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD"				0 Unit Kerja 12 Dokumen	953,009,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	0 Unit Kerja 12 Dokumen	953,009,000	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	733,961,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Sukagalih	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	733,961,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,423,857,400						3,423,857,400		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	2,886,687,400						100 Persen	2,886,687,400	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit		unit	1 unit	2,886,687,400						1 unit	2,886,687,400	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,886,687,400	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	2,886,687,400	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar	Persen		Persen	100 Persen	537,170,000						100 Persen	537,170,000	
		Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						537,170,000							537,170,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	537,170,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	537,170,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,948,126,000						3,074,051,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	2,108,156,000						100 Persen	2,108,156,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2,108,156,000							2,108,156,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				12 dokumen	2,108,156,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 dokumen	2,108,156,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	839,970,000						100 Persen	965,895,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						839,970,000							965,895,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 dokumen	839,970,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 dokumen	965,895,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,108,305,150							2,108,305,150	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,326,305,150						100 Persen	1,326,305,150	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,326,305,150						1 Unit Kerja	1,326,305,150	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,326,305,150	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	1,326,305,150	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	782,000,000						100 Persen	782,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						782,000,000							782,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 dokumen	782,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 dokumen	782,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,198,585,000							3,198,585,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	2,100,000,000						100 Persen	2,100,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Unit		Unit	1 Unit	2,100,000,000						1 Unit	2,100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,100,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	2,100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	1,098,585,000						100 Persen	1,098,585,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	50 Persen	1,098,585,000						50 Persen	1,098,585,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen 0 Dokumen	1,098,585,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen 0 Dokumen	1,098,585,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,244,428,000							3,244,428,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	2,306,428,000						100 Persen	2,306,428,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Unit		Unit	1 Unit	2,306,428,000						1 Unit	2,306,428,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,306,428,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	2,306,428,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar	Persen		Persen	100 Persen	938,000,000						100 Persen	938,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	50 Persen	938,000,000						50 Persen	938,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	938,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	12 Dokumen	938,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,326,672,177							3,326,672,177	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	2,244,484,177						100 Persen	2,244,484,177	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang BLUD	Unit		Unit	1 Unit	2,244,484,177						1 Unit	2,244,484,177	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,244,484,177	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	2,244,484,177	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	1,082,188,000						100 Persen	1,082,188,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,082,188,000							1,082,188,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,082,188,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	1,082,188,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,704,835,000							2,704,835,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,868,875,000						100 Persen	1,868,875,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	jumlah blud yang menyediakan pelayanan dan	unit		unit	1 unit	1,868,875,000						1 unit	1,868,875,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas				0 Unit Kerja 12 dokumen	1,868,875,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Unit Kerja 12 dokumen	1,868,875,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	835,960,000						100 Persen	835,960,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						835,960,000							835,960,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas				12 dokumen	835,960,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 dokumen	835,960,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,090,400,000							3,090,400,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	2,122,800,000						100 Persen	2,122,800,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Laporan		Laporan	12 Laporan	2,122,800,000						12 Laporan	2,122,800,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,122,800,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	Lain-lain Pendapatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	2,122,800,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Layanan Kesehatan di Puskesmas yang Memadai	Persen		Persen	100 Persen	967,600,000						100 Persen	967,600,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	50 Persen	967,600,000						50 Persen	967,600,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	967,600,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	12 Dokumen	967,600,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,104,366,050							1,000,800,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	2,103,766,050						100 Persen	0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	2,103,766,050						1 Unit	0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,103,766,050	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Sirnasari	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar	Persen		Persen	100 Persen	1,000,600,000						100 Persen	1,000,800,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Layanan Kesehatan di Puskesmas	Laporan		Laporan	12 Laporan	1,000,600,000						12 Laporan	1,000,800,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,000,600,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	12 Dokumen	1,000,800,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,926,869,000							2,206,506,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	926,869,000						100 Persen	1,106,506,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	926,869,000						1 Unit	1,106,506,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	926,869,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	1,106,506,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	1,000,000,000						100 Persen	1,100,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000,000							1,100,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,000,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK DAK Non Fisik - BOKKB - BOK LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,435,937,150							2,435,937,150	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,592,937,150						100 Persen	1,592,937,150	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	1,592,937,150						1 Unit	1,592,937,150	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,592,937,150	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit Kerja	1,592,937,150	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	843,000,000						100 Persen	843,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						843,000,000							843,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 dokumen	843,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 dokumen	843,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,773,000,000							2,773,000,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,950,000,000						100 Persen	1,950,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	Unit		Unit	1 Unit	1,950,000,000						1 Unit	1,950,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1 Unit Kerja	1,950,000,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit Kerja	1,950,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	823,000,000						100 Persen	823,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						823,000,000							823,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 dokumen	823,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 dokumen	823,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,029,400,000							3,131,060,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	2,061,000,000						100 Persen	2,261,060,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,061,000,000						1 Unit Kerja	2,261,060,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,061,000,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit Kerja	2,261,060,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	968,400,000						100 Persen	870,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						968,400,000							870,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	968,400,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	870,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,132,000,000							2,181,600,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,140,000,000						100 Persen	1,140,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Unit		Unit	1 Unit	1,140,000,000						1 Unit	1,140,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,140,000,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	1,140,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	992,000,000						100 Persen	1,041,600,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						992,000,000							1,041,600,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	992,000,000	Kab. Sumedang, Paseh, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	1,041,600,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,599,670,000							4,201,916,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	3,500,000,000						100 Persen	3,102,246,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	3,500,000,000						1 Unit Kerja	3,102,246,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	3,102,246,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	1,099,670,000						100 Persen	1,099,670,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	50 Persen	1,099,670,000						50 Persen	1,099,670,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,099,670,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	12 Dokumen	1,099,670,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,586,420,000							1,586,420,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	852,420,000						100 Persen	852,420,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	852,420,000						1 Unit	852,420,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	852,420,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	852,420,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	734,000,000						100 Persen	734,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						734,000,000							734,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen 0 Dokumen	734,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen 0 Dokumen	734,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,299,213,500						1,299,213,500		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	565,213,500					100 Persen	565,213,500		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	unit		unit	1 unit	565,213,500					1 unit	565,213,500		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	565,213,500	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit Kerja	565,213,500	Dinas Kesehatan	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	734,000,000					100 Persen	734,000,000		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	50 Persen	734,000,000					50 Persen	734,000,000		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 dokumen 0 Dokumen	734,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 dokumen 0 Dokumen	734,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,470,450,000						2,470,450,000		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,824,950,000					100 Persen	1,824,950,000		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja		unit kerja	1 unit kerja	1,824,950,000					1 unit kerja	1,824,950,000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,824,950,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	1 Unit Kerja	1,824,950,000	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	645,500,000					100 Persen	645,500,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						645,500,000						645,500,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	645,500,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	12 Dokumen	645,500,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,892,113,000						1,520,363,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	892,113,000					100 Persen	892,113,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						892,113,000						892,113,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0 Unit Kerja 12 Laporan	892,113,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0 Unit Kerja 12 Laporan	892,113,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	1,000,000,000					100 Persen	628,250,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000,000						628,250,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 dokumen	1,000,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	12 dokumen	628,250,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,442,580,800						2,442,580,800		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,551,580,800					100 Persen	1,551,580,800		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	1,551,580,800						1 Unit	1,551,580,800	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,551,580,800			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	1,551,580,800	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	891,000,000						100 Persen	891,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						891,000,000							891,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	891,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Dokumen	891,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,151,901,500							1,151,901,500	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	359,901,500						100 Persen	359,901,500	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Unit		Unit	1 Unit	359,901,500						1 Unit	359,901,500	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	359,901,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	100 Persen	359,901,500	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	792,000,000						100 Persen	792,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	Persen		Persen	50 Persen	792,000,000						50 Persen	792,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	792,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Hariang	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	12 Dokumen	792,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,601,027,000							1,601,027,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	691,027,000						100 Persen	691,027,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						691,027,000							691,027,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	691,027,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit Kerja	691,027,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	910,000,000						100 Persen	910,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						910,000,000							910,000,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	910,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	910,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,431,540,560							1,431,540,560	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	724,540,560						100 Persen	724,540,560	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	724,540,560						1 Unit	724,540,560	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	724,540,560	Kab. Sumedang, Jatinangor, Cisempur	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit Kerja	724,540,560	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	707,000,000						100 Persen	707,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						707,000,000						707,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas" Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen 0 Dokumen	707,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	12 Dokumen 0 Dokumen	707,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,112,235,000							2,112,235,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,462,235,000					100 Persen	1,462,235,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang BLUD	Unit		Unit	1 Unit	1,462,235,000					1 Unit	1,462,235,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Dokumen Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0 Unit Kerja 12 dokumen	1,462,235,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Sukadana	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0 Unit Kerja 12 dokumen	1,462,235,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	650,000,000					100 Persen	650,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	50 Persen	650,000,000					50 Persen	650,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 dokumen 0 Dokumen	650,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		12 dokumen 0 Dokumen	650,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,609,400,000							1,580,736,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	960,000,000					100 Persen	931,336,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	960,000,000					1 Unit	931,336,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	960,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Padasuka	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit Kerja	931,336,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	100 Persen	649,400,000						100 Persen	649,400,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	Persen		Persen	50 Persen	649,400,000						50 Persen	649,400,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	649,400,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat	12 Dokumen	649,400,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						806,315,800							806,315,800	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	806,315,800						100 Persen	806,315,800	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	806,315,800						1 Unit	806,315,800	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	"Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"				1 Unit Kerja	806,315,800		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit Kerja	806,315,800	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						300,000,000							401,205,100	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar	Persen		Persen	100 Persen	300,000,000						100 Persen	401,205,100	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi sarana sesuai standar	Persen		Persen	50 Persen	200,000,000						50 Persen	151,205,100	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Paket	151,205,100	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen		Persen	50 Persen	100,000,000						50 Persen	250,000,000	
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1,119,748,505,769							614,680,768,207	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	51,953,752,614						100 Persen	49,240,190,099	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	35 Dokumen	216,695,000						35 Dokumen	141,695,000	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 dokumen 0 Dokumen	84,420,150		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	5 dokumen 0 Dokumen	34,420,150	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 dokumen 0 Dokumen	12,790,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	3 dokumen 0 Dokumen	9,769,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 dokumen 0 Dokumen	14,516,650		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	2 dokumen 0 Dokumen	14,516,650	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	14,516,650		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	1 dokumen	14,516,650	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 dokumen	90,451,550		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	24 dokumen	68,471,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	27 Laporan	22,872,549,414						27 Laporan	20,961,145,099	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				184 orang/bulan	22,711,079,414		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	184 orang/bulan	20,799,675,099	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen	61,520,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	12 dokumen	61,520,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan				3 dokumen	33,770,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	3 dokumen	33,770,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SKPD				12 laporan	66,180,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	12 laporan	66,180,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	25 Laporan	350,000,000						25 Laporan	350,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kebutuhan Barang Milik Daerah				0 Dokumen 2 dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	0 Dokumen 2 dokumen	40,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Pengamanan				0 Dokumen 12 laporan	250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	0 Dokumen 12 laporan	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				13 laporan	60,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	13 laporan	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	1,284,000,000						5 Laporan	1,020,000,000	
1 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				510 pcs	800,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	510 pcs	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	2 laporan	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0 Orang 6 orang	250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	0 Orang 6 orang	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				42 orang	34,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	42 orang	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				500 orang	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	500 orang	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	94 Laporan	1,575,708,200						94 Laporan	1,620,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 paket	500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	12 paket	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Peralatan Rumah Tangga				12 paket	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	12 paket	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 paket	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	12 paket	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 paket	259,534,200		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	12 paket	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				33 dokumen	109,560,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	33 dokumen	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	156,614,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	12 laporan	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 dokumen	300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	3 dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	7 Laporan	21,120,000,000						7 Laporan	21,070,000,000	
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Operasional atau Lapangan				0 Unit 11 unit	1,250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	0 Unit 11 unit	1,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				19 unit	17,000,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	19 unit	17,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				10 unit	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	10 unit	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 unit	700,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	4 unit	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 unit	1,200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	8 unit	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	2 unit	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 unit	700,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	3 unit	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	24 Laporan	1,455,600,000						24 Laporan	1,037,100,000	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	0 Laporan	110,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 berkas laporan	1,205,600,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	12 berkas laporan	926,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	60 Laporan	3,079,200,000						60 Laporan	3,040,250,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				74 unit	800,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	74 unit	800,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				19 unit	979,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	19 unit	979,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 unit	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	30 unit	61,050,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 unit 0 Unit	800,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	4 unit 0 Unit	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	400,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dinas PUTR Kabupaten Sumedang	3 unit	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen		Persen	47.5 Persen	99,400,000,000						47.5 Persen	74,773,000,000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	m		m	43084.67 m	99,400,000,000						43084.67 m	74,773,000,000	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				1 dokumen	2,500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat yang bergerak di bidang pertanian	1 dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				7436 m 0 KM	19,190,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat yang bergerak di bidang pertanian	7436 m 0 KM	18,590,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi				21748.67 m	72,710,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat yang bergerak di bidang pertanian	21748.67 m	53,883,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1500 m	5,000,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat yang bergerak di bidang pertanian	1500 m	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Layak	Persen		Persen	76.9 Persen	28,119,981,000						76.9 Persen	74,886,986,500	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Air Minum Yang Terbangun/Ditingkatkan	SR		SR	9250 SR	28,119,981,000						9250 SR	74,886,986,500	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				1 Dokumen	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang yang membutuhkan Penyediaan air minum yang bersih	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				450 SR	11,800,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kabupaten Sumedang yang membutuhkan Penyediaan air minum yang bersih	450 SR	43,108,861,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen yang difasilitasi				1000 SR	15,069,981,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kabupaten Sumedang yang membutuhkan Penyediaan air minum yang bersih	1000 SR	7,931,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				4285 SR	550,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kabupaten Sumedang yang membutuhkan Penyediaan air minum yang bersih	4285 SR	17,071,875,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi				1 Kelompok Masyarakat	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kabupaten Sumedang yang membutuhkan Penyediaan air minum yang bersih	1 Kelompok Masyarakat	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang tersertifikasi laik fungsi	Persen		Persen	9 Persen	23,546,000,000						9 Persen	17,150,000,000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang tersertifikasi laik fungsi	persen		persen	9 persen	23,546,000,000						9 persen	17,150,000,000	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				1 dokumen	750,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki Bangunan	1 dokumen	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				2 dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki Bangunan	2 dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki Bangunan	1 dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan				1 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki Bangunan	1 unit	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis				1 Pengelola	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki Bangunan	1 Pengelola	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 08 2.01 08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif				1 Pengelola	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki Bangunan	1 Pengelola	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 08 2.01 09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan				1 unit	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki Bangunan	1 unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 08 2.01 10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)				0 Unit 1 unit	350,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki Bangunan	0 Unit 1 unit	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 08 2.01 11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi				2 unit 0 Unit	300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki Bangunan	2 unit 0 Unit	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				0 Unit 54 unit	21,196,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki Bangunan	0 Unit 54 unit	10,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	Persen		Persen	75 Persen	115,406,585,000						75 Persen	85,100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	persen		persen	75 persen	115,406,585,000						75 persen	85,100,000,000	
1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				23 dokumen	4,500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang	23 dokumen	3,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 09 2.01 02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				2 Kawasan	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang	2 Kawasan	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				20 Kawasan	109,556,585,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang	20 Kawasan	79,450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 09 2.01 05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan				0 orang	1,000,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang	0 orang	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 09 2.01 06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				2 dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang	2 dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang	Persen		Persen	85,3 Persen	790,692,187,155						85,3 Persen	307,220,591,608	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dengan kondisi Baik dan Sedang	Km		Km	660.739 Km	790,692,187,155						660.739 Km	307,220,591,608	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				1 dokumen	1,800,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang	1 dokumen	2,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				1 dokumen	1,000,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang	1 dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				61.75 Km	344,666,561,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang	61.75 Km	60,622,278,620	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi Panjang Jalan yang Direhabilitasi				173.81 Km 0 KM	333,986,279,455		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang	173.81 Km 0 KM	150,631,444,578	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				13.8 Km	11,151,652,200		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang	13.8 Km	13,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				161.95 Km	35,112,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang	161.95 Km	15,368,993,010	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				84 M	26,050,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang	84 M	26,050,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				136.25 m	32,946,186,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang	136.25 m	21,213,024,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				94.5 m	779,508,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang	94.5 m	14,034,851,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				1 dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang	1 dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				1 dokumen	2,000,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kabupaten Sumedang	1 dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah usaha jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang	Penyedia Jasa		Penyedia Jasa	432 Penyedia Jasa	1,880,000,000						432 Penyedia Jasa	2,050,000,000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga teknis/terampil penyedia jasa konstruksi yang tersertifikasi	Orang		Orang	250 Orang	950,000,000						250 Orang	1,000,000,000	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				250 orang 0 Orang	750,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang	250 orang 0 Orang	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				50 orang	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang	50 orang	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha jasa konstruksi yang menerima layanan informasi	persen		persen	100 persen	500,000,000						100 persen	500,000,000	
1 03 11 2.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				12 Laporan	300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang	12 Laporan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 11 2.02 09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi				12 dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang	12 dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang tertib administrasi	persen		persen	100 persen	430,000,000						100 persen	550,000,000	
1 03 11 2.04 01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 dokumen	155,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang	1 dokumen	275,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				12 Laporan	275,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang	12 Laporan	275,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan RTR	Persen		Persen	70 Persen	8,750,000,000						70 Persen	4,260,000,000	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan kepala daerah RDTR	Raperda		Raperda	4 Raperda	700,000,000						4 Raperda	700,000,000	
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				4 dokumen	600,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Pemerintah Kabupaten Sumedang	4 dokumen	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				4 dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Pemerintah Kabupaten Sumedang	4 dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen materi teknis dan dokumen pendukung penyusunan RDTR	Dokumen		Dokumen	16 Dokumen	7,150,000,000						16 Dokumen	3,100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				18 dokumen	7,150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Pemerintah Kabupaten Sumedang	18 dokumen	3,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berkas dokumen informasi ruang dan pengesahan rencana tapak	Dokumen		Dokumen	25 Dokumen	650,000,000						25 Dokumen	150,000,000	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				25 dokumen	650,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Masyarakat Kabupaten Sumedang	25 dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Objek Pemanfaatan Ruang	Dokumen		Dokumen	31 Dokumen	250,000,000						31 Dokumen	310,000,000	
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				31 dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Masyarakat Kabupaten Sumedang	31 dokumen	310,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							26,687,457,228						95,382,600,000	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						11,299,000,000							29,724,000,000	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						11,299,000,000							29,724,000,000	
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				380 Rumah Tangga	10,074,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Optimalisasi Pelayanan Dasar		380 Rumah Tangga	10,074,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terlaksananya sanitasi dasar dengan baik				0 Kelompok 1 Dokumen	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Kelompok 1 Dokumen	225,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				100 Rumah Tangga	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		100 Rumah Tangga	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						15,388,457,228							62,171,100,000	
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						15,388,457,228							62,171,100,000	
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jalan lingkungan di Kelurahan yang terbangun Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				70 lokasi 22 lokasi	15,388,457,228		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Optimalisasi Pelayanan Dasar		70 lokasi 22 lokasi	59,921,100,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						42,835,633,265							68,780,150,061	
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12,320,633,265							18,455,150,056	
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						477,462,375							639,867,375	
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD				7 Dokumen	118,845,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		7 Dokumen	146,250,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	22,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	56,250,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	22,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	56,250,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	22,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	56,250,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	22,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	56,250,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	268,617,375		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	6 Laporan	268,617,375	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,896,806,740						12,618,498,531		
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS				1 Tahun	7,748,484,715		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Tahun	12,452,804,106	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	20,127,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	37,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen 0 Laporan	128,194,425		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	12 Dokumen 0 Laporan	128,194,425	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						445,750,000						593,750,000		
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	172,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	3 Paket	250,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	33,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	33,750,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 4 Orang	140,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 Orang 4 Orang	125,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 orang 0 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		120 orang 0 Orang	185,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,301,784,150							1,301,784,150	
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	386,568,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	386,568,900	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	577,863,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	577,863,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	52,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	52,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen 1 Tahun	76,275,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 Dokumen 1 Tahun	76,275,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	208,577,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	208,577,250	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						622,500,000							1,700,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	472,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	1,200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 paket	200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 paket	300,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						572,880,000							597,800,000	
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	102,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	127,800,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	470,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	470,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,003,450,000							1,003,450,000	
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Tahun	703,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Tahun	703,450,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 1 paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 Unit 1 paket	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara				0 Unit 1 Gedung	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 Unit 1 Gedung	200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						700,000,000							2,600,000,003	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						200,000,000						200,000,001		
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 02 2.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	50,000,001	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						500,000,000						1,400,000,001		
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				9 Unit Rumah	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		9 Unit Rumah	500,000,001	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						4,050,000,000						26,325,000,000		
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						1,200,000,000						0		
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				1 Dokumen	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						300,000,000						500,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 03 2.02 08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						2,550,000,000							25,825,000,000	
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				100 Unit Rumah	2,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Optimalisasi Pelayanan Dasar		100 Unit Rumah	25,575,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 03 2.03 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	250,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						4,365,000,000							0	
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						4,365,000,000							0	
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				223 Unit Rumah	4,365,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		223 Unit Rumah	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						21,400,000,000							21,400,000,002	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						21,400,000,000							21,400,000,002	
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Terpenuhinya Document Perencanaan PSU Perumahan				0 Dokumen 1 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Dokumen 1 Dokumen	500,000,001	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				41 Lokasi	20,700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Optimalisasi Pelayanan Dasar		41 Lokasi	20,700,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Terpenuhinya PSU perumahan yang baik				0 Laporan 1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Laporan 1 Dokumen	200,000,001	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							208,100,000,000						371,804,400,000	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							1,350,000,000						2,250,000,000	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,350,000,000						2,250,000,000	
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	1,800,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sengketa pertanahan yang difasilitasi				0 Berita Acara 1 Dokumen/Kasus	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Berita Acara 1 Dokumen/Kasus	450,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							206,750,000,000						369,554,400,000	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							206,750,000,000						369,554,400,000	
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi				4 lokasi	206,750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 lokasi	369,554,400,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05							27,968,423,404						31,166,374,302		
1 05 01							18,310,902,404						18,796,374,302		
1 05 01 2.01							250,000,000						250,000,000		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen 1 Laporan	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen 1 Laporan	70,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.02							9,395,902,404						8,911,374,302		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	9,330,902,404	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	65 Orang/bulan	8,846,374,302	Satuan Polisi Pamong Praja	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Dokumen 1 Laporan	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Dokumen 1 Laporan	65,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						430,000,000							460,000,000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				230 Stel 2 Paket	370,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		230 Stel 2 Paket	400,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,300,000,000							1,800,000,000	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket 1 Paket	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket 1 Paket	45,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2 Paket 5 Jenis	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Paket 5 Jenis	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket 1 Paket	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket 1 Paket	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket 1 Paket	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket 1 Paket	450,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis 1 Paket	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Jenis 1 Paket	225,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan				1 Dokumen 1 Tahun	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen 1 Tahun	45,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Kali 1 Laporan	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		28 Kali 1 Laporan	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3,100,000,000							3,500,000,000	
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Khusus Pemadam Kebakaran yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Damkar yang Disediakan				1 Unit 0 Unit 1 Paket	3,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit 0 Unit 1 Paket	3,500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,635,000,000							2,675,000,000	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan				1 Laporan 1 Tahun	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan 1 Tahun	125,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan 1 Tahun	2,510,000,000				Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan 1 Tahun	2,550,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,200,000,000						1,200,000,000		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional				28 Unit 1 Tahun	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		28 Unit 1 Tahun	850,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana objek				1 Unit 2 Unit	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit 2 Unit	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman)	Persen		Persen	100 Persen	6,229,521,000						100 Persen	8,470,000,000	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						4,959,521,000							6,620,000,000	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini Jumlah pelaksanaan patroli Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Jumlah pengamanan dan pengawasan				12 Kasus 12 Kali 365 Kali 12 Kali 84 Kali	1,050,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Kasus 12 Kali 365 Kali 12 Kali 84 Kali	1,500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Jumlah penertiban gangguan tibumtranmas				0 Kasus 5 Kasus 12 Kali 48 Kali	950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Kasus 5 Kasus 12 Kali 48 Kali	1,500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi				1 Dokumen 5 Kali	450,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen 5 Kali	450,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Linmas yang di berdayakan				0 Dokumen 1 Dokumen 5294 Orang	582,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Dokumen 1 Dokumen 5294 Orang	750,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP yang dilatih Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				250 Orang 250 Orang	370,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		250 Orang 250 Orang	370,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah Kerjasama				1 Dokumen 28 Kali	1,207,521,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen 28 Kali	1,500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara				1 Unit 1 Unit 1 Paket	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit 1 Unit 1 Paket	550,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						1,070,000,000							1,600,000,000	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				6 Kali 1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 Kali 1 Laporan	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Wilayah yang Dikunjungi				1 Laporan 26 Kecamatan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan 26 Kecamatan	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kasus yang di tangani Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				75 Kasus 1 Laporan	720,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		75 Kasus 1 Laporan	1,200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						200,000,000							250,000,000	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada Jumlah PPNS yang diberdayakan				1 Laporan 23 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan 23 Orang	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (Response Timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen		Persen	90 Persen	3,428,000,000						90 Persen	3,900,000,000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						3,078,000,000							3,400,000,000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Laporan 90 Persen	2,628,000,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan 90 Persen	2,500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit 1 Unit	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit 1 Unit	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						350,000,000						350,000,000		
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Jumlah Relawan yang dibentuk				55 Desa/Kelurahan 260 Orang	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		55 Desa/Kelurahan 260 Orang	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8,600,918,715							8,312,000,000	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	2,670,918,715						100 Persen	2,332,000,000	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						114,422,000							117,000,000	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	65,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	65,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,458,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,458,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	4,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,753,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	4,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,753,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	4,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		7 Laporan	35,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,050,015,715							1,840,000,000	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	2,018,918,715		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		15 Orang/bulan	1,800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	31,097,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						17,789,000							18,000,000	
1 05 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	17,789,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		7 Dokumen	18,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						183,185,000							220,000,000	
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	37,909,400	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Paket	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Paket	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	23,275,600	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Paket	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				11 Dokumen	12,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		11 Dokumen	15,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	60,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Bulan	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						218,507,000							45,000,000	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		24 Laporan	35,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	183,507,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						87,000,000							92,000,000	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		10 Unit	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Laporan	12,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	12,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen		Persen	100 Persen	5,930,000,000					100 Persen	5,980,000,000		
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						100,000,000						120,000,000		
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	1 Dokumen	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				100 Orang	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	100 Orang	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen		Persen	100 Persen	3,055,000,000					100 Persen	3,085,000,000		
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	1 Dokumen	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				7 Dokumen	1,750,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	7 Dokumen	1,750,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				8 Unit	855,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	8 Unit	855,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				2 Kawasan	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	2 Kawasan	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	1 Dokumen	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				100 Orang	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	100 Orang	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	1 Dokumen	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen		Persen	100 Persen	2,625,000,000						100 Persen	2,625,000,000	
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	12 Dokumen	2,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				233 Orang	500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	233 Orang	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1400 Orang	125,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	1400 Orang	125,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen		Persen	100 Persen	150,000,000						100 Persen	150,000,000	
1 05 03 2.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				4 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	4 Dokumen	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				2 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	2 Dokumen	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04 06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				6 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0	6 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						24,866,526,088						28,487,500,000		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,089,836,408						9,662,500,000		
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						277,500,000						278,500,000		
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		7 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen	80,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	25,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	30,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	7,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	35,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	6,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	115,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	120,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,518,036,408							6,079,000,000	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang 50 Orang/bulan	5,469,836,408	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		50 Orang 50 Orang/bulan	6,000,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	9,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan 12 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan 12 Laporan	70,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						60,000,000							185,000,000	
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10 Dokumen 10 Dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Dokumen 10 Dokumen	60,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 orang	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		50 orang	35,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						600,000,000						710,000,000		
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket 1 Paket	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket 1 Paket	90,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket 2 Paket	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Paket 2 Paket	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Paket	50,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Dokumen	15,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan 12 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan 12 Laporan	300,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	55,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen 12 Dokumen	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen 12 Dokumen	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						360,000,000							770,000,000	
1 06 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 unit	600,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Unit	85,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit 1 Unit	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 unit 1 Unit	85,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						565,000,000							740,000,000	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan 12 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan 12 Laporan	85,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	80,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan 12 Laporan	415,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan 12 Laporan	575,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						709,300,000							900,000,000	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	289,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		30 Unit	350,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	420,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Unit	550,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						1,810,000,000						2,295,000,000		
1 06 02 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)						235,000,000						325,000,000		
1 06 02 2.01 01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Keluarga	250,000,000	Dinas Sosial	
1 06 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				450 Keluarga 450 Keluarga	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Optimalisasi Pelayanan Dasar		450 Keluarga 450 Keluarga	75,000,000	Dinas Sosial	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						1,575,000,000						1,970,000,000		
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				277 orang 277 Orang	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Optimalisasi Pelayanan Dasar		277 orang 277 Orang	150,000,000	Dinas Sosial	
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				26 orang 26 Orang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Optimalisasi Pelayanan Dasar		26 orang 26 Orang	250,000,000	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				277 lembaga 277 Lembaga	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		277 lembaga 277 Lembaga	1,500,000,000	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						2,875,950,900							3,515,000,000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						2,360,000,000							2,950,000,000	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				16007 orang	2,050,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		16007 orang	2,250,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang 100 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		100 Orang 100 Orang	75,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				450 orang 450 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		450 orang 450 Orang	300,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang 150 Orang	160,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		150 Orang 150 Orang	175,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						515,950,900							565,000,000	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		200 Orang	350,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	65,950,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		30 Orang	70,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang 25 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		25 Orang 25 Orang	70,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				30 orang 30 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		30 orang 30 Orang	75,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						11,096,563,300						11,400,000,000		
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						11,096,563,300						11,400,000,000		
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				129417 Keluarga	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			129417 Keluarga	800,000,000	Dinas Sosial	
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				135000 Keluarga	8,872,563,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Optimalisasi Pelayanan Dasar		135000 Keluarga	9,000,000,000	Dinas Sosial	
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				3360 orang 3360 Orang	1,524,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Optimalisasi Pelayanan Dasar		3360 orang 3360 Orang	1,600,000,000	Dinas Sosial	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						850,000,000						1,300,000,000		
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						400,000,000						900,000,000		
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				400 orang	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Optimalisasi Pelayanan Dasar		400 orang	500,000,000	Dinas Sosial	
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						450,000,000						400,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kampung 3 Kampung	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Kampung 3 Kampung	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		100 Orang	300,000,000	Dinas Sosial
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						144,175,480							315,000,000	
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						144,175,480							315,000,000	
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen 1 Dokumen	74,175,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000	Dinas Sosial
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				3 Makam	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Makam	125,000,000	Dinas Sosial
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12 Laporan 12 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan 12 Laporan	40,000,000	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 07							50,605,429,078						32,232,250,000		
2 07 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	Persen	100 Persen	8,903,479,078					100 Persen	9,507,500,000		
2 07 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					192,500,000						195,000,000		
2 07 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	2 Dokumen	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD, Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			6 Laporan	80,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6,771,367,678						7,105,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	6,683,867,678	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		42 Orang/bulan	7,000,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	57,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						17,500,000							17,500,000	
2.07.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	7,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000							50,000,000	
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						347,111,400							465,000,000	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	102,251,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Paket	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Paket	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	19,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6 Dokumen	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						165,000,000							175,000,000	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Unit	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						590,000,000							700,000,000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						770,000,000							800,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Unit	250,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Unit	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Unit	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	Persen		Persen	100 Persen	38,780,350,000						100 Persen	18,850,350,000	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						22,050,350,000							15,650,350,000	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				224 Orang	9,400,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		224 Orang	2,900,350,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03 2.01 03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				3 Unit	12,650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		3 Unit	12,650,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						450,000,000							100,000,000	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				35 Lembaga	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		35 Lembaga	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03 2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						450,000,000							100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 07 03 2.04 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				30 Perusahaan	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		30 Perusahaan	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						15,830,000,000							2,900,000,000	
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				50 Dokumen	15,830,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		50 Dokumen	2,900,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Persen		Persen	100 Persen	1,921,600,000						100 Persen	2,474,400,000	
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						1,250,000,000							1,250,000,000	
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				1816 Orang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1816 Orang	250,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				500 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		500 Orang	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.01 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				0 Orang 20 Orang	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		0 Orang 20 Orang	750,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				60 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		60 Orang	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						397,200,000							650,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				9082 Orang	297,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		9082 Orang	400,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja				100 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		100 Orang	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						274,400,000							274,400,000	
2 07 04 2.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelayanan IMTA				12 Laporan	274,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	274,400,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	1,000,000,000						100 Persen	1,400,000,000	
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						650,000,000							700,000,000	
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				5 Perusahaan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Perusahaan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 2.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				5 Perusahaan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Perusahaan	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						350,000,000						700,000,000			
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				15 Perkara	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		15 Perkara	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				10 Perkara	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		10 Perkara	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				36 Serikat	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		36 Serikat	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Lembaga	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							600,000,000							3,004,150,000	
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lokasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	600,000,000							1 Lokasi	2,104,150,000	
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						600,000,000								2,104,150,000	
3 32 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		3 Laporan	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan					15 Kepala Keluarga	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		15 Kepala Keluarga	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan					450 Kepala Keluarga	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		450 Kepala Keluarga	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						31,590,500,000								3,211,550,000	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik diperkotaan	Persen		Persen	19.11 Persen	31,590,500,000							19.11 Persen	3,211,550,000	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						31,590,500,000								3,211,550,000	
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi				7 Unit	1,411,400,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		7 Unit	141,140,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan				159 Unit	30,179,100,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		159 Unit	3,017,910,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						33,977,802,768								13,405,480,276	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	24,956,802,768							100 Persen	6,864,680,276	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						171,200,000								46,120,000	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 3 Dokumen	80,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 Dokumen 3 Dokumen	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11,700,000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	1,170,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Dokumen	49,500,000					Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		7 Dokumen	4,950,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18,782,602,768								1,932,260,276	
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				165 Orang/Bulan	18,713,802,768			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		165 Orang/Bulan	1,871,380,276	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						8,800,000								880,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	60,000,000			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						325,000,000								140,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				187 Orang	215,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		187 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						768,000,000							317,300,000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	215,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	21,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Paket	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Paket	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	308,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	30,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,000,000							500,000,000	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	100,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6 Unit	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						600,000,000							696,000,000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	576,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4,210,000,000							3,233,000,000	
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	4,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		75 Unit	3,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				25 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		25 Unit	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		20 Unit	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Instrumen dan/atau rujukan Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1,665,000,000						2 Dokumen	166,500,000	
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						665,000,000							66,500,000	
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	585,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 Dokumen	58,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 Dokumen	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						1,000,000,000							100,000,000	
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				3 Dokumen	1,000,000,000				Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		3 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindakan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen		Persen	100 Persen	305,000,000						100 Persen	547,000,000	
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						275,000,000							497,000,000	
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	215,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		2 Dokumen	422,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 Dokumen	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						30,000,000							50,000,000	
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				4 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		4 Laporan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Tutupan vegetasi (ITV)	Poin		Poin	0.42 Poin	1,598,000,000						0.42 Poin	229,800,000	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						1,598,000,000							229,800,000	
2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Ha	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		10 Ha	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				11.51 Ha	1,446,000,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		11.51 Ha	144,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5521.41 Ha	102,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		5521.41 Ha	10,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah usulan TPS B3 yang mendapat rekomendasi	Usaha/Kegiatan		Usaha/Kegiatan	7 Usaha/Kegiatan	50,000,000						7 Usaha/Kegiatan	50,000,000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						50,000,000							50,000,000	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 Laporan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen		Persen	36 Persen	175,000,000						36 Persen	217,500,000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						175,000,000							217,500,000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				17 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		17 Dokumen	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		12 Laporan	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah komunitas kearifan lokal yang diakui keberadaannya dalam PPLH	Komunitas		Komunitas	2 Komunitas	50,000,000						2 Komunitas	50,000,000	
2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						50,000,000							50,000,000	
2 11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkatkan aktivitasnya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lembaga		Lembaga	42 Lembaga	125,000,000						42 Lembaga	190,000,000	
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						125,000,000							190,000,000	
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				0 Lembaga 15 Lembaga	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		0 Lembaga 15 Lembaga	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 Dokumen	90,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Desa/Kelurahan berbudaya lingkungan	Desa/Kelurahan		Desa/Kelurahan	16 Desa/Kelurahan	50,000,000						16 Desa/Kelurahan	50,000,000	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000							50,000,000	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				26 Entitas	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		26 Entitas	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian sengketa PPLH	Persen		Persen	100 Persen	80,000,000						100 Persen	90,000,000	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						80,000,000							90,000,000	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				7 Pengaduan	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		7 Pengaduan	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	Persen		Persen	99 Persen	4,923,000,000						99 Persen	4,950,000,000	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah						4,923,000,000							4,950,000,000	
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				0 Laporan 12 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		0 Laporan 12 Laporan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			163173 Ton	4,500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		163173 Ton	4,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			3 Kelompok	223,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		3 Kelompok	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						420,000,000						925,000,000	
3	28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi	Persen	Persen	70.79 Persen	420,000,000						70.79 Persen	925,000,000	
3	28 04 2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota					420,000,000							925,000,000	
3	28 04 2.01 01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Luas hutan dan lahan Tahura yang terjaga Luas hutan dan lahan Tahura yang terjaga			12 Operasi 34.8 Ha 34.8 Ha	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		12 Operasi 34.8 Ha 34.8 Ha	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28 04 2.01 02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota			0 Operasi 12 Operasi	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		0 Operasi 12 Operasi	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28 04 2.01 03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai KEHATI Tinggi			34.8 Ha	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		34.8 Ha	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28 04 2.01 08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif			1 Desa	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 Desa	85,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28 04 2.01 11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan			1 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 Dokumen	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	12						19,242,127,448						18,032,156,730		
2	12	01													
2	12	01													
2	12	01													
2	12	01	2.01												
2	12	01	2.01	01											
2	12	01	2.01	02											
2	12	01	2.01	03											
2	12	01	2.01	04											
2	12	01	2.01	05											
2	12	01	2.01	06											

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	175,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	2 Laporan	210,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,470,934,448							5,332,866,630	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	5,360,627,448	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		45 Orang/bulan	5,185,366,630	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	110,307,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	147,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	40,000,000						100 Persen	51,450,000	
2.12.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	40,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	12 Laporan	51,450,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						236,000,000							273,500,000	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				85 Paket	56,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		85 Paket	65,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	150,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Orang	160,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				85 Orang	30,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		85 Orang	35,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						920,000,000							1,110,500,000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	179,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		8 Paket	267,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	165,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6 Paket	210,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	57,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Paket	62,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Cetak				4 Laporan	163,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	173,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	31,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	35,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	275,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	298,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Dokumen	65,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47,073,000							480,000,000	
2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	47,073,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Unit	480,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,462,620,000							1,826,810,000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	420,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	650,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	138,620,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	164,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	120,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	137,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	784,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	874,560,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						435,000,000							477,000,000	
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	175,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		15 Unit	201,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Paket	260,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Paket	276,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen		Persen	97 Persen	8,482,170,000						97 Persen	4,595,530,100	
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						3,323,530,100							3,480,530,100	
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				55000 Dokumen	3,323,530,100	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		55000 Dokumen	3,323,530,100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						4,948,639,900							465,000,000	
2 12 02 2.03 02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				150000 Dokumen	170,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		150000 Dokumen	225,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.03 03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				12 Laporan	4,660,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	170,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	118,639,900	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						210,000,000							220,000,000	
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	210,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Laporan	120,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen		Persen	93 Persen	977,330,000						93 Persen	1,858,500,000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen		Persen	100 Persen	364,863,370						100 Persen	600,000,000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	364,863,370	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Layanan	375,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						459,078,290							893,500,000	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	228,737,290	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	265,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	230,341,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	288,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						153,388,340							365,000,000	
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				4 Laporan	153,388,340	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	365,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase instansi yang menggunakan Database Kependudukan	Persen		Persen	100 Persen	775,000,000						100 Persen	1,510,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						230,000,000						320,000,000		
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				350 Dokumen	145,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		350 Dokumen	225,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				20 Dokumen	85,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		20 Dokumen	95,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						545,000,000							1,015,000,000	
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	350,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	715,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	195,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	215,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						18,240,245,655							25,672,925,622	
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	7,985,559,555						100 Persen	8,827,702,302	
2 13 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	152,280,000						4 Laporan	182,000,000	
2 13 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Dokumen	96,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Laporan	66,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	6,035,559,555						2 Laporan	6,686,702,302	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/Bulan	5,995,559,555		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		38 Orang/Bulan	6,638,702,302	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhrit Rahun SKPD				12 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	48,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	766,000,000						3 Laporan	724,000,000	
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket 60 Paket	216,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 Paket 60 Paket	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Dokumen	24,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				60 Orang 0 Orang	530,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		60 Orang 0 Orang	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	291,000,000						5 Laporan	350,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan				4 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Paket	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				11 Paket	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		11 Paket	48,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				7 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		7 Paket	36,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				12 Dokumen	21,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	26,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	356,720,000						3 Laporan	529,000,000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	21,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	26,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Laporan	335,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	403,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	384,000,000						2 Laporan	356,000,000	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya				26 Unit	130,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		26 Unit	156,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 0 Unit	254,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit 0 Unit	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Program Penataan Desa Kategori Optimal	Persen		Persen	100 Persen	1,400,000,000						100 Persen	1,700,000,000	
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						1,400,000,000							1,700,000,000	
2 13 02 2.01 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				2 Unit 0 Unit	1,400,000,000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil **)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Unit 0 Unit	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persen		Persen	100 Persen	10,000,000						100 Persen	20,000,000	
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						10,000,000							20,000,000	
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10,000,000		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa tertib administrasi	Persen		Persen	90 Persen	6,673,686,100						90 Persen	8,440,423,320	
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						6,673,686,100							8,440,423,320	
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa				5 Dokumen	437,500,000		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Dokumen	525,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Desa				1 Dokumen	17,500,000		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	21,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa				4 Dokumen	4,768,786,100		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	5,722,543,320	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas				540 Orang	250,000,000		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		540 Orang	360,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Perberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				0 Dokumen 1 Dokumen	962,400,000		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		0 Dokumen 1 Dokumen	1,166,880,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaam Aset Desa				0 Dokumen 1 Dokumen	187,500,000		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 Dokumen 1 Dokumen	225,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				270 Orang	50,000,000		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		270 Orang	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Persen		Persen	100 Persen	2,171,000,000						100 Persen	6,684,800,000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						2,171,000,000							6,684,800,000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga 0 Lembaga	450,000,000		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Lembaga 0 Lembaga	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 05 2.01 04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				0 Unit 1 unit	187,500,000		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar	0 Unit 1 unit	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemeritahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				2 Unit	103,500,000		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	2 Unit	124,200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	180,000,000		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Laporan	210,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	750,000,000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar	1 Laporan	750,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	500,000,000		Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						15,078,171,933						19,404,739,126		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	10,841,671,933						100 Persen	12,260,789,126	
2 08 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	Laporan	4 Laporan	196,330,000						4 Laporan	270,413,000	
2 08 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			5 dokumen	82,450,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja	5 dokumen	90,695,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD			1 dokumen	10,190,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja	1 dokumen	11,209,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	6,590,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja	1 dokumen	7,249,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 dokumen	5,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja	1 dokumen	60,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 dokumen	5,900,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja	1 dokumen	6,490,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9 laporan	85,700,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja	9 laporan	94,270,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9,342,940,933						10,277,235,026		
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 orang/bulan	9,277,240,933	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		53 orang/bulan	10,204,965,026	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				1 dokumen	37,250,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 dokumen	40,975,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 laporan	28,450,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		4 laporan	31,295,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10,000,000						11,000,000		
2 08 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				2 laporan	10,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		2 laporan	11,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						222,500,000						299,750,000		
2 08 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 paket	60,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 paket	66,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 dokumen	12,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 dokumen	13,750,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		6 Orang	165,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						234,081,000						499,489,100		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	25,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 paket	27,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	21,081,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 paket	23,189,100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan				1 paket	28,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 paket	30,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	40,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 paket	44,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 dokumen	22,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		12 laporan	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						407,000,000							431,200,000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan				12 laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		12 laporan	27,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	45,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 laporan	49,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	337,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		12 laporan	354,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						428,820,000							471,702,000	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				135 unit	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		135 unit	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	193,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 unit	213,202,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	135,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 unit	148,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD Responsip Gender	Persen		Persen	61,29 Persen	1,783,000,000						61,29 Persen	2,016,300,000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	125,000,000						1 Dokumen	192,500,000	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 dokumen	27,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				54 perangkat daerah	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	54 perangkat daerah	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				54 perangkat daerah	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	54 perangkat daerah	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	558,000,000						1 Dokumen	613,800,000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	458,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 dokumen	503,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 organisasi	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	5 organisasi	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,100,000,000						1 Dokumen	1,210,000,000	
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				5 lembaga	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	5 lembaga	165,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 orang	850,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	100 orang	935,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	Persen		Persen	100 Persen	225,000,000						100 Persen	357,500,000	
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50,000,000						1 Dokumen	165,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	75,000,000						1 Dokumen	82,500,000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				10 orang	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	10 orang	82,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100,000,000						1 Dokumen	110,000,000	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 orang	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	100 orang	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan	Persen		Persen	100 Persen	1,528,500,000						100 Persen	2,460,150,000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,453,500,000						1 Dokumen	2,038,850,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 laporan	1,453,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 laporan	1,598,850,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	75,000,000						1 Dokumen	82,500,000	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				26 layanan	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	26 layanan	82,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000						100 Persen	110,000,000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100,000,000						1 Dokumen	110,000,000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 dokumen	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persen		Persen	65,38 Persen	300,000,000						65,38 Persen	550,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50,000,000						1 Dokumen	165,000,000	
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				7 organisasi	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	7 organisasi	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	250,000,000						1 Dokumen	385,000,000	
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 orang	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	50 orang	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 dokumen	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan	Persen		Persen	100 Persen	300,000,000						100 Persen	1,650,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50,000,000						1 Dokumen	165,000,000	
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	250,000,000						1 Dokumen	825,000,000	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 orang	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	10 orang	275,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					18,564,019,423							18,877,723,713	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan kependudukan	Persen		Persen	5 Persen	569,430,000						5 Persen	610,130,000	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah yang memperoleh pembinaan/panduan untuk menerapkan kebijakan pendidikan kependudukan	Sekolah		Sekolah	10 Sekolah	217,000,000						10 Sekolah	238,700,000	
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal				20 Satuan Pendidikan	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	20 Satuan Pendidikan	82,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal				1 laporan	42,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 laporan	46,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	02	2.02		Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data urusan pengendalian penduduk dan KB	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	352,430,000						5 Dokumen	371,430,000	
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				2 Laporan	40,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		2 Laporan	44,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				4 dokumen	37,630,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		4 dokumen	37,630,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 Laporan	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				0 Dokumen	124,800,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		0 Dokumen	124,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				12 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		12 Laporan	55,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	Persen		Persen	9,04 Persen	11,369,193,000						9,04 Persen	11,551,420,300	
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi(KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2,139,215,000						1 Dokumen	2,139,215,000	
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				3 organisasi 0 Organisasi	4,375,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	3 organisasi 0 Organisasi	4,375,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 dokumen	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				26 unit	60,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	26 unit	60,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang				1 dokumen	145,640,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 dokumen	145,640,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				196 laporan	811,200,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	196 laporan	811,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				13 laporan	1,053,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	13 laporan	1,053,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 laporan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 laporan	40,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB(PKB/PLKB) yang didayagunakan	Orang		Orang	2547 Orang	2,919,109,000						2547 Orang	3,066,336,300	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini lapangan Oleh PKB/PLKB				1 organisasi	1,472,273,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	1 organisasi	1,619,500,300	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)				2430 orang	1,446,836,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0	2430 orang	1,446,836,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rasio akseptor KB	Persen		Persen	75.67 Persen	5,112,119,000						75.67 Persen	5,137,119,000	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0 Laporan	19,800,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		0 Laporan	19,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)				4833 orang	999,769,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		4833 orang	999,769,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB				20 unit	3,826,350,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		20 unit	3,826,350,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya				1 laporan	16,200,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		1 laporan	16,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				78 orang	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		78 orang	165,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				50 orang	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		50 orang	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,198,750,000						1 Dokumen	1,208,750,000	
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB				3 organisasi	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0		3 organisasi	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di kampung KB				57 kampung	1,098,750,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0		57 kampung	1,098,750,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok Ketahanan (BKB, BKR dan BKL)	Persen		Persen	20.87 Persen	6,625,396,423						20.87 Persen	6,716,173,413	
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	6,549,231,923						1 Dokumen	6,632,392,463	
2 14 04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)				1 laporan	500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	0		1 laporan	550,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Penyusunan perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	185,000,000						100 Persen	260,000,000	
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	90,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	6 Dokumen	80,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	20,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	15,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	15,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	55,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	6 Laporan	110,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	8,746,929,268						100 Persen	8,756,929,268	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	8,686,929,268	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	12 Orang/bulan	8,686,929,268	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	35,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	35,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	10,000,000						100 persen	17,500,000	
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	10,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	10,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	310,000,000						100 Persen	387,500,000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	115,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	2 Paket	85,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	35,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	6 Dokumen	35,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	60,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	2 Orang	60,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	100 Orang	200,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	445,000,000						100 Persen	665,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	120,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	2 Paket	120,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	20,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	55,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	2 Paket	110,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	35,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	120,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	150,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	175,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengadaan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	370,000,000						100 Persen	410,000,000	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	60,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	3 Paket	60,000,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	5 Unit	50,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Paket	260,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	2 Paket	300,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	11,670,000,000						100 Persen	13,670,000,000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan				12 Laporan	10,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Penerangan Jalan - Penyediaan Penerangan Jalan		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	12,000,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	50,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,620,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	1,620,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	860,000,000						100 Persen	860,000,000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	26 Unit	300,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	60,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	5 Unit	60,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	200,000,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Sipil Negara	3 Unit	300,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen		Persen	50 Persen	27,907,070,000						50 Persen	27,256,000,000	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang Memadai	Persen		Persen	100 Persen	230,000,000						100 Persen	276,000,000	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				3 Dokumen	230,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Ruas Jalan Di Kabupaten Sumedang	3 Dokumen	276,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Fasilitas Jalan di Ruas Jalan Kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	19,049,000,000						100 Persen	14,850,000,000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				860 Unit	16,589,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum Pajak Penerangan Jalan - Penyediaan Penerangan Jalan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Ruas Jalan Di Kabupaten Sumedang	860 Unit	7,800,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1100 Unit	2,460,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Penerangan Jalan - Penyediaan Penerangan Jalan		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Ruas Jalan Di Kabupaten Sumedang	1100 Unit	6,500,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	Persen		Persen	100 Persen	225,000,000						100 Persen	2,420,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Paket	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Awak Angkutan Umum	1 Paket	80,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Angkutan Umum Yang Terlayani Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang ditingkatkan Kapasitasnya				325 Kendaraan 20 Orang	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Awak Angkutan Umum	325 Kendaraan 20 Orang	120,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tersedianya Jumlah Ijin Penyelenggaraan Parkir dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persen		Persen	100 Persen	5,070,000,000						100 Persen	6,250,000,000	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				300 Dokumen	4,900,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	0	300 Dokumen	6,000,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	170,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	0	12 Laporan	250,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Laik Jalan	persen		persen	100 persen	1,035,000,000						100 persen	1,105,000,000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				9 Unit	350,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Awak Angkutan Umum di Kabupaten Sumedang	9 Unit	350,000,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				10500 Unit	85,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Awak Angkutan Umum di Kabupaten Sumedang	10500 Unit	110,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				10500 Dokumen	270,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Awak Angkutan Umum di Kabupaten Sumedang	10500 Dokumen	300,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 Paket	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Awak Angkutan Umum di Kabupaten Sumedang	2 Paket	300,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Awak Angkutan Umum di Kabupaten Sumedang	4 Laporan	35,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	1,728,070,000						100 Persen	1,445,000,000	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Ruas Jalan Di Kabupaten Sumedang	2 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	1,148,070,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Ruas Jalan Di Kabupaten Sumedang	4 Laporan	950,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				6 Laporan	80,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Ruas Jalan Di Kabupaten Sumedang	6 Laporan	95,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.07	Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Peretujuan Analisa Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	90,000,000						100 Persen	90,000,000	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				1 Laporan	90,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Sumedang	1 Laporan	90,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Persen		Persen	100 Persen	150,000,000						100 Persen	320,000,000	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	0	12 Laporan	320,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan di Kabuapten Sumedang	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000						100 Persen	100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan di Kabupaten Sumedang	Persen		Persen	100 Persen	80,000,000						100 Persen	100,000,000	
2 15 02 2.12 01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	150,000,000						100 Persen	200,000,000	
2 15 02 2.14 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				917 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Awak Angkutan Umum di Kabupaten Sumedang	917 Laporan	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						32,730,031,276							20,626,600,500	
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	9,329,462,476						100 Persen	8,896,600,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	16 Dokumen 100 Persen	193,325,600						16 Dokumen 100 Persen	170,500,000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	5 Dokumen	55,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	2 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	2 Dokumen	4,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	72,325,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	5 Laporan	85,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Persen		Laporan Persen	12 Laporan 100 Persen	6,856,559,126						12 Laporan 100 Persen	6,462,100,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/Bulan	6,779,059,126	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfosa nditik Kab. Sumedang	41 Orang/Bulan	6,375,100,500	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfosa nditik Kab. Sumedang	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	57,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfosa nditik Kab. Sumedang	12 Laporan	65,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Persen		Laporan Persen	12 Laporan 100 Persen	99,250,000						12 Laporan 100 Persen	40,000,000	
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfosa nditik Kab. Sumedang	3 Dokumen	25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	79,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfosa nditik Kab. Sumedang	70 Orang	15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persen		Laporan Persen	12 Laporan 100 Persen	840,335,750						12 Laporan 100 Persen	689,000,000	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	225,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfosa nditik Kab. Sumedang	10 Paket	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfosa nditik Kab. Sumedang	10 Paket	40,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	8,055,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	10 Paket	9,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	32,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	12 Laporan	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Persen		Laporan Persen	12 Laporan 100 Persen	136,000,000						12 Laporan 100 Persen	285,000,000	
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	27,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	2 Unit	35,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	108,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	10 Unit	250,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Persen		Laporan Persen	12 Laporan 100 Persen	676,992,000						12 Laporan 100 Persen	630,000,000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	89,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	12 Laporan	150,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	72,992,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	12 Laporan	80,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	515,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	12 Laporan	400,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Persen		Laporan Persen	12 Laporan 100 Persen	527,000,000						12 Laporan 100 Persen	620,000,000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	149,856,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	20 Unit	200,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	10 Unit	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	362,143,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Diskominfo nditik Kab. Sumedang	1 Unit	400,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Persen		Persen	60 Persen	4,511,000,000						60 Persen	3,200,000,000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Mendapatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	4,511,000,000						100 Persen 100 Persen	3,200,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	2,050,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	54 OPD	1 Dokumen	450,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	54 OPD	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	835,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hibah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	54 OPD	1 Dokumen	750,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	54 OPD	3 Layanan	200,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				65 Orang	476,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	54 OPD	65 Orang	200,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Desa Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	18,889,568,800						100 Persen 100 Persen	8,530,000,000	
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah Terkelolanya Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah Persen		Perangkat Daerah Persen	54 Perangkat Daerah 100 Persen	5,850,000,000						54 Perangkat Daerah 100 Persen	6,750,000,000	
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	250,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					62 Unit	5,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	62 Unit	6,500,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah Terkelolanya E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Persen			Sistem Persen	14 Sistem 100 Persen	13,039,568,800						14 Sistem 100 Persen	1,780,000,000		
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					12 Unit	420,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	12 Unit	460,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City					2 Dokumen	11,774,568,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	450,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					1 Dokumen	480,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	550,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE					3 Dokumen	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	3 Dokumen	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							505,000,000							380,000,000		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Sesuai dengan Standar	Persen			Persen	100 Persen	505,000,000							100 Persen	380,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Data Pembangunan Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Persen		Dokumen Persen	2 Dokumen 100 Persen	505,000,000						2 Dokumen 100 Persen	380,000,000	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kab. Sumedang	1 Dokumen	90,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kab. Sumedang	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				54 Orang	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kab. Sumedang	54 Orang	80,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2 20 02 2.01 05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kab. Sumedang	1 Unit	110,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							831,000,000						714,000,000	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi	Persen		Persen	62,01 Persen	831,000,000						62,01 Persen	714,000,000	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indeks KAMI Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Score Persen		Score Persen	400 Score 100 Persen	631,000,000						400 Score 100 Persen	504,000,000	
2 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	112,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	55 OPD dan 270 Desa	1 Dokumen	117,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	109,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	55 OPD dan 270 Desa	12 Laporan	112,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	270,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	55 OPD dan 270 Desa	12 Laporan	125,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				54 Perangkat Daerah	140,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	55 OPD dan 270 Desa	54 Perangkat Daerah	150,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Titik Yang Diamankan dan Diterapkan Pemerintah Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen Persen	Persen Persen	100 Persen 100 Persen	200,000,000							100 Persen 100 Persen	210,000,000			
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				54 Perangkat Daerah	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	55 OPD dan 270 Desa	54 Perangkat Daerah	210,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						19,966,418,702									33,941,983,515	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13,466,918,702								16,401,983,515		
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						222,750,850								325,000,000		
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	63,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Dokumen	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	21,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	19,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	23,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	45,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	23,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 dokumen	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	71,750,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		16 Laporan	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9,394,636,702							8,987,323,515	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	9,350,470,702				Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		70 Orang/bulan	8,927,323,515	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh		12 Dokumen	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen	24,166,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						60,000,000							150,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						49,205,000							725,000,000	
2 17 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	19,205,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						555,000,000							1,530,000,000	
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Paket	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Paket	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Paket	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	170,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Paket	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	190,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 laporan	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,050,000,000							1,560,000,000	
2 17 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Unit	760,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				25 Unit	125,000,000						25 Unit	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		35 Unit	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		10 Unit	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,138,326,150							1,474,660,000	
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,018,326,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	1,249,660,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						997,000,000							1,650,000,000	
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	290,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		29 Unit	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				48 Unit	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		48 Unit	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		40 Unit	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		20 Unit	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	555,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	900,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	115,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Unit	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						80,000,000							100,000,000	
2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						80,000,000							100,000,000	
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit Usaha	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Unit Usaha	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						50,000,000							200,000,000	
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						50,000,000							200,000,000	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				251 Unit Usaha	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		251 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				251 Unit Usaha	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		251 Unit Usaha	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						100,000,000							300,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100,000,000						300,000,000		
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				50 Unit Usaha	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		50 Unit Usaha	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				5 Unit Usaha	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Unit Usaha	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						100,000,000						300,000,000		
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						100,000,000						300,000,000		
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				75 Orang	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik- PK2UMK		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		75 Orang	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						420,000,000						0		
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						420,000,000						0		
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				25 Orang	420,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		25 Orang	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						804,200,000						7,000,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						900,000,000						900,000,000		
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						120,000,000						300,000,000		
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	12 Laporan	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						630,000,000						300,000,000		
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	12 Laporan	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	530,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	12 Laporan	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150,000,000						300,000,000		
3 30 04 2.03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				12 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						200,000,000						600,000,000		
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						600,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				3 Pelaku Usaha	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		3 Pelaku Usaha	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						150,000,000							1,800,000,000	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						150,000,000							1,800,000,000	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				28502 Unit	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		28502 Unit	1,000,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				50 Orang	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		50 Orang	500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						255,000,000							1,500,000,000	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						255,000,000							1,500,000,000	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				2 UMKM	255,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		2 UMKM	500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1,200,000,000						2,575,000,000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1,050,000,000							1,175,000,000	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						1,050,000,000							1,175,000,000	
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				5 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				5 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				5 Dokumen	375,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				8 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		8 Dokumen	500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						100,000,000							500,000,000	
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						100,000,000							500,000,000	
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				2 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						50,000,000						900,000,000		
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						50,000,000						900,000,000		
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				12 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	12 Dokumen	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						12,882,177,906						14,327,000,000		
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	9,879,405,222					100 Persen	11,377,000,000		
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						230,825,000						207,000,000		
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				5 Dokumen	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	5 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2 18 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	3 Dokumen	12,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2 18 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	5 Dokumen	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	6,675,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Dokumen	102,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		24 Dokumen	110,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6,389,405,222							6,825,000,000	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang 70 Orang/bulan	6,289,405,222		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		60 Orang 70 Orang/bulan	6,700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	85,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						95,550,000							115,000,000	
2 18 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	45,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				80 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		80 Orang	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						591,716,000							915,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Paket	450,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	117,216,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			2 Paket	110,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	121,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 paket	115,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				12 Dokumen	38,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	165,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						121,909,000							600,000,000	
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	121,909,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,100,000,000							2,265,000,000	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	375,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Dokumen	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	165,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,615,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	1,700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						350,000,000							450,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		20 Unit	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		30 Unit	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Persen		Persen	90 Persen	1,161,442,036						90 Persen	1,315,000,000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						75,000,000							215,000,000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Investor penerima fasilitas/insentif Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				10 Perusahaan 10 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		10 Perusahaan 10 Dokumen	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah Jumlah Perusahaan yang dievaluasi untuk diberikan insentif				10 Kegiatan Usaha 10 Perusahaan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		10 Kegiatan Usaha 10 Perusahaan	65,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						1,086,442,036							1,100,000,000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi/Jumlah Peta Peluang Investasi				5 Dokumen 5 Dokumen	1,086,442,036		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen 5 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	Persen		Persen	4 Persen	550,000,000						4 Persen	450,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						550,000,000						450,000,000		
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Penanaman Modal				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman modal				2 Kali/Media	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	2 Kali/Media	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	Persen		Persen	87 Persen	632,416,648					87 Persen	650,000,000		
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						632,416,648						650,000,000		
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah SK Izin Terbit Tepat Waktu				4000 Pelaku Usaha 4000 SK Izin	482,416,648		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	4000 Pelaku Usaha 4000 SK Izin	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan terpantau yang sudah memiliki izin				50 Kegiatan Usaha 50 Perusahaan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar	50 Kegiatan Usaha 50 Perusahaan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi yang dilayani Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				60 Layanan 60 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		60 Layanan 60 Orang	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah perusahaan penerima insentif				50 Kegiatan Usaha 50 Perusahaan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		50 Kegiatan Usaha 50 Perusahaan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	Persen		Persen	85 Persen	458,914,000						85 Persen	315,000,000	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						458,914,000							315,000,000	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang sudah terpantau				200 Perusahaan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		200 Perusahaan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan yang dibina				200 Pelaku Usaha 200 Perusahaan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		200 Pelaku Usaha 200 Perusahaan	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				200 Kegiatan Usaha	408,914,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal		Optimalisasi Pelayanan Dasar		200 Kegiatan Usaha	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	Persen		Persen	100 Persen	200,000,000						100 Persen	220,000,000	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000							220,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah dokumen data informasi perizinan				4 Dokumen 4 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen 4 Dokumen	220,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2,735,000,000							14,840,000,000		
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin		Poin	92 Poin	2,735,000,000							92 Poin	14,840,000,000	
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelola Perpustakaan dan Perpustakaan Se-Kabupaten Sumedang	Laporan		Laporan	6 Laporan	2,290,000,000							6 Laporan	2,940,000,000	
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				2 Layanan	275,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pengelola Perpustakaan dan Perpustakaan Se-Kabupaten Sumedang	2 Layanan	450,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pengelola Perpustakaan dan Perpustakaan Se-Kabupaten Sumedang	1 Perpustakaan	120,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2 23 02 2.01 03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				6000 Eksemplar	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pengelola Perpustakaan dan Perpustakaan Se-Kabupaten Sumedang	6000 Eksemplar	550,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				50 Perpustakaan	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pengelola Perpustakaan dan Perpustakaan Se-Kabupaten Sumedang	50 Perpustakaan	170,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan					105 Perpustakaan	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pengelola Perpustakaan dan Perpustakaan Se-Kabupaten Sumedang	105 Perpustakaan	275,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					105 Orang	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pengelola Perpustakaan dan Perpustakaan Se-Kabupaten Sumedang	105 Orang	275,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi					82737 Layanan	140,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pengelola Perpustakaan dan Perpustakaan Se-Kabupaten Sumedang	82737 Layanan	350,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan					10000 Eksemplar	1,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pengelola Perpustakaan dan Perpustakaan Se-Kabupaten Sumedang	10000 Eksemplar	350,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					250 Eksemplar	25,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pengelola Perpustakaan dan Perpustakaan Se-Kabupaten Sumedang	250 Eksemplar	400,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan			Laporan	2 Laporan	445,000,000						2 Laporan	11,900,000,000	
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1 Perpustakaan	60,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Perpustakaan	11,200,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan					1 Paket 50 Perpustakaan	310,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Paket 50 Perpustakaan	300,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 23 02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				30 Orang	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	30 Orang	400,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						11,822,434,471							13,788,514,031		
2 24 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	10,429,434,471							100 Persen	10,413,514,031	
2 24 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	208,094,650							5 Laporan	223,094,650	
2 24 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	110,094,650	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	5 Dokumen	125,094,650	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2 24 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2 24 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	12,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2 24 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	12,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2 24 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	12,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2 24 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	6 Laporan	50,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Laporan		Laporan Laporan	2 Laporan 3 Laporan	8,376,996,721						2 Laporan 3 Laporan	8,381,996,721	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	8,324,803,271	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	12 bulan	8,324,803,271	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	12 Dokumen	20,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	37,193,450	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	12 Laporan	37,193,450	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	23,100,000						1 Laporan	23,100,000	
2.24.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	23,100,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	3 Dokumen	23,100,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	205,322,660						6 Laporan	180,322,660	
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	33,057,160	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	12 Paket	33,057,160	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Paket	10,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Paket	30,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	69,085,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 Paket	44,085,500	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Laporan	24,780,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	12 Laporan	24,780,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	38,400,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	15 Laporan	38,400,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	590,000,000						2 Laporan	590,000,000	
2.24.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Laporan	530,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	5 Laporan	530,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	60,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	10 Unit	60,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	815,000,000						2 Laporan	815,000,000	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	12 Laporan	200,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan 94 Orang	615,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	12 Laporan 94 Orang	615,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	210,920,440						3 Laporan	200,000,000	
2 24 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Laporan	134,020,440	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	12 Laporan	123,100,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2 24 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	26,900,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	18 Unit	26,900,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2 24 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Laporan 1 Unit	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	3 Laporan 1 Unit	50,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Arsip yang memadai	Kategori Persen		Kategori Persen	BB Kategori 100 Persen	510,000,000						BB Kategori 100 Persen	2,900,000,000	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	2 Laporan	250,000,000						2 Laporan	1,200,000,000	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				6000 Berkas	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dokumen Arsip Kabupaten Sumedang	6000 Berkas	600,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				61 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dokumen Arsip Kabupaten Sumedang	61 Laporan	600,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	80,000,000						1 Laporan	700,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				500 Arsip	80,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dokumen Arsip Kabupaten Sumedang	500 Arsip	700,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	2 Laporan	180,000,000						2 Laporan	1,000,000,000		
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				250 Penggura	90,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dokuem Arsip Kabupaten Sumedang	250 Penggura	400,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				63 Laporan	90,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dokuem Arsip Kabupaten Sumedang	63 Laporan	600,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal	Kategori		Kategori	BB Kategori	883,000,000							BB Kategori	475,000,000	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Laporan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Laporan		Laporan	1 Laporan	75,000,000							1 Laporan	150,000,000	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				500 Arsip	75,000,000		Pendapatan Bagi Hasil **)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dokumen Arsip Kabupaten Sumedang	500 Arsip	150,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	50,000,000							1 Laporan	75,000,000	
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				500 Arsip	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Dokumen Arsip Kabupaten Sumedang	500 Arsip	75,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	24	03	2.03															
2	24	03	2.03	02														
2	24	03	2.04															
2	24	03	2.04	01														
2	24	03	2.05															
2	24	03	2.05	01														
3																		
3	25																	
3	25	01																

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						153,000,000						0		
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	63,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	10,190,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	6,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	5,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	57,320,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		8 Laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11,543,087,155							0	
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	11,513,087,155		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Orang/bulan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						76,000,000						0		
3 25 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				5 Orang	39,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Orang	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	37,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		50 Orang	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						593,700,000						0		
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	245,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Paket	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	42,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Paket	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	29,700,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Paket	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	27,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						45,800,000						0		
3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	18,300,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	27,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						762,000,000						0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	702,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						206,500,000							0	
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				87 Unit	191,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		87 Unit	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						130,000,000							0	
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						105,000,000							0	
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah data dan informasi Sumber Daya Ikan Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen 1 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		0 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				10 Unit	80,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		10 Unit	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						25,000,000							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	25,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		100 Orang	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						1,775,000,000							0	
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						25,000,000							0	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				6 Kelompok	25,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		6 Kelompok	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						1,750,000,000							0	
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	1,665,000,000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		3 Unit	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				40 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		40 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						160,000,000							2,062,500,000	
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						160,000,000							2,062,500,000	
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	160,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	937,500,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						100,000,000							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						25,000,000						0		
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						75,000,000						0		
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				24 Unit Usaha	75,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	24 Unit Usaha	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							21,601,300,000						0	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						8,468,800,000							0	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						133,500,000							0	
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				20 Laporan	133,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	20 Laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						40,000,000							0	
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				20 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	20 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						8,295,300,000							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				2500 Ekor	8,295,300,000		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		2500 Ekor	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						11,200,000,000						0		
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						100,000,000						0		
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						11,000,000,000						0		
3 27 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	11,000,000,000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 03 2.04	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum						100,000,000						0		
3 27 03 2.04 02	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola				10 Ha	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		10 Ha	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						1,850,000,000						0		
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						170,000,000						0		
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				35000 Laporan	170,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		35000 Laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						1,500,000,000						0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	1 Laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						180,000,000						0		
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				10 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	10 Laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				20 Laporan	80,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	20 Laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 04 2.04 04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				60 Dokumen	50,000,000		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer			60 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						50,000,000						0		
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						50,000,000						0		
3 27 05 2.01 04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				1 laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	1 laporan	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						32,500,000						0		
3 27 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						32,500,000						0		
3 27 06 2.01 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				10 Dokumen	32,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	10 Dokumen	0	Dinas Perikanan dan Peternakan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA							73,495,000,000						30,060,000,000	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda yang dibina	Orang		Orang	700 Orang	1,615,000,000					700 Orang	3,185,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						1,400,000,000						1,585,000,000		
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				15 Orang	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		15 Orang	80,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 orang	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		100 orang	175,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				15 Orang 0 Orang	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		15 Orang 0 Orang	80,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				75 orang	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		75 orang	125,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.01 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 unit 0 Unit	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 unit 0 Unit	125,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				100 orang 0 Orang	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		100 orang 0 Orang	125,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				654 orang	750,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		654 orang	750,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						215,000,000							1,600,000,000	
2 19 02 2.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				50 Orang	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		50 Orang	800,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	165,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	800,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Penyelenggaraan Keolahragaan	Event		Event	10 Event	71,330,000,000						10 Event	26,325,000,000	
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						750,000,000							2,200,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				300 orang	750,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		300 orang	1,750,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						4,080,000,000							5,250,000,000	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				20 Orang	480,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		20 Orang	650,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				100 Orang	3,500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		100 Orang	4,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	600,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						6,950,000,000							15,750,000,000	
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	6,950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		2 Organisasi	15,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						59,550,000,000							2,850,000,000	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	37,350,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	850,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.05 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	700,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	500,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				2 Unit	400,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	500,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 2.05 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Dokumen	21,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Anggota dan Organisasi Pramuka yang Dibina	Organisasi		Organisasi	26 Organisasi	550,000,000						26 Organisasi	550,000,000	
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						550,000,000							550,000,000	
2 19 04 2.01 07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	550,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	550,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					35,677,350,000							4,405,000,000	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase OPK yang dikembangkan	Persen		Persen	100 Persen	32,327,350,000						100 Persen	2,850,000,000	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						500,000,000							650,000,000	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				0 Objek 5 Objek	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		0 Objek 5 Objek	300,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				200 Orang	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		200 Orang	350,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						31,377,350,000							1,250,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	31,077,350,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		5 Objek	550,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	350,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				10 Sertifikat	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		10 Sertifikat	350,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						450,000,000							950,000,000	
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				8 Objek	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		8 Objek	300,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				4 Unit	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		4 Unit	650,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Persen		Persen	100 Persen	150,000,000						100 Persen	120,000,000	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						150,000,000							120,000,000	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		50 Orang	50,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang dibina	Persen		Persen	100 Persen	400,000,000						100 Persen	260,000,000	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						400,000,000							260,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				80 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		80 Orang	130,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				10 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		10 Dokumen	130,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen		Persen	20.62 Persen	2,250,000,000						20.62 Persen	625,000,000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						100,000,000							250,000,000	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		10 Objek	250,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						2,150,000,000							375,000,000	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				4 Objek	1,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		4 Objek	125,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	1,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Objek	125,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 Objek	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Objek	125,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Kunjungan wisatawan museum Persentase OPK yang dikembangkan	Orang Persen		Orang Persen	4000 Orang 100 Persen	550,000,000						4000 Orang 100 Persen	550,000,000	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						550,000,000							550,000,000	
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	175,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	350,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	1 Unit	375,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						24,443,988,115						15,940,000,000		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	11,718,988,115					100 Persen	9,140,000,000		
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300,000,000						200,000,000		
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	175,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	7 Dokumen	60,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	2 Dokumen	15,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 laporan	65,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		6 laporan	65,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6,251,463,429							6,260,000,000	
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	6,213,263,429			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 bulan	6,200,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						8,200,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar			15,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		7 laporan	45,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						320,000,000							110,000,000	
3 26 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Laporan	70,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		3 Laporan	30,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 orang	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		4 orang	80,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						583,500,000							1,095,000,000	
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	130,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 paket	120,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	25,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 paket	150,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	90,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 paket	150,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	73,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 paket	150,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	75,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,159,524,686							375,000,000	
3 26 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		3 Unit	75,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit 0 Unit	109,524,686	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		2 Unit 0 Unit	100,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,530,000,000							520,000,000	
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	85,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	100,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	335,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						574,500,000							525,000,000	
3 26 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit 22 Unit	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		0 Unit 22 Unit	175,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 20 Unit	74,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		0 Unit 20 Unit	175,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	175,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan	ODTW		ODTW	7 ODTW	2,000,000,000						7 ODTW	1,775,000,000	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						1,550,000,000							1,100,000,000	
3 26 02 2.01 01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				10 Lokasi	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		10 Lokasi	275,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	275,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Lokasi	275,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	275,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						450,000,000							400,000,000	
3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				1 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	100,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 02 2.04 05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi				3 Unit Usaha	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		3 Unit Usaha	100,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	Event		Event	14 Event	2,400,000,000						14 Event	1,950,000,000	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						2,400,000,000							1,950,000,000	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen 1 Dokumen	750,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		0 Dokumen 1 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Laporan	1,150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	750,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor		Sub Sektor	16 Sub Sektor	3,010,000,000						16 Sub Sektor	1,850,000,000	
3 26 04 2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						2,460,000,000							1,100,000,000	
3 26 04 2.01 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				2 Unit	2,460,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		2 Unit	1,100,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						550,000,000							750,000,000	
3 26 04 2.02 05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				0 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		0 Dokumen 1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 04 2.02 08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	175,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 04 2.02 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	325,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitas dan kompetensi sumber dayanya	Orang		Orang	140 Orang	5,315,000,000						140 Orang	1,225,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						3,150,000,000						1,050,000,000		
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				35 Orang	1,225,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		35 Orang	100,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				3 Laporan	1,775,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		3 Laporan	750,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		100 Orang	200,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3 26 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						2,165,000,000							175,000,000	
3 26 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				80 Orang	2,165,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		80 Orang	175,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							25,741,103,300						13,427,700,000	
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola	Persen		Persen	100 Persen	1,550,000,000						100 Persen	8,041,000,000	
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan yang disediakan Jumlah Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Unit Unit		Unit Unit	24 Unit 10 Unit	1,550,000,000						24 Unit 10 Unit	8,041,000,000	
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				10 Unit	1,300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani Lumbung Pangan	10 Unit	4,114,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 02 2.01 05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan				1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani Lumbung Pangan	1 Dokumen	275,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	Persen		Persen	95 Persen	19,262,563,300						95 Persen	3,294,500,000	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Coefficient off Varians (CV) maksimum harga pangan pokok di tingkat konsumen	Persen		Persen	5 Persen	100,000,000						5 Persen	1,298,000,000	
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				12 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani Lumbung Pangan	12 Laporan	55,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				12 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani Lumbung Pangan	12 Dokumen	33,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten	Persen		Persen	26.04 Persen	250,000,000						26.04 Persen	1,523,500,000	
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				20 ton	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat di Kabupaten Sumedang	20 ton	66,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tingkat Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persen		Persen	100 Persen	18,912,563,300						100 Persen	363,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	18,912,563,300	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani dan Masyarakat di Kabupaten Sumedang	1 Laporan	38,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan penduduk rawan pangan	Persen		Persen	100 Persen	4,098,540,000						100 Persen	1,573,000,000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan	Lokasi		Lokasi	10 Lokasi	4,098,540,000						10 Lokasi	1,573,000,000	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4,098,540,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani di Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	1,485,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang disertifikasi/diregistrasi Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen Persen		Persen Persen	25 Persen 100 Persen	830,000,000						25 Persen 100 Persen	519,200,000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Tingkat Kabupaten	Laporan		Laporan	8 Laporan	830,000,000						8 Laporan	519,200,000	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani dan Masyarakat di Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	65,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani dan Masyarakat di Kabupaten Sumedang	6 Dokumen	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	65,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani dan Masyarakat di Kabupaten Sumedang	6 Dokumen	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	400,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani dan Masyarakat di Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	79,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						177,620,137,245							474,311,834,815	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	58,043,672,337						100 Persen	48,941,170,097	
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	41 Laporan	1,080,000,000						41 Laporan	1,205,495,000	
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah				43 Dokumen	427,610,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	43 Dokumen	285,120,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	53,625,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	7,390,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah laporan penyusunan Dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	65,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	107,250,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					2 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 Dokumen	15,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					79 Dokumen	520,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	79 Dokumen	520,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan			Laporan	17 Laporan	32,905,119,937							17 Laporan	34,905,408,198	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					225 Orang/Bulan	32,640,119,937	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	225 Orang/Bulan	34,537,185,798	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10 Dokumen	125,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10 Dokumen	79,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					25 Laporan	140,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25 Laporan	150,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen	7 Dokumen	77,000,000							7 Dokumen	238,920,000	
3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	12,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	23,760,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	65,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	66,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen	7 Dokumen	25,000,000							7 Dokumen	105,600,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
3	27	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	15,840,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan			Laporan		21 Laporan	2,210,750,000						21 Laporan	1,683,000,000		
3	27	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						406 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	406 Unit	396,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan						3 Paket	322,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3 Paket	330,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						16 Dokumen	145,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	16 Dokumen	39,600,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						27 Orang	1,098,250,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	27 Orang	462,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan						700 Orang	445,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	700 Orang	237,600,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan			Laporan		55 Laporan	1,750,000,000							55 Laporan	2,165,205,779	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						3 Paket	320,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3 Paket	199,843,875	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Paket	247,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					14 Paket	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14 Paket	289,841,904	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					22 Paket	60,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22 Paket	39,600,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					27 Dokumen	90,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	27 Dokumen	47,520,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Laporan	712,800,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	39,600,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	230,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	277,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan			Laporan	5 Laporan	7,150,000,000							5 Laporan	3,572,000,000	
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	800,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 Unit	1,056,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	950,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Paket	264,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	800,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30 Unit	800,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Unit	660,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				32 Unit	4,100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	32 Unit	792,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	25 Laporan	1,691,500,000							25 Laporan	2,119,941,120	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Laporan	348,480,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,441,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Laporan	1,705,461,120	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	16 Laporan	11,154,302,400							16 Laporan	2,945,600,000	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				215 Unit	454,302,400	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	215 Unit	1,003,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				65 Unit	500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	65 Unit	198,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	2,750,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75 Unit	200,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	3,350,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10 Unit	554,400,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				38 Unit	4,100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	38 Unit	990,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan sarana pertanian Cakupan pengembangan sarana pertanian	Persen Persen		Persen Persen	70.07 Persen 29.93 Persen	83,881,822,708						70.07 Persen 29.93 Persen	357,473,542,773	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian yang diawasi	Persen		Persen	33 Persen	82,421,822,708						33 Persen	354,008,542,773	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				5 Laporan	78,191,822,708	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Sumedang	5 Laporan	333,502,135,975	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4,230,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Sumedang	4 Laporan	20,506,406,798	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman yang dikelola	Persen		Persen	100 Persen	1,460,000,000						100 Persen	3,465,000,000	
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				3 VUB	900,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Sumedang	3 VUB	495,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	560,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Sumedang	3 Dokumen	2,970,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas tambahan lahan yang terairi	Ha		Ha	2088 Ha	24,225,042,200						2088 Ha	61,695,121,945	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	Jenis		Jenis	5 Jenis	350,000,000						5 Jenis	1,210,000,000	
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani di Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	550,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani di Kabupaten Sumedang	4 Laporan	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara	Unit		Unit	311 Unit	23,875,042,200						311 Unit	60,485,121,945	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				152 Unit	13,865,042,200	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani di Kabupaten Sumedang	152 Unit	33,450,350,419	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara				4 Unit	750,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani di Kabupaten Sumedang	4 Unit	1,140,480,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				18 Unit	3,860,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani di Kabupaten Sumedang	18 Unit	17,448,051,526	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	600,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani di Kabupaten Sumedang	4 Unit	950,400,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 Unit	4,800,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani di Kabupaten Sumedang	6 Unit	6,270,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian	Persen Persen		Persen Persen	10 Persen 95 Persen	2,540,000,000						10 Persen 95 Persen	1,562,000,000	
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen		Persen	100 Persen	2,540,000,000						100 Persen	1,562,000,000	
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				2229 ha	1,530,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani di Kabupaten Sumedang	2229 ha	335,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 05 2.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				1893 ha	660,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani di Kabupaten Sumedang	1893 ha	704,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 05 2.01 05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				1 Laporan	350,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani di Kabupaten Sumedang	1 Laporan	522,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian	Persen		Persen	27.73 Persen	8,929,600,000						27.73 Persen	4,640,000,000	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	Poktan		Poktan	307 Poktan	8,929,600,000						307 Poktan	4,640,000,000	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				76 Unit	1,874,600,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	76 Unit	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				255 Unit	1,585,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	255 Unit	286,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				254 Unit	2,770,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	254 Unit	1,200,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk				1 Unit	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	1 Unit	44,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				16 Unit	2,600,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	16 Unit	3,000,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						96,905,795,937								126,293,000,000	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen			Persen	100 Persen	65,596,771,157						100 Persen	91,655,500,000	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			Laporan	12 Laporan	380,000,000						12 Laporan	528,000,000	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	135,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	11 Bagian	4 Dokumen	140,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	11 Bagian	1 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	11 Bagian	1 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	11 Bagian	1 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	11 Bagian	1 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				23 Dokumen	125,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	11 Bagian	23 Dokumen	187,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	28,856,771,157						12 Laporan	36,387,500,000	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				187 Orang/Bulan	27,931,771,157	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	11 Bagian	187 Orang/Bulan	35,000,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	800,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	11 Bagian	12 Dokumen	1,200,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	125,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	11 Bagian	12 Laporan	187,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	975,000,000						12 Laporan	1,462,500,000	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	1 Paket	375,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9 Dokumen	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	9 Dokumen	450,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				43 Orang	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	43 Orang	225,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				250 Orang	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	250 Orang	112,500,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				250 Orang	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	250 Orang	300,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	6,900,000,000						12 Laporan	11,887,500,000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1,750,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	3 Paket	3,375,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	3 Paket	3,337,500,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	225,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	2 Paket	337,500,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	275,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	12 Dokumen	412,500,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	750,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	2 Laporan	1,125,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1,750,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	12 Laporan	3,000,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	1 Dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	4,355,000,000						12 Laporan	5,425,000,000	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	3,500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	5 Unit	4,000,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Unit	450,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	1 Unit	675,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	405,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	2 Unit	750,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	4,350,000,000						12 Laporan	5,790,000,000	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,350,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	12 Laporan	2,250,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	12 Laporan	3,540,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	5,540,000,000						12 Laporan	8,865,000,000	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	1,100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	6 Unit	1,650,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				149 Unit	2,240,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	149 Unit	3,765,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	400,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	8 Unit	750,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1,250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	5 Unit	1,875,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	550,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	9 Unit	825,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	1,450,000,000						12 Laporan	2,125,000,000	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati dan Wakil Bupati	2 Orang/Bulan	250,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati dan Wakil Bupati	3 Paket	225,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	125,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati dan Wakil Bupati	2 Orang	187,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	975,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati dan Wakil Bupati	2 Orang/Bulan	1,462,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	2,800,000,000						12 Laporan	4,200,000,000	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	6 Paket	1,500,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	850,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	6 Paket	1,275,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				6 Paket	950,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Aparatur	6 Paket	1,425,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	740,000,000						9 Dokumen	1,110,000,000	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	290,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	435,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	2 Laporan	112,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	225,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	337,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	112,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	112,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jenis Laporan		Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	9,250,000,000						3 Jenis Laporan	13,875,000,000	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	4,250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	KDH/WKDH, Pimpinan, Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	6,375,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				7 Laporan	3,500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	KDH/WKDH, Pimpinan, Aparatur dan Masyarakat	7 Laporan	5,250,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	1,500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	KDH/WKDH, Pimpinan, Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	2,250,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewilayahan	Persen		Persen	100 Persen	28,659,024,780						100 Persen	30,887,500,000	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	1,000,000,000						7 Dokumen	1,287,500,000	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	475,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	500,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	225,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	337,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	3 Dokumen	450,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persen		Persen	100 Persen	25,459,024,780						100 Persen	26,300,000,000	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				14 Dokumen	4,879,650,780	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah	14 Dokumen	4,000,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				5 Dokumen	20,379,374,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah	5 Dokumen	22,000,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah	1 Dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persen		Persen	100 Persen	1,350,000,000						100 Persen	2,025,000,000	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				502 Dokumen	500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	502 Dokumen	750,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	575,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	5 Kasus	862,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				650 Dokumen	275,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	650 Dokumen	412,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Daerah	Naskah dan Dokumen		Naskah dan Dokumen	37 Naskah dan Dokumen	850,000,000						37 Naskah dan Dokumen	1,275,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				11 Dokumen	500,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	11 Dokumen	750,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				22 Dokumen	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	22 Dokumen	375,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				4 Laporan	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	4 Laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen		Persen	100 Persen	2,650,000,000						100 Persen	3,750,000,000	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persen		Persen	100 Persen	550,000,000						100 Persen	825,000,000	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				20 Dokumen	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah dan BUMD	20 Dokumen	450,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah dan BUMD	2 Laporan	375,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	625,000,000						100 Persen	937,500,000	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	4 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	275,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	4 Laporan	412,500,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	4 Laporan	375,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Predikat Pada Domain Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi	Predikat		Predikat	5 Predikat	825,000,000						5 Predikat	1,237,500,000		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	275,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	3 Dokumen	412,500,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				3 Dokumen	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	3 Dokumen	375,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				70 Orang	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	70 Orang	450,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam	Persen		Persen	100 Persen	650,000,000						100 Persen	750,000,000		
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				8 Dokumen	650,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang	8 Dokumen	750,000,000	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 02	SEKRETARIAT DPRD						83,216,725,298							97,722,997,880		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	47,854,754,798							100 Persen	55,377,998,980	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	32 Laporan	231,064,100						32 Laporan	335,770,900	
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 dokumen	49,715,600	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	8 dokumen	136,289,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	19,877,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	21,864,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	19,877,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	21,864,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	16,866,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	18,552,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	17,548,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	19,303,130	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	107,180,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	20 Laporan	117,898,770	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	36 Laporan	2,804,682,500						36 Laporan	5,478,579,980	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2,659,734,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	30 Orang/bulan	5,319,135,900	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	66,708,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	73,379,200	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	78,240,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	86,064,880	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	14 Laporan	25,547,500						14 Laporan	28,101,500	
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	10,285,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	11,313,500	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	15,262,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	16,788,000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	7 Laporan	909,066,900						7 Laporan	1,040,364,900	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	121,583,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	2 Paket	133,741,000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	82,390,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	4 Dokumen	90,629,000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				59 Orang	176,993,900	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	59 Orang	176,993,900	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	105,650,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	90 Orang	127,836,500	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	422,450,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	90 Orang	511,164,500	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Persen		Persen	100 Persen	1,685,204,500						100 Persen	1,779,201,000	
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	237,141,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	3 Paket	260,856,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	118,867,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	1 Paket	130,754,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	186,616,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	1 Paket	130,754,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	220,933,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	2 Paket	243,027,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	100,155,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	110,170,500	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	649,858,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	714,843,500	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	75,350,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	82,885,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	96,283,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	105,911,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan			Laporan	3 Laporan	1,988,249,000							3 Laporan	1,469,356,000	
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	1,310,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	2 Unit	723,283,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					50 Unit	228,283,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	50 Unit	251,111,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					20 Unit	449,966,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	20 Unit	494,962,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan			Laporan	24 Laporan	1,942,798,000							24 Laporan	2,137,077,000	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	203,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	223,850,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	1,739,298,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	1,913,227,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan			Laporan	29 Laporan	1,239,865,000							29 Laporan	1,363,850,000	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	562,782,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	12 Unit	619,060,000	Sekretariat DPRD	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	91,894,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	50 Unit	101,083,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	90,398,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	50 Unit	99,437,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	494,791,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Sekretariat DPRD	4 Unit	544,270,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan		Laporan	17 Laporan	33,430,699,298						17 Laporan	37,733,362,700	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50 Orang/Bulan	33,026,867,298	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	50 Orang/Bulan	37,289,147,700	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	293,832,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Paket	323,215,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	110,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	50 Orang	121,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	Laporan		Laporan	37 Laporan	3,597,578,000						37 Laporan	4,012,335,000	
4 02 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	110,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	121,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	2,247,064,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	2,526,770,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	677,402,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	745,142,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	563,112,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Paket	619,423,000	Sekretariat DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	Persen		Persen	100 Persen	35,361,970,500						100 Persen	42,344,998,900	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah produk hukum yang disetujui	Produk		Produk	15 Produk	4,578,002,500						15 Produk	5,535,801,400	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	166,628,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	183,290,800	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	3,047,754,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	8 Dokumen	3,852,529,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	354,068,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	389,474,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	584,166,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	642,582,600	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	425,386,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	467,925,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kebijakan Anggaran yang dibahas	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	2,600,362,000						6 Dokumen	2,814,994,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	507,023,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	557,725,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	507,023,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	557,725,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	520,498,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	572,547,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	520,498,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	572,547,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	91,300,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100,430,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	454,020,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	454,020,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan		Laporan	62 Laporan	1,881,990,000						62 Laporan	2,070,184,000	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	169,279,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	12 Laporan	186,206,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				6 Laporan	85,327,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	6 Laporan	93,859,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	164,791,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	12 Laporan	181,270,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	169,279,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	12 Laporan	186,206,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				6 Laporan	85,327,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	6 Laporan	93,859,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	107,613,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	118,374,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Dokumen	296,648,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	12 Dokumen	326,312,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	803,726,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	884,098,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen		Persen	100 Persen	5,542,989,500						100 Persen	5,988,851,000	
4 02 02 2.04 01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	474,045,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD	1 Dokumen	521,449,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	2,314,210,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD	4 Dokumen	2,437,194,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				12 Dokumen	1,127,570,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD	12 Dokumen	1,240,328,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	641,575,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD	8 Orang	705,732,500	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	238,975,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD	7 Orang	262,872,500	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	497,948,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD	12 Dokumen	547,742,500	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	248,666,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD	1 Dokumen	273,532,500	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Laporan		Laporan	17 Laporan	4,002,014,500						17 Laporan	4,402,215,000	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	1,308,747,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Masyarakat	12 Laporan	1,439,621,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	257,191,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Masyarakat	2 Dokumen	282,910,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2,436,076,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Masyarakat	3 Dokumen	2,679,684,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Ketaatan dan Kepatuhan DPRD Terhadap Kode Etik	Persen		Persen	100 Persen	774,752,000						100 Persen	852,227,000	
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	425,386,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	467,925,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	349,365,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Laporan	384,302,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah	Laporan		Laporan	16 Laporan	1,036,106,500						16 Laporan	1,139,717,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 02 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				4 Dokumen	513,414,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	564,755,000	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				12 Dokumen	522,692,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	DPRD dan Pemerintah Daerah	12 Dokumen	574,962,000	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD	Persen		Persen	100 Persen	14,945,753,500						100 Persen	19,541,009,500		
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				128 Dokumen	12,934,909,500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	128 Dokumen	17,329,081,500	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	243,760,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Laporan	268,136,000	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	447,645,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	492,409,500	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	1,319,439,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Dokumen	1,451,382,500	Sekretariat DPRD	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 01	PERENCANAAN							27,594,393,339							29,040,561,421	
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	14,786,247,109							100 Persen	15,255,915,191	
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	435,000,000							6 Laporan	390,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	165,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bappppeda Kabupaten Sumedang	8 Dokumen	95,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	45,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bappppeda Kabupaten Sumedang	25 Laporan	155,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	8,986,485,191						3 Laporan	8,996,485,191	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 orang/bulan	8,896,485,191	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bappppeda Kabupaten Sumedang	59 orang/bulan	8,896,485,191	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bappppeda Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	70,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Bappppeda Kabupaten Sumedang	12 Laporan	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	30,000,000						2 Laporan	35,000,000	
5 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aset Bappppeda Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aset Bappppeda Kabupaten Sumedang	12 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	311,170,000						5 Laporan	320,000,000	
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Paket	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	4 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	61,170,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	3 Orang	65,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	90 Orang	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	8 Laporan	1,445,081,918						8 Laporan	1,515,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	265,081,918	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Paket	275,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	115,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Paket	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Paket	305,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	130,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Paket	135,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				28 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	28 Dokumen	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	330,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	12 Laporan	335,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				13 Dokumen	75,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	13 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	210,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	1,231,510,000						4 Laporan	1,624,430,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	304,430,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aset Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Unit	304,430,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	202,080,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aset Bappppeda Kabupaten Sumedang	10 Unit	210,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	425,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aset Bappppeda Kabupaten Sumedang	10 Unit	510,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aset Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Unit	600,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	1,472,000,000						3 Laporan	1,490,000,000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	230,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	12 Laporan	235,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	280,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	2 Laporan	280,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	962,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang	5 Laporan	975,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	875,000,000						4 Laporan	885,000,000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aset Bappppeda Kabupaten Sumedang	37 Unit	310,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				92 Unit	175,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aset Bappppeda Kabupaten Sumedang	92 Unit	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aset Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Unit	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aset Bappppeda Kabupaten Sumedang	1 Unit	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	2,360,350,000						100 Persen	2,797,600,000	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Laporan		Laporan	7 Laporan	1,526,000,000						7 Laporan	1,555,000,000	
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD				2 Dokumen	121,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	125,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	27,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	27,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Berita Acara	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				29 Berita Acara	125,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		29 Berita Acara	125,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	225,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Berita Acara	230,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				26 Usulan	125,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		26 Usulan	130,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	875,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Dokumen	880,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	266,750,000						3 Laporan	275,000,000	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Masukan	27,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Masukan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				28 Orang	74,250,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		28 Orang	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				7 Buku	165,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		7 Buku	170,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	567,600,000						1 Laporan	967,600,000	
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	567,600,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		8 Laporan	967,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Target Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik	Persen		Persen	100 Persen	10,447,796,230						100 Persen	10,987,046,230	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan		Laporan	8 Laporan	2,690,750,000						8 Laporan	2,760,000,000	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	640,750,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	675,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				39 Perangkat Daerah	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		39 Perangkat Daerah	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				4 Laporan	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	295,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	400,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	750,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				8 Perangkat Daerah	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	8 Perangkat Daerah	115,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				8 Perangkat Daerah	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	8 Perangkat Daerah	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				5 Laporan	950,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	5 Laporan	380,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan		Laporan	8 Laporan	2,940,000,000					8 Laporan	3,345,000,000		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	850,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	3 Dokumen	1,180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				5 Perangkat Daerah	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	5 Perangkat Daerah	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				5 Perangkat Daerah	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	5 Perangkat Daerah	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				8 Laporan	800,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	8 Laporan	550,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	450,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Dokumen	1,100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				2 Perangkat Daerah	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Perangkat Daerah	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				2 Perangkat Daerah	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Perangkat Daerah	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	340,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	275,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan		Laporan	6 Laporan	4,817,046,230						6 Laporan	4,882,046,230	
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				2 Perangkat Daerah	55,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Perangkat Daerah	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	440,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	445,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	1,350,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	1,850,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				2 Perangkat Daerah	55,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Perangkat Daerah	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				2 Perangkat Daerah	1,917,046,230	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Perangkat Daerah	1,917,046,230	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1,000,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	550,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2,802,500,000							1,780,000,000	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	2,802,500,000						100 Persen	1,780,000,000	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Laporan		Laporan	1 Laporan	150,000,000						1 Laporan	230,000,000	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Terkait, Perguruan Tinggi	1 Laporan	230,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Laporan		Laporan	2 Laporan	400,000,000						2 Laporan	500,000,000	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Terkait, Perguruan Tinggi, Stakeholder	2 Dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Terkait, Perguruan Tinggi, Stakeholder	2 Dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Laporan		Laporan	3 Laporan	702,500,000						3 Laporan	475,000,000		
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	250,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Terkait, Perguruan Tinggi	1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 05 02 2.03 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	152,500,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Terkait, Perguruan Tinggi	1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 05 02 2.03 10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Terkait, Perguruan Tinggi	1 Dokumen	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan		Laporan	2 Laporan	1,550,000,000						2 Laporan	575,000,000		
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1,450,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Terkait, Perguruan Tinggi	1 Dokumen	450,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	100,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Perangkat Daerah Terkait, Perguruan Tinggi	1 Laporan	125,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 02	KEUANGAN							742,508,772,875							379,074,162,332	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	309,380,751,875							100 Persen	189,496,422,332	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						360,000,000								310,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		10 Dokumen	100,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	30,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	30,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		10 Dokumen	150,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						302,690,751,875							182,786,422,332	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen	302,590,751,875		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	182,686,422,332	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	10,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	90,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						305,000,000							300,000,000	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	305,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		3 Dokumen	300,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						386,250,000							475,000,000	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				92 Stel	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		92 Stel	150,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	50,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 orang	186,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		60 orang	275,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,535,000,000							1,590,000,000	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	300,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	50,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Laporan	245,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 Laporan	230,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Laporan	190,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	150,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Laporan	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	35,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	600,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	25,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	200,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,416,000,000							1,490,000,000	
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1,150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		2 Unit	1,150,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				90 Unit	102,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		90 Unit	250,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	164,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		3 Unit	90,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,812,750,000							1,685,000,000	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	243,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	225,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,569,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	1,460,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						875,000,000							860,000,000	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	205,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	10,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Laporan	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	80,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Laporan	370,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	415,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	150,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 97 Persen	429,986,421,000						100 Persen 100 Persen 97 Persen	187,882,295,000	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						3,003,000,000							4,550,000,000	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	263,283,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	325,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	203,175,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	325,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	226,121,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	275,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	170,644,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	300,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	212,634,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	275,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	179,029,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	300,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	241,699,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	400,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	351,411,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6 Dokumen	600,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Dokumen	500,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	155,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	250,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	500,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	500,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						1,782,000,000							2,700,000,000	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				2 Dokumen	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	500,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	82,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	350,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				3 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Dokumen	350,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	300,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Dokumen	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	2 Dokumen	500,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	300,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	400,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						1,973,400,000						2,845,000,000		
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				2 Laporan	132,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	2 Laporan	200,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				3 Dokumen	181,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	3 Dokumen	275,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	211,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	320,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				4 Laporan	262,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	375,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	221,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Dokumen	275,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	100,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	175,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	115,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	175,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	392,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	275,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	275,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Laporan	247,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	400,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						423,228,021,000						177,787,295,000		
5 02 02 2.04 07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	810,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	500,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	368,130,726,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	127,800,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2 Laporan	24,800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	20,000,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				4 Laporan	29,487,295,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	29,487,295,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Persen		Persen	91 Persen	3,141,600,000						91 Persen	1,695,445,000	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						3,141,600,000							1,695,445,000	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	299,510,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	33,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	41,710,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	169,400,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				4 Laporan	111,804,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	450,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	95,832,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	187,550,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2,108,538,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	96,195,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	123,783,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	159,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	63,488,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	121,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	155,270,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Dokumen	24,200,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	79,860,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	169,400,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	61,804,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	120,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5 02		KEUANGAN					26,362,119,342							28,233,000,000	
5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16,242,799,342						100 %	15,845,000,000	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	7 Laporan	226,219,750						7 Laporan	385,000,000	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	11,531,440		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	30,000,000	Badan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	10,748,260		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	10,623,290		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	35,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	13,316,760		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	2 Dokumen	30,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	105,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	2 Laporan	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	11,471,579,592						3 Laporan	10,565,000,000	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/Bulan	11,326,579,592		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	58 Orang/Bulan	10,400,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	12 Dokumen	35,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	14 Laporan	130,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	105,000,000						4 Laporan	160,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	12 Dokumen	60,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	1 Orang	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	8 Laporan	1,967,000,000						8 Laporan	2,067,000,000	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	4 Paket	550,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	4 Paket	175,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	4 Paket	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	4 Paket	500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	4 Dokumen	18,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	4 Laporan	500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	74,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	12 Dokumen	74,000,000	Badan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	200,000,000						1 Laporan	200,000,000	
5 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	1 Unit	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	1,918,000,000						2 Laporan	1,968,000,000	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	12 Laporan	300,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,668,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	12 Laporan	1,668,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	355,000,000						2 Laporan	500,000,000	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				72 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	72 Unit	400,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	20 Unit	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Potensi Pajak Daerah	%		%	85 %	10,119,320,000						85 %	12,388,000,000	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	10,119,320,000						15 Dokumen	12,388,000,000	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	4 Dokumen	300,000,000	Badan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				6 Dokumen	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	6 Dokumen	1,500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				98 Unit	544,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	98 Unit	595,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	1,010,755,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	10 Laporan	1,200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Baisi Data Pajak Daerah				12 Laporan	1,890,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	12 Laporan	2,200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya				1000 Obyek Pajak	117,565,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	1000 Obyek Pajak	300,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	147,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	12 Dokumen	147,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	11 Layanan	700,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				3000 Dokumen	163,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	3000 Dokumen	265,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	3,825,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	12 Dokumen	4,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	56,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	56,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				18 Dokumen	358,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	18 Dokumen	425,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	158,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	1 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Kabupaten Sumedang	1 Laporan	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 03	KEPEGAWAIAN						30,444,815,303						32,919,438,301		
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	9,961,749,463						100 Persen	10,388,065,877	
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	202,600,000						8 Dokumen	222,860,000	
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	88,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	3 Dokumen	96,800,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	6,600,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6,600,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	7,260,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	6,600,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	6,600,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	86,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	12 Laporan	99,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	7,360,149,463						3 Dokumen	7,625,305,877	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"				12 Bulan	7,304,749,463	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	12 Bulan	7,557,105,877	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD"				2 Dokumen	28,400,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	2 Dokumen	38,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	27,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	12 Laporan	29,700,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	23,000,000						8 Dokumen	25,300,000	
5 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD"				2 Dokumen	8,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	8,800,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"				6 Laporan	15,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6 Laporan	16,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	8 Laporan	340,000,000						8 Laporan	374,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	"Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan"				1 Paket	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Paket	55,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	"Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian"				4 Laporan	40,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	4 Laporan	44,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	3 Orang	55,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"				50 Orang	150,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	50 Orang	165,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Orang	55,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Laporan		Laporan	6 Laporan	527,000,000						6 Laporan	579,700,000	
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"				4 Paket	95,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	4 Paket	104,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"				1 Paket	65,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Paket	71,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"				3 Paket	65,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	3 Paket	71,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"				3 Paket	80,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	3 Paket	88,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	22,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	24,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"				1 Laporan	200,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Laporan	220,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	650,000,000						3 Laporan	616,000,000	
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	60,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		18 Unit	66,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"				2 Unit	250,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Unit	275,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	340,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	275,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	574,000,000						3 Laporan	631,400,000	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	125,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	3 Laporan	137,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"				3 Laporan	45,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	3 Laporan	49,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"				12 Laporan	404,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	12 Laporan	444,400,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	285,000,000						3 Laporan	313,500,000	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		16 Unit	220,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"				5 Unit	30,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Unit	33,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"				1 Unit	55,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	60,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan	Persen		Persen	100 Persen	20,483,065,840						100 Persen	22,531,372,424	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Laporan		Laporan	6 Laporan	2,081,740,000						6 Laporan	2,289,914,000	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	35,960,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	39,556,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK"				1 Dokumen	1,500,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	1,650,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	240,700,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	264,770,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	116,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Lembaga	127,600,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian"				1 Dokumen	48,720,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	53,592,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian"				1 Dokumen	140,360,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	154,396,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	1,616,718,400						3 Dokumen	1,778,390,240	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	68,718,400	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	75,590,240	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	548,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	602,800,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN"				1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	1,100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	Laporan		Laporan	5 Laporan	16,257,065,840						5 Laporan	17,882,772,424	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				746 Orang	1,100,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	746 Orang	1,210,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat"				1 Dokumen	9,124,565,840	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	10,037,022,424	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan"				500 Orang	427,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	500 Orang	470,250,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN"				2 Laporan	245,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	2 Laporan	269,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	5,360,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	5,896,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	527,541,600						7 Dokumen	580,295,760	
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	26,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	28,600,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur"				2 Dokumen	78,300,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	86,130,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				18 Orang	195,552,800	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	18 Orang	215,108,080	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				100 Orang	30,740,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	100 Orang	33,814,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan"				10 Orang	123,288,800	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	10 Orang	135,617,680	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN"				1 Laporan	11,600,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Laporan	12,760,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani"				1 Dokumen	62,060,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	68,266,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6 01	INSPEKTORAT DAERAH						23,723,674,052						30,762,956,650		
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	17,218,496,162					100 Persen	18,486,895,222		
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						134,620,000						182,500,000		
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	64,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0 Dokumen 2 Dokumen	64,500,000	Inspektorat	
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	10,000,000	Inspektorat	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	8,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	50,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	100,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13,746,326,162							13,757,326,162	
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/Bulan 62 Orang/bulan	13,722,326,162		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		62 Orang/Bulan 62 Orang/bulan	13,722,326,162	Inspektorat
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan 1 Laporan	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 Laporan 1 Laporan	35,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						46,700,000							80,000,000	
6 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen 0 Dokumen	19,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen 0 Dokumen	30,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				62 Orang	26,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		62 Orang	50,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						959,750,000							1,348,069,060	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	120,129,060		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket 0 Paket	120,129,060	Inspektorat
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12,010,090		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi			15,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	202,988,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket 0 Paket	400,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan" Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	110,402,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket 0 Paket	200,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	36,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	36,440,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan 0 Laporan	301,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan 0 Laporan	400,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	"Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD" Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	176,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen 0 Dokumen	176,500,000	Inspektorat
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,100,000,000							2,000,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		15 Unit	500,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		15 Unit	500,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit 0 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit 0 Unit	1,000,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						779,000,000							544,000,000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan 0 Laporan	114,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan 0 Laporan	114,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan 0 Laporan	665,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan 0 Laporan	430,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						452,100,000							575,000,000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	267,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		16 Unit	300,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 12 Unit	34,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 Unit 12 Unit	75,000,000	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 0 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Unit 0 Unit	200,000,000	Inspektorat	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pemenuhan unsur SPIP Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	4,857,149,200					100 Persen 100 Persen	8,339,836,428		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						3,992,760,950						6,889,046,428		
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi maturitas SPIP Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				55 OPD 0 Laporan	999,748,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	55 OPD 0 Laporan	1,008,021,428	Inspektorat	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan OPD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				24 Dokumen 0 Laporan	547,930,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	24 Dokumen 0 Laporan	700,000,000	Inspektorat	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen laporan hasil reviu laporan kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				4 Dokumen 0 Laporan	886,711,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	4 Dokumen 0 Laporan	900,000,000	Inspektorat	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan hasil reviu laporan kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3 Dokumen 0 Laporan	145,051,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	3 Dokumen 0 Laporan	315,000,000	Inspektorat	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				2 Dokumen 0 Laporan	435,209,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	2 Dokumen 0 Laporan	2,019,615,000	Inspektorat	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah dokumen sosialisasi dan aksi saberpungli Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Dokumen 0 Kesepakatan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen 0 Kesepakatan	300,000,000	Inspektorat	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				0 Dokumen 2 Dokumen	728,110,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0 Dokumen 2 Dokumen	1,646,410,000	Inspektorat	
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						864,388,250						1,450,790,000		
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan penanganan pengaduan dan penyelesaian kerugian negara/daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				5 Dokumen 0 Laporan	336,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	5 Dokumen 0 Laporan	718,740,000	Inspektorat	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				3 Dokumen 0 Laporan	527,888,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	3 Dokumen 0 Laporan	732,050,000	Inspektorat	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase pemenuhan elemen IACM	Persen		Persen	100 Persen	1,648,028,690					100 Persen	3,936,225,000		
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						577,397,000						1,444,000,000		
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen leveling pengelolaan SDM, Peran dan Layanan APIP, Praktik Profesional Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Dokumen 0 Rekomendasi	432,856,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen 0 Rekomendasi	1,294,000,000	Inspektorat	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah dokumen leveling akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun				5 Dokumen 0 Rekomendasi	144,541,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen 0 Rekomendasi	150,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi						1,070,631,690							2,492,225,000	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				3 Dokumen 0 perangkat daerah	293,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Dokumen 0 perangkat daerah	1,216,025,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah SKPD yang dinilai PMPRB				0 perangkat daerah 55 OPD	148,376,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 perangkat daerah 55 OPD	160,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Dokumen 0 Kegiatan	573,234,940		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Dokumen 0 Kegiatan	650,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				55 OPD 0 perangkat daerah	56,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		55 OPD 0 perangkat daerah	466,200,000	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							4,974,062,896						6,114,899,146	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,505,562,896						100 Persen	4,283,649,146	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	108,240,000						2 Dokumen	148,860,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	55,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	0 Dokumen 2 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Wado
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	8,280,000	Kecamatan Wado
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	5,580,000	Kecamatan Wado
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Wado
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Wado
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	31,400,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0	4 Laporan	50,000,000	Kecamatan Wado
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,126,789,146							2,136,789,146	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Laporan 15 Orang/bulan	2,096,789,146	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan 15 Orang/bulan	2,096,789,146	Kecamatan Wado
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Wado
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				12 Laporan 0 Laporan 2 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan 0 Laporan 2 Laporan	30,000,000	Kecamatan Wado
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	40,000,000						4 Laporan	70,000,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	40,000,000	Kecamatan Wado
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Wado
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				38 Orang 38 Orang	15,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		38 Orang 38 Orang	25,000,000	Kecamatan Wado
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	7 Laporan	49,533,750						7 Laporan	258,000,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	15,000,000	Kecamatan Wado

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	15,000,000	Kecamatan Wado
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,533,750	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Paket	12,000,000	Kecamatan Wado
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Wado
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen 1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen 1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Wado
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	615,000,000						3 Laporan	845,000,000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				11 Unit 11 Unit	275,000,000	Semua Kab/Kota, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		11 Unit 11 Unit	350,000,000	Kecamatan Wado
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	40,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Unit	70,000,000	Kecamatan Wado
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit 1 Unit	300,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit 1 Unit	325,000,000	Kecamatan Wado
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	376,000,000						2 Laporan	475,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	50,000,000	Kecamatan Wado

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	346,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	425,000,000	Kecamatan Wado
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan		Laporan	5 Laporan	190,000,000						5 Laporan	350,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	40,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		8 Unit	50,000,000	Kecamatan Wado
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	250,000,000	Kecamatan Wado
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat Di Kecamatan Wado	Persen		Persen	100 Persen	385,000,000						100 Persen	481,250,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						101,000,000							131,250,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	36,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	50,000,000	Kecamatan Wado
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	65,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	81,250,000	Kecamatan Wado
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						124,000,000							155,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	124,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	155,000,000	Kecamatan Wado
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						160,000,000							195,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Dokumen 1 Laporan	140,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0 Dokumen 1 Laporan	170,000,000	Kecamatan Wado	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan 1 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Laporan 1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Wado	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Wado	Persen		Persen	100 Persen	665,500,000					100 Persen	831,250,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						30,000,000						37,500,000		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Laporan	37,500,000	Kecamatan Wado	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						635,500,000						793,750,000		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga	461,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	4 Lembaga	576,250,000	Kecamatan Wado	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	3 Lembaga	112,500,000	Kecamatan Wado	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	84,500,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	3 Laporan	105,000,000	Kecamatan Wado	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Wado	Persen		Persen	100 Persen	195,000,000					100 Persen	241,250,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						165,000,000						206,250,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	165,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	206,250,000	Kecamatan Wado
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						30,000,000							35,000,000	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan 0 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan 0 Laporan	35,000,000	Kecamatan Wado
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani Di Kecamatan Wado	Persen		Persen	100 Persen	70,000,000						100 Persen	87,500,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						70,000,000							87,500,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	70,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	87,500,000	Kecamatan Wado
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa Di Kecamatan Wado	Persen		Persen	100 Persen	153,000,000						100 Persen	190,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						153,000,000							190,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	70,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	87,500,000	Kecamatan Wado	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Wado	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Wado	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	38,000,000	Kab. Sumedang, Wado, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	2 Laporan	47,500,000	Kecamatan Wado	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						4,908,451,889							5,889,500,572	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,079,951,889					100 Persen	3,961,000,572		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						106,200,000						150,000,000		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	52,960,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	3 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Jatinunggal	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Jatinunggal	
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Jatinunggal	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan 0 Laporan	31,400,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan 0 Laporan	50,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,056,206,609							1,891,600,572	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	2,032,406,609	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Orang/bulan	1,861,600,572	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	15,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						66,924,000							240,000,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	80,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	24,500,000	Kecamatan Jatinunggal

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,004,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	8,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1,920,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	25,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						250,000,000							550,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	250,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Unit	250,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						390,621,280							396,400,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik				12 Laporan	19,221,280	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	25,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				35 Aparatur 12 Laporan	371,400,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		35 Aparatur 12 Laporan	371,400,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						210,000,000							650,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	35,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		8 Unit	100,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	175,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	550,000,000	Kecamatan Jatinunggal

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jatinunggal	persen		persen	100 persen	459,500,000						100 persen	459,500,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150,000,000							150,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Daftar Usulan Kegiatan Jumlah Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan				1 Dokumen 9 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen 9 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	100,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						150,000,000							150,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	150,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						159,500,000							159,500,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	159,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	159,500,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Jatinunggal	persen		persen	100 persen	956,000,000						100 persen	1,032,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						50,000,000							50,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						50,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar			50,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						906,000,000							982,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati Jumlah Keluarga Yang Berdayakan Jumlah Lansia Penerima Makanan Pokok Jumlah Wakil Peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi				2 Hari Besar 18 Orang 20 Orang 18 Orang	600,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	2 Hari Besar 18 Orang 20 Orang 18 Orang	676,000,000	Kecamatan Jatinunggal	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader Pos Pelayanan Terpadu yang Dibina Jumlah Kelompok Seni Dan Budaya Yang Dibina Jumlah Organisasi Kepemudaan Dan Olahraga Yang Dibina				45 Orang 9 Kelompok 9 Organisasi	154,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	45 Orang 9 Kelompok 9 Organisasi	154,000,000	Kecamatan Jatinunggal	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok Ekonomi Yang Berdayakan Jumlah Kelompok Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berdayakan Jumlah Pengelola BUMDes Yang Dibina				9 Kelompok 9 Kelompok 27 Orang	152,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	9 Kelompok 9 Kelompok 27 Orang	152,000,000	Kecamatan Jatinunggal	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000					100 Persen	100,000,000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						100,000,000						100,000,000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pencegahan Covid 19				1 Laporan 6 Laporan	100,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	1 Laporan 6 Laporan	100,000,000	Kecamatan Jatinunggal	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Jatinunggal	persen		persen	100 persen	110,000,000					100 persen	130,000,000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						110,000,000						130,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				9 Lembaga Masyarakat	30,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		9 Lembaga Masyarakat	45,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 Dokumen	85,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Jatinunggal	persen		persen	100 persen	203,000,000						100 persen	207,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						203,000,000							207,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Dibina Jumlah Desa Peserta Lomba Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				27 Orang 9 Desa 0 Dokumen	82,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		27 Orang 9 Desa 0 Dokumen	82,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	46,000,000	Kab. Sumedang, Jatinunggal, Semua Kelurahan			Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	50,000,000	Kecamatan Jatinunggal
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							6,073,509,915						7,420,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	4,292,009,915						100 Persen	5,450,000,000	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	125,400,000						6 Laporan	150,000,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat				5 Dokumen	63,500,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	5 Dokumen	70,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,300,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,600,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,500,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,500,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	40,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	24 Laporan	50,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	3,000,097,755						3 Laporan	3,540,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/Bulan	2,972,097,755	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	24 Orang/Bulan	3,500,000,000	Kecamatan Darmaraja
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Darmaraja	12 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Darmaraja
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	19,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	14 Laporan	30,000,000	Kecamatan Darmaraja
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	6,000,000						1 Laporan	30,000,000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	6,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Darmaraja
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	67,400,000						2 Laporan	105,000,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	62,400,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	4 Paket	70,000,000	Kecamatan Darmaraja
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	4 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Darmaraja
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	43,312,160						6 Laporan	75,000,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18,112,160	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	1 Paket	25,000,000	Kecamatan Darmaraja
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Darmaraja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13,200,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	5 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	430,000,000						3 Laporan	690,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				13 Unit	330,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	13 Unit	500,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	20,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	2 Unit	40,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	80,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	6 Unit	100,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	305,800,000						3 Laporan	350,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21,600,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Darmaraja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	274,200,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	12 Laporan	300,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	314,000,000						4 Laporan	510,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	100,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	10 Unit	150,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	4,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	6 Unit	10,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	1 Unit	300,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	10,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Darmaraja	2 Unit	30,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Darmaraja	persen		persen	100 persen	393,000,000						100 persen	450,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	112,000,000						2 Laporan	130,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat dan Aparatur Desa Kecamatan Darmaraja	1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	87,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat dan Aparatur Desa Kecamatan Darmaraja	2 Dokumen	100,000,000	Kecamatan Darmaraja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	221,000,000						1 Laporan	230,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	221,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Darmaraja	12 Laporan	230,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan		Laporan	3 Laporan	60,000,000						3 Laporan	90,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Darmaraja	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Darmaraja	1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Darmaraja	1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Darmaraja	Persen		Persen	100 Persen	926,500,000						100 Persen	980,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	90,000,000						1 Laporan	100,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga	90,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Darmaraja	3 Lembaga	100,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	3 Laporan	836,500,000						3 Laporan	880,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga	567,500,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Darmaraja	6 Lembaga	600,000,000	Kecamatan Darmaraja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	147,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Darmaraja	4 Lembaga	150,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	122,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Darmaraja	3 Laporan	130,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Darmaraja	persen		persen	100 persen	170,000,000						100 persen	180,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Lapaoran		Lapaoran	1 Lapaoran	170,000,000						1 Lapaoran	180,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	170,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Petugas Linmas dan Masyarakat Kecamatan Darmaraja	5 Laporan	180,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Darmaraja	persen		persen	100 persen	60,000,000						100 persen	80,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	60,000,000						2 Laporan	80,000,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				1 Lembaga Masyarakat	20,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur, Desa dan Masyarakat Kecamatan Darmaraja	1 Lembaga Masyarakat	30,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur, Desa dan Masyarakat Kecamatan Darmaraja	6 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Darmaraja	persen		persen	100 persen	232,000,000						100 persen	280,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	7 Laporan	232,000,000						7 Laporan	280,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintahan Desa	2 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	45,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintahan Desa	2 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Darmaraja
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	82,000,000	Kab. Sumedang, Darmaraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Laporan	90,000,000	Kecamatan Darmaraja
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						4,719,569,201							5,361,354,780	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	2,985,069,201						100 Persen	3,504,354,780	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	112,400,000						6 Laporan	133,000,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	55,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cibugel	5 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,300,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cibugel	2 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,600,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cibugel	2 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,500,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cibugel	2 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cibugel	2 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	35,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cibugel	10 Laporan	40,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	2,100,955,361						2 Laporan	2,522,554,780	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	2,085,355,361	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cibugel	14 Orang/Bulan	2,497,554,780	Kecamatan Cibugel
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2,500,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cibugel	12 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Cibugel

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	13,100,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cibugel	12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Cibugel
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Memadai	Laporan		Laporan	2 Laporan	1,000,000						2 Laporan	12,500,000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cibugel	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Cibugel
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	13,000,000						5 Laporan	40,000,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cibugel	1 Paket	16,000,000	Kecamatan Cibugel
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cibugel	1 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Cibugel
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	200,000,000						1 Laporan	210,000,000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	Desa dan Aparatur Kecamatan Cibugel	8 Unit	210,000,000	Kecamatan Cibugel
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	333,500,000						2 Laporan	341,300,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,200,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cibugel	12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Cibugel

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	326,300,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cibugel	12 Laporan	331,300,000	Kecamatan Cibugel
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	224,213,840						2 Laporan	245,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	24,213,840	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cibugel	8 Unit	35,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cibugel	1 Unit	210,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat Di Kecamatan Cibugel	Persen		Persen	100 Persen	212,000,000						100 Persen	233,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	50,000,000						1 Laporan	60,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Cibugel	1 Laporan	60,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	114,000,000						1 Laporan	120,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	114,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Desa dan Aparatur Kecamatan Cibugel	2 Laporan	120,000,000	Kecamatan Cibugel

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Laporan		Laporan	1 Laporan	48,000,000						1 Laporan	53,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	48,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Cibugel	5 Dokumen	53,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Di Kecamatan Cibugel	Persen		Persen	100 Persen	943,500,000						100 Persen	996,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	120,000,000						1 Laporan	150,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasy.	120,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Desa dan Aparatur Kecamatan Cibugel	7 Lembaga Kemasy.	150,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cibugel	Laporan		Laporan	3 Laporan	823,500,000						3 Laporan	846,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Masy	487,500,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Cibugel	7 Lembaga Masy	492,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasy.	174,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Cibugel	6 Lembaga Kemasy.	184,000,000	Kecamatan Cibugel

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	162,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Cibugel	3 Laporan	170,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Cibugel	Persen		Persen	100 Persen	200,000,000						100 Persen	220,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	200,000,000						1 Laporan	220,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	200,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Cibugel	6 Laporan	220,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani Di Kecamatan Cibugel	Persen		Persen	100 Persen	75,000,000						100 Persen	80,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	75,000,000						1 Laporan	80,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	75,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Desa dan Aparatur Kecamatan Cibugel	6 Dokumen	80,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Cibugel	Persen		Persen	100 Persen	304,000,000						100 Persen	328,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	5 Laporan	304,000,000						5 Laporan	328,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	87,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Desa dan Aparatur Kecamatan Cibugel	2 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Cibugel

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	52,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Desa dan Aparatur Kecamatan Cibugel	2 Dokumen	58,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Desa dan Aparatur Kecamatan Cibugel	1 Dokumen	45,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Desa dan Aparatur Kecamatan Cibugel	1 Dokumen	45,000,000	Kecamatan Cibugel
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	85,000,000	Kab. Sumedang, Cibugel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Desa dan Aparatur Kecamatan Cibugel	1 Laporan	90,000,000	Kecamatan Cibugel
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					4,895,365,457							4,950,007,025	
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan			100 Persen	3,336,965,457						100 Persen	3,353,007,025	
7 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan							6 Laporan	116,350,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	50,560,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Cisitu	6 Dokumen	60,500,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Cisitu	2 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Cisitu	2 Dokumen	6,100,000	Kecamatan Cisitu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Cisitu	2 Dokumen	3,750,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Cisitu	2 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	31,400,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Cisitu	20 Laporan	33,500,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	2,237,457,777						3 Laporan	2,238,657,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/Bulan	2,209,657,777	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	15 Orang/Bulan	2,210,657,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Laporan	8,800,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	12 Laporan	9,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	19,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	12 Laporan	19,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	35,000,000						3 Laporan	10,000,025	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	25,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	45 Paket	25	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	4 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Cisitu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	61,207,680						5 Laporan	63,500,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	16,037,680	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	12 Paket	17,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	12 Paket	31,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	12 Paket	10,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				4 Dokumen	5,170,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	4 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	313,500,000						2 Laporan	338,500,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				11 Unit	275,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	11 Unit	300,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	38,500,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	6 Unit	38,500,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	325,000,000						3 Laporan	325,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	310,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	12 Laporan	310,000,000	Kecamatan Cisitu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	261,000,000						3 Laporan	261,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	56,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Barang Milik Daerah di Kecamatan Cisitu	6 Unit	56,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	5,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Barang Milik Daerah di Kecamatan Cisitu	6 Unit	5,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Barang Milik Daerah di Kecamatan Cisitu	2 Unit	200,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat Kecamatan Cisitu	persen		persen	100 persen	285,400,000						100 persen	286,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	100,400,000						2 Laporan	101,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	35,400,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	12 Laporan	36,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	65,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cisitu	12 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	90,000,000						1 Laporan	90,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	90,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Cisitu	1 Laporan	90,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan		Laporan	1 Laporan	95,000,000						1 Laporan	95,000,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	95,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Cisitu	12 Laporan	95,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Cisitu	persen		persen	100 persen	911,000,000						100 persen	911,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	75,000,000						1 Laporan	75,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga	75,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Cisitu	5 Lembaga	75,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	3 Laporan	836,000,000						3 Laporan	836,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga	558,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Cisitu	4 Lembaga	558,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	128,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Cisitu	3 Lembaga	128,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Cisitu	3 Laporan	150,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Cisitu	persen		persen	100 persen	135,000,000						100 persen	170,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	135,000,000						1 Laporan	170,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	135,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Cisitu	2 Laporan	170,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Cisitu	persen		persen	100 persen	65,000,000						100 persen	65,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	laporan		laporan	1 laporan	65,000,000						1 laporan	65,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	65,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Forkopimcam Cisitu	1 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Cisitu	persen		persen	100 persen	162,000,000						100 persen	165,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	4 Laporan	162,000,000						4 Laporan	165,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	65,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Desa di Kecamatan Cisitu	2 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Desa di Kecamatan Cisitu	2 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Cisitu
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				10 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Desa di Kecamatan Cisitu	10 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Cisitu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	32,000,000	Kab. Sumedang, Cisitu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Desa di Kecamatan Cisitu	1 Laporan	35,000,000	Kecamatan Cisitu
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						6,057,237,303							6,195,250,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	4,248,737,303						100 Persen	4,317,250,000	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	134,600,000						6 Laporan	157,250,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	67,250,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	5 Dokumen	67,250,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Situraja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	45,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	24 Laporan	70,000,000	Kecamatan Situraja
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	2,793,480,663						3 Laporan	2,845,000,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/Bulan	2,756,480,663	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan Situraja	22 Orang/Bulan	2,800,000,000	Kecamatan Situraja
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan Situraja	12 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Situraja
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan Situraja	12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Situraja
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	24,930,000						2 Laporan	30,000,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	19,930,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan Situraja	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Situraja
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan Situraja	4 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Situraja
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	83,076,640						5 Laporan	278,000,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23,076,640	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	1 Paket	30,000,000	Kecamatan Situraja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	36,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	1 Paket	43,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Situraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	4,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	5 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	448,650,000						2 Laporan	145,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				16 Unit	405,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	16 Unit	70,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	43,650,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	4 Unit	50,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	342,000,000						3 Laporan	377,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	12 Laporan	45,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	312,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Pemerintah Kecamatan	12 Laporan	312,000,000	Kecamatan Situraja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	422,000,000						4 Laporan	485,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	67,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Peralatan Kantor Kecamatan Situraja	11 Unit	75,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Peralatan Kantor Kecamatan Situraja	10 Unit	10,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Peralatan Kantor Kecamatan Situraja	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Peralatan Kantor Kecamatan Situraja	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Situraja	Persen		Persen	100 Persen	369,000,000						100 Persen	419,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	50,000,000						2 Laporan	100,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1 Laporan	70,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	244,000,000						1 Laporan	244,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	244,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Laporan	244,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Laporan		Laporan	3 Laporan	75,000,000						3 Laporan	75,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Situraja	Persen		Persen	100 Persen	953,500,000						100 Persen	958,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	55,500,000						1 Laporan	60,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah				3 Lembaga	55,500,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarkat dan Pemerintahan Desa	3 Lembaga	60,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	3 Laporan	898,000,000						3 Laporan	898,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga	520,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan Desa	7 Lembaga	520,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	189,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan Desa	4 Lembaga	189,000,000	Kecamatan Situraja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	189,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan Desa	3 Laporan	189,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Situraja	Persen		Persen	100 Persen	166,000,000						100 Persen	166,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	131,000,000						1 Laporan	131,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	131,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Fokopimcam, Pemerintahan Desa dan Masyarakat	5 Laporan	131,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Laporan		Laporan	1 Laporan	35,000,000						1 Laporan	35,000,000	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	35,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Forkopimcam dan Pemerintahan Desa	1 Laporan	35,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Situraja	Persen		Persen	100 Persen	105,000,000						100 Persen	105,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	105,000,000						2 Laporan	105,000,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				6 Lembaga Masyarakat	40,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	Forkopimcam, Pemerintahan Desa dan Masyarakat	6 Lembaga Masyarakat	40,000,000	Kecamatan Situraja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	65,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Forkopimcam / Pemerintahan Desa dan Masyarakat	6 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Situraja	Persen		Persen	100 Persen	215,000,000						100 Persen	230,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	6 Laporan	215,000,000						6 Laporan	230,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	115,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Pemerintahan Desa	2 Dokumen	115,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Pemerintahan Desa	2 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Situraja
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Situraja, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Pemerintahan Desa	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Situraja
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							5,404,658,687						5,550,658,687	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,543,158,687						100 Persen	3,779,158,687	
7 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					125,000,000							115,000,000	
7 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah			6 dokumen	60,000,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6 dokumen	50,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	8,500,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 dokumen	8,500,000	Kecamatan Conggeang
7 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dokumen	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 dokumen	6,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	4,500,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Conggeang
7 01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			20 laporan	41,000,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		20 laporan	41,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,212,165,567							2,212,165,567	
7 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	2,183,165,567	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		14 Bulan	2,183,165,567	Kecamatan Conggeang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Conggeang
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 laporan	20,000,000	Kecamatan Conggeang
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						17,000,000							17,000,000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Conggeang
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	13,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 laporan	13,000,000	Kecamatan Conggeang
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						82,260,000							97,260,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	32,260,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Paket	32,260,000	Kecamatan Conggeang
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				37 orang	50,000,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		37 orang	65,000,000	Kecamatan Conggeang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44,733,120							224,733,120	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan				1 paket	13,442,520		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 paket	13,442,520	Kecamatan Conggeang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	8,000,000	Kecamatan Conggeang
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	14,000,000	Kecamatan Conggeang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	6,500,000	Kecamatan Conggeang
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2,790,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen	2,790,600	Kecamatan Conggeang
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						440,000,000							451,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 unit	325,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		15 unit	300,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 unit	25,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 unit	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6 unit	26,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						335,000,000							320,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 laporan	30,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan 0 Laporan	305,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 laporan 0 Laporan	290,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						287,000,000							342,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 unit	77,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		9 unit	77,000,000	Kecamatan Conggeang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Unit	5,000,000	Kecamatan Conggeang
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	180,000,000	Kecamatan Conggeang
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 0 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit 0 Unit	80,000,000	Kecamatan Conggeang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Conggeang	Persen		Persen	100 Persen	453,000,000						100 Persen	453,000,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						159,000,000							159,000,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Conggeang
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	109,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	109,000,000	Kecamatan Conggeang
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						144,000,000							144,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 laporan 0 Laporan	144,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 laporan 0 Laporan	144,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						150,000,000							150,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen 0 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen 0 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Conggeang	Persen		Persen	100 Persen	734,500,000						100 Persen	644,500,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						60,000,000							60,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga	60,000,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Lembaga	60,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						674,500,000							584,500,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 laporan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 laporan	500,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Lembaga	10,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 laporan	74,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 laporan	74,500,000	Kecamatan Conggeang
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Conggeang	Persen		Persen	100 Persen	250,000,000						100 Persen	250,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						250,000,000						250,000,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	250,000,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	250,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Conggeang	Persen		Persen	100 Persen	85,000,000					100 Persen	85,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						85,000,000						85,000,000		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	85,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Conggeang	Persen		Persen	100 Persen	339,000,000					100 Persen	339,000,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						339,000,000						339,000,000		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	144,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	144,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Conggeang
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Conggeang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 dokumen	80,000,000	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 dokumen	80,000,000	Kecamatan Conggeang
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						5,004,745,776							6,087,497,736	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,269,245,776						100 Persen	4,227,497,736	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						107,000,000							150,000,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Paseh

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	32,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Laporan	60,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,283,304,256							2,117,497,736	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2,254,504,256		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		17 Orang/bulan	2,057,497,736	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumedang, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	50,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6,200,000							170,000,000	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Laporan Pemulangan Pegawai yang pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				0 Laporan 2 Orang	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 Laporan 2 Orang	40,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39,441,520							421,000,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,641,520		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	40,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	40,000,000	Kecamatan Paseh

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	30,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	8,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						280,000,000							410,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit 11 Unit	280,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 Unit 11 Unit	350,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						283,800,000							440,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	50,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan 2 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		0 Laporan 2 Laporan	40,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	243,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6 Laporan	350,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						269,500,000							464,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	67,000,000	Kab. Sumedang, Paseh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		9 Unit	87,000,000	Kecamatan Paseh

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Laporan 0 Unit 26 Unit	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan 0 Unit 26 Unit	30,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Unit	260,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						192,000,000							210,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						15,000,000							20,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	15,000,000	Kab. Sumedang, Paseh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						112,000,000							140,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	112,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Laporan	140,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						65,000,000							50,000,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	65,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	50,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Paseh	Persen		Persen	100 Persen	869,500,000						100 Persen	900,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						70,000,000							75,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Daftar Usulan Kegiatan Jumlah Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan				0 Dokumen 0 Dokumen	70,000,000	Kab. Sumedang, Paseh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0 Dokumen 0 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Paseh	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						799,500,000						825,000,000		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati Jumlah Keluarga Yang Diberdayakan Jumlah Lansia Penerima Makanan Pokok Jumlah Peserta Penyuluhan Dan Penanggulangan Penyakit Sosial Jumlah Peserta Peran Perempuan Dalam Pembangunan Jumlah Wakil Peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi				0 Hari Besar 0 Keluarga 0 Orang 0 Orang 0 Orang	594,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0 Hari Besar 0 Keluarga 0 Orang 0 Orang 0 Orang	495,000,000	Kecamatan Paseh	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Seni Dan Budaya Yang Dibina Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberdayakan Jumlah Organisasi Kepemudaan Dan Olahraga Yang Dibina				0 Kelompok 0 Lembaga 0 Organisasi	93,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	0 Kelompok 0 Lembaga 0 Organisasi	150,000,000	Kecamatan Paseh	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	112,000,000	Kab. Sumedang, Paseh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	3 Laporan	180,000,000	Kecamatan Paseh	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Paseh Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Paseh	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	200,000,000					100 Persen 100 Persen	140,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						200,000,000						140,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	200,000,000	Kab. Sumedang, Paseh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	3 Laporan	140,000,000	Kecamatan Paseh	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Paseh	Persen		Persen	100 Persen	130,000,000					100 Persen	110,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						130,000,000						110,000,000		
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				1 Lembaga Masyarakat	70,000,000	Kab. Sumedang, Paseh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Lembaga Masyarakat	60,000,000	Kecamatan Paseh	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Paseh	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Paseh	Persen		Persen	100 Persen	344,000,000					100 Persen	500,000,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						344,000,000						500,000,000		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	112,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	3 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Paseh	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	2 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Paseh	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	31,000,000	Kab. Sumedang, Paseh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Paseh	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	31,000,000	Kab. Sumedang, Paseh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Paseh
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	70,000,000	Kab. Sumedang, Paseh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	100,000,000	Kecamatan Paseh
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					4,680,795,272							4,708,945,272	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	2,936,295,272						100 Persen	2,964,445,272	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						98,200,000							113,350,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	44,960,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	56,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	8,280,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	5,580,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	4,490,000	Kecamatan Surian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	31,400,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		24 Laporan	35,000,000	Kecamatan Surian
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,020,053,272							2,020,053,272	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,986,253,272	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		14 Orang/bulan	1,986,253,272	Kecamatan Surian
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	8,800,000	Kecamatan Surian
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		14 Laporan	25,000,000	Kecamatan Surian
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33,000,000							33,000,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	12,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	12,000,000	Kecamatan Surian
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	8,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Surian
7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				1 Orang	3,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Orang	3,000,000	Kecamatan Surian
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	10,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		25 Orang	10,000,000	Kecamatan Surian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						42,500,000							55,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	25,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	7,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	5,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,500,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	4,500,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	5,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	4,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						290,000,000							290,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				11 Unit	280,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		11 Unit	280,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	10,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						192,000,000							192,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	12,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	175,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	175,000,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						260,542,000							260,542,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	60,542,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Unit	60,542,000	Kecamatan Surian
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	200,000,000	Kecamatan Surian
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Surian	persen		persen	100 persen	307,000,000						100 persen	307,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						60,000,000							60,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Surian
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Surian
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						192,000,000							192,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	192,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	192,000,000	Kecamatan Surian
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						55,000,000							55,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Surian
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Surian
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	15,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Surian
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Surian	persen		persen	100 persen	941,500,000						100 persen	941,500,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						95,000,000							95,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga	95,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Lembaga	95,000,000	Kecamatan Surian
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						846,500,000							846,500,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga	627,500,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Lembaga	627,500,000	Kecamatan Surian
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	122,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Lembaga	122,000,000	Kecamatan Surian
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	97,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	97,000,000	Kecamatan Surian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Surian	persen		persen	100 persen	160,000,000						100 persen	160,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						160,000,000							160,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	160,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	160,000,000	Kecamatan Surian
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Surian	persen		persen	100 persen	87,000,000						100 persen	87,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						87,000,000							87,000,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				5 Lembaga Masyarakat	30,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Lembaga Masyarakat	30,000,000	Kecamatan Surian
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	57,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 Dokumen	57,000,000	Kecamatan Surian
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Surian	persen		persen	100 persen	249,000,000						100 persen	249,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						249,000,000							249,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	45,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	45,000,000	Kecamatan Surian
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	82,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Dokumen	82,000,000	Kecamatan Surian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Surian
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Surian
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	72,000,000	Kab. Sumedang, Surian, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	72,000,000	Kecamatan Surian
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						5,030,013,672							5,030,013,672	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,124,513,672						100 Persen	3,124,513,672	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						111,240,000							111,240,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen	58,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 dokumen	58,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 dokumen	8,280,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	5,580,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 dokumen	3,490,000	Kecamatan Buahdua

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	4,490,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	31,400,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Laporan	31,400,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,090,382,712							2,090,382,712	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2,057,582,712	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		14 Orang/bulan	2,057,582,712	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	8,800,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	24,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	24,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3,000,000							3,000,000	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 dokumen	3,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 dokumen	3,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						9,860,000							9,860,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	3,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 paket	3,860,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 paket	3,860,000	Kecamatan Buahdua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 dokumen	3,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 dokumen	3,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						414,530,960							414,530,960	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				16 unit	404,530,960	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		16 unit	404,530,960	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 unit	10,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 unit	10,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						275,500,000							275,500,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9,500,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	9,500,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	4,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	262,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	262,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						220,000,000							220,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 unit	20,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 unit	20,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 unit	200,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Buahdua	Persen		Persen	100 Persen	308,000,000						100 Persen	308,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						113,000,000						113,000,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	70,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	70,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	43,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	43,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						144,000,000						144,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	144,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		16 Laporan	144,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						51,000,000						51,000,000		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	51,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	51,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Buahdua	Persen		Persen	100 Persen	1,050,500,000						100 Persen	1,050,500,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						85,000,000						85,000,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah				3 Lembaga	85,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		3 Lembaga	85,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						965,500,000						965,500,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 lembaga	656,500,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan				Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 lembaga	656,500,000	Kecamatan Buahdua
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 lembaga	102,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan				Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 lembaga	102,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				10 Unit	50,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan				Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Unit	50,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	117,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	117,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	40,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	40,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Buahdua	Persen		Persen	100 Persen	222,000,000							100 Persen	222,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						222,000,000								222,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	222,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Laporan	222,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Buahdua	Persen		Persen	100 Persen	37,000,000							100 Persen	37,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						37,000,000								37,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 dokumen	37,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6 dokumen	37,000,000	Kecamatan Buahdua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Buahdua	Persen		Persen	100 Persen	288,000,000						100 Persen	288,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						288,000,000							288,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	32,500,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	32,500,000	Kecamatan Buahdua
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa				1 Dokumen	53,500,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	53,500,000	Kecamatan Buahdua
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	46,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	46,000,000	Kecamatan Buahdua
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	66,000,000	Kab. Sumedang, Buahdua, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	66,000,000	Kecamatan Buahdua
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							5,875,446,618						5,572,561,030	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,773,946,618						100 Persen	3,721,061,030	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	109,500,000						6 Laporan	110,000,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	56,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	3 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	31,660,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	5 Laporan	45,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	2,647,828,458						3 Laporan	2,443,942,870	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/Bulan	2,627,828,458	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD dan ASN Kecamatan Tanjungsari	19 Orang/Bulan	2,403,942,870	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD dan ASN Kecamatan Tanjungsari	12 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Tanjungsari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	10,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD dan ASN Kecamatan Tanjungsari	12 Laporan	25,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	76,450,000						3 Laporan	120,000,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	15,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD dan ASN Kecamatan Tanjungsari	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				4 Orang	10,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	SKPD dan ASN Kecamatan Tanjungsari	4 Orang	15,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				46 Orang	51,450,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD dan ASN Kecamatan Tanjungsari	46 Orang	50,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	48,000,000						5 Laporan	94,100,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	1 Paket	13,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	1 Paket	14,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	1 Paket	12,500,000	Kecamatan Tanjungsari
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	1 Paket	8,500,000	Kecamatan Tanjungsari
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Tanjungsari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	365,000,000						3 Laporan	264,068,160	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				13 Unit	325,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	13 Unit	69,068,160	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	30,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	4 Unit	30,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	297,000,000						3 Laporan	419,800,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD dan Aparatur Kecamatan Tanjungsari	12 Laporan	19,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD dan Aparatur Kecamatan Tanjungsari	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	273,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD dan Aparatur Kecamatan Tanjungsari	12 Laporan	385,800,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	230,168,160						2 Laporan	269,150,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	30,168,160	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	7 Unit	69,150,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Tanjungsari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tanjungsari	Persen		Persen	100 Persen	576,000,000						100 Persen	588,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	62,000,000						1 Laporan	124,000,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	62,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD,UPT dan Desa Se-Kecamatan Tanjungsari	1 Dokumen	62,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	80,000,000						1 Laporan	74,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	80,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Tanjungsari	2 Laporan	74,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan		Laporan	2 Laporan	434,000,000						2 Laporan	390,000,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan NonPerizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	184,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Tanjungsari	1 Laporan	140,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	250,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Tanjungsari	1 Laporan	250,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Tanjungsari	Persen		Persen	100 Persen	674,500,000						100 Persen	686,500,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	75,000,000						1 Laporan	65,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga	75,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD, Desa-Desa, UPT Se-Kecamatan Tanjungsari	1 Lembaga	65,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	3 Laporan	599,500,000						3 Laporan	621,500,000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga	463,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari, Masyarakat, Lansia, Kelompok Ekonomi serta Kelompok Seni Kecamatan Tanjungsari	3 Lembaga	482,500,000	Kecamatan Tanjungsari
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	62,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari, Masyarakat, Lansia, Kelompok Ekonomi serta Kelompok Seni Kecamatan Tanjungsari	2 Lembaga	62,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	74,500,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	SKPD Kecamatan Tanjungsari, Masyarakat, Lansia, Kelompok Ekonomi serta Kelompok Seni Kecamatan Tanjungsari	2 Laporan	77,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Di Kecamatan Tanjungsari	Persen		Persen	100 Persen	292,000,000						100 Persen	180,000,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	292,000,000						1 Laporan	180,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	292,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Anggota Linmas, Relawan Penanggulangan Bencana dan Tim Monev Covid-19	1 Laporan	180,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Tanjungsari	Persen		Persen	100 Persen	247,000,000						100 Persen	135,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	247,000,000						2 Laporan	135,000,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				1 Lembaga Masyarakat	152,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Muspika Kecamatan Tanjungsari dan Desa Se-Kecamatan Tanjungsari	1 Lembaga Masyarakat	65,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	95,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Muspika Kecamatan Tanjungsari dan Desa Se-Kecamatan Tanjungsari	1 Dokumen	70,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Tanjungsari	Persen		Persen	100 Persen	312,000,000						100 Persen	262,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	5 Laporan	312,000,000						5 Laporan	262,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	112,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Desa dan Perangkat Desa Se-Kecamatan Tanjungsari	1 Dokumen	102,000,000	Kecamatan Tanjungsari
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Desa dan Perangkat Desa Se-Kecamatan Tanjungsari	1 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Tanjungsari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Desa dan Perangkat Desa Se-Kecamatan Tanjungsari	2 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Tanjungsari	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				24 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Desa dan Perangkat Desa Se-Kecamatan Tanjungsari	24 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Tanjungsari	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungsari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Desa dan Perangkat Desa Se-Kecamatan Tanjungsari	1 Laporan	40,000,000	Kecamatan Tanjungsari	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						5,013,915,742							5,240,755,742		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,184,215,742							100 Persen	3,411,055,742	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						81,200,000								131,840,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	27,960,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	48,000,000	Kecamatan Sukasari	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				2 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	8,280,000	Kecamatan Sukasari	
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	5,580,000	Kecamatan Sukasari	
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	3,490,000	Kecamatan Sukasari	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	4,490,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	31,400,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		24 Laporan	32,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,209,153,742							2,210,353,742	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/Bulan	2,177,353,742	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		20 Orang/Bulan	2,177,353,742	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		14 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	23,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		14 Laporan	23,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						27,000,000							52,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	19,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	19,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	8,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						61,662,000							61,662,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,642,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	16,642,000	Kecamatan Sukasari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	8,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	14,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	9,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4,020,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	4,020,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						250,000,000							400,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	205,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		8 Unit	205,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	12,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Unit	12,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	33,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Unit	33,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						280,200,000							280,200,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	22,200,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	22,200,000	Kecamatan Sukasari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	253,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	253,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						275,000,000							275,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	60,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		8 Unit	60,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	5,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Unit	5,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		8 Unit	5,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	205,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Unit	205,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Sukasari	Persen		Persen	100 Persen	560,000,000						100 Persen	560,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						50,000,000							50,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Sukasari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						200,000,000						200,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Laporan	200,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						310,000,000							310,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	270,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	270,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Sukasari	Persen		Persen	100 Persen	820,000,000						100 Persen	820,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						60,000,000							60,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Laporan	60,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	60,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						760,000,000							760,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga	650,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Lembaga	650,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	55,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Lembaga	55,000,000	Kecamatan Sukasari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	55,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Laporan	55,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Sukasari	Persen		Persen	100 Persen	154,700,000						100 Persen	154,700,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						130,000,000							130,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	130,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Laporan	130,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						24,700,000							24,700,000	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	24,700,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Laporan	24,700,000	Kecamatan Sukasari
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Sukasari	Persen		Persen	100 Persen	85,000,000						100 Persen	85,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						85,000,000							85,000,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				1 Lembaga	40,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Lembaga	40,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	45,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 Dokumen	45,000,000	Kecamatan Sukasari

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Sukasari	Persen		Persen	100 Persen	210,000,000						100 Persen	210,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						210,000,000							210,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	55,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	55,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Sukasari
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	55,000,000	Kab. Sumedang, Sukasari, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Laporan	55,000,000	Kecamatan Sukasari
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						5,668,963,532						5,772,472,892		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang- undangan Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	3,578,463,532						100 Persen 100 Persen	3,655,972,892	
7 01 01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					131,840,000							132,350,000	
7 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen 1 Dokumen	70,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen 1 Dokumen	70,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	8,280,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	5,580,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	4,490,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	40,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	40,000,000	Kecamatan Pamulihan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7	01	01	2.02					2,499,972,892						2,524,972,892		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/bulan	2,466,172,892	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan		Optimalisasi Pelayanan Dasar		14 Orang/bulan	2,466,172,892	Kecamatan Pamulihan
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2 Dokumen	8,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	8,800,000	Kecamatan Pamulihan
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Pamulihan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25,000,000					55,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	15,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Pamulihan
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	4 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Pamulihan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				36,400,640					34,400,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	17,000,640	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar	1 Paket	15,000,000	Kecamatan Pamulihan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	7,200,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar	1 Paket	7,200,000	Kecamatan Pamulihan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan		1 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Pamulihan
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	7,200,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar	12 Dokumen	7,200,000	Kecamatan Pamulihan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				356,000,000					380,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	286,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Unit	305,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	25,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Unit	25,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	45,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Unit	50,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						264,250,000							264,250,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Laporan	12,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,250,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	5,250,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	247,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 Laporan	247,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						265,000,000							265,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	50,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		8 Unit	50,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	15,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Unit	15,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Unit	200,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Pamulihan	Persen		Persen	100 Persen	750,049,000						100 Persen	776,049,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						200,000,000						200,000,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	150,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						150,000,000							150,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Laporan	150,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						400,049,000							426,049,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	150,049,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	176,049,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	250,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	250,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Pamulihan	Persen		Persen	100 Persen	900,451,000						100 Persen	900,451,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						300,000,000							300,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Laporan	150,000,000	Kecamatan Pamulihan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	150,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						600,451,000							600,451,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati Jumlah Keluarga Yang Diberdayakan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Jumlah Wakil Peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi				2 Jenis 60 Orang 1 Dokumen 50 Orang	487,500,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Jenis 60 Orang 1 Dokumen 50 Orang	487,500,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	112,951,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	112,951,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Pamulihan	Persen		Persen	100 Persen	120,000,000						100 Persen	120,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						120,000,000							120,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	120,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Laporan	120,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Pamulihan	Persen		Persen	100 Persen	86,000,000						100 Persen	86,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						86,000,000							86,000,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				2 Lembaga Masyarakat	26,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Lembaga Masyarakat	26,000,000	Kecamatan Pamulihan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	60,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Pamulihan	Persen		Persen	100 Persen	234,000,000						100 Persen	234,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						234,000,000							234,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	124,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	124,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Pamulihan
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Pamulihan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Laporan	30,000,000	Kecamatan Pamulihan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						6,000,587,539							5,908,378,392	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,843,587,539						100 Persen	4,007,378,392	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	121,240,000						6 Laporan	103,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	68,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	6 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	2 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	2 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	2 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	2 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	31,400,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	12 Laporan	53,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,465,787,539							2,274,878,392	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/Bulan	2,436,987,539	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		22 Orang/Bulan	2,219,878,392	Kecamatan Cimanggung
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Cimanggung

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	45,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5,000,000							0	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	0	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						19,500,000							79,000,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	14,500,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Paket	67,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	7 Laporan	89,600,000						7 Laporan	194,500,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	1 Paket	95,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	19,600,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	2 Paket	40,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	2 Paket	28,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	12 Dokumen	14,500,000	Kecamatan Cimanggung

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	397,960,000						3 Laporan	370,000,000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	305,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	12 Unit	150,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	26,960,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	5 Unit	50,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	66,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	4 Unit	170,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						360,500,000							462,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	37,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	313,500,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	400,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						384,000,000							524,000,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	80,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		8 Unit	100,000,000	Kecamatan Cimanggung

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	4,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Unit	24,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Unit	300,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Unit	100,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Cimanggung	Persen		Persen	100 Persen	769,000,000						100 Persen	459,000,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	80,000,000						2 Laporan	280,000,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	40,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	12 Laporan	141,500,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan	6 Dokumen	138,500,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						144,000,000							144,000,000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	144,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Laporan	144,000,000	Kecamatan Cimanggung
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Laporan		Laporan	3 Laporan	545,000,000						3 Laporan	35,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				9 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat	9 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	515,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Cimanggung	Persen		Persen	100 Persen	867,500,000						100 Persen	1,034,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	50,000,000						1 Laporan	45,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga	50,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan dan Desa	2 Lembaga	45,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	3 Laporan	817,500,000						3 Laporan	989,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga	570,500,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat	5 Lembaga	601,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	125,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat	4 Lembaga	237,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	122,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat	3 Laporan	151,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Cimanggung	Persen		Persen	100 Persen	120,500,000						100 Persen	100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	3 Laporan	120,500,000						3 Laporan	100,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	120,500,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat dan Forkopimcam	1 Laporan	100,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Cimanggung	Persen		Persen	100 Persen	95,000,000						100 Persen	100,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	95,000,000						2 Laporan	100,000,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				5 Lembaga Masyarakat	15,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan dan Forkopimcam	5 Lembaga Masyarakat	15,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	80,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan dan Forkopimcam	6 Dokumen	85,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Cimanggung	Persen		Persen	100 Persen	305,000,000						100 Persen	208,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	5 Laporan	305,000,000						5 Laporan	208,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	110,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Desa	2 Dokumen	66,000,000	Kecamatan Cimanggung

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	60,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Desa	2 Dokumen	67,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Desa	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Cimanggung
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Desa	1 Dokumen	0	Kecamatan Cimanggung
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	95,000,000	Kab. Sumedang, Cimanggung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Desa	2 Laporan	45,000,000	Kecamatan Cimanggung
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					7,039,323,714							7,039,323,714	
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan			Persen	Persen	100 Persen	4,321,823,714				100 Persen	4,321,823,714	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Laporan	Laporan	6 Laporan	147,350,000				6 Laporan	147,350,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	75,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	4 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	2 Dokumen	8,280,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	2 Dokumen	5,580,000	Kecamatan Jatinangor

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	2 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	2 Dokumen	4,490,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	24 Laporan	50,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	2,773,589,234						3 Laporan	2,773,589,234	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/Bulan	2,731,589,234	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	21 Orang/Bulan	2,731,589,234	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	12 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	14 Laporan	30,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	75,000,000						2 Laporan	75,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut				1 Paket	60,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	1 Paket	60,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	4 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Jatinangor

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	152,884,480						6 Laporan	152,884,480	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	1 Paket	30,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	19,234,480	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	2 Paket	19,234,480	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	63,650,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	2 Paket	63,650,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	1 Paket	15,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				12 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	12 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berkas Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berkas Elektronik Pada SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	435,000,000						3 Laporan	435,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				13 Unit	330,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	13 Unit	330,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	30,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	3 Unit	30,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	75,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	5 Unit	75,000,000	Kecamatan Jatinangor

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	340,000,000						3 Laporan	340,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	290,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	12 Laporan	290,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	398,000,000						5 Laporan	398,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	65,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	8 Unit	65,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	10,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	4 Unit	10,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralata dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	10,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	8 Unit	10,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	205,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	1 Unit	205,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	108,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor	2 Unit	108,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jatinangor	Persen		Persen	100 Persen	1,079,000,000						100 Persen	1,079,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	55,000,000						2 Laporan	55,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	35,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor dan Aparatur Desa	1 Laporan	35,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor dan Aparatur Desa	2 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	234,000,000						1 Laporan	234,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	234,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Jatinangor, Aparatur Desa dan Masyarakat	12 Laporan	234,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan		Laporan	3 Laporan	790,000,000						3 Laporan	790,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa dan Masyarakat	2 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa dan Masyarakat	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	750,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa dan Masyarakat	1 Laporan	750,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Jatinangor	Persen		Persen	100 Persen	1,030,000,000						100 Persen	1,030,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	90,000,000						1 Laporan	90,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah				3 Lembaga	90,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa dan Masyarakat	3 Lembaga	90,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	3 Laporan	940,000,000						3 Laporan	940,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga	590,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Peserta TQ, Kader Posyandu, Masyarakat, Lansia dan Kepemudaan	6 Lembaga	590,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	180,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Peserta TQ, Kader Posyandu, Masyarakat, Lansia dan Kepemudaan	4 Lembaga	180,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	170,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Peserta TQ, Kader Posyandu, Masyarakat, Lansia dan Kepemudaan	3 Laporan	170,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Jatinangor	Persen		Persen	100 Persen	198,500,000						100 Persen	198,500,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	173,500,000						1 Laporan	173,500,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	173,500,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kecamatan Jatinangor dan Anggota Linmas	5 Laporan	173,500,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Laporan		Laporan	1 Laporan	25,000,000						1 Laporan	25,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Lembaga, Aparatur Desa dan Aparatur Kecamatan Jatinangor	1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Jatinangor	Persen		Persen	100 Persen	110,000,000						100 Persen	110,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	110,000,000						2 Laporan	110,000,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				6 Lembaga Masyarakat	50,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan, Forkopimcam Jatinangor dan Aparatur Desa	6 Lembaga Masyarakat	50,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	60,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan, Forkopimcam Jatinangor dan Aparatur Desa	6 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Jatinangor	Persen		Persen	100 Persen	300,000,000						100 Persen	300,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	7 Laporan	300,000,000						7 Laporan	300,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	135,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa	2 Dokumen	135,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan				2 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa	2 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Jatinangor

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Jatinangor
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Jatinangor, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa	1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Jatinangor
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						5,429,975,306							5,429,975,306	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,670,475,306						100 Persen	3,670,475,306	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						118,240,000							118,240,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	65,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	8,280,000	Kecamatan Rancakalong

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	5,580,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	3,490,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	4,490,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	31,400,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	31,400,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,496,118,186							2,496,118,186	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	2,476,118,186	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		18 Orang/bulan	2,476,118,186	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5,000,000							5,000,000	
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						57,000,000							57,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				37 Paket	19,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		37 Paket	19,000,000	Kecamatan Rancakalong

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	8,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				5 Orang	10,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Orang	10,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				37 Orang	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		37 Orang	20,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						134,760,000							134,760,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	40,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Paket	40,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	15,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Paket	15,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Paket	15,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	6,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	43,760,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	43,760,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						316,357,120							316,357,120	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				11 Unit	276,530,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		11 Unit	276,530,000	Kecamatan Rancakalong

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	39,827,120	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	3 Unit	39,827,120	Kecamatan Rancakalong	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						303,000,000						303,000,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	12 Laporan	8,000,000	Kecamatan Rancakalong	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	10,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	2 Laporan	10,000,000	Kecamatan Rancakalong	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				96 Laporan	285,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	96 Laporan	285,000,000	Kecamatan Rancakalong	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						240,000,000						240,000,000		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	30,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	14 Unit	30,000,000	Kecamatan Rancakalong	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	5 Unit	10,000,000	Kecamatan Rancakalong	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Rancakalong	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rancakalong	persen		persen	100 persen	217,000,000					100 persen	217,000,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						60,000,000						60,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						137,000,000							137,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	137,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Laporan	137,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						20,000,000							20,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Rancakalong	persen		persen	100 persen	839,500,000						100 persen	839,500,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						120,000,000							120,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga	120,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Lembaga	120,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						719,500,000							719,500,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga	518,500,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		5 Lembaga	518,500,000	Kecamatan Rancakalong

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	102,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		4 Lembaga	102,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	99,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	99,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Rancakalong	persen		persen	100 persen	234,000,000						100 persen	234,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						209,000,000							209,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	209,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	209,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 04 7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah						25,000,000							25,000,000	
7 01 04 7.04 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Rancakalong	persen		persen	100 persen	75,000,000						100 persen	75,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						75,000,000							75,000,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				1 Lembaga Masyarakat	45,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Lembaga Masyarakat	45,000,000	Kecamatan Rancakalong

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		6 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Rancakalong	persen		persen	100 persen	394,000,000						100 persen	394,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						394,000,000							394,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	141,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	141,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	60,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		2 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	34,500,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	34,500,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	34,500,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	34,500,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	34,500,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	34,500,000	Kecamatan Rancakalong
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat				1 Dokumen	34,500,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	34,500,000	Kecamatan Rancakalong

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	35,000,000	Kab. Sumedang, Rancakalong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		1 Laporan	35,000,000	Kecamatan Rancakalong
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
							9,642,397,231							10,390,902,118	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	7,117,897,231						100 Persen	7,548,002,118	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						151,000,000							202,000,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	75,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	100,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	9,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	6,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	5,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		24 Laporan	70,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	5,541,751,281						3 Laporan	5,423,502,118	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	5,507,751,281	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Sumrdang Selatan	39 Orang/bulan	5,358,502,118	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Sumrdang Selatan	12 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Sumrdang Selatan	24 Laporan	50,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8,645,950							35,000,000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	8,645,950	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						37,000,000							70,000,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	17,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	22,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	7 Laporan	122,000,000						7 Laporan	315,000,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	100,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	35,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	40,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	90,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				12 Dokumen	8,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis				4 Dokumen	6,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	450,000,000						3 Laporan	505,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 Unit	380,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		15 Unit	375,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Unit	30,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		8 Unit	100,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						425,500,000							454,500,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	51,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	60,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	364,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	364,500,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						382,000,000							543,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	52,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		18 Unit	85,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	10,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Unit	25,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Unit	33,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Sumedang

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	200,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	200,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat Di Kecamatan Sumedang Utara	Persen		Persen	100 Persen	901,500,000						100 Persen	1,086,900,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						101,200,000							250,000,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	40,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	50,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	61,200,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	200,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	221,900,000						1 Laporan	221,900,000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	221,900,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Laporan	221,900,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan		Laporan	3 Laporan	578,400,000						3 Laporan	615,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				13 Dokumen	58,400,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		13 Dokumen	95,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	500,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Laporan	500,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Sumedang Selatan	Persen		Persen	100 Persen	1,055,000,000						100 Persen	1,160,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						50,000,000							150,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah				5 Lembaga	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Lembaga	150,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	4 Laporan	1,005,000,000						4 Laporan	1,010,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga	700,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 Lembaga	700,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	135,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Lembaga	135,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	150,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Di Kecamatan Sumedang Selatan	Persen		Persen	100 Persen	160,000,000						100 Persen	160,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						160,000,000							160,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	160,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Laporan	160,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani Di Kecamatan Sumedang Selatan	Persen		Persen	100 Persen	111,000,000						100 Persen	121,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	111,000,000						2 Laporan	121,000,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				5 Lembaga Masyarakat	31,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Lembaga Masyarakat	31,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	80,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Sumedang Selatan	Persen		Persen	100 Persen	297,000,000						100 Persen	315,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	6 Laporan	297,000,000						6 Laporan	315,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	120,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	120,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	67,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	85,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,067,801,000						1,594,041,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Persen		Persen	100 Persen	228,000,000						100 Persen	228,000,000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Persen		Persen	100 Persen	20,500,000						100 Persen	20,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,090,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Pasanggrahan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Pasanggrahan Baru	1 Paket	14,090,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,410,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Pasanggrahan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Pasanggrahan Baru	1 Paket	6,410,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	50,000,000						2 Laporan	50,000,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Pasanggrahan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Pasanggrahan Baru	50 Unit	20,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	30,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Pasanggrahan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Pasanggrahan Baru	3 Unit	30,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	157,500,000						1 Laporan	157,500,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	157,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Pasanggrahan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Pasanggrahan Baru	12 Laporan	157,500,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif di Kecamatan Sumedang Selatan	Persen		Persen	100 Persen	839,801,000						100 Persen	1,366,041,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						764,801,000							1,291,041,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Pasanggrahan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Lembaga	25,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	306,760,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Pasanggrahan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Unit	600,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	438,041,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Pasanggrahan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pelayanan Dasar		7 Pokmas / Ormas	666,041,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Laporan		Laporan	2 Laporan	75,000,000						2 Laporan	75,000,000	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	64,800,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Pasanggrahan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kelurahan Pasanggrahan Baru	1 Dokumen	64,800,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.05 04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	10,200,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Pasanggrahan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kelurahan Pasanggrahan Baru	1 Dokumen	10,200,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					1,067,801,000							1,539,000,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Persen		Persen	100 Persen	228,000,000						100 Persen	233,000,000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	7,500,000						2 Laporan	7,500,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Kotakulon	1 Paket	7,500,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	15,000,000						1 Laporan	20,000,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Kotakulon	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	205,500,000						1 Laporan	205,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	205,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Kotakulon	12 Laporan	205,500,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Sumedang Selatan	Persen		Persen	100 Persen	839,801,000						100 Persen	1,306,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						764,801,000							1,230,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	17,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Lembaga	30,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	274,675,500	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Unit	600,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	472,625,500	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Pokmas / Ormas	600,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Laporan		Laporan	2 Laporan	75,000,000						2 Laporan	76,000,000	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	54,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kelurahan Kotakulon	1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.05 04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	21,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kelurahan Kotakulon	1 Dokumen	26,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,067,801,000							1,092,000,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Persen		Persen	100 Persen	228,000,000						100 Persen	282,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	70,500,000						2 Laporan	82,000,000	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	6,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Regolwetan	1 Unit	7,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	64,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Regolwetan	5 Unit	75,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	157,500,000						1 Laporan	200,000,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	157,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Regolwetan	12 Laporan	200,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Sumedang Selatan	Persen		Persen	100 Persen	839,801,000						100 Persen	810,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan		Laporan	3 Laporan	764,801,000						3 Laporan	720,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga	15,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Lembaga	20,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	357,740,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Unit	400,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	392,061,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		9 Pokmas / Ormas	300,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Laporan		Laporan	2 Laporan	75,000,000						2 Laporan	90,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	64,800,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kelurahan Regolwetan	1 Dokumen	70,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.05 04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	10,200,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Regolwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kelurahan Regolwetan	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,067,801,000							1,515,000,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Persen		Persen	100 Persen	228,000,000						100 Persen	320,000,000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	83,000,000						2 Laporan	120,000,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	70,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Cipameungpeuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Cipameungpeuk	3 Paket	100,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	13,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Cipameungpeuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Cipameungpeuk	5 Paket	20,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	145,000,000						1 Laporan	200,000,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	145,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Cipameungpeuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kelurahan Cipameungpeuk	12 Dokumen	200,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Sumedang Selatan	Persen		Persen	100 Persen	839,801,000						100 Persen	1,195,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						764,801,000							1,120,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga	15,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Cipameungpeuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Lembaga	20,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	399,801,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Cipameungpeuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Pelayanan Dasar	3 Unit	500,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	350,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Cipameungpeuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Pelayanan Dasar	6 Pokmas / Ormas	600,000,000	Kecamatan Sumedang Selatan	
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Laporan		Laporan	2 Laporan	75,000,000					2 Laporan	75,000,000		
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	64,800,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Cipameungpeuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kelurahan Cipameungpeuk	1 Dokumen	64,800,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7 01 03 2.05 04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	10,200,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Cipameungpeuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kelurahan Cipameungpeuk	1 Dokumen	10,200,000	Kecamatan Sumedang Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						8,355,874,521							7,989,394,988	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	6,374,374,521					100 Persen	6,007,894,988		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						137,000,000						142,000,000		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	65,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar	4 Dokumen	70,000,000	Kecamatan Sumedang Utara	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	9,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	2 Dokumen	9,500,000	Kecamatan Sumedang Utara	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	6,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	6,500,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	45,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		24 Laporan	45,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,987,033,081							4,615,553,548	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang	4,954,533,081	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		38 Orang	4,583,053,548	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	22,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		24 Laporan	22,500,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						34,430,000							34,430,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	24,430,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	24,430,000	Kecamatan Sumedang Utara

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						110,301,440							110,301,440	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36,398,440	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	36,398,440	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	3,500,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	24,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32,243,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	32,243,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				9 Dokumen	14,160,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		9 Dokumen	14,160,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						383,430,000							383,430,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				14 Unit	355,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		14 Unit	355,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	10,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Unit	10,000,000	Kecamatan Sumedang Utara

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	18,430,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Unit	18,430,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						404,000,000							404,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	43,500,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	355,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	355,500,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						318,180,000							318,180,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	65,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		14 Unit	65,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	10,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		20 Unit	10,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	243,180,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Unit	243,180,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Sumedang Utara	persen		persen	100 persen	302,000,000						100 persen	302,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						80,000,000							80,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						122,000,000							122,000,000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	122,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	122,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						100,000,000							100,000,000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	100,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Sumedang Utara	persen		persen	100 persen	995,500,000						100 persen	995,500,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						79,000,000							79,000,000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Laporan	79,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	79,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						916,500,000							916,500,000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga	657,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 Lembaga	657,500,000	Kecamatan Sumedang Utara

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	137,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Lembaga	137,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	122,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	122,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Sumedang Utara	persen		persen	100 persen	225,000,000						100 persen	225,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						175,000,000							175,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	175,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Laporan	175,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						50,000,000							50,000,000	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	50,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani dengan Baik di Kecamatan Sumedang Utara	persen		persen	100 persen	110,000,000						100 persen	110,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						110,000,000							110,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				6 Lembaga	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 Lembaga	50,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	60,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Sumedang Utara	persen		persen	100 persen	349,000,000						100 persen	349,000,000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						349,000,000							349,000,000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	102,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	102,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	127,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	127,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Sumedang Utara

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	50,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,067,801,000							1,067,801,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						228,000,000							228,000,000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						105,500,000							105,500,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	60,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	9,500,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	24,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				1 Paket	12,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	12,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121,000,000							121,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	6,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	115,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	115,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,500,000							1,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	1,500,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Unit	1,500,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						839,801,000							839,801,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						764,801,000							764,801,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga	25,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Lembaga	25,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit 0 Unit	300,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit 0 Unit	300,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas	439,801,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		8 Pokmas	439,801,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						75,000,000							75,000,000	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	54,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	54,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03 2.05 04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	21,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Kotakaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Dokumen	21,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,067,801,000						1,067,801,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							228,000,000						228,000,000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							109,000,000						109,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	60,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	10,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	24,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	15,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						117,400,000							117,400,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2,400,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	2,400,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	115,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	115,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,600,000							1,600,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit 0 Unit	1,600,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Unit 0 Unit	1,600,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						839,801,000							839,801,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						764,801,000							764,801,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga	30,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Lembaga	30,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit 0 Unit	300,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Unit 0 Unit	300,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas	434,801,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		8 Pokmas	434,801,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						75,000,000							75,000,000	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	54,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	54,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03 2.05 04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	21,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	21,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					1,067,801,000							1,067,801,000	
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					228,000,000							228,000,000	
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					99,000,000							99,000,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Talun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	60,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Talun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	9,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Talun			Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	24,000,000	Kecamatan Sumedang Utara

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Talun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	6,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7,000,000							7,000,000	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	7,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Talun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Unit	7,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121,000,000							121,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Talun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	6,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	115,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Talun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	115,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,000,000							1,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	1,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Situ	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Unit	1,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						839,801,000							839,801,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						764,801,000							764,801,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga	17,850,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Talun	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Lembaga	17,850,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit 0 Unit	346,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Talun	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Unit 0 Unit	346,000,000	Kecamatan Sumedang Utara

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas	400,951,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Talun	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		8 Pokmas	400,951,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						75,000,000							75,000,000	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	54,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Talun	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	54,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7 01 03 2.05 04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	21,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Utara, Talun	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	21,000,000	Kecamatan Sumedang Utara
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						4,872,339,796							4,872,339,796	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,139,839,796						100 Persen	3,139,839,796	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	148,500,000						6 Laporan	148,500,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	61,500,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	4 Dokumen	61,500,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	8,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	2 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Ganeas

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	7,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	2 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	7,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	2 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	55,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	19 Laporan	55,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	1,992,417,436						3 Laporan	1,992,417,436	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1,953,417,436	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	12 Orang/bulan	1,953,417,436	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	12 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	5,000,000						2 Laporan	5,000,000	
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	43,000,000						4 Laporan	43,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	35,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	1 Paket	35,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	8,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	4 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	9 Laporan	92,922,360						9 Laporan	92,922,360	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	43,282,360	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	1 Paket	43,282,360	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	42,800,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	1 Paket	42,800,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,600,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	1 Paket	3,600,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3,240,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	12 Dokumen	3,240,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	290,000,000						3 Laporan	290,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9 Unit	225,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	9 Unit	225,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	65,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	7 Unit	65,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	268,000,000						3 Laporan	268,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	12 Laporan	12,000,000	Kecamatan Ganeas
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	256,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	12 Laporan	256,000,000	Kecamatan Ganeas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	300,000,000						5 Laporan	300,000,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	100,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	8 Unit	100,000,000	Kecamatan Ganeas
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Ganeas
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Ganeas	Persen		Persen	100 Persen	312,000,000						100 Persen	312,000,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	50,000,000						2 Laporan	50,000,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Ganeas	12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Ganeas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	262,000,000						1 Laporan	262,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	262,000,000	Semua Kab/Kota, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	3 Laporan	262,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Ganeas	Persen		Persen	100 Persen	796,500,000						100 Persen	796,500,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	45,000,000						1 Laporan	45,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga	45,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	4 Lembaga	45,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	5 Laporan	751,500,000						5 Laporan	751,500,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga	582,500,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	5 Lembaga	582,500,000	Kecamatan Ganeas
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	92,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	4 Lembaga	92,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	77,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	3 Laporan	77,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Ganeas	Persen		Persen	100 Persen	205,000,000						100 Persen	205,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	175,000,000						1 Laporan	175,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	175,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	4 Laporan	175,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	30,000,000						1 Laporan	30,000,000	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Ganeas	Persen		Persen	100 Persen	95,000,000						100 Persen	95,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	95,000,000						2 Laporan	95,000,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				8 Lembaga Masyarakat	55,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	8 Lembaga Masyarakat	55,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	6 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Ganeas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Ganeas	Persen		Persen	100 Persen	324,000,000						100 Persen	324,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	8 Laporan	324,000,000						8 Laporan	324,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	122,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	2 Dokumen	122,000,000	Kecamatan Ganeas	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Ganeas	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Ganeas	
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Ganeas	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	92,000,000	Semua Kab/Kota, Ganeas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Ganeas	1 Laporan	92,000,000	Kecamatan Ganeas	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						5,042,463,587							5,385,392,216		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,331,963,587							100 Persen	3,612,892,216	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						120,000,000								126,000,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	60,000,000	Kab. Sumedang, Tangungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Tangungkerta	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,300,000	Kab. Sumedang, Tangungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Tangungkerta	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,600,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4,600,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,500,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	37,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		24 Laporan	40,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	2,081,809,107						3 Laporan	2,295,892,216	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	2,064,809,107	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		14 Orang/Bulan	2,275,892,216	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				12 Laporan	8,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						12,000,000							16,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				31 Paket	8,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		31 Paket	10,000,000	Kecamatan Tanjungkerta

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						90,154,480							104,000,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30,154,480	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Paket	35,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	3,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	35,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Paket	40,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan				3 Paket	18,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Paket	20,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						360,000,000							370,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan				13 Unit	330,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		13 Unit	330,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Unit	40,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						400,000,000							416,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	8,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	8,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan				12 Laporan	387,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	400,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						268,000,000							285,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	60,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		7 Unit	75,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	5,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Unit	5,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	203,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	205,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tanjungkerta	persen		persen	100 persen	279,000,000						100 persen	320,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						94,000,000							120,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	40,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	60,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	54,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Tanjungkerta

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						145,000,000						150,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	145,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Laporan	150,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						40,000,000						50,000,000		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Tanjungkerta	Persen		Persen	100 Persen	815,000,000					100 Persen	825,000,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	4 Lembaga	85,000,000					4 Lembaga	85,000,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	85,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kecamatan Tanjungkerta	4 Lembaga Kemasyarakatan	85,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						730,000,000						740,000,000		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	550,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		5 Lembaga Kemasyarakatan	550,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkn Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	100,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Lembaga Kemasyarakatan	100,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	80,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	90,000,000	Kecamatan Tanjungkerta

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Tanjungkerta	persen		persen	100 persen	204,000,000						100 persen	204,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	3 Laporan	204,000,000						3 Laporan	204,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	204,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Masyarakat Kecamatan Tanjungkerta	3 Laporan	204,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Tanjungkerta	persen		persen	100 persen	112,500,000						100 persen	122,500,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						112,500,000							122,500,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				4 Lembaga Masyarakat	70,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Lembaga Masyarakat	80,000,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	42,500,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	42,500,000	Kecamatan Tanjungkerta
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Tanjungkerta	persen		persen	100 persen	300,000,000						100 persen	301,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						300,000,000							301,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	55,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Dokumen	45,000,000	Kecamatan Tanjungkerta

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	65,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Dokumen	71,000,000	Kecamatan Tanjungkerta	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Tanjungkerta	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	45,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	45,000,000	Kecamatan Tanjungkerta	
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Tanjungkerta	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	55,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungkerta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Tanjungkerta	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						4,964,401,868							5,742,075,824		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,183,901,868							100 Persen	3,989,575,824	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						114,155,000								94,000,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	58,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		3 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen 0 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 laporan	34,315,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi		24 laporan	60,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,199,118,268							2,219,818,268	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan 0 Orang/bulan	2,160,318,268	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi		14 bulan 0 Orang/bulan	2,160,318,268	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	8,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	9,500,000	Kecamatan Tanjungmedar

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan 0 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		14 Laporan 0 Laporan	50,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						52,500,000							94,000,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 paket 0 Paket	17,500,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 paket 0 Paket	50,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen 0 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen 0 Dokumen	14,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				0 Orang 3 Orang	5,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Orang 3 Orang	10,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang 0 Orang	20,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		30 Orang 0 Orang	20,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						51,139,000							308,500,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	18,500,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket 0 Paket	50,000,000	Kecamatan Tanjungmedar

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	5,019,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket 0 Paket	10,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	21,500,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket 0 Paket	50,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Paket	20,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	3,120,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						261,800,000							365,145,000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	250,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		10 Unit	255,145,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11,800,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit	75,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						235,200,000							323,112,556	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan 0 Laporan	12,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan 0 Laporan	15,000,000	Kecamatan Tanjungmedar

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan 0 Laporan	223,200,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan 0 Laporan	308,112,556	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						269,989,600							585,000,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	67,989,600	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		7 Unit	90,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 2 Unit	2,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Unit 2 Unit	10,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 0 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Unit 0 Unit	265,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tanjungmedar	0		0	0 0	384,000,000						0 0	396,000,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						100,000,000							112,000,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	60,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan	60,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		4 Dokumen	52,000,000	Kecamatan Tanjungmedar

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						144,000,000						144,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan 0 Laporan	144,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		12 Laporan 0 Laporan	144,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						140,000,000							140,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	100,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan 1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan			Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Laporan 1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan 1 dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan			Optimalisasi Pelayanan Dasar		0 Laporan 1 dokumen	20,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Tanjungmedar	persen		persen	100 persen	906,500,000					100 persen	886,500,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						60,000,000							40,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Lembaga	40,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						846,500,000							846,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga	657,500,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Lembaga	657,500,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	92,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Lembaga	92,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	97,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	97,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Tanjungmedar	persen		persen	100 persen	160,000,000						100 persen	90,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						160,000,000							90,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	160,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pelayanan Dasar		3 Laporan	90,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Tanjungmedar	persen		persen	100 persen	70,000,000						100 persen	110,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						70,000,000							110,000,000	
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	mlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				2 Laporan	20,000,000				Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Laporan	40,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		6 Dokumen 0 Dokumen	70,000,000	Kecamatan Tanjungmedar

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Tanjungmedar	persen		persen	100 persen	260,000,000						100 persen	270,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						260,000,000							270,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	68,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	68,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		2 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	36,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan			Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	36,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen 0 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen 0 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen 0 Dokumen	36,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan			Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen 0 Dokumen	36,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Tanjungmedar, Semua Kelurahan			Optimalisasi Pelayanan Dasar		1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Tanjungmedar
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						5,443,048,910							5,988,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,997,548,910						100 Persen	4,403,500,000	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	154,200,000						6 Laporan	166,000,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	62,360,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	5 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	1 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	1 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	70,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	10 Laporan	80,000,000	Kecamatan Cimalaka

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	2,521,204,030						3 Laporan	2,540,000,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	2,487,404,030	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	12 Bulan	2,500,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	12 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	135,000,000						5 Laporan	210,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	20,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	35 Paket	30,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				8 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	8 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	1 Dokumen	110,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	82,144,880						5 Laporan	107,500,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,144,880	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	1 Paket	60,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	1 Paket	15,000,000	Kecamatan Cimalaka

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	1 Paket	15,000,000	Kecamatan Cimalaka
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Cimalaka
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				8 Dokumen	7,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	8 Dokumen	7,500,000	Kecamatan Cimalaka
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	525,000,000						5 Laporan	680,000,000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 Unit	380,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	15 Unit	400,000,000	Kecamatan Cimalaka
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	5 Unit	110,000,000	Kecamatan Cimalaka
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	1 Unit	50,000,000	Kecamatan Cimalaka
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	315,000,000						3 Laporan	355,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Cimalaka
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	300,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	12 Laporan	310,000,000	Kecamatan Cimalaka

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	265,000,000						5 Laporan	330,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	45,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	12 Unit	50,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	10,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	5 Unit	20,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	5 Unit	20,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	1 Unit	220,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Cimalaka	persen		persen	100 persen	305,000,000						100 persen	330,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	25,000,000						2 Laporan	30,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cimalaka	1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	280,000,000						1 Laporan	300,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	280,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Cimalaka	1 Laporan	300,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Cimalaka	persen		persen	100 persen	850,500,000						100 persen	890,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	50,500,000						1 Laporan	60,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 lmbg kmsyrktan	50,500,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cimalaka	1 lmbg kmsyrktan	60,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	3 Laporan	800,000,000						3 Laporan	830,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga	470,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cimalaka	6 Lembaga	480,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	250,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cimalaka	3 Lembaga	260,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	80,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cimalaka	3 Laporan	90,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani dikecamatan Cimalaka	persen		persen	100 persen	110,000,000						100 persen	150,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	110,000,000						1 Laporan	150,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	110,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Cimalaka	2 Laporan	150,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di kecamatan Cimalaka	persen		persen	100 persen	30,000,000						100 persen	40,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	30,000,000						1 Laporan	40,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Cimalaka	1 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Cimalaka	persen		persen	100 persen	150,000,000						100 persen	175,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	3 Laporan	150,000,000						3 Laporan	175,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Desa dan Masyarakat Kecamatan Cimalaka	2 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Desa dan Masyarakat Kecamatan Cimalaka	2 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Cimalaka
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				14 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Cimalaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Desa dan Masyarakat Kecamatan Cimalaka	14 Laporan	55,000,000	Kecamatan Cimalaka
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							4,994,938,807						7,395,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,511,238,807						100 Persen	4,925,000,000	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	124,840,000						6 Laporan	154,000,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	53,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	4 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	16 Laporan	70,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	2,521,206,247						3 Laporan	3,065,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/Bulan	2,492,406,247	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	17 Orang/Bulan	3,000,000,000	Kecamatan Cisarua
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	12 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Cisarua
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	12 Laporan	40,000,000	Kecamatan Cisarua
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	15,000,000						4 Laporan	145,000,000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	6 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Cisarua
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	85,160,000						6 Laporan	353,000,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	1 Paket	50,000,000	Kecamatan Cisarua
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	1 Paket	15,000,000	Kecamatan Cisarua
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	1 Paket	35,000,000	Kecamatan Cisarua
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	1 Paket	50,000,000	Kecamatan Cisarua
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	2,160,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	3 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Cisarua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	247,032,560						3 Laporan	475,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	8 Unit	300,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	47,032,560	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	3 Unit	100,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	268,000,000						3 Laporan	333,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	12 Laporan	8,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	255,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	12 Laporan	300,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	250,000,000						3 Laporan	400,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	50,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	10 Unit	100,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Cisarua	Persen		Persen	100 Persen	295,000,000						100 Persen	500,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	110,000,000						2 Laporan	225,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	12 Laporan	75,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	80,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Kecamatan Cisarua	12 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	80,000,000						1 Laporan	150,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	80,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisarua	3 Laporan	150,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan		Laporan	2 Laporan	105,000,000						2 Laporan	125,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				6 Dokumen	80,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisarua	6 Dokumen	80,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisarua	1 Laporan	45,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Cisarua	Persen		Persen	100 Persen	767,000,000						100 Persen	1,025,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	60,000,000						1 Laporan	50,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah				3 Laporan	60,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisarua	3 Laporan	50,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	4 Laporan	707,000,000						4 Laporan	975,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga	457,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisarua	6 Lembaga	500,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	100,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisarua	4 Lembaga	200,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	100,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisarua	3 Laporan	200,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisarua	1 Laporan	75,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Cisarua	Persen		Persen	100 Persen	120,000,000						100 Persen	250,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	100,000,000						1 Laporan	200,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	100,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Forkompimke c dan Masyarakat Kecamatan Cisarua	5 Laporan	200,000,000	Kecamatan Cisarua
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Laporan		Laporan	1 Laporan	20,000,000						1 Laporan	50,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisarua	1 Laporan	50,000,000	Kecamatan Cisarua
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Cisarua	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000						100 Persen	250,000,000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	100,000,000						2 Laporan	250,000,000	
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				8 Lembaga Masyarakat	50,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisarua	8 Lembaga Masyarakat	150,000,000	Kecamatan Cisarua
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisarua	12 Dokumen	100,000,000	Kecamatan Cisarua
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Cisarua	Persen		Persen	100 Persen	201,700,000						100 Persen	445,000,000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	6 Laporan	201,700,000						6 Laporan	445,000,000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	81,700,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa Kecamatan Cisarua	2 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Cisarua
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa Kecamatan Cisarua	2 Dokumen	100,000,000	Kecamatan Cisarua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa Kecamatan Cisarua	1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Cisarua	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa Kecamatan Cisarua	1 Dokumen	45,000,000	Kecamatan Cisarua	
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa Kecamatan Cisarua	1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Cisarua	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Cisarua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Desa Kecamatan Cisarua	1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Cisarua	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN							4,522,899,120							4,616,899,120	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	2,704,399,120						100 Persen	2,460,899,120		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	110,400,000						6 Laporan	139,000,000		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	57,160,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	4 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Tomo	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Tomo	
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	2 Dokumen	6,500,000	Kecamatan Tomo	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,490,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	2 Dokumen	6,500,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	31,400,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	9 Laporan	45,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	1,569,699,120						3 Laporan	1,585,899,120	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,535,899,120	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	14 Orang/bulan	1,535,899,120	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	12 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	12 Laporan	40,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	6,000,000						1 Laporan	7,500,000	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	6,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	4 Dokumen	7,500,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	29,300,000						4 Laporan	44,500,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	12,800,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	2 Paket	17,500,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	2 Paket	15,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1,500,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	2 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	255,000,000						1 Laporan	100,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	255,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	10 Unit	100,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	461,000,000						3 Laporan	499,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	12 Laporan	40,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	5,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	2 Laporan	9,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	426,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	12 Laporan	450,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	273,000,000						3 Laporan	85,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	62,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	8 Unit	75,000,000	Kecamatan Tomo
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	10 Unit	10,000,000	Kecamatan Tomo
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	205,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan Tomo	1 Unit	0	Kecamatan Tomo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tomo	persen		persen	100 persen	420,000,000						100 persen	495,000,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	140,000,000						2 Laporan	180,000,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	70,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan Masyarakat Kecamatan Tomo	12 Laporan	90,000,000	Kecamatan Tomo
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	70,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan Masyarakat Kecamatan Tomo	6 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Tomo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	250,000,000						1 Laporan	275,000,000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	250,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Tomo	12 Laporan	275,000,000	Kecamatan Tomo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan		Laporan	1 Laporan	30,000,000						1 Laporan	40,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Tomo	1 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Tomo	persen		persen	100 persen	775,000,000						100 persen	868,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	75,000,000						1 Laporan	98,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	75,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan Masyarakat Kecamatan Tomo	5 Lembaga Kemasyarakatan	98,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	3 Laporan	700,000,000						3 Laporan	770,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	75,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kecamatan Tomo	5 Lembaga Kemasyarakatan	500,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	125,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kecamatan Tomo	5 Lembaga Kemasyarakatan	150,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	100,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kecamatan Tomo	3 Laporan	120,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Tomo	persen		persen	100 persen	150,000,000						100 persen	200,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	150,000,000						1 Laporan	200,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	150,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan & Desa, Anggota TNI-POLRI, Satlinmas, Satlak Bencana, dan Masyarakat	12 Laporan	200,000,000	Kecamatan Tomo
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Tomo	persen		persen	100 persen	136,000,000						100 persen	165,000,000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	136,000,000						2 Laporan	165,000,000	
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				5 Lembaga Masyarakat	16,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan, Anggota TNI-POLRI, Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Tomo	5 Lembaga Masyarakat	20,000,000	Kecamatan Tomo
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	120,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Kecamatan, Anggota TNI-POLRI, Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Tomo	12 Dokumen	145,000,000	Kecamatan Tomo
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Tomo	persen		persen	100 persen	337,500,000						100 persen	428,000,000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	6 Laporan	337,500,000						6 Laporan	428,000,000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Tomo	3 Dokumen	125,000,000	Kecamatan Tomo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Tomo	3 Dokumen	58,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Tomo	1 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	30,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Tomo	2 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	52,500,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Tomo	1 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Tomo
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	65,000,000	Kab. Sumedang, Tomo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Tomo	9 Laporan	75,000,000	Kecamatan Tomo
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					5,705,995,176							7,026,120,347	
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	4,136,495,176						100 Persen	5,551,945,000	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	107,840,000						6 Laporan	124,000,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Ujungjaya	5 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Ujungjaya

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,280,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Ujungjaya	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,580,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Ujungjaya	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Ujungjaya	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,490,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Ujungjaya	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	35,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Ujungjaya	8 Laporan	70,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	2,535,317,776						3 Laporan	3,345,000,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	2,473,157,776	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Ujungjaya	14 Orang/Bulan	3,250,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12,160,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Ujungjaya	12 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Ujungjaya	12 Laporan	45,000,000	Kecamatan Ujungjaya

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	81,000,000						4 Laporan	80,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	75,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Ujungjaya	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	3,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Ujungjaya	4 Dokumen	24,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				2 Orang	3,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Kecamatan Ujungjaya	2 Orang	6,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	7 Laporan	177,640,000						7 Laporan	433,000,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	90,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Kantor Kecamatan Ujungjaya	11 Paket	84,860,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Kantor Kecamatan Ujungjaya	12 Paket	57,500,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	24,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Kantor Kecamatan Ujungjaya	12 Paket	54,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				3 Dokumen	8,640,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Kantor Kecamatan Ujungjaya	3 Dokumen	8,640,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Kantor Kecamatan Ujungjaya	1 Dokumen	175,000,000	Kecamatan Ujungjaya

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	420,000,000						4 Laporan	501,445,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan"				10 Unit	250,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Sarana Prasarana Kecamatan Ujungjaya	10 Unit	40,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	150,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Sarana Prasarana Kecamatan Ujungjaya	3 Unit	90,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur dan Sarana Prasarana Kecamatan Ujungjaya	2 Unit	20,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	664,697,400						3 Laporan	502,600,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Disiplin Aparatur Kecamatan Ujungjaya	12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12,757,400	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Disiplin Aparatur Kecamatan Ujungjaya	1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	611,940,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Disiplin Aparatur Kecamatan Ujungjaya	12 Laporan	442,600,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	150,000,000						4 Laporan	494,900,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	100,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan Ujungjaya	9 Unit	100,000,000	Kecamatan Ujungjaya

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	50,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan Ujungjaya	6 Unit	7,900,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Ujungjaya	Persen		Persen	100 Persen	249,000,000						100 Persen	284,675,347	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	112,000,000						2 Laporan	141,675,347	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	50,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	1 Laporan	71,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	62,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	1 Dokumen	70,675,347	Kecamatan Ujungjaya
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	65,000,000						1 Laporan	71,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	65,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	1 Laporan	71,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan		Laporan	1 Laporan	72,000,000						1 Laporan	72,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	72,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	12 Dokumen	36,000,000	Kecamatan Ujungjaya

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Ujungjaya	Persen		Persen	100 Persen	830,500,000						100 Persen	726,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	65,000,000						1 Laporan	65,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga	65,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	9 Lembaga	65,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	3 Laporan	765,500,000						3 Laporan	661,000,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				9 Lembaga	480,500,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	9 Lembaga	367,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Lembaga	195,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	9 Lembaga	194,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	90,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	2 Laporan	100,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Ujungjaya	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000						100 Persen	123,500,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	100,000,000						1 Laporan	90,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	100,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	6 Laporan	90,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Ujungjaya	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000						100 Persen	130,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	100,000,000						1 Laporan	130,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	100,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	6 Dokumen	130,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Ujungjaya	Persen		Persen	100 Persen	290,000,000						100 Persen	210,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	4 Laporan	290,000,000						4 Laporan	210,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	95,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	1 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	90,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi berbasis Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	2 Dokumen	100,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Ujungjaya

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	65,000,000	Kab. Sumedang, Ujungjaya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Masyarakat Kecamatan Ujungjaya	1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Ujungjaya
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	3,985,349,362						100 Persen	3,718,500,000	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	132,400,000						6 Laporan	139,000,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah				0 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	70,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	0 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,300,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,600,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,500,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Jatigede

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	40,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	12 Laporan	40,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	2,237,307,602						2 Laporan	2,285,000,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang	2,212,307,602	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	17 Orang	2,250,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan 12 Laporan	25,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	0 Laporan 12 Laporan	35,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	7,500,000						1 Laporan	8,500,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7,500,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	12 Laporan	8,500,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	179,500,000						5 Laporan	191,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 paket	85,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	1 paket	26,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	12,500,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	3 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Jatigede

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				1 Orang	10,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	1 Orang	15,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	60,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	4 Orang	125,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	12,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	35 Orang	15,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	7 Laporan	324,541,760						7 Laporan	206,500,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31,541,760	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	1 Paket	27,500,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	45,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	1 Paket	15,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,500,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	1 Paket	6,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	3,500,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	4 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	15,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	12 Laporan	8,500,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	125,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	1 Dokumen	125,000,000	Kecamatan Jatigede

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	503,600,000						3 Laporan	445,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				14 Unit	380,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	14 Unit	380,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	50,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	2 Paket	15,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit	73,600,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	2 unit	50,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	325,000,000						3 Laporan	305,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	12 Laporan	35,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	2 Laporan	20,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	275,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	12 Laporan	250,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	275,500,000						3 Laporan	138,500,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	65,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	10 Unit	56,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit 0 Unit	10,500,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	5 Unit 0 Unit	7,500,000	Kecamatan Jatigede

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	1 Unit	75,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jatigede	persen		persen	100 persen	394,000,000						100 persen	454,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	92,000,000						2 Laporan	195,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	2 Laporan	75,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	62,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	2 Dokumen	120,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	185,000,000						1 Laporan	139,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	185,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	2 Laporan	139,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan		Laporan	1 Laporan	117,000,000						1 Laporan	120,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen 0 Dokumen	57,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	3 Dokumen 0 Dokumen	120,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	1 Laporan	0	Kecamatan Jatigede

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	30,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	0	Kecamatan Jatigede
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Jatigede	persen		persen	100 persen	976,500,000						100 persen	1,235,000,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	61,500,000						1 Laporan	75,000,000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	61,500,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	4 Laporan	75,000,000	Kecamatan Jatigede
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	4 Laporan	915,000,000						4 Laporan	1,160,000,000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lmbaga kmsyrktn	616,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	6 Lmbaga kmsyrktn	660,000,000	Kecamatan Jatigede
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lmbaga kmsyrktn	107,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	4 Lmbaga kmsyrktn	165,000,000	Kecamatan Jatigede
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	152,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	3 Laporan	165,000,000	Kecamatan Jatigede
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	40,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	1 Laporan	40,000,000	Kecamatan Jatigede
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Keterlibatan Umum yang Ditangani di Kecamatan Jatigede	persen		persen	100 persen	140,000,000						100 persen	95,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	1 Laporan	140,000,000						1 Laporan	95,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	140,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	3 Laporan	95,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani di Kecamatan Jatigede	persen		persen	100 persen	60,000,000						100 persen	70,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	60,000,000						1 Laporan	70,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	60,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	6 Dokumen	70,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Jatigede	persen		persen	100 persen	327,000,000						100 persen	309,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		Laporan	4 Laporan	327,000,000						4 Laporan	309,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	187,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	2 Dokumen	144,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	60,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	11 Dokumen	70,000,000	Kecamatan Jatigede

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				11 Dokumen 0 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	11 Dokumen 0 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Jatigede
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Sumedang, Jatigede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Perangkat Daerah Kec. Jatigede	1 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Jatigede
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					28,645,667,902							30,442,686,752	
8 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen		Persen	100 Persen	8,727,843,552						100 Persen	9,138,393,552	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peyusunan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan		laporan	6 laporan	113,830,000						6 laporan	159,000,000	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 dokumen	40,150,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	5 dokumen	65,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 dokumen	10,190,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	2 dokumen	11,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 dokumen	6,590,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	2 dokumen	11,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 dokumen	4,700,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	2 dokumen	11,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 dokumen	5,900,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	2 dokumen	11,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	46,300,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	6 Laporan	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan		laporan	4 laporan	3,337,393,552						4 laporan	3,339,393,552	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang	3,313,843,552	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	30 Orang	3,313,843,552	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	8,200,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	9,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 laporan	15,350,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	12 laporan	16,350,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	laporan		laporan	2 laporan	110,000,000						2 laporan	115,000,000	
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				35 stel	100,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	35 stel	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan		laporan	8 laporan	760,620,000						8 laporan	815,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	60,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 paket	65,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 paket	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	150,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 paket	160,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	60,620,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 paket	70,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	20 dokumen	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	250,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 laporan	260,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 dokumen	50,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 dokumen	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 dokumen	150,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 dokumen	160,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan		laporan	2 laporan	2,856,000,000						2 laporan	3,000,000,000	
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 unit	1,856,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	15 unit	1,900,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 unit	1,000,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	30 unit	1,100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		laporan	3 laporan	780,000,000						3 laporan	810,000,000	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	60,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 laporan	70,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	70,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 laporan	80,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	650,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 laporan	660,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		laporan	4 laporan	770,000,000						4 laporan	900,000,000	
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	300,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	10 Unit	310,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	70,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	20 Unit	80,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	250,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 unit	310,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	150,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan Kolaborasi	Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang	1 unit	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	persen		persen	100 persen	1,590,000,000						100 persen	1,600,000,000	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	laporan		laporan	2 laporan	1,590,000,000						2 laporan	1,600,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				150 Orang	1,590,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Masyarakat Kabupaten Sumedang	150 Orang	1,600,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	persen		persen	100 persen	5,248,012,350						100 persen	5,360,000,000	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	laporan		laporan	2 laporan	5,248,012,350						2 laporan	5,360,000,000	
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	4,401,007,350	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Masyarakat Kabupaten Sumedang	50 Orang	4,500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150 Orang	847,005,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Masyarakat Kabupaten Sumedang	150 Orang	860,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	persen		persen	100 persen	850,000,000						100 persen	900,000,000	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	laporan		laporan	1 laporan	850,000,000						1 laporan	900,000,000	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				523 Orang	850,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Ormas di Kabupaten Sumedang	523 Orang	900,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, Ekonomi dan Budaya	persen		persen	100 persen	935,000,000						100 persen	1,010,000,000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	laporan		laporan	3 laporan	935,000,000						3 laporan	1,010,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	125,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Masyarakat Kabupaten Sumedang	1 Dokumen	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				55 Orang	810,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Masyarakat Kabupaten Sumedang	55 Orang	860,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	persen		persen	100 persen	11,294,812,000						100 persen	12,434,293,200	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	laporan		laporan	2 laporan	11,294,812,000						2 laporan	12,434,293,200	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				15 Orang	100,000,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Masyarakat di kabupaten Sumedang	15 Orang	120,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				500 Orang	11,194,812,000	Kab. Sumedang, Sumedang Selatan, Kotakulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh	Masyarakat di kabupaten Sumedang	500 Orang	12,314,293,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL							6,104,210,687,432						5,706,559,640,579		

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja penyelenggaraan pada pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Makro Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,80	71.93-72.48	72.40-73.37	73.37
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,71	10.41-9.54	9,70-7,56	7,56
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,18	8.78-7.99	8.18-6.95	6.95
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,17	4.70-5.70	5.20-6.20	6.20
5	Gini Ratio	Poin	0,36	0.38-0.35	0,37-0,34	0,34
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	2,47	32.09-33.84	33.85-34.70	34.70

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumedang
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Sumber Data/ Tahun	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1	Angka harapan hidup	Tahun	Badan Pusat Statistik, 2022	72,62	72,70-73,20	73,20
2	Rata-Rata lama Sekolah (RLS)	Tahun	Badan Pusat Statistik, 2022	8,52	8,81-9,00	9,00
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Badan Pusat Statistik, 2022	12,98	13,05-13,12	13,12
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	Badan Pusat Statistik, 2022	10,71	9,70-7,56	7,56
5	Indeks Pembangunan Gender	Poin	Badan Pusat Statistik, 2022	95,18	96,75	96,75
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	Badan Pusat Statistik, 2022	70,13	71,37	71,37
7	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	Bagian Kesra	n/a	74,5	74,5
8	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	Badan Pusat Statistik, 2022	2,26	4,15 - 6,40	6,40
9	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	Badan Pusat Statistik, 2022	- 0,27	3,76-5,59	5,59
10	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	Badan Pusat Statistik, 2022	1,59	8,77-10,27	10,27
11	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	n/a	77,65	77,65
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022	62,26	64,67	64,67
13	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	Laporan Kegiatan Penanaman Modal, 2022	260	30	30
14	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022	0,47	0,52	0,52
15	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	89,6	90,2	90,2

No	Indikator	Satuan	Sumber Data/ Tahun	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
16	Opini BPK	Opini	Badan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP	WTP
17	Nilai Sakip Kabupaten	Kategori	Bagian Organisasi, 2022	BB	A	A
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022	85,60	92	92
19	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik, 2022	3,6	4,2	4,2
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Badan Pusat Statistik, 2022	9,18	8,18-6,95	6,95

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact
Kabupaten Sumedang Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1.1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,40-73,37	73,37
1.2	Rata-Rata lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,81-9,00	9,00
1.3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,05-13,12	13,12
1.4	Angka harapan hidup	Tahun	72,70-73,20	73,20
1.5	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	33,85-34,70	34,70
1.6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,70-7,56	7,56
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,18-6,95	6,95
1.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,20-6,20	6,20
1.9	Gini Ratio	Poin	0,37-0,34	0,34
1.10	Indeks Pembangunan Gender	Poin	96,75	96,75
1.11	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	71,37	71,37
2	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	URUSAN WAJIB			
1.1	URUSAN WAJIN PELAYANAN DASAR			
1.1.1	PENDIDIKAN			
1.1.1.1	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	53,53	53,53
1.1.1.2	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	30,11	30,11

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.1.2	KESEHATAN			
		kelahiran Hidup	95/100.000 KH	95/100.000 KH
1.1.2.1	Ratio kematian ibu	kelahiran Hidup	3/1.000 KH	3/1.000 KH
1.1.2.2	Ratio kematian bayi	Persen	9	9
1.1.2.3	Prevalensi stunting	Persen	92	92
1.1.2.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang kesehatan	Persen	< 1	< 1
1.1.2.5	Angka Kematian Karena Penyakit DBD (CFR DBD)	Persen	65	65
1.1.2.6	PHBS Tatanan Rumah Tangga	poin	95	95
1.1.2.7	IKM Rumah Sakit	Nilai	85	85
1.1.2.8	Akreditasi Rumah Sakit sesuai Standar Nasional	kelahiran Hidup	95/100.000 KH	95/100.000 KH
1.1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.1.3.1	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	85,30	85,3
1.1.3.2	Cakupan pelayanan daerah irigasi	ha	21.054,30	21.054,30
1.1.3.3	Ketaatan Terhadap RTR	Persen	70	70
1.1.3.4	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Persen	100	100
1.1.3.5	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air minum Layak	Persen	76,9	76,86
1.1.3.6	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Layak	Persen	2,31	2,31
1.1.3.7	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata	Persen	75	75
1.1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.1.4.1	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	83,33	83,33
1.1.4.2	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Persen	40,9	40,9

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.1.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.1.5.1	Cakupan penanganan pelanggaran K3 (Keamanan, Ketentraman dan ketertiban)	Persen	100	100
1.1.5.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	90	90
1.1.5.3	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,52	0,52
1.1.6	SOSIAL			
1.1.6.1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	75	75
1.2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
1.2.1	TENAGA KERJA			
1.2.2.1	Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Persen	20	20
1.2.2.2	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persen	100	100
1.2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1.2.2.1	Persentase Perempuan yang Mampu memenuhi kehidupan Keluarga	Persen	25,15	25,15
1.2.2.2	Persentase Perempuan Korban tindak Kekerasan	Persen	0,003	0,003
1.2.2.3	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persen	0,005	0,005
1.2.2.4	Kabupaten Layak Anak	Skor	801	801

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.2.3	PANGAN			
1.2.3.1	Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok	kg/kapita/tahun	231	231
1.2.3.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	90,2	90,2
1.2.4	PERTANAHAN			
1.2.4.1	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	Persen	100	100
1.2.4.2	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	Persen	100	100
1.2.5	LINGKUNGAN HIDUP			
1.2.5.1	Persentase penanganan sampah	persen	72	72
1.2.5.2	Persentase pengurangan sampah	persen	27	27
1.2.5.3	Persentase RTH Terkelola	Persen	11,17	11,17
1.2.5.4	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	48,89	48,89
1.2.5.5	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	81,29	81,29
1.2.5.6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	61,04	61,04
1.2.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
1.2.6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	93	93
1.2.6.2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	98	98
1.2.6.3	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	93	93
1.2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1.2.7.1	Persentase Status Desa Mandiri	persen	40,37	40,37
1.2.7.2	Persentase Status Desa Maju	Persen	59,63	59,63
1.2.7.3	Prosentase Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan	Persen	20	20

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1.2.8.1	TFR	Kelahiran	2,04	2,04
1.2.8.2	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	3,76	3,76
1.2.8.3	Persentase Keluarga Sejahtera 1	Persen	16,76	16,76
1.2.9	PERHUBUNGAN			
1.2.9.1	Cakupan Kelancaran, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	77,98	77,98
1.2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
1.2.10.1	Persentase Masyarakat dalam Memahami Program-Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang	Persen	60	60
1.2.10.2	Nilai SPBE	Poin	4,2	4,2
1.2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
1.2.11.1	Jumlah Koperasi Yang Modern	Koperasi	3	5
1.2.11.2	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omset	UMKM	1.000	2.000
1.2.12	PENANAMAN MODAL			
1.2.12.1	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp.	2.505.607.790.400	2.505.607.790.400
1.2.12.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Poin	90	90
1.2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1.2.13.1	Persentase organisasi Kepemudaan yang aktif	Persen	100	100
1.2.13.2	Jumlah Atlet berprestasi	Medali / Penghargaan	20	20

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
1.2.14	STATISTIK			
1.2.14.1	Persentase Ketersediaan Data Sesuai dengan Standar	Persen	100	100
1.2.15	PERSANDIAN			
1.2.15.1	Score Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	400	400
1.2.16	KEBUDAYAAN			
1.2.16.1	Cakupan perlindungan/ pengembangan/ pemanfaatan/ pembinaan kebudayaan	Persen	100	100
1.2.17	PERPUSTAKAAN			
1.2.17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	11,62	11,62
1.2.17.2	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Poin	50,508	50,508
1.2.18	KEARSIPAN			
1.2.18.1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal	Kategori	A	A
2	URUSAN PILIHAN			
2.1	KELAUTAAN DAN PERIKANAN			
2.1.1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.519,58	1.519,58
2.1.2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	8.405,99	8.405,99

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
2.2	PARIWISATA			
2.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	875.000	2.946.822
2.2.2	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Persen	100	100
2.3	PERTANIAN			
2.3.1	Jumlah produksi komoditas pertanian :		965.324	965.324
	A. Tanaman Pangan :	Ton	965.324	965.324
	- Padi	Ton	691.957	691.957
	- Jagung	Ton	443.406	443.406
	- Tanaman Pangan Lainnya	Ton	126.063	126.063
	B. Holtikultura	Ton	122.488	122.488
	C. Perkebunan	Ton	265.292	265.292
2.3.2	Persentase peningkatan produktivitas peternakan		5,18	5,18
2.3.3	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		80,8	80,8
2.4	KEHUTANAN			
2.4.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	61,04	61,04
2.5	PERDAGANGAN			
2.5.1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	2.77 - 4.33	4.33
2.6	PERINDUSTRIAN			
2.6.1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	4.15 - 6.40	6.40

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
2.7	TRANMIGRASI			
2.7.1	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	5	25
3	URUSAN PENUNJANG DAN PENDUKUNG			
3.1	INSPEKTORAT			
3.1.1	Persentase tindaklanjut pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	Persen	95	95
3.1.2	Maturitas SPIP	Persen	Level 4	Level 4
3.1.3	Persentase penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD	Persen	4	4
3.1.4	Persentase pemenuhan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP	Persen	71,25	71,25
3.1.5	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Level	100	100
3.2	PERENCANAAN			
3.2.1	Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100
3.2.2	Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"	Persen	100	100
3.3.	KEUANGAN			
3.3.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP
3.3.2	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.3.3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	18,99	18,99
3.4	KEPEGAWAIAN. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
3.4.1	Indeks Sistem Merit	Poin	340	340
3.4.2	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	79	79

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
3.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
3.5.1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan	Persen	100	100
3.6	SEKRETARIAT DAERAH			
3.6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang	Poin	74,5	74,5
3.6.2	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100
3.6.3	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi	Persen	100	100
3.6.4	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang administrasi umum	Persen	100	100
3.6.5	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	Poin	30,86	30,86
3.6.6	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori	A	A
3.7	SEKRETARIAT DPRD			
3.7.1	Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	100
3.7.2	Tingkat Kepuasan DPRD atas dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	80	80

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
4	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
4.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
4.1.1	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	100	100
4.1.2	Tingkat Bina Demokratisasi	Persen	100	100
3	ASPEK DAYA SAING			
3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,67	64,67
3.2	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	92	92
3.3	Pertumbuhan PDRB ADHK	persen		
3.4	Pertumbuhan PDRB ADHB	persen		
3.5	PDRB per Kapita	Juta rupiah	33.85-34.70	34.70
3.6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen		

Tabel 6.4
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan
 Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome
 Kabupaten Sumedang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
ASPEK PELAYANAN UMUM			
01	PENUNJANG URUSAN		
01.1.1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100
01.1.2	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100
01.1.3	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100
01.1.4	Persentase Ketersediaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100
01.1.5	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Persen	100
01.1.6	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Persen	100
01.1.7	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Persen	100
01.1.8	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Persen	100
01.1.9	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Persen	100
01.1.10	Persentase Layanan BLUD yang memadai	Persen	100
01.1.11	Persentase Layanan Keuangan dan Administrasi kepada DPRD yang memadai	Persen	100
01.1.12	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memadai	Persen	100
01.1.13	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang memadai	Persen	100
01.1.14	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	85,00
01.1.15	Cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan yang memadai	Persen	90
1	URUSAN WAJIB		
1.1.1	PENDIDIKAN		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
1.1.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	Persen	100
1.1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP	Persen	100
1.1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	Persen	100
1.1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	100
1.1.2	KESEHATAN		
1.1.2.1	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Persen	100
1.1.2.2	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar	Persen	100
1.1.2.3	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	Persen	90
1.1.2.4	Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Persen	100
1.1.2.5	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri	Persen	25
1.1.2.6	Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga	Persen	65
1.1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.1.3.1	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	47,50
1.1.3.2	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Layak	Persen	76,9
1.1.3.3	Jumlah Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik diperkotaan	Persen	
1.1.3.4	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	Persen	2,31
1.1.3.5	Persentase Cakupan Drainase Lingkungan yang ditangani	Persen	9,52
1.1.3.6	Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/ Permukiman	Persen	24,57
1.1.3.7	Persentase bangunan yang tersertifikasi laik fungsi	Persen	9
1.1.3.8	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	Persen	75
1.1.3.9	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang	Persen	85,30
1.1.3.10	Jumlah usaha jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang	Penyedia Jasa	250
1.1.3.11	Persentase ketersediaan RTR	Persen	70,00
1.1.3.12	Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	Persen	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
1.1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.1.4.1	Persentase Penanganan Hunian Rumah Pasca Bencana	Persen	100
1.1.4.2	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	83,33
1.1.4.3	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	0
1.1.4.4	Persentase Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum yang dibangun dan dikembangkan	Persen	100
1.1.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.1.5.1	Rasio petugas Perlindungan masyarakat (1 orang setiap RT)	Persen	90
1.1.5.2	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman)	Persen	100
1.1.5.3	Cakupan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tertangani	Persen	100
1.1.5.4	Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen	100
1.1.5.5	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100
1.1.5.6	Persentase Penanganan Bencana	Persen	100
1.1.5.7	Tingkat waktu tanggap (Response Timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	90
1.1.6	SOSIAL		
1.1.6.1	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	Persen	16,2
1.1.6.2	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	58,33
1.1.6.3	Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar	Persen	44,25
1.1.6.4	Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar	Persen	98

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
1.1.6.5	Persentase Penanganan Bencana	Persen	100
1.1.6.6	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Persen	100
1.2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
1.2.1	TENAGA KERJA		
1.2.1.1	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat	Persen	100
1.2.1.2	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	Persen	100
1.2.1.3	Persentase Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Persen	100
1.2.1.4	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	Persen	100
1.2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1.2.2.1	Persentase OPD Responsip Gender	Persen	61,29
1.2.2.2	Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	Persen	100
1.2.2.3	Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan	Persen	100
1.2.2.4	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	Persen	100
1.2.2.5	Persentase Kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persen	65,38
1.2.2.6	Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan	Persen	100
1.2.3	PANGAN		
1.2.3.1	Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola	Persen	100
1.2.3.2	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	Persen	95
1.2.3.3	Persentase penanganan penduduk rawan pangan	Persen	100
1.2.3.4	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
1.2.4	PERTANAHAN		
1.2.4.1	Persentase Sengketa Pertanahan yang difasiltasi	Persen	100
1.2.4.2	Persentase (Jumlah Bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasiltasi	Persen	3
1.2.5	LINGKUNGAN HIDUP		
1.2.5.1	Jumlah Instrumen dan/atau rujukan Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	2
1.2.5.2	Persentase tindakan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen	100
1.2.5.3	Indeks Tutupan vegetasi (ITV)	Poin	0,42
1.2.5.4	Jumlah usulan TPS B3 yang mendapat rekomendasi	Usaha/ Kegiatan	7
1.2.5.5	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen	36
1.2.5.6	Jumlah komunitas kearifan lokal yang diakui keberadaannya dalam PPLH	Komunitas	2
1.2.5.7	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkat aktivitasnya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lembaga	42
1.2.5.8	Jumlah Desa/Kelurahan berbudaya lingkungan	Desa/ Kelurahan	16
1.2.5.9	Persentase penyelesain sengketa PPLH	Persen	100
1.2.5.10	Persentase pengelolaan sampah	Persen	99,00
1.2.7	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
1.2.7.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	97
1.2.7.2	Persentase Kepemilikan Pencatatan Sipil	Persen	93
1.2.7.3	Persentase Instansi yang menggunakan Data Base Kependudukan	Persen	100
1.2.8	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1.2.8.1	Persentase Fasilitasi Program Penataan Desa Kategori Optimal	Persen	100
1.2.8.2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persen	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
1.2.8.3	Cakupan desa tertib administrasi	Persen	90
1.2.8.4	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Persen	100
1.2.9	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1.2.9.1	Persentase sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan kependudukan	Persen	5
1.2.9.2	Cakupan ketersediaan data pengendalian penduduk	Persen	100
1.2.9.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	75,67
1.2.9.4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	Persen	9,04
1.2.9.5	Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok ketahanan (BKB, BKR dan BKL)	Persen	20,87
1.2.9.6	Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS	Persen	4,33
1.2.10	PERHUBUNGAN		
1.2.10.1	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	Persen	77,27
1.2.10.2	Persentase Pelayanan Bidang Perhubungan	Persen	90
1.2.10.3	Persentase dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	66,67
1.2.11	KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
1.2.11.1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Persen	60
1.2.11.2	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persen	100
1.2.11.3	Persentase Desa Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persen	100
1.2.12	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
1.2.12.1	Persentase rekomendasi pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persen	100
1.2.12.2	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	100
1.2.12.3	Persentase KSP/USP Yang Sehat	persen	70,51
1.2.12.4	Persentase koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian	persen	22,08
1.2.12.5	Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan	persen	7,15
1.2.12.6	Persentase UMKM yang diberdayakan	persen	0,5
1.2.12.7	persentase UMKM yang di kembangkan	persen	0,4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
1.2.13	PENANAMAN MODAL		
1.2.13.1	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Persen	90
1.2.13.2	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	Persen	4
1.2.13.3	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	Persen	87
1.2.13.4	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	Persen	85
1.2.13.5	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	Persen	100
1.2.14	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1.2.14.1	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	Organisasi	97
1.2.14.2	Jumlah Pemuda yang dibina	Orang	700
1.2.14.3	Jumlah Atlet yang berprestasi	Orang	20
1.2.14.4	Jumlah Penyelenggaraan Keolahragaan	Event	10
1.2.14.5	Jumlah Anggota dan Organisasi Pramuka yang Dibina	Organisasi	26
1.2.15	STATISTIK		
1.2.15.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik	Persen	100
1.2.16	PERSANDIAN		
1.2.16.1	Tingkat Keamanan Informasi	Persen	62,01
1.2.17	KEBUDAYAAN		
1.2.17.1	Persentase OPK yang dikembangkan	Persen	100
1.2.17.2	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	persen	100
1.2.17.3	Persentase Sejarah Lokal yang dibina	persen	100
1.2.17.4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	20,62
1.2.17.5	Jumlah Kunjungan wisatawan musieum	orang	4.000

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
1.2.18	PERPUSTAKAAN		
1.2.18.1	Persentase Pamanfaatan Bahan Pustaka	Persen	4,42
1.2.18.2	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan	Persen	90
1.2.18.3	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Persen	100
1.2.19	KEARSIPAN		
1.2.19.1	Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar	Persen	67
1.2.19.2	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Arsip yang memadai	Persen	100
1.2.19.3	Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan	Persen	100
1.2.19.4	Persentase izin penggunaan arsip	Persen	8
2	URUSAN PILIHAN		
2.2	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
2.2.1	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap	persen	100
2.2.2	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya	persen	100
2.2.3	Cakupan Kelestarian Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum	persen	100
2.2.4	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	persen	100
2.3	PARIWISATA		
2.3.1	Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan	ODTW	7
2.3.2	Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	Event	14
2.3.3	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	16
2.3.4	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitas dan kompetensi sumber dayanya	Orang	140
2.4	PERTANIAN		
2.4.1	Cakupan ketersediaan sarana pertanian	persen	70
2.4.2	Cakupan pengembangan sarana pertanian	persen	30

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
2.4.3	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	hektar	100
2.4.4	Luas tambahan lahan pertanian yang terairi	persen	2088
2.4.5	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persen	100
2.4.6	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persen	100
2.4.7	Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian	persen	95,00
2.4.8	Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian	persen	10,00
2.4.9	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persen	100
2.4.10	Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan	Persen	100
2.4.11	Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian		
2.6	URUSAN KEHUTANAN		
2.6.1	Persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi	Persen	70,79
2.7	URUSAN PERDAGANGAN		
2.7.1	Persentase perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persen	100
2.7.2	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	Persen	52
2.7.3	Jumlah Laporan Upaya stabilitasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Laporan	12
2.7.4	Cakupan pengembangan ekspor	kali	10
2.7.5	Persentase Metrologi Legal yang Sesuai Standar	Persen	100
2.7.6	Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	kali	5
2.8	URUSAN PERINDUSTRIAN		
2.8.1	Persentase pembangunan industri sesuai perencanaan	Persen	45
2.8.2	Jumlah pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Laporan	14
2.8.3	Jumlah pengelolaan sistem informasi industri nasional	Laporan	12
2.9	TRANMIGRASI		
2.9.1	Jumlah lokasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi	Lokasi	1
2.9.2	Jumlah transmigran yang dilatih	KK	5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
3	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
3.1	SEKRETARIAT DAERAH		
3.1.1	Presentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewilayahan	Persen	100
3.1.2	Presentase Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB; Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang capaian kinerja tahunannya berkategori "baik" serta Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan	Persen	100
3.1.3	Persentase Pelayanan Bagian Hukum	Persen	100
3.1.4	Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama serta rencana aksi yang jelas dan terukur	Persen	100
3.1.5	Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	100
3.1.6	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan Triwulanannya berkategori "baik"	Persen	100
3.1.7	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	Level 5
3.1.8	Persentase Perangkat Daerah bidang SDA, pertanian, sarana ekonomi, perdagangan dan UMKM yang target capaian kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	100
3.2	SEKRETARIAT DPRD		
3.2.1	Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Fasilitasi, Penganggaran, Kerja Sama dan Pengawasan	Persen	100
3.2.2	Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	Persen	100
3.2.3	Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Program dan Keuangan	Persen	100
3.2.4	Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Umum	Persen	100
4	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.1	PERENCANAAN		
3.3.1	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Persen	100
3.3.2	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Berkategori Baik	Persen	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
3.3.3	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik	Persen	100
3.3.4	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA berkategori Baik	Persen	100
3.3.5	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkategori Baik	Persen	100
4.2	KEUANGAN		
3.4.1	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Persen	97
3.4.2	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen	100
3.4.3	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Persen	97
3.4.4	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Persen	97
3.4.5	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Persen	91
3.4.6	Persentase Potensi Pajak Daerah	Persen	90
4.3	KEPEGAWAIAN		
3.5.1	Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan	Persen	100
3.5.2	Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan	Persen	100
3.5.3	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen	100
3.5.4	Persentase ASN yang berkinerja baik	Persen	100
4.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
4.4.1	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan	Persen	100
4.4.2	Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi	Persen	100
5	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
5.1	INSPEKTORAT DAERAH		
5.1.1	Persentase pemenuhan unsur SPIP	Persen	100
5.1.2	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	Persen	100
5.1.3	Presentase pemenuhan elemen IACM	Persen	100
5.1.4	Cakupan Zona Integritas	Persen	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
6	UNSUR KEWILAYAHAN		
6.1	KECAMATAN		
6.1.1	Persentase Layanan kepada Masyarakat	Persen	100
6.1.2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100
6.1.3	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Persen	100
6.1.4	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani	Persen	100
6.1.5	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa	Persen	100
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
7.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
7.1.1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persen	100
7.1.2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	100
7.1.3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100
7.1.4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persen	100
7.1.5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	100

BAB VII PENUTUP

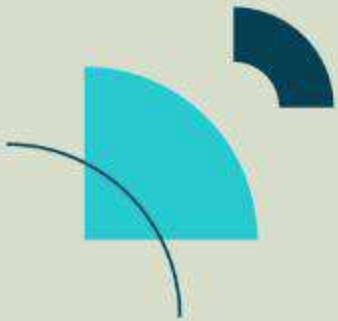
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kelima dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk keselarasan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi dan nasional.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkualitas melalui perencanaan yang implementatif, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dirumuskan melalui pendekatan perencanaan holistik-tematik; terintegrasi dan spasial; sehingga RKPD dapat dijadikan sebagai pedoman:

- a. Penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023;
- b. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
- c. Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sumedang;
- d. Penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Pembangunan Desa;
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan RKPD dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), serta perlu dukungan partisipasi dari segenap pemangku kepentingan (sektor swasta, perguruan tinggi, bisnis, media dan masyarakat) dengan semangat "*Sareundeuk Saigel Sabobot Sapihanean*".

Demikian RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 telah disusun sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan akan lebih terkordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga visi **“SUMEDANG SIMPATI”** pada **Tahun 2023** bisa terwujud.


BUPATI SUMEDANG,
DONY AHMAD MUNIR



BAPPPEDA SUMEDANG